

FASTER, HIGHER, STRONGER!

2018 ANNUAL REPORT

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)





PELINDO 1
INDONESIA GATEWAY

LAPORAN TAHUNAN 2018

2018 ANNUAL REPORT

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

08	Kesinambungan Tema Continuity of Theme	41	Struktur Organisasi Organizational Structure
LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT		42	Visi dan Misi Vision and Mission
13	Laporan Komisaris Utama Report of The Board Of Commissioners	43	Penerapan Budaya Perusahaan Application of The Company's Culture
17	Laporan Direktur Utama Report of The Board Of Directors	44	Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners
24	Pernyataan Tanggung Jawab Statement of Responsibility	50	Profil Dewan Direksi Profile of Board of Directors
IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE OVERVIEW		57	Daftar Nama Pejabat Senior List of Senior Officers
26	Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	60	Struktur Grup Group Structure
28	Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance Overview	61	Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan Subsidiary Entities/ Association Entities/ Joint Companies
30	Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Overview	61	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Share Ownership of The Board of Commissioners and Directors
32	Ikhtisar Kinerja Lainnya Other Performance Overview	62	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		62	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Stock Listing
34	Identitas Perusahaan Identity of Company	63	Nama Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name of Institutions and/or Supporting Professions
35	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of Company	63	Informasi pada Website Perusahaan Information on Company's Website
37	Jejak Langkah Milestones	64	Peristiwa Penting Tahun 2018 Important Events In 2018
38	Makna Logo Significance of Logo	66	Penghargaan Tahun 2018 Awards In 2018
39	Bidang Usaha Business Field	68	Alamat Kantor Office Adresses
40	Produk & Jasa Products & Services	68	Alamat Kantor Cabang dan Unit Usaha Address of Branch Offices And Business Units
40	Maksud dan Tujuan Perusahaan Purposes and Objectives of The Company	71	Alamat Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi dan Entitas Pengendalian Bersama Address of Subsidiary Entities/ Association Entities/ Joint Controlled Entities

**ANALISIS MANAJEMEN ATAS
KINERJA PERUSAHAAN**
MANAGEMENT ANALYSIS
OVER COMPANY PERFORMANCE

74	Tinjauan Umum General Review	154	Kebijakan Dividen Dan Jumlah Dividen Dividend Policy And Amount
81	Tinjauan Kinerja Operasional Review of Operational Performance	155	Pembayaran Pajak Kepada Negara Tax Payment to the Country
100	Tinjauan Profitabilitas Review of Profitability	155	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan /atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan Share Ownership Program By Employees and/or Management of The Company
102	Tinjauan Kinerja Entitas Anak Review of Subsidiaries Entity performance	156	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Public Offering Funds Usage
110	Tinjauan Kinerja Keuangan Review of Financial Performance	157	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Disvestasi, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/ Modal Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Acquisition And Debt/ Capital Restructuring
131	Tinjauan Kinerja Rasio Keuangan Review of Financial Ratio Performance	157	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Information on Material Transactions Which Containing Conflict Of Interest And/ Or Transactions With Affiliated Parties
144	Kemampuan Membayar Utang & Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Account Payable And Account Receivables Collectibility	165	Perubahan Regulasi Yang Berdampak Signifikan Pada Perusahaan Regulations Changes That Has Significant Impact On The Company
136	Kebijakan Manajemen Dan Struktur Modal Management Policy And Capital Structure	166	Perubahan Kebijakan Akuntansi Change of Accounting Policies
144	Kejadian Luar Biasa Selama Tahun 2018 Extraordinary Event During 2018	168	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information
145	Tinjauan Komponen Pendapatan Dan Beban Usaha Review of Components of Non-Operating Income & Expense	170	Informasi Perkembangan Penyelesaian Aset Bantuan Yang Belum Ditetapkan Statusnya Information on The Settlement Development Of Assistance Asset Which Its Status Has Not Been Determined Yet
147	Informasi Perbandingan Realisasi 2018 & RKAP 2019 Information of Comparison Of 2018 Realization & 2019 RKAP	173	Informasi Program Prioritas Nasional Information of National Priority Program
149	Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan/ Pendapatan Bersih Perusahaan Serta Laba Impact of Price Changes Towards Sales/ Company Net Income And Profit	174	Tinjauan Keberadaan Posisi Perusahaan Review of The Existence of The Company Position
149	Sanksi Administratif Kepada Perseroan, Dewan Komisaris Dan Direksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Otoritas Lainnya Administrative Sanctions For The Company, Board of Commissioners And Board Of Directors By Financial Services Authorities And Other Authorities	177	Pemenuhan Peraturan Dan Ketentuan Terkait Compliance Towards Related Regulations And Provisions
149	Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Laporan Akuntan Information And Facts Material That Occurred After Accountant Reports	178	Pernyataan Atas Pengecualian Pengungkapan Laporan Statement of The Exclusion of Report Disclosure
150	Prospek Usaha Perusahaan Company Business Prospect		
152	Aspek Pemasaran Bisnis Aspects of Business Marketing		

DAFTAR ISI *Table of Contents*

FUNGSI PENUNJANG BISNIS MANAGEMENT ANALYSIS OVER COMPANY PERFORMANCE

- 180 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 189 Survei Kepuasan Pegawai
Employee Satisfaction Survey
- 191 Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey
- 194 Teknologi Informasi
Information Technology
- 196 Manajemen Risiko
Risk Management
- 202 Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System

TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

- 206 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Good Corporate Governance
- 220 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 232 Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi
Work Relationship Pattern of The Board of
Commissioners And Board Of Directors
- 234 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 239 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 240 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of The Board Of Commissioners
- 242 Komite Audit
Audit Committee
- 247 Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee
- 252 Komite Nominasi Dan Remunerasi
Committee of Nomination And Remuneration
- 258 Dewan Direksi
Board of Directors
- 260 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



- 263 Satuan Pengawasan Intern
Internal Monitoring Unit
- 271 Agenda Dan Tingkat Kehadiran Rapat
Meeting Agenda And Attendance Level
- 277 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham
Affiliate Relation of Board of Commissioners, Board of Directors And Shareholders
- 278 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi
Diversity of The Composition of The Board of Commissioners And Board of Directors
- 279 Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi
Assessment of Performance of The Board of Commissioners And Board of Directors
- 288 Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi
Policy of Remuneration For The Board of Commissioners And Board of Directors
- 294 Akuntan Publik
Public Accountant
- 295 Kode Etik
Code of Ethics
- 296 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System
- 300 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrators Assets Report
- 302 Gratifikasi
Gratification
- 304 Penyelesaian Permasalahan Hukum
Settlement of Legal Problems

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

- 308 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup
Environmental Responsibility
- 312 Tanggung Jawab Pengembangan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Responsibility Towards Social Development And Community Empowerment
- 319 Tanggung Jawab Kepada Konsumen
Responsibility For Consumers
- 323 Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Responsibility For Labor, Occupational Health And Safety
- 325 Tanggung Jawab Terhadap Hak Asasi Manusia
Responsibility For Human Rights
- 326 Tanggung Jawab Terhadap Operasi Yang Adil
Responsibility For Fair Operations

LAPORAN KEUANGAN AUDIT INDEPENDEN TAHUN 2018 INDEPENDENT AUDIT FINANCIAL STATEMENTS IN 2018

- 327 Laporan Keuangan Audit Independen Tahun 2018
Independent Audit Financial Statements In 2018



KESINAMBUNGAN TEMA CONTINUITY OF THEME

2018

FASTER, HIGHER, STRONGER!

Sebagai negara maritim, transportasi laut memiliki peran penting dalam mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pariwisata Indonesia.

Sebagai salah satu simpul ekonomi penting di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan pembangunan berbagai pelabuhan dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung berbagai aktivitas pelayaran diantaranya pelayanan jasa kunjungan kapal, pelayanan jasa peti kemas dan barang umum lainnya serta pelayanan jasa penumpang.

Dengan didukung oleh utilisasi dan fasilitas pelabuhan yang lengkap dan modern disertai dengan pelayanan pelabuhan yang baik dan cepat, maka Pelindo 1 memilih dan menetapkan Tema Laporan Tahunan Tahun 2018 adalah "Faster, Higher, Stronger". Dalam tema ini tergambar tahapan jangka panjang perusahaan yang terbagi dan 4 tahapan utama yaitu Masa Pertumbuhan, Masa Pertumbuhan dan Pengembangan, Masa Lepas Landas, dan Masa Kejayaan Regional.

Guna mencapai tahapan diatas, akan diimplementasikan dalam 3 (tiga) tema strategi utama, yaitu Penguatan Bisnis Utama (Core Business Enhancement), Diversifikasi Bisnis Berbasis Hinterland dan Teknologi (Hinterland and Technology-Based Diversification), dan Keunggulan Operasional dan Layanan (Operational and Service Excellence).

Dengan melaksanakan tiga tema strategi ini, perusahaan diharapkan dapat mencapai aspirasinya sebagai perusahaan pelabuhan nomor satu di Indonesia.



As a maritime country, sea transportation plays an important role in developing social, economic, cultural and tourism in Indonesia.

As one of the important economic nodes in Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has built a number of seaports to support various shipping activities including ship visit services, container services and other public goods as well as passenger services.

Supported by complete and modern port utilization and facilities accompanied by good and fast port services, Pelindo 1 chose and determined the theme of the 2018 Annual Report with "Faster, Higher, Stronger". In this theme, it is described that the long-term stages of the company are divided into 4 main stages, namely Period of Growth, Period of Growth and Development, Period of Taking Off, and then Period of Regional Glory.

To achieve the above stages, it will be implemented in 3 (three) main strategy themes, namely Core Business Enhancement, Hinterland and Technology-Based Diversification, and Operational and Service Excellence.

By implementing the three themes of this strategy, the company is expected to achieve its aspirations as the number one port company in Indonesia.

**2014****SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT**

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai perusahaan yang sedang tumbuh, memiliki keyakinan bahwa setiap perubahan akan membuat Perusahaan tumbuh semakin kuat. Pelindo 1 memanfaatkan momentum perubahan ini untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan efisiensi Logistik Nasional.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a growing company, believe that every change will make the company grow stronger. Pelindo 1 utilized the momentum of this change to strengthen its position as one of the State-Owned Enterprises in carrying out the port business in promoting the national economic growth and the efficiency of National Logistics.

**2015****CORPORATE TRANSFORMATION**

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bergerak cepat membenahi diri, menyeimbangkan kompetensi dan kinerja melalui "Corporate Transformation". Perusahaan telah melakukan serangkaian perubahan yang akan menjamin tercapainya pertumbuhan kinerja berkelanjutan (sustainability performance).

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) works swiftly to improve itself, balance its competency and performance through "Corporate Transformation". The company has carried out a series of changes that will ensure the achievement of sustainable performance growth.

**2016****TRANSFORMING BUSINESS CULTURE
ENHANCING VALUE**

Penetapan Budaya Perusahaan melalui berbagai program internalisasi visi misi dan nilai-nilai Perseroan, bertujuan untuk memastikan karyawan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan demi terciptanya SDM yang handal dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk kesinambungan Perusahaan

Establishing the Corporate Culture through various internalization of vision and mission, and values of the Company, aims to ensure employees are able to uphold corporate values in order to create reliable and highly competent human resources for the sustainability of the Company.

**2017****SUSTAINABLE TRANSFORMATION**

Perseroan terus melakukan transformasi dan perbaikan internal secara berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan perusahaan menjadi semakin baik. Inovasi dan transformasi teknologi ditujukan untuk mendukung pengelolaan perusahaan semakin efektif dan efisien. Transformasi SDM agar semakin handal melalui peningkatan pengetahuan dan kompetensi profesi, serta transformasi pada semua aspek manajerial lainnya.

The company continues to carry out internal transformation and improvement continuously to encourage management of the company to be better. Technological innovation and transformation are aimed to support the management of companies to be more effective and efficient. HR transformation to be more reliable through increasing professional knowledge and competencies, as well as transformation in all other managerial aspects.



Belawan International Container Terminal
Medan, North Sumatra



LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT



Refly Harun

Komisaris Utama / *President Commissioner*

Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board of Commissioners

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya, perusahaan berhasil melewati tahun 2018, walaupun kondisi perekonomian Indonesia masih rentan terhadap perubahan ekonomi dunia. Dengan menyadari besarnya tantangan yang dihadapi tahun 2018 ini, Dewan Komisaris sangat bangga memperhatikan semangat dan tekad segenap jajaran perusahaan yang secara bersama-sama bekerja keras memberikan kemampuan terbaiknya, menciptakan berbagai inovasi strategis dan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi perusahaan.

Mekanisme pengawasan dan penasehatan melalui check and balances antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara intensif melalui pembahasan terhadap kinerja dan permasalahan perusahaan, baik secara berkala dengan Pemegang Saham, dan/atau Direksi maupun pembahasan secara khusus atas hal-hal yang dinilai bersifat urgent sesuai kebutuhan. Disamping itu juga dilakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang/Perwakilan dan unit-unit kerja lain apabila diperlukan guna mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Penilaian Kinerja Direksi

Di tahun 2018, Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan, telah melakukan analisis atas capaian kinerja Direksi Pelindo 1 yang tercermin dalam:

1. Pemeriksaan yang dilaksanakan KAP Heliantono dan Rekan menerbitkan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan pernyataan pendapat berikut :
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak Tahun Buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
 - b. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00050/2.0459/AU.2/05/1107-1/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
 - c. Audit Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang diterapkan di PT Pelabuhan

Praise Allah SWT, the Almighty God, because only by His grace, the company successfully passed the year of 2018, despite Indonesia's economy remains vulnerable to changes in the world economy. By realizing the magnitude of the challenges faced in 2018, the Board of Commissioners is very proud to cognize the spirit and willpower of all levels of the company which jointly work hard to give their best performance, create a variety of strategic innovation and overcome various obstacles and challenges faced by the company.

Monitoring and advisory mechanisms through checks and balances between the Board of Commissioners and Directors are implemented intensively through discussion of company performance and problems, both periodically with Shareholders, and/or Directors as well as special discussions on matters deemed urgent as needed. Besides that, work visits are also made to the Branch Offices/ Representatives and other work units if needed to know directly the problems faced by the work unit while providing recommendations for improvements.

Directors Performance Assessments

In 2018, the Board of Commissioners in accordance with the functions, duties and responsibilities as stipulated in the articles of association as well as the laws and regulations, has carried out an analysis of the performance achievements of the Board of Directors of Pelindo 1, namely:

1. Audit performed by KAP Heliantono dan Rekan have issued 4 (four) Reports on Audit Result which the statement of opinion as follows:
 - a. Consilidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and subsidiary Fiscal year 2018 according to Report Number: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 dated February 11, 2019.
 - b. Financial Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) fiscal year 2018 according to Report Number: 00050/2.0459/AU.2/05/1107-1/1/II/2019 dated February 11, 2019.
 - c. Compliance Audit to Legislations and Internal Control which implemented at

- Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
- d. Audit Kinerja di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00021/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
2. Penilaian KPI Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang diukur berdasarkan KPI Corporate Eksisting dan KPI Agen Pembangunan mencapai hasil penilaian sebesar 101,60% dengan predikat "BAIK SEKALI".
 3. Penilaian KPI Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan capaian skor 95,00 atau klasifikasi Sehat AA.
 4. Penilaian KPKU sesuai dengan capaian skor 545
 5. Penilaian Self Assessment GCG yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan mendapatkan skor 94.60 dengan kualifikasi "Sangat Baik"
 6. Penilaian Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai Laporan Nomor: LAP-737/PW02/4/2016 tanggal 7 Desember 2016 dengan nilai 78,92 dengan tingkat efektivitas "Efektif" yaitu "pengendalian intern telah distandarisasi dan secara periodik dievaluasi".
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) fiscal year 2018 according to Report Number: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 dated Februari 11, 2019.
- d. Performance Audit at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) fiscal year 2018 according to Report Number: 00021/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 dated Februari 11, 2019.
2. Assessment of KPI Management Contract which signed by Shareholders, Board of Commissioners and Directors that measures according to KPI Corporate Existing and KPI Development Agent achieve assessment score for 101,60% with the title "VERY GOOD".
 3. KPI Assessment of Company Soundness level score based on Ministry of SOEs Regulations Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 with a score of 95.00 or AA Health.
 4. Assessment of KPKU in accordance with the achievement score 545.
 5. Appraisal of GCG Self-Assessment which carried out by Internal Audit Unit and Company Secretary obtain score 94.60 with "Very Good" qualifications.
 6. Assesment of Internal Control Systems that carried out by BPKP in accordance with Report Number: LAP-737/PW02/4/2016 dated December 7, 2016 with score 78.92 and effectiveness level is "Effective", namely "internal control has been standardized and evaluated periodically".

Pandangan Atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Pelindo 1 semakin memberikan harapan dalam jangka panjang, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia, tersedianya sarana dan prasarana kepelabuhanan yang modern serta posisi strategis Pelindo 1 yang menempati posisi strategis pada jalur pelayaran Internasional selat Malaka.

Dengan adanya penandatanganan kontrak Service Level Agreement (SLA) antara Pelindo 1 dengan Main Line Operator (MLO) yang merupakan perusahaan internasional berkelas dunia untuk memberikan kepastian pelayanan, semakin meyakinkan Dewan Komisaris untuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dalam menjamin pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja.

Peran Dewan Komisaris Dalam WBS

Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo 1 telah menyetujui Kebijakan WBS sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direksi Lampiran V Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 yang menampung laporan pengaduan dari seluruh stakeholders.

Implementasi WBS masih dalam taraf sosialisasi internal kepada Insan Pelindo 1, sedangkan sosialisasi eksternal kepada stakeholders dilakukan dalam bentuk website perusahaan,

Overview of the Business Prospects

The Board of Commissioners views the business prospects of Pelindo 1 are increased and it's giving a long term hope, this is marked by the increase of improving Indonesian economy, the availability of modern port facilities and infrastructure, and the strategic position of Pelindo 1 which occupies a strategic position on the Malacca Strait international shipping lane.

With the signing of the Service Level Agreement (SLA) contract between Pelindo 1 and the Main Line Operator (MLO), which is a world-class international company to provide service certainty, it increasingly convinced the Board of Commissioners to provide an assessment of the performance of the Board of Directors in providing services to partners.

The Role of the Board of Commissioners in the WBS

The Board of Commissioners and Board of Directors of Pelindo 1 have agreed on the WBS Policy as stated in the Directors' Decree Appendix V Decision of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50 / 27/15 / PI15.TU dated November 19, 2015 which accommodates complaints reports from all stakeholders.

WBS implementation is still at the level of internal

namun demikian Dewan Komisaris merekomendasikan untuk dilakukan upaya terobosan dalam rangka meningkatkan efektivitas WBS.

Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Pelindo 1 selama tahun 2018 mengalami beberapa pergantian, sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2018 - 6 September 2018

Komisaris Utama : Sapto Amal Damandari
 Komisaris : Djarot Sri Sulisty
 Komisaris : Djoko Sasono
 Komisaris : Bambang Setyo Wahyudi
 Komisaris : Winata Supriatna

Periode 7 September 2018 - 31 Desember 2018

Komisaris Utama : Refly Harun
 Komisaris : Bambang Setyo Wahyudi
 Komisaris : Winata Supriatna
 Komisaris : Lukita Dinarsyah Tuwo
 Komisaris : Heryadi

Upaya yang telah dilakukan Direksi serta pencapaiannya di tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa perusahaan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), persetujuan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Akhir kata, Dewan Komisaris pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas segala bentuk dukungan dari semua pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajarannya dengan, serta dukungan dari para mitra kerja terkait. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 24 April 2019



Refly Harun
 Komisaris Utama /
 President Commissioner

socialization to Pelindo 1 Personnel, while external socialization to stakeholders is carried out in the form of company websites, however the Board of Commissioners recommends making a breakthrough effort in order to improve the effectiveness of the WBS.

Composition of Members of the Board of Commissioners

The composition of Pelindo 1 Board of Commissioners members during 2018 has several changes, as follows:

Period January 1, 2018 to September 6, 2018

President Commissioner : Sapto Amal Damandari
 Commissioner : Djarot Sri Sulisty
 Commissioner : Djoko Sasono
 Commissioner : Bambang Setyo Wahyudi
 Commissioner : Winata Supriatna

Period September 7, 2018 to December 31, 2018

President Commissioner : Refly Harun
 Commissioner : Lukita Dinarsyah Tuwo
 Commissioner : Heryadi
 Commissioner : Bambang Setyo Wahyudi
 Commissioner : Winata Supriatna

The efforts made by the Board of Directors and their achievements in 2018, the Board of Commissioners considers that the company in principle has been implemented in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Board of Commissioners approval and recommendations.

Finally, the Board of Commissioners on this occasion expressed his gratitude and appreciation for all forms of support from all parties who have helped the successful implementation of the duties of the Board of Commissioners, Board of Directors and all of the staff, as well as support from relevant partners. May Allah SWT, God Almighty always provide guidance, strength, and convenience for all of us.



Bambang Eka Cahyana
Direktur Utama / *President Director*

Laporan Dewan Direksi

Report of The Board of Directors

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pelindo 1 telah diberikan amanah untuk menjalankan usaha di bidang jasa kepelabuhanan dan sejak tahun 2008 dalam rangka optimalisasi sumber daya, Pelindo 1 dapat melakukan kegiatan usaha lain. Beroperasinya Pelindo 1 di Industri jasa pelabuhan dan kegiatan usaha lainnya merupakan komitmen pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Indonesia Bagian Barat khususnya di wilayah Sumatera. Dengan menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Direksi menyampaikan laporan tahunan Perusahaan tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan bukti eksistensi Pelindo 1 sekaligus kebanggaan atas kepercayaan pemerintah kepada kami untuk mengelola jasa kepelabuhanan. Laporan yang kami sampaikan ini merupakan laporan konsolidasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh regulator dan praktik bisnis terbaik serta sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Capaian Penting Perusahaan Tahun 2018

Sebagai perusahaan dengan bisnis inti di bidang jasa kepelabuhanan, maka kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ditinjau dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan konsumsi dan kenaikan nilai kurs dollar terhadap rupiah sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap kunjungan kapal, aktivitas bongkar muat barang, bongkar muat peti kemas serta arus penumpang di pelabuhan.

Kami telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan internal guna mengantisipasi kondisi ekonomi nasional tersebut, sehingga kami dapat menutup tahun buku 2018 dengan peningkatan capaian yang signifikan baik dari sisi operasional, dari sisi keuangan maupun dari sisi layanan yang merupakan pencapaian terbaik yang pernah diraih Pelindo 1. Dengan capaian ini diharapkan ke depan Pelindo 1 menjadi pelabuhan yang unggul dan sebagai pemenang sesuai dengan visi dan misi Pelindo 1 serta menjadi bagian integral dalam mendukung program tol laut sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019.

Setelah fokus pada peningkatan produktivitas dan investasi peralatan, Pelindo 1 terus melakukan pengembangan pelabuhan secara berkelanjutan. Saat ini Pelindo 1 sedang fokus melakukan

According to the Government Regulation No. 56 of 1991 concerning the Transfer of Forms of Public Corporation (Perum) Pelabuhan I become a Company (Persero), Pelindo 1 has been given the mandate to conduct business in port services and since 2008 in order to optimize resources, Pelindo 1 may conduct other business activities. The operation of Pelindo 1 in the port service industry and other business activities is a government commitment together with all stakeholders to encourage the increasing of economic growth and trade in Western Indonesia, especially in the Sumatra region.

By expressing gratitude for the presence of God Almighty, we on behalf of the Board of Directors submitted the Company's annual report in 2018 as a form of accountability for the performance and proof of the existence of Pelindo 1 as well as pride for the government's trust in us to manage port services. This submitted report is a consolidated report based on the standards set by the regulator and best business practices in accordance with the financial statements audited by an independent auditor.

Important Achievements of the Company in 2018

As a company with a core business in port services, due to Indonesia's economic conditions in 2018 in terms of domestic demand, consumption growth and the increase in the value of US dollar against the rupiah have influenced the ship visits, loading and unloading activities, container loading and unloading also the flow of passengers at the port.

We have conducted various internal improvement efforts to anticipate the national economic conditions, so that we can close the 2018 fiscal year with significant achievements both in terms of operations, from the financial side and from the service side which is the best achievement of Pelindo 1 has ever achieved. With this achievement, hopefully Pelindo 1 in the future will become an excellent port and as a winner in accordance with Pelindo 1's vision and mission and become an integral part in supporting the sea toll program as announced by the government in the 2015 - 2019 National Medium-Term Development Plan.

After focusing on increasing productivity and investment in equipment, Pelindo 1 continues to develop ports in a sustainable manner. At present Pelindo 1 is focusing on

pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendorong peningkatan handling peti kemas dan melakukan perbaikan pelayanan operasional guna menekan dwelling time diseluruh pelabuhan yang berada dalam kewenangan Pelindo 1.

Analisis Kebijakan Strategis Perusahaan

Melihat perkembangan dan situasi yang terjadi di sektor industri jasa kepelabuhanan, Pelindo 1 menetapkan kebijakan strategis bisnis ke dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek pengembangan bisnis dan aspek keuangan.

Dari aspek kelembagaan, serangkaian strategi bisnis yang diinisiasi oleh Pelindo 1 dalam tahun 2018 antara lain penerapan organisasi yang dinamis, memiliki alur koordinasi yang baik, berorientasi pada pelayanan dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis IT, melakukan pengembangan fungsi research and development serta peningkatan hubungan kerjasama dengan cabang, pelanggan, mitra, maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar.

Terkait dengan aspek pengembangan bisnis, kebijakan strategis Pelindo 1 lebih difokuskan kepada ekspansi bisnis logistik, pengembangan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan menuju kontainerisasi, pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub-Port, Pengembangan Terminal Curah Cair.

Kebijakan strategis Pelindo 1 lainnya berupa pengembangan kawasan industri, perdagangan dan logistik yang terintegrasi dengan pelabuhan, pengembangan pengelolaan marine, pendirian unit bisnis atau anak Perusahaan yang memiliki hak pengelolaan alur pelayaran, aliansi penyediaan power plan untuk meningkatkan pengelolaan yang ramah lingkungan serta aliansi pemasaran dalam pengelolaan marine. Pelindo 1 berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional untuk menjaga preferensi sebagai BUMN penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik yang unggul di Indonesia.

Dari aspek keuangan, Pelindo 1 terus berupaya untuk membuka peluang penggalangan dana dari penerbitan surat utang (obligasi), sekuritas aset maupun pinjaman dana dari mitra strategis dalam rangka pengembangan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan, peningkatan dan perluasan kapasitas pelabuhan, peremajaan peralatan dan fasilitas pelabuhan serta pemberian layanan jasa yang berkualitas, cepat, efisien berbasis IT untuk mendukung pengelolaan kegiatan usaha pelabuhan yang berstandar internasional.

Capaian Kinerja Operasional

Dalam konteks peningkatan handling peti kemas diantaranya menambah panjang dermaga 700 meter di Belawan International Container Terminal (BICT) untuk dapat mengelola handling peti kemas dari 1,2 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEU,s) menjadi 2 juta TEU,s setiap tahun. Dalam kaitan perbaikan pelayanan dwelling time rata-rata produktivitas 32 B/S/H (Box/Ship/Hour) dan waktu pelayanan kapal (TRT)

developing port capacity to encourage increasing container handling and to improve operational services to reduce dwelling time across ports that are within the authority of Pelindo 1.

Analysis of Company Strategic Policy

By noticing the developments and situations that occur in the port service sector, Pelindo 1 stipulates business strategic policy into 3 (three) aspects, namely the institutional aspects, business development aspects and financial aspects.

From the institutional aspect, a series of business strategy initiated by Pelindo 1 in 2018 including dynamic organization implementation, good coordination flow, service oriented and IT-based business decision making, developing research and development functions and enhancing cooperative relations with branches, customers, partners, and the government in order to increase market share.

Regarding aspects of business development, strategic policy of Pelindo 1 is more focused on expanding the logistics business, developing and modernizing port infrastructure for containers facility, developing the Kuala Tanjung port as a Hub-Port, and developing Liquid Bulk Terminal.

Strategic policy of Pelindo 1 includes the development of industrial, integrated trade and logistics areas with ports, marine management development, establishment of business units or subsidiaries which have the right to manage shipping lines, the alliance of the provision of power plans to improve environmentally friendly management and marketing alliances in marine management. Pelindo 1 is committed to improving service and operational quality to maintain preference as an excellent SOEs provider of port and logistics services in Indonesia.

From the financial aspect, Pelindo 1 continues to strive for opportunities to raise funds from the issuance of bonds (bonds), asset securities and loan funds from strategic partners in the context of development and port infrastructure modernization, upgrading and expanding port capacity, restoration port equipment and facilities and providing qualified, fast, efficient IT-based services to support the management of international standard port business activities.

The Achievement of Operational Performance

In the context of increasing container handling, there are pier expanding length of 700 meters in Belawan International Container Terminal (BICT) to be able to manage container handling from 1.2 million Twenty-foot Equivalent Units (TEU, s) to 2 million TEUs every year. In terms of improving dwelling time service, average productivity of 32 B/S/H (Box/Ship/Hour) and ship service

kurang dari 2 hari, Pelindo 1 telah melakukan Operational and service improvement melalui penambahan fasilitas dan peralatan, Infrastructure Development melalui modernisasi infrastruktur pelabuhan serta Optimize IT Utilization melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Hingga 31 Desember 2018, cakupan bongkar muat barang mencapai 42,777,373 ton atau 80,44% dari target sebanyak 53,174,759 ton dan bila disandingkan dengan capaian bongkar muat barang tahun sebelumnya sebesar 49.890.399 ton menunjukkan penurunan sebesar 14,26%. Aktivitas bongkar muat peti kemas mengalami kenaikan, dimana realisasi selama tahun 2018 mencapai 1,057,610 box atau 0,35% dari target sebanyak 1,053,905 box dan jika disandingkan dengan capaian bongkar muat peti kemas pada tahun sebelumnya sebesar 949.176 box menunjukkan kenaikan sebesar 11,42%.

Sementara pada aspek operasional lainnya hingga 31 Desember 2018, realisasi kunjungan kapal mencapai 69.426 call melebihi realisasi tahun 2017 yaitu 67.989 call atau sebesar 2,11%. Sementara untuk satuan GT (Gross Tonnage), kunjungan kapal mencapai 160.610.816 lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yaitu 147.311.586 atau mengalami kenaikan sebesar 9,03%.

Untuk cakupan arus penumpang yang hingga 31 Desember 2018 mencapai 5.316.860 orang atau hanya mencapai 92,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,755,788 orang. Meskipun demikian capaian arus penumpang ini mengalami kenaikan 5,85% dari capaian arus penumpang tahun 2017 yang mencapai sebesar 5.022.971 orang.

Capaian Kinerja Keuangan

Aset

Hingga 31 Desember 2018, total aset perusahaan tumbuh mencapai Rp. 14.020.853 juta, mengalami kenaikan sebesar 64,81% dari tahun sebelumnya Rp. 8.507.143 juta. Kondisi tersebut disebabkan oleh bertambahnya aset lancar sebesar Rp. 413.402 juta atau 18,71% dan bertambahnya aset tidak lancar sebesar Rp. 5.100.308 juta atau 80,99% dari tahun sebelumnya. Pencapaian aset perusahaan tahun 2018 melampaui 38,05% di atas target yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2018 yang sebesar Rp. 10.156.395 juta.

Beban Usaha

Beban usaha dalam tahun 2018 sebesar Rp. 1.868.587 juta lebih tinggi 9,56% dari beban usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.705.546 juta. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar 20,26% dan meningkatnya beban usaha pelayanan jasa lainnya sebesar 22,28%. Kendati demikian, pertumbuhan beban usaha sebesar 9,56% lebih kecil dari pada pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 13,17%.

Pendapatan Usaha

Selama tahun 2018, Pelindo 1 berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 3.113.533 juta, meningkat Rp. 362.426 juta atau naik 13,17% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 2.751.107 juta. Terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2018, yaitu

time (TRT) of less than 2 days, Pelindo 1 has conducted Operational and service improvement through the addition of facilities and equipment, Infrastructure Development through modernization of port infrastructure and Optimize IT Utilization through optimizing the use of information technology.

By December 31, 2018, the cargo loading and unloading coverage reached 42,777,373 tons or 80.44% of the target of 53,174,759 tons and when compared to the previous year's loading and unloading results of 49,890,399 tons, showing a decrease of 14.26%. Container loading and unloading activities has increased, where realization in 2018 reached 1,057,610 boxes or 3.5% of the target of 1,053,905 boxes and when compared with the results of container loading and unloading in the previous year was 949,176 boxes, an increase by 11.42%.

While in other operational aspects by December 31, 2018, the realization of ship visits reached 69,426 calls exceeding the realization in 2017 of 67,989 calls or 2.11%. While for the GT (Gross Tonnage) unit, ship visits reached 160,610,816 higher than the realization in 2017, which was 147,311,586 or an increase by 9.03%.

For passenger flow coverage by December 31, 2018 reached 5,316,860 people or only reached 92.37% of the target set of 5,755,788 people. Nevertheless, the achievement of this passenger flow has increased by 5.85% from the achievement of passenger flows in 2017 which reached 5,022,971 people.

The Achievement of Financial Performance

Assets

By December 31, 2018, the company's total assets grew to Rp. 14,020,853 million, increased 64.81% from the previous year Rp. 8,507,143 million. This condition was caused by the increase in current assets of Rp. 413,402 million or 18.71% and an increase in non-current assets of Rp. 5,100,308 million or 80.99% from the previous year. The achievement of company assets in 2018 exceeded 38.05% above the target set in the 2018 RKAP which amounted to Rp. 10,156,395 million.

Operating Expenses

Operating expenses in 2018 are Rp. 1,868,587 million 9.56% higher than the previous year's operating expenses of Rp. 1,705,546 million. This condition was caused by the increasing of port service business expenses by 20.26% and an increase in other service business expenses by 22.28%. Nevertheless, the growth of operating expenses was 9.56% smaller than the growth in operating revenues of 13.17%.

Operating Revenues

During 2018, Pelindo 1 managed to record operating revenues of Rp. 3,113,533 million, increased to Rp. 362,426 million or an increase by 13.17% compared to 2017 of Rp. 2,751,107 million. There are 3 (three) sources of revenues that experienced the highest growth in 2018, namely container services which rose by Rp. 239,790 million or

pelayanan peti kemas yang naik sebesar Rp. 239.790 juta atau 18,34%, pelayanan barang dan non peti kemas yang naik sebesar Rp. 41.619 juta atau 11,45% serta kenaikan pendapatan dari pelayanan jasa penunjang sebesar Rp. 70.026 juta / 11,68%.

Capaian Kinerja Entitas Anak

Bagi Pelindo 1 keberadaan 5 (lima) entitas anak dalam bisnis perseroan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha, profitabilitas dan nilai tambah bagi Pelindo 1 sebagai entitas utama.

PT Prima Indonesia Logistik dalam tahun 2018 berhasil memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 81.956 juta dan membukukan laba usaha bersih sebesar Rp. 28.455 juta, sedangkan beban usaha yang dibukukan PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp. 53.501 juta.

PT Prima Husada Cipta di tahun 2018 mencatat pendapatan usaha sebesar Rp. 35.217 juta dan laba usaha bersih sebesar Rp. 5.491 juta, sedangkan beban usaha yang dibukukan sebesar Rp. 29.726 juta.

PT Prima Pengembangan Kawasan, PT Prima Terminal Peti Kemas, PT Prima Multi Terminal dan PT Terminal Peti Kemas Indonesia (TPKI) belum memperoleh pendapatan dikarenakan belum melaksanakan kegiatan komersil.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diarahkan sepenuhnya untuk menunjang keberlanjutan bisnis perusahaan, yang meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain melakukan penanaman pohon di lingkungan pelabuhan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pengurangan dampak pemanasan global serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan disekitar pengoperasian pelabuhan.

Dalam hal tanggung jawab Perseroan dalam bidang lingkungan, Pelindo 1 telah melakukan penyempurnaan sistem yang terkait dengan lingkungan dan manajemen, Hal ini ditandai dengan berhasilnya pelabuhan Belawan, Belawan International Container Terminal dan pelabuhan Dumai menerima sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan ISO sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pelindo 1 disamping menyajikan dan melaporkan TJSL dalam Laporan Tahunan ini, juga menyajikan dan melaporkan secara terpisah dalam Sustainability Report.

Prospek Usaha Perusahaan

Dengan beroperasinya pelabuhan yang modern dengan fasilitas yang lengkap dan didukung dengan pelayanan yang cepat akan memicu peningkatan kunjungan kapal, aktivitas bongkar muat barang, bongkar muat peti kemas dan arus penumpang di pelabuhan. Posisi strategis Pelindo 1 dimana beberapa pelabuhan andalan berhadapan dan berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka mendapatkan prospek sekaligus peluang bagi Pelindo 1 untuk meraih pendapatan

18.34%, cargo and non-container services increased by Rp. 41,619 million or 11.45% and an increase in revenue from supporting services as Rp. 70,026 million or 11.68%.

The Achievement Subsidiaries Performance

For Pelindo 1 the existence of 5 (five) subsidiaries in company business can give positive contribution towards business growth, profitability and additional value for Pelindo I as parent entity.

PT Prima Indonesia Logistik in 2018 managed to obtain a business income of Rp. 81,956 million and posted a net operating profit of Rp. 28,455 million, while the operating expenses posted by PT Prima Indonesia Logistics amounted to Rp. 53,501 million.

PT Prima Husada Cipta in 2018 recorded a business income of Rp. 35,217 million and net operating profit of Rp. 5,491 million, while the operating expenses booked amounted to Rp. 29,726 million.

PT Prima Pengembangan Kawasan, PT Prima Terminal Peti Kemas, PT Prima Multi Terminal and PT Terminal Peti Kemas Indonesia (TPKI) have not yet received revenue because they have not carried out commercial activities.

Corporate Social Responsibility

The Social and Environmental Responsibility (TJSL) work program is intended to support the sustainability of the company, which is responsible for the environment, including planting trees in the port environment. It is as a part of the company's contribution for global conservation and conservation of ecosystems related to ports.

In terms of the Company's responsibilities in the environmental field, Pelindo 1 has made improvements to systems related to environment and management. This is indicated by the success of Belawan, Belawan International Container Terminal and Dumai ports receiving ISO 14001: 2004 Environmental Management System certificates and ISO 9001: 2015 Quality Management System certificates. Pelindo 1 in addition to presenting and reporting TJSL in this Annual Report, also presents and reports separately in the Sustainability Report.

Company Business Prospect

With the operation of a modern port with complete facilities and supported by fast services, it will trigger an increase in ship calls, cargo loading and unloading activities, container loading and unloading, and passenger flows at the port. Pelindo 1 strategic position where several mainstay ports face and are on the international shipping routes of the Malacca Strait has the prospect and

yang lebih besar terutama bisnis marine.

Kondisi pelabuhan seperti ini telah mendapat apresiasi dari perusahaan pelayaran internasional yang ditandai dengan dilaksanakannya kontrak Service Level Agreement (SLA) dengan 8 perusahaan untuk kepastian Fixed Berthing Windows yang mengatur tentang kepastian jaminan pelayanan (produktivitas dan kepastian berthing), reward and punishment dan minimum throughput yang harus dipenuhi. Bahkan dalam waktu dekat dua Main Line Operator (MLO) yang merupakan perusahaan internasional berkelas dunia yaitu Evergreen dan K'Line juga akan menandatangani kesepakatan SLA.

Pelindo 1 tetap memandang tahun 2018 dengan penuh optimistis mengingat kondisi perekonomian Indonesia maupun Dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif ditandai dengan mulai meningkatnya harga CPO, karet serta produk-produk turunannya. Kondisi ekonomi global maupun domestik yang membaik serta ditunjang oleh peningkatan efektifitas dan efisiensi serta upaya strategis lainnya untuk meningkatkan pendapatan, membuat Pelindo 1 optimis dengan prospek usaha perusahaan di tahun 2019 semakin menjanjikan.

Kendala Yang Dihadapi Perusahaan

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan masih tetap pada terbatasnya dana investasi yang dimiliki untuk pendanaan pengembangan pelabuhan yang sudah berjalan maupun untuk pendanaan proyek-proyek baru termasuk pengerjaan proyek yang ditugaskan oleh pemerintah diantaranya pengembangan terminal pelabuhan di kawasan industri Kuala Tanjung dan pengembangan terminal pelabuhan di kawasan ekonomi khusus Batu Ampar Batam. Pelindo 1 memenuhi kebutuhan investasi tersebut dari modal sendiri dan juga membuka peluang penggalangan dana dari penerbitan surat utang (obligasi), sekuritas aset maupun suntikan dana dari mitra strategis.

Dalam tahun 2018, Pelindo 1 telah menerima suntikan dana dari kredit sindikasi Bank Mandiri, BRI dan BNI senilai Rp. 1,3 triliun berjangka waktu tujuh tahun yang digunakan untuk penataan pelabuhan Belawan, perkuatan dermaga peti kemas di pelabuhan Perawang Pekanbaru, perpanjangan dermaga di pelabuhan Dumai, pembangunan dermaga pelabuhan Sei Kolak Kijang di Tanjung Pinang dan penataan pelabuhan Malahayati di Aceh.

Kendala lainnya yang dihadapi perusahaan pada bidang operasional antara lain dalam peningkatan produktivitas pelayanan, perusahaan telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah menambah panjang dermaga, penambahan fasilitas dan peralatan, modernisasi infrastruktur pelabuhan, optimalisasi penggunaan teknologi informasi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

opportunity for Pelindo 1 to gain greater revenue, especially in the marine business.

The condition of the port like this has received appreciation from international shipping companies which was marked by the implementation of a Service Level Agreement (SLA) contract with 8 companies to ensure Fixed Berthing Windows which regulates certainty of service guarantees (productivity and certainty of berthing), reward and punishment also minimum throughput which must be fulfilled. Even in the near future two Main Line Operators (MLO) which are world-class international companies namely Evergreen and K'Line will also sign an SLA agreement.

Pelindo 1 still looking at 2018 optimistically considering the economic conditions of Indonesia and the World is starting to show positive signs marked by the rising of CPO prices, rubber and derivative products. Global and domestic economic conditions are improving and supported by the increasing of effectiveness and efficiency and other strategic efforts to increase income, Pelindo 1 optimistic with the company's business prospects in 2019 will be more promising.

Obstacles Faced by the Company

The biggest challenge faced by the company is still on the limited investment funds for funding the development of existing ports as well as funding new projects including the construction of projects assigned by the government including the development of port terminals in the Kuala Tanjung industrial area and the development of port terminals in the region special economy Batu Ampar Batam. Pelindo 1 meets these investment needs from its own capital and also opens up opportunities for raising funds from the issuance of bonds (bonds), asset securities and injections of funds from strategic partners.

In 2018, Pelindo 1 received a funding from Bank Mandiri, BRI and BNI syndicated loans worth Rp. 1.3 trillion for a period of seven years used for structuring the port of Belawan, strengthening the container dock at Perawang port of Pekanbaru, extension of the pier at the port of Dumai, construction of the port of Sei Kolak Kijang in Tanjung Pinang and structuring the port of Malahayati in Aceh.

Other obstacles faced by the company in the operations field is to increase service productivity, thus the company has made various efforts including increasing the length of the pier, adding facilities and equipment, modernizing port infrastructure, optimizing the use of information technology and improving the quality of Human Resources.

Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi anggota Direksi Pelindo 1 selama tahun 2018 mengalami beberapa pergantian, sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2018 sampai 7 Oktober 2018

Direktur Utama	:	Bambang Eka Cahyana
Direktur Bisnis	:	Syahputera Sembiring
Direktur SDM & Umum	:	M. Hamied Wijaya
Direktur Keuangan	:	Farid Luthfi
Direktur Perencanaan & Pengembangan	:	Iman A. Sulaiman

Periode 8 Oktober 2018 sampai 4 November 2018

Direktur Utama	:	Bambang Eka Cahyana
Direktur Bisnis	:	Syahputera Sembiring
Direktur SDM dan Umum	:	M. Hamied Wijaya
Direktur Keuangan	:	M. Nur Sodik
Direktur Perencanaan & Pengembangan	:	Hosadi Apriza Putra

Periode 5 November 2018 sampai 31 Desember 2018

Direktur Utama	:	Bambang Eka Cahyana
Direktur SDM	:	M. Hamied Wijaya
Direktur Teknik	:	Hosadi Apriza Putra
Direktur Keuangan	:	M. Nur Sodik
Direktur Operasi dan Komersial	:	Syahputera Sembiring
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis	:	Ihsanuddin Usman

The Change of Composition of Board of Directors

The composition of Pelindo 1 Board of Directors during 2018 has several changes, as follows:

Period January 1, 2018 to October 7, 2018

President Director	:	Bambang Eka Cahyana
Business Director	:	Syahputera Sembiring
Plan & Development Director	:	Iman A. Sulaiman
Financial Director	:	Farid Luthfi
Human Resources and General Affairs Director	:	M. Hamied Wijaya

Period October 8, 2018 to November 4, 2018

President Director	:	Bambang Eka Cahyana
Business Director	:	Syahputera Sembiring
Financial Director	:	M. Nur Sodik
Plan & Development Director	:	Hosadi Apriza Putra
Human Resources and General Affairs Director	:	M. Hamied Wijaya

Period November 5, 2018 to December 31, 2018

President Director	:	Bambang Eka Cahyana
Human Resources Director	:	M. Hamied Wijaya
Financial Director	:	M. Nur Sodik
Technical Director	:	Hosadi Apriza Putra
Operational & Commercial Director	:	Syahputera Sembiring
Business Transformation & Development Director	:	Ihsanuddin Usman

Apresiasi

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tahun-tahun ke depan merupakan tahun yang penuh tantangan tetapi juga sekaligus memberikan peluang bagi Pelindo 1 untuk lebih eksis, unggul dan terpercaya. Dengan dukungan dan semangat kerja yang tinggi serta disertai kebersamaan yang erat, kami optimis kinerja perseroan dimasa yang akan datang akan terus meningkat serta perseroan mampu berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas Nasional sesuai dengan tema Laporan Tahunan Tahun 2018 ini "Faster, Higher, Stronger".

Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham atas segala dukungan yang diberikan, sehingga pada tahun 2018 Perseroan dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Pemerintah, masyarakat, pengguna jasa pelabuhan serta para mitra kerja dan stakeholders lainnya atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada Pelindo 1.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 24 April 2019



Bambang Eka Cahyana
Direktur Utama
/ *President Director*

Appreciation

We are fully aware that the years ahead will be a challenging year but also give opportunities for Pelindo 1 to be more exist, excellent and reliable. With high support, enthusiasm and strong bonding, we are optimist that the company's future performance will continue to increase, and the company will be able to contribute to improving National connectivity in accordance with the theme of the 2018 Annual Report "Faster, Highest, Stronger".

The Board of Directors express their highest gratitude and appreciation to the Shareholders for all the support provided, so that in 2018 the Company can continue to carry out various developments. Our appreciation also goes to the Government, the community, users of port services and work partners and other stakeholders for the cooperation and support that has been given to Pelindo 1.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab penuh manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

Semua informasi yang disajikan dalam laporan tahunan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 telah dimuat secara lengkap dan benar serta tidak menghilangkan informasi atau data material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Annual Report Fiscal Year 2018 and other related information is the full responsibility of the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its accuracy is guaranteed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by affixing their respective signatures below.

All information presented in the annual report and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) fiscal year 2018 has been completely and correctly published and does not omit material information or data.

This statement was made with actual.

Medan, 24 April 2019

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Board of Commissioners



Refly Harun
Komisaris Utama
/ President Commissioner



Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris
/ Commissioner



Heryadi
Komisaris
/ Commissioner



Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris
/ Commissioner



Winata Supriatna
Komisaris
/ Commissioner

Board of Directors



Bambang Eka Cahyana
Direktur Utama
/ President Director



M. Hamied Wijaya
Direktur Sumber Daya Manusia
/ Human Resource Director



Syahputera Sembiring
Direktur Operasional & Bisnis
/ Operational and Commercial Director



Hosadi Apriza Putra
Direktur Teknik
/ Technical Director



Mohamad Nur Sodik
Direktur Keuangan
/ Financial Director



Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis
/ Business Transformation & Development Director



IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE OVERVIEW

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Pendapatan Usaha
Revenues

3,1 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+10,50%

Beban Usaha
Operating Expenses

1,8 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+6,02%

Laba Usaha
Operating Income

1,3 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+18,54%

Laba sebelum Pajak
Profit Before Corporation Income Tax

1,1 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+15,39%

Beban Pajak
Income Tax

291 MILYAR

Pertumbuhan /Growth
+23,03%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Current Year Comprehensive Profit

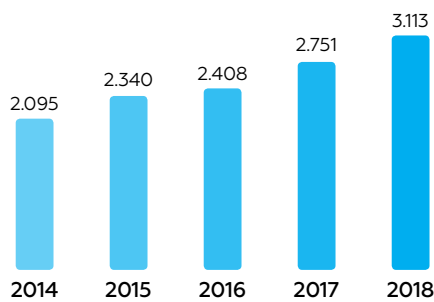
873 MILYAR

Pertumbuhan /Growth
+13,57%

Laba Rugi Konsolidasi Consolidated Income Statement (Rp/Juta) (Rp/Million)	2014	2015	2016	2017	2018	% Pertumbuhan Growth
Pendapatan Usaha Revenues	2.095.520	2.340.724	2.408.900	2.751.107	3.113.533	10,50
Beban Usaha Operating Expenses	1.495.619	1.559.233	1.471.274	1.705.546	1.868.586	6,02
Laba Usaha Operating Income	689.617	893.619	1.063.296	1.170.893	1.351.905	18,54
Laba sebelum Pajak Profit Before Corporation Income Tax	678.977	846.267	995.846	1.067.401	1.195.982	15,39
Beban Pajak Income Tax	144.079	145.899	262.544	262.256	291.111	23,03
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Current Year Comprehensive Profit	536.436	715.304	726.117	792.895	873.931	13,57

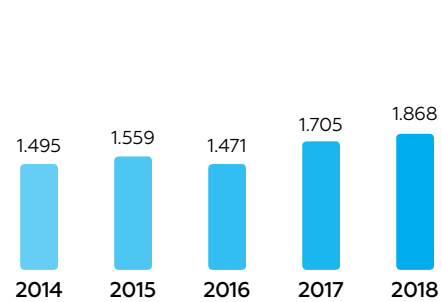
Pendapatan Usaha (dalam milyar rupiah)

Operating Revenue (in billion rupiah)



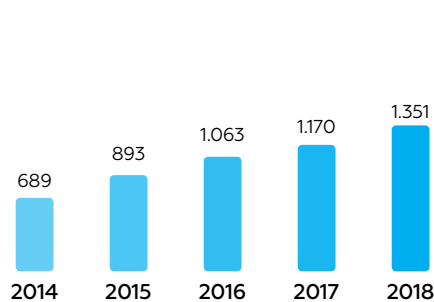
Beban Usaha (dalam milyar rupiah)

Operating Expenses (in billion rupiah)



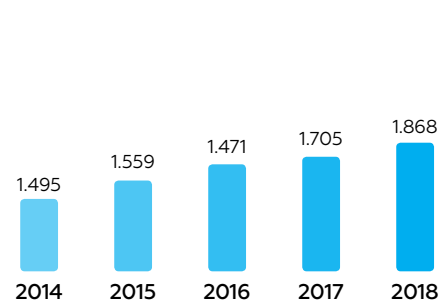
Laba Usaha (dalam milyar rupiah)

Operating Income (in billion rupiah)



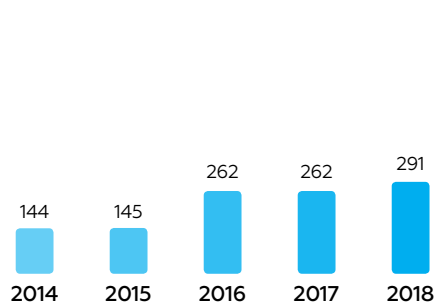
Laba Sebelum Pajak (dalam milyar rupiah)

Income Before Tax (in billion rupiah)



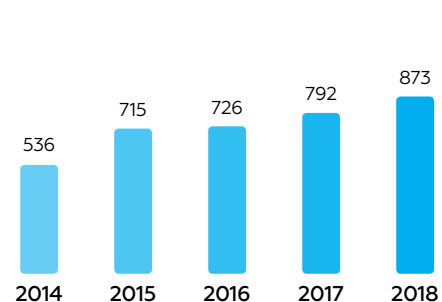
Beban Pajak (dalam milyar rupiah)

Operating Income (in billion rupiah)



Laba Komprehensif Tahun Berjalan (dalam milyar rupiah)

Current Year Comprehensive Profit Chart (in billion rupiah)



IKHTISAR POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION PERFORMANCE OVERVIEW

Aset Lancar
Current Assets

2,6 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+16,93%

Aset Tidak Lancar
Non-current assets

11,3 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+37,94%

Jumlah Aset
Total Assets

14 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+31,92%

Liabilitas Jangka Pendek
Short Term Liabilities

2,6 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+39,10%

Liabilitas Jangka Panjang
Long Term Liabilities

4,8 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+68,15%

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

7,5 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+57,31%

Jumlah Ekuitas
Total Equity

6,4 TRILIUN

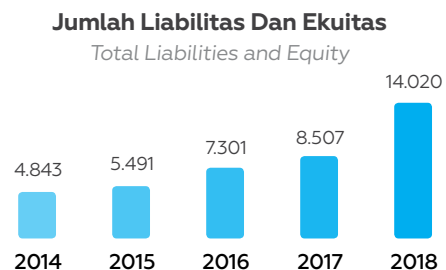
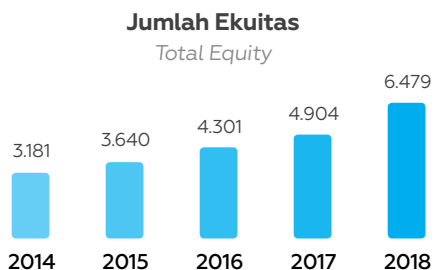
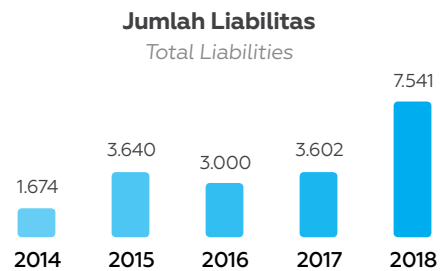
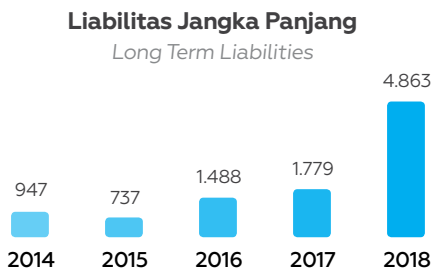
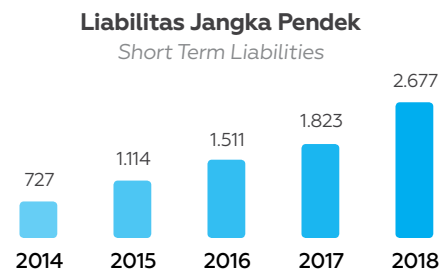
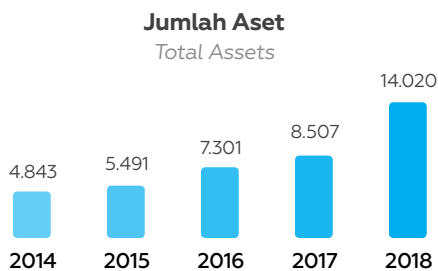
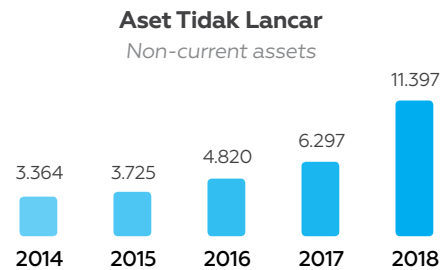
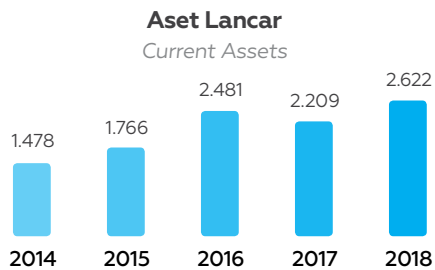
Pertumbuhan /Growth
+19,68%

Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas
Total Liabilities and Equity

14 TRILIUN

Pertumbuhan /Growth
+31,92%

Posisi Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Position (Rp/Juta) (Rp/Million)	2014	2015	2016	2017	2018	% Pertumbuhan Growth
Aset Lancar Current Assets	1.478.308	1.766.673	2.481.343	2.209.548	2.622.950	16,93
Aset Tidak Lancar Non-current assets	3.364.746	3.725.242	4.820.008	6.297.595	11.397.903	37,94
Jumlah Aset Total Assets	4.843.054	5.491.916	7.301.351	8.507.143	14.020.853	31,92
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	727.173	1.114.461	1.511.587	1.823.138	2.677.741	39,10
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	947.059	737.230	1.488.588	1.779.782	4.863.535	68,15
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.674.232	3.640.225	3.000.175	3.602.920	7.541.275	57,31
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.181.435	3.640.225	4.301.176	4.904.224	6.479.577	19,68
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.843.054	5.491.916	7.301.351	8.507.143	14.020.853	31,92



IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW

Arus Kapal (Call)
Ship Traffic (Call)

69.426
CALLS

Pertumbuhan /Growth
+1,52%

Arus Kapal (GT)
Ship Traffic (GT)

160.610.816
GROSS TONNAGES

Pertumbuhan /Growth
+0,10%

Bongkar Muat Barang (Ton)
Cargo Loading Unloading (Tons)

42.777.373
TONS

Pertumbuhan /Growth
-11,39%

Bongkar Muat Peti Kemas (Box)
Container Loading Unloading (Box)

1.057.610
BOXES

Pertumbuhan /Growth
+0,31%

Bongkar Muat Peti Kemas (Teus)
Container Loading Unloading (Teus)

1.293.094
TEUS

Pertumbuhan /Growth
+0,24%

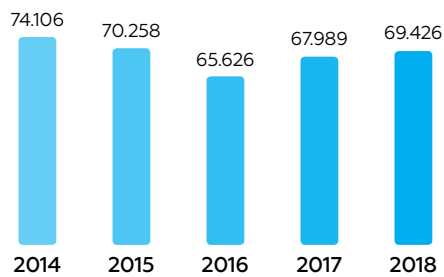
Arus Penumpang (Orang)
Passanger Traffic (Persons)

5.316.860
PASSANGERS

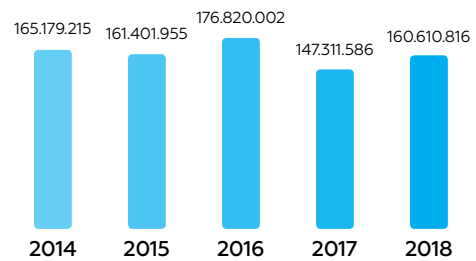
Pertumbuhan /Growth
+1,04%

Laba Rugi Konsolidasi Consolidated Income Statement (Rp/Juta) (Rp/Million)	2014	2015	2016	2017	2018	% Pertumbuhan Growth
Arus Kapal (Call) Ship Traffic (Call)	74.106	70.258	65.626	67.989	69.426	1,52
Arus Kapal (GT) Ship Traffic (GT)	165.179.215	161.401.955	176.820.002	147.311.586	160.610.816	0,10
Bongkar Muat Barang (Ton) Cargo Loading Unloading (Tons)	77.140.809	46.906.025	54.832.851	49.890.399	42.777.373	- 11,39
Bongkar Muat Peti Kemas (Box) Container Loading Unloading (Box)	1.082.954	982.045	952.059	949.176	1.057.610	0,31
Bongkar Muat Peti Kemas (Teus) Container Loading Unloading (Teus)	1.322.543	1.196.891	1.151.942	1.146.944	1.293.094	0,24
Arus Penumpang (Orang) Passanger Traffic (Persons)	5.130.137	5.218.553	5.440.151	5.022.971	5.316.860	1,04

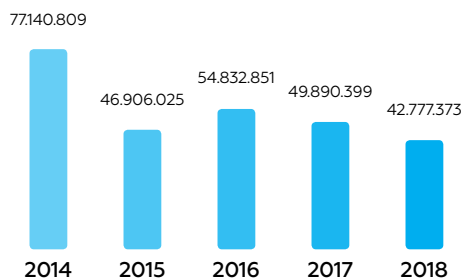
Arus Kapal (Call)
Ship Traffic (Call)



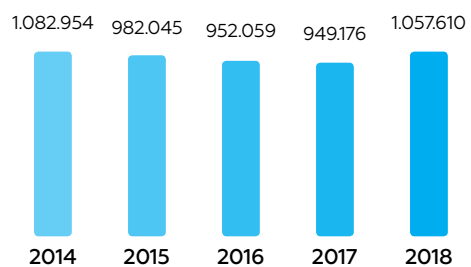
Arus Kapal (GT)
Ship Traffic (GT)



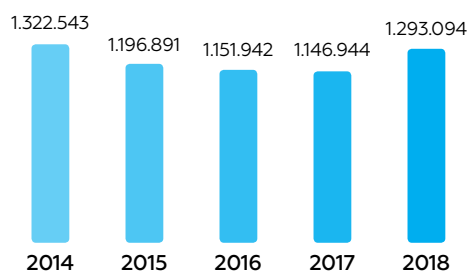
Bongkar Muat Barang (Ton)
Cargo Loading Unloading (Tons)



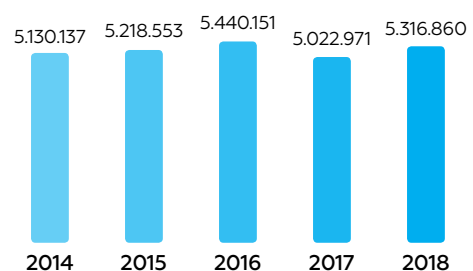
Bongkar Muat Peti Kemas (Box)
Container Loading Unloading (Box)



Bongkar Muat Peti Kemas (Teus)
Container Loading Unloading (Teus)



Arus Penumpang (Orang)
Passanger Traffic (Persons)



IKHTISAR KINERJA LAINNYA

OTHERS PERFORMANCE OVERVIEW

Skor Penilaian Tata Kelola Perusahaan GCG Assesment Score

94,6

Pertumbuhan /Growth

+0,12%

Skor Penilaian Kontrak Manajemen Management Contract Assesment Score

101,6

Pertumbuhan /Growth

+0,16%

Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level Assesment Score

95,0

Pertumbuhan /Growth

+0,31%

Uraian Description	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	% Pertumbuhan Growth
Penilaian Tata Kelola Perusahaan GCG Assesment	Skor	94,16	94,19	94,23	94,30	94,60	0,12
Penilaian Kontrak Manajemen Management Contract Assesment	Skor	100,94	101,63	100,77	101,15	101,60	0,16
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level Assesment	Skor	93,88	92,60	92,77	95,00	95,00	0,31

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



IDENTITAS PERUSAHAAN

IDENTITY OF COMPANY

Nama Perusahaan State-Owned Enterprises	:	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Status Perusahaan Company Status	:	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises
Tanggal Pendirian Established Dated	:	1 Desember 1992
Modal Dasar per 31 Desember 2017 Paid up Capital per Desember 31, 2017	:	Rp. 1.800.000.000.000
Pemegang Saham Shareholders	:	100% milik Negara Republik Indonesia 100% owned by Negara Republik Indonesia
Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar Main Business Activities According to Articles of Association	:	Kepelabuhanan Port business
Pencatatan di Bursa Listing in Stock Exchange	:	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is a SOE which its share has not listed in any stock exchange
Jaringan Network	:	17 Cabang, 1 Kantor Perwakilan, 11 Kawasan 17 Branches, 1 Representative Office, 11 Area
Kantor Pusat Head Office	:	Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241, Sumatera Utara
Situs Web Website	:	Indonesia
Telepon/Fax Telepon/Fax	:	+62-61-6610220/+62-61-6610-906
Surel Email	:	pelabuhan1@pelindo1.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau yang disebut dengan Pelindo 1 pada awal masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87. Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or known as Pelindo 1 at the beginning of the Dutch colonial period the company was named "Haven Bedrijf". After the independence of the Republic of Indonesia, in the period 1945-1950, the Company changed its status to a Port Department (Jawatan Pelabuhan). In 1969, the Port Department changed to a State-Owned Enterprises (BUMN/ SOE) with the status of Port State Company (Perusahaan Negara Pelabuhan) abbreviated as PNP.

In the period of 1969-1983, PN Pelabuhan changed into a Port Entrepreneur Institution with the name of the Port Concession Agency (Badan Pengusahaan Pelabuhan) abbreviated as BPP. In 1983, based on Government Regulation No. 11 of 1983 Port Concession Agency (BPP) was changed to Public Port I Company (Perusahaan Umum Pelabuhan I) abbreviated as Perumpel I. Based on Government Regulation No. 56 of 1991 Perumpel I changed its status to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Change of name of the Company to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) based on the Deed No. 1 dated December 1, 1992 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta and obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in accordance to Decree No. C2-8519. HT.01.01 of 1992 dated June 1, 1992 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 8612 dated November 1, 1994, additional No. 87. Based



perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp. 1.800.000.000.000 (Rp. 1,8 triliun) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham menjadi Rp. 6.800.000.000.000 (Rp. 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp. 511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham menjadi Rp. 1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada di tangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Pelindo 1 bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhanan dan perusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Pelindo 1 dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

on Deed No. 207 dated June 30, 2014 issued by Notary Risna Rahmi Arifa, S.H., the Articles of Association of the Company has been amended with an increase in the Company's authorized capital from Rp. 1,800,000,000,000 (Rp. 1.8 trillion) which is divided into 1,800,000 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share to Rp. 6,800,000,000,000 (Rp. 6.8 trillion) divided into 6,800,000 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share. Based on the deed there has also been an increase in the paid up capital of the Company from Rp. 511,960,000,000 which is divided into 511,960 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share to Rp. 1,700,000,000,000 which is divided into 1,700,000 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share. The amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 dated July 11, 2014.

The company is domiciled in a head office on Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Based on Government Regulation No. 64 of 2001, the position, duty and authority of the Minister of Finance as Shareholders in the Limited Liability Company (Persero)/ Company (Perusahaan) were assigned to the Minister of SOE of the Republic of Indonesia, while Operational Technical guidance was in the hands of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and run by the Directorate General of Sea Transportation.

Prior to 2008, Pelindo 1 was engaged in port services, container services, container terminals, and depots, shipyard businesses, land services, electricity and water, refueling, consolidation and distribution including animals, port consulting services and business of customs areas. Since 2008, in order to optimize resources, Pelindo 1 able to conduct other business activities including transportation services, rental and repair of facilities, maintenance of ships and equipment, transshipment, property outside of the main port activities, industrial estates, tourism, and hospitality facilities, consultant and surveyor services, communication and information, port construction, freight forwarding, health, supplies, shuttle bus, diving, tally, fitting port and scales.

JEJAK LANGKAH

MILESTONES

Jejak Langkah Pelindo 1 dapat digambarkan sebagai berikut:

PELINDO 1 milestones described as follows:

1945

Perubahan Nama Pelabuhan dari "Haven Badrift" menjadi Jawatan Pelabuhan.

Change of Port Name from "Haven Badrift" into Jawatan Pelabuhan.

1960

Jawatan Pelabuhan berubah menjadi PN Pelabuhan.

Jawatan Pelabuhan changed into PN Pelabuhan.

1969

PN Pelabuhan berubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PN Pelabuhan changed into Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

1970

Berdirinya Unit Galangan Kapal (UGK).

Establishment of Shipyard Unit.

1983

BPP menjadi Perumpel I.

BPP became Perumpel I.

1987

Dioperasikan Terminal Peti Kemas Belawan yang sekarang menjadi BICT (Belawan International Container Terminal).

Terminal Peti Kemas Belawan was operated which now change to BICT (Belawan International Container Terminal).

1991

Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perumpel I changed its status to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1994

Operasi Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Belawan.

Operation of Liquid Bulk Terminal at Pelabuhan Belawan.

2008

Terminal Curah Cair Dumai beroperasi.

Operation of Liquid Bulk Terminal at Dumai.

2012

Terminal Kontainer Perawang beroperasi.

Terminal Kontainer Perawang has been operated.

2013

- Kawasan Pelabuhan Batam berubah menjadi Cabang Pelabuhan Batam.

Batam Port Area changed into Batam Port Branch.

- Berdirinya PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) sebagai anak perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).

Establishment of PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) as a joint venture subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).

- Berdirinya PT Prima Terminal Petikemas (PTP) sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Establishment of PT Prima Terminal Petikemas (PTP) as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

- Kawasan Pelabuhan Gunung Sitoli menjadi Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli.

Gunung Sitoli Port Area became Gunung Sitoli Port Branch.

2014

Berdirinya PT Prima Indonesia Logistik dan PT Prima Multi Terminal.

Establishment of PT Prima Indonesia Logistik and PT Prima Multi Terminal.

2015

- Launching Logo Baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tanggal 17 Agustus 2015.

Launching New Logo of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) on August 17, 2015.

- Berdirinya PT Prima Pengembangan Kawasan.

• Establishment of PT Prima Pengembangan Kawasan.

2016

Perusahaan melakukan transformasi dengan fokus pada nilai dan budaya Perusahaan, yang salah satunya dengan melahirkan roadmap di bidang sumber daya manusia.

The company transforms with a focus on the Company values and culture, one of by creating a roadmap in the field of human resources.

2017

Berdirinya PT Prima Husada Cipta Medan

Establishment of PT Prima Husada Cipta Medan

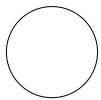
MAKNA LOGO

SIGNIFICANCE OF LOGO



Logo ini merupakan symbol Pelindo 1 yang bersemangat terus melakukan perubahan menjadi Global Company. Seiring perubahan tersebut, Pelindo 1 terus mengembangkan bisnis di bidang logistic dan kepelabuhanan dengan berbasis value CIPTA dan nasionalisme yang menjadi spirit kerja Pelindo 1

This logo is a symbol of Pelindo 1 that describes enthusiastic in continuing to make changes to be a Global Company. Along with these changes, Pelindo 1 continues to develop business in the field of logistics and ports with CIPTA value and nationalism basis which becomes the work spirit of Pelindo 1



CIRCLE

Arah perubahan Pelindo 1 yaitu menuju Global Company menjadi pelabuhan yang mampu melayani pasar global dengan performa terbaik, menyeluruh, dan berdedikasi luhur.

This form represents Pelindo 1 change direction to be a Global Company which become one of the port which capable to serving the global market with the best performance, completed, and dedicated.



ARROWHEAD

Terus melakukan perubahan dan bergerak ke depan, melesat, menuju masa depan yang lebih baik.

Continue to make changes and move forward, streaking, towards a better future.



DYNAMIC MOVEMENT

Gerakan dinamis yang bersinergi untuk memberikan multiplier effects di bisnis kepelabuhanan dan logistik.

A dynamic synergy movement to provide multiplier effects in the port and logistics business.

Konstruksi Master Logo terbentuk dari lingkaran dan arah panah melesat yang menjadi satu kesatuan gerakan dinamis untuk terus menerus melakukan perubahan dan bergerak ke depan, melesat menuju masa depan yang lebih baik.

Bentuk lingkaran melambangkan arah perubahan perusahaan yaitu menuju global company, menjadi salah satu pelabuhan yang mampu melayani pasar global dengan performa terbaik, menyeluruh dan berdedikasi luhur

Perpaduan ketiga warna corporate (merah, hijau dan biru) merepresentasikan perusahaan yang kuat dan yang mampu berkomunikasi dengan terbuka.

Wordmark "PELINDO 1" yang mempunyai konstruksi kokoh mewakili keteguhan, semangat dan kepercayaan diri untuk memberikan performa terbaik

Tagline "INDONESIA GATEWAY" menjadi penguat positioning perusahaan sebagai pintu gerbang masuk wilayah Indonesia di perairan internasional dan sebagai simbol pintu gerbang perubahan.

Semenjak awal pendirian sampai dengan sekarang (1991-2018), tidak terdapat perubahan nama. Nama Perseroan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau sering disebut dengan nama Pelindo 1.

The construction of Master Logo is formed from a circle and the direction of the shot arrow which becomes a dynamic bond to keep making change and move forward, streak off for a better future.

The circle shape represents the company's direction which is to be a global company to become one of the Port which capable to provide services in global market with the best performance, complete, and dedicated.

The third combination colors (red, green and blue) represent a strong company and able to have an open communication.

Wordmark "PELINDO 1" which has a strong construction representing courage, enthusiasm and confidence to give the best performance.

"INDONESIA GATE WAY" Tagline becomes a strengthener of company positioning as the entrance gate to Indonesia territory at international waters and as a symbol of the gate of change.

Since the beginning of the establishment until now (1991-2018), there is no change of name. The company name is PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or often called with Pelindo 1.

BIDANG USAHA

BUSINESS FIELDS

Bidang Usaha sesuai Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 15 Agustus 2008 sebagai berikut: Penyediaan dan/atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.

1. Penyediaan dan/atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.
2. Penyediaan dan/atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general cargo) dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan.
4. Penyediaan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (general cargo) dan kendaraan.
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, multipurpose, penumpang, pelayanan rakyat dan RO-RO.
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda.
8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum, dan instalasi limbah serta pembuangan sampah.
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan.
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.
11. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan.
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan Depo Peti Kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi serta pelayanan logistik.

Business Field in accordance with the last Articles of Association in accordance with Deed Number 1 Dated August 15, 2008, as follows:

Providing and/or services of ports and waters for traffic and berths of ships.

1. Providing and/or services of ports and waters for traffic and berths of ships.
2. Providing and/or services related to pilotage and ship holding.
3. Providing and/or services of dock and other facilities for berthing, container loading and unloading, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, cargo including animals (general cargo) and facilities for passenger flow and/or vehicles.
4. Providing loading and unloading services, containers, liquid bulk, dry bulk (general cargo) and vehicles
5. Providing and/or services of container terminal, liquid bulk, dry bulk, multipurpose, passengers, public shipping and RO-RO
6. Providing and/or services of warehouses and landfill and tanks/stockpiles of cargo, transportation, loading and unloading equipment, and port equipment.
7. Providing and/or services of land for various buildings and fields, industries and buildings/constructions that are related to the importance of the smoothness of multi-modes of transportation.
8. Providing and/or services of electricity, drinking water, and waste installations and waste disposal
9. Providing and/or services of refueling for ships and vehicles in the port environment.
10. Providing and/or services for consolidation and distribution of cargo including animals.
11. Provision and management of consultancy, education and training services related to ports.
12. Business and operation of Container Depots and repair, cleaning, fumigation and logistics services.

KEGIATAN USAHA BERUPA PRODUK / JASA YANG DIJALANKAN

BUSINESS ACTIVITIES IN THE FORM RUN PRODUCTS/SERVICES

Kegiatan usaha Pelindo 1 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan Pelindo 1 meliputi, penyediaan dan/atau pelayanan meliputi :

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar minyak dan pelayanan air bersih.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang,
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Maksud dan Tujuan Pelindo 1 sesuai Anggaran Dasar adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pelindo 1 untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan Nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pelindo 1 business activities referring to the Decree of the Minister of Transportation Number: KP 133 of 2011 dated March 2, 2011 regarding the Granting of Business Licenses to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Business Entity carried out in providing port and other business services that support the achievement of the objectives of Pelindo 1 covering, provision and / or service includes:

1. Providing and/or services of dock for mooring.
2. Providing and/or services of refueling and clean water.
3. Providing and/or services for facilities for ups and downs of passengers and/ or vehicles
4. Providing and/or services of dock for loading and unloading cargo and containers.
5. Providing and/or services of warehouses, landfill, loading and unloading equipment, and port equipment
6. Providing and/or services of container terminal, liquid bulk, dry bulk, and Ro-Ro.
7. Providing and services of cargo loading and unloading.
8. Providing and/or services of distribution center and cargo consolidation.
9. Providing and/or services of ship holding.

PURPOSES AND OBJECTIVES OF THE COMPANY

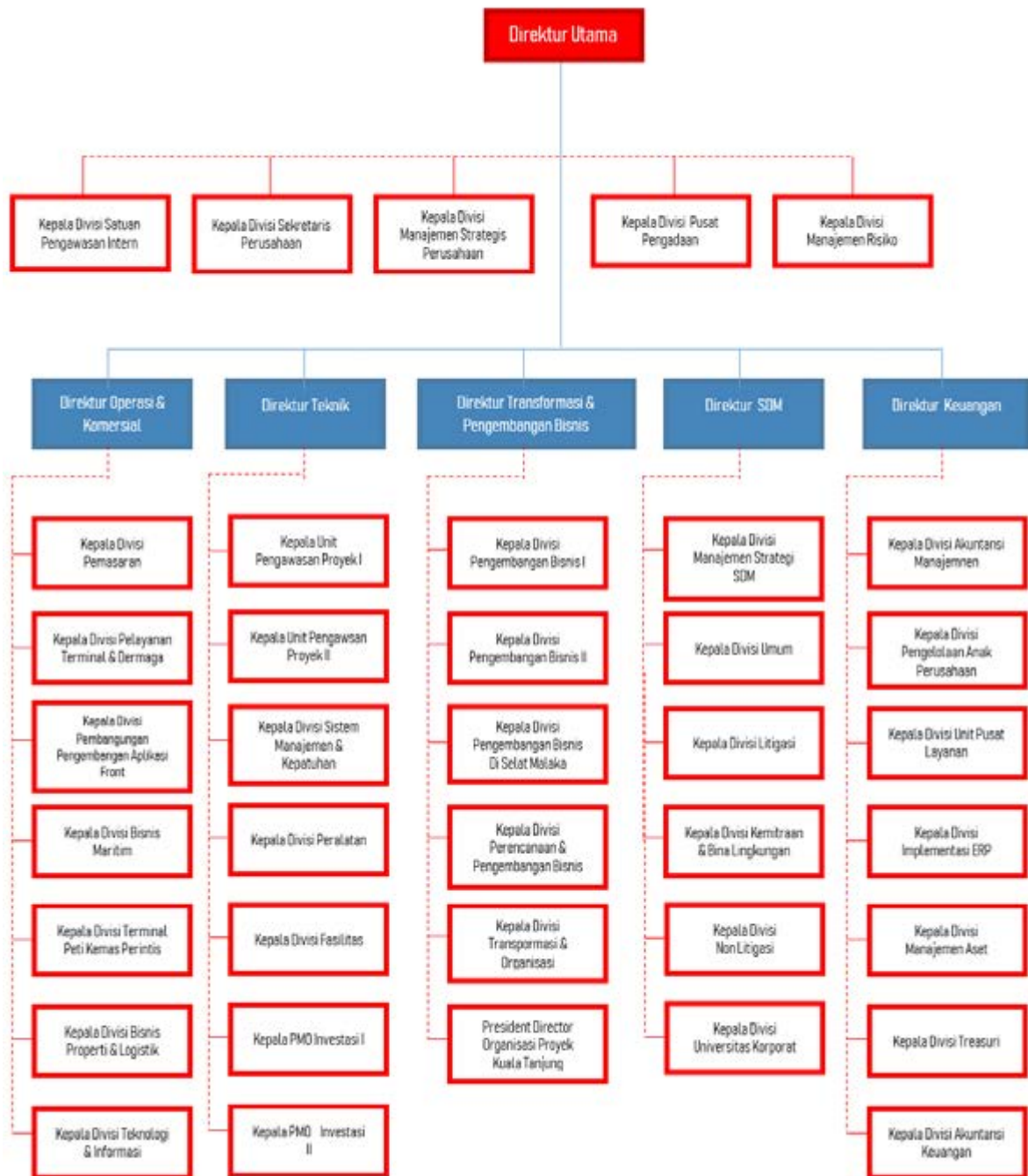
The purpose and objective of Pelindo 1 in accordance with the Articles of Association is to conduct business in the field of business and operation of port services, and to optimize the utilization of resources owned by Pelindo 1 to produce high-quality and highly competitive cargo and/ or services to gain/pursue profits to increase Company Value by implementing the principles of a Limited Liability Company.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan berdasarkan keputusan Direksi Nomor: PR.02/8/22/PI-18.TU tanggal 4 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Company organizational structure according to Board of Directors Decision Number: PR.02/8/22/PI-18.TU dated December 4, 2018 as follows:



VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

Visi

Menjadi Nomor Satu di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia.

To Be Number One in Port Business in Indonesia.

Misi

Menyediakan jasa kepelabuhanan yang terintegrasi, berkualitas dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Providing integrated, qualified and value-added port services to encourage regional economic growth



PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN

APPLICATION OF THE COMPANY'S CULTURE



Tata Nilai Perusahaan adalah turunan dari Budaya Perusahaan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar atau filosofi operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan dan acuan perilaku organisasi secara internal dan juga dalam memberikan pelaporan kepada rekan, pelanggan dan Pemegang Saham.

Tata Nilai tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KP.32/6/10/PI-18.TU tanggal 31 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Customer Focus

Proaktif membangun hubungan dengan pelanggan sebagai upaya memahami kebutuhan pelanggan internal dan eksternal, dan cepat tanggap menyediakan solusi yang prima dengan semangat mengedepankan aspek kepuasan pelanggan, serta mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa mendatang.

Integrity

Jujur dan bersikap transparan dalam bekerja dengan mengacu kepada peraturan dan kebijakan serta mengedepankan prinsip, nilai maupun etika perusahaan yang didukung oleh sikap berani dan konsisten dalam mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil demi kepentingan perusahaan.

Professionalism

Memiliki penguasaan terhadap bidang pekerjaan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan disiplin, serta gesit dalam menanggapi berbagai peluang yang muncul sehingga memberikan hasil yang berkualitas dengan cepat dan tepat sasaran.

Team Work

Berkolaborasi dan menciptakan sinergi dengan orang lain dalam upaya memberikan performa terbaik untuk mencapai sasaran perusahaan dengan bekerjasama secara tulus, dan senantiasa memelihara serta menjaga keutuhan dan keharmonisan kelompok kerja sebagai satu kesatuan yang kokoh.

Adaptive

Kemampuan untuk bergerak dinamis dan menyesuaikan dengan situasi, melalui kreativitas dalam melihat peluang untuk perbaikan maupun menciptakan hal baru dalam bisnis, dan ditandai dengan lahirnya inovasi yang dilaksanakan secara konsisten.

Company Values are derivatives of Corporate Culture in the form of basic principles or operational philosophies that serve as guidelines for implementation and reference of organizational behavior internally and also in providing reporting to colleagues, customers and Shareholders.

The Values are stipulated in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: KP.32/6/10/PI-18.TU dated August 31, 2018.

Customer Focus

Proactively builds customer relationships as an effort to understand customer needs both internally and externally, and responsive in providing excellent solutions in the spirit of prioritizing customer satisfaction, and anticipating future customer needs.

Integrity

Honest and transparent in working with reference to regulations and policies and put forward the company's principles, values and ethics are supported by a courageous and consistent attitude in making the decisions in the interests of the company.

Professionalism

Having mastery of the field of work includes aspects of knowledge, skills and discipline, and agility in responding to various opportunities that arise as well as provide quality results quickly and on target.

Team Work

Collaborate and create synergies with other people to provide the best performance in order to achieve company goals by cooperating sincerely, and always maintain and keep the integrity and harmony of the work group as a solid entity.

Adaptive

The ability to move dynamically and to adjust to the situation, through creativity in seeing opportunities for improvement and creating new things in business, and marked by the birth of innovations that are implemented persistently.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS



Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris
Commissioner

Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris
Commissioner

Refly Harun
Komisaris Utama
President Commissioner

Heryadi
Komisaris
Commissioner

Winata Supriatna
Komisaris
Commissioner



REFLY HARUN

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 26 Januari 1970, saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris sejak 7 September 2018 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: SK-236/MBU/09/2018.

Meraih gelar S1 Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1995, gelar S2 Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2002 dan gelar LL.M. (Master Hukum) dari University of Notre Dame, Amerika Serikat tahun 2007, serta gelar doktor dari Universitas Andalas tahun 2016.

Mengawali karier sebagai jurnalis di beberapa media pada tahun (1995-2003), Saat ini juga menjadi Konsultan Hukum Tata Negara pada Refly Harun & Partners (sejak 2009), Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pengajar (tidak tetap) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sejak 2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum (Desember 2014- Maret 2015), Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (2013-2014), Staf Ahli Kelompok DPD di MPR (2009-2014), Staf Ahli Ketua DPR (2010), Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (2008-2013), dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (2003-2007).

Indonesian citizen, born in Palembang, January 26, 1970, currently domiciled in Jakarta. Served as Commissioner since September 7, 2018 based on the Decree of the Minister of SOE (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of the Perusahaan Perseroan of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: SK-236/MBU/09/2018.

He obtained a Bachelor's degree in Laws from the Faculty of Law, University of Gadjah Mada in 1995, a Masters Degree in Law from the Faculty of Law, University of Indonesia in 2002 and an LL.M. (Master of Law) from the University of Notre Dame, United States of America in 2007, and a Doctorate from University of Andalas in 2016.

He began his career as a journalist in several media in the period of 1995-2003, at present also a Consultant of Constitutional Law at Refly Harun & Partners (since 2009), Lecturer of the Faculty of Law at University of Tarumanagara and Lecturer (not regular) at the Faculty of Law of Postgraduate Program at Gadjah Mada University (since 2014). Previously he served as Special Staff to the Minister of State Secretary for Legal Affairs (December 2014 - March 2015), Executive Director of the Constitutional and Electoral Reform Center (2013-2014), Expert Staff of the DPD Group in the MPR (2009-2014), Expert Staff to the Head of DPR (2010), Researcher of Senior Center for Electoral Reform (2008-2013), and Expert Staff of the Constitutional Court (2003-2007).

PROFIL DEWAN KOMISARIS | PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS



WINATA
SUPRIATNA

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 09 Desember 1959, saat ini berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 November 2017 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-250/MBU/11/2017.

Beliau menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Padjajaran jurusan Ekonomi Manajemen tahun 1984, kemudian melanjutkan program Magister Manajemen di Universitas Satyagama, tahun 1999.

Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Anggaran Pembangunan di Biro Anggaran Sekretariat Sekretaris Negara (1999), Kepala Rumah Tangga Kepresidenan (2011), Kepala Sekretariat Presiden (2011), Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat Negara (2014), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan, Kebudayaan (2015).

Indonesian citizen, born in Karawang, December 9, 1959, currently domiciled in Tangerang. Served as Commissioner since November 21, 2017 according to the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of the Perusahaan Perseroan of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-250/MBU/11/2017.

He completed his undergraduate education at University of Padjajaran majoring in Faculty of Management Economics in 1984, then continued his Masters in Management program at University of Satyagama, 1999.

He has served as Head of Development Budget Section at the State Secretary Secretariat Budget Bureau (1999), Head of Presidential Household (2011), Head of Presidential Secretariat (2011), Expert Staff for State Apparatus and Regional Autonomy Ministry of State Secretariat (2014), Expert Staff Field of Economics, Maritime, Human Development and, Culture (2015).



BAMBANG SETYO WAHYUDI

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri pada 26 Agustus 1957, saat ini berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Komisaris sejak 4 Oktober 2017 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-214/MBU/10/2017.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1983, kemudian memperoleh gelar magisternya pada jurusan Manajemen Personil di STIE IPWI Jakarta tahun 2000, dan meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015.

Dalam kariernya pernah menjabat sebagai Staf TU Kejaksaan RI (1985), Jaksa Fungsional di Kejari Jakarta Utara (1988), Kepala Sub Seksi TPUL Kejari Jakarta Pusat (1992), Kepala Kejaksaan Negeri B Kejari Barabai (2000), Kepala Kejaksaan Negeri A Kejari Bojonegoro (2007), Kepala Kejaksaan Tinggi B Kejati Sumut (2011), Direktur Perdata Kejaksaan RI (2012), Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sumut (2013), Sekretaris JAM Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI (2014), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI (2015).

Indonesian citizen, born in Kediri on August 26, 1957, currently domiciled in Depok. Served as Commissioner since October 4, 2017 in accordance to the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of the Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-214/MBU/10/2017.

He obtained a Bachelor's degree of Laws from University of Sebelas Maret Surakarta in 1983, then earned his master's degree in Personnel Management at STIE IPWI Jakarta in 2000, and earned the Doctor Honoris Causa degree from Sebelas Maret University Surakarta in 2015.

In his career he served as RI the Attorney General's Administration Staff (1985), Functional Attorney at Kejari North Jakarta (1988), Head of Central Jakarta District Prosecutor General TPUL Sub-Division (1992), Head of Barabai District Prosecutor General Office (2000), Head of Bojonegoro District Prosecutor General Office A (2007), Head of the North Sumatra High Prosecutor General Office B (2011), Civil Director of the RI Supreme Prosecutor General Office (2012), Head of the North Sumatra High Prosecutor General Office (2013), Secretary of the RI Civil Solicitor General (JAM) and Attorney General's Administration Staff (2014), Civil Solicitor General and Republic of Indonesia AGO Administration (2015).

PROFIL DEWAN KOMISARIS | PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS



LUKITA
DINARSYAH
TUWO

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 25 September 1961, saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris sejak 7 September 2018 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: SK-236/MBU/09/2018. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1985, kemudian meraih gelar MA di University of Chicago tahun 1992 Dan memperoleh gelar PHD (S-3) dari University of Illinois USA tahun 1998.

Mengawali karier sebagai Production planner di PT Unilever Indonesia pada tahun (1986-1987), pernah menjabat sebagai Staf Biro Perencanaan Macro dan Studi Kuantitatif Bappenas (1987-1998), Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas (2005-2010), Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2010-2014), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2014-2017).

Indonesian citizen, born in Bandung, September 25, 1961, currently domiciled in Jakarta. Served as Commissioner since September 7, 2018 based on the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: SK-236/MBU/09/2018.

Obtained a Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1985, then earned an MA in the University of Chicago in 1992 and obtained a PHD (S-3) degree from University of Illinois USA in 1998.

Starting his career as a Production planner at PT Unilever Indonesia in (1986-1987), having served as Staff of the Bureau of Macro Planning and Quantitative Study of Bappenas (1987-1998), Director of Balance of Payments and International Economic Cooperation Bappenas (2005-2010), Deputy Minister National Development Planning (2010-2014), Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014-2017).



HERYADI

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 24 September 1951, saat ini berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Komisaris sejak 7 September 2018 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: SK-236/MBU/09/2018. Memperoleh Pendidikan AKABRI tahun 1973, Pendidikan SUSLAPAIF tahun 1984, Pendidikan SESKOAD tahun 1989, Pendidikan SESKO LN (Inggris) tahun 1992, Pendidikan SESKOGAB (Australia) tahun 1995 dan LEMHANNAS (China) tahun 2002.

Mengawali karier Komandan Peleton Batalyon 613 Tarakan, Instruktur di SECAPA dan PUSsesnif TNI-AD., Pengendali anggaran operasi militer, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Prancis, Wakil Asisten Intelejen Kepala Staf Umum TNI, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Hubungan Internasional, Asisten Intelejen Panglima TNI.

Indonesian citizen, born in Jakarta, September 24, 1951, currently domiciled in Bekasi. Served as Commissioner since September 7, 2018 based on the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of the Perusahaan Perseroan of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: SK-23/MBU/09/2018.

Obtained AKABRI Education in 1973, SUSLAPAIF Education in 1984, SESKOAD Education in 1989, Education of SESKO LN (UK) in 1992, Education of SESKOGAB (Australia) in 1995 and LEMHANNAS (China) in 2002.

He began his career as Battalion 613 Tarakan Platoon Commander, Instructor at SECAPA and Indonesian Army PUSsesnif, Controller of military operations budget, Defense Attache of the Republic of Indonesia in France, Deputy Assistant Intelligence Chief of TNI General Staff, Expert Staff of TNI Commander in International Relations, Intelligence Assistant of TNI.

PROFIL DEWAN DIREKSI

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



Hosadi A. Putra
Direktur Teknik
Technical Director

Bambang Eka Cahyana
Direktur Utama
President Director

Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis
Business Transformation & Development Director

M. Hamied Wijaya
Direktur SDM
HR Director

Syahputera Sembiring
Direktur Operasi Dan Komersial
Operations & Commercial Director

Mohamad Nur Sodik
Direktur Keuangan
Financial Director



BAMBANG EKA CAHYANA

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul pada tanggal 15 Mei 1967. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan sejak Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU/2013.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan Jurusan Manajemen Kehutanan di Universitas Gadjah Mada tahun 1991 dan Magister Manajemen Eksekutif Angkatan XXIV, Konsentrasi Program Studi Bisnis dan Keuangan Internasional di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta tahun 2003-2004.

Mengawali karirnya sebagai Staf Bidang Manajemen Kehutanan PT Trisida Pantau (1991) kemudian bergabung di Perum Perhutani Jawa Timur sebagai Staf Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI). Hingga akhirnya bergabung di PT Samudera Indonesia sebagai Staf Corporate Managing Director (CMD) Agency & Terminal Group. Jabatan terakhir yang didudukinya sebagai Asisten Direktur Utama bidang Pengembangan Usaha Terminal PT Samudera Indonesia Tbk. (2007-2008).

Bergabung di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 2009 sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.

Indonesian citizen, born in Bantul on May 15, 1967. At present, domiciled in Jakarta. He was appointed as President Director of the Company since August 2013 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Number SK-331/MBU/2013.

He holds a Bachelor's degree from the Faculty of Forestry, Department of Forestry at the University of Gadjah Mada in 1991 and a Masters in Executive Management Class XXIV, Concentration in International Business and Financial Study Program at PPM Management College, Jakarta 2003-2004.

He began his career as a Staff in Forestry Management at PT Trisida Pantau (1991) and then joined at Perum Perhutani East Java as a Staff of the Internal Monitoring Unit (SPI). Until he's finally joining PT Samudera Indonesia as Staff of Corporate Managing Director (CMD) Agency & Terminal Group. The last position he occupied as Assistant President Director of the PT Samudera Indonesia Tbk in the field of Terminal Business Development (2007-2008).

Joined PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2009 as Director of Commercial and Business Development.

PROFIL DEWAN DIREKTUR | PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



**M. HAMIED
WIJAYA**

Direktur SDM
HR Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Blora pada tanggal 13 Juli 1967. Saat ini berdomisili di Blora. Beliau menjabat sebagai Direkur SDM Perusahaan sejak 2014 berdasarkan Keputusan SK-92/MBU/2014.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1992, Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1993, dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2000.

Mengawali karirnya sebagai Staf Perencanaan dan Pengembangan SDM KP (1993-1996), Manajemen Representatif ISO 9001:2002 Cabang Belawan (2001), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelabuhan I (2002-2007), Senior Manajer Perencanaan Organisasi dan SDM (2007-2009), Senior Manajer Pemasaran (2009-2011), Senior Manajer Manajemen Risiko & Manajemen Mutu (2011-2014) dan Kepala SPI (2014).

Indonesian citizen, born in Bandung, September 25, 1961, currently domiciled in Jakarta. Served as Commissioner since September 7, 2018 based on the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: SK-236/MBU/09/2018.

Obtained a Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1985, then earned an MA in the University of Chicago in 1992 and obtained a PHD (S-3) degree from University of Illinois USA in 1998.

Starting his career as a Production planner at PT Unilever Indonesia in (1986-1987), having served as Staff of the Bureau of Macro Planning and Quantitative Study of Bappenas (1987-1998), Director of Balance of Payments and International Economic Cooperation Bappenas (2005-2010), Deputy Minister National Development Planning (2010-2014), Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014-2017).



SYAHPUTERA SEMBIRING

Direktur Operasi & Komersial
Operations & Commercial
Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 4 Maret 1963. Saat ini berdomisili di Medan. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Komersial Perusahaan sejak 8 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan SK-258/MBU/10/2018.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1989, dan menyelesaikan pendidikan Diploma Manajemen di Robert Wesleyan College Amerika Serikat pada tahun 1999.

Mengawali karir di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Staf Perencanaan Dermaga dan Kolam (1991), kemudian menjadi Staf Perencanaan Teknik Sipil (1991). Pada tahun 1992-1994, menjadi Wakil Pimpro Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Riau Cabang Pelabuhan Dumai. Pada tahun 1994-1995, menjabat sebagai Kepala Divisi Teknik Cabang Pelabuhan Lhokseumawe, kemudian menjabat sebagai Menejer Usaha dan Teknik/Pimbagpro Aceh (1995-1996). Pada tahun 1999-2001, sebagai Staf Direktur Utama, kemudian menjabat sebagai Kasubbag Analisa Kelayakan Investasi pada tahun 2002. Kemudian menjabat sebagai ASM Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Usaha. Selanjutnya pada tahun 2005, menjabat sebagai Senior Menejer Pengembangan Usaha dan TI. Pada tahun 2007, ditunjuk menjadi General Manager Unit Terminal Peti Kemas Belawan, dilanjutkan pada tahun 2008, menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Belawan.

Indonesian citizen, born in Jakarta, September 24, 1951, currently domiciled in Bekasi. Served as Commissioner since September 7, 2018 based on the Decree of the Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of the Perusahaan Perseroan of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: SK-23/MBU/09/2018.

Obtained AKABRI Education in 1973, SUSLAPAIF Education in 1984, SESKOAD Education in 1989, Education of SESKO LN (UK) in 1992, Education of SESKOGAB (Australia) in 1995 and LEMHANNAS (China) in 2002.

He began his career as Battalion 613 Tarakan Platoon Commander, Instructor at SECAPA and Indonesian Army PUsesnif, Controller of military operations budget, Defense Attache of the Republic of Indonesia in France, Deputy Assistant Intelligence Chief of TNI General Staff, Expert Staff of TNI Commander in International Relations, Intelligence Assistant of TNI.

PROFIL DEWAN DIREKTUR | PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



Warga Negara Indonesia, lahir di Padang pada tanggal 7 April 1972. Saat ini berdomisili di Medan. Beliau diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan sejak 8 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan SK-258/MBU/10/2018, dan perubahan nomenklatur sesuai Keputusan SK-288/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 menjadi Direktur Teknik.

Meraih gelar sarjana (S-1) Teknologi dari Institut Teknik Bandung pada tahun 1996.

Mengawali Karirnya sebagai Asisten Manajer di BICT tahun 2011-2012, Manajer Teknik di Cabang Pelabuhan Pekanbaru pada tahun 2012-2013, Koordinator PMO Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahun 2013-2014.

Indonesian citizen, born in Padang on April 7, 1972. At present, domiciled in Medan. He was appointed as Director of Planning and Development since 8 October 2018 in accordance to Decree SK-258/MBU/10/2018, and changes in nomenclature according to Decree SK-288/MBU/11/2018 dated November 5, 2018 became Technical Director.

He holds a Bachelor's degree in Engineering from the Bandung Technical Institute in 1996.

Starting his career as Assistant Manager at BICT in 2011-2012, Technical Manager at Pekanbaru Port Branch in 2012-2013, Coordinator of Kuala Tanjung Port Development PMO in 2013-2014.



MOHAMAD NUR SODIQ

Direktur Keuangan
Financial Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Magetan pada tanggal 11 November 1973. Saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan sejak 8 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan SK-258/MBU/10/2018.

Meraih gelar Sarjana dari Sekolah tinggi Akuntansi Negara tahun 2000 dan Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006.

Mengawali karirnya sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1992-2000, Executive Secretary di The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2001, senior associate di Sofyan Djalil & Paratners (SDP) tahun 2002-2003, staf tenaga ahli Direksi PT Persahaan Gas Negara (Persero) tahun 2004-2005 menjadi, Managing Partner di Sodik, Purwoko & Associate (SPA Consulting) tahun 2005-2012, staf ahli Direksi di PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2013 dan tahun 2014-2018 diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Industri Kereta Api (Persero).

An Indonesian citizen, born in Magetan on November 11, 1973. Currently domiciled in South Tangerang. He was appointed as Financial Director of the Company since 8 October 2018 based on Decree SK-258/MBU/10/2018.

He holds a Bachelor's degree from the State Accounting College in 2000 and a Masters in Accounting at the University of Muhammadiyah Jakarta in 2006.

He began his career as an Auditor at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 1992-2000, Executive Secretary at the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in 2001, senior associate at Sofyan Djalil & Paratners (SDP) in 2002-2003, expert staff of Directors of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) in 2004-2005 became, Managing Partner at Sodik, Purwoko & Associate (SPA Consulting) in 2005-2012, expert staff of Directors at PT Pegadaian (Persero) in 2012-2013 and 2014-2018 was appointed as Financial Director of PT Kereta Api (Persero).

PROFIL DEWAN DIREKTUR | PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



IHSANUDDIN
USMAN

Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis
*Business Transformation and
Development Director*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta Timur. Beliau menjabat sebagai Direkur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan sejak 5 November 2018 berdasarkan Keputusan SK-288/MBU/11/2018.

Meraih gelar Sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994, dan meraih gelar MBA in Innovation, Technology Management & Entrepreneurship TSM Business School, Twente University – the Netherlands tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Senior Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Pertamina (Persero) pada tahun 2017.

Indonesian citizen, born in Jakarta on July 7, 1969. Currently domiciled in East Jakarta. He has served as Corporate Business Transformation and Development Director since November 5, 2018 according to Decree SK-288/MBU/11/2018.

He obtained a Bachelor's degree at the Bandung Institute of Technology in 1994, and earned an MBA in Innovation, Technology Management & Entrepreneurship at TSM Business School, Twente University - the Netherlands in 2000.

He has served as Senior Vice President of Human Resource Development at PT Pertamina (Persero) in 2017.

PEJABAT SENIOR

SENIOR OFFICERS

Direktorat Utama

President Directors

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Arif Hutomo	Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Monitoring Unit Division
2.	Muhammad Eriansyah	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Head of Company Secretary Division
3.	Henry Naldi	Kepala Divisi Manajemen Strategis Perusahaan Head of Company Strategic Management Division
4.	Dominggo Pasaribu	Kepala Divisi Pusat Pengadaan Head of Procurement Center Division
5.	Emilda Andayani	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of the Risk Management Division Technical Directorate

Direktorat Teknik

Technical Directorate

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Parulian Panggabean	Kepala Unit Pengawasan Proyek I Head of Monitoring Unit of Project I
2.	Praptono	Kepala Unit Pengawasan Proyek II Head of Monitoring Unit of Project II
3.	Hendri Indra	Kepala Divisi Sistem Manajemen & Kepatuhan Head of Management & Compliance System
4.	Wedi Cahyono	Kepala Divisi Peralatan Head of Equipment Division
5.	MHD. Zulpan	Kepala Divisi Fasilitas Head of Facilities Division
6.	Lyndhu Adithya Wishnu Ray	Kepala PMO Investasi I Head of PMO Investment I
7.	Mahadi Widigdo	Kepala PMO Investasi II Head of PMO Investment II

Direktorat Transformasi Dan Pengembangan Bisnis

Business Transformation & Development Directorate

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Deni Rahayu Santoso	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis I Head of Division of Business Development I
2.	Jonedi Ramli	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis II Head of Division of Business Development II
3.	Parsaulian M.T. Manurung	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Diselat Malaka Head of Business Development Division in the Malacca Strait
4.	Auriga	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Head of Business Planning & Development
5.	Hartono	Kepala Divisi Transformasi dan Organisasi Head of Transformation & Organization Division
6.	Hanny Uktolseya	President Direktur Organisasi Proyek Kuala Tanjung President Director of the Kuala Tanjung Project Organization

PEJABAT SENIOR | SENIOR OFFICERS

Direktorat Operasi dan Komersial

Operations and Commercial Directorate

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Arief Hermawan	Kepala Divisi Pemasaran Head of Marketing Division
2.	Herry AMS	Kepala Divisi Pelayanan Terminal Dan Dermaga Head of Terminal & Pier Service Division
3.	Rudi Susanto	Kepala Divisi Pembangunan Pengembangan Aplikasi Front Head of Front Application Construction and Development Division
4.	Pasogit Satrya Simanungkalit	Kepala Divisi Bisnis Maritim Head of Maritime Business Division
5.	Bistori	Kepala Divisi Terminal Petikemas Perintis Head of Pioneer Container Terminal Division
6.	Uli Dani Desrina	Kepala Divisi Bisnis Properti dan Logistik Head of Property & Logistics Business Division
7.	Baratto Rosalina	Kepala Divisi Teknologi Dan Informasi Head of Technology & Information Division

Direktorat Keuangan

Financial Directorate

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Riza Nasution	Kepala Divisi Akuntansi Manajemen Head of Management Accounting Division
2.	Safrial	Kepala Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan Head of Subsidiary Management Division
3.	Basuki Soleh	Kepala Divisi Unit Pusat Layanan Head of Service Center Unit Division
4.	Sarmidi	Kepala Divisi Implementasi ERP Head of ERP Implementation Division
5.	Ridwan Sani Siregar	Kepala Divisi Manajemen Aset Head of the Asset Management Division
6.	Syaiful	Kepala Divisi Treasuri Head of Treasury Division
7.	Netty Wati Limbong	Kepala Divisi Akuntansi Keuangan Head of Financial Accounting Division

Direktorat Sumber Daya Manusia

Human Resources Directorate

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Imron Eryandy	Kepala Divisi Manajemen Strategi SDM Head of HR Strategy Management Division
2.	Sri Suyono	Kepala Divisi Umum Head of General Division
3.	Swandi Hutasoit	Kepala Divisi Litigasi Head of Litigation Division
4.	Santi Saptasari	Kepala Divisi Kemitraan Dan Bina Lingkungan Head of the Partnership and Community Development Division

5.	Basuki Widodo	Kepala Divisi Non Litigasi
6.	Kasih Dwi Yanti	Kepala Divisi Universitas Korporate

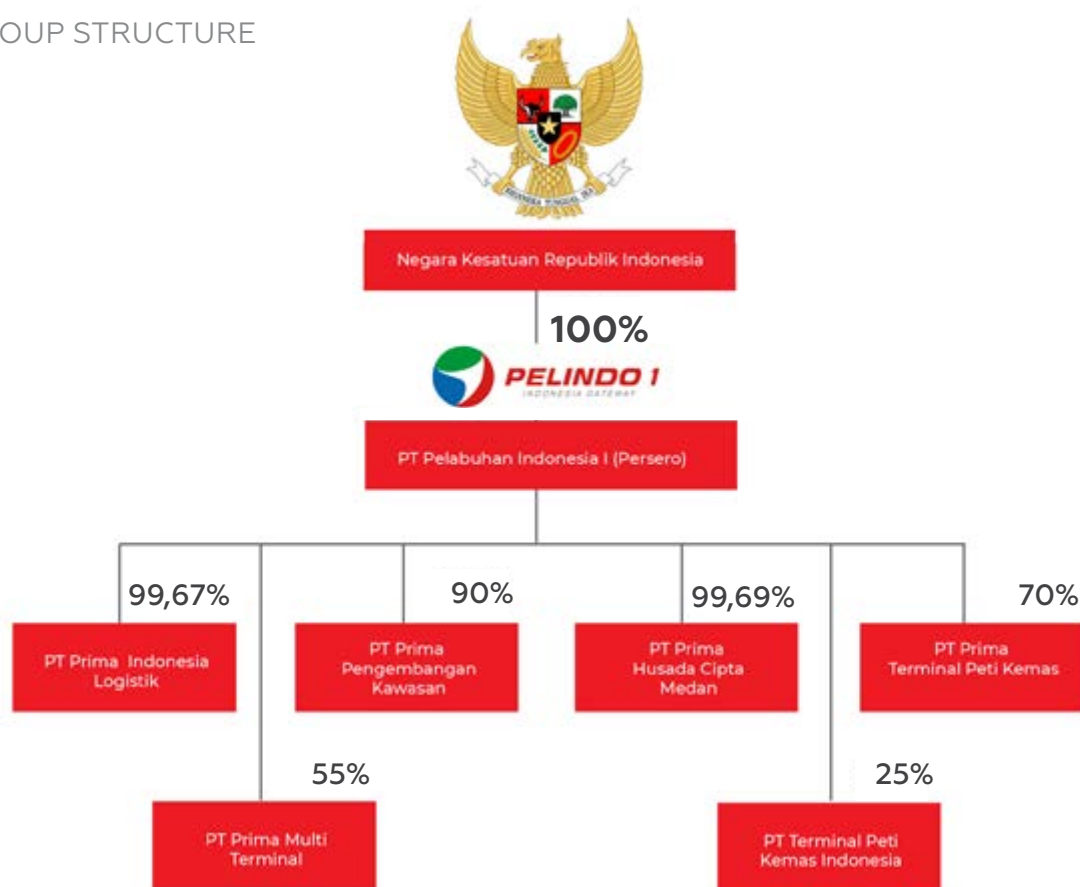
Kantor Cabang

Branch Offices

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1.	Yarham Harid	General Manager Cabang Pelabuhan Belawan General Manager of Branch of Pelabuhan Belawan
2.	Indra Pamulihan	General Manager Terminal Peti Kemas Domestik Belawan General Manager of Belawan Domestic Container Terminal
3.	Aris Zulkarnain	General Manager Belawan International Container Terminal General Manager of Belawan International Container Terminal
4.	Mardiofi	General Manager Cabang Pelabuhan Dumai General Manager of Branch of Pelabuhan Dumai
5.	Arif Indra Perdana	General Manager Cabang Pelabuhan Tanjungpinang General Manager of Branch of Pelabuhan Tanjungpinang
6.	I Wayan Wirawan	General Manager Cabang Pelabuhan Pekanbaru General Manager of Branch of Pelabuhan Pekanbaru
7.	Budi Azmi	General Manager Cabang Pelabuhan Lhokseumawe General Manager of Branch of Pelabuhan Lhokseumawe
8.	Syahri Ramadana	General Manager Cabang Pelabuhan TG. Balai Karimun General Manager of Branch of Pelabuhan TG. Balai Karimun
9.	Yusrizal	General Manager Cabang Pelabuhan Tembilahan General Manager of Branch of Pelabuhan Tembilahan
10.	Coro Ga	General Manager Cabang Pelabuhan Batam General Manager of Branch of Pelabuhan Batam
11.	Al Abrar	General Manager Cabang Pelabuhan Sungai Pakning General Manager of Branch of Pelabuhan Sungai Pakning
12.	Richard Siahaan	General Manager Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung General Manager of Branch of Pelabuhan Kuala Tanjung
13.	Agus Deritanto	General Manager Cabang Pelabuhan Sibolga General Manager of Branch of Pelabuhan Sibolga
14.	Aulia Rahman	General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan General Manager of Branch of Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
15.	Sam Arifin Wiwi	General Manager Cabang Pelabuhan Malayahati General Manager of Branch of Pelabuhan Malayahati
16.	Jonni Sitompul	General Manager Cabang Pelabuhan Gunungsitoli General Manager of Branch of Pelabuhan Gunung Sitoli
17.	Akhmad Yamani	General Manager Unit Galangan Kapal General Manager of Shipyard Unit

STRUKTUR GRUP

GROUP STRUCTURE



ENTITAS ANAK/ENTITAS ASOSIASI/PERUSAHAAN PATUNGAN

SUBSIDIARY ENTITIES/ ASSOCIATION ENTITIES/ JOINT COMPANIES

Entitas Anak

Per 31 Desember 2018, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 5 (lima) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Subsidiary

Per December 31, 2018, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has 5 (five) Subsidiaries and 1 (one) Association Entities as shown in the table as follows:

NO	Nama Perusahaan Company's Name	Bidang Usaha Business Fields	Kepemilikan Saham Shareholding	Status
1	PT Prima Indonesia Logistik	Jasa Depo Peti Kemas dan Jasa Logistik Lainnya Container Depot Services & Other Logistics Services	99,67%	Telah Beroperasi Has been operating
2	PT Prima Pengembangan Kawasan	Jasa Penyediaan & Pengelolaan Kawasan Industri Procurement Services & Industrial Estate Management	90,00%	Belum Beroperasi Not Operating
3	PT Prima Husada Cipta Medan	Jasa di Bidang Kesehatan Services in Health Sector	99,69%	Telah Beroperasi Has been operating
4	PT Prima Terminal Petikemas	Jasa Terminal Peti Kemas Container Terminal Services	25,00%	Belum Beroperasi Not Operating
5	PT Prima Multi Terminal	jasa pelayanan Terminal Multi Purpose Multi Purpose Terminal services	55,00%	Belum Beroperasi Not Operating
6	PT Terminal Petikemas Indonesia	Jasa Terminal Peti Kemas Container Terminal Services	25,00%	Belum Beroperasi Not Operating

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Mencapai 5% (lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor, dengan rincian sebagai berikut:

There are no shareholdings of members of the Board of Commissioners and Board of Directors that reach 5% (five percent) or more than paid-up capital, details as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor Shareholdings of members of the Board of Commissioners and Board Directors that reach 5% (five percent) or more than paid-up capital		
			Jumlah nominal saham Share nominal amount	% kepemilikan % ownership	Keterangan : Indonesia/Luar Negeri Description: Indonesia / Foreign Affairs
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners					
1.	Refly Harun	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris Commissioner	-	-	-
3.	Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	-	-	-
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris Commissioner	-	-	-
5.	Heryadi	Komisaris Commissioner	-	-	-
Dewan Direksi / Board of Directors					
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	-	-	-
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director	-	-	-
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi Dan Komersial Operations & Commercial Director	-	-	-
4.	Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Technical Director	-	-	-
5.	M. Nur Sodik	Direktur Keuangan Financial Director	-	-	-
6.	Ihsanuddin Usman Hosadi	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development Director	-	-	-

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Pelindo 1 tidak menampilkan informasi kronologis pencatatan saham karena hingga 31 Desember 2018 Pelindo 1 tidak mencatatkan saham di bursa efek manapun.

Per December 31, 2018, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has 5 (five) Subsidiaries and 1 (one) Association Entities as shown in the table as follows:

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER STOCK LISTING

Pelindo 1 menerbitkan Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh.

Pelindo 1 issued a scripless Pelindo 1 Gerbang Nusantara Bond 1 of 2016 and guaranteed full ability.

No	Nama Penerbitan Publishing Name	Jangka Waktu (th) Time period (year)	Tanggal Terbit Date of issue	Jatuh Tempo Due date	Rate (%)	Jumlah (Rp Miliar) Amount (Rp Billion)	Rating
1.	Seri A	3	21 Juni 2016	21 Juni 2019	8,25	50	AA
2.	Seri B	5	21 Juni 2016	21 Juni 2021	9,00	500	AA
3.	Seri C	7	21 Juni 2016	21 Juni 2023	9,25	400	AA
4.	Seri D	10	21 Juni 2016	21 Juni 2026	9,50	50	AA

NAMA LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

NAME OF INSTITUTIONS AND/ OR SUPPORTING PROFESSIONS

Konsultan Keuangan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Helianto & Rekan

JL. TB Simatupang, Kav 10, Plaza Aminta, Lt 17 Jakarta Selatan 12310.

Financial Consultants

Public Accountant Office (KAP) Helianto & Rekan

JL. TB Simatupang, Kav 10, Plaza Aminta, Floor 17 Jakarta Selatan 12310.

Konsultan Hukum

Kantor Hukum Siregar & Djojonegoro

One Pacific Place, 10th floor
Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Legal Consultants

Siregar & Djojonegoro Law Firm

One Pacific Place, 10th floor Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Kantor Hukum APSG Law Firm & Counsellor at law

Jl. Brantas No. 30A, Bandung 40114.

APSG Law Firm & Counsellor at law

Address: Jl. Brantas No. 30A, Bandung 40114.

Konsultan PWC

PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia

Gedung Plaza 89 Lt.9 suite 901 Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan.

PWC Consultants

PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia

Gedung Plaza 89 Lt.9 suite 901 Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION OF COMPANY'S WEBSITE

Melalui situs www.pelindo1.co.id Pelindo 1 membuka seluasluasnya akses kepada publik untuk mendapatkan data dan informasi penting Perusahaan. Data dan informasi penting tersebut antara lain berupa: profil, jaringan Kantor Cabang, service, GCC, marine service, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Program Kemitraan & Bina Lingkungan, penghargaan yang diperoleh Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan serta akses kepada Whistleblowing System.

Through the website www.pelindo1.co.id Pelindo 1 opens the widest access to the public to obtain important Company data and information. The important data and information, including profiles, Branch Office networks, services, GCC, marine services, Corporate Social Responsibility and Partnership & Community Development Programs, awards received by the Company, Annual Reports and Corporate Financial Reports and access to the Whistleblowing System.

Informasi penting Perusahaan dapat pula diakses melalui Portal BUMN dengan alamat bumn.go.id/pelindo1 Untuk menunjang informasi, kegiatan dan data terkini yang dapat diakses, Perusahaan melakukan update data dimaksud secara berkala.

Important information about the Company can also be accessed through the BUMN Portal with the address bumn.go.id/pelindo1 to support the latest information, activities and data that can be accessed, the Company periodically updates the data.

PERISTIWA PENTING DI 2018

IMPORTANT EVENTS IN 2018



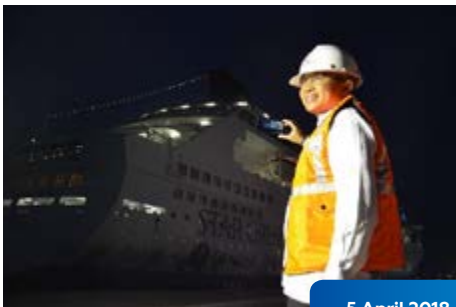
18 Januari 2018

Menhub Budi karya Sumadi, Menkeu Sri Mulyani, & Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kunjungi Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara / Minister of Transportation Budi karya Sumadi and Minister of Finance Sri Mulyani and Minister of PUPR Basuki Hadimuljono visited Kuala Tanjung Port, North Sumatera.



19 Februari 2018

Launching E-Berthing di Terminal Penumpang Sri Bintan Pura, Tanjungpinang / The launching of E-Berthing System in Sri Bintan Pura Passenger Terminal.



5 April 2018

Sandar Perdana Kapal di Pelabuhan Kuala Tanjung / Welcoming the first ship to berth in Port of Kuala Tanjung



8 Juni 2018

Soft Launching transaksi elektronik E-Pass di Terminal Penumpang Teluk Nibung, Tanjungpinang / E-Pass Electronic Payment Soft Launching in Teluk Nebung Passenger Terminal, Tanjungpinang.



19 Agustus 2018

Jalan Sehat 5K dalam rangka program BUMN Hadir Untuk Negeri di Kepulauan Natuna / 5K Fun Walk event at Ministry of SOE Program in the Natuna Islands



27 September 2018

Focus Group Discussion Kuala Tanjung Industrial Port Complex Development / Focus Group Discussion on Kuala Tanjung Industrial Port Complex Development



24 Oktober 2018

Audiensi Direksi Pelindo 1 ke Kantor Gubernur Sumatera Utara/ Audience Visit of Pelindo 1 Board of Directors to the Office of the Governor of North Sumatera



19 November 2018

Penandatanganan Kerjasama Pembiayaan Investasi Strategis Pelindo 1 / Signing of Pelindo 1 Strategic Investment Financing Cooperation.



3 Desember 2018

Peresmian Operasional Fix Crane Perdana di Pelabuhan Sibolga / Inauguration of Fix Crane Operational in Sibolga Port



27 Desember 2018

Pelindo 1 & Jamdatun tandatangani MoU bidang Perdata & Tata Usaha Negara di Batam / Pelindo 1 & Solicitor General of Indonesia signed Memorandum of Understanding in Batam.



3 Desember 2018

Pelabuhan Kuala Tanjung lakukan ekspor perdana.

Kuala Tanjung Port Services Its First Export of Container.

PENGHARGAAN TAHUN 2018

AWARDS IN 2018



25 Januari 2018

Penghargaan Apresiasi CSR Award 2017 / 2017 CSR Award
Appreciation for Pelindo 1



7 Februari 2018

Bronze Winner untuk Gema Pelabuhan dalam Inhouse
Magazine Awards (InMA) 2018 / Bronze Winner for Pelindo
1 Corporate Magazine at Inhouse Magazine Awards (InMA)
2018



29 Maret 2018

Tiga Penghargaan di Ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018
/ Three awards for Pelindo 1 at PR Indonesia Awards (PRIA)
2018



20 April 2018

GM BICT Aris Zulkarnain Raih Predikat Marketeer of The
Year / General Manager of BICT Aris Zulkarnain awarded
Marketeer of the Year 2018.



25 April 2018

Penghargaan Revolusi Mental Award BUMN 2018 / 2018
Revolusi Mental Award BUMN awarding for Pelindo 1



30 April 2018

Penghargaan Apresiasi PKBL Warta Ekonomi 2018 / Pelindo 1
earned Apresiasi PKBL Warta Ekonomi 2018 Award.



2 Mei 2018

Promising Company In Strategic Marketing Bronze Award pada BUMN Marketeer Award 2018 / Audience Visit of Pelindo 1 Board of Directors to the Office of the Governor of North Sumatera



7 Mei 2018

HR Excellence Award 2018 oleh Majalah SWA Bekerjasama dengan LM-FEUI / Signing of Pelindo 1 Strategic Investment Financing Cooperation.



17 September 2018

11 Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Transportasi Kementerian Perhubungan / 11 awards of The 2018 Excellent Service Unit of Public Service of Sector Transportation from the Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi.



21 November 2018

Pelindo 1 Meraih 4 Penghargaan BUMN Branding & Marketing Award 2018 / Pelindo 1 wins 4 Awards at 2018 BUMN Branding & Marketing Award.



6 Desember 2018

Dua penghargaan TOP IT & TELCO 2018 dengan kategori: TOP IT on Back End & Front End 2018 serta TOP Leader on IT Leadership 2018 / Two awards of TOP IT & TELCO 2018 with categories: TOP IT on Back End & Front End 2018 and TOP Leader on 2018 IT Leadership



17 Desember 2018

Pelindo 1 Meraih Penghargaan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Sumatera Utara / North Sumatera Office of Cultural and Tourism Award for Pelindo 1

ALAMAT KANTOR

OFFICE ADDRESSES

Kantor Pusat

Head Office Address

Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241
Sumatera Utara
Telp. : +62 61 661 0220 (Hunting)
Fax. : +62 61 661 0906
Website: <http://www.pelindo1.co.id>
Email : pelabuhan1@pelindo1.co.id

Kantor Perwakilan

Representative Office

Menara Ravindo Lt. 10
Jl. Kebun Sirih Kav. 75
Jakarta Pusat 10340
Telp. : +62 21 3190 3291
Fax. : +62 21 3190 3290
Email : perwakilan.jakarta@pelindo1.co.id

ALAMAT KANTOR CABANG DAN UNIT USAHA

ADDRESS OF BRANCH OFFICES AND BUSINESS UNITS

Provinsi Aceh/ Aceh Province

Cabang Pelabuhan Malahayati

Malahayati Port Branch

Jl. Laksamana Malahayati KM 32,5
Desa Lamreh Krueng Raya Aceh Besar 23301
Telp. (0651) 23166 / 638686
Fax. (0651) 23166
Email : malahayati@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Meulaboh

Meulaboh Port Branch

Jl. Pocut Baren No. SK - III/04
Meulaboh Aceh Barat 23611.
Telp. (0655)- 7551842
Fax. (0655)- 7551842
Email : meulaboh@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Lhokseumawe

Lhokseumawe Port Branch

Jl. Pelabuhan Umum, Krueng Geukeuh
Lhokseumawe 24354 Aceh Utara.
Telp. (0645) 56816
Fax. (0645) 57721
Email : lhokseumawe@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa

Kuala Langsa Port Branch

Jl. Pelabuhan Kuala Langsa
Aceh Timur 24451
Telp. (0641) 22291
Fax. (0641) 22291
Email : kualalangsa@pelindo1.co.id

Provinsi Sumatera Utara/ South Sumatera

Kawasan Pelabuhan Pangkalan Susu

Pangkalan Susu Port Branch

Jl. Pelabuhan No. 3 Pangkalan Susu
Telp. (0620) 51018
Email : pangkalansusu@pelindo1.co.id

Belawan International Container Terminal (BICT)

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414

Telp. (061) 6940032, 6940031
Fax. (061) 6941942
Email: bictblw@pelindo1.co.id

Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB)

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414

Telp. (061) 6940755
Fax. (061) 6940754
Email: tpkdblw@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Belawan

Jalan AR.Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara, 20411

Telp. (061) 6941919, 6941412,
Fax. (061)6941300
Email: belawan@pelindo1.co.id
Website: <http://belawan.pelindo1.co.id>

Cabang Pelabuhan Gunungsitoli

Gunungsitoli Port Branch

Jl. Kom. Laut Yos Sudarso, Gunungsitoli
Telp. (0639) 21662
Fax. (0639) 21662
Email : gunungsitoli@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Sibolga

Sibolga Port Branch

Jl. Horas Sibolga, Sibolga. 22532
Telp. (0631) 3270417
Fax. (0631) 24164
Email : sibolga@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
 Tanjung Balai Asahan Port Branch
 Jl. Pelabuhan Teluk Nibung, Tg. Balai Asahan 21332
 Telp. (0632) 92022
 Fax. (0632) 95083
 Email : tbasahan@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung
 Kuala Tanjung Port Branch
 Jl. Pelabuhan Kuala Tanjung 21257
 Telp. (0622) 31002
 Fax. (0622) 620282
 Email: kualatanjung@pelindo1.co.id

Unit Galangan Kapal
 Shipyard Unit
 Jl. Sumatera No. 1 Belawan 20411
 Telp. (061) 6941320
 Fax. (061) 6944084
 Email : ugk@pelindo1.co.id

Provinsi Riau/ Riau Province

Cabang Pelabuhan Dumai
 Dumai Port Branch
 Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1, Dumai 28813
 Telp. (0765) 31469
 Fax. (0765) 31758
 Email: dumai@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Bagan Siapi-Api
 Bagan Siapi-Api Port Branch
 Jl. Utama Bagan Siapi-api
 Telp. (0767) 21056
 Email : bagansiapiapi@pelindo1.co.i

Cabang Pelabuhan Pekanbaru
 Pekanbaru Port Branch
 Jl. Saleh Abbas No 3 Pekanbaru 28152
 Telp. (0761) 22826
 Fax. (0761) 33711
 email: pekanbaru@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Rengat
 Rengat Port Branch
 Jl. Raya Kuala Cinaku, Rengat
 Telp. (0769) 21437
 Fax. (0769) 21437
 Email : rengat@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Tembilahan
 Tembilahan Port Branch
 Jl. Jend Sudirman No 76, Tembilahan 29212
 Telp. (0768) 21050
 Fax. (0768) 21020
 Email : tembilahan@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Kuala Enok
 Kuala Enok Port Branch
 Jl. Pelabuhan No. 1, Kuala Enok 29271
 Telp. (0768) 328441
 Email : kualaenok@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Sei Pakning
 Sei Pakning Port Branch
 Jl. Yos Sudarso No.2, Sei Pakning
 Telp. (0766) 91121
 Fax. (0766) 391470
 Email : seipakning@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Bengkalis
 Bengkalis Port Branch
 Jl. Yos Sudarso, No. 08 Bengkalis 28712
 Telp. (0766) 21267
 Fax. (0766) 21267
 Email : bengkalis@pelindo1.co.id

ALAMAT KANTOR | OFFICE ADDRESSES

Provinsi Kepulauan Riau / Riau Islands

Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Tanjung Balai Karimun Port Branch
Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661.
Telp. (0777) 23570
Fax. (0777) 325349
Email: tbkarimun@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Batam

Batam Port Branch
Jl. Kuda Laut No. 8, Batu Ampar- Batam 29452
Telp. (0778) 452729
Fax. (0778) 452730
Email: batam@pelindo1.co.id

Cabang Pelabuhan Tanjungpinang

Tanjungpinang Port Branch
Jl. Sri Bayintan No. 1, Kijang 29151
Email: tanjungpinang@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Pulau Sambu

Pulau Sambu Port Branch
Jl. Pelabuhan No. 2 Pulau Sambu 29411
Telp. (0771) 310059
Email : pulausambu@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Selat Panjang

Selat Panjang Port Branch
Jl. Pelabuhan Beran No1, Selat Panjang 28753
Telp. (0763) 31025
Fax. (0763) 31025
Email : selatpanjang@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Tanjung Uban

Tanjung Uban Port Branch
Jl. Akasia No. 1, Tanjung Uban
Telp. (0771) 81215
Pertamina UPTN 1 (Dinas Kepanduan)
Email : tanjunguban@pelindo1.co.id

Kawasan Pelabuhan Sei Kolak Kijang

Sei Kolak Kijang Port Area
Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1
Telp. (0771) 61359
Email : seikolakkijang@pelindo1.co.id

**ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, ENTITAS ASOSIASI DAN
ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA/
ADDRESS OF SUBSIDIARY ENTITIES/ ASSOCIATION
ENTITIES/ JOINT CONTROLLED ENTITIES**

PT Terminal Petikemas Indonesia

Gedung Kobexindo Tower, Lt 2
Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol
Jakarta 14430
Telp. (021) 6456301
Fax. (021) 6456302

PT Prima Indonesia Logistik

Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI,
Ujung Baru Belawan 20411
Telp. (061) 6940157 - 6941590
Fax. (061) 6940113 - 6941590
Email: primaindonesialogistik@pelindo1.co.id
Website: www.primaindonesialogistik.com

PT Prima Pengembangan Kawasan

Komplek Taman Putri Hijau B19 & 20
Jl. Putri Hijau Medan – 20111
Telp. (061) 6628088
Email : primakawasan@ptppk.co.id

PT Prima Terminal Petikemas

Jl. Kartini No 22 Medan 20152
Telp. (061) 4521187
Fax. (061) 4517787
Email: primacontainerterminal@primatpk.co.id
Website: <http://www.primatpk.co.id>

PT Prima Multi Terminal


Jl. Sei Bengawan No. 27 Medan
Telp. (061) 88817915
Fax. (061) 88817916
Email: corporate@primamultiterminal.com
Website: www.primamultiterminal.com

PT Prima Husada Cipta Medan

Jl. Stasiun No. 92 Belawan 20413
Telp. (061) 6941927
Fax. (061) 6941927
Website: <http://rspelabuhan.pelindo1.co.id>



Layanan Penundaan di Perairan Batam
Batam, Riau Islands



ANALISIS PEMBAHASAN MANAJEMEN

ANALYSIS OF MANAGEMENT

Keberadaan pelabuhan membuat kegiatan ekonomi suatu negara akan dapat menjadi lancar, karena berdasarkan fakta yang ada barang-barang eksport import sebagian besar dikirim menggunakan moda kapal laut.

The existence of port makes a country's economic activities smoothen, because since there are mostly imported export goods sent by sea.

TINJAUAN UMUM

GENERAL REVIEW

Pelabuhan merupakan salah satu prasarana transportasi yang cukup penting bagi sebuah negara, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia, sebab pelabuhan dapat membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhannya.

Keberadaan pelabuhan membuat kegiatan ekonomi suatu negara akan dapat menjadi lancar, karena berdasarkan fakta yang ada barang-barang ekspor import sebagian besar dikirim menggunakan moda kapal laut, yang berarti membutuhkan pelabuhan atau tempat untuk bertambat, meskipun rute perjalanan yang dituju dapat dilalui oleh moda transportasi lain. Dengan menggunakan jalur laut jumlah barang yang dapat diangkut oleh kapal laut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang dapat diangkut oleh moda transportasi lain seperti pesawat.

TINJAUAN KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Dalam perkembangan ekonomi global di tahun 2018, kawasan Asia termasuk yang terkena imbas dari ketidakpastian perekonomian dunia terutama negara-negara yang bertujuan ekspor. Ketidakpastian ini pula yang menyebabkan perkembangan ekonomi negara-negara di Asia menjadi lebih bervariasi apabila dibandingkan dengan di negara-negara maju di kawasan lainnya.

Hingga beberapa tahun mendatang, globalisasi akan terus berjalan, sehingga aktivitas perekonomian antar negara cenderung semakin membaik. Nilai perdagangan dunia akan semakin meningkat seiring spesialisasi peran yang terjadi, dengan negara-negara seperti China dan India akan berperan sebagai pusat pabrikasi produk-produk yang dikonsumsi negara berkembang, sehingga menyebabkan ekspansi kegiatan ekonomi dunia ke depan akan terpusat di Asia.

Hal ini akan membuat perubahan mendasar pergerakan produksi dan perdagangan dunia. Industri yang bergerak di bidang kontainer dan usaha sektor distribusi akan diuntungkan dengan perkembangan ini. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pelabuhan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam menangani arus produksi dan perdagangan. Namun juga membawa tantangan dalam penyediaan infrastruktur pelabuhan yang modern, penambahan fasilitas dan peralatan, penambahan panjang dermaga, penyediaan jalur koneksi ke darat, peningkatan kualitas layanan dan lingkungan hingga tingkat keamanan.

Tinjauan Kondisi Perekonomian Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang bergerak lambat, meskipun di beberapa negara menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Perbaikan ekonomi global tersebut dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik dari jalur perdagangan maupun jalur keuangan.

The port is one of the important transportation infrastructures for a country, especially for maritime countries such as Indonesia, because ports can help the country in increasing its economic growth.

The existence of port makes a country's economic activities smoothen, because since there are mostly imported export cargo sent by sea mode, which means it requires a port or place to tethering, even though the other travel routes can be traversed by other modes of transportation. By using the sea lane, there are more items that can be transported by ships compared to the amount of cargo that can be transported by other modes of transportation such as air plane.

REVIEW OF GLOBAL ECONOMIC CONDITION

In the global economic development in 2018, the Asian region is among those affected by the impact of uncertainty in economy world, especially countries that aim to export. This uncertainty also causes economic development in Asian countries become more varied when compared to developed countries in other regions.

Until the next few years, globalization will continue, so that activity the economy between countries tends to improve. The value of world trade will be increasing in line with role specialization occurs, with countries such as China and India will act as a center for manufacturing products consumed by developing countries, thus causing the expansion of world economic activity in the future to be centered in Asia.

This will make a fundamental change in world production and trade movements. Industries engaged in containers and distribution sector businesses will benefit with this development. This condition provides an opportunity for ports which capable to increase capacity in handling production and trade flows. but also bring challenges in the provision of modern port infrastructure, additions of facilities and equipment, also the length of the pier, providing a connection to land, improving service quality and the environment to the level of security.

Review of Indonesian Economic Condition
Indonesia's economic growth in general is still influenced by global economic slow moving conditions, even though in some countries there are signs of improvement. The improvement in the global economy can sustain Indonesian economy in the future, both on trading and financial lines.

Fundamentally, the economic condition of Indonesia is slowly and surely heading for better positions, although the growth tends to be stable. Indonesia experienced

Secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia perlahan dan pasti sudah menuju posisi yang lebih baik walaupun pertumbuhannya cenderung stabil. Indonesia mengalami pengaruh dari dinamika perekonomian global sebagaimana tergambar pada tren pertumbuhan ekonomi yang stabil sejak triwulan awal tahun 2018. Untuk keseluruhan tahun 2018, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17% (yoy), sedikit di atas pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 5,07%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan investasi dan kegiatan ekspor yang bertumbuh terbatas akibat dari masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas global. Berbeda dengan ekspor, konsumsi memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup stabil dan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari dalam negeri paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sedikit banyak mulai mempengaruhi penyerapan anggaran belanja negara secara optimal dan penyerapan investasi, namun perlambatan di sektor pertambangan, perkebunan dan properti masih menyumbang terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

TINJAUAN INDUSTRI PELABUHAN

Seiring berlakunya UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diharapkan hambatan masuk ke bisnis jasa kepelabuhanan kedepan semakin berkurang. Pada pengaturan bidang kepelabuhanan, UU tersebut bertujuan untuk penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, dan memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Dengan demikian baik pemerintah daerah maupun pihak swasta ke depan dapat juga melakukan kegiatan usaha yang selama ini hanya dilakukan oleh Perusahaan.

Indonesia yang memiliki sekitar 17 ribu pulau dan disatukan lautan yang luas, pelabuhan memiliki peran dan fungsi strategis yang sangat penting sebagai salah satu mata rantai (link) proses transportasi dari tempat asal barang/orang ke tempat tujuan, sebagai tempat pertemuan (interface) antar dua moda transportasi atau berbagai kepentingan yang saling terkait, sebagai pintu gerbang (gateway) suatu daerah/Negara serta juga berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Lebih dari itu, pelabuhan biasanya memberikan pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat), pelayanan handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro), pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang, pelayanan jasa penumpukan (general cargo, peti kemas, tangki, silo), pelayanan bunkering (mengisi perbekalan seperti air kapal, BBM) serta pelayanan persewaan alat dan/atau lahan industri. Dalam meningkatkan pengelolaan jasa pelabuhan tersebut, pemerintah saat ini berupaya memperbaiki kinerja moda

the influence of dynamics global economy as reflected in the stable trend of economic growth since the beginning of 2018. During 2018, Indonesia's economic growth is recorded grew by 5.17% (yoy), slightly above growth in 2017 which was 5.07%. The slowdown was influenced by slowing investment and limited growth export activities due to weakening world economic growth and declining global commodity prices. Unlike exports, consumption has a growth rate which quite stable and has become the foundation of national economic growth.

From inside of the country, the economic policy package issued by the government has started affecting the absorption of the state budget optimally as well as the absorption of investment, but the slowdown in mining, plantation, and property sectors still contributed to the slowing domestic economic growth.

REVIEW OF PORT INDUSTRY

Since the enactment of Law No. 17 of 2008 regarding Shipping, it is expected that barriers to entry the port business services in the future are decreasing. In port sector settings, the law aims to abolish the monopoly of port administration, separation between the functions of regulators and operators, and providing participation of local and private governments proportionally in the implementation of ports. Thus, the government as well as regions and the private sector in the future can also carry out business activities that so far only have been done by the Company.

Indonesia which has around 17 thousand islands and is united by a vast ocean, the port has a very important strategic roles and functions as one of the process links transportation from the place of origin of cargo/people to their destinations, as a meeting place (interface) between two modes of transportation or various interrelated interests, as a gate (gateway) of a region / country and also acts as the center of economic activity.

The port usually provides ship services (anchoring, pilot, ship holding, and mooring), loading and unloading handling services (containers, liquid bulk, dry bulk, general cargo, roro), embarkation services and passenger debarkation, stacking services (general cargo, containers, tanks, silos), bunkering services (filling supplies such as ship water, fuel) and equipment and/or industrial land rental services.

In improving the management of port services, the

TINJAUAN UMUM | GENERAL REVIEW

transportasi laut dan sistem operasional jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien. Perbaikan kinerja moda transportasi laut, pemerintah tengah mempersiapkan fasilitas pelabuhan yang memadai, kecukupan muatan kontainer dan menambah kedalaman laut. Sampai saat ini, rata-rata pelabuhan besar di Indonesia memiliki panjang dermaga dan kedalaman laut yang kurang memadai, sehingga tidak dapat menampung kapal laut yang bermuatan hingga 18.000 TEUs.

Selain itu, dalam rangka memperluas dan meningkatkan konektivitas antar daerah, Pemerintah hingga tahun 2019 akan membangun dan mengembangkan 32 pelabuhan, sehingga secara keseluruhan telah memiliki paling sedikit 3.000 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pelabuhan umum dengan skala besar Pemerintah telah menunjuk 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pelabuhan yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang saat ini mengelola 17 pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang mengelola 16 pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang mengelola 17 pelabuhan dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang mengelola 25 pelabuhan.

Sebagai upaya menciptakan sistem operasional jasa pelabuhan yang efektif dan efisien, semua BUMN kepelabuhanan telah menanda-tangani nota kesepahaman yang mencakup sinergi operasional pelabuhan, sinergi sistem informasi terkait pelayanan jasa dan kepelabuhanan serta sinergi dalam bentuk penyamaan tarif, terutama pada layanan internasional. Sinergi tersebut juga akan dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menghadapi seluruh tantangan dan peluang yang ada, Pelindo 1 telah memanfaatkan kekuatan dan mengatasi sejumlah keterbatasan dengan fokus pada peningkatan peran dan fungsi strategis pelabuhan melalui pengembangan hard infrastructure dan soft infrastructure. Salah satu peran yang menjadi fokus Pelindo 1 saat ini adalah pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2018 tentang penugasan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN BISNIS UTAMA PERUSAHAAN

Dalam pengembangan bidang ekonomi, pelabuhan bukan hanya sebagai tempat merapat kapal melainkan juga dapat berfungsi untuk tempat penyimpanan barang seperti tempat penyimpanan peti kemas, karena selain sebagai prasarana transportasi manusia pelabuhan juga menjadi prasarana transportasi barang. Pada dasarnya jasa pelayanan pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpang).

government is currently improving the performance of sea transportation modes and the operational system of port services to become more effective and efficient. In improving of sea transportation mode, the government is currently preparing adequate port facilities, adequate container load and increasing sea depth. Recently, the average large port in Indonesia has inadequate dock length and sea depth, therefore it can not accommodate sea vessels that are loaded up 18,000 TEUs.

Furthermore, in order to expand and improve connectivity between regions, the Government's planning until 2019, they will build and develop 32 ports, so overall at least 3,000 ports spread throughout Indonesia. For large-scale public ports, Government has appointed 4 (four) Business Entities State-Owned Enterprise (BUMN) in the field of ports, consisting of PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero), which currently manages 17 ports, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which manages 16 ports, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), which manages 17 ports and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), which manages 25 ports.

As an effort to create an effective and efficient port service operational system, all The port state BUMN has signed a memorandum of understanding which includes synergy of port operations, information system synergy related to services and ports as well as synergy in the form of equalization in tariffs, especially on international services. The synergy also will be carried out in the development of human resources.

To deal with all the existing challenges and opportunities, Pelindo 1 has utilized strength and overcome a number of limitations with a focus on improving roles and strategic functions of ports through the development of hard infrastructure and soft infrastructure. One of the role that become a main focus of Pelindo 1 is the development of the Kuala Tanjung port, which is integrated with industrial estates as mandated by the Presidential Regulation Number 81 of 2018 concerning the assignment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for Acceleration Construction and Operation of Kuala Tanjung Ports and Industrial Estates in the Province of North Sumatra.

REVIEW OF COMPANY'S MAIN BUSINESS

In the development of economy, ports are not only used as a place for a ship to dock, but also can function as storage for cargo and supplies, such as container storage, because usually other than as a transportation for people, port also become transportation infrastructure for cargo. Essentially, the services provided by a port are services for ships and cargo (cargo and passengers).

Kegiatan usaha Pelindo 1 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Jasa kepelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 1 terbagi dalam 7 (tujuh) pilar utama, yaitu:

1. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Kapal

Jasa Pelayanan Kapal adalah jasa pelabuhan yang diberikan kepada kapal yang datang di Pelabuhan Umum (Pelum) dan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) baik untuk berlabuh diperairan maupun bersandar di dermaga. Pada bidang usaha ini, Pelindo 1 menyediakan dan memberikan jasa pelayanan kapal dalam bentuk jasa labuh, pandu, tunda, dan tambat terhadap kapal luar negeri dan kapal dalam negeri yang melakukan aktivitas di pelabuhan. Layanan kapal juga diberikan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan jasa dermaga, penyediaan dan pelayanan pengisian bahan bakar minyak dan penyediaan dan pelayanan logistik.

Kunjungan kapal luar negeri selama 5 (lima) tahun terakhir menurut satuan call mengalami tumbuh rata-rata -2,05% setiap tahun dan menurut satuan Gross Tonase (GT) tumbuh rata-rata -9,61% setiap tahun. Adapun kunjungan kapal dalam negeri menurut satuan call tumbuh dengan rata-rata -1,38% dan menurut satuan Gross Tonase (GT) mengalami peningkatan dengan tumbuh rata-rata 10,32% setiap tahun.

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kunjungan Kapal Luar Negeri Foreign Ship Calls	Call	20.446	19.386	21.152	19.614	18.662	(2,05)
		GT	103.270.045	100.913.658	114.517.93	66.897.681	68.925.678	(9,61)
2	Kunjungan Kapal Dalam Negeri Domestic Ship Calls	Call	3.660	50.872	43.934	48.375	50.764	(1,38)
		GT	61.909.170	60.488.297	62.302.072	80.413.905	91.685.138	10,32
3	Jumlah Kunjungan Kapal Total Ship Calls	Cal	74.106	70.258	65.626	67.989	69.426	(1,62)
		GT	165.179.215	61.401.955	76.820.002	147.311.586	160.610.816	0,70

2. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Peti Kemas

Jasa pelayanan Peti Kemas adalah jasa pelabuhan yang diberikan kepada kapal yang akan melakukan kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan.

Pelindo 1 business activities as stipulated in the Decree of the Minister of Transportation No. KP 133 of 2011 dated March 2, 2011 regarding Granting Business Permits to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is carrying out port and other business services, which supports the achievement of company goals. Port services managed by Pelindo 1 divided into 7 (seven) main pillars, namely:

1. Ship Service Business Field

Ship Service is a port service provided for ships which arriving at Public ports (Pelum) and in terminals for self-interest (TUKS) both for sailing in the water or leaning on the dock. In this field of business, Pelindo 1 provides ship services in the form of anchoring, pilot, ship holding, and mooring for foreign and domestic vessels that carrying out activities at the port. Ships service are also provided in the form of docks, provision and oil refueling services and logistics supply and services.

Foreign ship calls for the last 5 (five) years according to the call unit have grown on average of -2.05% every year and according to Gross Tonnage (GT) units it grows on average of -9.61% every year. Domestic ship calls according to call units have grown with an average of -1.38% and according to gross tonnage (GT) units increased with grew by an average of 10.32% every year.

2. Container Services Business Field

Container services are port services provided to vessels that will carry out container loading and unloading activities at the port.

TINJAUAN UMUM | GENERAL REVIEW

Pelindo 1 menyediakan Belawan International Container Terminal (BICT), Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB), Terminal Parawang dan terminal lainnya untuk memberikan layanan jasa bongkar muat peti kemas dari/ atau ke kapal, layanan jasa penumpukan sementara muatan peti kemas pada ruangan terbuka dan/atau ruangan tertutup, layanan jasa bongkar serta layanan peti kemas lainnya berupa behandle, fumigasi, labelling, overbrenge, alih kapal dan pengurusan pembatalan dokumen.

Selama 5 (lima) tahun terakhir jasa bongkar muat peti kemas menurut satuan box tumbuh rata-rata -0,59% setiap tahun serta ditinjau dari satuan TEUs tumbuh dengan rata-rata -0,56%.

Pelindo 1 provides Belawan International Container Terminal (BICT), Container Domestic Terminal Belawan (TPKDB), Parawang Terminal and other terminals to provide container loading and unloading services from / or to ships, temporary stacking services container loads in open spaces and / or closed rooms, unloading services and other container services in the form of behandle, fumigation, labeling, overbrenge, transfer of ships, and management of document cancellation.

For the past 5 (five) years container loading and unloading services according to box units have grown by average of -0.59% every year and in terms of TEUs it grows by an average of -0.56%.

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Bongkar Muat Peti Kemas Container Loading and Unloading	Box	1.082.954	982.045	952.059	949.176	1.057.610	(0,59)
		TEUs	1.322.543	1.196.891	1.151.942	1.146.944	1.293.094	(0,56)

3. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Barang Umum

Jasa pelayanan barang umum adalah jasa pelabuhan yang diberikan untuk barang kemasan general cargo termasuk bag cargo dan unitized/pallet. Pelindo 1 menyediakan dan memberikan jasa layanan berupa fasilitas dermaga untuk kegiatan bongkar muat, fasilitas penyimpanan general cargo (gudang), tempat penimbunan barang, alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal.

Jasa bongkar muat barang umum selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata -13,71% setiap tahun.

3. General Cargo Service Business Field

General cargo services are port services provided for packed goods, general cargo, including bag cargo and unitized/pallet. Pelindo 1 provides services in the form of dock facilities for loading and unloading activities, storage facilities for general cargo (storage), warehouse for cargo, loading and unloading equipment, and loading and unloading port services to and from ship.

General cargo loading and unloading services for the past 5 (five) years have grown by an average of -13.71% every year.

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Bongkar Muat Barang Umum General Goods Loading and Unloading	Ton	77.140.809	46.906.025	54.832.851	49.890.399	42.777.373	(13,71)

4. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Curah Kering

Jasa pelayanan curah kering adalah jasa pelayanan pelabuhan yang diberikan untuk non petikemas barang kemasan curah kering (dry bulk). Pelindo 1 menyediakan dan memberikan jasa layanan berupa fasilitas dermaga untuk kegiatan bongkar muat, fasilitas penyimpanan curah kering (silo), alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal

Jasa bongkar muat barang kemasan curah kering selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 24,56 % setiap tahun.

4. Dry Bulk Service Business Field

Dry bulk services are port services provided for non-container dry bulk packaging cargo. Pelindo 1 provides services in the form of dock facilities for loading and unloading activities, storage facilities dry bulk (silo), loading and unloading equipment as well as port equipment and loading and unloading services from and to the ship.

Loading and unloading services for dry bulk packaging for the past 5 (five) years have grown on average of 24.56% per year.

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading	Ton	77.140.809	46.906.025	54.832.851	49.890.399	42.777.373	(13,71)

Bidang Usaha Jasa Pelayanan Curah Cair

Jasa pelayanan curah kering adalah jasa pelayanan pelabuhan yang diberikan untuk non petikemas barang kemasan curah kering (liquid bulk). Pelindo 1 menyediakan dan memberikan jasa layanan berupa fasilitas dermaga untuk kegiatan bongkar muat, fasilitas penyimpanan (silo), alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal. Pelindo 1 menyediakan dan memberikan jasa layanan berupa fasilitas dermaga untuk kegiatan bongkar muat, fasilitas penyimpanan curah cair (storage tank), alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal

Jasa bongkar muat barang kemasan curah kering selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 1,68 % setiap tahun.

5. Liquid Bulk Service Business Field

Dry bulk services are port services provided for non-container cargo in liquid bulk. Pelindo 1 provides services in the form of dock facility for loading and unloading activities, warehouse facility (silo), liquid bulk storage facility (storage tanks) and loading and unloading equipment, port equipment, and loading and unloading services to and from ships.

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading	Ton	9.446.447	9.600.943	10.659.135	7.828.598	10.096.713	1,68

5. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Penumpang

Bidang usaha Jasa pelayanan penumpang adalah jasa pelabuhan yang diberikan kepada penumpang angkutan laut. Pelindo 1 telah memberikan jasa pelayanan bagi penumpang yang menggunakan fasilitas pelabuhan berupa penyediaan dan pelayanan debarkasi/ embarkasi termasuk jasa layanan pas terminal penumpang dan layanan pas masuk pelabuhan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Jasa pelayanan penumpang terus meningkat dan tumbuh rata-rata 0,90% seiring dengan penambahan fasilitas ruang tunggu penumpang.

6. Passenger Service Business Field

Passenger business services are port services provided to sea transport passengers. Pelindo 1 provides services for passengers who uses port facilities in the form of debarkation/ embarkation services including passenger's terminal pass services and port entry pass services.

In the last 5 (five) years period passenger service has been increasing and the average growth is 0,90%, and waiting room for passengers has been expanded.

TINJAUAN UMUM | GENERAL REVIEW

No	Keterangan Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					% Rata-Rata Pertumbuhan CAGR % CAGR Average Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Arus Penumpang Passengers Traffic	orang person	5.130.137	5.218.553	5.440.151	5.022.971	5.316.860	0,90

6. Bidang Usaha Jasa Penunjang

Bidang usaha jasa penunjang lainnya yang disediakan dan diberikan Pelindo 1 antara lain berupa penyediaan dan/ atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, pelayanan yang diberikan kepada kapal-kapal Pelayaran Rakyat (Pelra), perusahaan properti, penyediaan air dan listrik, perusahaan alat penunjang kegiatan pelabuhan serta pemberian pelayanan kepada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam bentuk pemanduan, penundaan dan kerjasama pelayanan bongkar muat barang.

TINJAUAN POTENSI EKSPOR DAN IMPOR

Kebutuhan akan jasa transportasi laut di Indonesia juga masih diperkirakan akan menguat seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perdagangan ekspor dan impor di Indonesia diprediksi meningkat 1,00-2,50 kali pertumbuhan PDB Indonesia. Melihat besarnya perkembangan dan pertumbuhan perdagangan ekspor dan import Indonesia, masih memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya industri kepelabuhanan. Hal ini terlihat dari data transaksi ekspor dan impor yang menggunakan jasa kepelabuhanan.

Transaksi ekspor Indonesia melalui pelabuhan tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 574,47 juta ton, naik dibanding ekspor melalui pelabuhan tahun 2017 sebesar 541,80 juta ton. Sedangkan transaksi impor Indonesia melalui pelabuhan tahun 2018 tercatat mencapai 170,80 juta ton, naik dibanding impor melalui pelabuhan tahun 2017 sebesar 158,98 ton. Secara kumulatif transaksi ekspor dan impor Indonesia melalui pelabuhan 2018 mencapai 745,35 ton atau naik dibanding tahun 2017 sebesar 700,78 ton.

7. Support Service Business Field

Other supporting services provided by Pelindo 1 are including service center for distribution and consolidation of cargo, services given to Public Sailing vessels (Pelra), property procurement, provision of water and electricity, port support such as tools and service delivery for Self Interest Terminal (TUKS) in the form of scouting, delay and cooperation in loading and unloading services.

REVIEW OF EXPORT AND IMPORT POTENTIAL

The need for sea transportation services in Indonesia is expected to be increased in line with improved economic growth. The growth in export and import trading in Indonesia is predicted to increase 1.00-2.50 times Indonesia's GDP growth. By monitoring the magnitude of the development and growth of Indonesia's export and import trade, it still providing a big opportunity for the growth of the port industry. This can be seen from the data of export and import transactions that using port services.

Indonesian export transactions through ports in 2018 based on data from the Central Statistics Agency (BPS) were recorded as 574.47 million tons, it's an increase compared to exports through the port in 2017 of 541.80 million tons. While Indonesia's import transactions through ports in 2018 were recorded as reaching 170.80 million tons, an increase compared to imports through the port in 2017 of 158.98 tons. In a cumulative of Indonesian export and import transactions through the 2018 port is 745.35 tons or increased compared to 2017 which is 700.78 tons.

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia transportasi laut, dipandang sebagai pintu gerbang (gateway) suatu negara dan merupakan komponen dari kegiatan logistik barang dari laut ke darat atau sebaliknya. Selain itu, pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai strategi untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional.

Tinjauan dan pembahasan manajemen terkait dengan kinerja operasional perusahaan dibuat berdasarkan data dan informasi perkembangan pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh Pelindo 1 sepanjang tahun 2018. Guna mendapatkan gambaran secara utuh, maka data dan informasi pengelolaan bisnis perusahaan disajikan juga untuk kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

TINJAUAN SEGMENTASI USAHA PERUSAHAAN

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pelindo 1 menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) tentang "Pelaporan Segmen operasi" yang diterbitkan oleh Institut Akuntansi Indonesia dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 30 Juni 2014 oleh Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan. Manajemen telah menentukan segmen usaha perusahaan didasarkan pada laporan dan digunakan untuk mengambil keputusan strategis, sebagai berikut:

1. Segmentasi bisnis berdasarkan jenis usaha dengan mempertimbangkan sifat operasional bisnis dari perspektif jenis bisnis. Perusahaan membagi segmentasi usaha ini ke dalam segmen usaha jasa pelayanan peti kemas, segmen usaha jasa pelayanan kepelabuhan dan segmen usaha jasa pelayanan lainnya.
2. Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.
3. Segmentasi bisnis berdasarkan geografis dengan memperhatikan lokasi pelabuhan pada wilayah ekonomi. Perusahaan membagi segmentasi usaha ini ke dalam segmentasi wilayah Pelabuhan Aceh, wilayah pelabuhan Sumatera Utara, wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4. Segmentasi bisnis berdasarkan entitas anak dengan memperhatikan jumlah saham yang dimiliki oleh Pelindo 1. Perusahaan membagi segmentasi usaha ini ke dalam segmentasi Entitas Perusahaan Anak, Entitas Perusahaan Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi.

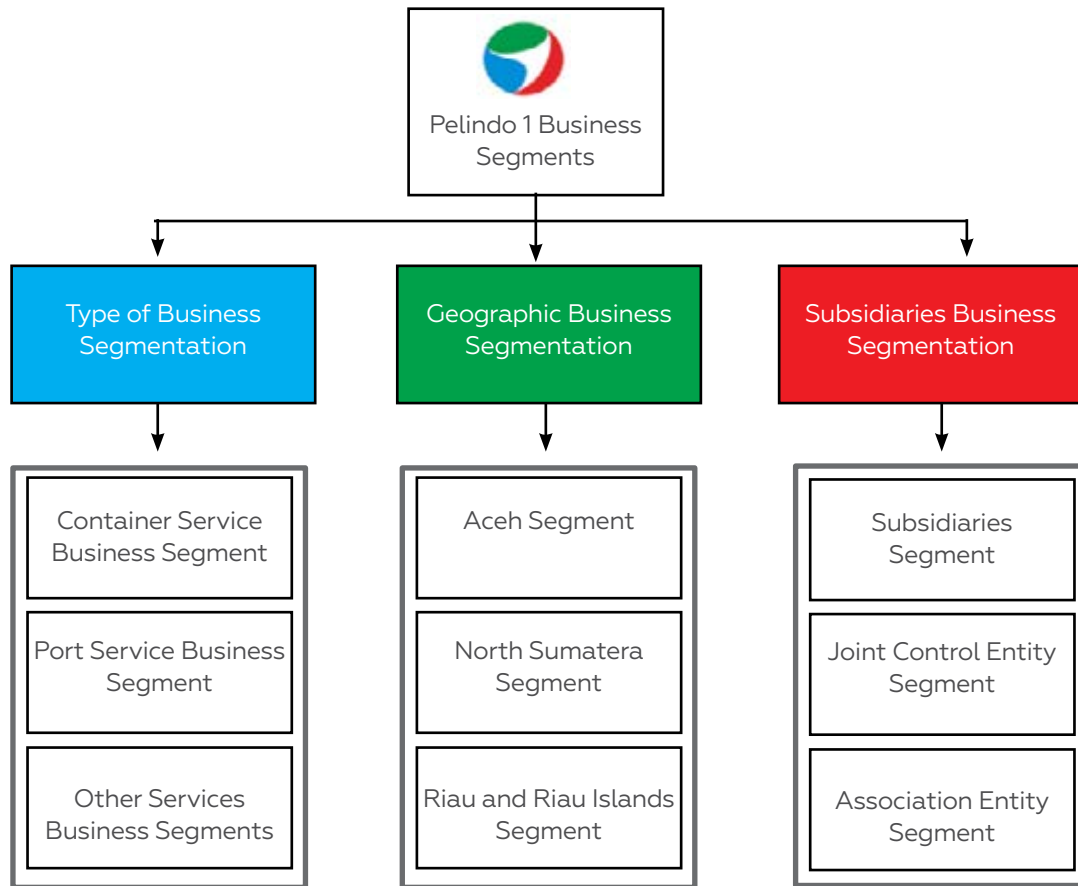
The port has a very important role in the world of sea transportation, as the gateway of a country and is a component of the logistics activities of cargo from sea to land or vice versa. In addition, the port in its activities has a strategy for industrial and trade growth and a business segment that capable to contribute in national economic development.

Management reviews and analysis related to the company's operational performance are made based on data and information on the development of business management carried out by Pelindo 1 throughout 2018. In order to get the full picture, the data and information of the company's business management also presents the activities of previous years.

REVIEW OF COMPANY'S BUSINESS SEGMENTATION

Segment information is prepared in accordance with the accounting policies applied in the preparation and presentation of financial statements. Pelindo 1 applies PSAK 5 (Revised 2009) regarding "Operating Segment Reporting" issued by the Indonesian Accounting Institute and in accordance with the Company's Article of Association based on Notary Deed Number 207 dated June 30, 2014 by Risna Rahmi Arifa, S.H., a Notary in Medan. Management has determined the company's business segment based on the statements, and made strategic decisions, as follows:

1. Business segmentation based on type of business by considering the business's nature of operations and perspective. The company divides the segment of business into; container service business segment, port service business segment, and other services business segments.
2. Business segment is a component of the company that can be distinguished in producing products or services (both products or services, or group of related products or services) and the component has risks and rewards that are different from the risks and rewards of the other segment.
3. Geographical business segmentation based on the port location on economic territory. The company divides this business segmentation into regional segmentation of Nanggroe Aceh Darussalam Port, Main Sumatra Port, Riau Port and Riau Islands Port.
4. Business segmentation based on subsidiaries by considering number of shares owned by Pelindo 1. The company divides this business segmentation into the segmentation of the Entity of Subsidiary Companies, Entity of Joint Control Companies, and Entity of Association.



SEGMENTASI JENIS USAHA

Dengan mempertimbangkan operasional bisnis perusahaan dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka informasi yang dilaporkan untuk tujuan penilaian kinerja lebih difokuskan pada kategori masing-masing jasa yaitu segmen usaha jasa petikemas, segmen usaha jasa kepelabuhanan dan segmen usaha jasa lainnya

Keseluruhan segmen jenis usaha tersebut merupakan kegiatan utama perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

1. Kinerja Operasional Segmen Jenis Usaha

Sebagai salah satu penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan terbaik di Indonesia, Pelindo 1 memiliki peranan kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya infrastruktur jasa kepelabuhanan yang memadai dan terpenuhinya pemberian pelayanan yang baik bagi konsumen, telah mampu mendorong peningkatan kinerja operasional perusahaan setiap tahun.

Selama tahun 2018, Pelindo 1 berhasil memberikan jasa pelayanan kapal yang berlabuh dan bersandar di dermaga sebanyak 69.426 call dan 160,61 juta Gross Tonase (GT).

BUSINESS TYPE SEGMENTATION

By considering the business operations of the company and presented in accordance to accounting policy which applied in the preparation and presentation of financial statements, information that is presented for the purpose of performance assessment is more focused on the category of each service, namely container services business segment, port services business segment and other service business segments.

The entire segment of the business type is the main activity of the company as it is stipulated in the company's articles of association.

1. Business Segment Operational Performance

As one of the best providers of port services in Indonesia, Pelindo 1 has a key role in ensuring the continuity and smoothness of sea transportation. With availability of adequate port services infrastructure and fulfillment of good service for consumers, Pelindo 1 has been able to stimulate increase on operations performance of the company every year.

During 2018, Pelindo 1 managed to provide ship services for ships that anchored and docked on the pier as 69,426 calls and 160.61 million Gross Tonnage (GT). Ship

Kunjungan kapal terbanyak melalui Pelabuhan Umum yaitu sebesar 73,80% dari seluruh kunjungan kapal dan kunjungan kapal dalam negeri merupakan kunjungan tertinggi mencapai 73,12% dari seluruh kunjungan kapal tahun 2018.

Bila dibandingkan dengan kunjungan kapal tahun 2017 meningkat 2,11% untuk satuan call dan untuk satuan GT juga mengalami kenaikan 9,03%. Hal ini disebabkan meningkatnya kunjungan call kapal antara lain di Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Pekanbaru dan Pelabuhan Tanjung Pinang.

Layanan peti kemas yang disediakan Pelindo 1 merupakan salah satu bisnis perusahaan yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha. Melalui peningkatan fokus kinerja peti kemas untuk memperkuat bisnis perusahaan selain angkutan lainnya, perusahaan berhasil mencapai jumlah bongkar muat peti kemas pada tahun 2018 sebesar 1.057,61 ribu box peti kemas dan 1.293,09 ribu teus. Dibandingkan dengan realisasi jasa bongkar muat peti kemas periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 949.176 box dan 1,15 juta teus terdapat peningkatan 11,42% untuk box dan 12,74% untuk teus.

Kenaikan operasional peti kemas di tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya operasional peti kemas di BICT dengan adanya tambahan kunjungan kapal dan throughput dari PT. Samudera Indonesia serta adanya peningkatan volume bongkar peti kemas isi di TPKDB. Juga peningkatan bongkar muat peti kemas di terminal Perawang dengan adanya peningkatan kegiatan ekspor dan impor komoditi pupuk NPK, kaca, plafond dan mesin pabrik serta meningkatnya kegiatan domestik komoditi tepung, semen, consumer good, keramik dan besi. Selain itu di terminal non peti kemas, kegiatan operasional bongkar muat peti kemas di tahun 2018 juga mengalami kenaikan dengan adanya kegiatan handling peti kemas dari Batam ke Belawan, peningkatan pasar peti kemas di Sibolga dan terealisasinya kerjasama dengan perusahaan pelayaran peti kemas domestik di Malahayati.

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa peti kemas, Pelindo 1 selama tahun 2018 telah melakukan pengembangan fasilitas bongkar muat, antara lain berupa:

- a. Pemasangan Barrier Gate In/Gate Out di Depo dan Gate In/Gate Out di terminal peti kemas Perawang serta penerapan sistem pelayanan peti kemas dan depo peti kemas di Cabang Pekanbaru.

visits mostly through Public Ports, which was up to 73.80% of total ship visits and domestic ship visits are the highest visit, which was 73.12% of all ship visits in 2018.

When compared with ship visits in 2017 it is increased by 2.11% for call unit, and for GT unit it also increased by 9.03%. This is due to the increase of ships visits call in Dumai Port, Pekanbaru Port, and Tanjung Pinang Port.

Container service provided by Pelindo 1 are one of the highest contributions to company's businesses income. By increasing focus on container service performance to strengthen the company business, beside other transportation service, the company succeeded in achieving the number of container loading and unloading in 2018 up to 1,057.61 thousand boxes of containers and 1,293.09 thousand TEUs. Compared with the realization of container loading and unloading services in the same period of previous year, which is 949,176 boxes and 1.15 million TEUs, this indicates an increase of 11.42% for the box and 12.74% for the TEUs.

The increase in container operations in 2018 is caused by the increase in container operations at BICT with the increase of ship visits and throughput from PT. The ocean Indonesia and also an increase in the volume of container loading and unloading in the TPKDB. The increase also performed in container loading and unloading at Perawang terminal in line with increase in activities of comoditied export and import of NPK fertilizer, glasses, ceiling plafonds, and factory machinery, and increasing activities of domestic commodities of flour, cement, consumer goods, ceramics and irons. Moreover, in the non-container terminal, container loading and unloading operations in 2018 also experienced an increase with the container handling activities from Batam to Belawan, the container market increase in Sibolga, and the realization of cooperation with domestic container shipping companies in Malahayati.

In order to improve container services, Pelindo 1 has improved loading and unloading facilities in 2018, namely:

- a. Installation of Barrier Gate In / Gate Out at Depot and Gate In / Gate Out at container terminals in Perawang and the implementation of a container service system and container depot at Pekanbaru

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

- b. Pengadaan jaringan LAN dan infrastruktur pendukung SIM Terminal Peti kemas di Cabang Malahayati, Sibolga, dan Tanjung Pinang.
- c. Pengadaan jaringan pre Gate ke Gate Utama di BICT yang diperlukan untuk melindungi kawasan BICT serta memastikan layanan telah dilaksanakan secara efektif dan optimal.
- d. Perluasan fasilitas dermaga Kawasan Pelabuhan Sei Kolak Kijang untuk melayani kapal peti kemas, sehingga dapat menampung shore crane dan fixed crane 150 ton. Pelabuhan Sei Kolak Kijang menjadi pelabuhan peti kemas di Pulau Bintan yang memback up kawasan kotamadya Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- e. Pengadaan 4 (empat) unit RTG, pengadaan 20 (dua puluh) unit terminal tractor dan pengadaan 2 (dua) unit Ship To Shore (STS) Crane di Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) untuk memperlancar kegiatan receiving/delivery, mengurangi masa penumpukan peti kemas dan meningkatkan peningkatan produktivitas layanan bongkar muat.

Realisasi jasa bongkar muat barang tahun 2018 tercapai sebanyak 42,77 juta ton, turun 14,27% atau setara dengan 7,12 juta ton dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 49,89 juta ton. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya kegiatan bongkar muat barang yang antara lain berupa ekspor bungkil, ekspor minyak sawit, impor gandum, impor pupuk curah dan bongkar batu bara melalui Pelabuhan Belawan dan kegiatan ekspor minyak sawit melalui Pelabuhan Dumai, serta bongkar LNG di Pelabuhan Lhokseumawe.

Selama tahun 2018 jumlah penumpang luar negeri dan dalam negeri tercatat sebanyak 5.316.860 orang, naik 5,85% atau bertambah 293.889 orang dari jumlah penumpang yang tercatat di tahun sebelumnya sebanyak 5.022.971 orang. Penumpang luar negeri tahun 2018 sebanyak 1.308.087 orang atau mencapai 24,60% dan penumpang dalam negeri sebanyak 4.008.773 orang atau mencapai 75,40% dari jumlah penumpang tahun 2018. Peningkatan jumlah penumpang ini sejalan dengan penataan dan pengembangan sejumlah terminal terutama terminal penumpang Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Terminal penumpang Sibolga dan Terminal penumpang Tanjung Balai Asahan sebagai upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.

Ketiga terminal ini memiliki peran penting sebagai terminal penyeberangan penumpang untuk akses domestik yang melayani penumpang antar pulau disekitarnya maupun

Branch.

- b. Procurement of LAN networks and SIM supporting infrastructure for Container Terminal in Branches of Malahayati, Sibolga, and Tanjung Pinang.
- c. The procurement of the Main Pre-Gate to Gate network in BICT that is needed to protect the BICT area and ensure that services have been carried out effectively and optimally.
- d. Expansion of dock facilities in Sei Kolak Kijang Port Area to improve service for container ships, that they can accommodate 150 tons of shore cranes and fixed cranes. Sei Kolak Kijang Port is a container port on Bintan Island which backs up the Tanjungpinang municipality and Bintan Regency area.
- e. Procurements of 4 (four) RTG units, 20 (twenty) terminal tractor units, and 2 (two) units of Ship To Shore (STS) Crane at the Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB) to facilitate receiving / delivery activities, reducing the containers accumulation period and increase the productivity of loading and unloading services.

The realization of goods loading and unloading services in 2018 reached 42.77 million tons, which is down to 14.27% or equivalent to 7.12 million tons compared to the previous year which was recorded at 49.89 million tons. This condition was mainly due to declining loading and unloading activities, which included export of palm kernel cake (PKC), exports of palm oil, wheat imports, bulk fertilizer imports and coal loading through the Belawan Port and palm oil export activities through the Dumai Port, and LNG unloading at Lhokseumawe Port.

During 2018 the number of foreign and domestic passengers was 5,316,860 persons, increased by 5.85% or 293,889 persons compared to the number of passengers recorded in the previous year of 5,022,971 persons. Overseas passengers in 2018 was 1,308,087 persons or increased by 24.60%, and domestic passengers was 4,008,773 persons or increased by 75.40% of the total passengers in 2018. This increase in passenger numbers was in line with the arrangement and development of numbers of terminals especially passenger terminal of Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Sibolga passenger terminal and Tanjung Balai Asahan passenger terminal, as an effort to increase comfort and safety for passengers.

These three terminals have an important role as

untuk akses internasional yang melayani penumpang menuju dan dari Malaysia dan Singapura. Di sektor pariwisata, penataan pelabuhan ini juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang akan mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau terutama sebagai pintu masuk turis dari Malaysia dan Singapura yang akan berwisata ke Danau Toba dan Batam.

Realisasi kegiatan operasional tahun 2018 yang meliputi arus kapal, arus peti kemas, arus non peti kemas (barang) dan arus penumpang dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

passenger crossing terminals for domestic access that facilitate passengers between islands surrounding as well as for international access that facilitate passengers to and from Malaysia and Singapore. In the tourism sector, structuring the port is also expected to increase the number of tourists who will visit tourist locations in North Sumatra and Riau Islands provinces primarily as the entrance for tourists from Malaysia and Singapore who will travel to Lake Toba and Batam.

The realization of operations activities in 2018 which includes vessel flows, container flows, non-container flows (goods) and passenger flows can be shown in the following table:

Tabel Kinerja Operasional Segmen Jenis Usaha

Table of Business Segments' Operational Performance

No	Kinerja Operasional Operational Performance	Satuan Unit	Realisasi 2017 2017 Realization	Realisasi 2018 2018 Realization	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Jasa Pelayanan Kapal Ship Service	Call	67.989	69.426	2,11
		GT	147.311.586	160.610.816	9,03
2.	Jasa Pelayanan Peti Kemas Container Service	Box	949.176	1.057.610	11,42
		Teus	1.146.944	1.293.094	12,74
3.	Jasa Pelayanan Barang Goods Service	Ton	49.890.399	42.777.373	(14,26)
4.	Jasa Pelayanan Penumpang Passenger Service	Orang	5.022.971	5.316.860	5,85

2. Kinerja Aset, Liabilitas dan Ekuitas Segmen Jenis Usaha

Aset segmen jenis usaha tahun 2018 mencapai Rp. 14.020.853 juta atau meningkat 64,81% dibanding dengan Rp. 8.507.143 juta aset segmen jenis usaha tahun 2017. Jumlah aset tahun 2018 terdiri dari aset peti kemas sebesar 5,78%, aset kepelabuhan sebesar 11,49%, aset lainnya sebesar 0,15% serta terdapat 82,58% aset perusahaan yang belum dapat dialokasikan.

Peningkatan aset kepelabuhan dari Rp. 1.610.538 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 2.479.597 juta di tahun 2018 atau naik 53,96% serta realisasi aset lainnya yang juga mengalami peningkatan dari Rp. 21.661 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 6.333.294 juta atau naik 29.138,23% disebabkan terutama oleh meningkatnya aset dalam penyelesaian diantaranya berupa penyelesaian bangunan fasilitas pelabuhan, pengadaan alat dan instalasi fasilitas pelabuhan serta pengadaan kapal.

2. Performance of Asset, Liability, and Equity of Business Segments

Assets of business segments in 2018 was Rp. 14,020,853 million or an increased as 64.81% compared to Rp. 8,507,143 million assets of the business segments in 2017. The total assets in 2018 consists of container assets of 5.78%, port assets of 11.49%, other assets of 0.15% and there are 82.58% of the company's assets cannot be allocated yet.

Increase in port assets from Rp. 1,610,538 million in 2017 to Rp. 2,479,597 million in 2018, increase as 53.96% and the realization of other assets which also increased from Rp. 21,661 million in 2017 to Rp. 6,333,294 million or an increase as 29,138.23% due mainly to the increase in assets in settlement including the completion of port facilities, procurement of equipment and installation of port facilities and procurement of ships.

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

Realisasi liabilitas segmen jenis usaha tahun 2018 sebesar Rp. 4.206.845 juta mengalami peningkatan 423,66% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 803.354 juta. Jumlah liabilitas ini terdiri dari liabilitas peti kemas 1,66%, liabilitas kepelabuhanan 9,40%, liabilitas lainnya sebesar 44,72% serta terdapat 44,22% liabilitas perusahaan yang belum dapat dialokasikan.

Jumlah liabilitas kepelabuhanan tahun 2018 sebesar Rp. 708.617 juta mengalami peningkatan 23,53% dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 573.650 juta serta liabilitas lainnya yang meningkat dari Rp. 23.831 juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.372.817 juta atau naik 14.053,07%. Hal tersebut antara lain disebabkan peningkatan utang usaha pada pihak ketiga berupa pengadaan Mobile Harbour Crane untuk 4 unit cabang Belawan, 2 unit untuk cabang Dumai dan 1 unit di Perawang, pengadaan Kapal Tunda 2 x 2 sebanyak 1 unit di cabang Batam, 1 unit cabang Belawan dan 2 unit cabang Tanjungbalai Karimun serta pembangunan kantor Belawan.

Ekuitas segmen jenis usaha tahun 2018 sebesar Rp. 5.343.549 juta mengalami peningkatan 225,93% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 1.639.453 juta. Peningkatan liabilitas disebabkan meningkatnya ekuitas petikemas 1,22%, meningkatnya ekuitas kepelabuhanan 70,80% dan meningkatnya ekuitas lainnya 136.327,51%. Jumlah ekuitas ini terdiri dari ekuitas peti kemas 9,45%, ekuitas kepelabuhanan 27,33%, ekuitas lainnya 45,69% serta 17,53% ekuitas perusahaan yang belum dapat dialokasikan.

Tabel Kinerja Keuangan Segmen Jenis Usaha (Rp Juta)

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018			% Naik/Turun % Increase/ Decrease		
		Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity
1.	Segmen Petikemas Container Segment	810.608	205.873	604.735	737.503	125.411	612.092	(9,02)	(39,08)	1,22
2.	Segmen Kepelabuhanan Port Segment	1.610.538	573.650	1.036.888	2.479.597	708.617	1.770.980	53,96	23,53	70,80
3.	Segmen Lainnya Other Segments	21.661	23.831	(2.170)	6.333.294	3.372.817	2.960.477	29138,23	14.053,07	136.327,51
	Jumlah/ Total	2.442.807	803.354	1.639.453	9.550.394	4.206.845	5.343.549	290,96	423,66	225,93

Realization of business segments liabilities in 2018 was Rp. 4,206,845 million experienced an increase of 423.66% from the previous year, which was recorded at Rp803,354 million. The total liabilities consist of container liabilities of 1.66%, port liabilities of 9.40%, other liabilities of 44.72% and there are 44.22% of company liabilities that cannot be allocated yet.

The total port liability in 2018 which was recorded was Rp. 708,617 million, an increase of 23.53% compared to the previous year amounting to Rp573,650 million and the number of other liabilities which increased from Rp. 23,831 million in 2017 to Rp. 3,372,817 million or an increase of 14,053.07%. This was partly due to an increase in debt to third parties in procurement of Mobile Harbor Crane of 4 units for Belawan branch, 2 units for the Dumai branch and 1 unit in Perawang, the procurement of 1 x 2 tugboats in Batam branch, 1 unit for Belawan branch and 2 units for Tanjungbalai Karimun branch, and an office building work in Belawan.

The equity of the business segments in 2018 was Rp. 5,343,549 million increased by 225.93% from the previous year which was recorded at Rp. 1,639,453 million. The increase in liabilities was caused by an increase in container equity by 1.22%, in port equity by 70.80% and in other equity by 136,327.51%. The total equity consists of container equity of 9.45%, port equity of 27.33%, other equity of 45.69% and there are 17.53% of company equity that cannot be allocated yet

Table of Business Segments Financial Position

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018			% Naik/Turun % Increase/ Decrease		
		Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity
4.	Tidak dapat dialokasikan Not Allocated	6.064.336	2.799.565	3.264.771	4.470.458	3.334.431	1.136.027	(26,28)	19,11	(65,20)
Jumlah seluruhnya Grand Total		8.507.143	3.602.920	4.904.223	14.020.853	7.541.275	6.479.578	64,81	109,31	32,12

3. Kinerja Pendapatan, Beban dan Laba Usaha Segmen Jenis Usaha

Tinjauan terhadap kinerja pendapatan usaha, beban usaha dan laba usaha dari segmen jenis usaha sebagai berikut:

a. Pendapatan Usaha Segmen Jenis Usaha

Sejalan dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, telah mendorong peningkatan pendapatan usaha dari sejumlah indikator kinerja operasional. Dari jumlah pendapatan usaha segmen jenis usaha tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 3.113.533 juta, diperoleh dari jasa peti kemas sebesar 49,33%, jasa kepelabuhan sebesar 49,59% dan jasa lainnya sebesar 1,08%.

Realisasi pendapatan usaha pelayanan jasa peti kemas tahun 2018 sebesar Rp. 1.536.099 juta meningkat hingga 14,56% atau setara dengan Rp. 195.194 juta dibanding dengan pendapatan usaha jasa peti kemas tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 1.340.815 juta. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan bongkar muat peti kemas di BICT terutama untuk kegiatan impor barang material, besi dan makanan ternak, meningkatnya kegiatan bongkar muat semen di TPKDB, dan peningkatan bongkar muat petikemas konsumsi rumah tangga di cabang pelabuhan Belawan, Sibolga dan Tanjung Pinang. Selain itu terdapat perubahan pola angkutan barang dari non peti kemas menjadi peti kemas yang menyebabkan pelayanan peti kemas meningkat, meskipun pendapatan pelayanan non peti kemas menurun.

Realisasi pendapatan usaha jasa kepelabuhan tahun 2018 sebesar Rp. 1.543.859 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp. 1.389.213 juta terdapat peningkatan pendapatan hingga 11,13% atau naik sebesar Rp. 154.646 juta. Tambahan pendapatan usaha ini disebabkan oleh pendapatan penambatan, pemanduan dan penundaan di sejumlah cabang pelabuhan sehubungan dengan peningkatan produksi gerakan kapal dan GT kapal seperti terjadi

3. Performance of Business Segments' Income, Expense, and Profit

Review of the performance of business income, operating expenses and income of business segments is as follows:

a. Income of Business Segments

In line with the improvement in service and development of port facilities, it has driven an increase in business income from several operational performance indicators. Of the total business income for the business type segment in 2018 which was recorded at Rp. 3,113,533 million, obtained from container services of 49.33%, port services of 49.59% and other services of 1.08%.

Realization of container service business income in 2018 was Rp. 1,536,099 million increased to 14.56%, equivalent to Rp. 195,194 million compared to the previous year's container service business income which was recorded at Rp. 1,340,815 million. This condition was caused by an increase in container loading and unloading activities in the BICT mainly for importing material goods, iron and livestock food, increasing cement loading and unloading activities in the TPKDB, and increasing loading and unloading of household consumption in the ports of Belawan, Sibolga and Tanjung Pinang. In addition, there is a change in the pattern of transportation of goods from non-container to container, which causes container services to increase, even though non-container service revenues decreased.

Realization of port service business income in 2018 was Rp. 1,543,859 million compared to the previous year which reached Rp. 1,389,213 million there was an increase in income up to 11.13% or Rp. 154,646 million. This additional operating income is due to revenue from vessels' anchoring, piloting and holding in several port branches due to increased production of ship and GT ship movements as

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

di cabang Dumai, Lhokseumawe, Kuala Tanjung, dan Tembilahan.

Adapun realisasi pendapatan usaha jasa lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 33.665 juta dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 21.079 juta terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp. 12.586 juta atau tumbuh 59,71%. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan pendapatan atas Sewa Lahan & Bangunan/Bagian Bangunan (Properti Investasi) di cabang Belawan, Dumai, Kuala Tanjung, dan Sibolga, penambahan pendapatan Sewa Aset, Peralatan dan Ruang (Non Properti Investasi) di cabang Belawan, Tanjung Pinang, Dumai, Tanjung Balai Karimun dan Lhokseumawe serta penambahan pendapatan perusahaan Jasa Listrik/Power Plant dan Air.

b. Beban Usaha Segmen Jenis Usaha

Jumlah beban usaha tahun 2018 sebesar Rp. 1.917.551 juta, meningkat 13,89% dari Rp. 1.683.705 juta. Beban ini teralokasikan pada beban usaha jasa peti kemas sebesar 25,02%, jasa kepelabuhan sebesar 46,99% dan jasa lainnya sebesar 27,99%.

Realisasi beban usaha jasa peti kemas tahun 2018 Rp. 479.764 juta menurun hingga 3,18% atau setara dengan Rp. 15.750 juta dibandingkan dengan beban usaha jasa peti kemas tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 495.514 juta serta realisasi beban usaha jasa kepelabuhan tahun 2018 sebesar Rp. 900.977 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 749.197 juta terdapat peningkatan hingga 20,26% atau naik sebesar Rp. 151.780 juta. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok sebesar 9,73% dan kenaikan beban pemasaran sebesar 0,06%.

Adapun realisasi beban usaha jasa lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 536.810 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 438.994 juta terdapat penambahan beban usaha sebesar Rp. 97.816 juta atau tumbuh 22,28%. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 9,77%.

c. Laba Usaha Segmen Jenis Usaha

Sejalan dengan optimalisasi pendapatan usaha dan efisiensi beban usaha yang dilaksanakan oleh manajemen, telah mendorong peningkatan laba usaha perusahaan.

Realisasi laba usaha dari jasa peti kemas sebesar Rp.

occurred in the Dumai, Lhokseumawe, Kuala Tanjung and Tembilahan branches.

The realization of other service business income in 2018 was Rp. 33,665 million compared to the previous year of Rp. 21,079 million there was an increase of income of Rp. 12,586 million or grew for 59.71%. This is partly due to changes in income for Leasing of Land & Buildings/Building Parts (Investment Properties) in Belawan, Dumai, Kuala Tanjung, and Sibolga branches, additional income for Rental Assets, Equipment and Room (Non-Investment Property) in Belawan, Tanjung Pinang, Dumai, Tanjung Balai Karimun and Lhokseumawe as well as additional concession services for Electricity/ Power Plant and Water.

b. Operating expenses of Business Segments

The total operating expenses in 2018 was Rp. 1,917,551 million, an increase of 13.89% from Rp. 1,683,705 million. This expense was allocated to container service operating expenses of 25.02%, port services of 46.99% and other services of 27.99%.

The realization of container service operating expenses in 2018 was Rp. 479,764 million decreased to 3.18% or equivalent to Rp. 15,750 million compared to the container service operating expenses of the previous year which was recorded at Rp. 495,514 million and the realization of port service operating expenses in 2018 was Rp. 900,977 million compared to the previous year which reached Rp. 749,197 million, an increase by 20.26% or Rp. 151,780 million. This condition was mainly due to an increase in cost of goods by 9.73% and an increase in marketing expenses by 0.06%.

The realization of other service operating expenses in 2018 was Rp. 536,810 million compared to the previous year of Rp. 438,994 million there were increase in expenses of Rp. 97,816 million or grew by 22.28%. This was partly due to an increase in general and administrative expenses of 9.77%.

c. Profit of Business Segments

In line with the optimization of business income and the efficiency of operating expenses carried out by the management, it has driven the increase in the company's operating profit.

1.056.245 juta meningkat hingga 24,95% dari perolehan laba tahun 2017 yang realisasinya sebesar Rp. 845.301 juta. Jasa peti kemas memberikan kontribusi sebesar 88,32% dari seluruh perolehan laba usaha tahun 2018.

Realisasi laba usaha jasa kepelabuhan sebesar Rp. 642.882 juta hanya meningkat 0,45 % dari laba tahun sebelumnya sebesar Rp. 640.016 juta. jasa kepelabuhan menyumbang laba usaha sebesar 53,75% dari seluruh perolehan laba usaha tahun 2018.

Adapun jasa lainnya pada tahun 2018 mengalami kerugian usaha sebesar Rp. 503.145 juta meningkat hingga 20,39% dari kerugian usaha jasa lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp. 417.915 juta.

Realization of operating profit from container services in 2018 was Rp. 1,056,245 million increased to 24.95% from profit in 2017, which was Rp. 845,301 million. Container services contributed 88.32% of the total operating profit in 2018.

Realization of port's operating profit of Rp. 642,882 million, only increased by 0.45% from the previous year's profit of Rp. 640,016 million. Port services contributed in operating profit by 53.75% in 2018.

Other services in 2018 suffered a business loss of Rp. 503,145 million increased to 20.39% from the loss of other service businesses in the previous year of Rp. 417,915 million.

Tabel Kinerja Keuangan Segmen Jenis Usaha (Rp Juta)

Table of Business Segments' Financial Performance

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018			% Naik/Turun		
		Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expenses	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expenses	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expenses	Laba Usaha Operating profit
1.	Segmen Peti Kemas Container Segment	810.608	205.873	604.735	737.503	125.411	612.092	(9,02)	(39,08)	1,22
2.	Segmen Kepelabuhan Port Segment	1.610.538	573.650	1.036.888	2.479.597	708.617	1.770.980	53,96	23,53	70,80
3.	Segmen Lainnya Other Segments	21.661	23.831	(2.170)	6.333.294	3.372.817	2.960.477	29138,23	14.053,07	136.327,51
	Total	2.442.807	803.354	1.639.453	9.550.394	4.206.845	5.343.549	290,96	423,66	225,93
4	Not Allocated	6.064.336	2.799.565	3.264.771	4.470.458	3.334.431	1.136.027	(26,28)	19,11	(65,20)
	Jumlah/ Grand Total	8.507.143	3.602.920	4.904.223	14.020.853	7.541.275	6.479.578	64,81	109,31	32,12

4. Rasio Net Profit Margin Segmen Jenis Usaha

Rasio Net Profit Margin bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh pendapatan usaha.

Rasio Net Profit Margin dari segmen jenis usaha pada tahun 2018 mencapai 38,41%. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 38,80%, margin laba segmen jenis usaha menurun sebesar 0,39%. Penurunan tersebut terutama terdapat pada lini jasa kepelabuhan yang mencapai rasio net profit margin pada tahun 2017 sebesar 46,07% menjadi 41,61% di tahun 2018. Meskipun demikian rasio Net Profit Margin untuk jasa peti kemas meningkat menjadi 69,77%

4. Net Profit Margin Ratio of Business Segments

The Net Profit Margin ratio aims to measure a company's ability to get a net profit from all business incomes.

The Net Profit Margin ratio of the business type segment in 2018 reached 38.41%. Compared to 2017 which reached 38.80%, the business segment profit margin decreased by 0.39%. The decline was mainly found in the port services line which achieved a ratio of net profit margin in 2017 of 46.07% decreased to 41.61% in 2018. Nevertheless, the ratio of Net Profit Margin for container services increased to 69.77% from 63 ,

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

dari sebesar 63,04% tahun sebelumnya sebagai dampak dari penyesuaian tarif penumpukan dan pemberlakuan tarif dangerous cargo di terminal BICT dan TPKDB

04% of the previous year as a result of stacking tariff adjustments and enforcement of dangerous cargo rates at the BICT and TPKDB terminals.

Tabel Rasio Net Profit Margin Segmen Jenis Usaha (Rp Juta)

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018		
		Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	%NPM	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	%NPM
1.	Jasa Peti Kemas Container Service	845.301	1.340.815	63,04	1.056.245	1.536.009	68,77
2.	Jasa Kepelabuhanan Port Service	640.016	1.389.213	46,07	642.882	1.543.859	41,61
3.	Jasa Lainnya Other Services	(417.915)	21.079	1.982,61	(503.145)	33.665	1.494,56
Jumlah/ Total		1.067.401	2.751.107	38,80	1.195.982	3.113.533	38,41

Tabel Net Profit Margin of Business Segments (Rp Million)

SEGMENTASI GEOGRAFIS

Dengan mempertimbangkan lokasi asal pelanggan pada wilayah ekonomi, Pelindo 1 membagi segmen usaha berdasarkan geografis terdiri dari wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara serta wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

GEOGRAPHIC BUSINESS SEGMENTATION

By considering the location of the customer's origin in the economic area, Pelindo 1 divides the geographical business segment consisting of Aceh region, North Sumatra region, and Riau and Riau Islands regions as mentioned in the following table:

Wilayah Region	Cabang Pelabuhan Port Branch	Kelas Cabang Branch Class	Kawasan Operasional Operations Area
Aceh	Malahayati	IV	Meulaboh
	Lhokseumawe	IV	Kuala Langsa
Sumatera Utara	Belawan	Utama	Pangkalan Susu/ Brandan
	Belawan International Container Terminal (BICT)	I	-
	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB)	I	-
	Kuala Tanjung	II	-
	Sibolga	III	-
Riau Dan Kepulauan Riau	Tanjung Balai Asahan	IV	-
	Tembilahan	V	Kuala Enok, Rengat
	Gunung Sitoli	V	-
	RS Pelabuhan	-	-
	Unit Galangan Kapal	-	-
Riau Dan Kepulauan Riau	Dumai	I	Bagan Siapi-API, Bengkalis
	Pekanbaru	II	Rengat
	Tanjung Balai Karimun	II	Selat Panjang
	Tanjung Pinang	II	Sei Kotak Kijang, Tanjung Uban
	Sei Pakning	III	-
	Batam	III	Pulau Sambu

1. Kinerja Operasional Segmen Geografis

Keluar masuknya kapal dan proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan memerlukan layanan yang lebih baik serta didukung oleh utilitas alat dan fasilitas pelabuhan yang memadai. Untuk proses implementasinya, Pelindo 1 telah melakukan sejumlah upaya perbaikan pelayanan dan operasional terutama dalam pelaksanaan pelayanan jasa pelabuhan.

2. Kinerja Aset, Liabilitas dan Ekuitas Segmen Geografis

Tinjauan kinerja aset, liabilitas dan ekuitas dari segmen geografis sebagai berikut:

a. Aset Segmen Geografis

Aset segmen geografis tahun 2018 mencapai Rp. 14.020.853 juta atau meningkat 64,81% dibanding dengan Rp. 8.507.143 juta aset segmen geografis tahun 2017. Jumlah aset tahun 2018 terdiri dari aset di wilayah Aceh sebesar 0,03%, aset di wilayah Sumatera Utara sebesar 95,35% serta aset di wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 4,62%.

Jumlah aset wilayah Aceh dalam tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 4.396 juta mengalami penurunan sebesar Rp. 14.423 juta atau turun 76,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 18.819 juta. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh penghapusbukuan aset tetap yang memiliki umur ekonomis sampai dengan 5 tahun atau lebih sehingga dilakukan reklasifikasi aset tetap ke aset tetap tidak produktif.

Jumlah aset wilayah Sumatera Utara dalam tahun 2018 sebesar Rp. 13.369.299 juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.443.525 juta atau naik 68,68% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 7.925.774 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset bangunan fasilitas pelabuhan, alat dan instalasi fasilitas pelabuhan khususnya dipelabuhan Belawan, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan, Belawan International Container Terminal, pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Sibolga.

Jumlah aset untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam tahun 2018 senilai Rp. 647.158 juta, meningkat 15,04% atau setara dengan Rp. 84.608 juta dari tahun yang lalu sebesar Rp. 562.550 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya alat dan instalasi fasilitas pelabuhan khususnya dipelabuhan Pekanbaru dan Dumai.

1. Operations Performance of Geographic Segments

The ship's traffic and the loading and unloading process that takes place at the port requires better services and supported by adequate utility tools and port facilities. For the implementation process, Pelindo 1 has made a number of efforts to improve service and operations, especially in the implementation of port services.

2. Performance of Asset, Liability, and Equity of Geographic Segments

Review of the performance of assets, liabilities and equity of the geographical business segments are as follows:

a. Assets of Geographic Business Segments

The assets of the geographical segments in 2018 reached Rp. 14,020,853 million or increased by 64.81% compared to Rp. 8,507,143 million assets in the geographical segments in 2017. The total assets in 2018 consist of assets in Aceh region of 0.03%, assets in North Sumatra region of 95.35%, and assets in Riau region and Riau Islands of 4.62%.

The total assets of the Aceh region in 2018 were recorded at Rp. 4,396 million decreased by Rp. 14,423 million or 76.64% compared to the previous year which was recorded at Rp. 18,819 million. This condition is partly due to write-offs of fixed assets that have economic lives up to 5 years or more so that reclassification of fixed assets to unproductive fixed assets.

The total assets of North Sumatra in 2018 was Rp. 13,369,299 million increased by Rp. 5,443,525 million or 68.68% compared with the previous year which was recorded at Rp. 7,925,774 million. This is mainly due to the increasing assets of port facilities, equipment and port facilities installation especially in Belawan Port, Belawan Domestic Container Terminal, Belawan International Container Terminal, Kuala Tanjung port and Sibolga port.

Total assets for Riau and Riau Islands in 2018 were Rp. 647,158 million, increased by 15.04%, equivalent to Rp. 84,608 million from last year amounting to Rp. 562,550 million. This is mainly due to the increase in equipment and installation of port facilities, especially in the ports of Pekanbaru and Dumai.

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

b. Liabilitas Segmen Geografis

Dari jumlah liabilitas perusahaan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 7.541.275 juta, terdistribusikan pada wilayah Aceh sebesar Rp. 11.835 juta atau 0,16%, pada wilayah Sumatera Utara sebesar Rp. 7.229.219 juta atau 95,86% serta pada wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp. 300.222 atau 3,98% dari seluruh liabilitas perusahaan di tahun 2018.

Liabilitas wilayah Aceh tahun 2018 sebesar Rp. 11.835 juta jika dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 11.735 juta meningkat 0,85% atau setara dengan Rp. 100 juta. Liabilitas wilayah Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp. 7.229.219 juta meningkat 120,25% atau setara dengan Rp. 3.946.999 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.282.220 juta. Adapun liabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau menurun dari sebesar Rp. 308.965 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 300.222 juta di tahun 2018 atau turun 2,83%.

c. Ekuitas Segmen Geografis

Untuk jumlah ekuitas perusahaan tahun 2018, wilayah Aceh mencatatkan ekuitas negatif sebesar Rp. 7.439 juta atau kurang 205,01% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya liabilitas dalam rangka pengembangan fasilitas pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe. Ekuitas wilayah Aceh memberikan kontribusi negatif sebesar -0,11% dari jumlah ekuitas perusahaan tahun 2018.

Wilayah Sumatera Utara dalam tahun 2018 berhasil mencatatkan jumlah ekuitas sebesar Rp. 6.140.080 juta, meningkat sebesar 32,23% atau setara Rp. 1.496.526 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 4.643.554 juta. Ekuitas wilayah Sumatera Utara memberikan kontribusi sebesar 94,76% dari jumlah ekuitas perusahaan tahun 2018.

Jumlah ekuitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 346.936 juta, meningkat sebesar Rp. 93.351 juta atau 36,81% dari jumlah ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 253.585 juta. Ekuitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau memberikan kontribusi sebesar 5,35% dari jumlah ekuitas perusahaan tahun 2018.

Berikut rincian perkembangan posisi keuangan untuk setiap wilayah operasional:

b. Liabilities of Geographic Segments

The total liabilities of the company in 2018 which were recorded at Rp. 7,541,275 million, distributed in the territory of Aceh in the amount of Rp. 11,835 million or 0.16%, in the area of North Sumatra Rp. 7,229,219 million or 95.86% as well as in Riau and Riau Islands in the amount of Rp. 300,222 or 3.98% of all company liabilities in 2018.

The liability of Aceh region in 2018 was Rp. 11,835 million compared to the previous year of Rp. 11,735 million, increased by 0.85%, equivalent to Rp. 100 million. The liability of the region of North Sumatra in 2018 was Rp. 7,229,219 million, an increase of 120.25%, equivalent to Rp. 3,946,999 million from the previous year amounting to Rp. 3,282,220 million. The liabilities of Riau and Riau Islands have decreased from Rp. 308,965 million in 2017 to Rp. 300,222 million in 2018 or decreased by 2.83%.

c. Equity of Geographic Segments

For the total equity of the company in 2018, Aceh region recorded negative equity of Rp. 7,439 million or decreased by 205.01% compared the previous year. This condition was caused by an increase in liabilities in the context of developing port facilities in Malahayati and Lhokseumawe. The equity of the Aceh region contributed negatively at -0.11% of the total equity of the company in 2018.

The North Sumatra region in 2018 managed to record total equity of Rp. 6,140,080 million, an increase of 32.23% or equivalent to Rp. 1,496,526 million from the previous year which was recorded at Rp. 4,643,554 million. The equity of the North Sumatra region contributes 94.76% of the total equity of the company in 2018.

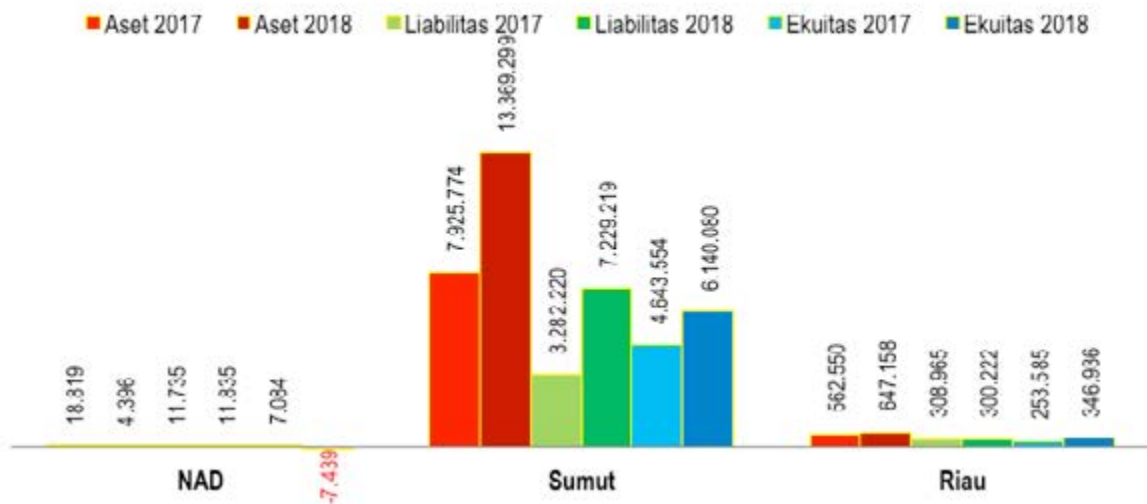
The total equity of Riau and Riau Islands in 2018 was recorded at Rp. 346,936 million, an increase of Rp. 93,351 million or 36.81% of the total equity in 2017 of Rp. 253,585 million. Equity in Riau and Riau Islands region contributed 5.35% of the total equity of the company in 2018.

The following are details of the development of financial positions for each operational area:

Tabel Kinerja Posisi Keuangan Segmen Geografis (Rp Juta)

Table of Financial Positions Performance of Geographic Segments (Rp Million)

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018			% Naik/Turun		
		Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Asset	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity
1.	Aceh	18.819	11.735	7.084	4.396	11.835	(7.439)	(76,64)	0,85	(205,01)
2.	Sumatera Utara	7.925.774	3.282.220	4.643.554	13.369.299	7.229.219	6.140.080	68,68	120,25	32,23
3.	Riau dan Kepulauan Riau	562.550	308.965	253.585	647.158	300.222	346.936	15,04	(2,83)	36,81
Jumlah/ Total		8.507.143	3.602.920	4.904.223	14.020.853	7.541.275	6.479.578	64,81	109,31	122,04



3. Kinerja Pendapatan, Beban Dan Laba Usaha Segmen Geografis

Tinjauan terhadap kinerja pendapatan usaha, beban usaha dan laba usaha dari segmen geografis sebagai berikut:

a. Pendapatan Usaha Segmen Geografis

Realisasi pendapatan usaha dalam tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 3.113.533 juta. Jumlah ini berasal dari pendapatan usaha wilayah Aceh sebesar Rp. 30.861 juta atau 0,99%, dari wilayah Sumatera Utara sebesar Rp. 2.266.277 juta atau 72,79% serta diperoleh dari wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp. 816.395 juta atau 26,22% dari seluruh pendapatan usaha tahun 2018.

Wilayah Aceh yang pada tahun 2018 berhasil memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 30.861 juta, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.001 juta atau turun 6,09% dibandingkan dengan perolehan pendapatan

3. Geographic Business Segments' Income, Expenses, and Profits

Review of the performance of business income, expenses, and profit of geographic business segments is as follows:

a. Income of Geographic Business Segments

Realization of business income in 2018 was Rp. 3,113,533 million. This amount comes from the business income of Aceh region of Rp. 30,861 million or 0.99%, from North Sumatra region of Rp. 2,266,277 million or 72.79% and obtained from Riau and Riau Islands in the amount of Rp. 816,395 million or 26.22% of all business income in 2018.

The Aceh region managed to obtain a business income of Rp. 30,861 million in 2018, a decrease of Rp. 2,001 million or decreased by 6.09% compared to the previous year's business income which was

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

usaha tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 32.862 juta. Cabang yang memberikan kontribusi terbesar adalah Cabang Malahayati.

Wilayah Sumatera Utara yang pada tahun 2018 memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 2.266.277 juta jika dibandingkan dengan perolehan pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp. 1.910.471 juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 355.806 juta atau naik 18,62%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pelayanan peti kemas dan pendapatan pelayanan barang non peti kemas di Cabang Belawan, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan dan Belawan Internasional Container Terminal.

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang pada tahun 2018 memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 816.395 juta lebih tinggi 1,07% atau setara dengan Rp. 8.621 juta dari pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp. 807.774 juta. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena meningkatnya proses bongkar muat barang di Cabang Dumai, Cabang Pekanbaru dan cabang Tanjung Balai Karimun serta meningkatnya arus penumpang di Batam.

- b. **Beban Usaha Segmen Geografis**
Realisasi beban usaha perusahaan tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 1.917.551 juta. Jumlah ini menjadi beban wilayah Aceh sebesar Rp. 34.565 juta atau mencapai 1,80%, beban wilayah Sumatera Utara sebesar Rp. 1.379.973 juta atau mencapai 71,97% serta menjadi beban Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp. 503.012 juta atau mencapai 26,23% dari seluruh beban usaha tahun 2018.

Beban usaha wilayah Aceh tahun 2018 sebesar Rp. 34.565 juta lebih tinggi 11,07% atau sama dengan Rp. 3.444 juta dibandingkan dengan beban usaha wilayah Aceh tahun 2017 sebesar Rp. 31.121 juta. Kenaikan beban usaha tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban sewa.

Wilayah Sumatera Utara membukukan beban usaha tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.379.973 juta dan dibandingkan dengan tahun yang lalu bertambah Rp. 188.721 juta atau naik 15,84% dari sebesar Rp. 1.191.252 beban usaha wilayah Sumatera Utara tahun 2017. Beban usaha wilayah Sumatera Utara membukukan beban usaha terbesar dengan kontribusi sebesar 71,97% dari seluruh beban usaha tahun 2018 yang sebesar

recorded at Rp. 32,862 million. The branch that made the biggest contribution was the Malahayati Branch.

The North Sumatra region which in 2018 obtained business income of Rp. 2,266,277 million when compared to the acquisition of business income in 2017 of Rp. 1,910,471 million increased by Rp. 355,806 million or 18.62%. This is due to increased revenue from container services and revenue from non-container goods services in Belawan Branch, Belawan Domestic Container Terminal and International Container Terminals.

Riau and Riau Islands regions in 2018 earned a business income of Rp. 816,395 million 1.07% higher or equivalent to Rp. 8,621 million higher than 2017 business income of Rp. 807,774 million. This increase in revenue was due to the increase in the process of loading and unloading goods at the Dumai, Pekanbaru Branch and Tanjung Balai / Karimun branch and the increasing flow of passengers in Batam.

- b. **Operating Expenses of Geographic Segments**
Realization of the company's operating expenses in 2018 reached Rp. 1,917,551 million. This amount is a operating expense for Aceh region of Rp. 34,565 million or reaching 1.80%, the operating expenses of North Sumatra region was Rp. 1,379,973 million or reached 71.97% and became the operating expenses of Riau and Riau Islands in the amount of Rp. 503,012 million or reaching 26.23% of all operating expenses in 2018.

The operating expense of the Aceh region in 2018 was Rp. 34,565 million which higher by 11.07% or equal to Rp. 3,444 million compared to the operating expenses of Aceh region in 2017 of Rp. 31,121 million. The increase in operating expenses was due to increase of rental expenses.

The North Sumatra Region recorded operating expenses in 2018 at the amount of Rp. 1,379,973 million and compared to the previous year of Rp. 188,721 million or an increase by 15.84% from Rp. 1,191,252 operating expenses in North Sumatra in 2017. The operating expenses of North Sumatra region was recorded the largest operating expenses with a contribution of 71.97% of the total operating

Rp. 1.917.551 juta. Realisasi dari beban usaha tersebut lebih banyak untuk membiayai kegiatan operasional pelabuhan termasuk pemanfaatan dan penggunaan fasilitas pelabuhan seperti di pelabuhan Belawan, Belawan International Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan.

Realisasi beban usaha wilayah Riau dan Kepulauan Riau tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 503.012 juta atau lebih tinggi 9,45% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2017 sebesar Rp. 348.181 juta. Kenaikan beban usaha tersebut terbanyak untuk pembiayaan kegiatan operasional pelabuhan Pekanbaru, Dumai dan Tanjung Pinang.

c. Laba Usaha Segmen Geografis

Realisasi laba usaha dalam tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 1.195.982 juta. Jumlah ini 12,05% lebih tinggi dari perolehan laba usaha tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.067.401 juta dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 886.304 juta atau 74,11% dari seluruh perolehan laba usaha tahun 2018.

Wilayah Aceh di tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 3.704 juta atau mengalami penurunan 312,75% dari laba usaha tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.741 juta. Kondisi ini disebabkan oleh realisasi beban usaha sebesar Rp. 34.565 juta lebih besar dari perolehan pendapatan usaha sebesar Rp. 30.861 juta.

Wilayah Sumatera Utara dalam tahun 2018 berhasil membukukan laba usaha sejumlah Rp. 886.304 juta, lebih tinggi 23,23% dari Rp. 719.219 juta perolehan laba usaha tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pelayanan jasa peti kemas pada cabang Belawan, Belawan International Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan.

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam tahun 2018 berhasil memperoleh laba usaha sebesar Rp. 313.383 juta atau menurun 9,99% dari perolehan laba tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 348.181 juta. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha tahun 2018 sebesar 1,07% tidak sebanding dengan peningkatan beban usaha sebesar 9,45%.

expenses in 2018 which amounted to Rp. 1,917,551 million. The realization of the operating expenses was mostly allocated to finance port operations including the utilization and use of port facilities such as in Belawan port, Belawan International Container Terminal and the Belawan Domestic Container Terminal.

The realization of the operating expenses in Riau and Riau Islands in 2018 were Rp. 503,012 million or higher by 9.45% compared to the operating expenses in 2017 of Rp. 348,181 million. The increase in operating expenses was mostly allocated to finance the operations of the ports of Pekanbaru, Dumai and Tanjung Pinang.

c. Operating Profit of Geographic Segments

Realization of business income in 2018 reached Rp. 1,195,982 million. This amount is 12.05% higher than the previous year's operating profit of Rp. 1,067,401 million with the largest contribution coming from the North Sumatra region, amounting to Rp. p886,304 million or 74.11% of the total operating income in 2018.

The region of Aceh in 2018 suffered a loss of Rp. 3,704 million or a decreased by 312.75% from the previous year's operating profit of Rp. 1,741 million. This condition was caused by the realization of operating expenses of Rp. 34,565 million greater than the acquisition of business income of Rp. 30,861 million.

The North Sumatra region in 2018 managed to record operating profit of Rp. 886,304 million, 23.23% higher than business income in 2017 which was Rp. 719,219 million. The increase was due the increased revenue from container services in Belawan branch, Belawan International Container Terminal and the Belawan Domestic Container Terminal.

The Riau and Riau Islands regions in 2018 managed to obtain operating profit of Rp. 313,383 million or decreased by 9.99% from the previous year's profit which was recorded at Rp. 348,181 million. This condition was caused by an increase in business income in 2018 by 1.07% not comparable with an increase in operating expenses of 9.45%.

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

Tabel Kinerja Pendapatan Usaha Segmen Geografi

Table of Performance of Geographic Business Segments

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018			% Naik/Turun		
		Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expense	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expense	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	Beban Usaha Operating expense	Laba Usaha Operating profit
1.	Wilayah NAD Aceh Region	32.862	31.121	1.741	30.861	34.565	(3,704)	(6,09)	11,07	(312,75)
2.	Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region	1.910.471	1.191.252	719.219	2.266.277	1.379.973	886.304	18,62	15,84	23,23
3.	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands Region	807.774	459.593	348.181	816.395	503.012	313.383	1,07	9,45	(9,99)
Jumlah/ Total		2.751.107	1.683.705	1.067.401	3.113.533	1.917.551	1.195.982	13,17	13,89	12,05

4. Rasio Net Profit Margin Segmen Geografis

Margin laba bersih (net profit margin) yang merupakan perbandingan antara laba usaha dan pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan tahun 2018 mencapai 38,41% dan mengalami penurunan 0,39% dari margin laba bersih tahun sebelumnya sebesar 38,80%. Capaian ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional masing-masing wilayah, meskipun wilayah Aceh menghasilkan penurunan laba usaha secara signifikan.

4. Net Profit Margin Ratio of Geographic Segments

Net profit margin, which is a comparison between operating profit and income obtained by the company in 2018, which reached 38.41% or decreased by 0.39% from the previous year's net profit margin of 38.80%. This achievement shows that the company has a large enough ability to benefit from the operations activities of each region, even though the Aceh region has resulted in a significant decrease in operating profit.

Tabel Rasio Net Profit Margin Segmen Geografis

Table of Net Profit Margin Ratio of Geographic Segments

No	Jenis Usaha Business Segments	2017			2018		
		Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	%NPM	Laba Usaha Operating profit	Pendapatan Usaha Business Income	%NPM
1.	Wilayah Aceh	1.741	32.862	5,30	(3,704)	30.861	(12,00)
2.	Wilayah Sumatera Utara	719.219	1.910.471	37,65	886.304	2.266.277	39,11
3.	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	348.181	807.774	43,10	313.383	816.395	38,39
Jumlah		1.067.401	2.751.107	38,80	1.195.982	3.113.533	38,41

SEGMENTASI ENTITAS ANAK

Untuk terus berkembang dan meningkatkan nilai perusahaan, Pelindo 1 terus memperkuat sinergi dan membangun kemitraan dengan entitas anak dalam beberapa bentuk implementasi sourcing strategy seperti antara lain implementasi program pengembangan berkelanjutan (joint continuous improvement program) yang dilakukan oleh entitas anak guna mendukung bisnis perusahaan dan mendorong peningkatan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Sejak tahun 2013 perusahaan telah memiliki sejumlah entitas anak yang bergerak di berbagai bidang usaha penunjang pelabuhan terdiri dari 3 (tiga) entitas anak perusahaan, 2 (dua) entitas pengendalian bersama dan 1 (satu) entitas asosiasi.

1. Kinerja Aset, Liabilitas Dan Ekuitas Segmen Entitas Anak

Aset entitas anak tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 7.177.912 juta mengalami kenaikan sebesar 32,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 5.429.265 juta. PT Prima Multi Terminal dalam tahun 2018 memiliki jumlah aset terbanyak yang mencapai Rp. 3.873.994 juta. Jumlah tersebut naik 21,21% dari aset PT Prima Multi Terminal di tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 3.196.113 juta dan memberikan kontribusi sebesar 53,97% dari seluruh aset entitas anak tahun 2018. Adapun jumlah aset yang terkecil dimiliki oleh PT Prima Husada Cipta Medan yang pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 28.046 juta naik 16,92% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 23.986 juta. Aset PT Prima Husada Cipta Medan adalah 0,39% dari seluruh aset entitas anak tahun 2018.

Entitas anak dalam tahun 2018 memiliki liabilitas sebesar Rp. 3.505.242 juta atau naik 68,66% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 2.078.245 juta. PT Prima Multi Terminal memiliki jumlah liabilitas terbanyak di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.406.869 atau naik 51,50% dari jumlah liabilitas tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 1.588.702 juta atau sebesar 68,66% dari jumlah liabilitas entitas anak tahun 2018 merupakan beban liabilitas PT Prima Multi Terminal. Adapun jumlah liabilitas terkecil terdapat pada PT Terminal Peti Kemas Indonesia yang di tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 1.551 juta atau naik 146,97% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 628 juta. Liabilitas PT Terminal Peti Kemas Indonesia adalah 0,04% dari seluruh jumlah liabilitas entitas anak tahun 2018.

Jumlah ekuitas entitas anak hingga tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 3.674.904 juta juga mengalami kenaikan 21,30%

SUBSIDIARIES SEGMENTATION

In order to continue to grow and increase company's value, Pelindo 1 continues to strengthen synergies and build partnerships with subsidiaries in several forms of sourcing strategy implementation such as the implementation of joint continuous improvement program carried out by subsidiaries to support the company's business and encourage improvement added value for both parties.

Since 2013 the company has several subsidiaries engaged in various port support business sectors consisting of 3 (three) subsidiaries, 2 (two) joint controlling entities and 1 (one) associate entity.

1. Performance of Assets, Liabilities and Equity of Subsidiary Entities

The assets of subsidiaries in 2018 were recorded at Rp. 7,177,912 million, an increase of 32.21% compared to the previous year which was recorded at Rp. 5,429,265 million. PT Prima Multi Terminal in 2018 has the highest number of assets reaching Rp. 3,873,994 million. The amount rose 21.21% from the assets of PT Prima Multi Terminal in 2017 which was recorded at Rp. 3,196,113 million and contributed 53.97% of all subsidiaries' assets in 2018. The smallest amount of assets is owned by PT Prima Husada Cipta Medan, which in 2018 was recorded at Rp. 28,046 million, increased by 16.92% from 2017 which was recorded at Rp. 23,986 million. The assets of PT Prima Husada Cipta Medan are 0.39% of all subsidiaries' assets in 2018.

Subsidiaries in 2018 have liabilities of Rp. 3,505,242 million or an increase of 68.66% compared to the amount of liabilities in 2017 which was recorded at Rp. 2,078,245 million. PT Prima Multi Terminal has the highest number of liabilities in 2018 which is Rp. 2,406,869 or an increase of 51.50% from the previous year's total liability which was recorded at Rp. 1,588,702 million or 68.66% of the total liabilities of subsidiaries in 2018 which is liabilities of PT Prima Multi Terminal. The smallest amount of liabilities is in the Indonesian Container Terminal, which in 2018 was recorded at Rp. 1,551 million or increased by 146.97% from the previous year which was recorded at Rp. 628 million. The liability of PT Indonesia Container Terminal is 0.04% of the total liabilities of subsidiaries in 2018.

The total equity of subsidiaries up to 2018 was recorded

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL REVIEW OF OPERATIONAL PERFORMANCE

dari jumlah ekuitas tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 3.029.625. Dilihat dari distribusinya jumlah ekuitas terbanyak terdapat pada PT Prima Multi Terminal yaitu 39,98% dari jumlah ekuitas entitas anak tahun 2018. Jumlah ini naik 12,29 % dibandingkan dengan jumlah ekuitas PT Prima Multi Terminal yang tercatat di tahun 2017 sebesar Rp. 1.308.340 juta. PT Prima Husada Cipta Medan menjadi entitas anak yang memiliki ekuitas paling kecil yakni sebesar 0,60% dari seluruh ekuitas entitas anak dan jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 17.365 juta mengalami kenaikan sebesar 26,97%.

Perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas masing-masing entitas anak selama 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

at Rp. 3,674,904 million also increased by 21.30% from the total equity in 2017 which was recorded at Rp. 3,029,625. Based on the distribution, the highest number of equity is at PT Prima Multi Terminal, which is 39.98% of the total equity of subsidiaries in 2018. This number is increased by 12.29% compared to the total equity of PT Prima Multi Terminal which was recorded in 2017 of Rp. 1,308,340 million. PT Prima Husada Cipta Medan becomes a subsidiary that has the smallest equity of 0.60% of all equity of subsidiaries and when compared to equity in 2017 of Rp. 17,365 million increased by 26.97%.

The development of the assets, liabilities and equity of each subsidiary for the last 2 (two) years as presented in the table below:

**Tabel Kinerja Posisi Keuangan
Segmen Entitas Anak**

**Table of Financial Position Performance for Subsidiary
Entities Segment**

Nama Entitas Anak Name of Subsidiary	2017			2018			% Naik/Turun % Increase/ Decrease		
	Aset Assets	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Assets	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity	Aset Assets	Liabilitas Liability	Ekuitas Equity
PT Prima Indonesia Logistik	148.564	182.212	104.484	381.018	134.786	246.944	156,47	(26,03)	136,35
PT Prima Pengembangan Kawasan	853.233	2.071	851.162	873.567	4.832	868.734	2,38	133,32	2,06
PT Prima Husada Cipta Medan	23.986	6.080	17.365	28.046	5.452	22.049	16,92	(10,33)	26,97
PT Prima Terminal Peti Kemas	1.071.632	298.552	613.159	1.889.641	951.752	937.817	76,33	218,79	52,95
PT Prima Multi Terminal	3.196.113	1.588.702	1.308.340	3.873.994	2.406.869	1.469.195	21,21	51,50	12,29
PT Terminal Peti Kemas Indonesia	135.742	628	135.115	131.716	1.551	130.165	(2,97)	146,97	(3,66)
Jumlah/ Total	5.429.270	2.078.245	3.029.625	7.177.982	3.505.242	3.674.904	32,21	68,66	21,30

2. Kinerja Pendapatan, Beban dan Laba Usaha Segmen Entitas Anak

Tinjauan terhadap kinerja pendapatan usaha, beban usaha dan laba usaha dari segmen entitas anak sebagai berikut:

Pendapatan usaha entitas anak tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 118.234 juta mengalami kenaikan 27,22% dari jumlah pendapatan usaha tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 92.936 juta. PT Prima Pengembangan Kawasan, PT Prima Terminal Peti Kemas dan PT Terminal Peti Kemas Indonesia dalam tahun 2018 belum memperoleh pendapatan usaha, mengingat ketiga entitas anak tersebut belum beroperasi

2. Performance of Income, Expenses and Profit of Subsidiary Entities Segment

Review of the performance of operating income, expenses, and profit from the subsidiaries segment as follows:

The operating income of subsidiaries in 2018 was recorded at Rp. 118,234 million, increased by 27.22% from the total operating income in 2017 which was recorded at Rp. 92,936 million. PT Prima Pembangunan Kawasan, PT Prima Terminal Peti Kemas and PT Indonesia Terminal Peti Kemas in 2018 have not yet received business

secara komersial. Adapun peningkatan pendapatan usaha entitas anak terbesar terdapat pada PT Prima Husada Cipta Medan dengan kenaikan sebesar 49,62%.

Beban usaha entitas anak tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 161.936 juta naik 38,69% dari beban operasional tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 116.761 juta. Peningkatan beban usaha tertinggi ada pada PT Prima Terminal Petikemas sebesar Rp. 21.295 juta dengan kenaikan 42,37% dan peningkatan beban usaha yang terkecil ada pada PT Prima Indonesia Logistik yang pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 53.501 juta atau naik 17,20%.

Keberadaan anak perusahaan bagi Pelindo 1 ditujukan untuk pengembangan bisnis serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan entitas anak. Dalam tahun 2018 secara total laba usaha entitas anak mengalami defisit sebesar Rp. 43.702 juta atau meningkat 83,43% dari tahun 2017 yang juga tercatat defisit sebesar Rp. 23.825 juta. Sebanyak 4 entitas anak dalam tahun 2018 masih mengalami defisit yaitu PT Prima Pengembangan Kawasan defisit sebesar Rp. 8.100 juta (18,53%), PT Prima Terminal Peti Kemas defisit sebesar Rp. 21.295 juta (48,73%), PT Prima Multi Terminal defisit sebesar Rp. 36.533 juta (83,59%) dan PT Terminal Petikemas Indonesia defisit sebesar Rp. 11.720 juta atau 26,82% dari jumlah laba usaha tahun 2018.

income, considering that the three subsidiaries have not operated commercially. The increase in business income of the largest subsidiary is PT Prima Husada Cipta Medan with an increase of 49.62%.

The operating expenses of subsidiaries in 2018 were recorded at Rp. 161,936 million, increased by 38.69% from the operating expenses in 2017 which were recorded at Rp. 116,761 million. The highest increase in operating expenses is in PT Prima Terminal Petikemas of Rp. 21,295 million with an increase of 42.37% and the smallest increase in operating expenses was in PT Prima Indonesia Logistik which in 2018 reached Rp. 53,501 million or increased by 17.20%.

The existence of a subsidiary for Pelindo 1 is intended for business development and to improve the performance of companies and subsidiaries. In 2018, the total operating profit of a subsidiary has a deficit of Rp. 43,702 million or an increase of 83.43% from 2017 which also recorded a deficit of Rp. 23,825 million. As many as 4 subsidiaries in 2018 still experienced a deficit, namely PT Prima Development Area a deficit of Rp. 8,100 million (18.53%), PT Prima Terminal Peti Kemas a deficit of Rp. 21,295 million (48.73%), PT Prima Multi Terminal deficit of Rp. 36,533 million (83.59%) and PT Terminal Petikemas Indonesia a deficit of Rp. 11,720 million or 26.82% of the total operating profit in 2018.

Tabel Kinerja Laba/Rugi Segmen Entitas Anak (Rp Juta)

Nama Entitas Anak Name of Subsidiary	2017			2018			% Naik/Turun		
	Pendapatan Operasional Operating Income	Beban Operasional Operating Expense	Laba Operasional Operating Profit	Pendapatan Operasional Operating Income	Beban Operasional Operating Expense	Laba Operasional Operating Profit	Pendapatan Operasional Operating Income	Beban Operasional Operating Expense	Laba Operasional Operating Profit
PT Prima Indonesia Logistik	68.337	45.648	22.689	81.956	53.501	28.455	19,93	1720	25,41
PT Prima Pengembangan Kawasan	0	6.115	(6.115)	0	8.100	(8.100)	0,00	32,46	32,46
PT Prima Husada Cipta Medan	23.538	21.972	1.566	35.217	29.726	5.491	49,62	35,29	250,64
PT Prima Terminal Peti Kemas	0	14.958	(14.958)	0	21.295	(21.295)	0,00	42,37	42,37
PT Prima Multi Terminal	1.061	28.068	(27.007)	1.061	37.594	(36.533)	0,00	33,94	35,27
PT Terminal Peti Kemas Indonesia	0	0	0	0	11.720	(11.720)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	92.936	116.761	(23.825)	118.234	161.936	(43.702)	27,22	38,69	83,43

Table of Subsidiaries Profit/Loss Performance (Rp Million)

TINJAUAN PROFITABILITAS

REVIEW OF PROFITABILITY

Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan peraturan perundangan lainnya, menjadi elemen penting dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Perkembangan usaha Pelindo 1 terus mengalami peningkatan yang signifikan sehubungan dengan fokus perusahaan terhadap Penguatan Bisnis Utama (Core Business Enhancement) ditandai dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Di tahun 2018, realisasi profitabilitas perusahaan mencapai sebesar Rp. 1.203.124 juta, meningkat 10,29% dari Rp. 1.090.868 juta jumlah profitabilitas tahun 2017. Profitabilitas perusahaan tersebut berasal dari 3 (tiga) wilayah operasional dan 6 (enam) entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kontribusi Profitabilitas (Rp Juta)

No	Kontribusi Profitabilitas Profitability Contribution	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/Decrease
1.	3 Wilayah Operasional 3 Operations Area	1.067.401	1.195.982	12,05
2.	6 Entitas Anak/ 6 Subsidiaries	23.467	7.142	(54,66)
Jumlah Profitabilitas/ Total Profitability		1.090.868	1.203.124	10,29

KONTRIBUSI PROFITABILITAS WILAYAH

Dari keberhasilan perusahaan memperoleh laba usaha yang signifikan pada tahun 2018 tidak terlepas dari kontribusi kinerja yang dicapai oleh cabang pelabuhan yang berada di wilayah Aceh, cabang pelabuhan yang berada di wilayah Sumatera Utara serta cabang pelabuhan yang berada di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Di tahun 2018, profitabilitas yang dihasilkan 3 (tiga) wilayah operasional sebesar Rp. 1.195.982 juta meningkat 12,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.067.401 juta. Dalam perolehan profitabilitas tersebut, kontribusi terbesar disumbangkan oleh wilayah Sumatera Utara sebesar 74,11% serta wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 26,20% Adapun untuk wilayah Aceh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.704 juta di tahun 2018 atau mencapai -312,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.741 juta.

Commitment to keep improving compliance with Good Corporate Governance principles and other laws and regulations, becomes an important element in achieving company performance.

The business development of Pelindo 1 continued to experience a significant increase due to the company's focus on Core Business Enhancement marked by an increase in the company's profitability. In 2018, the realization of the company's profitability reached Rp. 1,203,124 million, an increase of 10.29% from Rp. 1,090,868 million total profitability in 2017. The company's profitability comes from 3 (three) operations areas and 6 (six) subsidiaries as follows:

Table of Profitability Contribution (Rp Million)

REGIONAL PROFITABILITY CONTRIBUTION

The success of the company in obtaining a significant operating profit in 2018 is inseparable from the performance contribution achieved by the port branch in the Aceh region, the port branch located in the North Sumatra region and the port branch located in Riau and Riau Islands.

In 2018, the profitability which is generated by 3 (three) operations areas was Rp. 1,195,982 million, an increase of 12.05% from the previous year amounting to Rp. 1,067,401 million. In obtaining such profitability, the largest contribution was contributed by North Sumatra by 74.11% and Riau and Riau Islands by 26.20%. As for the Aceh region, it suffered a loss of Rp. 3,704 million in 2018 or -312.75% compared to the previous year of Rp. 1,741 million.

Perolehan laba usaha menurut wilayah operasional sebagaimana tabel berikut:

Obtaining operating profit according to operational area is as follows:

Tabel Kontribusi Profitabilitas (Rp Juta)

Table of Profitability Contributions (Rp Million)

No	Kontribusi Profitabilitas Regional Profitability Contributions	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	02 Cabang Wilayah Aceh 02 Aceh Regional Branch	1.741	(3.704)	(312,75)
2.	10 Cabang Wilayah Sumatera Utara 10 North Sumatera Regional Branch	719.219	886.304	23,23
3.	06 Cabang Wilayah Riau dan Kepulauan Riau 06 Riau and Riau Islands Regional Branch	348.181	313.383	(9,99)
Jumlah Profitabilitas/ Total Profitability		1.067.401	1.195.982	12,05

KONTRIBUSI PROFITABILITAS ENTITAS ANAK

Meskipun pendirian perusahaan anak belum begitu lama, namun pengelolaan bisnisnya telah memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Berikut ini capaian profitabilitas entitas anak, entitas pengendalian bersama dan entitas asosiasi, yaitu:

SUBSIDIARIES PROFITABILITY CONTRIBUTION

Although the establishment of a subsidiary companies are still recently, the management of its businesses have contributed to the profitability of the company. The following are the profitability achievements of subsidiaries, joint control entities, and associated entities, namely:

Tabel Kontribusi Profitabilitas (Rp Juta)

Table of Profitability Contribution (Rp Million)

No	Kontribusi Profitabilitas Regional Profitability Contributions	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	PT Prima Indonesia Logistik	25.208	29.204	15,85
2.	PT Prima Pengembangan Kawasan	11.657	15.570	33,57
3.	PT Prima Husada Cipta	2.190	5.970	172,60
4.	PT Prima Terminal Petikemas	(9.632)	(19.250)	(99,85)
5.	PT Prima Multi Terminal	(5.022)	(19.403)	(286,36)
6.	PT Terminal Petikemas Indonesia	(934)	(4.949)	(429,87)
Jumlah Profitabilitas/ Total		23.467	7.142	(69,57)

TINJAUAN KINERJA ENTITAS ANAK

REVIEW OF SUBSIDIARIES ENTITY PERFORMANCE

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, Pelindo 1 memiliki 3 (tiga) anak perusahaan 2 (dua) perusahaan pengendalian bersama dan 1 (satu) perusahaan asosiasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha penunjang jasa pelabuhan. Kinerja masing-masing entitas anak dijelaskan seperti rincian di bawah ini.

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

PT Prima Indonesia Logistik sebagai lini bisnis Pelindo 1 didirikan berdasarkan akta No. 34 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 26 September 2014 dan bergerak di bidang jasa pelabuhan dengan fokus pada pengelolaan Jasa Depo Peti Kemas dan Jasa Logistik Lainnya. Komposisi penyertaan modal PT Prima Indonesia Logistik per 31 Desember 2018 berasal dari Pelindo 1 sebesar 99% dengan nilai Rp. 67.320.000.000 dan Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Belawan sebesar 1% dengan nilai Rp. 680.000.000

Perusahaan merupakan spin off dari salah satu cabang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu Belawan Logistic Center. Didirikan untuk pengembangan bisnis sebagai salah satu perusahaan angkutan multimoda dan untuk logistik depo container, yang rencana jangka panjangnya akan menjadi port logistic. Saat ini sudah beroperasi selama 4 (empat) tahun.

1. Kinerja Operasional

Keberhasilan PT Prima Indonesia Logistik dalam mengembangkan kegiatan operasional didukung dengan penerapan berbagai strategi korporasi dan strategi bisnis yang tepat. Salah satu strategi korporasi adalah melakukan penetrasi pasar dengan menangani sendiri jasa depo peti kemas di depo PIL yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga disertai dengan melakukan difrensiasi pelayanan sesuai jenis jasa dan kondisi pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan prima.

PT Prima Indonesia Logistik telah berhasil mendapatkan pangsa pasar baru berupa pengoperasian alat di Palembang, Full handling PT Meratus dan PT SPIL, kerjasama pengoperasian alat dengan PT Prima Multi Terminal, kerjasama pengoperasian dengan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan, serta beroperasinya kegiatan short-sea shipping.

2. Kinerja Keuangan

Jumlah aset hingga tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 381.018 juta, naik 156,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 148.564 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi dalam penyertaan dan meningkatnya aset tetap.

Until the end of fiscal year of 2018, Pelindo 1 has 3 (three) subsidiaries 2 (two) joint control companies and 1 (one) associate company engaged in various port service supporting business fields. The performance of each subsidiary is explained in details below.

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

PT Prima Indonesia Logistik as a Pelindo 1 business line was established based on deed No. 34 made before Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan on September 26, 2014 and engaged in port services with a focus on managing Container Depot Services and Other Logistics Services. The composition of the equity participation of PT Prima Indonesia Logistik as of December 31, 2018 came from Pelindo 1 at 99% with a value of Rp. 67,320,000,000 and PT Koperasi Karyawan Port Business Unit Container Terminal Medan Municipality for 1% with value of Rp.680,000,000.

The company is a spin off from one of the branches of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the Belawan Logistic Center. It was established for business development as one of the multimodal transport companies and for container logistics depots, whose long-term plans will be port logistics. Currently it has been operating for 4 (four) years.

1. Operations Performance

The success of PT Prima Indonesia Logistik in developing operational activities is supported by the application of various corporate strategies and on target business strategies. One of the corporate strategies is to penetrate the market by handling the container depot services in the PIL depot, which has been managed by third parties, accompanied by service differentiation according to the type of services and market conditions by utilizing information technology to improve service excellence.

PT Prima Indonesia Logistik has succeeded in gaining new market shares in the form of operating tools in Palembang, Full handling of PT Meratus, and PT SPIL, joint operation in equipment with PT Prima Multi Terminal, joint operation with Belawan Domestic Container Terminal, and the operation of short-sea shipping.

2. Financial Performance

The total assets by the end of 2018 was recorded at Rp. 381,018 million, increased by 156.47% from the previous year of Rp. 148,564 million. This was mainly due to increased of investment and fixed assets.

Pendapatan operasional hingga tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 81.956 juta. Jumlah ini lebih tinggi 19,93% dari pendapatan operasional tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.337 juta. PT Prima Indonesia Logistik memberikan kontribusi terbesar atau 69,32% dari jumlah pendapatan operasional yang diperoleh seluruh entitas anak tahun 2018.

Laba setelah pajak hingga tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 22.386 juta. Jumlah ini lebih tinggi 10,13% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya sebesar Rp. 20.326 juta. Bagian Laba atas kepemilikan saham sebesar 99% untuk tahun 2018 sebesar Rp. 22.162 juta

PT Prima Indonesia Logistik melaksanakan pengembangan investasi dalam bentuk investasi fisik dan investasi non fisik. Dalam tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 207.710 juta, naik sebesar Rp. 171.347 juta atau 471,21% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 36.363 juta.

Operating income by the end of 2018 was recorded at Rp. 81,956 million. This amount is 19.93% higher than the previous year's operating income of Rp. 68,337 million. PT Prima Indonesia Logistik provides the largest contribution or 69.32% of the total operating income obtained by all subsidiaries in 2018.

After-tax profit until 2018 was recorded at Rp. 22,386 million. This amount is 10.13% higher than the previous year's profit after tax of Rp. 20,326 million. The share of profit on share ownership of 99% in 2018 is Rp. 22,162 million.

PT Prima Indonesia Logistik carry out investment development in the form of physical investment and non-physical investment. In 2018 the investment realization was Rp. 207,710 million, increased by Rp. 171,347 million or 471.21% from the previous year which was Rp. 36,363 million.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

Table of Financial Performance

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset/ Assets	148.564	381.018	156,47
2.	Pendapatan Operasional/ Operating Income	68.337	81.956	19,93
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	20.326	22.386	10,13
4.	Jumlah Investasi/ Total Investments	36.363	207.710	471,21

PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN

PT Prima Pengembangan Kawasan didirikan berdasarkan akta No.15 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 September 2015 dan bergerak di bidang Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, meliputi pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, seperti pabrik, gudang dan kegiatan terkait, Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri, Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah. Nilai saham penyertaan Pelindo 1 pada PT Prima Pengembangan Kawasan adalah sebesar Rp. 369.000.000.000 di tahun 2018 atau sebesar 90%, sedangkan sebesar 10% dimiliki oleh PT Prima Multi Terminal.

1. Kinerja Operasional

PT Prima Pengembangan Kawasan saat ini sedang dalam tahap pembangunan proyek, sehingga dalam tahun 2018

PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN

PT Prima Pengembangan Kawasan was established based on deed No. 15 made before Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan on September 8, 2015 and engaged in rental and management services of industrial estates, including management and leasing, maintenance, maintenance and provision of other supporting facilities, such as factories, warehouses and related activities, development services, and management of industrial estates, consulting in the management of operations and maintenance of industrial estates with infrastructure facilities, and physical infrastructure of the area. The shares value of Pelindo 1's investment in PT Prima Pengembangan Kawasan is Rp. 369.000.000.000 in 2018 or 90%, while the 10% is owned by PT Prima Multi Terminal.

1. Operations Performance

PT Prima Pengembangan Kawasan is currently in the stage of project development, therefore in 2018

TINJAUAN KINERJA ENTITAS ANAK

REVIEW OF SUBSIDIARIES ENTITY PERFORMANCE

belum melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara komersial.

the company has not yet carried out commercial operations.

2. Kinerja Keuangan

Jumlah aset PT Prima Pengembangan Kawasan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp. 873.567 juta, terdapat peningkatan 2,38% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 853.233 juta, terutama dipengaruhi oleh rencana pengadaan sebidang tanah untuk pengembangan investasi dan fasilitas umum dengan nilai Rp. 1.531.190 juta.

Laba setelah pajak yang diperoleh PT Prima Pengembangan Kawasan tahun 2018 sebesar Rp. 17.572 juta, meningkat 33,58% dari Rp. 13.159 juta laba operasional setelah pajak tahun 2017. Bagian Laba atas kepemilikan saham sebesar 90% untuk tahun 2018 sebesar Rp. 15.815 juta

Dalam tahun 2018, PT Prima Pengembangan Kawasan telah merealisasikan investasi yang terdiri dari investasi fisik dan investasi non fisik sebesar Rp. 226.593 juta, meningkat 25,06% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 181.190 juta

2. Financial Performance

The total assets of PT Prima Pembangunan Kawasan until December 31, 2018 were Rp. 873,567 million, increased by 2.38% compared to the previous year of Rp. 853,233 million, mainly affected by the plan to procure a plot of land for the development of investments and public facilities with a value of Rp. 1,531,190 million.

After tax income obtained by PT Prima Pembangunan Daerah in 2018 was Rp. 17,572 million, an increase of 33.58% from Rp. 13.159 million operating after tax income in 2017. The share of Profit for share ownership of 90% for 2018 is Rp. 15,815 million.

In 2018, PT Prima Pengembangan Kawasan has realized investments consisting of physical and non-physical investment of Rp. 226,593 million, an increase of 25.06% from the previous year which reached Rp. 181,190 million.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

Table of Financial Performance (Rp Million)

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset/ Assets	853.233	873.567	2,38
2.	Pendapatan Operasional/ Operating Income	0,00	0,00	0,00
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	13.159	17.572	33,58
4.	Jumlah Investasi/ Total Investments	181.190	226.593	25,06

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

PT Prima Husada Cipta Medan didirikan berdasarkan akta No. 4 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 November 2016 dan bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan: Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, serta usaha terkait. Nilai saham penyertaan Pelindo 1 pada PT Prima Husada Cipta adalah sebesar Rp. 15.840.000.000 di tahun 2018 atau sebesar 99,68%, sedangkan 0,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

1. Kinerja Operasional

Salah satu bentuk nyata perhatian perusahaan, PT Prima Husada Cipta Medan memberikan sejumlah pelayanan kesehatan yang lebih beragam dan berkualitas kepada

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

PT Prima Husada Cipta Medan was established based on deed No. 4 made before Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan on November 8, 2016 and engaged in health services: Hospitals, Clinics, Polyclinics, Medical Centers, and related businesses. The share value of Pelindo 1's investment in PT Prima Husada Cipta is Rp. 15,840,000,000 in 2018 or 99.68%, while the other 0.32% is owned by the Employee Cooperative of the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

1. Operations Performance

One tangible form of the company's attention, PT Prima Husada Cipta Medan provides several more diverse and quality health services to the community around

masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan. Selama tahun 2018 pemanfaatan pelayanan kesehatan terus meningkat sejalan dengan pengembangan sejumlah fasilitas kesehatan diantaranya pembukaan klinik pratama di Medan dan Dumai, pengembangan unit Hemodialisa, pengembangan klinik Estetika dan pembentukan Health Care Unit. Adapun dari segi pelayanan, telah dilakukan peningkatan kualitas layanan di rumah sakit dan klinik antara lain peningkatan jam layanan di Rumah Sakit, penambahan tenaga medis, penambahan peralatan medis, penambahan jumlah peserta BPJS serta pemanfaatan pemakaian kartu BPJS bagi para pensiunan dan keluarga.

2. Kinerja Keuangan

Jumlah aset PT Prima Husada Cipta Medan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp. 28.046 juta, terdapat peningkatan sebesar 16,92% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 23.986 juta. Hingga tahun 2018 jumlah liabilitas PT Prima Husada Cipta Medan mencapai Rp. 5.452 juta, turun 10,33% atau setara Rp. 628 juta dari tahun lalu sebesar Rp. 6.080 juta

Dari sisi ekuitas, PT Prima Husada Cipta Medan mencatat ekuitas sebesar Rp. 22.049 juta mengalami peningkatan Rp. 4.684 juta atau naik 26,97% dari ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 17.365 juta.

Pendapatan operasional pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 35.217 juta, naik 49,62% bila dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp. 23.538 juta. Laba setelah pajak pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 4.684 juta, meningkat 113,79% dari laba setelah pajak tahun 2017 sebesar Rp. 2.190 juta.

Dalam tahun 2018 realisasi investasi yang terdiri dari investasi fisik dan investasi non fisik sebesar Rp. 22.000 juta, naik 174,66% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 8.010 juta.

the port. During 2018 the utilization of health services continued to increase in line with the development of several health facilities including the opening of Pratama clinics in Medan and Dumai, the development of Hemodialysis units, the development of aesthetic clinics and the establishment of Health Care Units. As for service, there has been an increase in the quality of services in hospitals and clinics, among others, increased hours of service at hospitals, addition of medical personnel, addition of medical equipment, addition of BPJS participants and utilization of BPJS cards for retirees and families.

2. Financial Performance

The total assets of PT Prima Husada Cipta Medan until December 31, 2018 was Rp. 28,046 million, there was an increase of 16.92% compared to the previous year of Rp. 23,986 million. By the end of 2018 the total liabilities of PT Prima Husada Cipta Medan reached Rp. 5,452 million, decreased by 10.33% or equivalent to Rp. 628 million from last year amounting to Rp. 6,080 million.

In terms of equity, PT Prima Husada Cipta Medan recorded equity of Rp. 22,049 million, experienced an increase of Rp. 4,684 million or 26.97% from equity in 2017 of Rp. 17,355 million.

Operating income in 2018 was recorded at Rp. 35,217 million, increased by 49.62% compared to last year's Rp. 23,538 million. After tax income in 2018 was recorded at Rp. 4,684 million, an increase of 113.79% from 2017 after tax income of Rp. 2,190 million.

In 2018 the realization of investment consisting of physical and non-physical investments amounted to Rp. 22,000 million, increased by 174.66% from the previous year which reached Rp. 8.010 million.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset/ Assets	23.986	28.046	16,92
2.	Pendapatan Operasional/ Operating Income	23.538	35.217	49,62
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	2.190	4.684	113,79
4.	Jumlah Investasi/ Total Investments	8.010	22.000	174,66

Table of Financial Performance (Rp Million)

TINJAUAN KINERJA ENTITAS ANAK

REVIEW OF SUBSIDIARIES ENTITY PERFORMANCE

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PT Prima Terminal Petikemas didirikan berdasarkan akta No. 162 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 20 Juli 2013 dengan tujuan untuk menyediakan jasa pelayanan terminal petikemas internasional. Nilai saham penyertaan Pelindo 1 pada PT Prima Terminal Petikemas untuk tahun 2018 sebesar Rp. 436.501.000.000 atau sebesar 70%, sedangkan saham lainnya sebesar 30% dimiliki oleh PT Wijaya Karya sebesar 15% dan PT Utama Karya sebesar 15%.

1. Kinerja Operasional

PT Prima Terminal Petikemas merupakan usaha patungan dengan pengendalian bersama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Utama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) yang saat ini dalam pembangunan proyek pengembangan terminal peti kemas fase 2 sepanjang 350 m yang direncanakan akan selesai dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun dan untuk pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dalam 7 (tujuh) Paket penyelesaian pekerjaan yang meliputi pekerjaan sipil/infrastruktur dan pengadaan peralatan dan sistem Teknologi Informasi. Pada tahap awal, seluruh sumber daya perusahaan dioptimalkan agar dapat mendukung percepatan program investasi yaitu pengembangan terminal peti kemas sebagai tujuan utama saat ini dengan menyiapkan seluruh instrumen sistem dan kebijakan yang mendukung untuk itu.

Pengembangan Terminal Peti kemas Belawan Fase 1 sepanjang 350 m infrastrukturnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk penembangan Fase 2 sepanjang 350 m dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang telah mendapatkan hak konsesi dari Pemerintah yang dalam implementasinya ditugaskan kepada PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2012

2. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2018 PT Prima Terminal Petikemas mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.889.569 juta mencapai 76,43% dari jumlah aset tahun lalu yang sebesar Rp. 1.071.007 juta.

Laba setelah pajak mengalami penurunan sebesar 177,73% yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.369 juta dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp. -5.894 juta.

Investasi fisik dan non fisik PT Prima Terminal Petikemas tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 513.678 juta, turun 23,90% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 675.029 juta.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PT Prima Container Terminal was established based on deed No. 162 which was made before Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan on July 20, 2013 with the aim of providing international container terminal services. The share value of Pelindo 1's investment in PT Prima Terminal Petikemas in 2018 is Rp. 436,501,000,000 or 70%, while the other 30% shares are owned by PT Wijaya Karya and PT Utama Karya by 15%.

1. Operations Performance

PT Prima Terminal Petikemas is a joint venture with joint control between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Utama Karya (Persero), and PT Wijaya Karya (Persero) which is currently under construction for the planned 350 m phase 2 container terminal development project, it will be completed in approximately 3 (three) years and for the implementation of the work carried out in 7 (seven) completion of work packages covering civil / infrastructure work and procurement of equipment and information technology systems. In the initial stage, all company resources are optimized so that it can support the acceleration of investment programs, namely the development of container terminals as the current main objective by preparing all system instruments and policies that support the investment program.

The development of 350 m Belawan Phase 1 Container Terminal infrastructure was carried out by the Ministry of Transportation, while 350 m Phase 2 development was carried out by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which had obtained concession rights from the Government which were assigned to PT Prima Terminal Petikemas as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number PM. 21 of 2012.

2. Financial Performance

In 2018 PT Prima Terminal Petikemas recorded total assets of Rp. 1,889,569 million or 76.43% compared to last year's total assets of Rp. 1,071,007 million.

After tax income decreased by 177.73% in 2018 or Rp. -16,369 million compared to 2017 amounting to Rp. -5,894 million.

Physical & non-physical investment of PT Prima Terminal Petikemas in 2018 at Rp. 513,678 million, decreased by 23.90% from the previous year.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

Table of Financial Performance (Rp Million)

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset/ Assets	1.071.007	1.889.569	76,43
2.	Pendapatan Operasional/ Operating Income	0,00	0,00	0,00
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	(5.894)	(16.369)	(177,73)
4.	Jumlah Investasi/ Total Investments	675.029	513.678	(23,90)

PT PRIMA MULTI TERMINAL

PT Prima Multi Terminal didirikan berdasarkan akta No. 04 yang dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014 dengan tujuan untuk menyediakan jasa pelayanan Terminal Multi Purpose untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung dalam rangka menyukseskan Program MP3EI Sei Mangke dan tuntutan pasar atas keberadaan Terminal Curah Cair/Terminal Multi Purpose yang terbuka untuk umum. Nilai saham penyertaan Pelindo 1 pada PT Prima Multi Terminal hingga saat ini sebesar Rp. 559.548.000.000 atau sebesar 55%. Adapun saham lainnya dimiliki oleh PT. Pembangunan Perumahan 30% dan PT Waskita Karya 15%.

1. Kinerja Operasional

Sebagai perusahaan yang baru dibentuk dalam rangka melakukan pembangunan dan menyediakan jasa terminal multi purpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, maka perusahaan masih dalam tahap melanjutkan kegiatan penyempurnaan organisasi dan operasional perusahaan serta pelaksanaan percepatan penyelesaian pembangunan terminal dan pengadaan peralatan fasilitas bongkar muat petikemas.

Hingga tahun 2018 PT Prima Multi Terminal masih harus menanggung biaya operasional dalam masa pembangunan sebesar Rp. 37.594 juta yang melebihi dari pendapatan usaha sebesar Rp. 1.061 juta, sehingga tahun 2018 masih mengalami kerugian sebesar Rp. 36.534 juta.

2. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2018 PT Prima Multi Terminal mencatat jumlah aset sebesar Rp. 3.876.064 juta, meningkat 21,27% dari jumlah aset tahun lalu yang sebesar Rp. 3.196.113 juta karena ada peningkatan nilai aktiva tetap dalam konstruksi sebesar Rp. 2.359.548 juta atau naik 100% dan peningkatan nilai

PT PRIMA MULTI TERMINAL

PT Prima Multi Terminal was established based on deed No. 04 made before Tuti Sumarni, SH, Notary in Jakarta on September 26, 2014 and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number AHU-26883.40.10.2014 dated September 29, 2014 with the aim of providing services namely Multi-Purpose Terminal to meet customer needs at Kuala Tanjung Terminal in order to succeed the MP3EI Sei Mangke Program and market demands for the existence of a Liquid Bulk Terminal / Multi Purpose Terminal that is open to the public. The share value of Pelindo 1's investment in PT Prima Multi Terminal at present is Rp. 559,548,000,000 or 55%. The other shares are owned by PT. Pembangunan Perumahan 30% and 15% PT Waskita Karya.

1. Operations Performance

As a newly formed company in order to develop and provide multi-purpose terminal services in Kuala Tanjung Port, the company is still in the stage of continuing organizational improvement activities, company operations, and accelerating completion of terminal construction and procurement of container loading and unloading equipment.

Until 2018 PT Prima Multi Terminal still had to bear operational costs in the construction period of Rp. 37,594 million which exceeds the operating income of Rp. 1,061 million, therefore in 2018 there is still a loss of Rp. 36,534 million.

2. Financial Performance

In 2018 PT Prima Multi Terminal recorded total assets of Rp. 3,876,064 million, an increase of 21.27% from last year's total assets of Rp. 3,196,113 million due to an increase in the value of fixed assets in construction of Rp. 2,359,548 million or an increase of 100% and

TINJAUAN KINERJA ENTITAS ANAK

REVIEW OF SUBSIDIARIES ENTITY PERFORMANCE

aset yang akan dimanfaatkan sebesar Rp. 46.285 juta naik 100% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan operasional yang diperoleh PT Prima Multi Terminal pada tahun 2018 sama dengan perolehan pendapatan operasional pada tahun 2017 yang sebesar Rp. 1.061 juta. Kondisi ini disebabkan oleh belum beroperasinya terminal sesuai dengan waktu yang direncanakan dan realisasi pendapatan hanya bersumber dari PT Prima Tangki Indonesia atas persewaan lahan untuk area pembangunan tangki timbun CPO.

Dalam tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 1.051.222 juta turun 10,09% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 1.169.129 juta. Menurunnya investasi tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya investasi fisik sebesar Rp. 397.355 juta atau 23,48%, meskipun investasi non fisik meningkat sebesar Rp. 22.209 juta atau 61,21%.

an increase in the value of assets to be utilized is Rp. 46,285 million, increased by 100% from the previous year.

The operating income obtained by PT Prima Multi Terminal in 2018 is equal to the acquisition of operating income in 2017 which is Rp. 1,061 million. This condition is caused by the non-operation of the terminal in accordance with the planned time and the realization of revenue is only sourced from PT Prima Tangki Indonesia for leasing land for the construction area of the CPO storage tank.

In 2018 the investment realization was Rp. 1,051,222 million, decreased by 10.09% from the previous year which reached Rp. 1,169,129 million. The decline in investment in 2018 was caused by a decrease in physical investment of Rp. 397,355 million or 23.48%, even though non-physical investment increased by Rp. 22,209 million or 61.21%.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset/ Assets	3.196.113	3.876.064	21,27
2.	Pendapatan Operasional/ Operating Income	1.061	1.061	0,00
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	(16.210)	(8.953)	44,77
4.	Jumlah Investasi/ Total Investments	1.169.129	1.051.222	(10,09)

Table of Financial Performance (Rp Million)

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

PT Terminal Petikemas Indonesia didirikan berdasarkan akta No. 36 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Terminal Petikemas Indonesia sebesar Rp. 37.500.000.000 atau sebesar 25% dan saham lainnya dimiliki masing-masing oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 25%, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar 25% dan dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar 25%.

Pendirian PT Terminal Petikemas Indonesia didasarkan atas pemikiran potensi yang besar atas beberapa kondisi antara lain sebagai berikut :

- Dalam rangka meningkatkan Kinerja Performance Improvement Program (PIP) di Terminal Peti Kemas

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

PT Terminal Petikemas Indonesia was established based on deed No. 36 made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notary in Jakarta on April 10, 2013 with the aim of carrying out activities in the business of providing and developing port facilities. The share value of the Company's investment in PT Terminal Petikemas Indonesia is Rp. 37,500,000,000 or 25% and other shares owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) of 25%, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) of 25% and owned by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) of 25%.

The establishment of PT Terminal Petikemas Indonesia in Kuala Tanjung is based on the thought of great potential for several conditions including the following:

- In order to improve the Performance Improvement Program (PIP) at Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB).

Domestik Belawan (TPKDB).

- b. Meningkatkan konektivitas antara terminal peti kemas di Indonesia, sehingga dapat menurunkan waktu tunggu kapal baik di kolam pelabuhan maupun di terminal peti kemas yang dituju.
- c. Menghilangkan disparitas harga barang di Indonesia Barat, khususnya di bidang jasa layanan peti kemas.
- d. Antisipasi terhadap peningkatan volume arus petikemas di pelabuhan Kuala Tanjung yang dipersiapkan sebagai pelabuhan Hub Internasional.

1. Kinerja Operasional

PT Terminal Petikemas Indonesia merupakan usaha patungan dengan pengelolaan bersama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Hingga tahun 2018 PT Terminal Petikemas Indonesia belum ada kegiatan operasional karena belum ada terminal definitif yang diberikan oleh Pemegang Saham, sehingga PT Terminal Petikemas Indonesia harus menanggung bagian atas rugi entitas asosiasi sebesar Rp. 4.949 juta dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

2. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2018 PT Terminal Petikemas Indonesia mencatat jumlah aset sebesar Rp. 131.716 juta, menurun 2,97% dari jumlah aset tahun lalu yang sebesar Rp. 135.742 juta karena ada peningkatan nilai aset yang masih dalam konstruksi.

Dengan belum melakukan kegiatan operasionalnya, PT Terminal Petikemas Indonesia selama tahun 2018 mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp. 0,00.

- b. Increasing connectivity between container terminals in Western Indonesian, in order to reduce the dwelling time of ships in both the port and the destination container terminal.
- c. Eliminating the price disparity in Western Indonesia, especially in the field of container services.
- d. Anticipation of the increase in the volume of container flows in Kuala Tanjung port, which is prepared as an International Hub port.

1. Operations Performance

PT Terminal Petikemas Indonesia is a joint venture with joint management between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Until 2018 PT Terminal Petikemas Indonesia had no operational activities because there was no definitive terminal provided by the Shareholders, therefore PT Terminal Petikemas Indonesia had to bear the share of the loss of the associated entity in the amount of Rp. 4,949 million in the statement of profit and loss, and other comprehensive income for the year ended by 31 December 2018.

2. Financial Performance

In 2018 PT Terminal Petikemas Indonesia recorded total assets of Rp. 131,716 million, decreased by 2.97% from last year's total assets of Rp. 135,742 million due an increase in the value of assets that are still under construction.

By not carrying out its operational activities, PT Terminal Petikemas Indonesia during 2018 recorded a business income of Rp. 0.00.

Tabel Kinerja Keuangan (Rp Juta)

No	Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance	Realisasi 2017 Realization of 2017	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Naik/Turun % Increase/ Decrease
1.	Aset Assets	135.742	131.716	(2,97)
2.	Pendapatan Operasional Operating Income	0	0	0,00
3.	Laba Setelah Pajak/ After tax income	(934)	(4.949)	(429,87)

Table of Financial Performance (Rp Million)

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Tinjauan dan bahasan manajemen terkait dengan kinerja keuangan perusahaan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) dan disajikan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan tahunan ini.

Perusahaan memperoleh pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Guna mendapatkan gambaran secara utuh, maka data dan informasi mengenai kinerja keuangan disajikan juga untuk realisasi tahun-tahun sebelumnya.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Analisis perkembangan Kinerja Keuangan yang dicapai Perusahaan berdasarkan tinjauan Posisi Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2018, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Aset Perusahaan

Aset perusahaan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga 31 Desember 2018, total aset perusahaan tumbuh mencapai Rp. 14.020.853 juta, mengalami kenaikan sebesar 64,81% dari tahun sebelumnya Rp. 8.507.143 juta. Kondisi tersebut disebabkan oleh bertambahnya aset lancar sebesar Rp. 413.402 juta atau 18,71% dan bertambahnya aset tidak lancar sebesar Rp. 5.100.308 juta atau 80,99% dari tahun sebelumnya.

Pencapaian aset perusahaan tahun 2018 melampaui 38,05% di atas target yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2018 yang sebesar Rp. 10.156.395 juta.

Kontribusi aset lancar terhadap total aset perusahaan adalah sebesar 18,71% dan kontribusi aset tidak lancar sebesar 81,29% dari total aset perusahaan

Berikut ini rincian capaian aset perusahaan tahun 2017 dan 2018.

Management reviews and topics related to the company's financial performance are based on generally accepted accounting principles in Indonesia (PSAK) and are presented in accordance with information obtained from the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2018 and 2017 audited by KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as an integral part of this annual report.

The Company obtained fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2018, and consolidated financial performance, and consolidated cash flows for the year ended that date in accordance with Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

In order to get a full picture, the data and information regarding financial performance are also presented for the realization of previous years.

FINANCIAL POSITION REPORT

Analysis of the development of Financial Performance achieved by the Company based on a review of the Consolidated Financial Position for Fiscal Year of 2018, can be presented as follows:

1. Assets of the Company

Company assets increases from year to year. As of December 31, 2018, the company's total assets grew to Rp. 14,020,853 million, an increase of 64.81% from the previous year Rp. 8,507,143 million. This condition was caused by the increase in current assets of Rp. 413,402 million or 18.71% and an increase in non-current assets of Rp. 5,100,308 million or 80.99% from the previous year.

The achievement of company assets in 2018 exceeded 38.05% above the target set in the 2018 RKAP which amounted to Rp. 10,156,395 million.

The contribution of current assets to the company's total assets is 18.71% and the contribution of non-current assets is 81.29% of the company's total assets.

The following are details of the achievements of the company's assets in 2017 and 2018.

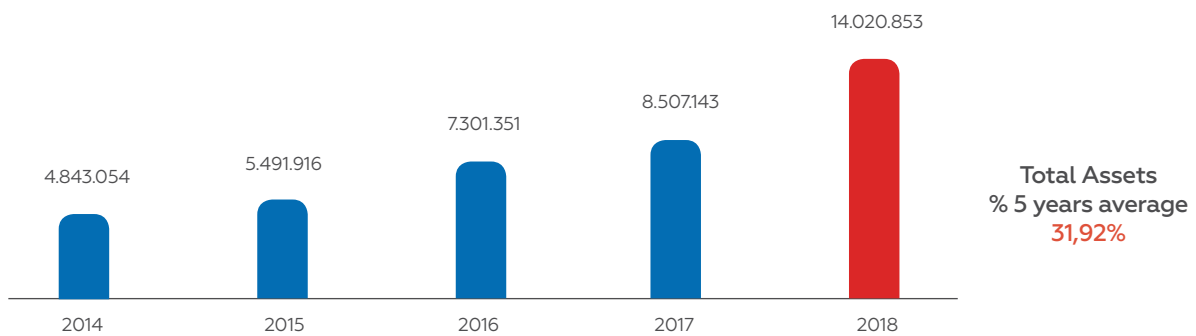
Tabel Jumlah Aset (Rp Juta)

Table of Total Assets (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Aset Lancar Current Assets	2.209.548	1.131.049	2.622.950	231,90	18,71
2.	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	6.297.595	9.025.346	11.397.903	126,29	80,99
Jumlah Aset/ Total Assets		8.507.143	10.156,95	14.020.853	138,05	64,81

Rata-rata pertumbuhan aset perusahaan selama periode lima tahun terakhir sebesar 31,92% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2018 mencapai 64,81% dan yang terendah terdapat di tahun 2015 mencapai 13,40% sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

The average growth of company's current assets over the past five years period was 31.92% with the highest growth in 2018 reaching 64.81% and the lowest in 2015 reaching 13.40% as illustrated in the graph below:



2. Aset Lancar

Realisasi aset lancar hingga tahun 2018 mencapai Rp. 2.622.950 juta atau 231,90% di atas target RKAP sebesar Rp. 1.131.049 juta. Dibandingkan dengan realisasi jumlah aset lancar tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.209.548 juta meningkat sebesar 18,71% atau setara dengan Rp. 413.402 juta. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran pajak dimuka yang mencapai Rp. 277.103 juta atau 193.678,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 143 juta serta aset lancar lainnya yang meningkat 103,73% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 97.416 juta.

Kontribusi terbesar aset lancar berasal dari investasi jangka pendek, yaitu 70,24% atau Rp. 1.842.369 juta dari total aset lancar.

Berikut ini rincian capaian aset lancar perusahaan tahun 2017 dan 2018.

2. Current Asset

Realization of current assets until 2018 reaches Rp. 2,622,950 million or 231.90% exceeded the RKAP target of Rp. 1,131,049 million. Compared to the realization of the number of current assets in the previous year amounting to Rp. 2,209,548 million increased by 18.71%, equivalent to Rp. 413,402 million. This increase was mainly influenced by the increase in upfront tax payments which reached Rp. 277,103 million or 193,678.32% compared to the previous year which was recorded at Rp. 143 million and other current assets which increased 103.73% from the previous year which was recorded at Rp. 97,416 million.

The largest contribution of current assets comes from short-term investments, namely 70.24% or Rp. 1,842,369 million of total current assets.

The following are the details.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Tabel Aset Lancar (Rp Juta)

Table of Current Assets (Rp Million)

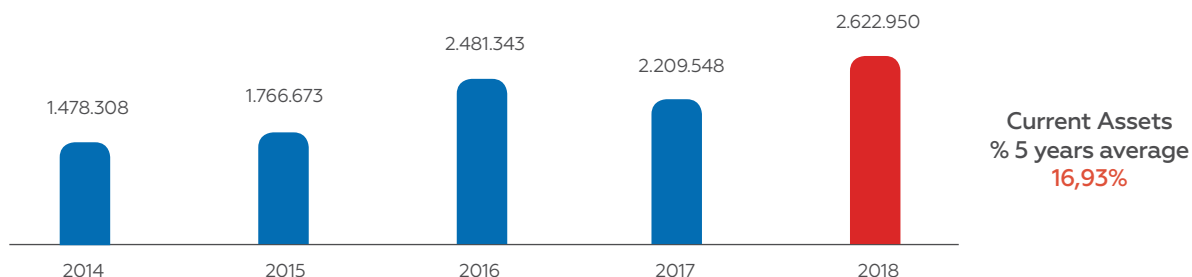
No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	146.508	265.424	156.819	59,08	7,04
2.	Investasi Jangka Pendek Short Term Investment	1.725.903	626.311	1.842.369	294,16	6,75
3.	Piutang Usaha Account Receivable	200.579	176.243	102.244	58,01	(49,03)
4.	Persediaan Inventory	23.717	9.655	25.388	262,95	7,05
5.	Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Prepaid Advances and Expenses	15.282	7.863	20.561	261,49	34,54
6.	Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	143	0	277.103	-	193.678,32
7.	Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	97.416	45.553	198.466	435,68	103,73
	Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.209.548	1.131.049	2.622.950	231,90	18,71

Aset lancar selama periode lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata sebesar 16,93% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2016 yang mencapai 40,45%. Pada tahun 2017 aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp. 271.795 juta atau turun 10,95% dan capaian tersebut merupakan pertumbuhan terendah aset lancar dalam lima tahun terakhir.

Perkembangan aset lancar selama lima tahun sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

Current assets over the last five years grew at an average of 16.93% with the highest growth in 2016 reaching 40.45%. In 2017 current assets decreased by Rp. 271,795 million or 10.95% and this achievement is the lowest growth of current assets in the last five years.

The development of current assets for five years as illustrated in the graph below:



3. Aset Tidak Lancar

Realisasi aset tidak lancar hingga tahun 2018 mencapai Rp. 11.397.903 juta atau 126,29% di atas target RKAP sebesar Rp. 9.025.345 juta. Dibandingkan dengan realisasi jumlah aset tidak lancar tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.297.595 juta meningkat sebesar 80,99% atau setara dengan Rp. 5.100.308 juta.

Capaian tersebut terutama karena adanya kenaikan aset pajak tangguhan sebesar 1.480,29%, aset tetap sebesar 122,20% dan kenaikan properti investasi sebesar 119,25%, meskipun terdapat penurunan signifikan pada komponen investasi jangka panjang termasuk didalamnya investasi entitas asosiasi dan investasi entitas pengendalian bersama sebesar 88,93% disebabkan investasi pengendalian bersama atas anak perusahaan PT. Prima Terminal Petikemas dan PT. Multi Terminal Petikemas telah dikonsolidasi oleh PT. Pelindo 1 (Persero)

Kontribusi terbesar aset tidak lancar berasal dari aset tidak tetap, yaitu sebesar Rp. 10.305.445 juta atau 90,45% dari total aset tidak lancar.

Berikut ini rincian capaian aset tidak lancar perusahaan tahun 2017 dan 2018.

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Investasi Jangka Panjang Long Term Investment	1.216.493	1.756.385	134.695	7,67	(88,93)
2.	Properti investasi Property Investment	189.858	13.489	416.270	3.086,00	119,25
3.	Aset tetap Fixed Asset	4.637.927	6.572.134	10.305.445	156,81	122,20
4.	Aset tak berwujud Intangible Asset	202.775	659.392	395.797	60,02	95,19
5.	Aset pajak tangguhan Deferred Tax Asset	3.019	11	47.709	433.718,18	1.480,29
6.	Aset tidak lancar lainnya Other Non-Current Assets	47.523	23.935	97.987	409,39	106,19
	Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	6.297.595	9.025.345	11.397.903	126,29	80,99

3. Non-Current Assets

The realization of non-current assets in 2018 reached Rp. 11,397,903 million or 126.29% above the RKAP target of Rp. 9,025,345 million. Compared to the realization of the previous year's total non-current assets of Rp. 6,297,595 million increased by 80.99%, equivalent to Rp. 5,100,308 million.

This achievement was mainly due to an increase in deferred tax assets of 1,480.29%, fixed assets of 122.20% and an increase in investment property by 119.25%, although there was a significant decrease in the long-term investment component including investment in associates and investment joint control entities with 88.93% due to mutual control investments in subsidiaries of PT. Prima Terminal Petikemas and PT. Multi Terminal Petikemas has been conceptualized by PT. Pelindo 1 (Persero).

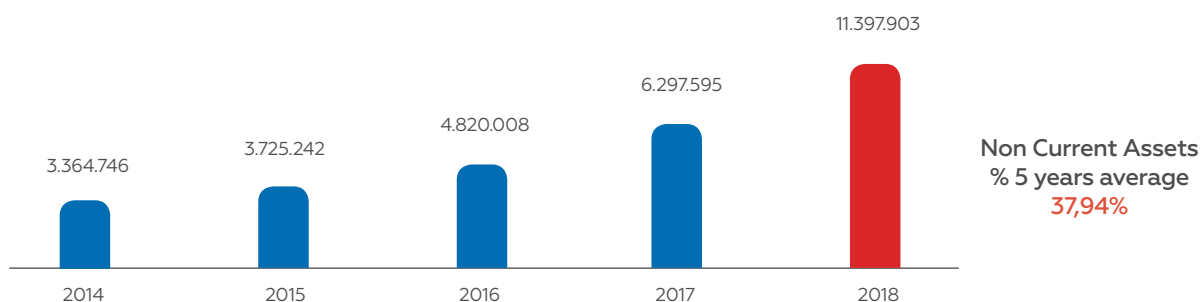
The biggest contribution of non-current assets comes from non-fixed assets, which is Rp. 10,305,445 million or 90.45% of total non-current assets.

The following are details of the achievements of the company's non-current assets in 2017 and 2018.

Table of Non-Current Asset (Rp Million)

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Aset tidak lancar selama periode lima tahun terakhir terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,94%. Pertumbuhan aset tidak lancar tertinggi terdapat di tahun 2018 yang mencapai 80,99% dan pertumbuhan terendah terdapat di tahun 2015 sebesar 10,71% sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Non-current assets over the past five years continued to increase with an average growth of 37.94%. The highest growth of non-current assets is in 2018 which reaches 80.99% and the lowest growth in 2015 is 10.71% as illustrated in the chart below:

4. Liabilitas Perusahaan

Hingga akhir Desember tahun 2018, posisi liabilitas perusahaan yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp. 7.541.275 juta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 8.507.143 juta mengalami peningkatan sebesar 109,31% atau setara dengan Rp. 3.938.355 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya liabilitas jangka pendek sebesar 46,88% atau sama dengan Rp. 854.603 juta dan meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar 173,27% atau sama dengan Rp. 3.083.753 juta.

Di dalam liabilitas tersebut masih terdapatnya utang obligasi sebesar Rp. 1 triliun yang diterbitkan pada 21 Juni 2016 dan dana hutang fasilitas sindikasi pinjaman Bank Mandiri, BRI dan BNI Rp. 1,3 triliun berjangka waktu tujuh tahun yang digunakan untuk penataan pelabuhan Belawan, perkuatan dermaga peti kemas di pelabuhan Perawang Pekanbaru, perpanjangan dermaga di pelabuhan Dumai, pembangunan dermaga pelabuhan Sei Kolak Kijang di Tanjung Pinang dan penataan pelabuhan Malahayati di Aceh.

Meskipun demikian, posisi liabilitas ini 159,43% di atas target RKAP tahun 2018 yang sebesar Rp. 10.156.395 juta.

Liabilitas jangka pendek memberikan kontribusi sebesar 35,51% dan liabilitas jangka panjang sebesar 64,49% dari total liabilitas perusahaan.

Berikut capaian liabilitas perusahaan tahun 2017 dan 2018:

4. Liability of the Company

By the end of December 2018, the position of the company's liabilities consisting of short-term liabilities and long-term liabilities reached Rp. 7,541,275 million. Compared to the previous year which amounted to Rp. 8,507,143 million increased by 109.31%, equivalent to Rp. 3,938,355 million. This increase was mainly due to the increase in short-term liabilities of 46.88% or equal to Rp. 854,603 million and increased long-term liabilities amounting to 173.27% or equal to Rp. 3,083,753 million.

In this liability there is still a bond debt of Rp. 1 trillion which was issued on June 21, 2016 and the loan funds of Bank Mandiri, BRI and BNI syndicated loan facilities Rp. 1.3 trillion for a period of seven years used for structuring the port of Belawan, strengthening the container dock at Perawang port of Pekanbaru, extension of the pier at the port of Dumai, construction of the port of Sei Kolak Kijang in Tanjung Pinang and structuring the port of Malahayati in Aceh.

Nevertheless, the position of this liability is 159.43% above the target of the 2018 RKAP which is Rp. 10,156,395 million.

Short-term liabilities contributed 35.51% and long-term liabilities amounted to 64.49% of the company's total liabilities.

The following are details of company liabilities in 2017 and 2018:

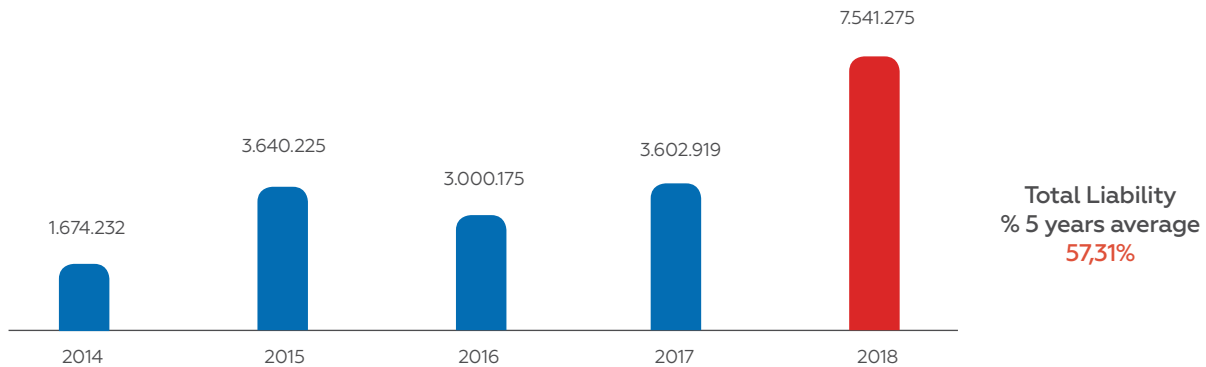
Tabel Liabilitas (Rp Juta)

Table of Liability (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liability	1.823.138	705.049	2.677.741	379,80	46,88
2.	Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liability	1.779.782	4.025.203	4.863.535	120,83	173,27
	Jumlah Liabilitas Total Liability	3.602.920	4.730.252	7.541.275	159,43	109,31

Liabilitas Perusahaan selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 57,31% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2015 sebesar 117,43% dan pertumbuhan yang menurun terdapat di tahun 2016 sebesar -17,58%, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

The Company's liabilities over the last five years grew by an average of 57.31% with the highest growth in 2015 amounting to 117.43%, and declining growth in 2016 of -17.58%, as illustrated in the chart below:



5. Liabilitas Jangka Pendek

Perusahaan telah mencatatkan realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2018 sebesar Rp. 2.677.741 juta, meningkat sebesar Rp. 854.603 juta atau 46,88% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.823.138 juta. Realisasi ini mencapai 379,80% di atas RKAP 2018 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 705.049 juta. Utang usaha di tahun 2018 yang terdiri dari utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp. 1.775.159 juta merupakan 66,29% dari total liabilitas jangka pendek.

Berikut ini rincian capaian liabilitas jangka pendek tahun 2017 dan 2018:

5. Short-Term Liability

The Company has recorded the realization of the 2018 short-term liabilities of Rp. 2,677,741 million, an increase of Rp. 854,603 million or 46.88% when compared to the previous year which amounted to Rp. 1,823,138 million. This realization reached 379.80% above the 2018 RKAP which had been set at Rp. 705,049 million. Accounts payable in 2018 which consist of accounts payable from related parties and third party business loans amounting to Rp. 1,775,159 million representing 66.29% of total short-term liabilities.

The following are details of the achievements of short-term liabilities for 2017 and 2018:

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

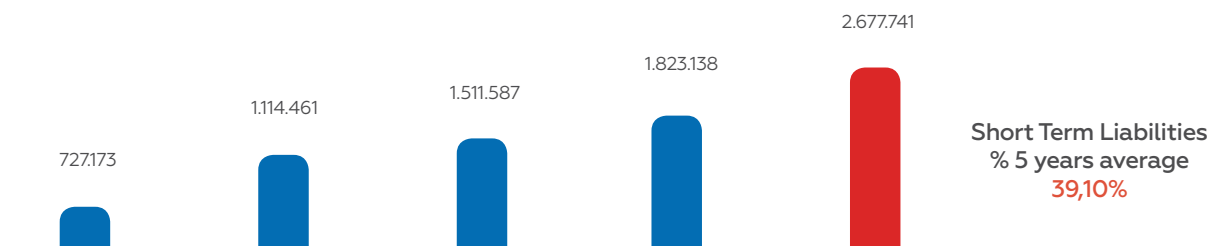
Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta)

Table of Short-Term Liabilities (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	A	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Utang Usaha Account Payable	1.432.473	393.622	1.775.159	450,98	23,92
2.	Utang Lain-Lain Other Accounts Payable	12.448	231.231	22.163	9,58	78,04
3.	Utang Pajak Tax Payable	48.078	41.334	77.508	187,51	61,21
4.	Biaya yang masih harus dibayar Accrued Expense Payable	166.380	7.433	503.599	6.775,18	202,68
5.	Pendapatan diterima dimuka jangka pendek Short-Term Prepaid Income	110.877	31.428	74.312	236,45	(32,98)
6.	Utang Bank Jangka Panjang yang akan jatuh tempo Long-Term Bank Payable Bank Due	52.883	194.250	175.000	90,09	230,92
	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	1.823.138	705.049	2.677.741	379,80	46,88

Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan liabilitas jangka pendek rata-rata sebesar 39,10%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2015 yakni sebesar 53,26%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 20,61%. pertumbuhan liabilitas jangka pendek selama lima tahun sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

During the last five years, the growth of short-term liabilities average at 39,10%, with the highest growth occurring in 2015 at 53,26%. While the lowest growth occurred in 2017 at 20,61%. growth of short-term liabilities for five years as illustrated in the chart below:



6. Liabilitas Jangka Panjang

Perusahaan telah mencatatkan realisasi liabilitas jangka panjang tahun 2018 sebesar Rp. 4.863.535 juta, meningkat sebesar Rp. 3.083.753 juta atau 173,27% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.779.782 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut antara lain disebabkan oleh naiknya utang bank jangka panjang sebesar 928,97% terutama adanya tambahan pinjaman kredit sindikasi dari 3 (tiga) bank untuk perusahaan sebesar Rp. 1.050.000 juta yang mengalami kenaikan 176,40% dan pinjaman untuk entitas anak sebesar Rp. 2.489.720 juta yang mengalami kenaikan 100,00% dari tahun sebelumnya. Realisasi ini mencapai 120,83% di atas RKAP 2018 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.025.203 juta.

Berikut ini rincian capaian liabilitas jangka panjang tahun 2017 dan 2018:

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Utang bank jangka panjang Long-term Bank Payable	327.000	2.524.014	3.364.720	133,31	928,97
2.	Utang obligasi Bond Payable	996.601	996.671	947.432	95,06	(4,93)
3.	Pendapatan diterima di muka jangka panjang Prepaid long-term income	209.725	245.867	234.184	95,25	11,66
4.	Liabilitas pajak tangguhan Deffered Taxes Liabilities	51.568	20	54.967	274.835,00	6,60
5.	Liabilitas imbalan kerja Employee benefits Liabilities	194.888	258.631	262.232	101,39	34,56
	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-term Liabilities	1.779.782	4.025.203	4.863.535	120,83	173,27

6. Long-term Liabilities

The Company has recorded the realization of 2018 long-term liabilities of Rp. 4,863,535 million, an increase of Rp. 3,083,753 million or 173.27% when compared to the previous year which amounted to Rp. 1,779,782 million. The increase in long-term liabilities was partly due to an increase in long-term bank loans of 928.97%, mainly due to additional syndicated loans from 3 (three) banks for companies amounting to Rp. 1,050,000 million which increased by 176.40% and loans for subsidiaries amounting to Rp. 2,489,720 million which increased by 100% from the previous year. This realization reached 120.83% above the 2018 RKAP which had been set at Rp. 4,025,203 million.

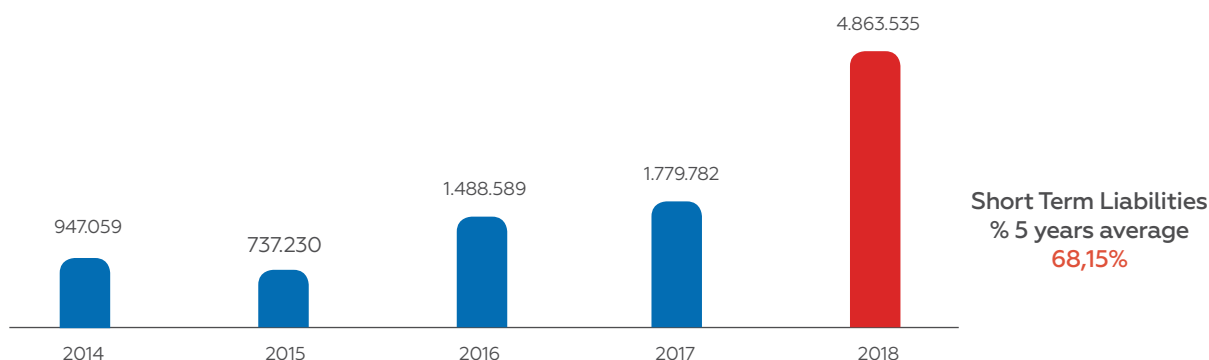
The following are details of the achievements of long-term liabilities in 2017 and 2018:

Table of Long-term Liabilities (Rp Million)

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan liabilitas jangka panjang rata-rata sebesar 68,15% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2018 sebesar 173,27%. Liabilitas perusahaan di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 209.829 juta atau turun 22,16%, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

During the last five years, the average growth in long-term liabilities was 68.15% with the highest growth in 2018 amounting to 173.27%. The company's liabilities in 2015 decreased by Rp. 209,899 million or down by 22.16%, as illustrated in the chart below:



7. Ekuitas Perusahaan

Perusahaan telah mencatatkan ekuitas perusahaan tahun 2018 sebesar Rp. 6.479.577 juta, naik sebesar Rp. 1.575.353 juta atau 32,12% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 4.904.224 juta. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kepentingan non pengendali sebesar 1.096,30%. Realisasi ini mencapai 119,41% di atas RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp. 5.426.143 juta.

7. Equity of the Company

The company has listed the company's equity in 2018 of Rp. 6,479,577 million, increased by Rp. 1,575,353 million or 32.12% when compared to the previous year which amounted to Rp. 4,904,224 million. This condition was mainly due to the increase in non-controlling interests by 1,096.30%. This realization reached 119.41% above the 2018 RKAP which was set at Rp. 5,426,143 million.

Berikut ini rincian capaian ekuitas perusahaan tahun 2017 dan 2018:

The following are details of the company's equity achievements in 2017 and 2018:

Tabel Ekuitas (Rp Juta)

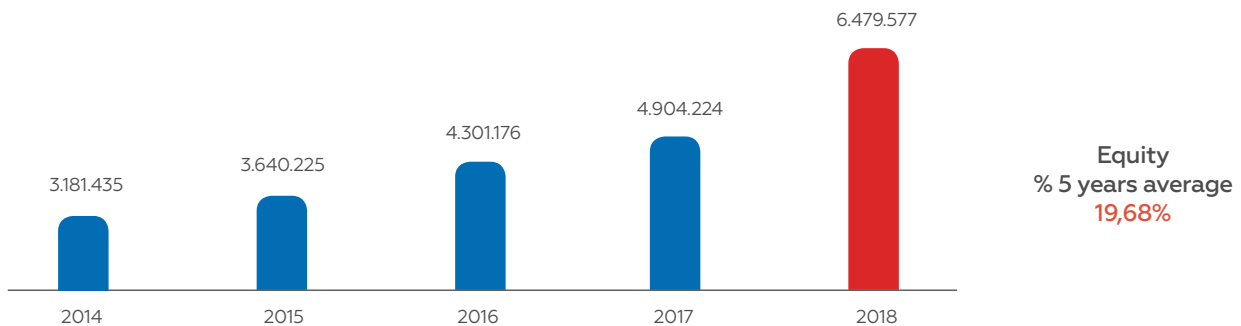
Table of Equity (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Modal Saham Capital Stock	1.700.000	3.000.000	1.700.000	56,67	0,00
2.	Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) Undetermined Status Government Status (BPYBDS)	525.885	0	527.133	-	0,24
3.	Saldo Laba Retained Earnings	2.719.350	2.489.828	3.380.016	135,75	24,29

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
4.	Pengukuran kembali imbalan pasca kerja Post Employment Benefits Re-measurement	(127.153)	(114.903)	(158.093)	137,59	24,33
5.	Kepentingan non pengendali Non-controlling Interest	86.142	51.218	1.030.521	2.012,03	1.096,30
	Jumlah Ekuitas Total Equity	4.904.224	5.426.143	6.479.577	119,41	32,12

Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan ekuitas perusahaan rata-rata sebesar 19,68% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2018 sebesar 32,12% dan pertumbuhan terendah terdapat di tahun 2017 sebesar 14,02%, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

During the last five years, the company's equity growth averaged was at 19.68% with the highest growth in 2018 amounting to 32.12% and the lowest growth in 2017 at 14.02%, as illustrated in the chart below:



LAPORAN LABA RUGI

Selama tahun 2018, Perusahaan telah berhasil membukukan Laba komprehensif sebesar Rp. 873.931 juta atau mengalami peningkatan sebesar 10,22% dari tahun 2017 sebesar Rp. 792.895 juta. Peningkatan tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan pelayanan jasa peti kemas sebesar 14,56%, pendapatan pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar 11,13% dan pelayanan jasa lainnya sebesar 59,71%. Di sisi lain, beban usaha pada tahun 2018 ini juga mengalami peningkatan sebesar 9,56% dari semula sebesar Rp. 1.705.546 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 1.868.587 juta pada tahun 2018.

Analisis perkembangan Kinerja Keuangan yang dicapai Perusahaan berdasarkan tinjauan laba rugi konsolidasian Tahun Buku 2018, dapat disajikan sebagai berikut:

INCOME STATEMENT

During 2018, the Company managed to record a comprehensive profit of Rp. 873,931 million or an increase of 10.22% from 2017 of Rp. 792,895 million. The increase was supported by an increase in container service revenue by 14.56%, port services revenue of 11.13% and other services at 59.71%. On the other hand, operating expenses in 2018 also increased by 9.56% from Rp. 1,705,546 million in 2017 became Rp. 1,868,587 million in 2018.

Analysis of the development of the Financial Performance achieved by the Company based on the 2018 book year consolidated income statement, can be presented as follows:

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

1. Pendapatan Usaha

Selama tahun 2018, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 3.113.533 juta, meningkat Rp. 362.426 juta atau naik 13,17% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 2.751.107 juta. Terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2018, yaitu pelayanan peti kemas yang naik sebesar Rp. 239.790 juta atau 18,34%, pelayanan barang dan non peti kemas yang naik sebesar Rp. 41.619 juta atau 11,45% serta kenaikan pendapatan dari pelayanan jasa penunjang sebesar Rp. 70.026 juta atau 11,68%.

Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan trafik peti kemas dalam satuan TEUs sebesar 1,29 juta TEUs atau naik sebesar 12,74% dari tahun 2017 sebesar 1,15 juta TEUs. Meski begitu, realisasi pendapatan usaha mencapai 90,21% di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 3.451.239 juta. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Pendapatan pelayanan jasa kapal tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh adanya penurunan call kapal di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
- b. Pendapatan pelayanan jasa non peti kemas (barang) tidak tercapai target karena terjadinya perubahan pola angkutan barang dari non peti kemas menjadi peti kemas sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan pelayanan non peti kemas namun dari sisi pelayanan peti kemas justru meningkat.
- c. Pendapatan pelayanan jasa penunjang juga tidak mencapai target, karena belum tercapainya target pendapatan anak usaha terutama pada segmen pelayanan logistik/konsolidasi dan distribusi barang.

1. Business Revenue

During 2018, the Company managed to record a business income of Rp. 3,113,533 million, an increase of Rp. 362,426 million or an increase of 13.17% compared to 2017 of Rp. 2,751,107 million. There are 3 (three) sources of income that experienced the highest growth in 2018, namely container services which rose by Rp. 239,790 million or 18.34%, goods and non-container services increased by Rp. 41,619 million or 11.45% and an increase in income from supporting services amounting to Rp. 70,026 million or 11.68%.

This increase in income was due to an increase in container traffic in TEUs of 1.29 million TEUs, an increase of 12.74% from 2017 of 1.15 million TEUs. Even so, the realization of operating revenues reached 90.21% below the predetermined target, which is Rp. 3,451,239 million. This is partly due to:

- a. Ship service revenue does not reach the target, this is caused by a decrease in ship calls in the Terminal for Self-interest (TUKS).
- b. Revenues from non-container services (goods) were not achieved due to changes in the pattern of transportation of goods from non-containers to containers, resulting in a decrease in non-container service revenues but in terms of container services it increased.
- c. Revenue from supporting services also did not reach the target, because the target of revenue of subsidiaries was not yet achieved, especially in the logistics /consolidation and goods distribution segment.

Berikut ini rincian capaian pendapatan usaha tahun 2017 dan 2018 :

The following are details of the achievement of business income in 2017 and 2018

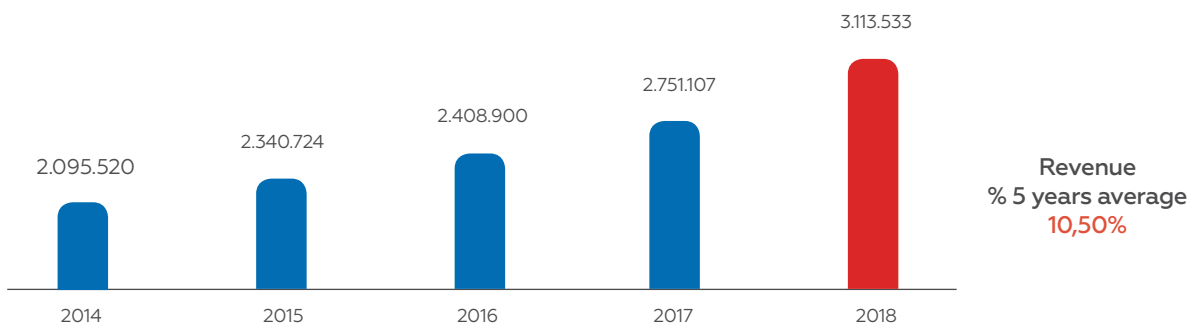
Tabel Pendapatan Usaha (Rp Juta)

Table of Business Revenue (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal Ship Service Revenue	362.240	41,905	63.545	82,27	0,36
2.	Pendapatan Pelayanan Jasa Peti Kemas Container Service Revenue	1.307.243	1.384.038	1.547.033	111,78	18,34
3.	Pendapatan Pelayanan Jasa Non Peti Kemas Non-Container Service Revenue	363.403	458.875	405.022	88,26	11,45
4.	Pendapatan Pelayanan Jasa Penunjang Passenger Service Revenue	599.516	1.062.992	669.542	62,99	11,68
5.	Pendapatan Rupa-Rupa Miscellaneous Revenue	118.705	103,429	128.391	124,13	8,16
6.	Jumlah Pendapatan Usaha Total Business Revenue	2.751.107	3.451.239	3.113.533	90,21	13,17

Selama periode lima tahun terakhir, pendapatan usaha rata-rata tumbuh sebesar 10,50%. Kenaikan pendapatan usaha tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 14,21% dan pendapatan usaha yang terendah terdapat di tahun 2016 sebesar 2,91% sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini:

During the last five years, the average operating income grew by average of 10.50%. The highest increase in operating income is in 2017 at 14.21% and the lowest operating income in 2016 is 2.91% as illustrated in the chart below:



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

2. Beban Usaha

Beban usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari beban pokok, beban pemasaran serta beban umum dan administrasi. Beban usaha dalam tahun 2018 sebesar Rp. 1.868.588 juta lebih tinggi 9,56% dari beban usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.705.546 juta. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar 20,26% dan meningkatnya beban usaha pelayanan jasa lainnya sebesar 22,28%.

Kendati demikian, realisasi beban usaha mencapai 90,50% tidak melampaui target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.064.725 juta karena semakin optimalnya penataan pelabuhan sehingga terdapat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Berikut ini rincian capaian pendapatan usaha tahun 2017 dan 2018:

Tabel Beban Usaha (Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Beban pokok Main Expense	1.353.233	1.600.352	1.484.938	92,79	9,73
2.	Beban pemasaran Marketing Expense	31.818	20.190	31.837	157,69	0,06
3.	Beban umum dan administrasi Administrative and General Expenses	320.495	444.183	351.812	79,20	9,77
4.	Jumlah Beban Usaha Total Operating Expense	1.705.546	2.064.725	1.868.588	90,50	9,56

Dalam lima tahun terakhir, beban usaha berfluktuasi dengan tumbuh rata-rata sebesar 6,02%. Pada tahun 2015 beban usaha mengalami penurunan sebesar 14,85% dan pada tahun 2017 beban usaha mengalami penurunan sebesar 2,85%.

Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi di tahun 2018 tumbuh sebesar 51,51% sebagaimana digambarkan dalam grafik di samping.

2. Operating Expense

The operating expense incurred by the company consist of principal expenses, marketing expenses as well as general and administrative expenses. Operating expenses in 2018 are Rp. 1,868,588 million 9.56% higher than the previous year's operating expenses of Rp. 1,705,546 million. This condition was caused by an increase in port service business expenses by 20.26% and an increase in other service business expenses by 22.28%.

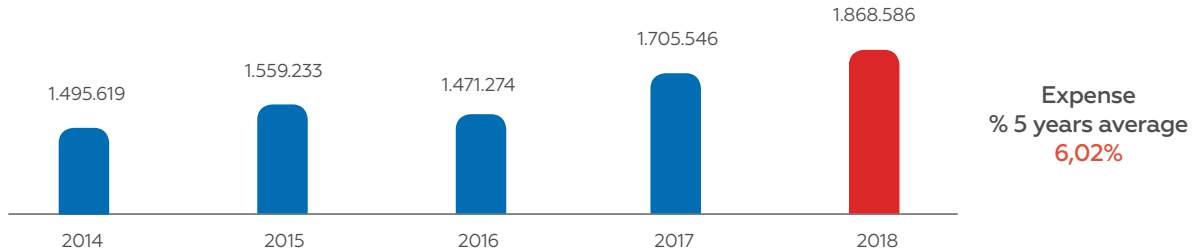
Nevertheless, the realization of operating expenses reached 90.50% not exceeding the set budget target of Rp. 2,064,725 million of the optimal arrangement of ports so that there is efficiency and effectiveness in the use of resources.

The following are details of the achievement of business revenue in 2017 and 2018

Table of Operating Expense (Rp Million)

In the last five years, operating expenses fluctuated with an average growth of 6.02%. In 2015 the operating expenses decreased by 14.85% and in 2017 the operating expenses decreased by 2.85%.

Nominal highest growth occurred in 2018 growing by 51.51% as illustrated in the chart below:



3. Laba Usaha

Faktor yang mendorong peningkatan perolehan laba usaha adalah optimalisasi pendapatan usaha dan efisiensi beban usaha. Perusahaan sepanjang tahun 2018 telah berhasil memperoleh laba usaha sebesar Rp. 1.351.905 juta di atas 22,83% dari anggaran sebesar Rp. 1.386.514 juta. Pelayanan jasa peti kemas memberikan kontribusi laba usaha sebesar 78,13%, pelayanan jasa kepelabuhan memberikan kontribusi laba usaha sebesar 47,55% serta pelayanan jasa lainnya dengan kontribusi sebesar -25,68%.

Dibandingkan dengan perolehan laba usaha di tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.170.893 juta, mengalami kenaikan 15,46% atau naik sebesar Rp. 181.012 juta. Perolehan laba usaha ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar 13,17% yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban usaha sebesar 9,56%. Manajemen dalam tahun 2018 telah menetapkan kebijakan efisiensi dan efektifitas pengendalian biaya usaha untuk mensikapi kondisi trafik dan produksi yang belum membaik sehubungan kondisi perekonomian global.

Tabel Laba Usaha (Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Pendapatan Usaha Business Revenue	2.751.107	3.451.239	3.113.533	90,21	13,17
2.	Beban Usaha Operating Expense	1.705.546	2,064.725	1.868.587	90,50	9,56
3.	Pendapatan (Beban) Diluar Usaha Non- Operating (expense) Revenue	125.333	(285.858)	106.960	37,42	(14,66)
4.	Laba Usaha Operating Income	1.170.893	1.386.514	1.351.905	122,83	15,46

3. Operating Income

The factor that drives the increase in operating income is the optimization of business income and efficiency of operating expenses. The company throughout 2018 has managed to obtain an operating income of Rp. 1,351,905 million above 22.83% of the budget of Rp. 1,386,514 million. Container services contributed operating income of 78.13%, port services contributed 47.55% to operating income and other services with a contribution of -25.68%.

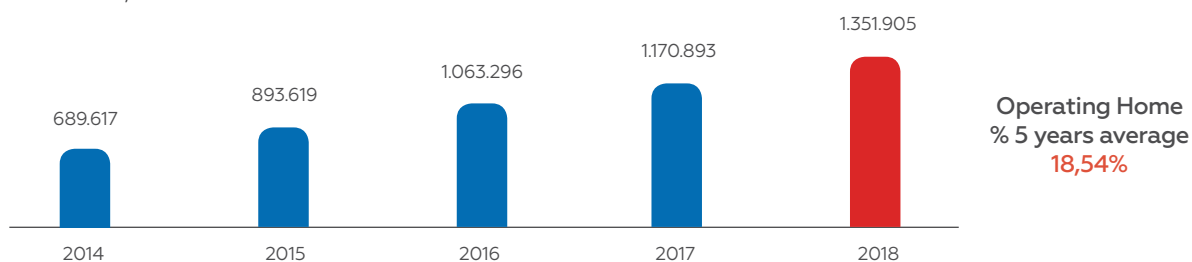
When compared with the operating income in the previous year amounting to Rp. 1,170,893 million, an increase of 15.46% or an increase of Rp. 181,012 million. This operating income was mainly influenced by the increase in revenues by 13.17%, which was slightly higher than the increase in operating expenses of 9.56%. Management in 2018 has established a policy of efficiency and effectiveness in controlling business costs to address traffic and production conditions that have not improved due to global economic conditions.

Tabel of Operating Income (Rp Million)

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Perusahaan mencatat rata-rata pertumbuhan laba usaha selama periode 2014 – 2018 sebesar 18,54%. Pertumbuhan laba usaha tertinggi terdapat di tahun 2015 sebesar 29,58%, sedangkan pertumbuhan laba usaha terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 10,12%.

The company recorded the average growth in operating income for the period of 2014 - 2018 was 18.54%. The highest growth of operating income in 2015 was 29.58%, while the lowest operating profit growth occurred in 2017 at 10.12%.



4. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Pembayaran pajak kepada negara berupa pajak final, pajak kini dan pajak penghasilan berbanding lurus dengan peningkatan laba perusahaan

Realisasi pembayaran pajak yang dilaksanakan perusahaan tahun 2018 sebesar Rp. 291.111 juta atau 96,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 300.400 juta.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 262.256 juta mengalami kenaikan 11,00% atau sebesar Rp. 28.855 juta. Hal ini berarti perusahaan tetap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.

Tabel Beban Pajak (Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Beban Pajak Income Tax	262.256	300.400	291.111	96,91	11,00
2.	Jumlah Beban Pajak Total Income Tax	262.256	300.400	291.111	96,91	11,00

Perusahaan mencatat rata-rata beban pajak penghasilan selama lima tahun terakhir sebesar 23,03%. Dalam periode tersebut beban pajak penghasilan dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2016 sebesar 79,95% dan pertumbuhan yang terendah terdapat di tahun 2017 sebesar -0,11%

4. Income Tax

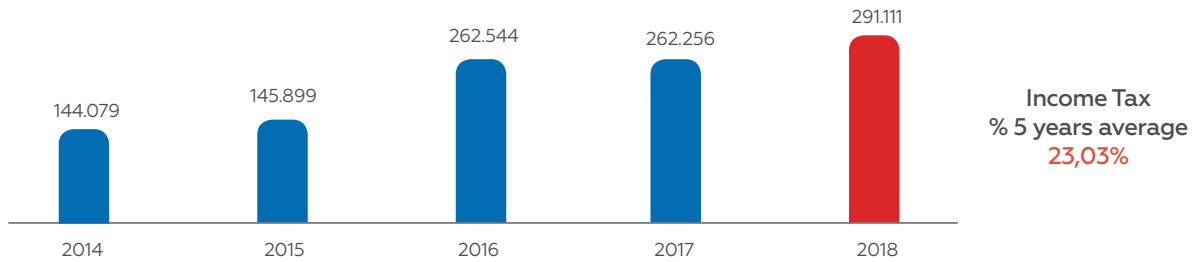
Current tax expense is determined based on the estimated current fiscal year taxable income of fiscal year. Payment of taxes to the state in the form of final tax, current tax, and income tax is proportionally in line with the increase in operating revenue.

Realization of tax payments carried out by the company in 2018 was Rp. 291,111 million or 96.91% of the budget set at Rp. 300,400 million.

Compared to the previous year of Rp. 262,256 million it is experiencing an increase by 11.00% or Rp. 28,855 million. This means that the company continues to contribute to the country's economic development.

Table of Income Tax (Rp Million)

The company recorded an average income tax expense over the past five years at 23.03%. In this period the income tax expense with the highest growth was in 2016 at 79.95% and the lowest growth in 2017 was -0.11%.



5. Pendapatan Komprehensif Lain

Pada tahun 2018, pendapatan komprehensif lain terealisasi dengan capaian negatif sebesar Rp. -12.500 juta. Pendapatan ini merupakan pengukuran kembali program imbalan pasti meningkat Rp. 18.690 juta atau naik 152,57% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh negatif sebesar Rp. -12.500 juta.

5. Other Comprehensive Income

In 2018, other comprehensive income was realized with a negative achievement of Rp. -12,500 million. This income is a re-measurement of the defined benefit program increasing by Rp. 18,690 million or an increase of 152.57% when compared to 2017 which grew negatively by Rp. -12,500 million.

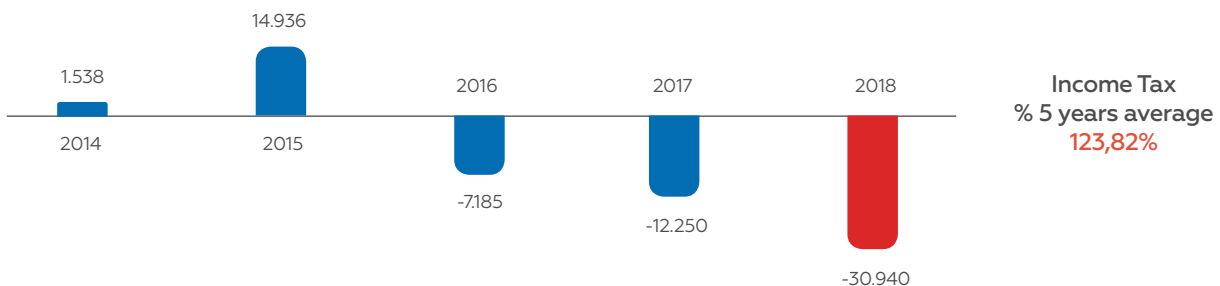
Tabel Pendapatan Komprehensif Lain (Rp Juta)

Table of Other Comprehensive Income (Rp Million)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Pengukuran kembali program imbalan pasti Re-measurement of defined benefit program	(12.250)	0	(30.940)	0,00	152,57
2.	Jumlah Pendapatan Komprehensif lain Total Other Comprehensive Income	(12.250)	0	(30.940)	0,00	152,57

Perusahaan mencatat rata-rata pendapatan komprehensif lain selama lima tahun terakhir sebesar 123,82%. Dalam periode tersebut pendapatan komprehensif sejak tahun 2016 selalu tumbuh negatif dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2015 sebesar 871,13% dan pertumbuhan yang terendah terdapat di tahun 2018 sebesar -157,27%

The company recorded average of other comprehensive income over the past five years by 123.82%. In that period, comprehensive income since 2016 continued growing negatively with the highest growth in 2015 amounting to 871.13% and the lowest growth in 2018 amounting to -157.27%



6. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perusahaan berhasil membukukan laba komprehensif untuk tahun 2018 sebesar Rp. 873.931 juta, meningkat sebesar

6. Current Year Comprehensive Income

The company managed to record comprehensive income for 2018 of Rp. 873,931 million, an increase

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Rp. 81.036 juta atau naik 10,22% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 792.895. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan pelayanan jasa pelabuhan di sejumlah pelabuhan seperti pelabuhan cabang Belawan, Dumai, Terminal Parawang, Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB). Jumlah laba komprehensif tahun berjalan ini mencapai 110,04% dari target laba komprehensif tahun 2018 sebesar Rp. 800.483 juta.

Dari perolehan laba komprehensif tersebut yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk Rp. 880.875 juta atau mencapai 100,79% dari jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp. 873.931 juta terutama disebabkan oleh laba komprehensif untuk kepentingan non pengendali mengalami penurunan sebesar 0,79% atau Rp. -6.944 juta.

of Rp. 81,036 million or an increase by 10.22% from the previous year of Rp. 792,895. The increase was driven by increased revenue from port services in a number of ports such as the Belawan branch port, Dumai, Parawang Terminal, Belawan International Container Terminal (BICT) and the Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB). The total comprehensive income for the current year reached 110.04% from the comprehensive income target of 2018 of Rp. 800,483 million.

From the acquisition of comprehensive income that can be distributed to the parent entity owner Rp. 880,875 million or reaching 100.79% of the total comprehensive income for the year amounting to Rp. 873,931 million mainly due to comprehensive income for non-controlling interests which decreased by 0.79% or Rp. -6,944 million.

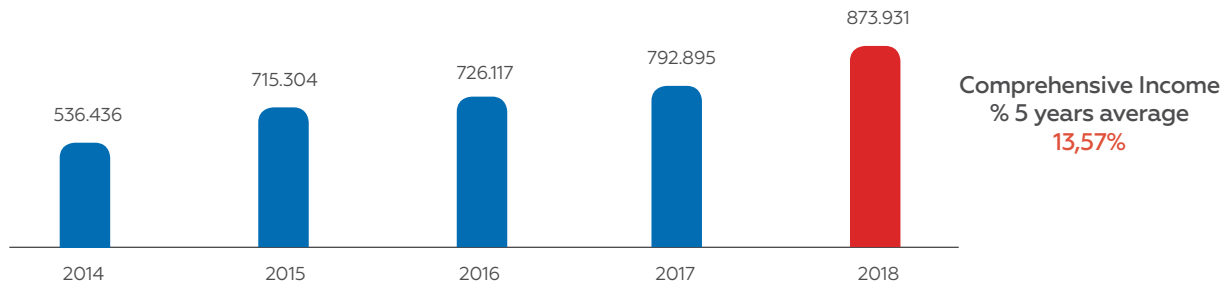
Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan
(Rp Juta)

No	Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization of 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
	a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
1.	Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	791.371	800.483	880.875	110,04	11,31
2	Kepentingan non pengendali Non-Controlling interest	1.524	(227)	(6.944)	3.059,03	(355,64)
	Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Current Fiscal Year Comprehensive Income	792.895	800.255	873.931	109,21	10,22

Table of Current Fiscal Year Comprehensive Income
(Rp Million)

Perolehan laba komprehensif selama 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dengan tumbuh rata-rata 13,57%. Dari data dalam tabel dibawah ini, laba koreprehensif tahun berjalan dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 33,43% dan pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2016 1,51%.

Comprehensive income for the past 5 years continues to increase with an average growth of 13.57%. From the data in the table below, the comprehensive income for the year with the highest growth was in 2015 at 33.43% and the lowest growth in 2016 was 1.51%.



LAPORAN ARUS KAS

Penyajian Laporan Arus Kas Perusahaan (Cash Flow) mengacu kepada PSAK 2 (Revisi 2009) merupakan informasi perubahan kas dan setara kas, yang disusun dengan menggunakan metode langsung, ditujukan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dan setara kas serta memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas yang sehat merupakan bukti kinerja keuangan yang positif dan menjadi landasan untuk mendukung perluasan usaha. Perusahaan terus mengambil langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan arus kas melalui upaya peningkatan produktivitas guna memperkokoh siklus arus kasnya.

Laporan Arus Kas Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan yang terdiri dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Tabel Arus Kas (Rp Juta)

No	Uraian Description	Tahun/ Year			Pertumbuhan Growth
		2016	2017	2018	
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	1.628.768	1.936.175	803.884	(19,81)
2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(1.320.398)	(2.393.365)	(2.380.457)	40,36
3.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	413.016	128.831	1.703.349	576,67
4.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	721.385	(328.359)	126.777	(57,94)
5.	Saldo Awal Kas Dan Setara Kas Beginning Balance of Cash and Cash Equivalent	1.479.384	2.200.770	1.872.411	16,92
6.	Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas Ending Balance of Cash and Cash Equivalent	2.200.770	1.872.411	1.999.188	(4,08)

1. Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Realisasi penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2018 mencapai Rp. 803.884 juta, lebih rendah 58,48% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 1.936.175 juta. Hal ini, terutama disebabkan oleh:

CASH FLOW STATEMENT

The presentation of the Cash Flow Statement refers to PSAK 2 (Revised 2009), which is information on changes in cash and cash equivalents, which are prepared using the direct method, aimed at assessing the ability of the company to produce cash and cash equivalents as well as meeting the needs in operations activities, investment and funding. Healthy cash flow is a testament to positive financial performance and is the basis for supporting business expansion. The company continues to take steps in order to improve its ability to generate cash flow through efforts to increase productivity to strengthen its cash flow cycle.

The Company's Cash Flow Statement consists of 3 (three) cash flow activities and the company's cash outflows which consist of Cash Flow from Operating Activities, Cash Flows from Investment Activities and Cash Flow from Funding Activities.

Table of Cash Flow (Rp Million)

1. Cashflow of Operations Activities

The realization of net cash receipts from operations activities in 2018 reached for Rp. 803,884 million, decreased by 58.48% compared to the realization in 2017 of Rp. 1,936,175 million. This is mainly due to:

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

- | | |
|---|--|
| <p>a. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.608.938 juta lebih tinggi 27,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.826.364 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 22,01%.</p> <p>b. Penerimaan kas lain-lain sebesar Rp. 197.479 juta lebih tinggi 57,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 125.333 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 28,62%.</p> <p>c. Pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya sebesar Rp. 2.150.799 juta lebih tinggi 223,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 664.730 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 110,10%.</p> <p>d. Pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 677.836 juta lebih tinggi 171,14% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 249.992 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 87,94%.</p> <p>e. Beban keuangan sebesar Rp. 173.897 juta lebih tinggi 72,52% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 100.799 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 36,26%.</p> | <p>a. Cash receipts from customers amounting to Rp. 3,608,938 million, 27.69% higher than the previous year of Rp. 2,826,364 million with growth over the past three years reaching an average of 22.01%.</p> <p>b. Other cash receipts of Rp. 197,479 million, 57.56% higher than the previous year of Rp. 125,333 million with growth over the past three years reaching an average of 28.62%.</p> <p>c. Cash outlays for payments to suppliers, employees and others of Rp. 2,150,799 million, 223.56% higher than the previous year of Rp. 664,730 million with growth over the past three years reaching an average of 110.10%.</p> <p>d. Payment of income tax of Rp. 677,836 million, 171.14% higher than the previous year which was Rp. 249,992 million with growth over the past three years reaching an average of 87.94%.</p> <p>e. Financial expenses of Rp. 173,897 million 72.52% higher than the previous year of Rp. 100,799 million with growth over the past three years reaching an average of 36.26%.</p> |
|---|--|

Rincian arus kas dari aktivitas operasi dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Details of cash flows from operating activities in the last three years are as follows:

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Rp Juta)

Table of Cash Flow of Operating Activities (Rp Million)

No	Uraian Description	Tahun/ Year			Pertumbuhan Growth
		2016	2017	2018	
1.	Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customer	2.429.658	2.826.364	3.608.938	22,01
2.	Penerimaan kas lain-lain Other Cash Receipts	125.740	125.333	197.479	28,62
3.	Pembayaran kas ke pemasok, karyawan dan lainnya Cash payments to suppliers, employees and others	(687.941)	(664.730)	(2.150.799)	110,10
4.	Pembayaran pajak penghasilan Income Tax Payment	(238.689)	(249.992)	(677.836)	87,94
5.	Beban Keuangan Finance Expenses	0	(100.799)	(173.897)	36,26
6.	Kas bersih dari aktivitas operasi Net Cash of Operations Activities	1.628.768	1.936.175	803.884	(19,81)

2. Arus Kas dari Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan Perusahaan dari kegiatan investasi pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.380.457 juta, lebih rendah 0,54% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 2.393.365 juta. Penurunan berasal dari hasil:

2. Cash Flow of Investment Activities

Net cash used by the Company from investment activities in 2018 reached Rp. 2,380,457 million, decreased by 0.54% compared to 2017 of Rp. 2,393,365 million. The decline is results of:

- a. Pengeluaran investasi sebesar Rp. 235.196 juta lebih rendah 13,31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 271.307 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata -20,61%.
- b. Perolehan aset tetap dan properti investasi sebesar Rp. 2.145.261 juta lebih tinggi 1,04% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.123.193 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 62,48%.
- c. Penjualan aset tetap sebesar Rp. 0,00 juta lebih rendah 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.136 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata -86,35%

Rincian arus kas dari aktivitas investasi dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp Juta)

No	Uraian Description	Tahun/ Year			Pertumbuhan Growth
		2016	2017	2018	
1.	Pengeluaran investasi Investment Expenses	(376.351)	(271.307)	(235.196)	(20,61)
2.	Perolehan aset tetap dan properti investasi Acquisition of fixed assets and investment property	(948.207)	(2.123.193)	(2.145.261)	62,48
3.	Penjualan aset tetap Sales of Fixed Asset	4.159	1.136	0	(86,35)
4.	Kas bersih dari aktivitas Investasi Net Cash of Investment Activities	(1.320.398)	(2.393.365)	(2.380.457)	40,36

3. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Realisasi kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2018 mencapai Rp. 1.703.349 juta, lebih tinggi 1.222,16% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 128.831 juta. Kondisi ini terjadi karena adanya:

- a. Penerimaan dana dari lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 2.154.430 juta, meningkat 476,05% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 374.000 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 476,05%.
- b. Pembayaran utang bank sebesar Rp. 64.438 juta, lebih rendah 5,59% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.250 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 476,05%
- c. Penambahan modal disetor pada entitas anak sebesar Rp. 135.393 juta, lebih rendah 413,24% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 43.223 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir

- a. Investment expenditure of Rp. 235,196 million, 13.31% lower than the previous year of Rp. 271,307 million with growth over the past three years reaching an average of -20.61%.
- b. The acquisition of fixed assets and investment property is Rp. 2,145,261 million 1.04% higher than the previous year of Rp. 2,123,193 million with growth over the past three years reaching an average of 62.48%.
- c. Sales of fixed assets of Rp. 0.00 million 100% lower than the previous year of Rp. 1,136 million with growth over the past three years reaching an average of -86.35%

Details of cash flows from investing activities in the last three years are as follows:

Table of Cash Flow of Investment Activities (Rp Million)

3. Cash Flow of Funding Activities

Net cash realization from funding activities in 2018 reached Rp. 1,703,349 million, increased by 1,222.16% compared to 2017 amounting to Rp. 128,831 million. This condition occurs because of:

- a. Receipt of funds from other financial institutions is Rp. 2,154,430 million, an increase of 476.05% from the previous year which amounted to Rp. 374,000 million with growth over the past three years reaching an average of 476.05%.
- b. Payment of bank debt of Rp. 64,438 million, 5.59% lower than the previous year of Rp. 68,250 million with growth over the past three years reaching an average of 476.05%.
- c. Addition of paid-up capital to a subsidiary is Rp. 135,393 million, decreased by 413.24% from the previous year which was recorded at Rp. 43,223 million with growth over the past three years

mencapai rata-rata 202,81%.

- d. Pembayaran dividen non pengendali sebesar Rp. 102 juta lebih tinggi 67,21% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 61 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 67,21%.
- e. Pembayaran dividen dan lainnya mencapai Rp. 251.147 juta lebih tinggi 14,12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 220.081 juta dengan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 61,54%.

reaching an average of 202.81%.

- d. Non-controlling dividend payment of Rp. 102 million higher 67.21% than the previous year which was recorded at Rp. 61 million with growth over the past three years reached an average of 67.21%.
- e. Dividend and other payments reach Rp. 251,147 million higher 14.12% from the previous year of Rp. 220,081 million with growth over the past three years reaching an average of 61.54%.

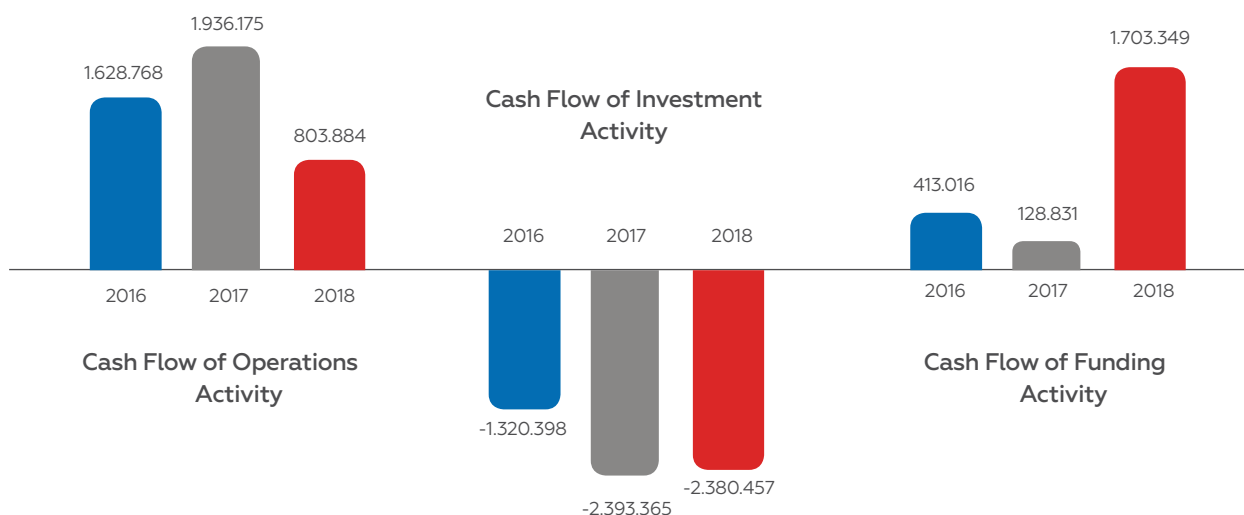
Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Details of cash flows from funding activities in the last three years are as follows:

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Rp Juta)

Table of Cash Flow of Funding Activities (Rp Million)

No	Uraian Description	Tahun/ Year			Pertumbuhan Growth
		2016	2017	2018	
1.	Penerimaan utang obligasi Receipt of Bond Debt	995.771	0	0	(100,00)
2.	Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya Receipt from other financial institutions	0	374.000	2.154.430	476,05
3.	Pembayaran utang bank Payment of Bank Debt	(447.612)	(68.250)	(64.438)	(45,17)
4.	Penambahan modal disetor pada entitas anak Addition of paid-in capital to subsidiaries	40.160	43.223	(135.393)	(202,81)
5.	Pembayaran dividen non pengendali Non-controlling dividend payments	0	(61)	(102)	67,21
6.	Pembayaran dividen dan lainnya Dividend Payments and Others	(105.326)	(220.081)	(251.147)	61,54
7.	Kas bersih dari aktivitas Pendanaan Net Cash of Funding Activities	413.016	128.831	1.703.349	576,68



TINJAUAN KINERJA RASIO KEUANGAN

REVIEW OF FINANCIAL RATIO PERFORMANCE

Laporan keuangan merupakan suatu laporan sangat penting yang digunakan untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Salah satu cara yang paling baik digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada periode tertentu.

Dengan merujuk pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Pelindo 1 yang dikelompokkan dalam kategori BUMN Infrastruktur melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan menggunakan sejumlah rasio keuangan.

Dari evaluasi tahun 2014 – 2018, capaian rata-rata pertumbuhan rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan pengelolaan operasional dan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki sejumlah kemampuan antara lain dalam peningkatan pendapatan usaha, pemenuhan kewajiban dan peningkatan laba perusahaan.

Imbalan Pemegang Saham (Return On Equity/ROE), Periode Penagihan Hutang (Collection Period), Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover Ratio), Rasio Perputaran Total Aset (Total Asset Turnover Ratio) dan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (Equity to Asset Ratio) mengalami pertumbuhan yang positif. Meski begitu pertumbuhan rasio Imbalan Investasi (Return On Investment/ROI), Rasio Kas (Cash Ratio) dan Rasio Lancar (Current Ratio) cenderung menurun, karena perusahaan masih dibebani kewajiban dari beberapa entitas anak yang secara operasional belum memberikan pendapatan usaha yang optimal.

The financial statement is a very important report that is used to obtain information relating to the financial position and the results that have been achieved by the company. One of the best ways to analyze a company's financial condition is to analyze financial ratios for a certain period.

Referring to the Decree of the Minister of SOE No: KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment of the Soundness Level of State-Owned Enterprises (BUMN), Pelindo 1 grouped in the category of Infrastructure BUMN conducts an assessment of the company's soundness using a number of financial ratios.

From evaluations in 2014 - 2018, the achievement of the average growth of financial ratios can provide an overview of the success of operational and financial management of the company, so that the company has a number of capabilities, including increasing operating income, fulfilling obligations and increasing profits.

Shareholder Dividend (Return On Equity / ROE), Collection Period, Inventory Turnover Ratio, Total Asset Turnover Ratio and Own Capital Ratio to Total Assets (Equity to Asset Ratio) have been experiencing positive growth. Thus, the growth of the Investment Rewards ratio (Return on Investment / ROI), Cash Ratio and Current Ratio tends to decrease, because the company is still burdened with obligations from several subsidiaries which operationally have not provided optimum operating income.

Rincian kinerja rasio operasional dan rasio keuangan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Details of the performance of operations ratios and financial ratios in the last five years are as follows:

Tabel Kinerja Rasio Rasio Keuangan

Table of Financial Ratios Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Tahun/ Year					Pertumbuhan Growth
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Imbalan Untuk Pemegang Saham Return on Equity	%	22,62	27,47	26,90	29,39	45,10	20,52
2.	Imbalan Untuk Investasi Return on Investment	%	11,23	12,75	10,04	19,84	29,67	34,89
3.	Periode Penagihan Hutang Debt Collection Period	Hari	14,98	24,31	18,99	26,61	11,99	6,40
4.	Rasio Perputaran Persediaan Asset Turnover Ratio	Hari	3,70	2,70	3,06	3,15	2,98	(4,04)
5.	Rasio Perputaran Total Aset Total Asset Turnover Ratio	%	43,16	42,62	38,95	43,69	44,80	1,21
6.	Rasio Total Aset terhadap Modal Sendiri Total Asset to Own Capital Ratio	%	152,63	150,87	169,75	173,47	144,11	(0,85)
7.	Rasio Kas/ Cash Ratio	%	176,00	132,74	145,59	102,70	74,66	(17,92)
8.	Rasio Lancar Current Ratio	%	203,30	158,82	164,15	121,19	97,95	(15,97)
9.	Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	25,53	29,92	30,45	29,21	29,29	3,79

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY ACCOUNT PAYABLE AND ACCOUNT RECEIVABLES COLLECTIBILITY

Kemampuan membayar utang perusahaan dan kemampuan kolektibilitas piutang merupakan persoalan yang sangat penting bagi Pelindo 1. Analisis kemampuan membayar utang diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan analisis kemampuan kolektibilitas piutang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan perusahaan melakukan pengelolaan piutang.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Pelindo 1 dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator antara lain likuiditas, solvabilitas, penilaian utang terhadap modal dan tingkat kesehatan perusahaan, yaitu:

1. Dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang usahanya, Pelindo menggunakan Rasio Likuiditas. Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Pada tahun 2018, angka likuiditas perusahaan sebesar 97,95%, menurun dibandingkan dengan 121,19% pada tahun 2017. Penurunan kemampuan tersebut ditandai dengan capaian tingkat likuiditas sejak tahun 2017 berada dibawah rata-rata sebesar 150,61%. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh menurunnya piutang usaha sebesar 49,03% serta meningkatnya utang usaha sebesar 23,92% dan naiknya utang bank jangka panjang sebesar 928,97%.
2. Pelindo 1 memiliki kemampuan yang optimal untuk memenuhi seluruh utang jangka pendek maupun utang jangka panjang meski tiga tahun terakhir (2016 – 2018) capaian tingkat solvabilitas cenderung menurun dan berada dibawah rata-rata sebesar 250,40%. Capaian tingkat solvabilitas tahun 2018 sebesar 185,92% menurun dibandingkan dengan 236,12% pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset tahun 2018 sebesar 64,81% lebih kecil dari kenaikan jumlah kewajiban tahun 2018 sebesar 109,31%.
3. Kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat digambarkan dari pencapaian rasio utang terhadap modal (debt to equity). Sejak tahun 2014 rasio debt to equity mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 74,14%, dengan rasio terendah pada tahun 2015 sebesar 50,87% dan rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 116,39%.

The ability to pay off corporate liabilities and collectability of accounts receivable is a very important issue for Pelindo 1. Analysis of the ability to pay debts is required in order to get a picture of the company's ability to pay off its liabilities both short and long term, while analyzing the collectability of account receivables is needed to get a picture of the company's ability to manage account receivables.

ABILITY TO PAY ACCOUNT PAYABLE

The ability of Pelindo 1 to fulfill its obligations can be seen from several indicators including liquidity, solvency, valuation of account payable to equity, and the level of company soundness, namely:

1. In measuring the Company's ability to pay its account payable, Pelindo uses a Liquidity Ratio. The amount of the Liquidity Ratio can be used to measure a company's ability to fulfill its obligations or pay its short-term liability. In 2018, the company's liquidity rate was 97.95%, a decrease compared to 121.19% in 2017. The decline in ability was marked by the achievement of liquidity levels since 2017 is below the average of 150.61%. This condition was caused, among others, by the decline in trade receivables by 49.03% and the increase of business liability by 23.92%, and the increase in long-term bank account payable by 928.97%.
2. Pelindo 1 has the optimal ability to pay all short-term and long-term liabilities, even though the last three years (2016 - 2018) the achievement of solvency levels tends to decrease and is below the average of 250.40%. Achievement of solvency level in 2018 of 185.92% was decreased compared to 236.12% in 2017 mainly due to an increase in the number of assets in 2018 by 64.81%, lower than the increase in total liabilities in 2018 by 109.31%.
3. The ability of the company to pay off its obligations both short and long term liabilities can also be illustrated by achieving liability to equity ratio (debt to equity). Since 2014 the debt to equity ratio has increased by an average of 74.14%, with the lowest ratio in 2015 of 50.87% and the highest ratio in 2018 of 116.39%.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY ACCOUNT PAYABLE AND ACCOUNT RECEIVABLES COLLECTIBILITY

No	Keterangan Description	Formula	Tahun/ Year					Rata-Rata Average
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Likuiditas Liquidity	Aset Lancar Utang Lancar Current Asset Current Debt	203,30	158,52	164,15	121,19	97,95	150,61
2	Solvabilitas Solvency	Jumlah Aset Jumlah Utang Total Asset Total Debt	290,02	296,59	243,36	236,12	185,92	250,40
3.	Utang terhadap Modal Debt to Equity	Jumlah Utang Jumlah Ekuitas Total Debt Total Equity	60,20	50,87	69,75	73,47	116,39	74,14

4. Implementasi Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Pelindo 1 pada tahun 2018 memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan konsolidasian dengan skor 95,00 (predikat sehat AA), atau sama dengan capaian tingkat kesehatan perusahaan tahun 2017 dengan skor 95,00 (predikat sehat AA). Dengan perolehan skor penilaian tingkat kesehatan tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi stabil dan memiliki kemampuan optimal untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang tersedia dalam tahun 2018.

4. Implementation of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding the Assessment of the Soundness of State-Owned Enterprises, Pelindo 1 in 2018 obtained the results of the assessment of the soundness status of the consolidated companies with a score of 95.00 (healthy AA predicate), or equal to the achievement of company soundness in 2017 with a score of 95.00 (healthy AA predicate). With the acquisition of a score on the assessment of the level of soundness, it shows that the company is in a stable condition and has the optimal ability to fulfill its obligations by using assets available in 2018.

No	Keterangan Description	Tahun/ Year					Rata-Rata Average
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Aspek Keuangan Financial Aspect	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2	Aspek Operasional Operations Aspect	33,88	33,60	33,60	35,00	35,00	34,22
3.	Aspek Administratif Administrative Aspect	15,00	14,00	13,00	15,00	15,00	14,40
4	Skor Penilaian/ Score	93,88	92,60	91,60	95,00	95,00	93,62
	Predikat Penilaian Rating Predicate	Sehat Sekali	Sehat AA	Sehat AA	Sehat AA	Sehat AA	Sehat AA

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perusahaan mendefinisikan kolektibilitas sebagai pengukuran piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pelanggan/debitur sebagai akibat dari transaksi pelayanan jasa kepelabuhanan dan/atau bentuk kerja sama lainnya di mana penyelesaian kewajiban debitur ditentukan dengan jangka waktu jatuh tempo tertentu sesuai kesepakatan.

Sepanjang tahun 2018, tingkat kolektibilitas piutang usaha relatif stabil. Kondisi ini terpenuhi karena perusahaan

RECEIVABLES COLLECTABILITY

The company defines collectability as a measurement of receivables that can be collected by the company to customers/ debtors as a result of port service transactions and/ or other forms of cooperation in which the settlement of debtor obligations is determined by a certain maturity period according to the agreement.

Throughout 2018, the level of collectability of account receivables was relatively stable. This condition is fulfilled

senantiasa menjaga komitmen dan menjalin hubungan bisnis yang kondusif dengan seluruh pihak ketiga.

Tingkat perputaran piutang usaha tahun 2018 sebanyak 37,79 kali mengalami peningkatan 19,86 kali dari posisi tahun 2017 sebanyak 17,93 kali. Perubahan tingkat perputaran piutang usaha tersebut disebabkan terdapat penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar 46,32% dan piutang usaha pihak berelasi sebesar 57,83%.

Periode kolektibilitas piutang usaha (collection period) pada tahun 2018 dengan memperoleh rata-rata 9,66 hari. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar rata-rata 20,36 hari. Hal ini menunjukkan terdapat waktu yang lebih cepat dalam melakukan penagihan setiap piutang usaha baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga. Capaian ini juga dibawah rata-rata selama 5 tahun sebesar 14,75 hari.

Rasio piutang usaha terhadap pendapatan usaha pada tahun 2018 sebesar 3,28% menurun dibandingkan dengan 7,29% di tahun 2017. Rasio piutang usaha yang dicapai tahun 2018 ini masih dibawah rata-rata rasio piutang usaha selama periode lima tahun terakhir sebesar 5,30%. Hal ini menggambarkan di tahun 2018 terdapat pengurangan jumlah piutang usaha sebesar 49,03 %.

due to the company's commitment to maintain and establish conducive business relationships with all third parties.

The account receivable turnover rate in 2018 as 37.79 times has increased 19.86 times from the position in 2017 of 17.93 times. Changes in the level of turnover of trade accounts receivable is due to a decrease in third party trade receivables by 46.32% and cooperated party accounts receivable of 57.83%.

In 2018 collection period of collectability was at average of 9.66 days. This achievement is slightly lower than the achievement in 2017 of an average of 20.36 days. This shows that there is a faster time for billing each account receivable to related parties or to third parties. This achievement is also below the 5-year average of 14.75 days.

The ratio of account receivables to operating income in 2018 was 3.28%, decreased compared to 7.29% in 2017. The ratio of accounts receivable achieved in 2018 is still below the average ratio of trade accounts receivable over the past five year period of 5.30 %. This illustrates that in 2018 there was a reduction in the number of accounts receivable by 49.03%.

No	Keterangan Description	Formula	Tahun/ Year					Rata-Rata Average
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Perputaran Piutang (kali) Receivable Turnover (multiply)	$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Piutang Pihak Ketiga}}$ $\frac{\text{Operating Income}}{\text{Third Party Receivable}}$	49,50	18,23	22,34	17,93	37,79	29,16
2	Periode Kolektibilitas Piutang (hari) Receivable Collection Period (day)	$\frac{365}{\text{Pendapatan Usaha}} : \frac{\text{Piutang Pihak Ketiga}}{\text{Pendapatan Usaha}}$ $\frac{365}{\text{Operating Income}} : \frac{\text{Piutang Pihak Ketiga}}{\text{Operating Income}}$	7,37	20,02	16,34	20,36	9,66	14,75
3.	Rasio Piutang Usaha dengan Pendapatan Usaha (%) Account Receivable to Equity Ratio (%)	$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}}$ $\frac{\text{Account Receivable}}{\text{Operating Income}}$	4,08	6,66	5,20	7,29	3,28	5,30

KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN STRUKTUR MODAL

MANAGEMENT POLICY AND CAPITAL STRUCTURE

Dalam mendukung pengelolaan ekuitas tersebut, perusahaan menetapkan sebagai berikut:

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2018, komposisi struktur modal yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 53,79% berasal dari Liabilitas dan 46,21% berupa Ekuitas. Komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2017. Komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami kenaikan dari semula 42,35% menjadi 53,79% sedangkan Ekuitas mengalami penurunan dari semula 57,65% menjadi 46,21%.

Struktur Modal perusahaan sebagaimana gambaran berikut:

No	Keterangan Description	Tahun/ Year					Rata-Rata Average
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Liabilitas/Liability	37,58	33,72	41,09	42,35	53,79	41,71
2	Ekuitas/ Equity	62,42	66,28	58,91	57,65	46,21	58,29
3.	Aset/ Asset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Dasar kebijakan perusahaan dalam pengelolaan struktur modal adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Bapepam - LK No. V.D.5 dan Peraturan Bapepam-LK No. X.E.1, PSAK 50 (revisi 2011) Instrumen Keuangan tentang Penyajian serta Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Kebijakan pengelolaan ekuitas dilaksanakan secara seimbang yaitu dengan memanfaatkan sumber dana sendiri (ekuitas).

Hal ini terlihat dari peningkatan total ekuitas perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang bersumber dari sebagian laba ditahan perusahaan, dengan ketentuan:

1. Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima entitas penyelenggara dari pemerintah sebesar nilai nominal saham. Modal disetor terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
2. Jumlah modal disetor tidak boleh berkurang bahkan harus diperkuat. Penambahan modal disetor dapat dilakukan melalui konversi atau kapitalisasi dari cadangan umum perusahaan sesuai amanat RUPS.
3. Perusahaan menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan paling sedikit 20% dari jumlah yang ditempatkan dan disetor penuh. Penggunaan dana cadangan umum untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan serta untuk perluasan usaha dan modal kerja, sedangkan cadangan tujuan

In supporting the management of the equity, the company establishes the following:

COMPANY CAPITAL STRUCTURE

In 2018, the composition of the capital structure owned by the Company was 53.79% from Liabilities and 46.21% in the form of Equity. This composition has changed when compared to 2017. The composition of the capital structure derived from Liabilities has increased from 42.35% to 53.79% while Equity has decreased from 57.65% to 46.21%.

Company Capital Structure as shown below:

MANAGEMENT POLICY

The basis of the company policy in managing the capital structure is Regulation Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, Regulation Number 19 of 2003 regarding BUMN, Bapepam-LK Regulation No. V.D.5, and Bapepam-LK Regulation No. X.E.1, PSAK 50 (revised 2011) of Financial Instruments regarding the Presentation and Articles of Association of PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Equity management policies are carried out in a balanced manner, namely by utilizing their own funding sources (equity).

This can be seen from the increase in the total equity of the company in the last 5 (five) years originating from a portion of the company's retained income, with provisions as follows:

1. Paid-up capital is capital that has been effectively received by the administering entity from the government in the amount of the nominal value of the shares. Paid up capital consists of all share nominal value and at least 25% of authorized capital must be placed and fully paid.
2. The amount of paid-up capital must not be reduced, it must be strengthened. Additional paid-up capital can be made through conversion or capitalization of the company's general reserves in accordance with the GMS mandate.
3. The company sets aside a certain amount of net income for each financial year for reserves of at least 20% of the total issued and fully paid. Use of general reserve funds to cover possible losses to the company as well as business expansion and business capital, while the purpose

untuk tambahan dana belanja modal yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahun serta tujuan lainnya yang sesuai dengan kepentingan entitas penyelenggara.

4. Kebijakan pembagian laba tahun berjalan ditetapkan oleh RUPS setiap tahun yang dialokasikan untuk dividen, cadangan umum, cadangan tujuan, tantiem dan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Saldo Laba merupakan jumlah laba tahun berjalan yang belum didistribusikan berdasarkan persetujuan RUPS dan/atau berasal dari koreksi perubahan akuntansi yang mempengaruhi laba tahun lalu.
5. Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2018, perusahaan melakukan perubahan struktur modal dengan penambahan liabilitas sebesar Rp. 3.938.355 juta atau naik 109,31% dan penambahan pada ekuitas sebesar Rp. 1.575.353 juta atau naik 32,12%, sehingga perbandingan liabilitas dan ekuitas menjadi 53,79 : 46,21. Sedangkan pada tahun 2017, perbandingan liabilitas dan ekuitas adalah 42,35 : 57,65.

reserves are for additional capital expenditure funds determined by the GMS each year and other objectives that are in accordance with the interests of the organizing entity.

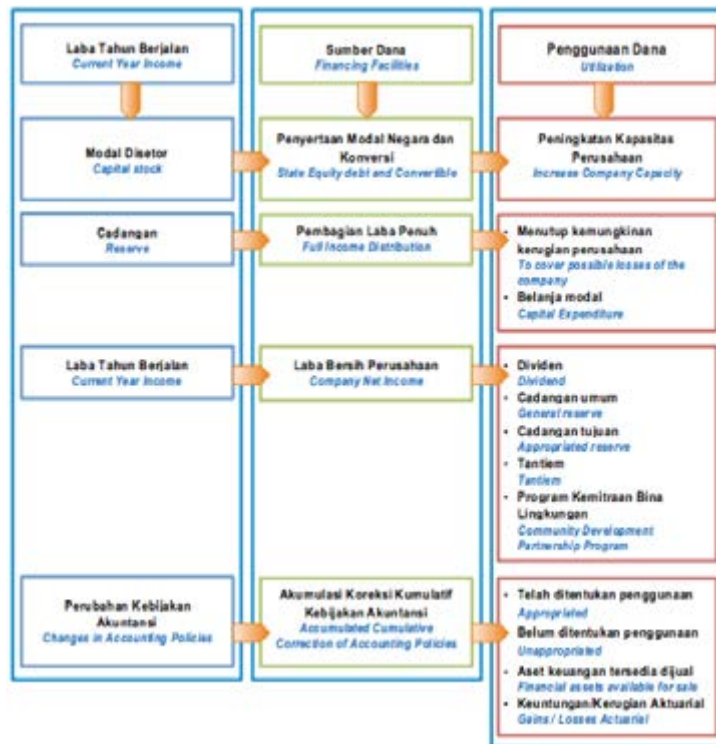
4. The policy for distribution of profit for the current year is determined by the annual GMS allocated for dividends, general reserves, destination reserves, bonuses, and the Community Development Partnership Program. Profit Balance is the amount of current year's profit that has not been distributed based on the approval of the GMS and/or comes from correction of accounting changes that affected previous year's profit.
5. In the context of business development in 2018, the company changed its capital structure by adding liabilities of Rp3,938,355 million or an increase of 109.31% and an increase in equity of Rp1,575,353 million or 32.12%, therefore the ratio of liabilities and equity became 53.79: 46.21. Whereas in 2017, the ratio of liabilities and equity was 42.35: 57.65.

SKEMA PELAKSANAAN EKUITAS

Sebagai gambaran dalam pelaksanaan ekuitas perusahaan, disajikan skema sebagai berikut:

EQUITY IMPLEMENTATION SCHEME

As an illustration of the implementation of company equity, the scheme is presented as follows:



KEBIJAKAN MANAJEMEN & STRUKTUR MODAL MANAGEMENT POLICY & CAPITAL STRUCTURE

RASIO MODAL TERHADAP UTANG

Dalam tahun 2018 capaian rasio modal terhadap utang sebesar 85,92% mengalami penurunan dari capaian rasio modal terhadap utang tahun 2017 sebesar 136,12%. Penurunan rasio modal tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 854.603 juta atau naik 46,88% dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 3.083.753 juta atau naik 173,27%. Pada tahun 2018 jumlah kewajiban perusahaan naik sebesar Rp. 3.938.355 juta atau 109,31%, sedangkan jumlah ekuitas naik sebesar Rp. 1.575.353 juta atau 32,12%.

CAPITAL TO DEBT RATIO

In 2018 the achievement of the capital to debt ratio of 85.92%, decreased from the achievement of the capital ratio to 2017 debt of 136.12%. The decrease in capital ratio was mainly due to the increase in short-term liabilities of Rp.854,603 million or an increase of 46.88% and long-term liabilities of Rp3,083,753 million or an increase of 173.27%. In 2018 the total liabilities of the company increased by Rp3,938,355 million or 109.31%, while the total equity increased by Rp1,575,353 million or 32.12%.

No	Keterangan/ Description	Satuan/Unit	2017 (Rp/juta)	2018 (Rp/juta)
1.	Jumlah Modal/ Capital	Rp. ' 000	4.904.224	6.479.577
2.	Jumlah Utang/ Debts	Rp. ' 000	3.602.920	7.541.275
3.	Rasio Modal terhadap Utang (%) Capital to Debt Ratio (%)	Rp. ' 000	136,12	85,92

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Menandai kegiatan operasional perusahaan, Pelindo 1 melakukan kegiatan investasi barang modal pada tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Utama Pelaksanaan Investasi Barang Modal

Pelaksanaan investasi barang modal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pelabuhan kepada pelanggan dan mengikuti perkembangan teknologi.

Perusahaan membagi investasi barang modal dalam bentuk investasi fisik yang diperlukan untuk pembiayaan pengembangan dan perluasan fasilitas termasuk sarana penunjang pelabuhan serta penambahan, penggantian dan modernisasi peralatan pelabuhan termasuk pengadaan kapal pandu dan kapal tunda. Adapun investasi barang modal dalam bentuk investasi non fisik yang diperlukan antara lain untuk pembiayaan pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan SDM serta pengembangan sistem informasi.

2. Realisasi Investasi Barang Modal Tahun 2018

Dalam tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 3.867.597 juta, meningkat 87,84% atau setara dengan sebesar Rp. 1.808.664 juta dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 2.058.933 juta. Jumlah investasi ini tercapai 52,98% dibawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000 juta.

Investasi fisik yang dikembangkan melalui intensifikasi

MATERIAL TIES OF CAPITAL GOODS

Marking the company's operations activities, Pelindo 1 conducts capital goods investment activities in 2018, with the following explanation:

1. The Main Purpose of Implementing Capital Goods Investment

The implementation of capital goods investment is intended to meet the needs of companies in order to improve port services to customers and keep up with technological developments.

The company divides capital goods investment in the form of physical investment which needed to finance the development and expansion of facilities including port support facilities as well as the addition, replacement and modernization of port equipment including the procurement of ship piloting and holding. The investment in capital goods in the form of non-physical investment is needed, among others, to finance business development, organizational development and HR as well as information system development.

2. Realization of Capital Goods Investment in 2018

In 2018 the investment realization amounted to Rp3,867,597 million, an increase of 87.84%, equivalent to Rp1,808,664 million compared with the previous year which reached Rp2,058,933 million. The total investment was reached 52.98% below the 2018 RKAP target of Rp.7,300,000 million.

pendapatan mencapai Rp. 3.586.404 juta, naik 90,37% dibanding dengan investasi yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.883.910 juta. Sedangkan investasi non fisik yang dikembangkan melalui pengembangan bisnis baru juga meningkat sebesar 60,66% dari tahun 2017 sebesar Rp. 175.023 juta.

Physical investment developed through revenue intensification reached Rp3,586,404 million, increased by 90.37% compared to the same investment in 2017 amounting to Rp1,883,910 million. Whereas non-physical investments developed through the development of new businesses also increased by 60.66% compared with 2017 amounting to Rp175,023 million.

Sepanjang tahun 2018, Pelindo 1 memiliki ikatan material terkait dengan investasi barang modal sebagai berikut:

Throughout 2018, Pelindo 1 has material ties related to capital goods investments as follows:

Investasi Investment	Realisasi 2017 Realization 2017	RKAP 2018 RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	% Pencapaian % Achievement	% Pertumbuhan % Growth
a	c	d	e	(f = e / d)	(g = e / c)
Investasi Fisik/ Physical Investment					
Investasi Anak Perusahaan Investment of Subsidiaries	655.000	849.266	454.424	53,51	69,38
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Property	343.871	1.631.721	1.116.117	68,40	324,57
Pengadaan Kapal Ship Procurement	219.506	420.846	483.782	114,95	220,40
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Equipment	260.426	1.937.671	1.047.890	54,08	402,37
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Installation	17.875	44.758	23.027	51,45	128,82
Tanah/ Land	0	1.472.591	255.198	17,33	0
Jalan dan Bangunan/ Road and Building	387.170	381.044	202.193	53,06	52,77
Peralatan/ Tools	61	7.350	2.067	28,12	3.413,09
Kendaraan/ Vehicles	0	4.410	1.707	38,71	0
Jumlah Investasi Fisik Total Physical Investments	1.883.910	6.749.657	3.586.404	53,13	190,37
Investasi Non Fisik/ Non-Physical Investment					
Pengembangan Usaha Business Development	48.032	186.989	84.488	45,18	175,90
Pengembangan Organisasi & SDM Organization & Human Resource Development	13.713	50.300	18.920	37,61	137,97
Pengembangan Sistem System Development	109.795	293.130	168.061	57,33	153,07
Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation	3.483	14.425	8.798	60,99	252,58
Pengkajian Pasar & Kerjasama Analysis of Market and Cooperation	0	5.500	926	16,84	0
Jumlah Investasi Non Fisik Total Non-Physical Investment	175.023	550.344	281.193	51,09	160,66
Jumlah Seluruh Investasi Total All Investments	2.058.933	7.300.000	3.867.597	52,98	187,84

KEBIJAKAN MANAJEMEN & STRUKTUR MODAL MANAGEMENT POLICY & CAPITAL STRUCTURE

3. Sumber Dana Investasi Barang Modal

Sumber dana dalam rangka pembiayaan investasi barang modal terutama untuk investasi fisik sebagian diperoleh dari fasilitas kredit investasi lembaga perbankan, yaitu:

- a. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 29 tanggal 25 Agustus 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dalam bentuk kredit R/C dan Credit Overeenkomst (OC) dengan plafon sebesar Rp. 400.000.000.000. Kredit investasi tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan bangunan fasilitas pelabuhan, kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit selama tujuh tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit, termasuk grace period selama dua belas bulan. Perjanjian kredit ditanda tangani tanggal 25 Agustus 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a.
- b. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 12 tanggal 5 April 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp. 126.000.000.000. Selain fasilitas kredit investasi, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas kredit Non Cash Loan berupa Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan limit sebesar Rp. 126.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a.
- c. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 21 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dengan limit sebesar Rp. 1.050.000.000.000. Proporsi masing-masing kreditur sindikasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 350.000.000.000, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 350.000.000.000 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 350.000.000.000.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan Capital Expenditur Perusahaan di tahun 2017 dan 2018. Jangka waktu kredit adalah tujuh tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit, termasuk grace period selama satu tahun, perjanjian ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2017. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah sebesar tingkat Weighted Average Time Deposit 3 bulan ditambah margin sebesar 3%.

3. Capital Goods Investment Funds

Sources of funds in the context of financing capital goods investments, especially for physical investment, are partly derived from investment credit facilities of banking institutions, namely:

- a. In accordance with the Deed of Credit Agreement of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 29 dated August 25, 2011, the Company obtained investment credit facilities in the form of R/C and Credit Overeenkomst (OC) loans with limit of Rp.400,000,000,000. These investment loans are used to finance the construction of port facilities, ships and port facilities. The credit period is seven years, starting from the signing of the credit agreement, including a grace period of twelve months. The credit agreement is signed on August 25, 2011 and ends on August 24, 2018. The interest rate applied for this credit facility is 9.5% p.a.
- b. In accordance with the Credit Agreement of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 12 dated April 5, 2011, the Company obtained an investment credit facility with a limit of Rp.126,000,000,000. In addition to investment credit facilities, the Company also obtains a Non-Cash Loan credit facility in the form of Letter of Credit (L / C) or Domestic Letter of Credit with a limit of Rp.126,000,000,000. The credit facility is used to finance the procurement of port facilities. The credit period is up to December 31, 2018. The interest rate applied for this credit facility is 9.5% p.a.
- c. In accordance with the Deed of Syndicated Credit Agreement No. 28 dated December 21, 2017, the Company obtained a syndicated credit facility with a limit of Rp1,050,000,000,000. The proportion of each syndicated creditor is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the amount of Rp.350,000,000,000, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp.350,000,000,000 and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp.350,000,000,000,-

The credit facility is used for financing Capital Expenditures of Companies in 2017 and 2018. The credit period is seven years from the signing of the credit agreement, including a one-year grace period, the agreement was signed on December 21, 2017. The interest rate applied to this credit facility is equal to the Weighted Average Time Deposit rate of 3 months plus margin of 3%.

No	Investasi Investment	Tujuan Purpose	Sumber Dana Source of Funds	Nilai Investasi Investment Value	Rencana Strategis Perusahaan Company's Strategic Plan
1.	Empat unit Kapal Tunda 2 x 1.600 HP Four Units of Tugboats 2 x 1.600 HP	Meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Belawan dan Dumai To improve services in Belawan dan Dumai Ports	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 160.781.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
2.	Dua unit kapal pandu cepat Two units of speed pilot boat	Meningkatkan pelayanan di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun To improve services in Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 35.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
3.	Dua unit Wheel Loader Two units Wheel Loader	Meningkatkan pelayanan di Belawan To improve services in Belawan	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 5.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
4.	Satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) One unit of fuel tanker truck	Meningkatkan pelayanan di BICT To improve services in BICT	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 499.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
5.	Satu unit forklift kapasitas 2,5 ton One unit of forklift 2,5 ton-capacity	Meningkatkan pelayanan di Unit Galangan Kapal Belawan To improve services in Belawan Shipyard Unit	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 405.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
6.	Satu unit mobile crane kapasitas 60 ton One unit of mobile crane 60 ton capacity	Meningkatkan pelayanan di Tanjung Pinang. To improve services in Tanjung Pinang.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 7.585.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
7.	Dermaga dengan panjang 100 m (meter) Dock with length of 100 m (meter)	Meningkatkan pelayanan di BICT. To improve services in BICT.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 42.625.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
8.	Dua unit gudang seluas 4.000 m (meter) Two units of warehouses, 4.000 m (meter)	Meningkatkan pelayanan di Dumai. To improve services in Dumai.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 19.982.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
9.	Perpanjangan Dermaga B sepanjang 400 m (meter) Length addition of Dock for 400 m (meter)	Meningkatkan pelayanan di Dumai To improve services in Dumai	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 143.566.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi

KEBIJAKAN MANAJEMEN & STRUKTUR MODAL

MANAGEMENT POLICY & CAPITAL STRUCTURE

No	Investasi Investment	Tujuan Purpose	Sumber Dana Source of Funds	Nilai Investasi Investment Value	Rencana Strategis Perusahaan Company's Strategic Plan
10.	Gedung workshop seluas 640 Workshop building 640	Meningkatkan pelayanan di Belawan Logistic Centre To improve services in Belawan Logistic Centre	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 2.310.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
11.	Satu unit generator set kapasitas 2.725 KVA, trafo dan instalasi One unit of generator set Capacity 2.725 KVA, transformer and installation	Meningkatkan pelayanan di Belawan To improve services in Belawan	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 12.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
12.	Satu unit generator set kapasitas 1.825 KVA One unit of generator set Capacity 1.825 KVA	Meningkatkan pelayanan di BICT. To improve services in BICT.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 15.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
13.	Satu unit mobile generator set One unit of mobile generator set	Meningkatkan pelayanan di Dumai. To improve services in Dumai.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 8.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi
14.	Conveyor System Terminal Curah Bulk Terminal Conveyor System	Meningkatkan pelayanan di Dumai. To improve services in Dumai.	Kredit Investasi Bank BRI Bank BRI Investment Credit	Rp. 39.483.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
15.	Pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan Procurement of Port facility equipmen	Meningkatkan pelayanan di sejumlah pelabuhan dan terminal. To improve services in several ports and terminal.	Kredit Investasi Bank Mandiri Bank Mandiri Investment Credit	Rp. 126.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
16.	Pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan Procurement of Port facility equipment	Meningkatkan pelayanan di sejumlah pelabuhan dan terminal. To improve services in several ports and terminal.	Kredit Investasi Bank Mandiri Bank Mandiri Investment Credit	Rp. 126.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement
17.	Capital Expenditur Perusahaan di tahun 2017 dan 2018 Company's Capital Expenditure in 2017 and 2018	Meningkatkan pelayanan di sejumlah pelabuhan dan terminal. To improve services in several ports and terminal.	Kredit Sindikasi Bank Mandiri, BRI dan BNI 46 Syndication Credit of Bank Mandiri, BRI and, BNI 46	Rp. 1.050.000.000.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan perjanjian kredit investasi Has been implemented in accordance with the Company's strategic plan and investment credit agreement

4. Penggunaan Mata Uang Dan Perlindungan Risiko

Kegiatan investasi barang modal dalam industri jasa pelabuhan secara inheren memiliki prosedur operasional yang kompleks, penuh aturan regulasi yang ketat, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial seperti perubahan kurs mata uang asing, kenaikan suku bunga dan perubahan teknologi informasi yang semakin cepat. Hal ini membuat perusahaan terekspos dengan berbagai ketidakpastian atau risiko.

Untuk itu perusahaan dalam tahun 2018 mengambil berbagai inisiatif dalam menangani risiko pelaksanaan investasi barang modal antara lain dan tidak terbatas pada:

- a. Setiap transaksi investasi barang modal sepenuhnya menggunakan mata uang Rupiah dengan meminimalisir penggunaan mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Pelindo 1 disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- c. Laba atau rugi yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat dan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif pada tahun berjalan.
- d. Posisi keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Laporan Keuangan dengan menggunakan kurs laporan akhir tahun. Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak, yaitu:

Mata Uang/ Currency	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	12.440	13.795	13.436	13.554	14.500

- e. Kebijakan yang telah diambil perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing, antara lain:
 - Melakukan pengendalian yang ketat atas pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi barang modal agar dapat direalisasikan tepat waktu, tepat jumlah, tepat nilai dan tepat mutu sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - Menerapkan lindung nilai secara proporsional terhadap biaya barang dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri meskipun tetap memperhatikan kualitas.
 - Meningkatkan kerja sama pengadaan dengan

4. The Usage of Currency and Risk Protection

Capital goods investment activities in the port service industry inherently have complex operational procedures, full of strict regulations, and are influenced by various crucial factors such as changes in foreign exchange rates, rising interest rates, and increasingly rapid changes in information technology. This makes the company exposed to various uncertainties or risks.

For this reason, companies in 2018 take various initiatives in handling the risks of implementing capital goods investments, including but not limited to:

- a. Every capital goods investment transaction fully uses the Rupiah currency by minimizing the use of foreign currency in accordance with Bank Indonesia Regulations related to the obligation to use Rupiah in every transaction in the territory of the Unitary Republic of Indonesia.
- b. Pelindo 1 Financial Statements are prepared in Rupiah, while transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rate on the transaction date.
- c. Profits or losses arising from the translation of assets and liabilities in foreign currencies are recorded and recognized in the Comprehensive Income Statement for the fiscal year.
- d. Financial positions in foreign currencies are translated into financial statements using the year-end report rate. The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and Subsidiaries, namely:

- e. The policies that have been taken by the company to protect risks from foreign currency positions include:
 - Conduct strict control over the implementation of capital investment cooperation agreement therefore it can be realized on time, exactly the amount, the right value and the right quality in accordance with the agreement.
 - Applying hedging proportionally to the cost of goods by prioritizing the use of domestic products but still pay attention to quality.
 - Improve procurement cooperation with national companies and international companies by prioritizing

perusahaan nasional maupun perusahaan internasional dengan mengutamakan sinergi Badan Usaha Milik Negara.

- Melakukan pengukuran efektivitas secara periodik dari pelaksanaan investasi barang modal untuk menghasilkan sejumlah kerangka perbaikan. Kerangka perbaikan tersebut digunakan untuk meningkatkan implementasi sistem pelaksanaan investasi barang modal yang dianut perusahaan.
- Mengalokasikan dana simpanan dalam mata uang USD sesuai dengan besaran kewajiban/ pembukaan LC.
- Penerimaan pembiayaan dari dana eksternal (bank dan non bank) hanya dalam mata uang Rupiah.
- Penerapan cash management system (CMS) dan uang panjar atas setiap permintaan pelayanan, serta penerapan sistem Host to Host untuk kemudahan pembayaran oleh pengguna.
- Melalui Sistem SAP menerapkan billing payment dan auto collection serta pemberlakuan kredit limit kepada masing-masing pengguna jasa.
- Pengalokasian biaya pembayaran bunga yang menjadi prioritas perusahaan dan monitoring
- Perusahaan telah melaksanakan penegakan integritas (pakta integritas), terhadap pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam rangka penerapan nilai-nilai budaya perusahaan serta Etika Bisnis dan Etika Kerja.
- Memperbaiki proses bisnis yang terkait dengan kerjasama operasional dengan mitra usaha.

the synergy of State-Owned Enterprises.

- Measuring periodic effectiveness of the implementation of capital goods investments to produce several improvement frameworks. The repair framework is used to improve the implementation of the capital goods investment system implemented by the company.
- Allocate deposit funds in USD in accordance with the amount of the obligation / opening of the LC.
- Funding receipts from external funds (bank and non-bank) are only in Rupiah.
- Implementation of a cash management system (CMS) and down payment for each service request, as well as the implementation of a Host to Host system for easy payment by users.
- Through the SAP System apply payment billing and auto collection and enforce limit credit to each service user.
- Allocation of interest payment costs which become company's priority and monitoring.
- The company has implemented integrity (integrity pact), both towards internal parties and external parties in the context of the application of corporate cultural values and Business and Work Ethics.
- Improve business processes related to operational cooperation with business partners.

KEJADIAN LUAR BIASA SELAMA TAHUN 2018 EXTRAORDINARY EVENT DURING 2018

Selama tahun 2018 perusahaan tidak mengalami kejadian yang luar biasa dan jarang terjadi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.

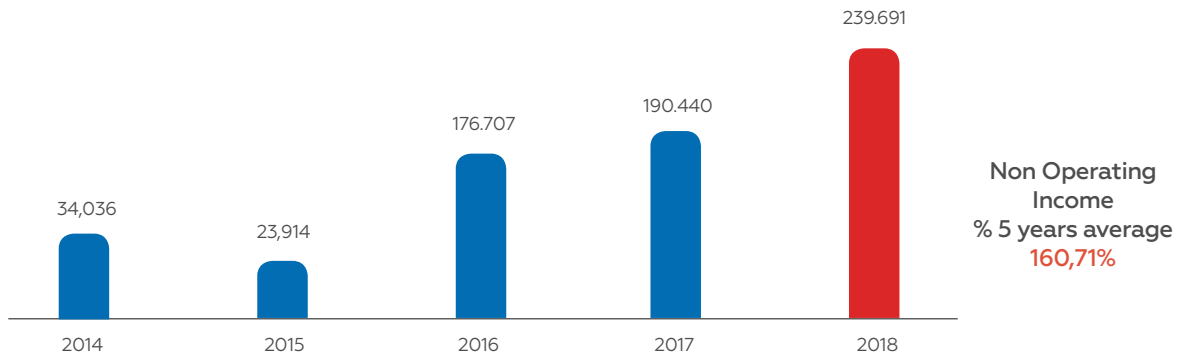
During 2018 the company did not experience extraordinary and rare events that affected the company's financial statements.

TINJAUAN KOMPONEN PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA

REVIEW OF COMPONENTS OF NON-OPERATING INCOME AND EXPENSE

Pendapatan non usaha dalam tahun 2018 sebesar Rp. 239.691 juta sedikit lebih tinggi dari pendapatan non usaha tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 190.440 juta atau naik 25,86%. Hal yang substansial mempengaruhi perubahan pendapatan non usaha antara lain pendapatan sewa properti investasi lainnya yang pada tahun 2018 meningkat 9.593,62%, pendapatan denda/penalti yang meningkat sebesar 69,76%, pendapatan laba selisih kurs yang meningkat 4.467,91% serta pendapatan lainnya yang naik sebesar 115,42%.

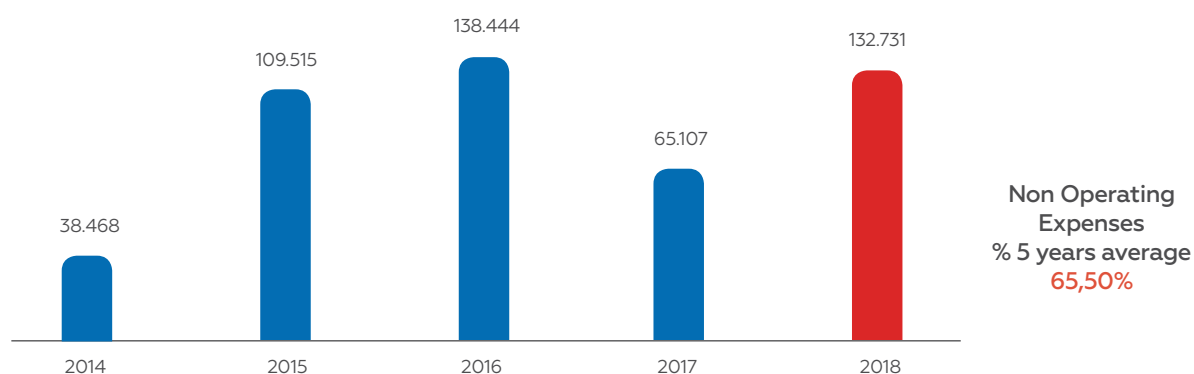
Non-operating income in 2018 amounting to Rp239,691 million was slightly higher than the previous year's non-operating income, which was recorded at Rp190,440 million or an increase of 25.86%. Substantially influencing changes in non-business income include other investment property rental income which in 2018 increased by 9,593.62%, income from fines / penalties increased by 69.76%, profit from foreign exchange gains increased by 4,467.91% and other income which increased by 115.42%.



No	Uraian Description	Tahun/ Year					Pertumbuhan Growth
		2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Non Usaha							
1.	Pendapatan Denda / Penalti Fines / Penalties Income	679	911	4.104	3.456	5.867	109,66
2.	Pendapatan Non Usaha - Jasa Giro Non-operating income – Current Account Service	0	0	2.273	3.499	3.033	20,31
3.	Pendapatan Sewa Properti Investasi Lainnya Other Investment Property Rental Income	0	0	0	47	4.556	9.593,62
4.	Pendapatan Bunga Deposito Deposit Interest Income	0	0	79.406	98.027	79.298	2,17
5.	Laba Penjualan Aset Non Keuangan Tidak Produktif Profit of Non-Earning Non- Financial Asset Sales	6.833	249	841	1.136	0	19,12
6.	Pendapatan Klaim Asuransi Insurance Claim Income	0	0	0	35.900	1.998	(94,34)
7.	Pendapatan Administrasi Administrative Income	137	9	246	736	1.490	96,23
8.	Laba Selisih Kurs Exchange Rate Difference	0	0	47.269	938	42.847	2.184,95
9.	Lainnya/ Others	26.387	22.625	42.568	46.701	100.602	49,76
Jumlah/ Total		34.036	23.914	176.707	190.440	239.691	160,71

Realisasi beban non usaha tahun 2018 sebesar Rp. 132.731 juta lebih tinggi 103,87% dari realisasi beban non usaha tahun 2017 sebesar Rp. 65.107 juta. Peningkatan beban non usaha ini secara substansial didorong oleh peningkatan beban konsesi yang meningkat 11,73%, peningkatan rugi selisih kurs 1.608,67%, Biaya Denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak meningkat 45,06% dan beban non usaha lainnya yang meningkat 1.676,77%

Realization of non-operating expenses in 2018 amounted to Rp132,731 million, 103.87% higher than the realization of non-business expenses in 2017 of Rp.65,107 million. This increase in non-operating expenses was substantially driven by an increase in concession expenses which increased by 11.73%, an increase in foreign exchange losses of 1,608.67%, a fine and non-tax revenues increased by 45.06% and other non-business expenses increased 1,676.77 %



No	Uraian Description	Tahun/ Year					Pertumbuhan Growth
		2014	2015	2016	2017	2018	
Beban Non Usaha/ Non-Operating Expenses							
1.	Biaya Denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fines and Non-tax Revenue	10.507	13.224	22.150	19.794	28.713	31,95
2.	Pengobatan Pensiun Retirement Medical Treatment	9.528	12.224	0	0	0	(14,34)
3.	Penurunan Nilai aset Depreciation expense of Assets	0	7.614	0	0	1.271	0,00
4.	Beban Konsesi Concession Expenses	0	56.962	38.400	39.809	44.481	(5,73)
5.	Amortisasi obligasi Amortization of Bonds	0	0	415	830	830	50,00
6.	Beban Meterai/ Postage expense	0	0	0	1.312	1.521	15,93
7.	Beban pajak final dan administrasi bank Final tax and Bank administration expenses	0	0	225	462	5.079	552,34
8.	Rugi Selisih Kurs Loss of Exchange Difference	0	0	53.372	1.023	17.486	485,55
9.	Lainnya/ Others	18.433	19.490	23.881	1.877	33.350	403,22
Jumlah/ Total			38.468	109.515	38.444	65.107	132.731

INFORMASI PERBANDINGAN REALISASI 2018 DENGAN RKAP 2019

INFORMATION OF COMPARISON OF 2018 REALIZATION AND 2019 RKAP

Penyusunan sasaran bisnis perusahaan tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPP) periode tahun 2019 – 2023 dengan tema “Core Business Enhancement” dan secara khusus mengacu pada Shareholders Aspiration 2019 yang telah disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional.

The compilation of the company’s business objectives in 2019 is the first year of the implementation of the Company’s Long Term Plan (RPP) for the period 2019 - 2023 with the theme “Core Business Enhancement” and specifically refers to the 2019 Shareholders Aspiration which has been adjusted to the national economic growth projection.

Untuk lebih detail berikut asumsi serta target operasional dan finansial perusahaan tahun 2019.

For more detailed information about the company’s assumptions, operations, and financial targets for 2019.

 Asumsi (Assumptions)	 Operasional (Operating)	 Keuangan (Financial)
Pertumbuhan Ekonomi 5,30%	Kunjungan Kapal 74.325 Call	Total Aset Rp11.772.254 Juta
Inflasi 3,50%	173.147.752 GT	Total Pendapatan Usaha Rp3.967.029 Juta
Nilai Tukar Rp14.500,-	Bongkar Muat 47.770.225 Ton	Total Beban Usaha Rp2.196.169 Juta
Suku Bunga SPN 5,30%	Bongkar Muat Peti Kemas 1.230.608 Box 1.472.366 Teus	Laba Tahun Berjalan Rp914.712 Juta
	Naik/Turun Penumpang 5.160.484 Orang	

Dengan konsep “Faster, Higher, Stronger” perusahaan menentukan beberapa target di tahun 2019 sebagai berikut:

With the concept of “Faster, Highest, Stronger” the company determines several targets in 2019 as follows:

Pelindo 1 menargetkan jumlah aset perusahaan sebesar Rp11.772.254 juta. Target ini diproyeksikan lebih rendah 16,04% dibandingkan dengan realisasi aset perusahaan tahun 2018 sebesar Rp14.020.853 juta. Penetapan target aset perusahaan tahun 2019 telah disesuaikan dengan prediksi asumsi makro tahun 2019 serta kecenderungan terjadi pada 5 tahun terakhir yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2019 – 2023.

Pelindo 1 targets the company’s assets amounting to Rp. 11,772,254 million. This target is projected to be lower by 16.04% compared to the realization of company assets in 2018 of Rp14,020,853 million. Determination of the company’s asset target in 2019 has been adjusted to the macro assumption predictions in 2019 and the tendency to occur in the last 5 years compiled based on the Company’s Long-Term Plan for 2019 - 2023.

Pelindo 1 menargetkan jumlah liabilitas perusahaan sebesar Rp5.641.746 juta. Target ini diproyeksikan lebih rendah 25,19% dibandingkan dengan realisasi liabilitas perusahaan tahun 2018 sebesar Rp7.541.275 juta. Penetapan target liabilitas perusahaan tahun 2019 telah disesuaikan dengan

Pelindo 1 targets the total liabilities of the company to be Rp.5,641,746 million. This target is projected to be 25.19% lower compared to the realization of company liabilities in 2018 amounting to Rp7,541,275 million. The determination of the company’s liability target for 2019 has been adjusted to

kemampuan perusahaan dalam mengurangi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang terutama terkait dengan utang obligasi.

Pelindo 1 menargetkan jumlah ekuitas perusahaan sebesar Rp6.130.509 juta. Target ini diproyeksikan lebih rendah 5,39% dibandingkan dengan realisasi ekuitas perusahaan tahun 2018 sebesar Rp6.479.577 juta. Penetapan target ekuitas perusahaan tahun 2019 telah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan perolehan laba bersih perusahaan, adanya penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan yang bersumber dari pembagian laba.

Pelindo 1 menargetkan pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp3.967.029 juta lebih tinggi 27,41% dari realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp3.113.533 juta. Penetapan target pendapatan usaha tahun 2019 telah disesuaikan terutama dengan potensi dan perspektif pendapatan usaha bisnis inti perusahaan yang terus meningkat setiap tahun meliputi pendapatan pelayanan kapal, pelayanan barang (peti kemas dan multi-purpose) dan pelayanan penumpang.

Pelindo 1 menargetkan beban usaha tahun 2019 sebesar Rp2.196.169 juta lebih tinggi 17,53% dari realisasi beban usaha tahun 2018 sebesar Rp1.868.586 juta. Penetapan target beban usaha tahun 2019 telah disesuaikan dengan rencana perusahaan untuk melakukan diversifikasi bisnis penunjang yang berbasis hinterland dan teknologi

Selain itu, Pelindo 1 telah menargetkan perolehan laba tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar Rp914.712 juta. Target ini lebih tinggi 1,09% dari realisasi perolehan laba tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp904.871 juta. Perolehan laba tahun berjalan setiap tahun telah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan usaha dan pengendalian beban usaha perusahaan.

Sasaran bisnis perusahaan beserta entitas anak untuk tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

the company's ability to reduce short-term debt and long-term debt, especially related to bond debt.

Pelindo 1 targets the company's equity amounting to Rp6,130,509 million. This target is projected to be 5.39% lower compared to the realization of the company's equity in 2018 of Rp6,479,577 million. Determination of the company's equity target in 2019 has been adjusted to the company's ability to increase the company's net profit, the addition of general reserves and purpose reserves derived from profit sharing.

Pelindo 1 targets 2019 operating income of Rp3,967,029 million, higher by 27.41% of the realization of 2018 operating revenues of Rp3,113,533 million. Determination of the target of operating income in 2019 has been adjusted especially with the potential and perspective of the company's core business income which continues to increase each year including ship service revenues, cargo services (containers and multi-purpose) and passenger services.

Pelindo 1 targets the operating expenses in 2019 to be Rp2,196,169 million, 17.53% higher than the realization of operating expenses in 2018 amounting to Rp1,868,586 million. Determination of the target operating expenses in 2019 has been adjusted to the company's plan to diversify hinterland-based and technology-based business support.

In addition, Pelindo 1 has targeted the acquisition of profit for the year 2019 is Rp914,712 million. This target is 1.09% higher than the realization of the profit for the current year in 2018 which was Rp904,871 million. Earnings for the current year each year has been adjusted to the achievement of business income and control of the company's operating expenses.

The business objectives of the company and its subsidiaries for 2019 as the table below:

No	Uraian/ Description	Realisasi 2018 Realization of 2018	RKAP 2019 RKAP of 2019	% Naik/Turun % Increase/Decrease
1.	Aset Perusahaan Company Asset	14.020.853	11.772.254	(16,04)
2.	Liabilitas Perusahaan/ Company Liability	7.541.275	5.641.746	(25,19)
3.	Ekuitas Perusahaan/ Company Equity	6.479.577	6.130.509	(5,39)
4.	Pendapatan Usaha/ Company Income	3.113.533	3.967.029	27,41
5.	Beban Usaha/ Operating Expense	1.868.586	2.196.169	17,53
6.	Laba Tahun Berjalan/ Fiscal year profit	904.871	914.712	1,09

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH PERUSAHAAN SERTA LABA

IMPACT OF PRICE CHANGES TOWARDS SALES/ COMPANY NET INCOME AND PROFIT

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 2018 yang antara lain dipengaruhi oleh pelemahan pertumbuhan ekonomi global, sehingga juga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama terhadap harga komoditas di dalam negeri dan peningkatan harga barang impor. Dampak ikutan dari pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional adalah perubahan harga pasar.

Sebagai perusahaan dengan bisnis inti di bidang jasa kepelabuhanan, maka kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ditinjau dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan konsumsi dan kenaikan nilai kurs dollar terhadap rupiah sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap kunjungan kapal, aktivitas bongkar muat barang, bongkar muat peti kemas serta arus penumpang di pelabuhan.

Disisi lain kenaikan nilai kurs dollar terhadap rupiah berdampak pada peningkatan jumlah pembayaran yang diterima terutama atas jasa kapal dan barang yang diberikan terhadap kapal asing, terutama pelayanan jasa pemanduan di jalur pelayaran Selat Malaka.

The weakening of the rupiah exchange rate that occurred in 2018, among others, was influenced by the weakening of global economic growth, so that it also had an impact on the slowing down of national economic growth, especially towards domestic commodity prices and the increase in prices of imported cargo. The after effect of the weakening national economic growth is market price fluctuation.

As a company with a core business in port services, Indonesia's economic conditions in 2018 in terms of domestic demand, consumption growth, and the increase in the value of the US Dollar against Indonesian Rupiah have influenced the ship visits, loading and unloading activities, container loading and unloading, and the flow of passengers at the port.

On the other hand, the increase in the value of the US Dollar exchange rate against Rupiah has resulted in an increase in the amount of payments received, mainly for the services of ships and cargo given to foreign vessels, especially piloting services on the Malacca Strait shipping line.

SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN OTORITAS LAINNYA

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR THE COMPANY, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND OTHER AUTHORITIES

Pada tahun 2018 baik Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi tidak mendapatkan sanksi administratif dari otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

In 2018 both the Company, Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors did not receive administrative sanctions from the Financial Services authority and other authorities.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND FACTS MATERIAL THAT OCCURRED AFTER ACCOUNTANT REPORTS

Pada tahun 2018 Pelindo 1 telah menyelesaikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp18.951 juta.

In 2018 Pelindo 1 has completed the Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for the 2013 and 2014 tax periods received in 2017 was Rp18,951 million.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

COMPANY BUSINESS PROSPECT

Pelindo 1 untuk tahun-tahun selanjutnya memiliki prospek usaha yang sangat baik dalam pelaksanaan bisnis jasa pelabuhan dan usaha lainnya. Keyakinan tersebut didukung oleh:

1. Perkembangan ekonomi negara-negara di Asia menjadi lebih bervariasi dan memiliki spesialisasi peran seperti China dan India yang berperan sebagai pusat pabrikasi produk-produk yang dikonsumsi negara berkembang, sehingga menyebabkan ekspansi kegiatan ekonomi dunia ke depan akan terpusat di Asia. Industri yang bergerak di bidang kontainer dan usaha sektor distribusi akan diuntungkan dengan perkembangan ini.
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei meningkatkan volume arus peti kemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039. Pada Tahap I diestimasikan kapasitas bongkar muat peti kemas sebesar 400.000 Teus dan bongkar muat curah cair sebanyak 750 Ton/jam atau 2.000.000 ton/tahun. Pembangunan Sei Mangkei ini melengkapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada sebelumnya yaitu KEK Arun Lhokseumawe dan KEK Galang Batang.
3. Perluasan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk ketiga di dunia serta merupakan jalur pelayaran utama dan lalu lintas kapal yang mempunyai kedalaman sampai -16 LWS s/d -17 LWS, sehingga sangat layak untuk dijadikan Hub Internasional.
4. Waktu tunggu (dwelling time) bongkar muat barang dan peti kemas mencapai rata-rata 2 – 3 hari. Dengan penggunaan teknologi informasi VTS (Vessel Traffic System) serta modernisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan, perbaikan waktu tunggu tersebut diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat barang dan peti kemas terutama di Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB).
5. Pelindo 1 memiliki konektivitas darat dan laut yang baik terhubung dengan rencana tol Sumatra. Pulau Sumatera memiliki potensi komoditas yang besar terutama pada agriculture dan mineral dengan GDP per kapita kedua terbesar di Indonesia mendorong arus barang dari/ke Sumatra akan tetap signifikan.
6. Pelabuhan Belawan Medan, Batam dan Dumai secara umum telah memenuhi standar (1) Keamanan, Ketahanan,

Pelindo 1 for the following years has very good business prospects in carrying out the port services business and other businesses. This confidence is supported by:

1. The economic development of Asian countries is more varied and has special roles such as China and India which act as centers for manufacturing products consumed by developing countries, thus causing expansion of world economic activity going forward in Asia. Industries engaged in containers and business in the distribution sector will benefit from this development.
2. Construction of Special Economic Zones (SEZs) Sei Mangkei increased the volume of container flows to 12.4 million TEUs in 2039. In Phase I estimated container loading and unloading capacity of 400,000 TEUs and loading and unloading of liquid bulk of 750 Tons/ hour or 2,000,000 tons/ year. The construction of the Sei Mangkei complements the existing Special Economic Zones (SEZ), namely the Arun Lhokseumawe SEZ and the Galang Batang SEZ.
3. Expansion and development of Kuala Tanjung Port located in the Malacca Strait which is the third busiest strait in the world and is the main shipping lane and ship traffic that has a depth of up to -16 LWS up to -17 LWS, making it very feasible to become an International Hub.
4. Expansion and development of Kuala Tanjung Port located in the Malacca Strait which is the third busiest strait in the world and is the main shipping lane and ship traffic that has a depth of up to -16 LWS up to -17 LWS, making it very feasible to become an International Hub.
5. The dwelling time for loading and unloading cargo and containers reaches 2-3 days on average. With the use of VTS (Vessel Traffic System) information technology and the modernization of port infrastructure and superstructure, the improvement of the waiting time is expected to accelerate the loading and unloading of cargo and containers, especially in Belawan International Container Terminal (BICT) and Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB).
6. Pelindo 1 has land and sea connectivity that is well connected with the Sumatra toll road plan. Sumatra Island has a large commodity potential, especially in agriculture and minerals with the second largest GDP per capita in Indonesia pushing the flow of cargo from / to Sumatra will remain significant.

dan Pelayanan Pelabuhan, (2) Ketersediaan Sumberdaya Manusia, (3) Fasilitas Pelabuhan Laut, (4) Proteksi terhadap Produk Lokal, dan (5) Wilayah Perairan untuk Pelabuhan Laut dapat dijadikan pintu masuk produk-produk hortikultura dan industri.

7. Posisi strategis Pelindo 1 dimana beberapa pelabuhan andalan berhadapan dan berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka memberikan peluang besar bagi Pelindo 1 untuk meraih pendapatan yang lebih besar terutama bisnis marine, karena merupakan salah satu jalur pelayaran utama di dunia.
8. Dilaksanakannya kontrak Service Level Agreement (SLA) dengan 8 perusahaan untuk kepastian Fixed Berthing Windows yang mengatur tentang kepastian jaminan pelayanan (produktivitas dan kepastian berthing), reward and punishment dan minimum troughput yang harus dipenuhi. Bahkan dalam waktu dekat dua Main Line Operator (MLO) yang merupakan perusahaan internasional berkelas dunia yaitu Evergreen dan K'Line juga akan menandatangani kesepakatan SLA.
9. Kelanjutan kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam kegiatan bongkar batubara untuk supply Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu serta kerjasama dengan Pertamina dalam kegiatan bongkar Liquefied Petroleum Gas (LPG) Propane Butane untuk supply kebutuhan gas masyarakat Sumatera dan Aceh dan kegiatan muat crudeoil/ condensate
10. Pertumbuhan perdagangan ekspor dan impor di Indonesia diprediksi meningkat 1,00-2,50 kali pertumbuhan PDB Indonesia, memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya industri kepelabuhanan.
11. Pemerintah juga kian giat merealisasikan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan agenda pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim.
7. Belawan Port Medan, Batam and Dumai in general have met the standards (1) Port Security, Resilience and Services, (2) Availability of Human Resources, (3) Seaport Facilities, (4) Protection of Local Products, and (5)) Water Areas for Seaports can be used as entry points for horticultural and industrial products.
8. Pelindo 1's strategic position where several mainstay ports facing and located in the international shipping lane of the Malacca Strait provides a great opportunity for Pelindo 1 to gain greater revenue, especially the marine business, because it is one of the main shipping lanes in the world.
9. Service Level Agreement (SLA) contract with 8 companies was implemented for the certainty of Windows Fixed Berthing that regulates the assurance of service guarantees (productivity and certainty of berthing), reward and punishment, and minimum throughput that must be met. Even in the near future two Main Line Operators (MLO) which are world-class international companies namely Evergreen and K'Line will also sign an SLA agreement.
10. Continuation of cooperation with the State Electricity Company (PLN) in coal unloading activities to supply Steam Power Plants (PLTU) in Pangkalan Susu and cooperation with Pertamina in the dismantling of Propane Butane Liquefied Petroleum Gas (LPG) to supply the gas needs of the people of Sumatra and Aceh and loading activities crudeoil / condensate.
11. The growth of the export and import trade in Indonesia is predicted to increase by 1.00-2.50 times Indonesia's GDP growth, providing a very good opportunity for the growth of the port industry.
12. The government is also increasingly active in realizing the concept of Indonesia as the World Maritime Axis with the agenda of infrastructure development and maritime connectivity by building Sea Toll, deep seaport, logistics, shipping industry, and maritime tourism.

ASPEK PEMASARAN BISNIS

ASPECT OF BUSINESS MARKETING

Menghadapi persaingan usaha saat ini yang semakin ketat termasuk di bidang usaha jasa kepelabuhanan telah mendorong Pelindo 1 bersama-sama Entitas Anak melakukan integrasi komunikasi pemasaran agar lebih efektif, terencana dan terukur dengan konsep yang dirumuskan secara tepat serta pelaksanaannya yang dirancang secara teliti serta dapat membangun image Pelindo 1 sebagai entitas yang kompeten, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Dalam kegiatan jasa pelabuhan, terdapat 4 (empat) kelompok pelanggan utama yang mempunyai kebutuhan dan memberikan kontribusi pendapatan perusahaan yang berbeda, yaitu:

1. Perusahaan pelayaran antara lain PT. Usda Seroja Jaya, MCC Transport (Maersk Line), PT. Snepac Shipping, PT. Samudera Shipping Services dan PT. Salam Pacific Indonesia membutuhkan kegiatan pelayanan kapal berupa pandu, tunda, tambat serta kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga dan/atau dari dermaga ke kapal yang lebih efisien. Perusahaan pelayaran ini memberikan kontribusi sekitar 50% dari seluruh pendapatan pelayanan jasa pelabuhan.
2. Perusahaan Logistik antara lain PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero), PT. Sufie Bahari Lines dan PT. Tirta Nusa Persada membutuhkan kegiatan pelayanan barang dari dermaga menuju tempat bongkar muat hinterland yang lebih efisien. Perusahaan Logistik ini memberikan kontribusi sekitar 17% dari seluruh pendapatan pelayanan jasa pelabuhan.
3. Perusahaan Bongkar Muat antara lain PT. Samudera Sarana Terminal, PT. Adimas Bahtera Harapan membutuhkan fasilitas serta infrastruktur dermaga dan terminal untuk kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas di pelabuhan. Perusahaan Bongkar Muat ini memberikan kontribusi sekitar 3% dari seluruh pendapatan pelayanan jasa pelabuhan.
4. Pemilik Kargo (Eksportir, Importir) antara lain PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Musim Mas, PT. Perkebunan Nusantara IV, PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Musim Mas membutuhkan kecepatan dari layanan pengiriman barang sampai ke tujuan akhir dan keamanan dari pengiriman barang. Perusahaan Kargo ini memberikan kontribusi sekitar 30% dari seluruh pendapatan pelayanan jasa pelabuhan.

Facing the current increasingly fierce business competition, including in the port services business, Pelindo 1 together with its Subsidiaries have integrated marketing communications to be more effective, planned and measurable with precisely formulated concepts and carefully designed and able to build image of Pelindo 1 as a competent entity, so that it can compete in the global market.

In port service activities, there are 4 (four) main customer groups that have different needs and contribute to the company's income, namely:

1. Shipping companies, including PT. Usda Seroja Jaya, MCC Transport (Maersk Line), PT. Snepac Shipping, PT. Samudera Shipping Services and PT. Salam Pacific Indonesia requires ship service activities in the form of pilotage, holding, moorings, and loading and unloading activities from ships to docks and / or from the dock to more efficient vessels. These shipping companies contribute around 50% of all port services revenues.
2. Logistics companies include PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero), PT. Sufie Bahari Lines and PT. Tirta Nusa Persada requires cargo service activities from the pier to a more efficient hinterland loading and unloading location. These logistics companies contribute around 17% of all port services revenues
3. Loading and Unloading Companies, including PT. Samudera Sarana Terminal, PT. Adimas Bahtera Harapan requires facilities and dock infrastructure and terminals for loading and unloading cargo at the port. These loading and unloading companies contribute around 3% of all port services revenues.
4. Cargo Owners (Exporters, Importers), namely, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Musim Mas, PT. Perkebunan Nusantara IV, PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Musim Mas requires the speed of the cargo delivery service to the final destination and the security of shipping cargo. These cargo companies contribute around 30% of all port service revenues.

Atas dasar hal tersebut, maka pemasaran bisnis perusahaan yang telah berada dalam tahapan Expansion and sustainability lebih difokuskan pada pemantapan 3 (tiga) tema grand strategy dan lebih khusus untuk memperkuat branding dengan memberikan layanan yang menekankan pada value & personality Pelindo 1. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan dengan beberapa marketing program/campaign, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan pangsa pasar pelayanan kapal (marine services).
2. Voluntary pilotage services di Selat Malaka dan Singapura.
3. Peningkatan pelayanan dan trafik barang melalui partnership dengan TERSUS dan TUKS.
4. Pelayanan logistik terintegrasi (pelayanan barang dan peti kemas end-to-end).
5. Peningkatan pelayanan penumpang dan bisnis turunannya dari kapal penumpang, ferry, dan cruise.
6. Inisiasi ekspansi regional terminal pelayanan barang (peti kemas dan multi-purpose).
7. Inisiasi ekspansi regional logistic.
8. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui sistem Customer Relationship Management (CRM) guna meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan termasuk mengakuisisi pelanggan dan kerja sama baru

Based on the above, the marketing of the company's business that has been in the expansion and sustainability stage is more focused on strengthening 3 (three) grand strategy themes and more specifically to strengthen branding by providing services that emphasize Pelindo 1's values & personality. The strategy is then implemented with several marketing programs/ campaigns, including:

1. Improving quality and market segments of marine services.
2. Voluntary pilotage services in Malacca Strait and Singapore.
3. Improving service and cargo traffic through a partnership with TERSUS and TUKS.
4. Integrated logistic services (end-to-end cargo and container services).
5. Improving passenger services and its derivative business of passenger ships, ferries, and cruise.
6. Initiate the expansion of regional terminal service cargo (containers and multi-purpose).
7. Initiate the expansion of regional logistic.
8. Improve customer relations through Customer Relationship Management (CRM) in order to increase customer loyalty and satisfaction including acquiring customers and new cooperation.

KEBIJAKAN DIVIDEN & JUMLAH DIVIDEN

DIVIDEND POLICY AND AMOUNT

Keberadaan Pelindo 1 sebagai salah satu BUMN yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk mengelola bidang usaha kepelabuhanan, selalu patuh terhadap regulasi yang terkait dengan kewajiban pembayaran dividen kepada negara. Pemenuhan terhadap kewajiban tersebut memberikan dorongan bagi Pelindo 1 untuk selalu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam uang tunai kepada Negara sekali setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan dividen minimal 30% dari laba bersih setelah pajak kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Dari evaluasi pembayaran dividen selama tahun 2014-2018 diperoleh rata-rata pertumbuhan sebesar 22,41% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2017 mencapai 109,05% disebabkan oleh meningkatnya penetapan rasio dividen menjadi 30% dari sebelumnya sebesar 15%. Adapun pertumbuhan pembayaran dividen terkecil terdapat pada tahun 2015 mencapai pertumbuhan sebesar -48,61% disebabkan oleh rasio dividen yang ditetapkan Pemegang Saham sebesar 15% lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 35%.

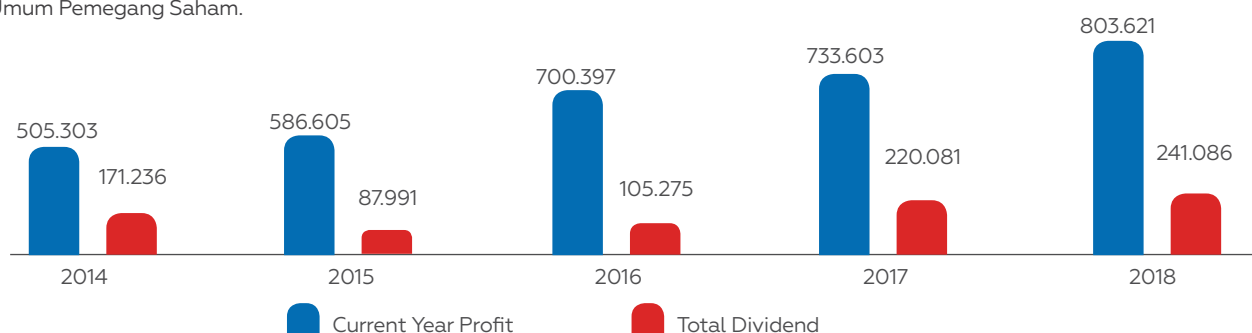
Perusahaan dalam merealisasikan pembayaran dividen kepada Pemerintah senantiasa dilaksanakan dengan waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pelindo 1's existence as one of the SOE given the trust by the Government to manage the port business sector, always adheres to regulations related to the obligation to pay dividends to the state. Fulfillment of these obligations provides encouragement for Pelindo 1 to always play an active role in national economic development.

The General Meeting of Shareholders has a policy to pay dividends in the form of cash to the State once a year. By minding the financial position or level of health of the company and without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders, the dividend policy is at least 30% of net income after tax unless otherwise specified by the General Meeting of Shareholders.

From the evaluation of dividend payments during 2014-2018 the average growth was 22.41% with the largest growth in 2017 reaching 109.05% due to the increase in the ratio of dividends to 30% from the previous 15%. The smallest dividend payment growth in 2015 reached a growth of -48.61% due to the ratio of dividends set by Shareholders of 15% smaller than the previous year of 35%.

The Company in realizing dividend payments to the Government is always implemented with a time not exceeding 1 (one) month from the stipulation of the General Meeting of Shareholders.



No	Uraian Description	Tahun/ Year					Pertumbuhan Growth
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Laba Tahun Berjalan Fiscal Year Profit	505.303	586.605	700.397	733.603	803.621	12,44
2.	Jumlah Dividen Total Dividend	171.236	87.991	105.275	220.081	241.086	22,41
3.	Rasio Dividen (%) Dividend Ratio (%)	35	15	15	30	30	25
4.	Tanggal Setor Deposit Date		9 Juni 2015	17 Juni 2016	7 Juni 2017	2 Mei 2018	-
5.	Keputusan RUPS GMS Decree	12 Mar 2014	13 Mei 2015	19 Mei 2016	8 Mei 2017	3 April 2018	-

PEMBAYARAN PAJAK KEPADA NEGARA

TAX PAYMENT TO THE COUNTRY

Pelindo 1 berkontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan, baik Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, maupun Pajak Pertambahan Nilai.

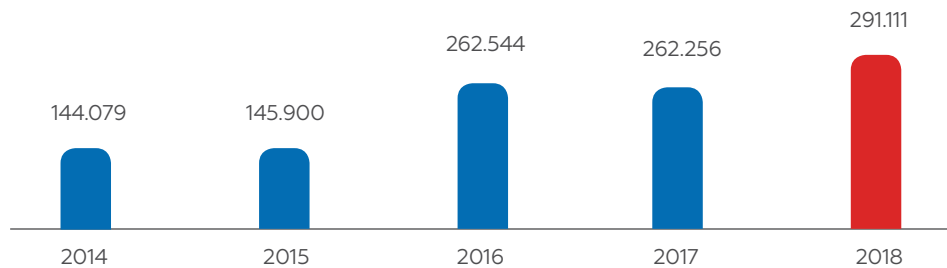
Dari evaluasi kewajiban kepada negara selama tahun 2014-2018 diketahui rata-rata pertumbuhan kewajiban pembayaran pajak kepada negara mencapai 23,03 %. Pertumbuhan kewajiban pembayaran pajak kepada negara terbesar pada tahun 2016 mencapai 79,95% dan terkecil terdapat pada tahun 2017 mencapai pertumbuhan negatif sebesar 0,11%.

Berikut disampaikan jumlah pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan:

Pelindo 1 contributes to the country through fulfillment of tax obligations, both Income Tax, Land and Building Tax and Value Added Tax.

From the evaluation of obligations to the country during 2014-2018, it was found that the average growth in the obligation to pay taxes to the country reached 23.03%. The growth of the obligation to pay taxes to the country in 2016 the highest was reached 79.95% and the lowest in 2017 reached negative growth of 0.11%.

The following is description of the amount of fulfillment of the Company's tax obligations:



No	Uraian Description	Tahun/ Year					Pertumbuhan Growth
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Pajak Kini/ Current Tax	134.850	197.358	210.765	258.945	293.891	22,38
2.	Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	9.429	(51.458)	51.779	3.311	(2.780)	(26,31)
3.	Jumlah Pajak/ Total Taxes	144.079	145.900	262.544	262.256	291.111	23,03

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP) SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT OF THE COMPANY

Pelindo 1 merupakan salah satu BUMN yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

Hingga 31 Desember 2018, Pelindo 1 belum mencatatkan dan melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

Pelindo 1 is one of the SOE whose shares are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia and are not traded on any stock exchange.

Until December 31, 2018, Pelindo 1 has not listed and conducted stock trading activities on the Indonesian Stock Exchange therefore there is no information on the number of shares outstanding, market capitalization, highest, lowest and closing stock prices, and trading volume.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF THE PUBLIC OFFERING FUNDS USAGE

Jumlah obligasi yang beredar sampai dengan akhir 2018 senilai Rp. 1 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan oleh Pelindo 1 pada tanggal 21 Juni 2016 dalam 4 seri obligasi, yaitu:

The amount of bonds outstanding until the end of 2018 is worth Rp.1 billion. The bonds are issued by Pelindo 1 on June 21, 2016 in 4 series of bonds, namely:

Nama Penerbitan Published Title	Peringkat Rank	Tanggal Pencatatan Record Date	Jumlah Beredar (Rp) Total Circulated (Rp)	Bunga/Jangka waktu Interest/Time Period	Tanggal Jatuh Tempo Due Date
Seri A	AA	21 Juni 2016	50.000.000.000	8,25% pa/3 tahun 8,25% pa/3 years	21 Juni 2019
Seri B	AA	21 Juni 2016	500.000.000.000	9,00% pa/5 tahun 9,00% pa/5 years	21 Juni 2021
Seri C	AA	21 Juni 2016	400.000.000.000	9,25% pa/7 tahun 9,25% pa/7 years	21 Juni 2023
Seri D	AA	21 Juni 2016	50.000.000.000	9,50% pa/10 tahun 9,50% pa/10 years	21 Juni 2026

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perusahaan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perusahaan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") dan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat: AA(idn) / idAA (Double A).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (Buy Back) obligasi, dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

These bonds are not guaranteed with special guarantees, but are guaranteed by all assets the company, both movable and immovable cargo, both existing and future ones will become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the Criminal Code. The rights of bondholders are pari passu without preferential rights with the creditor rights of other issuers both now and in the future, except the rights of the company's creditors which are specifically guaranteed with the wealth of the company both existing and future.

In the context of the issuance of these bonds, the company has obtained a rating on long-term bonds (bonds) from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") and PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") with ratings: AA (idn) / idAA (Double A)

These bonds are issued scrippless, except for the jumbo bond certificates issued to be registered in the name of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as proof of debt for the benefit of the bondholders. These bonds are registered in the name of KSEI for the benefit of account holders in KSEI, which are subsequently for the benefit of the bondholders and are registered on the date the Company is handed over the jumbo bond certificate to KSEI. Proof of bond ownership for bondholders is written confirmation issued by KSEI, Securities Company or Custodian Bank.

The company can buy back bonds, can be addressed as repayment or deposited for later resale at market prices, the implementation of bond buybacks is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, buybacks of new bonds can be done 1 (one) year after the allotment date as stated in the prospectus.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, OR DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING, AND/OR MANAGEMENT OF THE COMPANY

Sepanjang tahun 2018, Pelindo 1 tidak melakukan ekspansi, divestasi dan akuisisi, namun demikian Pelindo 1 hanya melakukan penambahan investasi untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan keamanannya serta rencana restrukturisasi utang/modal.

Throughout 2018, Pelindo 1 did not expand, divest and acquire, however, Pelindo 1 only made additional investments to obtain optimal results while considering the risk and security factors and the debt / capital restructuring plan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WHICH CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

KEBIJAKAN PERUSAHAAN ATAS TRANSAKSI USAHA DENGAN PIHAK BERELASI

Pelindo 1 beserta entitas anak telah menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), yang mengatur mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi usaha antara perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai PSAK 7 (Revisi 2010), yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
2. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang atau anggota keluarga terdekat yang memenuhi definisi pihak yang berelasi; atau
 - Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas/personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

COMPANY POLICY ON BUSINESS TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pelindo 1 and its subsidiaries have applied PSAK 7 (Revised 2010), which regulates "Related Party Disclosures". Business transactions between companies and State-Owned Enterprises are treated as related party transactions in accordance with PSAK 7 (Revised 2010), namely:

1. The closest person or family member who has a relationship with the reporting entity if the person:
 - Having joint control or control over the reporting entity; or
 - Having a significant influence on the reporting entity; or
 - Key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2. One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment benefit program for employee benefits from one of the reporting entities or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
 - Entities that are controlled or controlled jointly by the person or immediate family member who meets the definition of the related party; or
 - The closest person or family member who has a significant influence on the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WHICH CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

PIHAK YANG BERTRANSAKSI USAHA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Pelindo 1 beserta entitas anak telah melakukan transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2011) yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian.

Semua transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan syarat dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

BUSINESS TRANSACTING PARTIES AND THE NATURE OF RELATIONSHIPS

Pelindo 1 and its subsidiaries have conducted certain transactions with several parties that have special relationships in accordance with PSAK 7 (Revised 2011) which requires disclosure of relationships, related party transactions and balances, including commitments in the consolidated financial statements.

All transactions and balances with related parties, whether carried out or not carried out with normal terms and conditions as done with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

No.	Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Berelasi Nature of Relationship	Jenis Transaksi Type of Transaction
1.	Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	Pemegang Saham dan Pengendali Utama Badan Usaha Milik Negara Shareholders and Main Controller of State-Owned Enterprises	Pemegang Saham dan Pengendali Utama Badan Usaha Milik Negara Majority shareholders of 100%
2.	Bank Milik Pemerintah/ Government Owned Bank		
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Memiliki dana investasi dan pinjaman di Bank Mandiri (Persero) Tbk Having investment and loan funds at Bank Mandiri (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan dana • Pinjaman bank • Fund placement • Bank loan
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Memiliki dana investasi dan pinjaman di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Having investment and loan funds at Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan dana. • Pinjaman bank • Piutang usaha • Fund placement • Bank loan • Accounts Payable
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Memiliki dana investasi dan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Having investment and loan funds at Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan dana • Pinjaman bank • Fund placement • Bank loan
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Memiliki dana investasi Having investment fund	Penempatan dana Fund placement
	PT Bank Tabungan Negara Syariah	Memiliki dana investasi Having investment fund	Penempatan dana Fund placement
	PT Bank Mandiri Syariah	Memiliki dana investasi Having investment fund	Penempatan dana Fund placement
3.	Badan Usaha Milik Negara / State-Owned Enterprises		
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Hutama Karya (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Nindya Karya (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Virama Karya (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable

No.	Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Berelasi Nature of Relationship	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Pertamina (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Perkebunan Nusantara IV	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Pupuk Sriwidjaja	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Pupuk Iskandar Muda	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Jasa Prima Logistik Bulog	Sinergi Badan Usaha Milik Negara	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Semen Padang	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Piutang usaha/ Account Receivable
	PT Sucofindo (Persero)	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Utang Usaha/ Accounts Payable
	PT Arkindo	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Piutang usaha/ Account Receivable
	PT Arun NGL	Sinergi Badan Usaha Milik Negara Synergy of State-Owned Enterprises	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WHICH CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

No.	Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Berelasi Nature of Relationship	Jenis Transaksi Type of Transaction
4.	Anak Perusahaan/ Subsidiaries		
	PT Prima Indonesia Logistik	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 99,00% dengan biaya perolehan Rp. 148.564 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 99.00% with the acquisition cost of Rp. 148,564 million	Investasi/ Investment
	PT Prima Pengembangan Kawasan	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 90,00% dengan biaya perolehan Rp. 853.228 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 99.00% with the acquisition cost of Rp. 853.228 million	Investasi/ Investment
	PT Prima Husada Cipta	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 99,68% dengan biaya perolehan Rp. 23.986 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 99,68% with the acquisition cost of Rp. 23.986 million	Investasi/ Investment
	PT Prima Terminal Petikemas Indonesia	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 70,00% dengan biaya perolehan Rp. 1.071.632 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 70.00% with the acquisition cost Rp1.071.632 million	Investasi/ Investment
	PT Prima Multi Terminal	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 55,00% dengan biaya perolehan Rp. 3.196.113 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 55.00% with the acquisition cost of Rp. 3.196.113 million	Investasi/ Investment
	PT Terminal Petikemas Indonesia	Entitas Anak, dimana Perusahaan Induk memiliki saham sebesar 25,00% dengan biaya perolehan Rp. 135.742 juta Subsidiary, where the Parent Company owns shares of 25,00% with the acquisition cost of Rp. 135.742 million	Investasi/ Investment
5.	Pihak-pihak lainnya		
	PT Sarana Agro Nusantara	Kerjasama Antar Perusahaan Company Cooperation	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Pertamina Trans Kontinental	Kerjasama Antar Perusahaan Company Cooperation	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Perta Arun Gas	Kerjasama Antar Perusahaan Company Cooperation	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Kereta Api Logistik	Kerjasama Antar Perusahaan Company Cooperation	Pendapatan dan piutang usaha Income and Account Receivable
	PT Telomunikasi Seluler Tbk	Kerjasama Antar Perusahaan Company Cooperation	Piutang usaha/ Account Receivable

KEWAJARAN TRANSAKSI USAHA

Pelindo 1 beserta entitas anak dalam melaksanakan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi senantiasa dilakukan dalam batas kewajaran dan berdasarkan analisa risiko yang menyeluruh sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat benturan kepentingan dan memiliki asas sebagai berikut:

1. Legalitas, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan sah secara hukum guna menghindari terjadinya pengingkaran pelaksanaan transaksi diantara kedua belah pihak.
2. Akuntabilitas, yaitu dalam proses dan capaian hasil dari kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
3. Kepatuhan, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi harus dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan mekanisme kerjasama yang telah ditetapkan bersama.
4. Keterbukaan, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi dilaksanakan secara jelas dan terbuka meskipun memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga terhindar dari rasa saling curiga dalam pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.
5. Obyektivitas, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi dilaksanakan secara jujur, benar, lengkap dan tidak diskriminatif berdasarkan fakta atau bukti yang akurat.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI USAHA

Pelindo 1 beserta entitas anak dalam setiap melaksanakan transaksi usaha dengan pihak berelasi berdasarkan pada prinsip dan alasan, antara lain:

1. Kegiatan transaksi usaha dibutuhkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pihak berelasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.
2. Mendorong terciptanya sinergi dengan pihak berelasi sebagai upaya bersama untuk membangun ekonomi nasional.
3. Memberikan manfaat atau kegunaan yang seimbang bagi perusahaan dan pihak berelasi. sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

FAIRNESS OF BUSINESS TRANSACTION

Pelindo 1 and its subsidiaries in conducting business transactions with related parties are always carried out within reasonable limits and based on a comprehensive risk analysis therefore there is no conflict of interest in the implementation and has the following principles:

1. Legality, namely business transaction activities with related parties have legal force and are declared legally valid to avoid the occurrence of denial of transactions between the two parties.
2. Accountability, i.e. in the process and results of business transactions with related parties can be accounted for in accordance with the provisions of legislation and procedures applied.
3. Compliance that is the business transaction activities with related parties must be carried out consistently and based on the cooperation mechanism that has been established jointly.
4. Transparency, that is, business transaction activities with related parties are carried out clearly and openly despite having certain limitations, so as to avoid mutual suspicion in managing information and financial management.
5. Objectivity, that is business transaction activities with related parties are carried out honestly, truthfully, complete, and indiscriminative based on fact and/or accurate proof.

REASONS FOR CONDUCTING BUSINESS TRANSACTION

Pelindo 1 and its subsidiaries in conducting business transactions with related parties are based on the principles and reasons, including:

1. Business transaction activities are needed, in order to provide benefits to the company and related parties in order to increase the capacity and capability of the company, so that it can obtain good results.
2. Encouraging the creation of synergies between related parties as a joint effort to grow national economy.
3. Providing balanced benefits or uses for companies and related parties. So that the goals and objectives that have been set can be achieved optimally.
4. Interest rates obtained from cash placements at banks, and time deposits at related banks parties are

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WHICH CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

4. Tingkat suku bunga yang diperoleh dari penempatan kas pada bank, dan deposito berjangka pada bank pihak berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga. Tingkat suku bunga deposito rata-rata tahun 2018 berkisar 0,50% - 1,00% per tahun untuk USD, dan 5,00% - 8,00% per tahun untuk Rupiah.

proportional to the interest rates obtained from third party banks. The average deposit interest rate for 2018 ranges from 0.50% - 1.00% per year for USD, and 5.00% - 8.00% per year for the Rupiah.

REALISASI TRANSAKSI USAHA PADA PERIODE BERJALAN

Pelindo 1 mencatatkan seluruh realisasi transaksi usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga pada periode tahun 2018. Meskipun demikian dalam laporan ini hanya disajikan transaksi usaha dengan pihak berelasi yang memiliki nominal diatas Rp1.000 juta. Pada tahun 2018, besaran realisasi transaksi usaha Pelindo 1 dengan pihak berelasi adalah:

REALIZATION OF BUSINESS TRANSACTIONS IN THE CURRENT PERIOD

Pelindo 1 listed all realization of business transactions with related parties and third parties in the period of 2018. Nevertheless, in this report only business transactions with related parties are presented which have a nominal above Rp1,000 million. In 2018, the amount of Pelindo 1 business transactions with related parties is:

Nama Pihak Name of Party	Jumlah (Rp/Juta) Amount (Rp/Million)	%
Penempatan Dana Investasi Pada Pihak Berelasi Investment Fund Placement in Related Parties		% dari total aset % of total asset
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	818.493	5,84
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	558.338	3,98
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	385.014	2,75
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	56.463	0,40
PT Bank Mandiri Syariah	5.542	0,04
Jumlah Penempatan Dana/ Total Funds Placement	1.823.850	13,01
Pendapatan Usaha Dari Pihak Berelasi Operating Income from Related Parties		% dari total pendapatan usaha % of total operating income
PT Pertamina (Persero)	33.697	1,08
PT Pupuk Sriwijaya Palembang	1.021	0,03
PT Semen Padang	2.016	0,06
PT Pelayaran Nasional Indonesia	5.759	0,18
PT Bahtera Adhiguna	50	0,00
PT Banda Graha Reksa	18.834	0,60
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	115	0,00
PT A.S.D.P	0,34	0,00
PT Telekomunikasi Seluler Tbk	24	0,00
PT Perkebunan Nusantara IV	17	0,00
PT Sarana Bandar Nasional	531	0,01
PT Pupuk Iskandar Muda	134	0,00
PT Jasa Prima Logistik Bulog	11.771	0,38
PT Waskita Karya (Persero)	19	0,00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	196	0,01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8	0,00
PT Djakarta LLYOD	345	0,01
PT Lafarge Cement Indonesia	9.464	0,30

Nama Pihak Name of Party	Jumlah (Rp/Juta) Amount (Rp/Million)	%
PT Varuna Tirta Prakarsa	1	0,00
PT Sarana Agro Nusantara	10.112	0,32
Jumlah Pendapatan Usaha/ Total Operating Income	94.115	3,02
Piutang Usaha Dengan Pihak Berelasi Account Receivable with Related Parties		% dari total piutang usaha % of total account receivables
PT Pertamina Trans Kontinental	7.090	6,93
PT Pertamina (Persero)	4.833	4,73
PT Perta Arun Gas	3.024	2,96
Jumlah Piutang Usaha Dengan Pihak Berelasi Total Account Receivables with Related Parties	14.947	14,62
Utang Usaha Dengan Pihak Berelasi Business Payable with Related Parties		% dari total liabilitas % of total liabilities
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22.558	0,30
PT Hutama Karya (Persero)	15.221	0,20
PT Brantas Abipraya (Persero)	55.636	0,74
PT Nindya Karya (Persero)	71.318	0,70
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82.938	0,95
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.946	0,03
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34.648	0,46
PT Pertamina (Persero)	24.651	0,33
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	12.763	0,15
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6.734	0,09
PT Sucofindo (Persero)	5.718	0,08
Pertamina Trans Kontinental	1.323	0,02
BPPU ITS	1.247	0,02
Jumlah Utang Usaha Dengan Pihak Berelasi Total Business Payable with Related Parties	336.700	4,46
Utang Bank Pada Pihak Berelasi Bank Payable with Related Parties		% dari total liabilitas % of total liabilities
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	367.989	4,88
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	350.000	4,64
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000	4,64
PT Bank Syariah Mandiri	3	0,00
Jumlah Utang Bank Pada Pihak Berelasi Jumlah Utang Bank Pada Pihak Berelasi	1.067.992	14,16

Dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi, Pelindo 1 senantiasa melaksanakan kajian dan analisa atas setiap transaksi, yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti Komite Investasi, Komite Audit, Tim Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan pihak terkait lainnya. Perusahaan dapat menggunakan pihak ketiga (konsultan) terhadap transaksi usaha yang berskala multiyear guna mendapatkan hasil kajian dan analisa yang komprehensif.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Setiap transaksi usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator maupun perusahaan. Bagi transaksi usaha yang terindikasi kecurangan dan bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pelindo 1 memiliki komitmen untuk melakukan penundaan terhadap transaksi usaha yang terindikasi kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut.

PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelindo 1 telah melakukan pembayaran bunga obligasi tahun 2017 hingga 31 Desember 2018, sebagai berikut:

Tahun 2017 (dalam ribu) / Year of 2017

No	Periode Total Emission	Jumlah Emisi Total Emission	Coupon	Mar-17	Jun-17	Sep-17	Dec-17	Thn 2017 Year 2017
1.	21/06/16 - 21/06/19	50.000.000	8.25%	1.031.250	1.031.250	1.031.250	1.031.250	4.125.000
2.	21/06/16 - 21/06/21	500.000.000	9.00%	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	45.000.000
3.	21/06/16 - 21/06/23	400.000.000	9.25%	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	37.000.000
4.	21/06/16 - 21/06/26	50.000.000	9.50%	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	4.750.000
		1.000.000.000	0,09	22.718.750	22.718.750	22.718.750	22.718.750	90.875.000
Tanggal Pembayaran/ Payment Date				17/03/2017	19/06/2017	20/09/2017	19/12/2017	

Tahun 2018 (dalam ribu) / Year of 2018

No	Periode	Jumlah Emisi	Coupon	Mar-18	Jun-18	Sep-18	Dec-18	2018
1.	21/06/16 - 21/06/19	50.000.000.000	8.25%	1.031.250.000	1.031.250.000	1.031.250.000	1.031.250.000	4.125.000.000
2.	21/06/16 - 21/06/21	500.000.000.000	9.00%	11.250.000.000	11.250.000.000	11.250.000.000	11.250.000.000	45.000.000.000
3.	21/06/16 - 21/06/23	400.000.000.000	9.25%	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	37.000.000.000
4.	21/06/16 - 21/06/26	50.000.000.000	9.50%	1.187.500.000	1.187.500.000	1.187.500.000	1.187.500.000	4.750.000.000
		1.000.000.000.000		22.718.750.000	22.718.750.000	22.718.750.000	22.718.750.000	90.875.000.000
Tanggal Pembayaran/ Payment Date				20/03/2018	08/06/2018	18/09/2018	19/12/2018	

COMPANY POLICY REGARDING THE REVIEW MECHANISM OF TRANSACTIONS

In conducting business transactions with related parties, Pelindo 1 always conduct studies and analyzes of each transaction, which is carried out thoroughly and continuously by involving competent parties such as the Investment Committee, Audit Committee, Procurement Team for cargo and / or Services, and other related parties. The company can use third parties (consultants) on multiyear-scale business transactions to obtain comprehensive results of analysis.

COMPLIANCE TO RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

Every business transaction conducted is in accordance with the regulations and provisions stipulated by the regulator and the company. For business transactions that are indicated to be fraudulent and contrary to the principles of good corporate governance, Pelindo 1 has a commitment to postpone business transactions indicated as fraud and / or irregularities.

PERUBAHAN REGULASI YANG BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PERUSAHAAN

REGULATIONS CHANGES THAT HAS SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Pada tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan dan regulasi yang berdampak cukup signifikan bagi perusahaan, sebagai berikut:

In 2018 there were changes in policies and regulations that had a significant impact on the company, as follows:

No	Kebijakan/Regulasi Policy/Regulation	Tujuan Penerapan Kebijakan Purpose of Policy
1.	Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2018 Presidential Regulation No. 81 Year of 2018	Memberikan pedoman yang mengatur mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara Provide guidelines in governing the acceleration of the construction and operation of Kuala Tanjung Ports and Industrial Estate in North Sumatra Province
2.	Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 53 Tahun 2018 Minister of Transportation Regulation No. PM 53 Year of 2018	Memberikan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan mengenai kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi. Provide guidelines and instructions for companies regarding container feasibility and the verified gross weight of containers.
3.	Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2018 Minister of Transportation Regulation No. PM 121 Year of 2018	Memberikan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan mengenai jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tariff jasa kepelabuhanan Providing guidelines and instructions for companies regarding the type, structure, classification, and mechanism of tariff setting for port services
4.	Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 22 Tahun 2018 Minister of Transportation Regulation No. PM 22 Year of 2018	Memberikan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan mengenai komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan barang laut. Providing guidelines and instructions for companies regarding the components of income and costs calculated in the subsidy activities for the implementation of sea freight transportation.
5.	Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2017 Minister of Finance Regulation No. 110 Year of 2018 Revision of Minister of Finance Regulation No. 34 Year of 2017	Mengatur tentang Pemungutan PPh Import Pasal 22. Sebanyak 1.147 barang impor yang sebagian besar barang konsumsi dinaikkan tariff pajak dengan kisaran antara 7,5 – 10%. Regulates the Collection of Import PPh Article 22. A total of 1,147 imported goods, most of which are consumed, are increased the tax rates with a range between 7.5 - 10%.
6.	Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam No. 11 Tahun 2018 Regulation of the Head of the Concession Agency (BP) Batam No. 11 of 2018	Memberikan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan mengenai tariff dan jasa pelabuhan Batam. Provide guidelines and instructions for companies regarding Batam port tariffs and services.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGE OF ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI).

Pada tahun 2018 terdapat sejumlah perubahan kebijakan akuntansi atas laporan keuangan perusahaan konsolidasian, sebagai berikut:

STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU PADA TAHUN BERJALAN

Dalam tahun berjalan, Pelindo 1 telah menerapkan penyesuaian atas standard dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai tanggal 1 Januari 2018, meskipun tidak menimbulkan perubahan substantif terhadap pengungkapan atau jumlah yang dicatat didalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan dan untuk tahun sebelumnya. Adapun amandemen dan interpretasi standard dimaksud, adalah:

1. PSAK No. 2 (Amandemen 2017), "Laporan Arus Kas".
2. PSAK No. 16 (Amandemen 2017), "Aset Tetap".
3. PSAK No. 46 (Amandemen 2017), "Pajak Penghasilan".
4. PSAK No. 13 (Amandemen 2017), "Properti Investasi".
5. PSAK No. 53 (Amandemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham".
6. PSAK No. 15 (Amandemen 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
7. PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan pada Entitas Lain".

Standar Akuntansi Yang Berlaku Efektif 1 Januari 2019

Pada tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan akuntansi atas laporan keuangan perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

The consolidated financial statements are prepared and have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association (DSAK - IAI), as well as Attachment to the Decision of the Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number KEP-347 / BL / 2012 concerning the presentation and disclosure of financial statements of issuers or public companies, and the Accounting Guidelines for Indonesian Port Companies (PAPPI).

In 2018 there were several changes to the accounting policy for the consolidated company's financial statements, as follows:

ACCOUNTING STANDARDS APPLICABLE IN THE CURRENT YEAR

In the current year, Pelindo 1 has applied adjustments to new and revised standards and interpretations issued by the relevant and effective Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association for the accounting period beginning January 1, 2018, although it does not cause substantive changes to disclosures or amounts that recorded in the consolidated financial statements for the current year and for the previous year. The amendments and interpretations of the standard are:

1. PSAK No. 2 (Amendment 2017), "Cash Flow Statement".
2. PSAK No. 16 (Amendment 2017), "Fixed Asset".
3. PSAK No. 46 (Amendment 2017), "Income Tax".
4. PSAK No. 13 (Amendment 2017), "Property Investment".
5. PSAK No. 53 (Amendment 2017), "Share Based Payment".
6. PSAK No. 15 (Amendment 2017), "Investment in Associates and Joint Venture".
7. PSAK No. 67 (Adjustment 2017), "Disclosure of Interest of Other Entities".

Accounting Standards Effective on January 1, 2019

In 2018 there were changes to the accounting policies of the company's financial statements, but they have not been effective for the financial statements ended on December 31 2018. The company has reviewed the impact of the standards and interpretations as outlined below:

No	PSAK	Dampak Penerapan/ Impact of Application
1.	Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi" Amendment PSAK 62 "Insurance Contract"	Menentukan pelaporan keuangan untuk kontrak asuransi setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. Pernyataan ini secara khusus mensyaratkan pengembangan terbatas akuntansi insurer untuk kontrak asuransi serta pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan insurer yang timbul dari kontrak asuransi, dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan dari kontrak asuransi. Determine financial reporting for insurance contracts for each entity that issues insurance contracts. This statement specifically requires the limited development of insurer accounting for insurance contracts as well as disclosures that identify and explain the amount in insurer financial statements arising from insurance contracts, and assist financial report users in understanding the amount, timing and uncertainty of future cash flows from insurance contracts.
2.	PSAK 71 "Instrumen Keuangan" PSAK 71 "Financial Instrument"	Mengatur klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan. Regulates classification, measurement and termination of recognition of financial assets and liabilities, introduces new rules for hedge accounting and a new model of impairment of financial assets.
3.	PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" PSAK 72 "Revenues from Contract with Customers"	Suatu standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika control atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan A standard for recognition of income has been issued. This standard will replace PSAK 23 which regulates contracts for goods and services and PSAK 34 which regulates construction contracts. This new standard is based on the principle that income is recognized when control of goods or services is transferred to customers
4.	PSAK 73 "Sewa" PSAK 73 "Lease"	Standar ini akan membawa dampak hampir ke seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standard yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah. Perlakuan akuntansi untuk pesewa tidak akan berbeda secara signifikan. This standard will have an impact on almost all leases recognized in the statement of financial position, due the difference between operating leases and financing is written off. In the new standard, an asset (usufructuary rights for goods leased) and a financial liability to pay rent is recognized. Exceptions can only be found on short-term leases and ones low value. The accounting treatment for boarders will not differ significantly.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Dengan memperhatikan capaian kinerja Pelindo 1 di tahun 2018 dan proyeksi kinerja di tahun 2019 yang masih mencatat laba bersih serta memperoleh peningkatan nilai perusahaan, meskipun di tengah kondisi makro ekonomi global dan Indonesia yang belum stabil, manajemen penuh optimisme dan berkeyakinan dengan sumber daya yang ada, perusahaan masih memiliki kemampuan yang besar untuk melanjutkan kelangsungan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, manajemen tidak memiliki informasi adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan secara signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen senantiasa membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Keberhasilan pengelolaan bisnis pelabuhan yang dicapai oleh Pelindo 1 hingga akhir tahun 2018 telah memberikan suatu optimisme dan keyakinan bagi manajemen untuk mengembangkan dan menjadikan Pelindo 1 sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bisnis pelabuhan terbesar dalam negeri. Optimisme dan keyakinan dimaksud telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2018.

Pemerintah telah menunjuk dan menugaskan Pelindo 1 sebagai kontraktor dan sekaligus sebagai operator untuk membangun pelabuhan Kuala Tanjung yang disiapkan menjadi hub internasional bersama pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta. Pelabuhan Internasional Hub, merupakan pelabuhan utama primer dan berperan sebagai pelabuhan internasional yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai alih muat (transshipment) barang antar negara. Selain pelabuhan, Pelindo 1 juga ditugaskan untuk mengembangkan kawasan industri Kuala Tanjung yang lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan International Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan.

Sebagai konsekuensi dari penugasan ini, Pelindo 1 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan proyek mulai dari pendanaan hingga pengoperasian. Proyek yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp30 triliun nantinya dibiayai oleh Pelindo 1 melalui pinjaman maupun melalui penyertaan dana internal sendiri. Pada pengerjaan terminal pelabuhan Kuala Tanjung tahap II tahun 2018 – 2019, proyek strategis nasional ini membutuhkan dana sebesar Rp11 triliun

Didasari pada kajian dan analisis yang mendalam, pembangunan pelabuhan dan pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung memiliki potensi yang baik bagi kelangsungan usaha Pelindo 1, dengan sejumlah asumsi sebagai berikut:

By considering the performance achievements of Pelindo 1 in 2018 and the projected performance in 2019 which still records net profit and obtains an increase in the value of the company, even in the midst of unstable global and Indonesian macroeconomic conditions, management is full of optimism and belief in existing resources, the company still has a large ability to continue its business continuity in the future.

In addition, management does not have information about material uncertainty in connection with events or conditions that could raise significant doubts about the company's ability to sustain its business. Therefore, in preparing financial statements, management always makes judgments on the entity's ability to maintain business continuity.

The success of the port business management achieved by Pelindo 1 until the end of 2018 has provided an optimism and confidence for management to develop and create Pelindo 1 as one of the State-Owned Enterprises that manages the largest port business in the country. This optimism and confidence has gained trust from the government with the issuance of Presidential Regulation Number 81 of 2018.

The government has appointed and commissioned Pelindo 1 as a contractor and at the same time as an operator to build the Kuala Tanjung port which has been prepared to become an international hub with port of Bitung in North Sulawesi and port of Tanjung Priok in DKI Jakarta. The International Port of Hub, is the main primary port and acts as an international port that is open to foreign trade and serves as a transshipment of cargo between countries. In addition to the port, Pelindo 1 is also tasked with developing the Kuala Tanjung industrial area which is located nearby to the ports of Kuala Tanjung, Belawan International Container Terminal, and Belawan Domestic Container Terminal.

As a consequence of this assignment, Pelindo 1 is fully responsible for the sustainability of the project from funding to operations. The project, which is estimated to require funds up to Rp30 trillion, will be funded by Pelindo 1 through loans and through its own internal funds. In the phase II terminal construction of the Kuala Tanjung port in 2018 - 2019, this national strategic project requires funds of Rp. 11 trillion.

Based on in-depth studies and analysis, port development and Kuala Tanjung industrial area development have a good potential for the sustainability of Pelindo 1's business, with several assumptions as follows:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, pengembangan pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung akan meningkatkan volume arus peti kemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039. Pada Tahap I diestimasikan kapasitas bongkar muat peti kemas sebesar 400.000 Teus dan bongkar muat curah cair sebanyak 750 Ton/jam atau 2.000.000 ton/tahun. 2. Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi salah satu pelabuhan Hub Internasional yang berperan melayani kegiatan bongkar muat peti kemas dan barang umum, curah cair dan curah kering. Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran utama dan lalu lintas kapal yang mempunyai kedalaman sampai -16 LWS s/d -17 LWS, sehingga sangat layak untuk dijadikan Hub Internasional. 3. Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Selat Malaka untuk dapat menyaingi pelabuhan Port of Singapore, Port of Tanjung Pelepas, Port Klang dan Pelabuhan Penang.

Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang strategis bagi Indonesia, Malaysia dan Singapura. 4. Telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke diatas areal seluas 3000 Ha yang kawasannya berada dibelakang area pelabuhan serta terkoneksi langsung dengan pelabuhan dan sarana pendukung seperti jalur kereta. 5. Pelabuhan multipurpose Kuala Tanjung diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang akan mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara terutama sebagai pintu masuk turis dari Malaysia dan Singapura yang akan berwisata ke Danau Toba. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Based on the results of a study conducted by the Ministry of Transportation in 2015, the development of Kuala Tanjung Multipurpose Port will increase the volume of container flows to 12.4 million TEUs in 2039. In Phase I the container loading and unloading capacity is estimated at 400,000 TEUs and loading and unloading liquid quantity of 750 tons/ hour or 2,000,000 tons/ year. 2. Kuala Tanjung Port becomes one of the ports of the International Hub whose role is to serve loading and unloading activities for container and general cargo, liquid bulk and dry bulk. Kuala Tanjung Port is located in the Malacca Strait which is the main shipping lane and ship traffic which has a depth of up to -16 LWS up to -17 LWS, making it very feasible to be used as an International Hub. 3. Kuala Tanjung Port is one of the largest ports in the Malacca Strait to compete with Port of Singapore, Port of Tanjung Pelepas, Port Klang and Penang Port.

The Malacca Strait is a strategic water area for Indonesia, Malaysia and Singapore. 4. The operation of the Sei Mangke Special Economic Zone over an area of 3000 hectares, the area of which is behind the port area and directly connected to the port and supporting facilities such as the railway line. 5. Kuala Tanjung multipurpose port is expected to be able to increase the number of tourists who will visit tourist locations in North Sumatra Province, especially as entrances to tourists from Malaysia and Singapore who will travel to Lake Toba. |
|--|---|

INFORMASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN ASET BANTUAN YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA

INFORMATION ON THE SETTLEMENT DEVELOPMENT OF GOVERNMENT
ASSISTANCE ASSET WHICH ITS STATUS HAS NOT BEEN DETERMINED YET

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) adalah proyek Pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diserahkan kepada Pelindo 1 untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Bantuan tercatat dalam neraca perusahaan namun belum ada penetapan status dari proyek Pemerintah tersebut kepada Pelindo 1.

Government assistance that has not been determined (BPYBDS) is a Government project funded by the State Budget (APBN) which has been handed over to Pelindo 1 to support port operations. Assistance is recorded on the company's balance sheet but there has been no determination of the status of the Government project to Pelindo 1.

Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Pelindo 1 sampai dengan posisi tahun 2018 adalah sebesar Rp.527.133 juta yang terdiri atas :

Government Assistance Asset that have not been Determined (BPYBDS) in Pelindo 1 until the position in 2018 are Rp.527,133 million consisting of:

No.	Uraian Description	APBN Tahun Anggaran APBN Fiscal Year	Nilai (Rp/juta) Amount (Rp/ million)
1.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dumai, Kementerian Perhubungan Construction of Dumai Port Facility, the work of the Dumai Port Facility Development Unit, Ministry of Transportation	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008	414.128
2.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, Kementerian Perhubungan Construction of the Gunung Sitoli Port Facility, the work of Gunung Sitoli Port Facility Development Unit, Ministry of Transportation	2010 dan 2011	19.204
3.	Pembangunan 2 unit Kapal Tunda di Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias. Construction of 2 tugboat units in Malahayati and Lhokseumawe ports, the work of the Aceh-Nias Rehabilitation and Reconstruction Organization.	2007	562
4.	Pengadaan 1 unit Forklift 3 ton dan 1 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias. The procurement of 1 unit of 3 ton Forklift and 1 unit of 5 ton Forklift in Gunung Sitoli Port, the work of Aceh-Nias Rehabilitation and Reconstruction Organization.	2007	562
5.	Pengadaan 3 unit Forklift 3 ton dan 3 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias. Procurement of 3 units of 3 ton Forklift and 3 units of 5 ton Forklift in Malahayati Port, the work of the Aceh-Nias Rehabilitation and Reconstruction Organization.	2017	1.686
6.	Pembangunan Dermaga Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias. Construction of the Gunung Sitoli Pier, the work of Aceh-Nias Rehabilitation and Reconstruction Organization.	2017 dan 2018	37.992
	Jumlah/ TOTAL		527.133

Dengan diketahui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan – Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah dilaksanakan rekonsiliasi Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo 1 dengan hasil rekonsiliasi sebesar Rp527.133 juta. Hal ini telah tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Pelindo 1 (Persero) Nomor: BA- 02/KN.3/REKON.BPYBDS.SEM/2018 tanggal 18 Juli 2018. Tidak ada perbedaan nilai yang tercatat antara pembukuan perusahaan dengan nilai hasil rekonsiliasi.

Hingga dengan saat ini penyelesaian aset BPYBDS masih berada di Kementerian Sekretariat Negara dalam proses penyelesaian sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Seluruh aset tersebut masih tercatat dalam pembukuan perusahaan sebagai aset BPYBDS.

By being acknowledged by the Directorate General of Country's Assets - Directorate of Separated Country's Asset - Ministry of Finance and Ministry of State-Owned Enterprises have carried out reconciliation of Government Assets Assistance That The Status Have Not Been Defined between the Ministry of Transportation and Pelindo 1 with the results of reconciliation of Rp.527,133 million. This has been stated in the Minutes of Reconciliation of Government Asset Assistance That the Status Has Not been Defined (BPYBDS) in Pelindo 1 (Persero) Number: BA-02/KN.3/REKON.BPYBDS.SEM/2018 dated July 18 2018. There is no difference in value recorded between the company's books and the value of the results of reconciliation.

Until present, the completion of BPYBDS assets is still in the Ministry of State Secretariat in the settlement process as a State Capital Participation (PMN). All of these assets are still recorded in the company's books as BPYBDS assets.



INFORMASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

INFORMATION OF NATIONAL PRIORITY PROGRAM

1. Pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung
Pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi salah satu pelabuhan hub internasional dan berfungsi sebagai pintu masuk (gateway) wilayah barat Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan pelayanan dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dengan nilai investasi Rp4,029 triliun, pada tahap I difokuskan pada Pengembangan Terminal Multipurpose (TMP), tahap II pada pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, tahap III pada pengembangan Dedicated Terminal (Hub Port) dan tahap IV pada pengembangan integrated urban area. Proyek ini didanai oleh beberapa PT. Pelindo 1 (Persero) sebesar 55%, PT. PP (Persero) Tbk sebesar 25% dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 20%.

Hingga akhir tahun 2018 realisasi fisik telah mencapai 99.09 % dengan target 100%.

2. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan pelabuhan Kuala Tanjung ditujukan untuk pengembangan industri utama berupa industri berat dan hasil pertambangan. Keuntungan proyek ini dapat menurunkan biaya logistik, berpotensi menciptakan skala ekonomi, menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan konsep cluster, industri didalamnya dapat memberikan benefit satu sama lain menurunkan biaya produksi.

Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang diinisiasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki nilai investasi sebesar Rp 34,7 triliun dengan sumber pendanaan internal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan pinjaman pihak lain.

Hingga akhir tahun 2018 progres yang dicapai adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang penugasan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

1. The Construction of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal and the development of the Kuala Tanjung port is projected to be one of the international hub ports and serves as the gateway for the western region of Indonesia aimed at increasing regional economic growth, improving services and creating jobs.

Construction of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal with an investment value of Rp.4,029 trillion, in phase I focused on the Development of Multipurpose Terminals (TMP), phase II on the development of the Kuala Tanjung Industrial Zone, phase III on developing Dedicated Terminals (Hub Ports) and stage IV on integrated development urban area. This project was funded by PT. Pelindo 1 (Persero) of 55%, PT. PP (Persero) Tbk for 25% and PT. Waskita Karya (Persero) Tbk for 20%.

By the end of 2018 physical realization has reached 99.09% with target of 100%.

2. The construction of the Kuala Tanjung Industrial Area which is integrated with the Kuala Tanjung port is intended for the development of major industries in the form of heavy industries and mining products. The benefits of this project can reduce logistics costs, having the opportunity to create economic scale, attract investors both local and International. In addition, with the cluster concept, the industry in it can provide benefits to each other to reduce production costs.

The construction of the Kuala Tanjung Industrial Area initiated by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and has an investment value of Rp. 34.7 trillion with internal funding sources from PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) and other parties' loans.

Until the end of 2018 the progress achieved was the issuance of Presidential Regulation Number 81 of 2018 dated 17 September 2018 regarding the assignment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for the Acceleration of the Construction and Operation of the Kuala Tanjung Port and Industrial Zone in North Sumatra Province.

TINJAUAN KEBERADAAN POSISI PERUSAHAAN

REVIEW OF THE EXISTING COMPANY POSITION

Pelindo 1 pada tahun 2018 telah mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan tantangan ke depan dari sisi eksternal serta kekuatan dan kelemahan dari sisi internal. Dari hasil analisis dan identifikasi tersebut diketahui peluang perusahaan lebih besar dari pada ancaman dan kekuatan lebih besar dari kelemahan, sehingga perusahaan memposisikan diri pada Expansion (strategi ofensif) dengan beberapa pembenahan internal perusahaan yang terus dilakukan.

Penerapan Offensive strategy yang lebih difokuskan pada 3 (tiga) tema strategi utama, apabila dikaitkan dengan peningkatan profit diyakini jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha penekanan atau pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Dengan menggunakan penilaian interval 1 – 5, gambaran keberadaan posisi perusahaan pada tahun 2018 dapat dilihat pada hasil analisa SWOT dibawah ini:

Pelindo 1 in 2018 has identified and analyzed the upcoming opportunities and challenges in the future from the external side as well as strengths and weaknesses from the internal side. From the results of the analysis and identification, it is known that the company's opportunity is greater than the threat and the strength is greater than the weakness, so the company positions itself on the Expansion (offensive strategy) with several internal improvements that the company continues to perform.

The implementation of the Offensive strategy is more focused on 3 (three) main strategy themes, when it is associated with increasing profits it is believed to be far greater than the effort to suppress or reduce the costs incurred by the company.

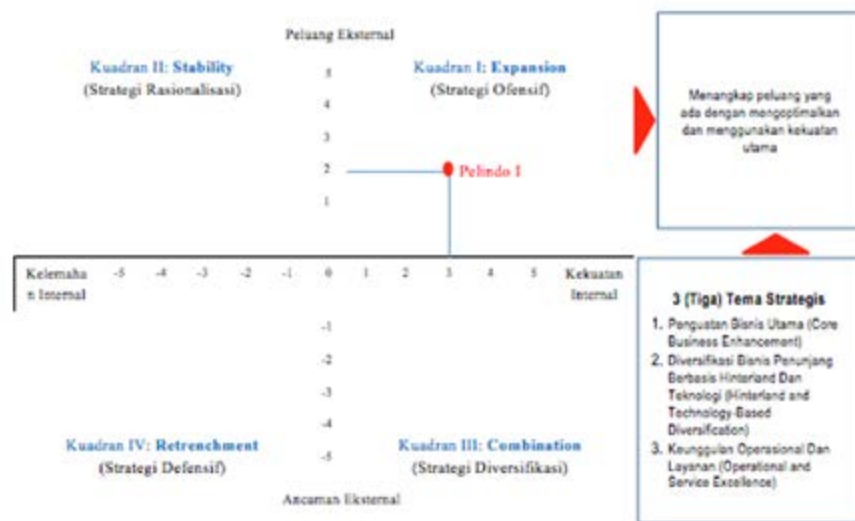
By using interval 1 - 5 assessments, the description of the existing company's position in 2018 can be seen in the results of the SWOT analysis below:

Faktor Strategis Eksternal/ External Strategic Factor			
Peluang Opportunity	Bobot Value	Skala Scale	Nilai Tertimbang Measured Value
• Makroekonomi Indonesia positif / <i>Positive Indonesian macro-economic</i>	5,0	4,0	20,0
• Peningkatan arus perdagangan global / <i>Global trading flow improvement</i>	5,0	5,0	25,0
• Sumatera sebagai emerging market / <i>Sumatera as emerging market</i>	4,0	4,0	16,0
• Perkembangan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mengintegrasikan seluruh sistem dalam rangka mempermudah pelayanan jasa pelabuhan kepada seluruh pemangku kepentingan / <i>The development of the use of technology and digitalization to integrate all systems in order to facilitate port services to all stakeholders</i>	4,0	3,0	12,0
• Peluang pengembangan bisnis adjacencies untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat ekosistem / <i>Opportunities to develop business adjacencies to increase synergy and strengthen ecosystems</i>	3,0	3,0	9,0
• Peningkatan sinergi dalam rencana pembentukan Pelindo 1nc. / <i>Synergy increase in the plan to establish Pelindo 1nc.</i>	2,0	3,0	6,0
• Intensifikasi program pemerintah di bidang maritim dan kawasan industri dan pariwisata / <i>Intensification of government programs in the field of maritime and industrial, and tourism areas</i>	2,0	3,0	6,0
Total Nilai Peluang/Total Opportunity Value	25,0	-	94,0

Ancaman	Bobot	Skala	Nilai Tertimbang
• Pemilik barang dan pelaku industri yang membuka dan melakukan operasi pelabuhan sendiri / <i>Owners of goods and industry players who open and conducting their own port operations.</i>	5,0	-5,0	-25,0
• Kompetisi dalam ekosistem pelabuhan (kompetisi dalam pelayanan kapal di Selat Malaka, kompetisi logistik, dll) / <i>Competition in the port ecosystem (competition in ship services in the Malacca Strait, logistics competitions, etc.)</i>	5,0	-4,0	-20,0
• Kebijakan atau perubahan regulasi yang memberikan ketidakpastian / <i>Policies or regulation changes that provide uncertainty.</i>	4,0	-3,0	-12,0
• Kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dapat mempengaruhi industri jasa pelabuhan / <i>Uncertain world economic conditions can affect the port service industry.</i>	4,0	-3,0	-12,0
• Tingkat kompetisi yang tinggi termasuk pemain baru menyebabkan fee yang relatif rendah / <i>High levels of competition including new players cause a relatively low fee.</i>	4,0	-4,0	-16,0
• Volatilitas nilai tukar Rupiah / <i>Rupiah exchange rate volatility.</i>	3,0	2,0	6,0
Total Nilai Ancaman/ Total Threat Value	25,0	-	-91,0
Nlai Peluang – Nilai Ancaman/ Opportunity Value – Threat Value			3,0

Faktor Strategis Internal/ Internal Strategic Factor			
Kekuatan Strength	Bobot Value	Skala Scale	Nilai Tertimbang Measured Value
• Reputasi diakui secara nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan jasa pelabuhan / <i>Reputation is recognized nationally and internationally in the field of ports business.</i>	5,0	5,0	25,0
• Keunggulan geografis Selat Malaka sebagai lalu lintas perdagangan dan lalu lintas kapal. / <i>Geographical benefit of the Malaka Strait as trading and ship traffic.</i>	4,0	4,0	16,0
• Konektivitas baik dengan transportasi darat, terhubung dengan adanya rencana tol Sumatra / <i>Good connectivity with road transportation, concerning to the Sumatera toll road plan</i>	3,0	4,0	12,0
• Kuala Tanjung sebagai hub Indonesia Barat / <i>Kuala Tanjung as West Indonesian hub</i>	3,0	4,0	12,0
• Hinterland industri agribisnis dan pertambangan / <i>Agribusiness and mining Hinterland industries</i>	3,0	4,0	12,0
• Memiliki aset yang dapat diutilisasi sebagai sumber pendapatan dan dapat dileverage untuk pengembangan usaha / <i>Having asset that utilized as income source and may be used as leverage for business development</i>	3,0	3,0	9,0
• Budaya kerja yang customer –driven dan mendorong inovasi solusi / <i>Customer–driven culture work and solution innovation encouragement</i>	2,0	3,0	6,0
• Hubungan baik dengan pemerintah dan regulator / <i>Good relationship with government and regulator</i>	2,0	3,0	6,0
Total Nilai Kekuatan/ Total Strength Value	25,0	-	98,0

Kelemahan Weakness	Bobot Value	Skala Scale	Nilai Tertimbang Measured Value
• Belum optimalnya penggunaan ICT dan digitalisasi / The usage of ICT and digitalization has not been optimized	5,0	-5,0	-25,0
• Portofolio bisnis yang belum terdiversifikasi / Business portfolio which not have not been diversified	5,0	-4,0	-20,0
• Belum optimalnya sinergi antar cabang / Branches synergy has not been optimized	4,0	-3,0	-12,0
• Kompetensi SDM masih terbatas pada tradisional core-port competencies (perlu peningkatan pada inovasi dan kewirausahaan) / HR competence is still limited on traditional core-port competencies (improvement is needed on innovation and entrepreneurship)	4,0	-4,0	-16,0
• Customer relationship management yang masih dapat ditingkatkan untuk memperkuat loyalitas pelanggan / Customer relationship management which still need to be improved in order to strengthening customer's loyalty	2,0	-4,0	-8,0
• Utilisasi aset yang masih bisa ditingkatkan / Asset utilization still needs to be improved	3,0	-3,0	-9,0
• Kesulitan pendanaan untuk pengembangan usaha / Funding difficulties for business development.	2,0	-3,0	-6,0
Total Nilai Kelemahan/ Total Weakness Value	25,0	-	-96,0
Nlai Peluang – Nilai Ancaman/ Strength Value – Weakness Value			2,0



PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

COMPLIANCE TOWARDS RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

Setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan maupun regulator antara lain:

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

PERATURAN PRESIDEN

1. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 146 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 22 Tahun 2018 tentang komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan barang laut.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Import Pasal 22.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada

Every transaction conducted is in accordance with the regulations and provisions set by the company and the regulator including:

REGULATIONS

1. Regulation No. 40 Year 2007 regarding Limited Company.
2. Regulation No. 13 Year 2003 regarding Employment.
3. Regulation No. 19 Year 2003 regarding State-Owned Enterprises.
4. Regulation No. 17 Year 2003 regarding State Finances.
5. Regulation No. 17 Year 2008 regarding Shipping.

GOVERNMENT REGULATIONS

1. Government Regulation No. 64 of 1999 regarding Amendments to Government Regulation No. 24 of 1998 regarding the Company's Annual Financial Information.
2. Government Regulation No. 12 of 1998 regarding Persero.
3. Government Regulation No. 45 of 2005 regarding the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
4. Government Regulation No. 64 of 2015 regarding Ports.

PRESIDENTIAL REGULATIONS

1. Presidential Regulation No. 80 of 2003 regarding Guidelines for the Implementation of Government Goods/ Services Procurement.
2. Presidential Regulation No. 81 of 2018 regarding the Acceleration of the Construction and Operation of the Kuala Tanjung Port and Industrial Zone in North Sumatra Province.

REGULATIONS AND DECREE OF MINISTER

1. Minister of Transportation Regulation No. PM 146 of 2016 regarding the Implementation of Sea Ports.
2. Minister of Transportation Regulation No. PM 53 Year 2018 regarding Container Fitness and Verified Container Gross Weight.
3. Minister of Transportation Regulation No. PM 121 of 2018 regarding Types, Structures, Groups, and Port Tariff Determination Mechanisms.
4. Minister of Transportation Regulation No. PM 22 of 2018 regarding the components of income and calculated costs in the subsidy activities for the implementation of sea freight transportation.
5. Minister of Finance Regulation No. 110 of 2018 Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 34 of 2017 regarding Collection of Import Income Tax PPH Article 22.
6. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 regarding

Badan Usaha Milik Negara

7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-101/MBU/ 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.
9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-10/MBU/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX.428/PP 304 tentang Penetapan Perusahaan sebagai Pelaksana Pandu Luar Biasa Untuk Kapal Asing Dan Domestik di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

7. Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2002 regarding Preparation of State-Owned Enterprises' Work Plans and Corporate Budgets.
8. Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-102/M-BUMN/2002 regarding Preparation of State-Owned Enterprises Long-Term Plans.
9. Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-10/MBU/2014 regarding Assessment of Health Level of State-Owned Enterprises
10. Decree of the Director General of Sea Transportation No. BX.428 / PP 304 regarding the Determination of the Company as an Extraordinary Guide for Foreign and Domestic Ships in the Malacca Strait and Singapore Strait.

PERNYATAAN ATAS PENGECUALIAN PENGUNGKAPAN LAPORAN

STATEMENT OF THE EXCLUSION OF REPORT DISCLOSURE

Sehubungan dengan keberadaan Pelindo 1 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah (100%) dan tidak menjual sahamnya kepada pasar modal, dengan ini menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki dan melaksanakan beberapa hal, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Tahunan 2018 sebagai berikut:

1. Kronologis Pencatatan Saham.
2. Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP).
3. Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi utang/Modal.

In connection with the existence of Pelindo 1 as a company that engaged in port services where all of its shares are owned by the Government (100%) and does not sell their shares to the capital market, this states that the company does not own and implement a several subjects, therefore it is not presented in the 2018 Annual Report as follows:

1. Listing of Shares Chronology
2. Employee and Management Share Ownership (ESOP/MSOP).
3. Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring.

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORTING FUNCTIONS

Pelindo 1 juga memandang SDM sebagai partner usaha yang strategis dalam menjalankan bisnis Perusahaan.

Pelindo 1 also consider HR as a strategic business partner in carrying out the Company's business.



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Sumber Daya Manusia yang profesional, handal dan cakap dalam menyelesaikan tugas serta mampu menghadapi segala tantangan bisnis di industri merupakan aset berharga bagi Pelindo 1.

Perusahaan memandang Sumber daya manusia (SDM) Pelindo 1 merupakan salah satu pemangku kepentingan dengan kedudukan sentral sebagai ujung tombak dan penentu keberhasilan Perusahaan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya.

Pelindo 1 juga memandang SDM sebagai partner usaha yang strategis dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuannya.

Dengan memahami kedua kepentingan tersebut, Pelindo 1 mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi seluruh harapan karyawan.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM

Penyusunan Roadmap SDM 2014-2018 ini mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018, dimana fokus pengembangan Perseroan diarahkan kepada 4 (empat) bisnis utama, yaitu pengembangan terminal, bisnis marine, bisnis logistik, dan bisnis pendukung lainnya.

Professional, reliable and capable human resources in completing tasks and being able to face all business challenges in the industry are valuable assets for Pelindo 1.

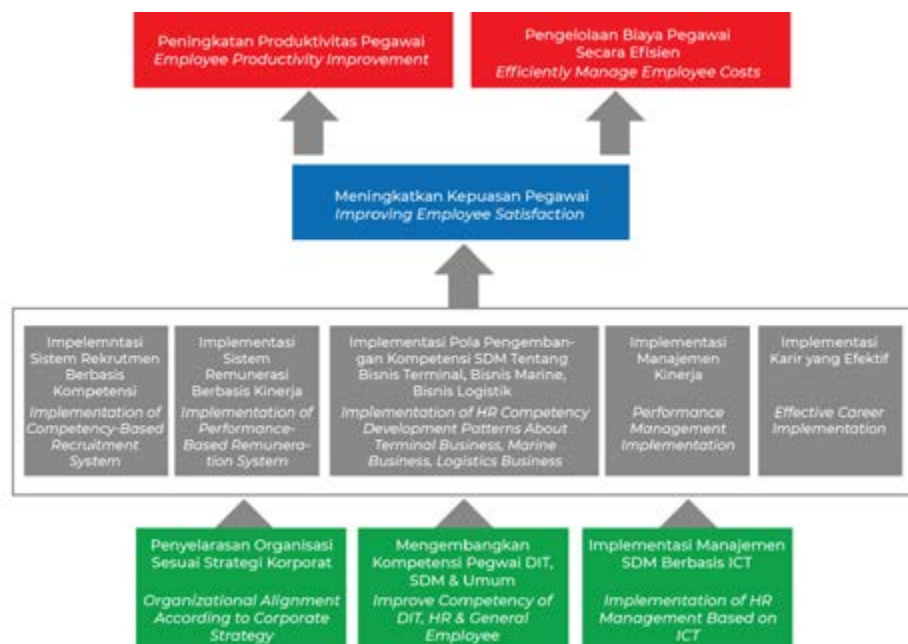
The company considers Pelindo 1's Human Resources (HR) as one of the stakeholders with a central position as the spearhead and determinant of the Company's success in realizing its vision and carrying out its mission.

Pelindo 1 also consider HR as a strategic business partner in carrying out the Company's business. The presence of employees who are professional, competent, dedicated and integrity will make the Company have a strong foundation to keep growing and improving to achieve its goals.

By understanding these two interests, Pelindo 1 manages HR with a focus on improving competencies while at the same time striving to fulfill all employees expectations.

ROADMAP OF HR DEVELOPMENT

The preparation of the 2014-2018 HR Roadmap refers to the 2014-2018 Company's Long Term Plan (RJPP), where the focus of the Company's development is directed to 4 (four) main businesses, namely terminal development, marine business, logistics business, and other supporting businesses.



Dengan adanya Roadmap Pengelolaan SDM 2014-2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan Bersama bagi penyiapan SDM yang handal dan profesional, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM dapat dilakukan secara sinergi dan in line dengan rencana jangka panjang Perusahaan.

PERENCANAAN SDM

Fokus rencana pengembangan SDM tahun 2018 masih berlanjut dengan dari Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Rekrutmen;
2. Pengembangan Sistem Remunerasi;
3. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja;
4. Pengembangan Sistem Manajemen Karir;
5. Pengembangan Sistem Pengembangan Kompetensi;
6. Pengembangan Manajemen SDM berbasis ICT;
7. Pengembangan product knowledge proses bisnis utama perusahaan.

PENGELOLAAN SDM

Sejalan perkembangan organisasi Pelindo 1, maka tantangan dalam pengelolaan SDM juga semakin besar. Dengan menganut paham SDM yang kompeten merupakan cermin dari perusahaan yang hebat maka pengelolaan SDM yang tepat merupakan salah satu kunci penting dari strategi bisnis Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka mendukung strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek terkait manajemen SDM diantaranya mengenai strategi pengelolaan SDM, evaluasi jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan pelatihan karyawan, kompensasi, pengelolaan talent, sistem manajemen kinerja karyawan serta aturan mengenai pemberhentian karyawan.

It is hoped that the 2014-2018 HR Management Roadmap can become a guide and reference for preparing reliable and professional HR, so that the planning and implementation of HR development programs can be carried out in synergy and in line with the Company's long-term plans.

HR PLANNING

HR Improvement planning focus of 2018 still continues since 2017, namely:

1. Development of Recruitment System;
2. Development of Remuneration System;
3. Development of Performance Management System;
4. Development of Career Management System;
5. Development of Competency Development System;
6. Development of HR Management based on ICT;
7. Development of product knowledge of company's main business process.

HR MANAGEMENT

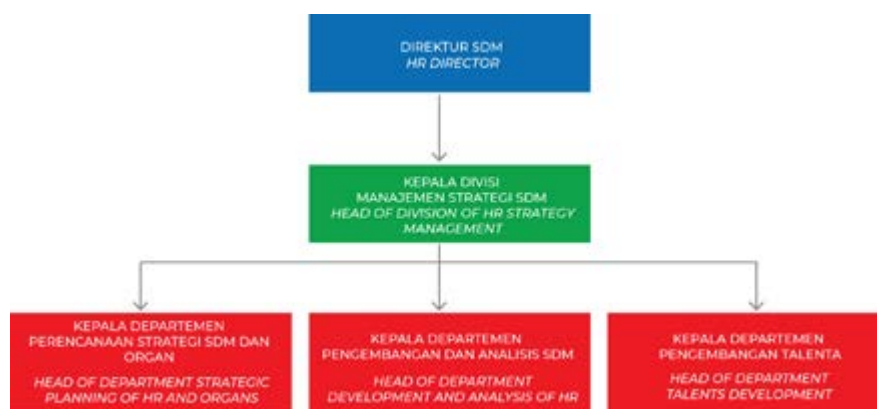
In line with the development of the Pelindo 1 organization, the challenges in managing HR are also increasing. By adhering to the understanding of competent HR is a mirror of a great company, the proper HR management is one of the important keys of the Company's business strategy.

The company has stipulate HR management policy in order to support the HR management strategy. The policy regulates various aspects related to HR management including strategies for HR management, job evaluation, manpower planning, recruitment and selection, employee development and training, compensation, talent management, employee performance management systems and rules regarding employee termination.

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Pengelolaan SDM berada dibawah Direktorat SDM dengan struktur organisasi sebagai berikut:

HR Management under supervision of HR Directorate with organization structure as follows:



Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 1.401 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Company total employee per December 31, 2018 is 1.401 persons with details below:

No	Cabang/Unit Branch/Unit	Jumlah Total
1.	Kantor Pusat/ Head Office	458
2.	Cabang Dumai/ Dumai Branch	173
3.	Cabang Belawan/ Belawan Branch	192
4.	Cabang Tanjung Pinang/ Tanjung Pinang Branch	40
5.	Cabang Tembilahan/ Tembilahan Branch	7
6.	Cabang Batam/ Batam Branch	32
7.	Cabang Malahayati/ Malahayati Branch	19
8.	Cabang Sei Pakning/ Sungai Pakning Branch	26
9.	Cabang Gunung Sitoli/ Gunung Sitoli Branch	7
10.	Cabang Kuala Tanjung/ Kuala Tanjung Branch	13
11.	Cabang Sibolga/ Sibolga Branch	12
12.	Cabang Tanjung Balai Karimun/ Tanjung Balai Karimun Branch	22
13.	Cabang Tanjung Balai Asahan/ Tanjung Balai Asahan Branch	7
14.	Cabang Lhokseumawe/ Lhokseumawe Branch	22
15.	Cabang Pekanbaru/ Pekanbaru Branch	65
16.	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Belawan Domestic Container Terminal	120
17.	Belawan International Container Terminal Belawan International Container Terminal	175
18.	Unit Galangan Kapal/ Shipyard Unit	11
	Total	1401

KOMPOSISI SDM**1. Berdasarkan Jenis Kelamin**

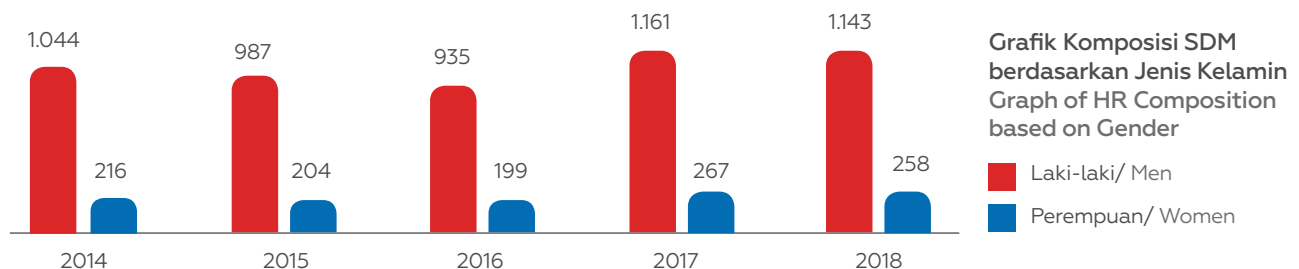
Rata-rata komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebesar 82% dan perempuan sebesar 18%, sedangkan rata-rata pertumbuhan perempuan selama 5 tahun terakhir sebesar 1,09% lebih sebanding dengan rata-rata pertumbuhan laki-laki sebesar 1,05%.

HR Composition**1. Based on Gender**

The average employee composition based on gender is dominated by male by 82% and female 18%, while female average growth during the last 5 years is 1.09%, higher than the male average growth amount to 1.05%.

No	Jenis Kelamin Gender	Tahun/ Year					Rata-rata Komposisi (%) Average composition (%)	% Rata-Rata Pertumbuhan Average growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	Laki-Laki/ Male	1.044	987	935	1.161	1.143	82	1,05
2	Perempuan/ Female	216	204	199	267	258	18	1,09
	Jumlah/ Total	1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Chart of HR Composition Base on Gender

**2. Berdasarkan Pendidikan**

Rata-rata komposisi karyawan berdasarkan pendidikan untuk S-1 dan S-2 sebesar 44%, lebih rendah dari Diploma dan SLTA sebesar 56%, sedangkan rata-rata pertumbuhan S-1 dan S-2 selama 5 tahun terakhir sebesar 2,03% lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Diploma dan SLTA sebesar 2,21%.

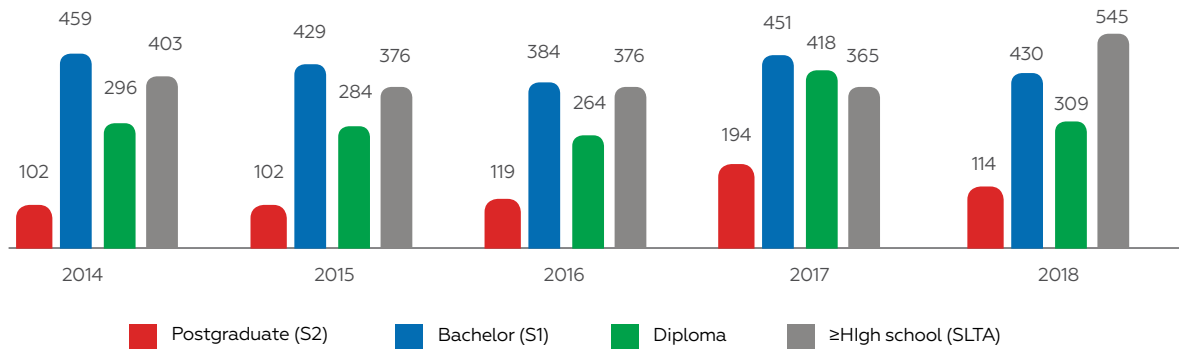
2. Based on Education

The average employee composition based on education for S-1 (Bachelor) and S-2 (Postgraduate) is 44%, lower than average growth of Diploma and High School as much as 56%, meanwhile average growth S-1 and s-2 for the last 5 year as 2.21%.

No	Tingkat Pendidikan Level Education	Tahun/ Year					Rata-rata Komposisi (%) Average composition (%)	% Rata-Rata Pertumbuhan Average growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	Postgraduate (S2)	102	102	110	194	114	10	1,06
2	Bachelor (S1)	459	429	384	451	430	34	0,97
3	Diploma	296	284	264	418	309	24	1,02
4	High school (SLTA)	403	376	376	365	545	32	1,19
	Jumlah/ Total	1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan
Chart of HR Composition based of Education



3. Berdasarkan Usia

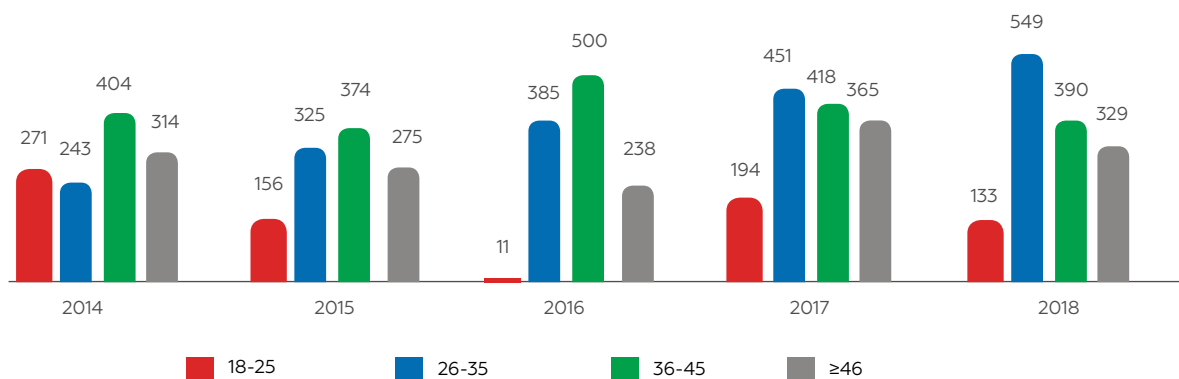
Rata-rata komposisi karyawan berdasarkan usia 18-35 tahun sebesar 42%, lebih rendah dari usia 36 tahun keatas sebesar 56%, sedangkan rata-rata pertumbuhan usia 18-35 tahun sebesar 2,20%, lebih tinggi dari usia 36 tahun keatas sebesar 1,96%.

3. Based on Age

The average composition of employee based on age 18-35 years is 42%, lower than the age of 36 years and over by 56%, while the average growth age of 18-35 years is 2.20%, higher than the age of 36 years and over by 1.96%.

No	Usia Age	Tahun/ Year					Rata-rata Komposisi (%) Average composition (%)	% Rata-Rata Pertumbuhan Average growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	18-25	271	156	11	194	133	12	0,70
2	26-35	243	325	385	451	549	30	1,50
3	36-45	404	374	500	418	390	33	0,98
4	≥46	314	275	238	365	329	23	0,98
	Jumlah/ Total	1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Usia
Chart of HR Composition Based on Age



4. Berdasarkan Kelas Jabatan

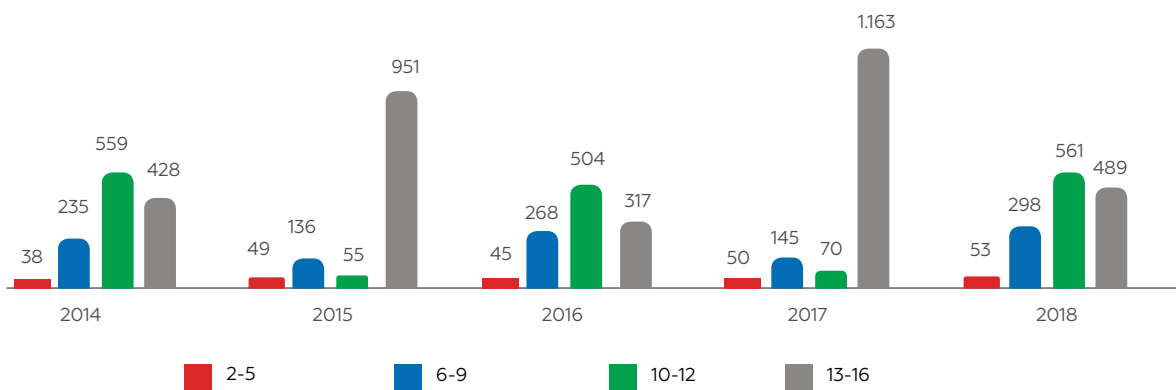
Rata-rata komposisi berdasarkan kelas jabatan yang dikaitkan dengan rentang kendali (Spend of Control) menunjukkan komposisi yang baik dimana kelas jabatan 2-5 membawahkan rata-rata 4 orang karyawan, kelas jabatan 6-9 membawahkan rata-rata 1,5 orang karyawan, dan kelas jabatan 10-12 membawahkan rata-rata 2 orang karyawan. Rata-rata pertumbuhan jabatan 2-9 selama 5 tahun terakhir sebesar 2,31% lebih tinggi dari pertumbuhan jabatan 10-16 sebesar 2,12%.

4. Based on Position Level

The average composition based on the position level that is associated with the Spend of Control shows a good composition where the positions level 2-5 in charge of an average of 4 employees, the position level 6-9 in charge of an average of 1.5 employees, and positions level 10-12 in charge of an average of 2 employees. The average position growth of 2-9 over the past 5 years was 2.31% higher than the growth of positions 10-16 of 2.12%.

No	Kelas Jabatan Position Level	Tahun					Rata-rata Komposisi (%) Average composition (%)	% Rata-Rata Pertumbuhan Average growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	2-5	38	49	45	50	53	4	1,18
2	6-9	235	136	268	145	298	17	1,13
3	10-12	559	55	504	70	561	27	1,00
4	13-16	428	951	317	1.163	489	52	1,07
	Jumlah/ Total	1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Kelas Jabatan
Chart of HR Composition Based on Position Level



5. Berdasarkan Masa Kerja

Rata-rata komposisi karyawan berdasarkan masa kerja 1 s.d 15 tahun sebesar 61%, lebih tinggi dari masa kerja 16 s.d 20 keatas sebesar 39%, sedangkan rata-rata pertumbuhan masa kerja 1 s.d 15 selama 5 tahun terakhir sebesar 4,01% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 16 s.d 20 tahun keatas sebesar 2,20%.

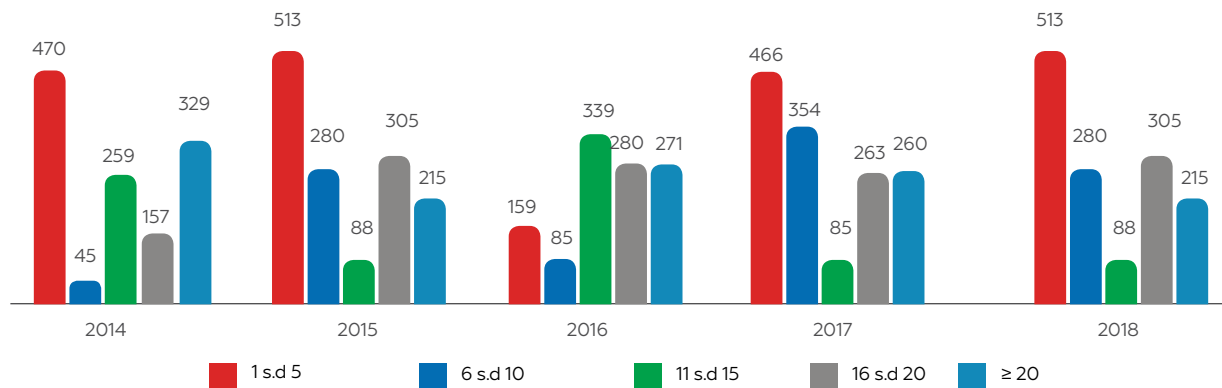
5. Based on work periods

The average employee composition based on 1 to 15 years work periods is 61%, higher than the 16 to 20 years above of work periods as 39%, while the average work periods of 1 to 15 over the past 5 years is 4.01% higher than the average growth of 16 to 20 years above at 2.20%.

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

No	Masa Kerja Work Periods	Tahun					Rata-rata Komposisi (%) Average composition (%)	% Rata-Rata Pertumbuhan Average growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	1 s.d 5	470	375	159	466	513	31	1,04
2	6 s.d 10	45	136	85	354	280	14	2,49
3	11 s.d 15	259	237	339	85	88	16	0,58
4	16 s.d 20	157	170	280	263	305	18	1,39
5	≥ 20	329	273	271	260	215	21	0,81
	Jumlah/ Total	1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Kelas Jabatan
Chart of HR Composition Based on Position Level



PELATIHAN PEGAWAI TAHUN 2018

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Perusahaan berlaku dan berhak diikuti oleh seluruh karyawan dari berbagai level jabatan. Pelaksanaannya dilakukan secara mandiri maupun melibatkan pihak ketiga. Di tahun 2018, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan telah diikuti oleh para pegawai dari Manajerial sampai level Staf. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara aktif dan berkesinambungan demi menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkualitas dan berkinerja tinggi.

Di tahun 2018, Perusahaan menyerap anggaran sebesar Rp8.368.075.369 sebagai dana program pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan.

Secara lebih terperinci, daftar pelatihan yang telah diadakan dan diikuti di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE TRAINING OF 2018

The human resources education and training program in the Company applies and has the right to be attended by all employees from various levels of position. The implementation is carried out independently or involving third parties. In 2018, the training held was attended by employees from Managerial to Staff level. Employee competency development is carried out actively and continuously in order to create competent, high-quality and high-performance human resources.

In 2018, the Company absorbed a budget of Rp 8,368,075,369 as funding for employee education, training and development programs.

In detail, the list of trainings that have been held and followed throughout 2018 is as follows:

1. Realisasi Diklat Berdasarkan Per Unit

1. Realization of Training Based on Unit

No	Unit Organisasi Organization Unit	Jumlah Pegawai Number of Employees	Sudah Diklat Trained	Belum Diklat Untrained	%
1.	Kantor Pusat/ Head Office	412	386	26	94
2.	Cabang Belawan/ Belawan Branch	193	95	98	49
3.	Cabang Dumai/ Dumai Branch	176	84	92	48
4.	BICT/ Belawan International Container Terminal	175	140	35	80
5.	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Belawan Domestic Container Terminal	120	96	24	80
6.	Cabang Pekanbaru/ Pekanbaru Branch	65	40	25	62
7.	Anak perusahaan/ Subsidiaries	50	24	26	48
8.	Cabang Tanjung Pinang/ Tanjung Pinang Branch	40	23	17	58
9.	Cabang Batam/ Batam Branch	31	16	15	52
10.	Cabang Sungai Pakning/ Sungai Pakning Branch	26	9	17	35
11.	Cabang Lhokseumawe/ Lhokseumawe	22	12	10	55
12.	Cabang Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch	22	18	4	82
13.	Cabang Malayahati/ Malahayati Branch	19	13	6	68
14.	Cabang Kuala Tanjung/ Kuala Tanjung Branch	13	8	5	62
15.	Cabang Sibolga/ Sibolga Branch	12	11	1	92
16.	Galangan Kapal Belawan/ Belawan Shipyard	11	6	5	55
17.	Cabang Gunung Sitoli/ Gunung Sitoli Branch	7	5	2	71
18.	Cabang Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Branch	7	7	0	100
19.	Cabang Tembilahan/ Tembilahan Branch	7	5	2	71
	Jumlah/ Total	1408	998	410	66

2. Realisasi Diklat Berdasarkan Kategori Diklat Per Unit Organisasi

2. Realization of Training Based on Training Category Per Organization Unit

No	Unit Organisasi Organization Unit	Moment Diklat Training Moment	Durasi Diklat Training Duration	Kategori Diklat				
				Teknikal Technical	Inti Core	Wawasan Concept	Manajerial Managerial	Purnabakti Retirement
1	Kantor Pusat/ Head Office	1421	7847	863	305	168	79	6
2	Cabang Belawan/ Belawan Branch	222	673	131	44	42	4	1
3	Cabang Dumai/ Dumai Branch	192	731	124	36	29	2	1
4	BICT/ Belawan International Container Terminal	214	452	74	119	18	1	2

No	Unit Organisasi Organization Unit	Moment Diklat Training Moment	Durasi Diklat Training Duration	Kategori Diklat				
				Teknikal Technical	Inti Core	Wawasan Concept	Manajerial Managerial	Purnabakti Retirement
5	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Belawan Domestic Container Terminal	188	455	89	81	11	6	1
6	Cabang Pekanbaru/ Pekanbaru Branch	93	293	50	18	19	4	2
7	Anak perusahaan/ Subsidiaries	39	351	17	4	14	3	1
8	Cabang Tanjung Pinang/ Tanjung Pinang Branch	52	169	41	6	3	2	0
9	Cabang Batam/ Batam Branch	42	141	25	4	11	1	1
10	Cabang Sungai Pakning/ Sungai Pakning Branch	33	103	21	4	5	3	0
11	Cabang Lhokseumawe/ Lhokseumawe	34	93	21	6	6	1	0
12	Cabang Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch	47	150	30	8	7	2	0
13	Cabang Malahayati/ Malahayati Branch	39	159	27	7	5	0	0
14	Cabang Kuala Tanjung/ Kuala Tanjung Branch	14	46	10	2	2	0	0
15	Cabang Sibolga/ Sibolga Branch	39	150	24	7	5	2	1
16	Galangan Kapal Belawan/ Belawan Shipyard	15	53	10	3	1	1	0
17	Cabang Gunung Sitoli/ Gunung Sitoli Branch	27	69	17	5	4	1	0
18	Cabang Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Branch	38	114	28	4	3	3	0
19	Cabang Tembilahan/ Tembilahan Branch	23	65	16	4	3	0	0
	Jumlah/ Total	1408	998	410	66			

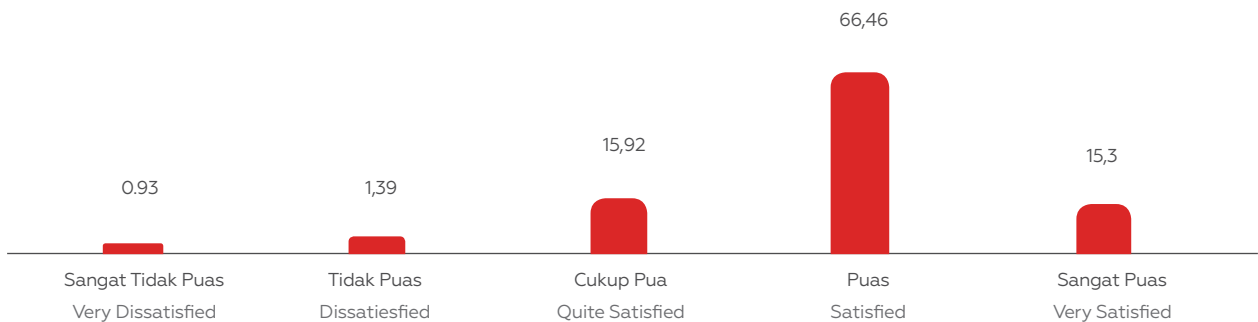
SURVEI KEPUASAN PEGAWAI

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

Pelindo 1 secara konsisten telah melaksanakan survei pegawai sejak tahun 2011 dan menunjukkan hasil yang positif, pada tahun 2018, Pelindo 1 kembali melaksanakan survei pegawai yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan kerja, efektivitas struktur organisasi, kepemimpinan dan keterikatan kerja pegawai Pelindo 1. Survei ini dirasakan sebagai hal yang penting seiring dengan banyaknya hasil penelitian dan kajian teoritis yang membuktikan bahwa kepuasan kerja, struktur organisasi, kepemimpinan dan keterikatan kerja masing-masing merupakan variabel yang berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pegawai maupun organisasi, meningkatkan komitmen pegawai dan menurunkan tingkat turnover pegawai.

KEPUASAN KERJA LEVEL KORPORAT

Berdasarkan analisa data survei kepuasan kerja secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa pegawai Pelindo 1 sudah merasa puas, dalam hal ini rata-rata skor kepuasan pegawai berada pada nilai 4 (dalam skala Likert 1 s/d 5). Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum pegawai Pelindo 1 sudah merasa puas dengan pekerjaannya, baik jika ditinjau dari dimensi rekan kerja, dimensi pekerjaan, dimensi gaji, dimensi promosi, dimensi supervisi, dimensi kepribadian maupun dimensi kondisi kerja. Adapun gambaran persentase kategorisasi kepuasan pegawai secara keseluruhan adalah sebagai berikut :



EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI LEVEL KORPORAT

Berdasarkan hasil analisa data survei efektivitas struktur organisasi secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa pegawai Pelindo 1 mempersepsikan struktur organisasi yang digunakan perusahaan cukup efektif. Dalam hal ini rata-rata skor efektivitas struktur organisasi berada pada nilai 3 (dalam skala Likert 1 s/d 5). Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi yang digunakan saat ini dinilai cukup efektif, baik dari komponen kompleksitas (diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, diferensiasi spasial) maupun komponen formalisasi dan sentralisasinya.

Pelindo 1 has consistently carried out employee surveys since 2011 and showed positive results, in 2018, Pelindo 1 carried out again employee surveys aimed at identifying job satisfaction, effectiveness of the organizational structure, leadership and Pelindo 1 employees work engagement. This survey is perceived as an important thing along with the many results of research and theoretical studies that prove that job satisfaction, organizational structure, leadership and work engagement are each variable that contributes to increasing organizational effectiveness, employee and organizational performance, increasing employees' commitment and reducing employee turnover.

CORPORATE LEVEL JOB SATISFACTION

Based on the analysis of the job satisfaction survey data in a whole, it was found that Pelindo 1 employees were satisfied, in this case the average employee satisfaction scale was at a level 4 (on a 1 to 5 Likert scale). These results indicate that in general Pelindo 1 employees are satisfied with their work, both in terms of the dimensions of their colleagues, work dimensions, salary dimensions, promotion dimensions, supervision dimensions, personality dimensions and work conditions dimensions. The description of the percentage of categorization of employee satisfaction as a whole is as follows:

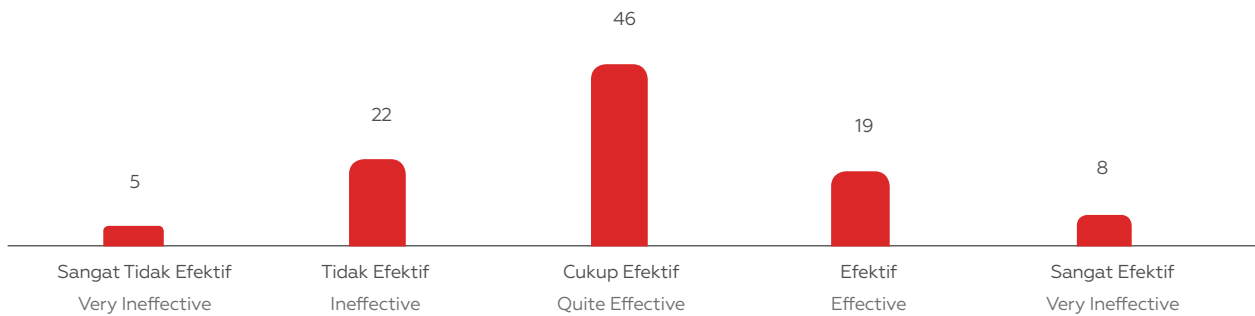
EFFECTIVENESS OF CORPORATE LEVEL ORGANIZATIONAL STRUCTURES

Based on the results of the analysis of the survey data on the effectiveness of the whole organizational structure, it was found that Pelindo 1 employees perceived the organizational structure used by the company to be quite effective. In this case the average scale of the effectiveness of the organizational structure is at value 3 (on a Likert scale 1 to 5). These results indicate that the organizational structure which used today is considered to be quite effective, both from the components of complexity (horizontal differentiation, vertical differentiation, spatial differentiation) and the components of formalization and centralization.

SURVEI KEPUASAN PEGAWAI EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

Adapun gambaran persentase kategorisasi efektivitas struktur organisasi adalah sebagai berikut :

The description of the percentage categorization of the effectiveness of the organizational structure is as follows:

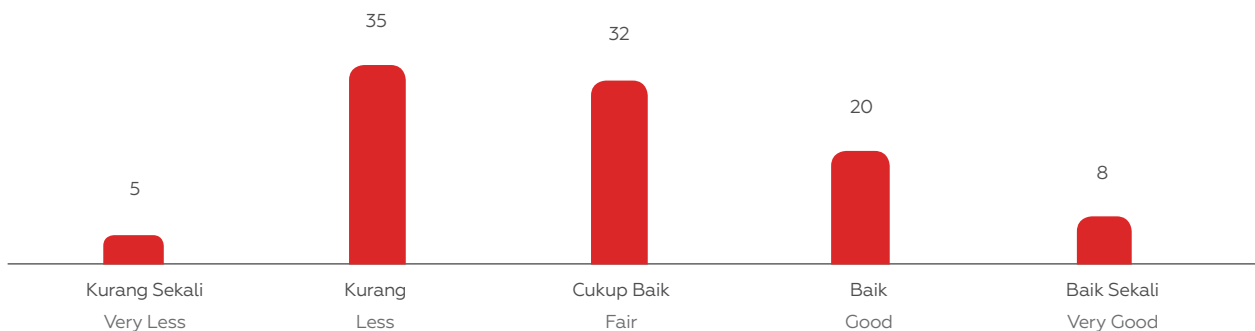


KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisa data survei kepemimpinan organisasi di level korporat, diperoleh hasil bahwa kepemimpinan organisasi di Pelindo 1, tergolong baik, dalam hal ini rata-rata skor kepemimpinan organisasi berada pada nilai 4 (dalam skala Likert 1 s/d 5). Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum pemimpin di Pelindo 1, termasuk pegawai dan Direksi telah menampilkan ciri perilaku kepemimpinan yang baik, yaitu pemimpin yang menghargai orang lain, mengembangkan orang lain, membangun rasa kebersamaan, menampilkan perilaku yang otentik, menyediakan diri sebagai pemimpin dan membagi kepemimpinan dengan orang lain. Adapun gambaran persentase kategorisasi kepemimpinan organisasi di level korporat adalah sebagai berikut :

ORGANIZATIONAL LEADERSHIP

In according to the results of analysis of organizational leadership survey data at the corporate level, the results show that organizational leadership in Pelindo 1 is classified as good, in this case the average organizational leadership scale is at a level of 4 (on a 1 to 5 Likert scale). These results indicate that in general the leaders in Pelindo 1, including employees and Directors, have performed good leadership behaviors, namely leaders who respect for others, develop others, build a sense of togetherness, perform authentic behavior, provide themselves as leaders and share leadership with other people. The description of the percentage of organizational leadership categorization at the corporate level is as follows:



KETERIKATAN PEGAWAI

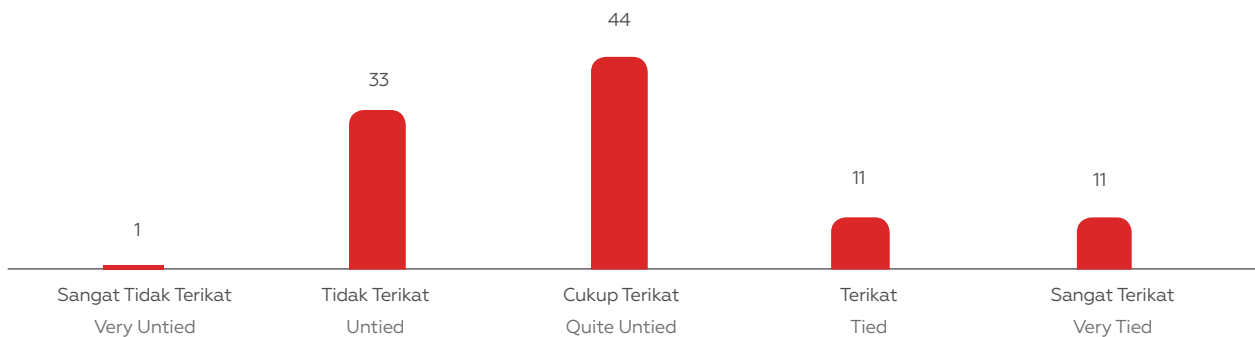
Berdasarkan hasil analisa data survei keterikatan kerja secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa pegawai Pelindo 1 sudah merasa terikat dengan pekerjaannya, dalam hal ini rata-rata skor keterikatan pegawai berada pada nilai 4 (dalam skala Likert 1 s/d 5). Hasil ini mengindikasikan bahwa pegawai Pelindo 1 sudah merasa terikat dengan pekerjaannya, baik jika ditinjau dari dimensi vigor (yang dikarakteristikan dengan tingginya tingkat energi dan ketahanan mental saat bekerja, keinginan untuk memberikan usaha yang lebih pada pekerjaannya dan

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Based on the results of the analysis of work engagement survey data in a whole, it obtained results that Pelindo 1 employees already felt tied to their work, in this case the average employee attachment scale was at a value of 4 (on a 1 to 5 Likert scale). These results indicate that Pelindo 1 employees already feel tied to their work, reviewed in terms of the dimensions of vigor (characterized by high levels of energy and mental resilience at work, willing to give more work to their jobs and persevere in facing difficulties),

tetap gigih menghadapi kesulitan), dimensi dedication (yang dikarakteristikan dengan perasaan bermakna, antusiasme, bangga terhadap pekerjaannya, dan merasa terinspirasi dan tertantang karenanya), maupun dimensi absorption (yang dikarakteristikan dengan konsentrasi penuh dan merasa senang dengan pekerjaannya, sehingga merasa waktu berlalu dengan cepat dan melupakan hal lain yang ada disekitarnya). Adapun gambaran persentase kategorisasi keterikatan pegawai secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

dimensions of dedication (characterized by meaningful feelings, enthusiasm, pride in his work, and feeling inspired and challenged by it), as well as dimensions of absorption (characterized by full concentration and feeling happy with his work, so the time passes quickly and forgetting other things around him). As for the description of the percentage of categorization of employee engagement are as follows:



SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Pada tahun 2018 Perusahaan telah melakukan Survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Kelompok Kajian Unggulan Pemodelan Statistika Bidang Manajemen (KKU.PSBM) Universitas Brawijaya Malang, yang meliputi tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan dan tingkat keterikatan pelanggan yang masing-masing terdiri atas hasil Survei kepuasan untuk 5 kantor cabang dan Survei pelayanan untuk 5 bidang usaha yang menggunakan interval penilaian 1-5, dengan hasil sebagai berikut:

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN

Hasil Survei tingkat kepuasan pelanggan Pelindo 1 tahun 2018 sebesar 78,10% dari skala 5 dengan nilai 3,91, dengan tingkat kepuasan tertinggi terdapat di cabang BICT yaitu sebesar 81.80% atau dengan nilai 4,09 dan terendah terdapat di cabang Tanjung Pinang yaitu sebesar 73.72% atau dengan nilai 3,69.

Berdasarkan Survei tingkat pelayanan Pelindo 1 tahun 2018, kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan penumpang yaitu 84.40% atau dengan nilai 4,22 dan kepuasan terendah terdapat pada pelayanan barang yaitu 75.20% atau dengan nilai 3,76.

In 2018 the Company has conducted a Customer satisfaction survey conducted by the Superior Study Group on Management of Statistical Modeling (KKU.PSBM) University of Brawijaya Malang, which includes the level of customer satisfaction, customer loyalty and customer engagement, each of which consists of the results of the satisfaction survey for 5 branch offices and Service surveys for 5 business fields using 1-5 assessment intervals, with the following results:

CUSTOMER SATISFACTION LEVEL

The results of Pelindo 1 customer satisfaction levels survey in 2018 amounted to 78.10% of scale 5 with a scale of 3.91, with the highest level of satisfaction found in the BICT branch that is equal to 81.80% or with a scale of 4.09 and the lowest is in the Tanjung Pinang branch which is 73.72% or with a scale of 3.69.

According to the survey of Pelindo 1 service levels in 2018, the highest satisfaction is found in passenger services, namely 84.40% or with a scale of 4.22 and the lowest satisfaction is in cargo services, namely 75.20% or a scale of 3.76.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Cabang Branch	Petikemas Container		Penumpang Passenger		Kapal Ship		Bongkar Muat Loading Unloading		Barang Goods		Total Kepuasan Total Satisfaction	
	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale
Belawan	78.80	3.94	86.60	4.33	74.00	3.70	76.60	3.83	67.60	3.38	76.72	3.84
TPKDB	79.40	3.97	-	-	-	-	-	-	-	-	79.40	3.97
BICT	81.80	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	81.80	4.09
PKU	86.40	4.32	-	-	74.00	3.70	74.00	3.70	85.80	4.29	80.05	4.00
Dumai	85.00	4.25	87.20	4.36	77.20	3.86	76.60	3.83	77.00	3.85	80.60	4.03
TP	65.20	3.26	79.40	3.97	76.80	3.84	76.80	3.84	70.40	3.52	73.72	3.69
Total Pelayanan Total Services	79.43	3.97	84.40	4.22	75.50	3.78	76.00	3.80	75.20	3.76	78.10	3.91

TINGKAT LOYALITAS PELANGGAN

Berdasarkan Survei tingkat loyalitas pelanggan Pelindo 1 tahun 2018 sebesar 81.82% dari skala 5 dengan nilai 4.09, dengan tingkat loyalitas tertinggi terdapat di Cabang Dumai yaitu 83,00% atau dengan nilai 4,15 dan terendah terdapat di Cabang TPKDB yaitu sebesar 78,40% atau dengan nilai 3,92.

Berdasarkan Survei tingkat pelayanan Pelindo 1 tahun 2018, pelayanan tertinggi terdapat pada pelayanan penumpang yaitu 87,46% atau dengan nilai 4,37 dan pelayanan terendah terdapat pada pelayanan kapal yaitu 76,75% atau dengan nilai 3,84

CUSTOMER LOYALTY LEVEL

Based on the survey of customer loyalty levels of Pelindo 1 in 2018 amounting to 81.82% of scale 5 with a scale of 4.09, with the highest loyalty level found in Dumai Branch which is 83.00% or with a scale of 4.15 and the lowest is in the TPKDB Branch which is 78.40 % or with a scale of 3.92.

According to the Pelindo 1 service level survey in 2018, the highest service is found in passenger service, which is 87.46% or with a scale of 4.37 and the lowest service is in the ship services which is 76.75% or with a scale of 3.84

Cabang Branch	Petikemas Container		Penumpang Passenger		Kapal Ship		Bongkar Muat Loading Unloading		Barang Goods		Total Kepuasan Total Satisfaction	
	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale
Belawan	79.80	3.99	91.80	4.59	76.40	3.82	76.00	3.8	83.20	4.16	81.44	4.07
TPKDB	78.40	3.92	-	-	-	-	-	-	-	-	78.40	3.92
BICT	80.60	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	80.60	4.03
PKU	88.20	4.41	-	-	73.60	3.68	74.60	3.73	88.80	4.44	81.30	4.07
Dumai	85.60	4.28	87.20	4.36	78.20	3.91	82.20	4.11	81.80	4.09	83.00	4.15
TP	70.60	3.53	83.40	4.17	78.80	3.94	81.80	4.09	89.00	4.45	80.72	4.04
Total Pelayanan Total Services	80.54	4.03	87.46	4.37	76.75	3.84	78.65	3.93	85.70	4.29	81.82	4.09



KETERIKATAN PELANGGAN

Berdasarkan tingkat engagement pelanggan Pelindo 1 tahun 2018 sebesar 79,14% atau dalam skala 5 dengan nilai 3,96, dengan tingkat engagement tertinggi terdapat pada Cabang BICT yaitu 81,40% atau dengan nilai 4,07 dan terendah terdapat pada cabang Tanjung Pinang yaitu sebesar 77,80% atau dengan nilai 3,89.

Berdasarkan Survei tingkat pelayanan Pelindo 1 tahun 2018, pelayanan tertinggi terdapat pada pelayanan penumpang yaitu 86,14% atau dengan nilai 4,31 dan pelayanan terendah terdapat pada pelayanan kapal yaitu 74,60% atau dengan nilai 3,73.

CUSTOMER ENGAGEMENT

In accordance to the Pelindo 1 customer engagement level in 2018 is 79.14% or on a scale of 5 with a scale of 3.96, with the highest level of engagement found in BICT Branches which is 81.40% or 4.07 and the lowest is in the Tanjung Pinang branch that is equal to 77.80% or scale of 3.89.

Based on the Survey of Pelindo 1 service levels in 2018, the highest service is found in passenger services, which is 86.14% or with a value of 4.31 and the lowest service is found in ship services, namely 74.60% or 3.73.

Cabang Branch	Petikemas Container		Penumpang Passenger		Kapal Ship		Bongkar Muat Loading Unloading		Barang Goods		Total Kepuasan Total Satisfaction	
	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale	%	Skala Scale
Belawan	79.00	3.95	89.00	4.45	73.60	3.68	77.60	3.88	71.40	3.57	78.12	3.91
TPKDB	79.80	3.99									79.80	3.99
BICT	81.40	4.07									81.40	4.07
PKU	87.00	4.35			72.80	3.64	66.60	3.33	85.60	4.28	78.00	3.90
Dumai	85.80	4.29	89.60	4.48	74.60	3.73	78.60	3.93	78.00	3.9	81.32	4.07
TP	75.20	3.76	79.80	3.99	77.40	3.87	78.20	3.91	78.40	3.92	77.80	3.89
Total Pelayanan Total Services	81.37	4.07	86.14	4.31	74.60	3.73	75.25	3.76	78.35	3.92	79.14	3.96

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Kelengkapan layanan Teknologi Informasi yang mendukung proses otomatisasi seluruh lini bisnis proses PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan menjadi keharusan untuk menjadi Perusahaan Pelabuhan Terbesar di Indonesia. Oleh karena itu pengembangan layanan Teknologi Informasi dan infrastrukturnya, harus efektif, efisien dan optimal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Keputusan Direksi Nomor: KP.31/30/11/PI-18.TU tentang Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Information Technology Governance tanggal 11 Juli 2018, membuat perusahaan berkomitmen untuk menjadikan Teknologi Informasi sebagai salah satu tools untuk meningkatkan daya saing perusahaan, terutama sektor pelabuhan, dalam hal peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan melakukan serangkaian program kerja di bidang teknologi informasi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, antara lain untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi terhadap pertumbuhan bisnis Perusahaan.

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. **Tanggung Jawab**
Setiap satuan kerja perusahaan harus memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab terkait Teknologi Informasi.
2. **Strategi**
Strategi bisnis perusahaan harus memperhitungkan kemampuan Teknologi Informasi saat ini dan masa depan.
3. **Akuisisi**
Akuisisi dilakukan berdasarkan analisis yang tepat dan berkelanjutan sehingga keputusan dalam melakukannya menjadi jelas dan transparan.
4. **Kinerja**
Teknologi Informasi harus mendukung Perusahaan melalui penyediaan layanan Teknologi Informasi dengan tingkat layanan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bisnis saat ini dan masa depan.
5. **Kesesuaian**
Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku.
6. **Perilaku Manusia**
Kebijakan, praktik dan keputusan terkait Teknologi Informasi dapat mengarahkan perilaku manusia, untuk memenuhi kebutuhan terkait personal yang menjalankan proses Teknologi Informasi.

The completeness of Information Technology services that support the automation process of all business processes of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) will be a necessity to become the Largest Port Company in Indonesia. Therefore the development of Information Technology services and infrastructure should be effective, efficient and optimal so it can provide added value to the company.

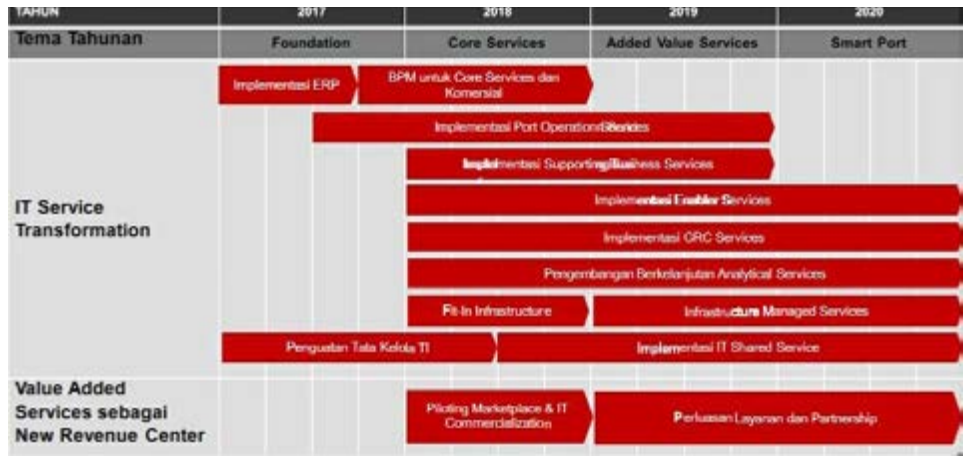
Decree of the Board of Directors Number: KP.31/30/11/PI-18.TU regarding Information Technology Governance Policy and Standard Operating Procedure (SOP) on July 11, 2018, makes the company committed to enact Information Technology as one of the tools to improve company competitiveness, especially the port sector, in terms of improving customer service.

Throughout 2018, the Company carried out a series of work programs in the field of information technology to achieve the set targets, there are for increasing information technology support for the Company's business growth.

THE PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

1. **Responsible**
Each of company work unit should understand and implement their role and responsibility related to Information Technology.
2. **Strategy**
The Company business strategy should consider the Information Technology capabilities at present and in the future.
3. **Acquisition**
Acquisitions are based on appropriate and ongoing analysis therefore decisions become clear and transparent.
4. **Performance**
Information Technology should support Company through a provision of Information Technology services with required service level to fulfill business requirements at present and in the future.
5. **Conformity**
The Company should comply all the prevailed regulations and law.
6. **Human Behavior**
Policies, practices, and decisions related to Information Technology can direct human behaviors, to meet the needs of the personnel who run the Information Technology process.

**ROADMAP
TEKNOLOGI
INFORMASI
ROADMAP
OF INFORMATION
TECHNOLOGY**







**HASIL ASSESSMENT TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI**

Pelindo 1 telah melakukan assessment terhadap Tata Kelola Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Veda Praxis, temuan, risiko dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dibagi kedalam kalsifikasi tingkatan risiko dari masing-masing temuan, dengan rincian sebagai berikut:





**RESULTS OF INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNANCE ASSESSMENT**

Pelindo 1 has conducted an assessment of Information Technology Governance conducted by Vedic Praxis, findings, risks and recommendations related to the implementation of risk management in the use of Information Technology are divided into the classification of risk levels of each finding, with details as follows:

No	Tingkatan Risiko/ Risk Level	Deskripsi/ Description
1.	 Ekstrem/ Extreme	Membutuhkan perhatian segera. Risiko ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan operasional yang signifikan atau berdampak pada reputasi yang buruk. Need immediate attention. This risk may effect in significant operational disruption or an impact on a bad reputation.
2.	 Tinggi/ High	Memiliki dampak yang sangat signifikan. Risiko ini harus dijadikan prioritas utama untuk segera ditanggulangi It has a very significant impact. This risk must be a top priority to be addressed immediately
3.	 Moderat/ Moderate	Memiliki dampak yang cukup signifikan, namun tidak harus dijadikan prioritas utama untuk segera ditanggulangi. It has a very significant impact, however , the risk have not to be a top priority to be addressed immediately
4.	 Rendah/ Low	Hal-hal yang relatif memiliki dampak tidak signifikan dan kecil kemungkinannya untuk terjadi. Secara umum dapat diabaikan namun bila diperhatikan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan dalam jangka panjang. Things that have relatively insignificant impacts and are less likely to occur. In general, it can be ignored, but if it can be considered, it can provide benefits to the Company in the long term.

Adapun ringkasan temuan Tata Kelola Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

The summary of the findings of Information Technology Governance is as follows:

No	Area Pengendalian Control Area	Temuan/ Finding			
		 Ekstrem Extreme	 Tinggi High	 Moderat Moderate	 Rendah Low
1	Plan and Organize (PO)	2	3	4	0
2	Acquire and Implement (AI)	2	2	1	0
3	Deliver and Support (DS)	6	5	3	0
4	Monitoring and Evaluate (ME)	0	1	0	0
5	ITIL v3	1	5	1	0
	Total	11	16	9	0

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Konsep Manajemen Risiko yang diimplementasikan pada Perusahaan adalah Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, yaitu proses pengelolaan risiko, yang diprakarsai dan melibatkan Direksi dan seluruh jajaran Manajemen dan pejabat struktural lainnya, diintegrasikan ke dalam proses bisnis di seluruh lini unit kerja dan dirancang untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi membawa pengaruh negatif bagi perusahaan, dan mengelolanya agar selalu berada di dalam batas toleransi perusahaan.

Setiap rencana pengambilan keputusan dan kebijakan strategis perusahaan telah mempertimbangkan berbagai risiko yang akan dihadapi perusahaan dan menyusun berbagai tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan juga untuk meminimalisir dampak jika risiko tetap terjadi. Seperti dalam pelaksanaan investasi, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan juga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengembangan bisnis perusahaan serta rencana pengembangan perusahaan lainnya.

Penyusunan, penerapan, dan pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pejabat dan organisasi di bawah supervisi dan pengarahan Direksi, sebagai early warning system dalam mengelola perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan manajemen risiko juga di bawah pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko yang telah dibentuk dan melakukan rivi secara periodik atas penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan.

Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi yang diimplementasikan berdasarkan ISO 31000:2009, hal ini juga sudah didukung dengan sistem Aplikasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan Risk Based Audit, yang telah diterapkan oleh PT Pelindo 1 pada tahun 2018, yang bertujuan untuk meningkatkan monitoring atas penerapan diseluruh unit kerja dan mendapatkan informasi sedini mungkin atas potensi risiko yang mungkin terjadi untuk dilakukan tindakan antisipasi seefektif mungkin.

The concept of Risk Management implemented in the Company is Integrated Corporate Risk Management, namely the risk management process, which is initiated and involve the Board of Directors and all levels of Management and other structural officials, integrated into business processes throughout all the work unit line and designed to identify potential obstacles which could bring negative influence for the company, and manage it in order to be within the company's tolerance limits.

Each plan for decision making and strategic policy of the company has considered the various risks that will be faced by the company and prepared various mitigation actions to reduce the possibility of risk occurring and also to minimize the impact if the risk still occurring. Such as in the implementation of investments, preparation of Corporate Work Plans and Budgets (RKAP), preparation of the Company Long Term Plan (RJPP) and also in the implementation of cooperation activities with third parties related to the compass business development and other company development plans.

The preparation, implementation and development of the Company's Risk Management Policy is the responsibility of all levels of functionary and organizations under the supervision and direction of the Board of Directors, as an early warning system in managing the company to achieve the stipulated vision, mission and objectives. The Implementation of Risk Management also under supervision of Board of Commissioner through Risk Management Monitoring Committee which has established and carried out review of the implemented risks management.

Integrated Corporate Risk Management implemented based on ISO 31000: 2009, this has also been supported by a Risk Management Application system which is integrated with Risk Based Audit, that has been implemented by PT Pelindo 1 in 2018, which aims to improve monitoring of implementation across work units and get information as early as possible on the potential risks that might occur as effectively as possible.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 pasal 25 yang mengatur tentang manajemen risiko, Pelindo 1 wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

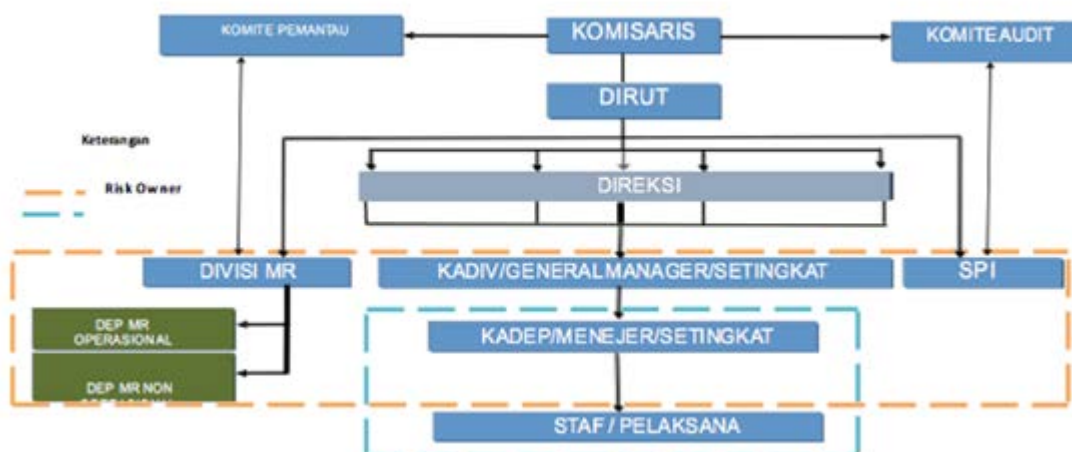
Pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Pelindo 1, dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.39/9/2/PI-16.TU tanggal 28 Desember 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Nomor KP.39/9/3/PI-16.TU tanggal 28 Desember 2016 tentang Pedoman Prosedur dan Instruksi Kerja Manajemen Risiko.

According to the Regulation of the Minister of SOE (BUMN) Number Per-01/MBU/2011 article 25 which regulates risk management, Pelindo 1 must implement the following matters:

1. The Board of Director, in every decision making/corporate action should consider business risk.
2. The Board of Directors must develop and implement a corporate risk management program in an integrated manner that is part of the implementation of the GCG program.
3. Implementation of a risk management program can be carried out by creating a separate work unit under the Board of Directors; or give assignments to existing and relevant work units to implement risk management functions.

Guidelines for implementing risk management in the Pelindo 1 environment, set forth in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number KP.39/9/2/PI-16.TU dated December 28, 2016 concerning Risk Management Policy and Numbers KP.39/9/3/PI-16.TU dated December 28, 2016 concerning Risk Management Work Instructions and Procedure Guidelines.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

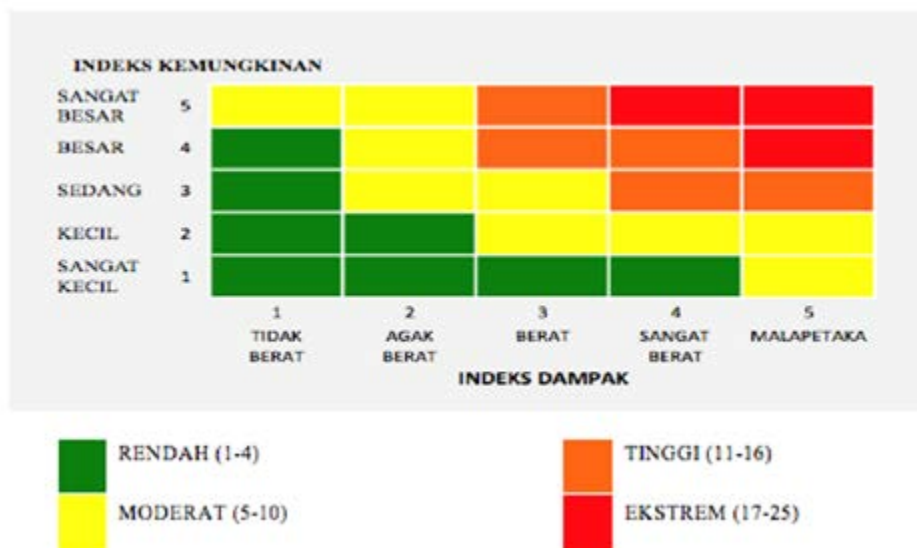


MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

RISIKO UTAMA

Dengan memperhatikan target perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan KPI tersebut di atas, maka dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi dan menghambat/ mengganggu pencapaian atau mengakibatkan tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab risiko dan memperkirakan besaran kemungkinan terjadinya dan dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi, sehingga diketahui tingkat risiko awal/inherent risk. Penetapan tingkat risiko dilaksanakan sesuai tabel peta risiko berikut :



Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana tindakan/mitigasi, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemungkinan dan ataupun dampak dari risiko tersebut, sehingga tingkat risiko dapat diturunkan ke tingkat moderat atau rendah, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan.

MAJOR RISK

By noticing to the company's targets in the RKAP and KPI mentioned above, accordingly, there is identification of potential risks that may occur and hamper/ affect the failure on the targets set.

Furthermore, a study is conducted to find out the causes of risk and estimate the magnitude of the possibility of occurrence and possible impacts if the risk occurs, so it is known the level of initial risk/ inherent risk. Risk level determination is carried out according to the following risk map table:

The next stage is the preparation of an action/mitigation plan, which aims to reduce the level of possibility and/or impact of the risk, so that the level of risk can be reduced to moderate or low levels, namely the level of risk that can be accepted by the company.

Berdasarkan hasil kajian risiko yang dilaksanakan, terdapat 14 (empat belas) risiko utama korporat yang berpotensi terjadi pada tahun 2018, yang terdiri dari risiko hukum, finansial, stratejik, operasional, bisnis, aset dan reputasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Based on the results of the risk study carried out, there are 14 (fourteen) major corporate risks that have the potential to occur in 2018, consisting of legal, financial, strategy, operational, business, assets and reputation risks, with details as follows:

NO	RISIKO Types of Risk	JUDUL RISIKO/ Title of Risk
1.	HUKUM LAW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbulnya permasalahan hukum dengan vendor internasional terkait penyelesaian aplikasi Front End 2. Terjadinya permasalahan/tuntutan hukum atas kerugian pengguna jasa 3. Dicabut/tidak diperpanjangnya izin segmen pelayanan (seperti pemanduan, penundaan, bongkar muat) atau perizinan lainnya (seperti izin lingkungan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal problems arise with international vendors related to the completion of the Front End application 2. The occurrence of problems / lawsuits for loss of service users 3. Revoked/ not extended service segment permit (such as pilotage, holding, loading and unloading) or other permits (such as environmental permits).
2.	FINANSIAL FINANCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya piutang tidak lancar 2. Adanya sanksi administrasi dan denda terkait perpajakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase in non-current receivables 2. There are administrative sanctions and penalties related to taxation
3.	STRATEJIK STRATEGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penyerapan anggaran investasi 2. Anak perusahaan tidak memberikan hasil seperti yang ditargetkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase in non-current receivables 2. There are administrative sanctions and penalties related to taxation
4.	OPERASIONAL OPERATIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kecelakaan kerja 2. Down system melebihi waktu toleransi 3. Ketidaksiapan alat bongkar muat khususnya di terminal peti kemas <ol style="list-style-type: none"> 1. Occurrence of work accidents 2. Down system exceeds tolerance time 3. Unpreparedness of loading and unloading equipment, especially in container terminals
5.	BISNIS BUSINESS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya target trafik peti kemas 2. Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan <ol style="list-style-type: none"> 1. Not achieving container traffic targets 2. Decreased of customer satisfaction level
6.	ASET ASSETS	<p>Hilangnya aset perusahaan Loss of company assets</p>
7.	REPUTASI REPUTATION	<p>Adanya persepsi/penilaian negatif dari stakeholder There are negative perceptions / assessments from stakeholders</p>

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Apabila risiko di atas diurutkan berdasarkan tingkat risiko mulai dari yang tertinggi hingga terendah sesuai dengan hasil kajian awal dan perubahannya setelah dilaksanakan mitigasi s.d Triwulan IV 2018, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

If the above risks are sorted by the level of risk starting from the highest to the lowest according to the results of the initial study and the changes after mitigation has been carried out in the 4th Quarter of 2018, thus the results can be seen in the following table:

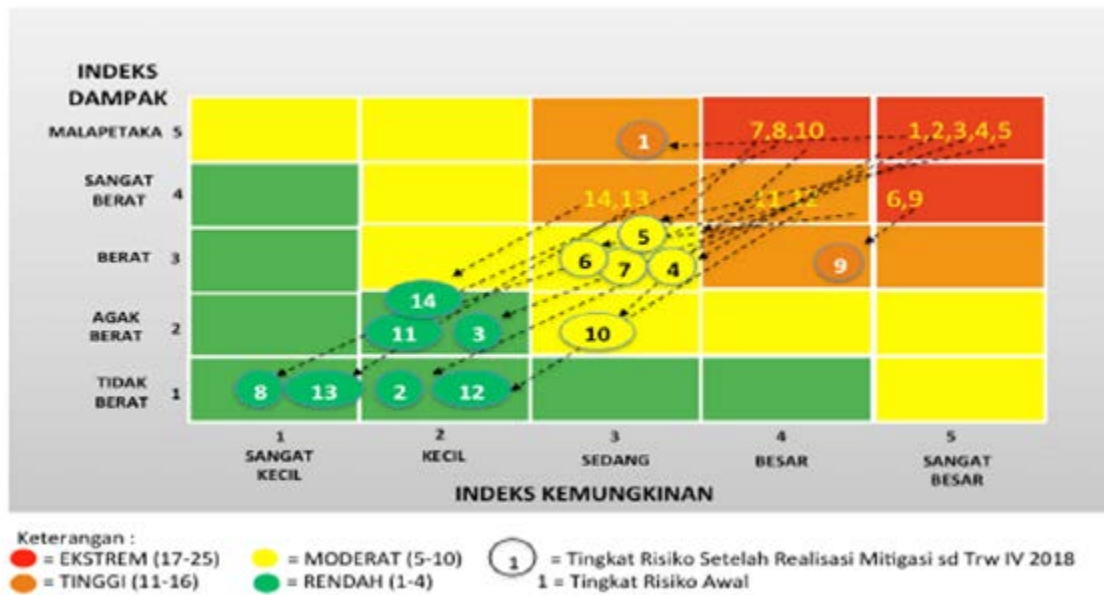
NO	JENIS RISIKO Types of Risk	JUDUL RISIKO Title of Risk	TINGKAT RISIKO/ Risk level	
			KAJIAN RISIKO AWAL Initial Risk Study	SETELAH MITIGASI TRIWULAN IV After 4th Quarter Mitigation
1.	Hukum/ Law	Timbulnya permasalahan hukum dengan vendor internasional terkait penyelesaian aplikasi Front End Legal problems arise with international vendors related to the completion of the Front End application	25	15
2.	Keuangan Financial	Peningkatan piutang tidak lancar Increase in non-current receivables	25	2
3.	Keuangan Financial	Adanya sanksi administrasi dan denda terkait perpajakan There are administrative sanctions and penalties related to taxation	25	4
4.	Strategik Strategy	Rendahnya penyerapan anggaran investasi Low absorption of investment budgets	25	9
5.	Operasional Operational	Terjadinya kecelakaan kerja Occurrence of work accidents	25	9
6.	Operasional Operational	Down system melebihi waktu toleransi Down system exceeds tolerance time	20	9
7.	Strategik Strategy	Anak Perusahaan tidak memberikan hasil seperti yang ditargetkan Subsidiaries do not provide results as targeted	20	9
8.	Bisnis Business	Trafik peti kemas tidak mencapai target Not achieving container traffic targets	20	1
9.	Aset/ Assets	Kehilangan aset perusahaan/ Loss of company assets	20	12
10.	Operasional Operational	Ketidaksiapan alat bongkar muat khususnya di terminal peti kemas Unpreparedness of loading and unloading equipment, especially in container terminals	20	6
11.	Hukum/ Law	Terjadinya permasalahan/tuntutan hukum Legal problems/ lawsuit arise	16	4
12.	Reputasi Reputation	Adanya persepsi/penilaian negative dari stakeholder There are negative perceptions/ assessments from stakeholders	16	4
13.	Bisnis Business	Penurunan tingkat kepuasan pelanggan Decreased of customer satisfaction level	12	1
14.	Hukum/ Law	Dicabut/tidak diperpanjangnya izin segmen pelayanan (seperti pemanduan, penundaan, bongkar muat) atau perijinan lainnya (seperti lingkungan) Revoked/ not extended service segment permit (such as pilotage, holding, loading and unloading) or other permits (such as environmental permits).	12	4

Perubahan tingkat risiko disebabkan mitigasi yang telah direalisasikan diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemungkinan dan atau dampak dari risiko.

The changes in the risk level due to realized mitigation are expected to reduce the level of possibility and/ or impact of risk.

Perubahan dari posisi awal (kajian risiko awal) hingga realisasi mitigasi s.d Triwulan IV 2018, dapat dilihat pada tabel peta risiko berikut :

The changes from initial position (initial risk study) to mitigation realization until Quarter IV 2018, can be seen in the following risk map table:



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

KEBIJAKAN

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, Pasal 26 ayat (2) sistem pengendalian intern mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Pengkajian Pengelolaan Risiko.
3. Aktivitas Pengendalian.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi.
5. Monitoring.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

EVALUASI

1. Interval Nilai

Nilai/Skor Akhir Penilaian/Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern menetapkan klasifikasi sebagaimana tabel berikut:

NO	INTERVAL NILAI/ Interval value	KLASIFIKASI/ Classification
1.	Nilai di atas 85/ Score above 85	Optimum/ Optimum
2.	75 < Nilai ≤ 85/ 75 < Score ≤ 85	Terkelola dan terukur/ Managed and measurable
3.	60 < Nilai ≤ 75/ 60 < Score ≤ 75	Terdefinisi/ Defined
4.	50 < Nilai ≤ 60/ 50 < Score ≤ 60	Berkembang/ Developing
5.	30 < Nilai ≤ 50/ 30 < Score ≤ 50	Rintisan/ Stubs
6.	Dibawah 30/ Under 30	Belum ada/ Not Available

POLICY

Internal Control System is an integral process in actions and activities which implement continuously by the leaders and all employees to provide adequate confidence in achieving organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security of assets, and compliance towards laws and regulations.

Regulation of Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, Article 26 paragraph (2) of the internal control system includes the following points:

1. Environmental control
2. Assessment of Risk Management
3. Control Activities
4. Information and Communication Systems
5. Monitoring

Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency Number: 4 of 2016 concerning Guidelines for Assessment and Strategy for Increasing the Maturity of the Government's Internal Control System, which is adjusted to the conditions of the company.

EVALUATION

1. Interval Value

Final Value/Score Assessment/Evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control carried out by Internal Supervision Unit stipulate the classification as follows:



2. Penilaian

Penilaian Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor sebesar 78,92 klasifikasi "Terkelola dan Terukur" dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARAMETER	BOBOT Quality	NILAI Score	% CAPAIAN EFEKTIVITAS Effectiveness Achievement
1.	Lingkungan Pengendalian Environmental control	30	25,09	83,64
2.	Penilaian Risiko/ Risk Assesment	20	15,97	79,83
3.	Kegiatan Pengendalian Control Activities	20	15,59	77,94
4.	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	11,35	75,69
5.	Pemantauan/ Monitoring	15	10,92	72,77
Nilai Total		100	78,92	78,92

REKOMENDASI

Terhadap kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik yang terbaik penerapan Sistem Pengendalian Intern, terdapat beberapa rekomendasi yang pada prinsipnya telah ditindaklanjuti oleh Pelindo 1.

2. Assesment

The Internal Control System Assessment is performed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a score of 78.92 classed as "Managed and Measured" with the following details:

RECOMMENDATION

Regarding the weaknesses in the implementation of the Internal Control System, in an effort to improve the performance of the best practices in implementing the Internal Control System, there are several recommendations which in principle have been followed up by Pelindo 1.





TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel, dan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika.

To increase the achievement of business results targets and optimizing the value of the company for all stakeholders accountably, and based on regulations and ethical values.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Seiring berjalannya waktu, Pelindo 1 semakin memperkuat komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menunjuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara, Tata Kelola Perusahaan merupakan struktur dan proses serta prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang digunakan untuk organ perusahaan dalam meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha serta mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel, dan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika.

Dasar Acuan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan perubahannya.
6. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN

Pelindo 1 telah memiliki kelengkapan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan GCG, soft-structure GCG disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Soft-structure GCG yang dimiliki Pelindo 1 adalah sebagai berikut:

From time to time, Pelindo 1 further strengthens its commitment to apply the principles of Good Corporate Governance to continue to grow and develop in a sustainable manner in the long term.

Referring to the Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Application of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Corporate Governance is the structure and process as well as the principles underlying a company's management processes and mechanisms used for corporate organs in increasing the achievement of business results targets and optimizing the value of the company for all stakeholders accountably, and based on regulations and ethical values.

The Basic Reference for Implementation of Good Corporate Governance

1. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE).
2. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/2012 concerning the amendment of the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011.
3. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: 02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the State Owned Enterprises' Supervisory Board.
4. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: 03/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the State Owned Enterprises' Board of Directors.
5. Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: 04/MBU/2014 concerning the Income Guidelines for Directors, Board of Commissioners and State Owned Enterprises Supervisory Board and their amendments.
6. Decree of the Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S-MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters in Assessing and Evaluating the Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

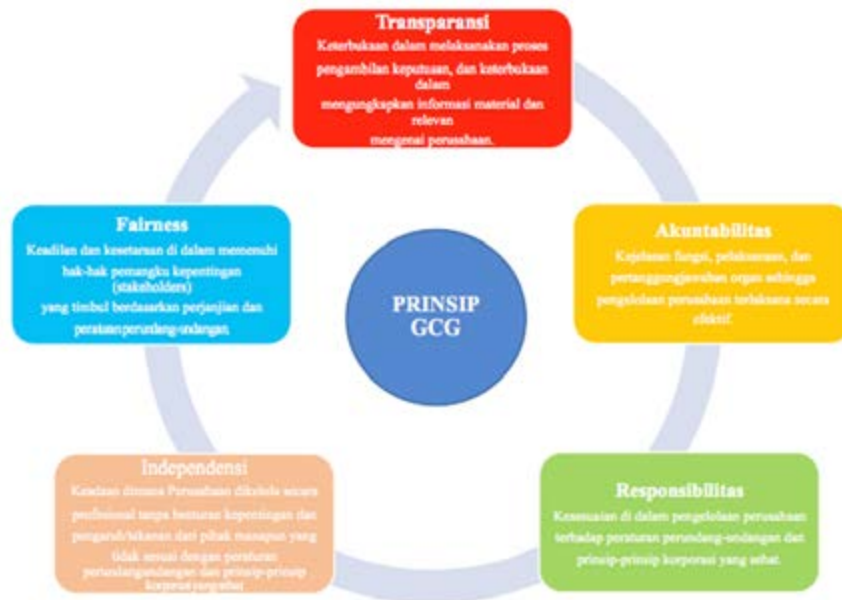
POLICY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelindo 1 already has a complete set of policies that regulate various aspects of GCG implementation, soft-structure of GCG is structured in such a way as needed and refers to various provisions that apply in Indonesia. The soft-structure of GCG owned by Pelindo 1 is as follows:



No	Kebijakan/ Policy	Keputusan
1.	Panduan Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of Good Corporate Governance (GCG)	Lampiran I Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix I Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI-15.TU dated November 19, 2015
2.	Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (Board Manual) Guidelines of Duties Performance of Directors and Commissioners (Board Manual)	Lampiran II Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix II Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI-15.TU dated November 19, 2015
3.	Pedoman Sistem Pengendalian Intern Guidelines of Interns Control System	Lampiran III Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix III Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/ PI15.TU dated November 19, 2015
4.	Pedoman Sistem Pengawasan Intern (Audit Charter) Guidelines of Interns Supervising System (Audit Charter)	Lampiran IV Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix IV Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU dated November 19, 2015
5.	Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System) Guidelines for Reporting Mechanisms for Alleged Deviations (Whistleblowing System)	Lampiran V Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix V Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU dated November 19, 2015
6.	Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja Code of Business Ethics and Work Ethics	Lampiran VI Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Appendix VI Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/ PI15.TU dated November 19, 2015

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE



PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TRANSPARANSI

Implementasi prinsip transparansi pada Pelindo 1 antara lain:

1. Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi telah dilaksanakan pada rapat Dewan Komisaris Internal dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi (rapat gabungan).
3. Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan Pelindo 1 telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi, dan rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris (rapat gabungan).
4. Pelindo 1 telah memiliki sistem teknologi informasi online yang real time untuk mempercepat akses informasi.
5. Laporan Tahunan telah memenuhi syarat kriteria Annual Report dan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya informasi BUMN yang disajikan dalam website Pelindo 1 www.pelindo1.co.id.

TRANSPARENCY

Implementation of the principle of transparency in Pelindo 1, among others are:

1. The process of decision-making of the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) has met the requirements of the Company's Articles of Association..
2. The decision-making process of the Board of Commissioners that functions as supervision and giving advice to the Board of Directors has been carried out at the Internal Board of Commissioners meeting and the Board of Commissioners meeting that invites the Board of Directors (joint meeting).
3. The decision-making process of the Board of Directors that functions to manage Pelindo 1 has been carried out through the mechanism of the Board of Directors meeting, and the Board of Directors meeting that invites the Board of Commissioners (joint meeting).
4. Pelindo 1 has a real time online information technology system to accelerate access to information.
5. The Annual Report has fulfilled the criteria for the Annual Report and Law Number 24 of 2008 concerning public information disclosure, specifically the SOE information presented on the Pelindo 1 website www.pelindo1.co.id.

AKUNTABILITAS

Implementasi prinsip akuntabilitas pada Pelindo 1 antara lain:

1. Pelindo 1 telah memiliki struktur organisasi, job Description untuk masing-masing job title dan penilaian key performance indicator untuk Direksi, Kepala Unit kerja dan seluruh pegawai.
2. Pelindo 1 memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Dewan Komisaris dan telah di breakdown kepada seluruh Unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya.
3. Insan Pelindo 1 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan mempertanggung jawab kan kegiatannya secara transparan setiap triwulan.
4. Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan dengan opini auditor independen adalah wajar tanpa pengecualian dan tingkat kesehatan antara sehat dan sehat sekali.
5. Pelindo 1 telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas laporan tahunan oleh RUPS.
6. Perusahaan telah memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.

RESPONSIBILITAS

Implementasi prinsip responsibilitas pada Pelindo 1 antara lain:

1. Pelindo 1 memiliki peraturan perundang-undangan, anggaran Dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai dasar pelaksanaan tugas.
2. Insan Pelindo 1 selalu bersikap prudent sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan.
3. Pelindo 1 setiap tahun telah dilakukan audit kepatuhan oleh Auditor Eksternal dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan.
4. Pelindo 1 telah berkontribusi kepada masyarakat dilingkungan perusahaan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
5. Insan Pelindo 1 telah menandatangani pakta integritas dan anti suap untuk tunduk kepada Code of Conduct dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

INDEPENDENSI

Implementasi prinsip independensi pada Pelindo 1 antara lain:

1. Pelindo 1 telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (conflict of interest).
2. Pelindo 1 telah memiliki budaya perusahaan yaitu customer focus, integrity, professionalism, team work dan adaptive

ACCOUNTABILITY

Implementation of the principle of accountability in Pelindo 1, among others are:

1. Pelindo 1 has an organizational structure, job description for each job title and an assessment of key performance indicators for Directors, Work Unit Heads and all employees.
2. Pelindo 1 has a Corporate Work Plan and Budget that has been ratified by the GMS / Board of Commissioners and has been broken down to all work units as a reference in the implementation of duties each year.
3. Pelindo 1 personnel have carried out their duties and responsibilities, and called to account for their activities transparently every quarter.
4. The external auditor has conducted an examination of the Company's Financial Report with the opinion of an independent auditor that is reasonable without exception and the soundness level is between healthy and very healthy.
5. Pelindo 1 has been responsible for and approved by the annual report by the GMS.
6. The company has given awards and sanctions to employees who have high achievements and who have committed violation.

RESPONSIBILITY

Implementation of the principle of responsibility for Pelindo 1, among others are:

1. Pelindo 1 has legislation, articles of association, GCG infrastructure, and Community Development Partnership Program (PKBL) policies as the basis for implementing tasks.
2. Pelindo 1 personnel are always prudent in accordance with risk management policies and ensure the implementation of their duties in accordance with regulations.
3. Pelindo 1 has conducted a compliance audit by the External Auditor every year and there has not been a significant and material increase in the compliance audit findings.
4. Pelindo 1 has contributed to the community within the company, through the Partnership and Community Development Program
5. Pelindo 1 personnel have signed integrity and anti-bribery pacts to submit to the established Code of Conduct and business ethics.

INDEPENDENCE

Implementation of the principle of independence in Pelindo 1, among others are:

1. Pelindo 1 has policy of conflict of interest.
2. Pelindo 1 has a corporate culture namely, customer

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(CIPTA)

- Masing-masing organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan masing-masing peranannya tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya.
- Pelindo 1 telah menerapkan Good Corporate Governance dengan hasil Assessment yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
- Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi check and balances melalui komunikasi formal melalui rapat, persetujuan/penolakan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

focus, integrity, professionalism, team work and adaptive (CIPTA)

- Each company organ, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out each of their roles without intervention and domination of other parties.
- Pelindo 1 has implemented Good Corporate Governance with the results of Assessment which always increases from year to year.
- The Board of Commissioners and Directors have carried out the function of check and balances through formal communication through meetings, approval/ rejection of the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals.

FAIRNESS

Implementasi prinsip fairness pada Pelindo 1 antara lain:

- Pelindo 1 telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
- Pelindo 1 telah memberikan perlakuan yang proporsional kepada peserta tanpa membedakan size perusahaan peserta, jumlah upah pekerja, jumlah peserta yang di cover pada masing-masing perusahaan.
- Pelindo 1 melakukan peningkatan manfaat kepada peserta secara konsisten setiap 2 (dua) tahun.
- Pelindo 1 telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (website), saluran pelayanan (call centre) dan saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
- Pelindo 1 telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan Serikat Pekerja Pelindo 1.

FAIRNESS

Implementation of the fairness principle in Pelindo 1, among others are:

- Pelindo 1 has had an operational technical policy to provide services to all stakeholders through the Quality Management System ISO 9001: 2008.
- Pelindo 1 has provided proportional treatment to the participants without distinguishing the size of the participating companies, the number of workers' wages, the number of participants that covered in each company.
- Pelindo 1 consistently increases benefits for the participants every 2 (two) years.
- Pelindo 1 has provided an opportunity for all stakeholders to express their opinions through meeting forums, electronic communication channels (websites), call centers and whistleblowing systems.
- Pelindo 1 has provided equal opportunities to all employees without discrimination in accordance with the Collective Labor Agreement between management and Pelindo 1 Labor Union.

RENCANA DAN REALISASI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2018

Dalam rangka terus mempertahankan konsistensi implementasi GCG, Pelindo 1 memiliki rencana kerja yang terukur dan terarah yang didasarkan pada Roadmap GCG. Untuk tahun 2018, Pelindo 1 merencanakan kegiatan sebagai berikut:

PLAN AND REALIZATION OF DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2018

In order to continue to maintain the consistency of GCG implementation, Pelindo 1 has a measurable and directed work plan based on the GCG Roadmap. For 2018, Pelindo 1 plans activities as follows:

No	Rencana/ Plan	Realisasi/ Realization
1.	Melakukan Self Assessment GCG dengan mengundang pihak independen untuk periode tahun buku 2018 Conduct GCG Self Assessment by inviting independent parties for the 2018 fiscal year	Perusahaan telah melakukan Self Assessment GCG yang mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16.S/MBU/2012 The Company has conducted GCG Self Assessment which refers to the Secretary of the Ministry of BUMN Decree Number: SK-16.S/MBU/2012

No	Rencana/ Plan	Realisasi/ Realization
2.	Memperkuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan refreshment terhadap nilai-nilai GCG Strengthen the commitment of the Board of Commissioners and Directors by doing refreshment GCG values	Untuk melakukan refreshment terhadap nilai-nilai GCG, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama tahun 2018 To refresh the GCG values, the Board of Commissioners and Directors have followed the Education and training that was held during 2018
3.	Melakukan internalisasi dan institusionalisasi GCG kepada pegawai dan unit kerja terkait di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Internalize and institutionalize GCG to employees and related work units at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Perusahaan telah melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh pegawai dan kepada unit kerja terkait untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi GCG. The company has conducted GCG socialization to all employees and related work units to supervise GCG implementation.
4.	Menyebarkan materi Code of Conduct, Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System kepada stakeholders Perusahaan. Disseminate the Code of Conduct material, Gratification Control and Whistleblowing System to the Company's stakeholders.	Perusahaan menyebarkan materi Code of Conduct, Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System, melalui website perusahaan www.pelindo1.co.id The company disseminates the material of the Code of Conduct, Gratification Control and Whistleblowing System, through the company's website www.pelindo1.co.id
5.	Menindaklanjuti hasil Assessment GCG Tahun 2017. Following up on the results of the 2017 GCG Assessment.	Perusahaan telah membuat Laporan Self Assessment GCG Tahun 2018, dengan skor sebesar 94,60%, naik 0,30% dari tahun sebelumnya sebesar 94,30%. The Company has made the GCG Self Assessment Report of 2018, with a score of 94.60%, increasing 0.30% from the previous year of 94.30%.

PENILAIAN GCG

1. Kriteria Penilaian

Guna mengetahui hal-hal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Pelindo 1 untuk periode tahun 2018, telah dilakukan Self Assessment GCG berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Pihak Yang Melakukan Penilaian

Pelaksanaan Self Assessment penerapan GCG tahun 2018 dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu oleh Corporate Secretary dan Satuan Pengawasan Internal.

3. Skor Penilaian

Nilai Akhir Penerapan GCG yang diperoleh Pelindo 1 dalam Self Assessment GCG tahun 2018 untuk seluruh aspek telah mencapai skor sebesar 94,60% dengan klasifikasi "Sangat Baik", dengan capaian nilai untuk masing-masing aspek sebagai berikut:

GCG ASSESSMENT

1. Assessment Criteria

In order to find out the things that have been implemented related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Pelindo 1 for the period of 2018, GCG Self Assessment has been carried out based on the Secretary of the Ministry of SOE Decree Number: SK-16 / S-MBU / 2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessing and Evaluating the Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

2. The Party Conducting the Assessment

The exercise of Self Assessment of GCG implementation in 2018 is carried out by the company, namely by the Corporate Secretary and the Internal Control Unit.

3. Rating Score

Final Value of GCG Implementation obtained by Pelindo 1 in GCG Self Assessment in 2018 for all aspects has achieved the score of 94.60% with the classification of "Very Good", with achievement of scores for each aspect as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/ PARAMETER ASPECT OF ASSESSMENT/ INDICATORS/ PARAMETERS	BOBOT WEIGHT	CAPAIAN TAHUN 2018 ACHIEVEMENTS IN 2018	
			SKOR SCORE	% CAPAIAN % ACHIEVEMENT
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,27	89,52
2.	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,37	92,95
3.	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	35,00	34,58	98,79
4.	Direksi/ Directors	35,00	33,10	94,59
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,29	80,95
6.	Aspek Lainnya/ Other Aspects	5,00	5,00	100,00
SKOR KESELURUHAN/ OVERALL SCORE		100,00	94,60	94,60
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG QUALITY CLASSIFICATION OF GCG APPLICATION			SANGAT BAIK VERY GOOD	

Dalam rangka mengetahui perkembangan penerapan GCG di Pelindo 1, dibawah ini disajikan perbandingan hasil capaian Assessment GCG selama 5 tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

In order to discover the development of GCG implementation in Pelindo 1, below is showing a comparison of the results of achievement of GCG Assessment during the last 5 years with the details as follows:

No	ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/ PARAMETER ASPECT OF ASSESSMENT/ INDICATORS/ PARAMETERS	CAPAIAN TAHUN/ ACHIEVEMENT OF YEAR				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	6,69	6,69	6,70	6,22	6,27
2.	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	8,72	8,74	8,74	8,41	8,37
3.	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	34,58	34,59	34,61	34,53	34,58
4.	Direksi/ Directors	34,57	34,57	34,58	33,10	33,10
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	8,35	8,35	8,36	7,05	7,29
6.	Aspek Lainnya/ Other Aspects	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00
SKOR KESELURUHAN/ OVERALL SCORE		94,16	94,19	94,23	94,30	94,60
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG QUALITY CLASSIFICATION OF GCG APPLICATION		SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK VERY GOOD	SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK VERY GOOD	SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK VERY GOOD	SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK VERY GOOD	SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK VERY GOOD

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN

Dari hasil pelaksanaan Self Assessment GCG di Pelindo 1 pada tahun 2018, terdapat 30 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Aspek Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- 1) Perusahaan agar memuat uraian mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan terkait dengan Intangible Asset dalam Pedoman Perilaku.
- 2) Melakukan pengukuran tingkat pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
- 3) Menambahkan bagian tentang Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pengelolaan Gratifikasi.
- 4) Melakukan survey dan pengukuran tingkat pemahaman terkait dengan Pengendalian Gratifikasi.
- 5) Melakukan sosialisasi terkait Whistleblowing System kepada stakeholders di luar Perusahaan.
- 6) Membuat alamat email khusus untuk pelaporan Whistleblowing System dengan akses terbatas untuk menjamin kerahasiaan isi laporan dan identitas pelapor.

b. Aspek Pemegang Saham

- 1) Pemegang Saham agar menyebutkan alasan pemberhentian Direksi dalam Surat Keputusan Pemberhentian Direksi.
- 2) Perusahaan agar mengupayakan percepatan penyelesaian RJPP 2019 dikarenakan telah melampaui dari batas waktu yang ditentukan.
- 3) Pemegang Saham melaksanakan penilaian kinerja anggota Direksi secara individu.
- 4) Pemegang Saham agar secara spesifik menetapkan sistem penerimaan pelaporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

c. Aspek Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris mengupayakan agar di masa mendatang melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu.
- 2) Melengkapi dalam Laporan Tugas Pelaksanaan Dewan Komisaris dengan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
- 3) Komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan (sebelum tahun buku periode berakhir).
- 4) Komite perlu mempertimbangkan ketentuan dan pelaksanaan pertemuan rutin dalam rencana kerja dan piagam komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris. (sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rapat Dewan Komisaris).
- 5) Komite menyediakan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan disertai dengan

RECOMMENDATION OF ASSESSMENT RESULTS

From the results of GCG Self Assessment in Pelindo 1 in 2018, there are 30 recommendations with details as follows:

a. Commitment Aspects of Good Corporate Governance

- 1) The company should include a description of Intellectual Property Rights (IPR) and related Intangible Assets in the Code of Conduct.
- 2) Measuring the level of understanding of the Corporate Governance Guidelines and the Code of Conduct.
- 3) Adding a section concerning the Commitments of the Board of Commissioners and Directors in Management of Gratification.
- 4) Conducting surveys and measuring the level of understanding related to Gratification Control.
- 5) Conducting socialization regarding Whistleblowing Systems to stakeholders outside the Company.
- 6) Make an exclusive email address for Whistleblowing System report with limited access to ensure the confidentiality of the report content and the identity of the reporter.

b. Shareholder Aspect

- 1) Shareholders should state the reason for terminating Director in the Decree of Dismissal of the Board of Directors.
- 2) The company seeks to accelerate the completion of the 2019 Company Long Term Plan for it has exceeded the specified time limit.
- 3) Shareholders carry out an assessment of performance of Directors individually.
- 4) Shareholders specifically set out a system in receiving reports regarding the symptoms of performance degradation of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners.

c. Board of Commissioners Aspect

- 1) The Board of Commissioners should make an effort in order that in the future it will evaluate the performance of the Directors individually.
- 2) Completing the Board of Commissioners' Implementation Task Reports by evaluating the performance achievements of each Member of the Board of Commissioners.
- 3) The Committee prepares and submits work plans to the Board of Commissioners in accordance with the provisions (before the financial year ends).
- 4) The Committee needs to consider the provisions and implementation of routine meetings in the work plan and charter of the committee according to the needs of the Board of Commissioners. (at least equal to the number of Board of Commissioners meetings).
- 5) The Committee provides report documents to the Board of Commissioners for each implementation of assignment together with recommendation and

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

rekomendasi dan kinerja triwulanan/ tahunan sesuai ketentuan.

performance by quarterly/ annually in accordance with the provisions.

d. Aspek Direksi

- 1) Melakukan revisi terhadap Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (Board Manual) dan menambahkan aturan mengenai standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan mengatur ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut dalam jangka waktu maksimal maksimal hari.
- 2) Direksi agar memastikan tidak terdapat jabatan yang masih kosong.
- 3) Direksi agar mengatur ketentuan mengenai mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/ anggota Direksi/Dewan Komisaris dalam Board Manual (Pedoman Pelaksanaan Kerja Direksi dan Komisaris).
- 4) Direksi agar mengatur ketentuan mengenai mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan dalam Board Manual.
- 5) Direksi agar menyusun tingkat pencapaian kinerja anggota Direksi secara individu.
- 6) Perusahaan agar menyediakan data aduan/complain dari pelanggan dan survei kepuasan pelanggan sebagai tolok ukur pelaksanaan SPM dan mutu.
- 7) Perusahaan agar melengkapi Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dengan menambahkan:
 - Penjaringan atau nominasi calon Direksi.
 - Penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris.

Proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih serta Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (Kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.
- 8) Direksi agar membuat sistem Customer Relation Management (CRM) yang teintegrasi untuk memastikan terdapat standar pelayanan yang sama terkait dengan keluhan pelanggan, termasuk membuat call center khusus untuk menerima pengaduan.
- 9) Perusahaan agar mengupayakan tidak terdapat tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada Usaha Kecil.

d. Directors Aspect

- 1) Revising the Task Guidelines of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) and adding the rules regarding the standard time of immediacy level the in decision making for the Board of Directors and regulate provisions concerning the immediacy in communicating to the level of organizational under the Board of Directors related to the decision within a maximum period of days.
- 2) Directors should ensure that there are no vacant positions.
- 3) Directors should regulate the provisions regarding the mechanism for Directors to respond to proposed business opportunities from management under the Directors/ members of the Board of Directors / Board of Commissioners in the Board Manual (Directors and Commissioners Work Implementation Guidelines).
- 4) Directors should arrange provisions regarding the mechanism for the Directors at anytime to immediately discuss current issues concerning changes in the business environment and issues that have major impact on the company's business and performance in the Board Manual.
- 5) Directors to arrange the level of performance achievement of Directors individually.
- 6) Company should provide data on complaints from customers and customer satisfaction surveys as benchmarks for implementing Minimum Service Standards and quality.
- 7) Company should complete the Subsidiary Management Policy by adding:
 - Screening or nominating candidates for Directors;
 - Fit and proper test for prospective Directors and Board of Commissioners;

The process of determining prospective Directors and selected Board of Commissioners also the System/ guidelines in assessing the performance of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial), which contains at least key performance indicators and success criteria.
- 8) Directors should create an integrated Customer Relation Management (CRM) system to ensure that there are same service standards related to customer complaints, including creating an exclusive call center to receive complaints.
- 9) Company should make an effort so there is no arrears of partnership refund that loaned to Small Businesses.
- 10) Corporate Secretary should ensure that all information on the Company's website has been updated.

- 10) Sekretaris Perusahaan agar memastikan keseluruhan informasi dalam website Perusahaan telah dimutakhirkan.
- 11) Perusahaan agar memastikan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan yakni 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Terkait dengan hal tersebut, Pemegang Saham sebaiknya menyiapkan waktu sesuai dengan ketentuan.

e. Aspek Informasi dan Transparansi

- 1) Memastikan bahwa pengelolaan website mengacu pada ketentuan yang dimiliki oleh Perusahaan.
- 2) Melakukan update pada Website secara konsisten dan mengupdate konten-konten yang berada di website perusahaan sehingga informasi dapat disajikan up to date.
- 3) Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat Laporan Tahunan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan (bilingual).
- 4) Agar Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya, serta bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

- 11) Company should ensure that the summons of the GMS is conducted according to the stipulated period of time, namely 14 days prior to the GMS, without taking into account the date of summons and the date of the GMS. Related to this, Shareholders should prepare time in accordance to the provisions.

e. Information and Transparency Aspect

- 1) Ensure that website management refers to the provisions owned by the Company.
- 2) Updating the Website consistently and updating the content on the company's website therefore, the information can be presented up to date.
- 3) Company should consider to making Annual Reports in Indonesian and English side by side (bilingual).
- 4) In order for the Company to participate in Sustainability Reporting Awards and the like, as well as the field of publication and information disclosure.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Program Pelatihan Dewan Komisaris secara formal yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

EDUCATION AND TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Board of Commissioners

Training Programs in order to improve the competence of the Board of Commissioners is carried out both formally and informally. The formal Board of Commissioners Training Programs implemented during 2018 are as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Pelatihan/ Training	Tempat/ Place	Waktu/ Time
1.	Refty Harun	Komisaris Utama President Commissioner	Business Development Expo 2018V	Surabaya	3-4 Oktober 2018
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris Commissioner	Aspek Hukum Peran dan Fungsi BUMN Law Aspects of SOE's Role and Function	Yogyakarta	29 - 30 November 2018
3.	Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	Leaders Talk Winning Strategy "Leading Strategic Growth and Change"	Jakarta	11 - 12 Oktober 2018
			Aspek Hukum Peran dan Fungsi BUMN Law Aspects of SOE's Role and Function	Yogyakarta	29 - 30 November 2018
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris Commissioner	-	-	-
5.	Heryadi	Komisaris Commissioner	Business Development Expo 2018V	Surabaya	3-4 Oktober 2018

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Direksi

Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Program Pelatihan Dewan Komisaris secara formal yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

Directors

Training Programs in order to improve the competence of the Directors is carried out both formally and informally. The formal Board of Directors Training Programs implemented during 2018 are as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Pelatihan/ Training	Tempat/ Place	Waktu/ Time
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	-	-	-
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM Director of HR	Sistem Manajemen ke-HRDan HR Management System	Tangerang	4 Mei 2018
			HR Excellence Award	Jakarta	8 Mei 2018
			Diskusi dan Buka Puasa Bersama Indonesiasentris Fakta atau Hoax Discussion and Ifthar With Indonesiacentrist Fact or Hoax Discussion	Jakarta	6 Juni 2018
			Sharing Session TW-4 Digital Leadership	Makaasar	22-23 November 2018
			Diskusi Panel PwC Preparing for Tomorrow Workforce Panel Discussion PwC Preparing for Tomorrow Workforce	Jakarta	30 November 2018
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Director of Operational & Commercial	-	-	-
4.	Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Technical Director	-	-	-
5.	M. Nur Sodik	Direktur Keuangan Financial Director	-	-	-
6.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Director of Transformation & Business Development	-	-	-

SOSIALISASI GCG KEPADA PEGAWAI

Pelindo 1 telah melakukan sosialisasi Pedoman Umum GCG kepada seluruh Pegawai Kantor Pusat maupun Kantor Cabang pada tahun 2018, dari jumlah pegawai sebanyak 1.401 orang yang mengikuti sosialisasi sebanyak 506 pegawai atau sebesar 36,12%, peserta yang mengikuti sosialisasi dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman GCG kepada insan Pelindo 1 secara berkelanjutan, adapun jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GCG adalah sebagai berikut:

No	Cabang/Unit Branch/Unit	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Peserta Number of Participants	%
1.	Kantor Pusat/ Head Office	458	143	31,22
2.	Cabang Dumai/ Branch Office of Dumai	173	73	42,20
3.	Cabang Belawan/ Branch Office of Belawan	192	51	26,56
4.	Cabang Tanjung Pinang/ Branch Office of Tanjung Pinang	40	36	90,00
5.	Cabang Tembilahan/ Branch Office of Tembilahan	7	1	14,29
6.	Cabang Batam/ Branch Office of Batam	32	14	43,75
7.	Cabang Malahayati/ Branch Office of Malahayati	19	8	42,11
8.	Cabang Sei Pakning/ Branch Office of Sungai Pakning	26	19	73,08
9.	Cabang Gunung Sitoli/ Branch Office of Gunung Sitoli	7	7	100,00
10.	Cabang Kuala Tanjung/ Branch Office of Kuala Tanjung	13	11	84,62
11.	Cabang Sibolga/ Branch Office of Sibolga	12	4	33,33
12.	Cabang Tanjung Balai Karimun Branch Office of Tanjung Balai Karimun	22	16	72,73
13.	Cabang Tanjung Balai Asahan Branch Office of Tanjung Balai Asahan	7	7	100,00
14.	Cabang Lhokseumawe Branch Office of Lhokseumawe	22	1	4,55
15.	Cabang Pekanbaru Branch Office of Pekanbaru	65	18	27,69
16.	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Domestic Container Terminal of Belawan	120	56	46,67
17.	Belawan International Container Terminal International Container Terminal of Belawan	175	36	20,57
18.	Unit Galangan Kapal/ Shipyard Unit	11	5	45,45
Total		1401	506	36,12

GCG SOCIALIZATION TO EMPLOYEES

Pelindo 1 has socialized the General Guidelines for GCG to all Head Office Officers and Branch Offices in 2018, from the total 1,401 employees who participated in the socialization, 506 employees or 36.12%, participants who took part in the socialization could provide socialization and understanding of GCG to Pelindo 1 people in a sustainable manner, as for the number of participants participating in GCG socialization are as follows:

SOSIALISASI GCG KEPADA STAKEHOLDERS

Perusahaan menyebarkan materi Pedoman GCG, Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan, Code of Conduct, dan Pengendalian Gratifikasi melalui website Pelindo 1 www.pelindo1.co.id

GCG SOCIALIZATION TO STAKEHOLDERS

The company disseminates materials of GCG Guidelines, Reporting Mechanism Guidelines on Alleged Deviations, Code of Conduct, and Gratification Control through the Pelindo 1 website www.pelindo1.co.id

TINDAK LANJUT AREA OF IMPROVEMENT GCG

Self Assessment GCG tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satu kewajiban adalah menyusun laporan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG tahun 2017 dengan total 43 rekomendasi, yang dinyatakan tuntas 13 rekomendasi sedangkan sisa rekomendasi 31 atau dengan capaian 41,93% tindak lanjut dengan posisi sebagai berikut:

No	Organ Perusahaan Organ of Company	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Dinyatakan Tuntas Stated as Complete	Sisa Rekomendasi Remaining Recommendations	% Tindak lanjut Follow Up
1.	Pemegang saham /RUPS Shareholders/ GMS	7	3	4	75,00
2.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	0	5*	0,00
3.	Direksi/ Directors	14	3	11	27,27
4.	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties	18	7	11	63,63
Total		43	13	31	41.93

*Terdapat penambahan 1 (satu) rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2018

FOLLOW-UP OF AREA OF GCG IMPROVEMENT

GCG Self Assessment in 2018 based on Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, where one of the obligations is to compile a follow-up report on recommendations of 2017 GCG Assessment with a total of 43 recommendations, which stated as complete were 13 recommendations, while the remaining 31 recommendations or with the achievement of 41.93% followed up with the following positions:

* There is 1 (one) additional recommendation from the Board of Commissioners in 2018



GCG AWARD

Pelindo 1 di tahun 2018 telah melakukan GCG Award untuk Kantor Cabang Pelindo 1, dimana kriteria GCG Award yang dilakukan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

GCG AWARD

Pelindo 1 in 2018 has conducted a GCG Award for Pelindo 1 Branch Offices, where the GCG Award criteria carried out include the following aspects:

No	Kriteria/ Criteria	Penilaian Assessment	Hadiah/ Award	Juara/ Winner
1.	Pelaporan LHKPN State Administration Assets Report	25 %	Juara I = Rp 25.000.000,- I Winner = IDR 25.000.000,-	Pekanbaru
2.	Kuesioner Questionnaire	25 %	Juara II = Rp 20.000.000,- II Winner = IDR 20.000.000,-	Lhokseumawe
3.	Banner Anti Korupsi Anti Corruption Banner	25 %	Juara III = Rp 15.000.000,- III Winner = IDR 15.000.000,-	Sibolga
4.	Sosialisasi GCG GCG Socialization	25 %	Juara IV = Rp 10.000.000,- IV Winner = IDR 10.000.000,-	Tanjung Balai Asahan
			Juara V = Rp 5.000.000,- V Winner = IDR 5.000.000,-	Kuala Tanjung



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

RUPS merupakan capital yang memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan RUPS, capital berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan atau Direksi sepanjang hal tersebut sejalan dengan kepentingan Pelindo 1.

Kewenangan RUPS Perusahaan antara lain:

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, terdapat dua jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan.
Diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya pada bulan Juni setelah tutup buku Perusahaan. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukkan Akuntan Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
Diselenggarakan bila dianggap perlu oleh Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan melalui undangan tertulis dengan menginformasikan agenda pembahasannya.

HAK DAN WEWENANG RUPS

RUPS sebagai instansi tertinggi dalam Pelindo 1, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Pelindo 1, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

GMS is the capital that has all the authority which not given to the Board of Commissioners and Directors within the limits determined by the Articles of Association and the applicable laws. In implementing the GMS, capital has the right to obtain information related to the Company from the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors as long as in line with the interests of Pelindo 1.

The authority of the Company's GMS, among others are:

1. To appoint and dismiss Directors and Board of Commissioners;
2. Provide decisions needed to safeguard the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association of the Company;
3. Give approval to the Annual Report including ratification of the Financial Statements also supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and the Articles of Association of the Company;
4. Making decisions through a process that is transparent and fair also can be accounted for;
5. Implement Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Referring to the Company's Articles of Association, there are two types of GMS, namely:

1. Annual GMS.
Held annually, no later than June after the closing of the Company's books. In the Annual GMS, it discussed the Board of Directors reports on annual calculations, annual reports on the condition and the running of the Company, the plan to use profits and the amount of dividends paid, requests for appointment of Public Accountants and other matters for the benefit of the Company.
2. Extraordinary GMS (EGMS)
To be held if it is deemed to be necessary by the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners and/ or Shareholders. The summoning and organization of the EGMS is done through a written invitation by informing the agenda of the discussion.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE GMS

GMS as the highest institution in Pelindo 1, has an authority which not given to the Board of Commissioners or Directors within the limits specified in the Articles of Association and the applicable laws. The authority includes to requesting for accountability of the Board of Commissioners and Directors to be regarding to the management of Pelindo 1, amending the articles of association, appointing and dismissing Directors and Members of the Board of Commissioners, deciding on the distribution of duties and authorities among Directors and others..

RUPS PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2018

RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 6, Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Jalannya RUPS Tahunan didahului dengan penyampaian laporan dan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018 oleh Direksi dan tanggapan oleh Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Agenda RUPS

- a. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Konsolidasi serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018.
- b. Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.
- c. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018.
- d. Persetujuan Penyesuaian Penetapan Nilai dan Jangka Waktu Kerjasama yang Menjadi Kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-Tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi Dengan Nilai Maksimum 10% dari Masing-Masing Item Investasi.
- f. Persetujuan Pengagunaan Aset Perseroan dalam Rangka Memperoleh Sumber Pendanaan (Refinancing) Dari Perbankan Untuk Biaya Investasi.

2. Keputusan RUPS

- a. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Konsolidasi serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Pendapatan Usaha/ Operating revenues	:	3.451.239 juta/ million
Total Aset/ Total Assets	:	10.156.395 juta/ million
Total Investasi/ Total Investment	:	6.512.500 juta/ million
Dana Tersedia Kemitraan/ Partnership Available Funds	:	18.468 juta/ million
Penggunaan Dana kemitraan/ Utilization of Partnership Funds	:	18.468 juta/ million
Dana Tersedia Bina Lingkungan/ Available Funds for Community Development	:	14.640 juta/ million
Penggunaan Dana Bina Lingkungan/ Utilization of Community Development Funds	:	14.640 juta/ million

GMS APPROVAL OF THE 2018 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET

Annual GMS for Ratification of the 2018 Company's Work Plan and Budget was held on Tuesday January 23, 2018 At 11.00 until at 12.00 (West Indonesia Time) located at the 6th Floor Meeting Room, Ministry of SOE Building, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Central Jakarta. The course of the Annual GMS is preceded by the submission of reports and explanations regarding the 2018 Corporate Work Plan and Budget and the 2018 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program by the Board of Directors and responses by the Board of Commissioners, with details as follows:

1. GMS Agenda

- a. Approval and Ratification of the Consolidated Corporate Work Plan and Budget and the 2018 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program.
- b. Approval and Ratification of Key Performance Indicators for the Directors and Board of Commissioners of 2018.
- c. Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of the Soundness Level of The Company in 2018.
- d. Approval of Adjustment of Value Determination and Period of Cooperation which become the Authority of Directors, Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders.
- e. Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Provide Approval If There Are Actions That Resulting to Changes in Investment Budget Allocation with a Maximum Value of 10% from Each Investment Item.
- f. Approval of Collateral Assets of the Company in Order to Obtain a Refinancing from Banks for Investment Costs.

2. GMS decision

- a. Approved and Ratified the Consolidated Company Work Plan as well as the 2018 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program with the following points:
- b. Determining the 2018 Key Performance Indicators

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- b. Menetapkan Key Performance Indicators Tahun 2018 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018, sebagai berikut:

which contained in the Management Contract signed by the Shareholders, Directors and Board of Commissioners.

- c. Determining the Operational Aspect Indicators of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for Calculation of the Soundness Level of The Company in 2018, as follows:

No	Indikator/ Indicator	Bobot weight
1.	Waiting Time for Pilot (jam)/ Waiting Time for Pilot (hourly)	7 %
2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas (%) Level of Effectiveness of Container Moorings (%)	7 %
3.	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas (B/S/H) Productivity of Loading And Unloading Containers (B/S/H)	7 %
4.	Produktivitas Bongkar Muar Curah Kering (T/G/H) Dry Bulk Load Unloading Productivity (T/G/H)	7 %
5.	Yard Occupancy Ratio Petikemas (%) ContainerYard Occupancy Ratio (%)	7 %
Jumlah Bobot		35 %

- d. Menyetujui Penetapan Nilai dan Jangka Waktu Kerjasama yang Menjadi Kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:

- d. Approving the Determination of Value and Duration of Cooperation which become the Authority of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as follows:

Party	Authority	
	Value	Duration
Direksi Board of Directors	s.d. Rp 25 Miliar Up to IDR 25 Billion	s.d 5 tahun Up to 5 years
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Di atas Rp25 Miliar s.d. Rp100 Miliar Above IDR25 Billion up to IDR100 Billion	Di atas 5 tahun s.d. 10 tahun Above 5 years up to 10 years
RUPS GMS	Di atas Rp100 Miliar Above IDR100 Billion	Di atas 10 tahun Above 10 years

- e. Menyetujui Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-Tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi Dengan Nilai Maksimum 10% dari Masing-Masing Item Investasi dan tidak merubah program/item investasi serta tidak melebihi total nilai investasi.
- f. Menyetujui Pengagungan Aset Perseroan yang dibiayai dalam Rangka Memperoleh Sumber Pendanaan (Refinancing) dari Perbankan atau Lembaga Keuangan Untuk Biaya Investasi.

- e. Approving Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Give Approval if there is/are action(s) that result in changes in the allocation of investment budgets with maximum value of 10% from each investment item and does not change the program / investment item and does not exceed the total investment value.
- f. Approving the Collection of Company Assets which funded in order to Obtaining Source of Refinancing from Banks or Financial Institutions for Investment Costs.

RUPS PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

RUPS Tahunan untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Pukul 09.00 WIB s.d 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 21, Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Jalannya RUPS Tahunan didahului dengan penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2017 yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa agenda oleh Direksi dan ditanggapi oleh Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Agenda RUPS

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016 dengan Jumlah Emisi Rp1 Triliun, serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2017.
- c. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
- d. Penetapan tantiem tahun buku 2017, gaji, honorarium dan tunjangan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

2. Keputusan RUPS

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016 dengan Jumlah Emisi Rp1 Triliun, serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - Menyetujui laporan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagai mana

GMS APPROVAL OF 2017 FINANCIAL STATEMENTS

The Annual GMS for the Approval of the Financial Accountability Report of 2018 Fiscal Year was held on Tuesday April 3, 2018 At 09:00 West Indonesia Time until 10:00 West Indonesia Time at the 21st Floor Meeting Room, Ministry of SOE Building Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Central Jakarta. The course of the Annual GMS is preceded by the submission of the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements in 2017, followed by the submission of several agendas by Directors and responded by the Board of Commissioners, with the following details:

1. GMS Agenda

- a. Approval of the Annual Report of 2017 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Implementation Report and ratification of the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31, 2017, including the submission of the 2016 Realization of Utilization of Funds from Obligation Public Offering with the Emissions Amount of IDR1 Trillion in, and Ratification of the Partnership and Community Development Program Report of 2017 Fiscal Year.
- b. Determination of the utilization of net income for the 2017 Financial Year.
- c. Determination of the Public Accountant Office to audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2018 Fiscal Year and Financial Report of the Partnership and Community Development Program of 2018 Fiscal Year.
- d. Determination of the 2017 fiscal year tantiem, salary, honorarium and other facilities allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 Fiscal Year.

2. GMS decisions

- a. Approval of the Annual Report of 2017 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Implementation Report and ratification of the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31, 2017, including the submission of the 2016 Realization of Utilization of Funds Obligation Public Offering with the Emissions Amount of IDR1 Trillion in, and Ratification of the Partnership and Community Development Program Report for 2017 Fiscal Year with the following details:
 - Approving the report and supervisory duties of the Board of Commissioners and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal Year audited by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono with the opinion "reasonable in all material respects" as Independent Auditor's Report Number: R-091/

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Laporan Auditor Independen Nomor: R-091/
Pelindol-adf/SHT01II/2018 tanggal 12 februari
2018 dengan rincian sebagai berikut:

Pelindol- adf/SHT01II/2018 dated 12 February
2018 with the following details:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Juta Rp) Consolidated Financial Position Report (Million Rp)	
Aset Lancar Current assets	2.209.548
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	6.297.595
Total Aset Total Assets	8.507.143
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	1.823.138
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	1.779.782
Ekuitas Equity	4.904.224
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	8.507.143
Laporan Laba Rugi Konsolidasian (Juta Rp) Consolidated Income Statement (Million Rp)	
Pendapatan Operasi Operational Income	2.751.107
Beban Operasi Operational Expenses	1.705.546
Pendapatan Non Usaha Bersih Non-Business Net Income	125.333
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	1.170.893
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	1.067.401
Laba (Rugi) Bersih Net profit (Loss)	805.145
Laba yang didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit distributed to Owners of the Parent Entity	803.621
Laba Kepentingan Non Pengendalian Non-controlling Benefit Interest	1.524

- Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai mana Laporan Auditor Independen Nomor: R-086/Pelindol-adf/SHT01II/2018 tanggal 12 februari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Ratifying the Financial Report for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for 2017 which ended on December 31, 2017 that was audited by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono as the Independent Auditor's Report Number: R-086/Pelindol-adf/SHT01II/2018 dated February 12, 2018 with details as follows:

Laporan Posisi Keuangan PKBL (Ribuan Rp) Financial Position Report of PCDB (Thousand Rp)	
Aset Lancar Current assets	36.762.165
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	16.225
Total Aset Total Assets	36.778.389
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	61.462
Aset Bersih Net Assets	36.716.927
Total Liabilitas dan Aset Bersih Total Net Liabilities and Asset	36.778.389

Laporan Aktivitas PKBL (Ribuan Rp) Activity Report of Partnership and Community Development Program (Thousand Rp)	
Alokasi Dana Dari BUMN Pembina Fund Allocation From State-Owned Trustees	11.700.000
Pendapatan Income	2.588.915
Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Distribution, Expenses and Spending	18.568.964
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Increase (decrease) in Net Assets	4.280.049
Aset Bersih Awal Tahun Net Assets Early in the Year	40.996.976
Aset Bersih Akhir Tahun End of Year Net Assets	36.716.927

- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016 dengan Jumlah Emisi Rp1.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- /Receiving the Accountability Report for the Utilization of Funds from the 2016 Public Bonds with an Emission Amount of IDR1,000,000,000,000 with the following details:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016 (Rp) Utilization of Funds from the 2016 Public Bonds (Rp)	
Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Infrastructure Development and Construction	540.000.000.000
Peralatan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Equipment	421.402.260.380
Bina Usaha Business Development	3.000.000.000
Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Information Technology Infrastructure Development	35.597.539.620
Total Pengembangan Dana Total Development Fund	1.000.000.000.000

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Dengan telah disetujuinya laporan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta disahkannya Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun 2017
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasi Tahun Buku 2017 sebesar Rp803.620.909.175 dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar 30% dari laba bersih atau Rp241.086.272.753 sebagai dividen.
 - Sebesar 70% dari laba bersih atau Rp562.534.636.422 sebagai cadangan.
- c. Penetapan Kantor Akuntan Publik
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 dan laporan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2018 dengan putusan sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris diminta untuk melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2018.
 - Seleksi Dewan Komisaris agar disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat keputusan.
- d. Penetapan tantiem tahun buku 2017, gaji, honorarium dan tunjangan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- With the approval of the report and supervisory duties of the Board of Commissioners and ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal Year and the ratification of the Financial Report for the Implementation of the Partnership Program and Community Development Program for the year which ended on December 31, 2017, the GMS provides full repayment and liability (volledig acquit et de charge) to all members of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out during the financial year on December 31, 2017.
- b. Establishment of the Utilization of Net Profit for 2017
Establish the Use of 2017 Consolidated Net Profit of IDR 803,620,909,175 with the following details:
 - At the number of 30% of net income or IDR 241,086,272,753 as dividends.
 - As the number of 70% of net income or IDR 562,534,636,422 as reserves.
- c. Appointing the Public Accountant Office
Appointing the Public Accountant Office to audit the Company's consolidated financial statements for the 2018 fiscal year and reports on partnership programs and community development for 2018 fiscal year with the following decisions:
 - The Board of Commissioners were asked to select the Public Accounting Firm which will audit the company's financial statements and the implementation of partnership programs and environmental development of 2018 fiscal year.
 - Selection of the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) to attain decision.
- d. Establishment of the 2017 fiscal year tantiem, salary, honorarium and other facilities allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 Fiscal Year is stipulated in a separate decision

RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Pelindo 1. Selama Tahun 2018 Pelindo 1 tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 dengan beberapa arahan RUPS yang telah ditindaklanjuti Pelindo 1, sebagai berikut :

EXTRAORDINARY GMS IN 2018

The Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs for the benefit of Pelindo 1. During 2018 Pelindo 1 did not hold any Extraordinary GMS.

FOLLOW-UP ACTIONS OF SHAREHOLDERS

In 2018 a GMS of the 2018 Fiscal Year Company Work Plan and Budget (RKAP) was held with several GMS directives which had been followed up by Pelindo 1, as follows :

No	Arahan RUPS/ GMS directives	Realisasi/ Realization
1.	<p>Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan cascading ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan cascading dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>The 2018 Corporate Budget Work Plan that has been ratified to be specified as a target per month and cascaded to all levels of the company. The Board of Commissioners must report the detailed results and the said cascading to the Shareholders in the first quarter of 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>KAP 2018 yang telah disahkan telah dirinci menjadi target per bulan dan didistribusikan kepada seluruh jajaran perusahaan (Cabang maupun Bidang di Kantor Pusat) melalui sistem SAP yang telah diimplementasikan. Setiap General Manajer Cabang maupun Senior Manajer Bidang Kantor Pusat maupun PIC yang ditunjuk dapat mengakses dan memonitor secara langsung melalui user SAP yang dimiliki masing-masing.</p> <p>Hal ini telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Triwulan I 2018.</p> <p>The approved 2018 Public Accounting Firm has been specified as a target per month and distributed to all levels of the company (Branches and Fields at Head Office) through the SAP system that has been implemented. Each Branch General Manager and Head Office Senior Manager and appointed PIC can access and monitor directly through each SAP user owned.</p> <p>This has been reported to the Board of Commissioners and Shareholders in the First Quarter of 2018.</p>
2.	<p>Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (cost reduction program) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan.</p> <p>To make an effort to increase income and cost reduction programs in all business lines in order to realize a more effective and efficient corporate management, and net income is the minimum target that must be achieved by all levels of the company management.</p>	<p>Upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya telah dilakukan dengan ketentuan setiap perilaku anggaran meliputi pergeseran anggaran, switching anggaran dilaksanakan dengan tujuan pencapaian target laba yang telah ditentukan dengan melakukan analisa terhadap realisasi pencapaian pendapatan</p> <p>Efforts to increase revenue and control costs have been carried out with the provisions of each budgetary behavior including shifting budgets, switching budgets carried out with the aim of achieving predetermined profit targets by analyzing the realization of income achievement</p>
3.	<p>Memonitor dan meningkatkan implementasi standarisasi Terminal Operating System (TOS) pada terminal petikemas di seluruh cabang.</p> <p>To monitor and improve the implementation of standardized Terminal Operating System (TOS) at container terminals in all branches.</p>	<p>a. Go Live Aplikasi Front End (iGMT) pada 3 Cabang Pelabuhan Dumai, Malahayati dan Sibolga.</p> <p>b. Belum dilakukannya SIT dan UAT pada Terminal Pekanbaru dan Malahayati.</p> <p>c. Adanya hasil revidu dan saran dari BPKP kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar melakukan kajian ulang apakah rencana penerapan aplikasi Front – End BICT dan TPKDB lebih menguntungkan bagi perusahaan</p> <p>a. Front End Go Live Application (iGMT) in 3 Port Branches; Dumai, Malahayati and Sibolga.</p> <p>b. Has not done SIT and UAT yet at Pekanbaru and Malahayati Terminals.</p> <p>c. There is a result of the review and suggestions from BPKP to the Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to review whether the plans for implementing the Front-End Belawan International Container Terminal and Belawan Domestic Container Terminal applications are more profitable for the company.</p>
4.	<p>Seluruh layanan kepelabuhanan sudah harus menerapkan ICT (Information and communication technology) dalam rangka memenuhi SLA/SLG yang telah disepakati. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan atas hal tersebut dan melaporkan hasil review secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>All port services should have implemented the ICT (Information and communication technology) in order to fulfill the agreed SLA/ SLG. The Board of Commissioners should supervise this matter and report the results of the review periodically to the Shareholders.</p>	<p>Go live pada 3 Cabang sesuai dengan Fase pengembangan sistem Aplikasi Front End. Readiness dan pemilihan teknologi pada BICT dan TPKDB belum dilaksanakan dan dalam pertimbangan atas saran dari BPKP.</p> <p>Go live on 3 Branches in accordance with the Front End Application system development phase. Readiness and technology selection at the Belawan International Container Terminal and Belawan Domestic Container Terminal have not been implemented and are in consideration of the advice of the BPKP.</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Arahan RUPS/ GMS directives	Realisasi/ Realization
5.	<p>Melakukan peninjauan dan menindaklanjuti dengan kerjasama dan sinergi dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan asset, pengembangan SDM, joint procurement, serta pemanfaatan dan pengembangan IT.</p> <p>Exploring and following up with cooperation and synergy with Port SOE and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HR development, joint procurement, and IT utilization and development.</p>	<p>Telah dilaksanakan sinergi BUMN dalam bentuk kerjasama pemanfaatan tanah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cabang Pelabuhan Belawan, yaitu dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Perkebunan Nusantara III dan IV (Persero), PT Sucofindo, PT KAI (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja serta PT Perusahaan Gas Negara. Cabang Pelabuhan Dumai, yaitu dengan PT Hakastoon (Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) dan PT PGN. Cabang Pelabuhan Sibolga, yaitu dengan PT Pertamina (Persero). <p>The synergy of SOEs has been implemented in the form of cooperation in land use, among others are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Branch of Belawan Port, namely with PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Perkebunan Nusantara III dan IV (Persero), PT Sucofindo, PT KAI (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja serta PT Perusahaan Gas Negara; Branch of Dumai Port, namely with PT Hakastoon (Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) dan PT PGN; Branch of Sibolga Port, namely with PT Pertamina (Persero).
6.	<p>Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, segera menyelesaikan Paket Kebijakan Ekonomi terkait Kepelabuhanan dan melaporkan secara periodik kepada Kementerian BUMN. Khusus untuk kebijakan Pemerintah tentang logistik, Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) agar saling berkoordinasi untuk segera menentukan pricing management strategy.</p> <p>Directors under the supervision of the Board of Commissioners, immediately complete the Economic Policy Package related to Port and reports periodically to the Ministry of BUMN. Specifically for Government policy regarding logistics, Directors of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) to coordinate with each other to immediately determine pricing management strategy.</p>	<p>Belum ada pertemuan lebih lanjut antara Pelindo 1 sd IV untuk pembahasan lebih lanjut.</p> <p>There has not been any further meeting between Pelindo 1 to IV for further discussion.</p>
7.	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>Directors to improve the development and supervision of the performance of subsidiaries and joint ventures, especially for those which make a significant contribution to the company's performance on a consolidated basis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Draft Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Tata Kelola Tata Kelola Pembinaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Draft Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian Pada Anak Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). <ol style="list-style-type: none"> Draft of Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) concerning Corporate Governance Guidance for Subsidiaries in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); Draft of Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) concerning Organizational Governance and Staffing in Subsidiaries in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

No	Arahan RUPS/ GMS directives	Realisasi/ Realization
8.	<p>Direksi agar memastikan Program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi Corporate Human Capital Development (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karir dan talent management untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan best practice.</p> <p>Directors to ensure that the HR management and development program is carried out comprehensively by all functions of Corporate Human Capital Development (CHCD). Implementation of HR development policies, career paths and talent management to support the achievement of corporate targets in the short or long term to be improved, also to evaluate of HR policies in order to always in accordance with best practice.</p>	<p>Untuk mendukung pembangunan aplikasi system human capital I Pelindo, telah dilakukan Inventarisasi seluruh SK terkait people development yang akan dievaluasi dan disesuaikan dengan Struktur organisasi baru serta RJPP Pelindo 1.</p> <p>To support the development of the Pelindo 1 human capital system application, an Inventory of all Decree related to people development will be evaluated and adjusted to the new organizational structure as well as the Pelindo 1 Company's Long Term Plan.</p>
9.	<p>Terkait PKBL diminta untuk:</p> <p>a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id.</p> <p>b. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/ 07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan peraturan Menteri BUMN dimaksud.</p> <p>Related to PKBL, asked to:</p> <p>a. Deliver periodic reports timely as stipulated in the Minister of BUMN Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 dated 03-07-2015 (third of July two thousand fifteen) regarding PKBL BUMN through PKBL Portal dengan ala with the address http://pkbl.bumn.go.id;</p> <p>b. th the issuance of the Minister of SOE Regulation Number: PER-02/MBU/ 07/2017 regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of BUMN Number: PER09/MBU/07/2015 regarding PKBL BUMN, therefore, the Board of Directors are asked to determine the SOP for PKBL implementation which has been adjusted to Ministerial regulations Said BUMN</p>	<p>a. Laporan berkala melalui Portal PKBL disampaikan tepat waktu.</p> <p>b. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN SOP pelaksanaan PKBL telah disesuaikan.</p> <p>a. Periodic reports through Portal of the Partnership and Environmental Development Program are delivered timely.</p> <p>b. With the issuance of the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER09/MBU/07/2015 regarding SOE's Partnership and Environmental Development Program, SOP of the Partnership and Environmental Development Program implementation has been adjusted.</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Arahan RUPS/ GMS directives	Realisasi/ Realization
10.	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematika yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan dan kesiapan talent untuk Sustainable Growth dari BUMN, diminta kepada Direksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan talent management system sekaligus menyiapkan talent perusahaan menjadi talent pool di Kementerian BUMN. Menyediakan talent pool di setiap minimal sebanyak 20% (dua puluh persen). Menyiapkan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 (tiga) suksesor per posisi BOD. <p>In order to manage talent management functions with better systematics, as well as to ensure the availability and readiness of talents for Sustainable Growth from SOE, the Board of Directors are asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Organize the talent management system as well as prepare company talents to become a talent pool at the Ministry of SOE. Provide talent pool at a minimum of 20% (twenty percent). Prepare candidates for Board of Directors from BOD-1 with 3 (three) successors per BOD position. 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan tahapan proses pembangunan Integrated Talent Management System serta evaluasi terhadap SK pengembangan Talent yang kedepannya akan terintegrasi dengan Talent Pool BUMN. Data talent pool telah dimasukkan kedalam system talent kementerian BUMN sebesar 29.79 %. Telah ada data talent calon suksesi direksi. <ol style="list-style-type: none"> The stages of the development process of the Integrated Talent Management System have been implemented and evaluation of the Talent Development Decree, which in the future will be integrated with the SOE Talent Pool. The talent pool data has been input into the talent system of the ministry of SOE by 29.79%. There has been talent data for prospective directors' succession
11.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, auditor independent dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Board of Directors shall pay attention to the findings and recommendations from the Audit Board (BPK), independent auditors and the company's Internal Monitoring Unit that have not been resolved until 2017 (two thousand and seventeen) and make this a target for completion in 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>Untuk penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi BPK-RI belum dapat diselesaikan seluruhnya (100,00%), masih menunggu undangan pembahasan lebih lanjut oleh BPK yang dipending bln Desember 2018 lalu. sedang untuk penyelesaian tindak lanjut temuan investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Utara diperkirakan dapat diselesaikan 90,00%. Untuk penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal (SPI) Tahun 2006 dapat diselesaikan 100,00%, temuan tahun 2017 apat diselesaikan 97,5%, dan temuan tahun 2018 diperkirakan dapat diselesaikan 85,00%.</p> <p>For the completion of the follow-up and recommendations of the Audit Board of Republic of Indonesia can not yet been completed (100.00%), still awaiting an invitation for further discussion by the Audit Board that was posted last December 2018. while for the completion of follow-up investigative findings BPKP Representative of North Sumatra is estimated to be completed 90.00%. For the completion of the follow-up of the internal audit findings (SPI) in 2006, it can be completed 100.00%, the findings in 2017 must be resolved 97.5%, and the findings in 2018 are estimated to be completed 85.00%.</p>
12.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: KU-66/005/DK/PP.I/1/2018 tanggal 05-01-2018.</p> <p>Board of Directors shall pay attention to and follow up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners in implementing the Company's Budget Work Plan for 2018 (two thousand and eighteen) as submitted by letter Number</p>	<p>Terhadap Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: KU-66/005/DK/PP.I/1/2018 tanggal 05-01-2018</p> <p>Towards the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners in implementing the Company's Budget Work Plan in 2018 as submitted by letter Number: KU-66/005 / DK / PPI / 1 / 2018 dated 05-01-2018</p>

No	Arahan RUPS/ GMS directives	Realisasi/ Realization
13.	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Books of Company Work Plan and Budget, Partnership and Environment Develeopment's Work Plan and Budget, Board of Commissioners' Work Plan and Budget and Directors and Board of Commissioners KPI (Key Performance Indicators) Work Plan and Budget in 2018 which have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are an integral part of this Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) and become a guideline for the Board of Directors in implementing the work programs and performance targets in 2018 (two thousand and eighteen) as well as a means of monitoring and supervising for the Board of Commissioners.</p>	<p>Menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya Become a guideline in its implementation</p>

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pelindo 1 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

INFORMATION OF THE MAIN AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pelindo 1 is a company engaged in the port sector which is a State-Owned Enterprise where all of its shares are owned by the Republic of Indonesia.



POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

WORK RELATIONSHIP PATTERN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Pelindo 1. Dengan demikian diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN, Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapana Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN dan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU Tanggal 19 November 2015 tentang Panduan Good Corporate Gocernance, bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun board charter dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Fungsi Dewan Komisaris.
2. Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.
3. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan.
4. Etika Jabatan.
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Wewenang Dewan Komisaris.
7. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi pada Anak Perusahaan.
8. Tugas dalam Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
9. Tugas dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.
10. Hak Dewan Komisaris.
11. Rapat Dewan Komisaris.
12. Hubungan Kerjasama Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
14. Komite-Komite Dewan Komisaris,
15. Sekretaris Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners and Directors are guided by the Board of Commissioners and Directors Work Guidelines (Board Manual). The Board Manual contains instructions on the working procedures of the Board of Commissioners and Directors and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand and can be implemented consistently, can be a reference for the Board of Commissioners and Directors in implementing their respective tasks to achieve Pelindo 1 Vision and Mission. Thus, high standards of work are expected to be aligned with the principles of GCG.

Based on State Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE, Decree of Secretary of the Ministry of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Implementation of Good Corporate Governance in SOE and Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI-15.TU dated November 19, 2015 concerning Good Corporate Governance Guidelines, that the Board of Commissioners and Directors have compiled charters the details are as follows:

Board of Commissioners

- Function of the Board of Commissioners.
- Qualifications and Composition of the Board of Commissioners.
- Knowledge Introduction and Deepening Program.
- Position Ethics.
- Duties and Obligations of the Board of Commissioners.
- Authority of the Board of Commissioners.
- Duties, Authorities and Obligations of Board of Directors in Subsidiaries.
- Duties in the Management of Subsidiaries/ Joint Ventures.
- Duties in the Selection of Candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary/ Joint Venture Company.
- Rights of the Board of Commissioners.
- Meeting of the Board of Commissioners.
- Cooperation Relations between the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Evaluation of the Board of Commissioners' Performance.
- Board of Commissioners Committees,
- Secretary of the Board of Commissioners.



Dewan Direksi

1. Fungsi Direksi.
2. Kualifikasi dan Komposisi Direksi.
3. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan.
4. Independensi Direksi
5. Etika Jabatan.
6. Tugas dan Kewajiban Direksi.
7. Wewenang Direksi.
8. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi pada Anak Perusahaan.
9. Hak-hak Direksi
10. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
11. Pembagian Tugas Direksi
12. Rapat Direksi
13. Sekretaris Perusahaan
14. Satuan Pengawasan Intern
15. Penggunaan Saran Profesional

Board of Directors

- Functions of Board of Directors.
Qualifications and Composition of Board of Directors.
Knowledge Introduction and Deepening Program.
Independence of the Board of Directors
Position Ethics.
Duties and Obligations of the Board of Directors.
Authority of the Board of Board of Directors.
Duties, Authorities and Obligations of Board of Directors in Subsidiaries.
Rights of Board of Directors
Establishment of Company Management Policies by the Board of Directors.
Distribution of Tasks of the Board of Directors
Board of Directors' Meetings
Corporate Secretary
Internal Monitoring Unit
Use of professional advice

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Pelindo 1 dan apabila dinilai perlu, dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Pelindo 1.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Utama Nomor KP 04 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai berikut:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Tugas/ Duty
1.	Refly Harun	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Head of the Nomination and Remuneration Committee
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Pemantau Manajemen Resiko Head of the Risk Management Monitoring Committee
3.	Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Deputy of the Nomination and Remuneration Committee
4.	Lukita Dinarsyah	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Audit Deputy of the Audit Committee
5.	Heryadi	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan atau pun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disusun Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

The Board of Commissioners is the Organ of the Company whose in charge to conduct general and/ or special supervision in accordance with the Articles of Association and provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company. The Board of Commissioners carries out the function of monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) practices implemented by Pelindo 1 and if it is deemed necessary, it can make adjustments in accordance with the needs of Pelindo 1.

DISTRIBUTION OF TASKS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners determines the distribution of duties and responsibilities of each Member of the Board of Commissioners based on the Decree of the President Commissioner Number KP 04 Year 2018 dated 24 September 2018 concerning the Distribution of Tasks of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as follows:

DESCRIPTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RESPONSIBILITIES

Regarding the implementation of the supervisory function, the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

- Supervise management policies, the course of management in general, both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, as well as the Articles of Association and General Meeting of Shareholders' decisions, as well as applicable laws, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
- Research and review the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the annual report. If the Board of Commissioners is not willing to sign the Annual Report,

Jika Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan harus disertai dengan alasannya.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi, serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
 4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
 6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan memberikan pendapat dan saran kepada Rapat RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan tahunan, apabila diminta.
 8. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS.
 9. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan komisaris.
 10. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
 11. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan.
 12. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
 13. Melakukan Self Assessment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik
 14. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance.
 15. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Pelindo 1.
 16. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta independensi dari Auditor Internal.
 - b. Memberikan usulan mengenai penunjukan Auditor eksternal kepada RUPS.
 - c. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi, serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.
 - d. Memastikan Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan
- they should provide the reasons.
3. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff regarding the preparation of the company's vision, mission, and strategic plans for both the short and long term.
 4. Research and review and sign the Company's Long Term Work Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
 5. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget.
 6. Keep abreast of developments of the Company, provides opinions and suggestions to the GMS Meeting regarding issues that are considered important for the management of the Company.
 7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested.
 8. Propose the appointment of the Public Accountant Office to the GMS.
 9. Research and review reports from committees under the Board of Commissioners.
 10. Attend work/ coordination meetings with the Board of Directors and all staff.
 11. Make efforts to ensure that the Board of Directors and the staff comply with statutory provisions and other regulations in managing the Company.
 12. Prepare the Board of Commissioners Work Plan for the current year period.
 13. Conduct a Self Assessment on the performance of the Board of Commissioners periodically.
 14. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices.
 15. Conduct regular evaluations and provide recommendations on risks and the application of risk management in Pelindo 1.
 16. The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has the obligation to:
 - a. Assess the effectiveness of the internal control system, by assessing the competence and the number of resources, the scope of duties and authorities, and the independence of the Internal Auditor.
 - b. Give proposals regarding the appointment of an external Auditor to the GMS.
 - c. Assess the effectiveness of the implementation of External Auditor's duties, by assessing the competence, independence, and scope of work of the External Auditor.
 - d. Ensure the External Auditor and Audit Committee have access to information about the Company that

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

tugasnya.

17. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
18. Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan
19. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

are needed to carry out their duties.

17. The Board of Commissioners is obliged to monitor in order that the Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements to other parties, in accordance with the laws that apply in a timely, accurate, clear and objective manner.
18. The Board of Commissioners is obliged to maintain the confidentiality of the Company information.
19. The Board of Commissioners is obliged to propose a remuneration system for the Board of Commissioners and Directors as well as a performance evaluation system for the Board of Commissioners and Board of Directors.

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ATAS USULAN DIREKSI

Selama tahun 2018 Direksi menyampaikan 13 usulan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan persetujuan, dengan rincian sebagai berikut:

During 2018 the Directors submitted 13 proposals to the Board of Commissioners for approval, with details as follows:

No	Usulan Direksi Board of Director's Proposal	Persetujuan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Approval
1.	Nomor: KU.61/8/4/PI-17 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Dumai Number: KU.61/8/4/PI-17 Dated October 18, 2017 regarding the Proposal for the Deletion of Fixed Assets at the Branch of Dumai Port	Nomor: US.15/400/DK/PP.I/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Dumai Number: US.15/400/DK/PP.I/XII/2017 dated December 12, 2017 regarding the Board of Commissioners' Response to the Proposed Abolition of the Fixed Assets of the Branch of Dumai Port
2.	Nomor PR.02/3/1/PI-17.TU tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Modal Disetor pada Anak Perusahaan PT Prima Pengembangan Kawasan Number: PR.02/3/1/PI-17.TU dated December 20, 2017 regarding the Application for Recommendation of Paid Up Capital in Subsidiaries of PT Prima Pengembangan Kawasan	Nomor: PR.60/003/DK/PP.I/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penambahan Modal Disetor pada PT Prima Pengembangan Kawasan (Anak Perusahaan) Number: PR.60/003/DK/PP.I/I/2018 dated January 2, 2018 regarding the Recommendations for Paid Up Capital in PT Prima Pengembangan Kawasan (Subsidiary)
3.	Nomor: US.15/1/18/PI-18 tanggal 21 Februari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan SOP Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: US.15/1/18/PI-18 dated February 21, 2018 regarding the Recommendations for SOP Determination of Cooperation in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Nomor: US.15/030/DK/PP.I/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Persetujuan atas Sop Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: US.15/030/DK/PP.I/II/2018 dated February 22, 2018 regarding the Approval of the Cooperation Sop in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
4.	Nomor: PR.02/2/6/PI-18 tanggal 21 Februari 2018 perihal Rekomendasi Penggantian Direktur PT Prima Husada Cipta Medan (Anak Perusahaan) Number: PR.02/2/6/PI-18 dated February 21, 2018 regarding the Recommendations for Replacement of Directors in PT Prima Husada Cipta Medan (Subsidiary)	Nomor: PR.02/065/DK/PP.I/IV/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Rekomendasi Calon Direktur PT Prima Husada Cipta Medan (Anak Perusahaan) Number: PR.02/065/DK/PP.I/IV/2018 April 2, 2018 regarding the Recommendations for Prospective Directors in PT Prima Husada Cipta Medan (Subsidiary)

No	Usulan Direksi Board of Director's Proposal	Persetujuan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Approval
5.	<p>Nomor: KU.65/2/1/PI-18 tanggal 26 Maret 2018 perihal Persetujuan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Pelaksanaan Program PKBL dan BHUN Tahun 2017</p> <p>Number: KU.65/2/1/PI-18 dated March 26, 2018 regarding the Audit Agreement by the Public Accountant Office on the Implementation of 2017 Partnership and Environmental Development Program and BHUN Programs</p>	<p>Nomor: KU.65/067/DK/PP.I/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Audit atas Pelaksanaan Program-Program PKBL Tahun 2017</p> <p>Number: KU.65/067/DK/PP.I/IV/2018 dated April 4, 2018 regarding the Approval of Appointment of Public Accounting Firm to Conduct an Audit of the Implementation of 2017 Partnership and Environmental Development Programs</p>
6.	<p>Nomor US.15/2/16/PI.18 tanggal 5 April 2018 perihal Tindak Lanjut Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dengan PT Waruna Nusa Sentana</p> <p>Number: US.15/2/16/PI.18 dated April 5, 2018 regarding Follow-Up on Land Utilization Cooperation with PT Waruna Nusa Sentana</p>	<p>Nomor: US.51/091/DK/PP.I/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dengan PT Waruna Nusa Sentana di Cabang Belawan</p> <p>Number: US.51/091/DK/PP.I/V/2018 dated May 17, 2018 regarding the Response of the Board of Commissioners to the Application of Agreement on Cooperation in the Use of Land with PT Waruna Nusa Sentana at the Branch of Belawan</p>
7.	<p>Nomor: PR.02/6/8/PI-18 tanggal 8 Juni 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor pada Anak Perusahaan PT Prima Indonesia Logistik</p> <p>Number: PR.02/6/8/PI-dated June 8, 2018 regarding the Application of Recommendations to Increasing Authorized Capital and Issued/ Paid-up Capital in Subsidiaries of PT Prima Indonesia Logistik</p>	<p>Nomor PR.02/124/DK/PP.I/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Rekomendasi Peningkatan Modal Dasar dan Modal disetor pada PT Prima Indonesia Logistik (PT PIL)</p> <p>Number: PR.02/124/DK/PP.I/VII/2018 dated July 11, 2018 regarding the Recommendations to Increasing authorized capital and paid-up capital of PT Prima Indonesia Logistik (PT PIL)</p>
8.	<p>Nomor: KU.63/13/2/ PI-18 Tanggal 7 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan dan atau Rekomendasi untuk menerima Pinjaman/ Fasilitas Kredit Jangka Panjang dari Perbankan.</p> <p>Number: KU.63/13/2/ PI-18 dated September 7, 2018 regarding the Application of Approval and/ or Recommendation to receive Long-Term Loans/ Credit Facilities from Banks.</p>	<p>Nomor: PR.04/175/DK/PP.I/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Persetujuan untuk menerima pinjaman/fasilitas kredit Jangka Panjang dari Perbankan</p> <p>Number: PR.04/175/DK/PP.I/IX/2018 dated September 24, 2018 regarding the Approval to receive Long-term loans/ credit facilities from Banks</p>
9.	<p>Nomor PR.04/3/13/PI-18.TU tanggal 03 September 2018 perihal Permohonan Rekomendasi atas Revisi Investasi Tahun 2018.</p> <p>Number: PR.04/3/13/PI-18.TU dated September 3, 2018 regarding the Application of Recommendation on the Investment Revision of 2018.</p>	<p>Nomor: PR.04/176/DK/PP.I/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Rekomendasi atas Revisi Investasi tahun 2018</p> <p>Number: PR.04/176/DK/PP.I/IX/2018 dated September 24, 2018 concerning Recommendations for the Investment Revision in 2018</p>
10.	<p>Nomor KP.32/1/14/PI.18 tanggal 3 September 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Pengisian dan Pergantian Direktur Anak Perusahaan PT Pelindo 1 (Persero).</p> <p>Number: KP.32/1/14/PI.18 dated September 3, 2018 regarding the Application of Recommendation to Fill in and Change the Directors of the Subsidiary of PT Pelindo 1 (Persero).</p>	<p>Nomor: KP.32/211/DK/PP.I/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Penggantian Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan</p> <p>Number: KP.32/211/DK/PP.I/X/2018 dated October 22, 2018 regarding the Recommendations for Replacement of Directors and Commissioners of Subsidiaries</p>

No	Usulan Direksi Board of Director's Proposal	Persetujuan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Approval
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor PR.02/6/17/PI-18.TU tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Peningkatan Modal Disetor pada PT Prima Terminal Petikemas. - Nomor PR.02/6/18/PI-18.TU tanggal 28 September 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Peningkatan Modal Disetor pada PT Prima Multi Terminal - Number: PR.02/6/17/PI-18.TU dated September 28, 2018 regarding the Application of Recommendation to Increase Paid-in Capital of PT Prima Terminal Petikemas. - Number: PR.02/6/18/PI-18.TU dated September 28, 2018 concerning Application for Recommendation for Increased Paid-in Capital of PT Prima Multi Terminal 	<p>Nomor PR.02/221/DK/PP.I/X/2018 26 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor pada Anak perusahaan Number: PR.02/221/DK/PP.I/X/2018 dated October 26, 2018 regarding the Recommendations to Increasing authorized capital and paid-up capital in subsidiaries</p>
12.	<p>Nomor: PR.02/11/11/PI-18 tanggal 19 November 2018 perihal Persetujuan Usulan Perubahan Struktur Organisasi Number: PR.02/11/11/PI-18 dated November 19, 2018 regarding the Approval of Proposed Changes in Organizational Structure</p>	<p>Nomor: PR.02/291/DK/PP.I/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Number: PR.02/291/DK/PP.I/XII/2018 dated December 3, 2018 regarding the Approval of Changes to Organizational Structure</p>
13.	<p>Nomor: UM.57/8/23/PI-18 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL Tahun Buku 2018 Number: UM.57/8/23/PI-18 dated October 2, 2018 regarding the Approval of the Establishment of a Public Accounting Firm for the implementation of the General Audit of Consolidated and Subsidiary Financial Statements and the Report of Partnership and Environmental Development Programs for the 2018 Fiscal Year</p>	<p>Nomor: KU.66/260/DK/PP.I/XI/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun Buku 2018 Number: KU.66/260/DK/PP.I/XI/2018 dated November 2, 2018 regarding the Establishment of a Public Accounting Firm to Audit Consolidated Financial Statements and Subsidiaries as well as the Report of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Partnership and Environmental Development Programs for 2018 Fiscal Year</p>

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU Tanggal 19 November 2015 tentang Panduan Good Corporate Governance didalamnya memuat tentang kriteria Komisaris Independen sebagai berikut:

1. Paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afliasninya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
4. Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afliasinya.
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Koomisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup perusahaan.

INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris Independen melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak ada benturan kepentingan (Conflict of interest) antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, yang semata-mata bekerja sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Criteria of Determination for Independent Commissioners Based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI-15. TU dated November 19, 2015, regarding the Good Corporate Governance Guidance, it contains the following criteria for Independent Commissioners:

1. At least 20% are members of the Independent Board of Commissioners determined in their assignation decisions.
2. Not serving as a Director in a company affiliated with the Company.
3. Not working at the Company or its affiliates in the past three years.
4. Does not have financial attachments, directly or indirectly with companies or companies that provide services and products to the Company and its affiliates.
5. Free from interests and business activities or other relationships that can hinder or disrupt the ability of the Commissioner who comes from outside the Company to act or think freely in the scope of the company.

INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The current Independent Commissioner has no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors and controlling shareholders. The Independent Commissioner does not have financial relations with the controlling shareholders and the Independent Commissioner does not have financial relations with fellow members of the Board of Commissioners and Directors.

Independent Commissioners carry out their duties and obligations without Conflict of Interest between the interests of the company and personal, which solely work in accordance with the interests of the company.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

MASYHUR USMAN

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners



Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 September 1971, dengan tingkat pendidikan Strata (S1) Manajemen di Universitas 45 Ujung Pandang pada tahun 1996.

Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sejak 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KP 07 Tahun 2016. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Sarana Angkutan Pariwisata II (2006-2010), Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIb (2010-2014), Kepala Sub Bidang Restrukturisasi BUMN Ia (2014-2015), Sekretaris Dewan Komisaris PT ASDP (2003-2013), dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara I (2013-2016). Saat ini, selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Menyusun Rancangan Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen baik triwulanan maupun tahunan.
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris lainnya. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Born in Ujung Pandang on September 14, 1971, with education level of Strata (S1) of Management at the University of 45 Ujung Pandang in 1996.

Appointed as Secretary of the Board of Commissioners of the Company since August 1, 2016 based on the Decree of the Board of Commissioners Number: KP 07 of 2016. Previously served as Head of Sub Division of Governance and Management of Tourism Transport Business Risk II (2006-2010), Head of Sub Division of Asset and Synergy Utilization IIb (2010-2014), Head of Sub Division of SOE Restructuring Ia (2014-2015), Secretary of the Board of Commissioners of PT ASDP (2003-2013), and Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara I (2013-2016). Currently, besides serving as Secretary of the Board of Commissioners of the Company, also serves as Head of Sub Division of Utilization of Minority States Portfolio II in the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Secretary of the Board of Commissioners is in charge with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:

1. Prepare meetings, including the briefing sheet of the Board of Commissioners;
2. Make minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Administer the documents of the Board of Commissioners, as well as incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Compile the Draft of Work Plan and Budget of the Board of Commissioners; Arranging the Draft of Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners' on Management Report whether quarterly and/or annually;
5. Arrange the Draft of other Board of Commissioners Reports; Carry out other duties given by the Board of Commissioners.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

REALISASI PROGRAM KERJA

Selama tahun 2018, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2018.
2. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi selama tahun 2018.
3. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018.
4. Melakukan koordinasi kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Pelindo 1 selama tahun 2018.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Aside from carrying out the aforesaid tasks, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat carries out other duties such as:

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
2. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/ or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if needed in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. As the Board of Commissioners' liaison officer to other parties.

REALIZATION OF WORK PROGRAM

During 2018, the Secretary of the Board of Commissioners carried out the following tasks:

1. Prepare for the internal meeting of the Board of Commissioners during 2018.
2. Prepare for joint meetings between the Board of Commissioners and Directors during 2018.
3. Make Minutes of Board of Commissioners' Meetings during 2018.
4. Coordinating the Board of Commissioners' work visits to Pelindo 1 during 2018.
5. Performing other tasks given by the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal, serta melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, bahwa susunan Komite Audit tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Based on the State Minister of SOE Regulation Number: PER-12/MBU/2012 regarding the Supporting Organs of the Board of Commissioners of SOE, that the Board of Commissioners should establish an Audit Committee to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of internal auditor and external auditor duties, and identify things that require the attention of the Board of Commissioners.

Based on the Board of Commissioners' Decree, the composition of the Audit Committee in 2018 is as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan/ Appointment Basics
1.	Heryadi	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 04 Tahun 2018 Tanggal 25 September 2018 Board of Commissioners Decree Number: KP 04 of 2018 Dated September 25, 2018
2.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Wakil Ketua Komite Audit Deputy of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 04 Tahun 2018 Tanggal 25 September 2018 Board of Commissioners Decree Number: KP 04 of 2018 Dated September 25, 2018
3.	Lidya Noor Haryanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 01 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 02 Tahun 2017 Tanggal 3 April 2017 Board of Commissioners Decree Number: KP 01 of 2014 Dated March 17, 2014 Board of Commissioners Decree Number: KP 02 of 2017 Dated April 3, 2017
4.	Eddy Hary Susanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 02 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018 Board of Commissioners Decree Number:

PROFIL

a. Ketua Komite Audit

Heryadi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 24 September 1951, saat ini berdomisili di Bekasi. Memperoleh Pendidikan AKABRI tahun 1973, Pendidikan SUSLAPAIF tahun 1984, Pendidikan SESKOAD tahun 1989, Pendidikan SESKO LN (Inggris) tahun 1992, Pendidikan SESKOGAB (Australia) tahun 1995 dan LEMHANNAS (China) tahun 2002.

b. Wakil Ketua Komite Audit

Lukita Dinarsyah Tuwo

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 25 September 1961, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1985, kemudian meraih gelar MA di University of

PROFILE

a. Chairman of Audit Committee

Heryadi

An Indonesian citizen, born in Bandung, September 25, 1961, currently domiciled in Bekasi. Obtained AKABRI Education in 1973, SUSLAPAIF Education in 1984, SESKOAD Education in 1989, SESKO LN (UK) Education in 1992, SESKOGAB (Australia) Education in 1995 and LEMHANNAS (China) in 2002.

b. Deputy of Audit Committee

Lukita Dinarsyah Tuwo

An Indonesian citizen, born in Bandung, September 25, 1961, currently domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1985, then earned

Chicago tahun 1992 Dan memperoleh gelar PHD (S-3) dari University of Illinois USA tahun 1998.

c. Anggota Komite Audit

Lidya Noor Haryanto

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 September 1957, saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1983.

Eddy Hary Susanto

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1954, saat ini berdomisili di Bekasi Jawa Barat. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Manajemen dari Universitas Mulawarman Samarinda tahun 1983, Diploma (D-III) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Surabaya tahun 1986, Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Udayana Bali tahun 2001, Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Udayana Bali tahun dan Magister (S-2) Hukum Bisnis dari Universitas Gajah Mada.

an MA in the University of Chicago in 1992 and obtained a PHD (S-3) degree from the University of Illinois USA in 1998.

c. Member of Audit Committee

Lidya Noor Haryanto

An Indonesian citizen, born in Ujung Pandang on September 13, 1957, currently domiciled in South Tangerang. Obtained a Bachelor (S-1) in Accounting Economics from Brawijaya University Malang in 1983.

Eddy Hary Susanto

An Indonesian citizen, born in Jakarta on October 4, 1954, currently domiciled in Bekasi, West Java. Obtained a Bachelor's Degree (S-1) in Management from Mulawarman University Samarinda in 1983, Diploma (D-III) in Accounting from the Surabaya College of State Accountancy in 1986, Bachelor (S-1) Accounting from Udayana University Bali in 2001, Master (S-2) in Management from Udayana University Bali and Masters (S-2) in Business Law from Gajah Mada University.

INDEPENDENSI

Tabel pengungkapan independensi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

INDEPENDENCE

Table of disclosure of the independence of Audit Committee members is as follows:

No	Nama/ Name	Pejabat KAP Public Accountant Officials	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation with Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Relations with the Board of Commissioners and Directors	Memiliki Saham Perusahaan Owing Company Shares	Hubungan Bisnis Dengan Perusahaan Business Relations with the Company
1.	Heryadi	X	X	X	X	X
2.	Lukita Dinarsyah Tuwo	X	X	X	X	X
3.	Lidya Noor Haryanto	X	X	X	X	X
4.	Eddy Hary Susanto	X	X	X	X	X

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Pelindo 1 dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory function, in order for the management of Pelindo 1 can run effectively and efficiently. In carrying out the duties and in reporting, the Audit Committee is independent and directly responsible to the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. The accountability of the Audit Committee to the Board of Commissioners is an embodiment of supervisory accountability for the management of the company in the context of implementing the GCG principles.

KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) terdiri atas:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor ekstern.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Pelindo 1.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

The duties and responsibilities of the Audit Committee as contained in the Audit Committee Charter consist of:

1. Ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of external auditor and internal auditor duties.
2. Provide recommendations on improving the management control system of the company and its implementation; Assessing the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.
3. Provide recommendations on improving management control systems and their implementation.
4. Ensure that there are satisfactory review procedures for all information issued by Pelindo 1.
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other Board of Commissioners' duties.

PELATIHAN

Selama tahun 2018 Komite Audit mengikuti beberapa kali pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

TRAINING

During 2018 the Audit Committee attended several training sessions with the following details:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Pelatihan/ Training	Tempat Place	Waktu/ Time
1.	Heryadi	Ketua Chairman	Business Development Expo 2018V	Surabaya	3-4 Oktober 2018
2.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Wakil Ketua Komite Audit Deputy of the Audit Committee	-	-	-
3.	Lidya Noor Haryanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Nuturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times	Bali	27-29 Agustus 2018
			Seminar Aspek Hukum Peran dan Fungsi BUMN	Yogyakarta	29-30 November 2018
4.	Eddy Hary Susanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Nuturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times	Bali	27-29 Agustus 2018

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

1. Agenda Rapat
Selama tahun 2018, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan pembahasan masalah strategis perusahaan, yaitu:

FREQUENCY OF MEETINGS AND ATTENDANCE LEVELS

1. Meetings Agenda
During 2018, the Audit Committee held meetings as much as 11 times with discussion of the company's strategic issues, namely:

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Materi Rapat/ Meetings Materials
1.	26 Januari 2018	Rapat teknis pembahasan LMPT IV Tahun 2017 Technical meeting on discussion of Annual Company Management Report IV in 2017
2.	21 Maret 2018	Pembahasan draft pendapatan dan saran Dewan Komisaris dalam RUPS Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (LMPT) Tahun 2017 (audited) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Discussion of draft of income and advice of the Board of Commissioners in the GMS of the 2017 Annual Company Management Report (audited) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
3.	6 April 2018	Manajemen Audit Berbasis Risiko yang terintegrasi oleh tim konsultan Integrated Risk-Based Audit Management by the consultant team
4.	23 April 2018	Rapat teknis pembahasan LMPT Triwulan I Tahun 2018 Technical meeting discussing the 1st Quarter of the 2018 Annual Company Management Report
5.	10 April 2018	Wawancara calon anggota Komite Audit yang baru Interview of new members of the Audit Committee
6.	25 Mei 2018	Pembahasan draft TOR Genral Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Discussion of the draft of TOR General Audit of Financial Statements for 2018 Fiscal Year
7.	31 Mei 2018	Pembahasan rencana tender KAP Tahun 2018 Discussion of 2018 Public Accountant Office tender plan
8.	10 juli 2018	Pembahasan TOR KAP 2018 Discussion of TOR of 2018 Public Accountant Office
9.	November 2018	Kick of Meeting KAP Pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Kick-off Meeting of Public Accountant Office for the Implementation of the Audit General Financial Statements for Fiscal Year 2018
10.	18 Oktober 2018	Pembahasan LMPT Triwulan III 2018 dan RKAP 2019 Discussion of the third quarter of 2018 Annual Company Management Report and 2019 Company's Work Plan and Budget.
11.	Oktober 2018	Pembahasan Teknis LMPT Triwulan III Tahun 2018 dan RKAP 2019 Technical Discussion of the third quarter of the 2018 Annual Company Management Report and 2019 Company's Work Plan and Budget

2. Tingkat Kehadiran

Sampai dengan bulan Desember 2018 telah diselenggarakan Rapat Komite Audit sebanyak 11 kali. Rata-rata tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat selama tahun 2018 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

2. Level of Attendance

As of December 2018, Audit Committee Meetings has been held for 11 times. The average attendance rate of the Audit Committee in 2018 meetings is 100%, with details as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meetings Attendance	%
1.	Heryadi	Ketua/ Chairman	11	11	100,00
2.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Wakil Ketua Komite Audit Deputy of the Audit Committee	11	11	100,00
3.	Lidya Noor Haryanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	11	11	100,00
4.	Eddy Hary Susanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	11	11	100,00
Rata-rata/ Average					100,00

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Komite Audit dalam bentuk Realisasi Program Kerja Komite Audit sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Menyusun laporan realisasi program kerja komite audit: laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
- Mengkinikan (update) Audit Charter Komite Audit.
- Melakukan rapat secara berkala dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk membahas pelaksanaan:
 - Realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI.
 - Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi.
 - Laporan Hasil Audit Rutin.
- Melakukan evaluasi terhadap Laporan Realisasi RKAP (LMPT) Triwulanan, Semester dan Laporan Manajemen Tahun 2018.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan SPI dan Eksternal Auditor.
- Memantau dan mengevaluasi terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Melakukan rewi terhadap Internal Audit Charter, Panduan Direksi, dan Dewan Komisaris, dan Panduan Umum GCG.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of the Audit Committee in the form of Realization of the Audit Committee Work Program up to 2018 are as follows:

- Compile reports on the realization of the audit committee's work program: quarterly reports, semester reports, and annual reports.
- Updating the Audit Committee Charter.
- Conduct regular meetings with the Internal Audit Unit to discuss implementation on:
 - Realization of the Annual Inspection Work Program of the Internal Audit Unit.
 - Special Audit/ Investigation Result Report.
 - Routine Audit Report.
- Evaluate the Realization Reports of Work Plan And Budget (Annual Company Management Report) in Quarterly, Semester and Annual Company Management Report.
- Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions on findings of Internal Audit Unit and External Auditors.
- Monitor and evaluate the Company's Long Term Plan.
- Reviewing the Internal Audit Charter, the Guidelines of the Board of Directors, and the Board of Commissioners, and the General Guidelines for GCG.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, dimana Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Sebagai Perusahaan yang harus dikelola dengan manajemen modern dan sejalan dengan perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, pertumbuhan dan perkembangan nilai tambah serta memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa Pelindo 1 telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko perusahaan Enterprise Risk Management (ERM), maka dilakukan Penyelarasan di bidang pengawasan perusahaan. Dalam rangka pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memandang perlu membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, bahwa susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The establishment of the Risk Management Monitoring Committee refers to the State Minister of SOE Regulation Number: PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organ of the BUMN Board of Commissioners, where the Board of Commissioners can form other Committees which names and duties are adjusted to the needs of the Board of Commissioners. As a company that must be managed with modern management and in line with the need to increase efficiency, effectivity, productivity, growth and value added development also provide confidence to stakeholders that Pelindo 1 has been managed based on the Enterprise Risk Management (ERM) principles, therefore an Alignment is done in the field of corporate supervision. In the context of such supervision, the Board of Commissioners considers it is necessary to establish a Risk Management Monitoring Committee.

Based on the Decree of the Board of Commissioners, the composition of the Risk Management Monitoring Committee in 2018 is as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan/ Appointment Basics
1.	Bambang Setyo Wahyudi	Ketua KPMR Chairman of Risk Management Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 31 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 Decision of the Board of Commissioners Number: KP 31 of 2017 Dated December 4, 2017
2.	Denny Purwanto	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 13 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 09 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Decision of the Board of Commissioners Number: KP 13 of 2014 Dated December 1, 2014 Decision of the Board of Commissioners Number: KP 09 of 2017 Dated November 30, 2017
3.	Bambang Prio Djatmiko Hadi	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 31 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 Decision of the Board of Commissioners Number: KP 31 of 2017 Dated December 4, 2017

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROFIL

a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko

Bambang Setyo Wahyudi

Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri pada 26 Agustus 1957, saat ini berdomisili di Depok. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1983, kemudian memperoleh gelar magisternya pada jurusan Manajemen Personil di STIE IPWI Jakarta tahun 2000, dan meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015.

b. Anggota Komite Pemantau Risiko

Denny Purwanto

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 4 Mei 1974, saat ini berdomisili di Tangerang. Memperoleh gelar Diploma (D-III) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1996, kemudian memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2000, Diploma (D-IV) dari Sekoah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2005 dan memperoleh gelar Magister Keuangan Negara (S-2) dari STIA LAN Jakarta tahun 2011.

Bambang Prio Djatmiko Hadi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1957, saat ini berdomisili di Tangerang. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi Perusahaan Universitas Jaya Raya tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Konsentrasi SDM (S-2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta tahun 2000.

INDEPENDENSI

Tabel pengungkapan independensi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama/ Name	Pejabat KAP Public Accountant Officials	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With The Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Relations With The Board of Commissioners and Directors	Memiliki Saham Perusahaan Owning Shares of the Company	Hubungan Bisnis Dengan Perusahaan Business Relations With Company
1.	Bambang Setyo Wahyudi	X	X	X	X	X
2.	Denny Purwanto	X	X	X	X	X
3.	Bambang Prio Djatmiko Hadi	X	X	X	X	X

PROFILE

a. Chairman of Risk Management Monitoring Committee

Bambang Setyo Wahyudi

An Indonesian citizen, born in Kediri on August 26, 1957, currently domiciled in Depok. Obtained a Bachelor degree of Laws from Sebelas Maret University Surakarta in 1983, then obtained his master's degree in Personnel Management from STIE IPWI Jakarta in 2000, and won the Honoris Causa Doctorate degree from Sebelas Maret University Surakarta in 2015.

b. Member of Risk Management Monitoring Committee

Denny Purwanto

An Indonesian citizen, born in Semarang on May 4, 1974, currently domiciled in Tangerang. Obtained a Diploma (D-III) from the College of State Accountancy (STAN) in 1996, then obtained a Bachelor's degree (S-1) at the Faculty of Economics, Airlangga University Surabaya in 2000, Diploma (D-IV) from the State Accounting College (STAN) in 2005 and obtained a Master in State Finance (S-2) from STIA LAN Jakarta in 2011.

Bambang Prio Djatmiko Hadi

An Indonesian citizen, born in Jakarta on September 17, 1957, currently domiciled in Tangerang. Obtained a Bachelor (S-1) degree from the Faculty of Corporate Economics, University of Jaya Raya in 1985 and obtained a Master degree in Concentration of HR (S-2) from the 2000 IPWI School of Economics in Jakarta.

INDEPENDENCY

Table for disclosure of the independence of members of the Risk Management Monitoring Committee is as follows:

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, system dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan.
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PELATIHAN

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Manajemen Risiko mengikuti beberapa kali pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Obtain an understanding of the Company's risk management which covers a variety of risks faced by the Company, strategies, systems and policies of the Company's risk management, the Company's internal controls, including policies, methodologies and infrastructure.
2. Evaluate various risk measurement models used by the Company and provide recommendations for further improvements.
3. Monitor the suitability of various policies and implementation of the Company's risk management.
4. Monitor various potential risks faced by the Company.
5. Evaluating various risk management policies of the Company.
6. Coordinate the implementation and supervision of the existence and effectiveness of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the Company.
7. Measure the effectivity of each component of ERM that has been implemented in the Company.
8. Conduct other duties given by the Board of Commissioners based on the laws and regulations.

TRAINING

During 2018 the Risk Management Monitoring Committee attended several training sessions with the following details:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Pelatihan/ Training	Tempat Place	Waktu/ Time
1.	Bambang Setyo Wahyudi	Ketua KPMR Chairman of Risk Management Monitoring Committee	Aspek Hukum Peran dan Fungsi BUMN Legal Aspects of the Role and Function of BUMN	Yogyakarta	29 - 30 November 2018
2.	Denny Purwanto	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	-	-	-
3.	Bambang Prio Djatmiko Hadi	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	Risk Beyond International Conference	Yogyakarta	6-7 Desember 2018

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

1. Agenda Rapat

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 3 kali dengan agenda pembahasan masalah strategis perusahaan, yaitu:

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Materi Rapat/ Meetings Materials
1.	12 Maret 2018	1. Kajian risiko operasional PT PPK ke Depan 2. Kajian risiko pembangunan aplikasi IT 1. Study of PT PPK's further operational risk 2. Study of Risk of IT application development
2.	19 Juli 2018	1. Pembahasan Draft Laporan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2018 2. Pembahasan Progress Implementasi Aplikasi Manajemen Risiko dan Audit Berbasis Risiko Terintegrasi 1. Discussion of Draft of Second Quarter of 2018 Risk Management Report 2. Discussion on the Progress of the Implementation of Risk Management and Integrated Risk-Based Audit Applications
3.	11 Oktober 2018	1. Pembahasan Draft Laporan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2018. 2. Rivi Risiko Hukum dan Mitigasinya Terkait Pelaksanaan Investasi. 1. Discussion of Draft of Third Quarter of 2018 Risk Management Report. 2. Review of Legal Risk and Its Mitigation Regarding Investment Implementation.

2. Tingkat Kehadiran

Sampai dengan tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko sebanyak 3 kali. Rata-rata tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat selama tahun 2018 sebesar 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

FREQUENCY OF MEETINGS AND ATTENDANCE LEVELS

1. Meetings Agenda

During 2018, the Risk Management Monitoring Committee held meetings 3 times with the agenda of discussing the company's strategic issues, namely:

2. Level of Attendance

Until 2018, has been held the Risk Management Oversight Committee Meeting for 3 times. The average attendance rate of the Audit Committee in 2018 meetings is 100%, with details as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meetings Attendance	%
1.	Bambang Setyo Wahyudi	Ketua KPMR Chairman of Risk Management Monitoring Committee	3	3	100,00
2.	Denny Purwanto	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	3	3	100,00
3.	Bambang Prio Djatmiko Hadi	Anggota KPMR Member of Risk Management Monitoring Committee	3	3	100,00
Rata-rata/ Average					100,00

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam bentuk Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi laporan profil Manajemen Risiko perusahaan triwulanan sebagai realisasi RKAP dan PKM.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan.
3. Mengevaluasi pencapaian tujuan, strategis dan sasaran perusahaan.
4. Mengevaluasi pengukuran dan pemetaan serta klasifikasi jenis risiko dalam pengelolaan kajian risiko baik rutin maupun non rutin.
5. Mempelajari dan monitoring keberadaan implementasi risiko dan tingkat efektivitas penerapan masing – masing komponen Enterprise Risk Management (ERM), sadar risiko dan penerapan Audit berbasis risiko (Risk base audit) dapat dilaksanakan.
6. Mengevaluasi kecukupan informasi terhadap akibat risiko dan kemungkinan risiko terjadi.
7. Mengevaluasi klasifikasi jenis risiko dan pengukuran rating risiko ekstrim, tinggi, moderat dan rendah terhadap risiko yang akan timbul.
8. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personil Komite Pemantau Manajemen Risiko melalui pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan pengetahuan dan menjamin kelancaran tugas.
9. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris dan diselesaikan dengan baik.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of the Risk Management Monitoring Committee in the form of the Risk Management Monitoring Committee Work Program up to 2018 are as follows:

1. Evaluate quarterly company Risk Management profile reports as realization of Company's Work Plan and Budget also PKM.
2. Evaluate the Company's Risk Management management policies.
3. Evaluate the achievement of company goals, strategies and objectives.
4. Evaluate measurement and mapping and classification of types of risks in the management of routine and non-routine risk studies.
5. Study and monitor the existence of risk implementation and the level of effectiveness of the application of each component of Enterprise Risk Management (ERM), risk awareness and implementation of risk-based audits can be implemented.
6. Evaluate the adequacy of information on the consequences of risks and the possibility of risks occurring.
7. Evaluate the classification of types of risks and measurement of rating of extreme, high, moderate and low risk of risks that will arise.
8. Improve skills and knowledge of the Risk Management Monitoring Committee personnel through training and education to increase knowledge and ensure the smooth running of tasks.
9. Carry out other duties ordered by the Board of Commissioners and resolved properly.

KOMITE NOMISASI & REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 15 Tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite: Winata Supriatna.
- b. Anggota Komite terdiri dari 2 anggota yaitu:
 - 1) Imron Eryandy;
 - 2) Ambal Lubis.

Periode

7 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 06 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Nomor KP 04 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite: Refly Harun;
- b. Wakil Ketua: Winata Supriatna;
- c. Anggota Komite: Imron Eryandy.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Commissioners Number KP 15 of 2017 dated December 4, 2017 regarding the Termination and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are as follows:

- a. Head of Committee: Winata Supriatna;
- b. Committee members consist of 2 members, namely:
 - 1) Imron Eryandy;
 - 2) Ambal Lubis.

Period

Desember 7, 2018 until Desember 31 2018

Based on the Decree of the Board of Commissioners Number KP 06 of 2018 dated December 7, 2018 regarding the Dismissal of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), and Number KP 04 of 2018 dated September 24, 2018 regarding the Distribution of Tasks of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are as follows:

- a. Head of Committee: Refly Harun;
- b. Deputy of Committee: Winata Supriatna;
- c. Member of Committee: Imron Eryandy.

Based on the Decree of the Board of Commissioners, the composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2018 are as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan/ Appointment Basics
1.	Refly Harun	Ketua KNR Head of Nomination And Remuneration Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 04 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018 Decree of the Board of Commissioners Number: KP 04 of 2018 Dated September 24, 2018
2.	Winata Supriatna	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 15 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 04 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018 Decree of the Board of Commissioners Number: KP 15 of 2017 Dated December 4, 2017 Decree of the Board of Commissioners Number: KP 04 of 2018 Dated September 24, 2018

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan/ Appointment Basics
3.	Imron Eryandy	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 15 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KP 04 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018 Decree of the Board of Commissioners Number: KP 15 of 2017 Dated December 4, 2017 Decree of the Board of Commissioners Number: KP 04 of 2018 Dated September 24, 2018

PROFIL

a. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Refly Harun

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 26 Januari 1970, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian memperoleh gelar Magister Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, meraih gelar LL.M di University of Notre Dame Amerika Serikat dan memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Winata Supriatna

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 09 Desember 1959, saat ini berdomisili di Tangerang. Memperoleh gelar pendidikan Sarjana (S-1) di Universitas Padjajaran Jurusan Ekonomi Manajemen tahun 1984, kemudian melanjutkan program Magister Manajemen (S-2) di Universitas Satyagama tahun 1999.

Imron Eryandy

Warga Negara Indonesia, lahir di Martubung, 22 April 1975, saat ini berdomisili di Medan. Memperoleh gelar pendidikan Diploma (D-3) Akuntansi di Universitas Sumatera Utara Tahun 1996 dan meraih gelar Sarjana (S-1) di Universitas Sumatera Utara Jurusan Akuntansi tahun 2003.

PROFILE

a. Head of Nomination And Remuneration Committee

Refly Harun

An Indonesian citizen, born in Palembang, January 26, 1970, currently domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor degree of Laws from Gadjah Mada University, then obtained a Masters in Law from the Department of State Law at the University of Indonesia, obtained his LL.M degree at the University of Notre Dame in the United States and obtained a Doctorate degree from the Faculty of Law, Andalas University Padang.

b. Member of Nomination And Remuneration Committee

Winata Supriatna

An Indonesian citizen, born in Karawang, December 9, 1959, currently domiciled in Penang. Obtained a Bachelor's degree (S-1) from Padjajaran University, Department of Economics, Management in 1984, then continued his Master of Management (S-2) program at Satyagama University in 1999.

Imron Eryandy

An Indonesian citizen, born in Martubung, April 22, 1975, currently domiciled in Medan. Obtained a Diploma (D-3) in Accounting from the University of North Sumatra in 1996 and earned a Bachelor's degree (S-1) from the University of North Sumatra Accounting Department in 2003.

KOMITE NOMISASI & REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

INDEPENDENSI

Tabel pengungkapan independensi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama/ Name	Pejabat KAP Public Accountant Officials	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With The Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Relations With The Board of Commissioners and Directors	Memiliki Saham Perusahaan Owning Shares of the Company	Hubungan Bisnis Dengan Perusahaan Business Relations With Company
1.	Refly Harun	X	X	X	X	X
2.	Winata Supriatna	X	X	X	X	X
3.	Imron Eryandy	X	X	X	X	X

INDEPENDENCE

Table for disclosure of the independence of members of the Risk Management Monitoring Committee are as follows:

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Terkait Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan jabatan Direksi anak Perusahaan, Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan.
2. Kebijakan evaluasi terhadap Direksi anak Perusahaan, Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan.
3. Pemberian usulan mengenai calon Direksi anak Perusahaan, Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kepada Komisaris Utama.

Terkait Fungsi Remunerasi

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi perusahaan.
2. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Komisaris Utama.

Tanggung Jawab

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil rapat (risalah rapat).
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
 - c. Laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
 - d. Laporan hasil kunjungan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisis, kesimpulan dan saran, jika ada.

DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility to provide recommendations to the Board of Commissioners as follows:

Related to Nomination Functions

1. Prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the determination of the position of Directors of subsidiaries, Head of Internal Controlling Unit and Corporate Secretary;
2. Evaluation policy towards Directors of subsidiaries, Head of Internal Controlling Unit and Corporate Secretary;
3. Provision of proposals regarding prospective Directors of subsidiaries, Head of Internal Monitoring Unit and Corporate Secretary to be submitted to the President Commissioner;

Related to Remuneration Function

1. Evaluation of remuneration policies and evaluation of policy compliance in accordance with the development of the company's situation and conditions.
2. Provision of recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the President Commissioner.

Responsibilities

1. The Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Committee's accountability is submitted to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:
 - a. Report of meeting results (minutes of meeting);
 - b. Report on the implementation of the Committee's quarterly activities;
 - c. Report on the implementation of the Committee's annual activities; and

3. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 4. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk kepentingan pribadi.
 5. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan.
 6. Anggota Komite dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
 7. Anggota Komite harus melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Report on the results of visits, among others, contains findings or field facts, evaluation, analysis, conclusions and suggestions, if any.
 3. Members of the Committee who are still, or no longer served as members of the Committee, must maintain the confidentiality of the company's documents, data and information obtained while serving as members of the Committee, both from internal and external parties and only used for the purpose of carrying out their duties.
 4. Committee members are prohibited from misusing important information related to the company for personal gain.
 5. Committee members in implementing their duties and responsibilities must obey the prevailing rules and regulations of the Company COBP and are prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the Company's activities.
 6. Committee members in carrying out their duties are responsible to the Board of Commissioners and must act independently in implementing their duties.
 7. Committee members must implement other duties, other than those mentioned above given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

PELATIHAN

Selama tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti beberapa kali pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

TRAINING

During 2018 the Nomination and Remuneration Committee attended several training sessions with the following details:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Pelatihan/ Training	Tempat Place	Waktu/ Time
1.	Refly Harun	Ketua KNR Head of Nomination And Remuneration Committee	Business Development Expo 2018	Surabaya	October 3-4, 2018
2.	Winata Supriatna	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	Leaders Talk Winning Strategy "Leading Strategic Growth and Change"	Jakarta	October 11 – 12, 2018
			Legal Aspects of the Role and Function of BUMN	Yogyakarta	November 29 – 30, 2018
3.	Imron Eryandy	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	-	-	-

KOMITE NOMISASI & REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

1. Agenda Rapat

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 6 kali dengan agenda pembahasan masalah strategis perusahaan, yaitu:

FREQUENCY OF MEETINGS AND ATTENDANCE LEVELS

1. Meetings Agenda

During 2018, the Nomination and Remuneration Committee has held 6 meetings with the agenda of discussing the company's strategic issues, namely:

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Materi Rapat/ Meetings Materials
1.	9 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan charter 2018 Pembahasan Rencana Kerja Komite th 2018 Pembahasan usulan gaji direksi dan dekom th 2018 Pembahasan usulan tantiem direksi dan dekom th 2018 Pembahasan usulan penggantian direktur PT Prima Husada Cipta Medan Pembahasan usulan penetapan komisaris independent hal-hal lain yang berkembang didalam rapat <ol style="list-style-type: none"> Discussion of 2018 charters Discussion of the Committee's 2018 Work Plan Discussion of the Board of Directors and Board of Commissioners salary proposals in 2018 Discussion of proposals for tantiem of Board of Directors and Board of Commissioners of 2018 Discussion of the proposed replacement of the director of PT Prima Husada Cipta Medan Discussion of proposed independent commissioners Other things that develop in the meeting
2.	10 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan charter 2018 Pembahasan Rencana Kerja Komite th 2018 Pembahasan usulan gaji direksi dan dekom th 2018 Pembahasan usulan tantiem direksi dan dekom th 2018 Pembahasan usulan penggantian direktur PT Prima Husada Cipta Medan Pembahasan usulan penetapan komisaris independent hal-hal lain yang berkembang didalam <ol style="list-style-type: none"> Discussion of 2018 charters Discussion of the Committee's 2018 Work Plan Discussion of the Board of Directors and Board of Commissioners salary proposals in 2018 Discussion of proposals for tantiem of directors and decrees of 2018 Discussion of the proposed replacement of the director of PT Prima Husada Cipta Medan Discussion of proposed independent commissioners Other things that develop inside
3.	27 Maret 2018	<p>Pembahasan mengenai bahan wawancara Direktur PT Prima Husada Cipta Medan (Anak Perusahaan)</p> <p>Discussion of interview material for Director of PT Prima Husada Cipta Medan (Subsidiary)</p>
4	27 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan program kerja komite nominasi dan remunerasi th 2018 Pembahasan laporan realisasi triwulan I th 2018 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the 2018 nomination and remuneration committee work program Discussion of realization reports for the first quarter of 2018
5	30 Mei 2018	<p>Pembahasan Lap TW I SDM Tahun 2018</p> <p>Discussion of 2018 TW I HR Report</p>
6	4 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan LMPT III KNR Kelengkapan Dokumen Pejabat Satu Tingkat Dibawah Direksi Rekomendasi Direksi Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Annual Company Management Report III of Nomination and Remuneration Committee Complete Documents of Officials One Level Under the Directors Recommendations of Directors of Subsidiaries

2. Tingkat Kehadiran

Sampai dengan tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 6 kali. Rata-rata tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2018 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meetings Attendance	%
1.	Refly Harun	Ketua KNR Head of Nomination And Remuneration Committee	1	1	100,00
2.	Winata Supriatna	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	6	6	100,00
3.	Imron Eryandy	Anggota KNR Member of Nomination And Remuneration Committee	6	6	100,00
Rata-rata/ Average					100,00

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam bentuk Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Menyusun Laporan Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi:
 - Laporan Triwulan.
 - Laporan Tahunan.
- Melakukan evaluasi terhadap Laporan Realisasi RKAP yang terkait dengan kegiatan Nominasi dan Remunerasi yang terdapat pada (LMPT) Triwulanan, dan Laporan Manajemen Tahun 2018.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi pada kegiatan pengelolaan Perusahaan.
- Memantau dan mengevaluasi terhadap hasil Auditor Eksternal terkait dengan kegiatan Nominasi dan Remunerasi.
- Melakukan reviu terhadap Piagam (Charter) Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.
- Menghadiri Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Menyusun ukuran kinerja (KPI) Komite NR atas Program Kerja yg telah ditetapkan.
- Melakukan Self Assessment atas kinerja Komite NR setiap tahun.

2. Level of Attendance

Until 2018, the Nomination and Remuneration Committee Meeting has been held 6 times. The average attendance rate of the Nomination and Remuneration Committee in the 2018 meeting is 100%, with details as follows:

PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance evaluation of the Nomination and Remuneration Committee in the form of Realization of the Nomination and Remuneration Committee Work Program until 2018 are as follows:

- Compile the Nomination and Remuneration Committee Work Program Realization Report:
 - Quarterly Report.
 - Annual report.
- Evaluate the Company Work Plan and Budget Realization Report related to the Nomination and Remuneration activities that are in the Quarterly (Annual Company Management Report), and 2018 Management Reports;
- Monitor and evaluate the implementation of Nomination and Remuneration in the Company's management activities;
- Monitor and evaluate the results of the External Auditor related to Nomination and Remuneration activities;
- Review the Nomination and Remuneration Charter;
- Carry out other duties ordered by the Board of Commissioners;
- Attending the Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- Compile the Nomination and Remuneration Committee's performance measurement (KPI) on the established Work Program;
- Conduct a Self Assessment of the Nomination and Remuneration Committee's performance every year.

DEWAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan, tugas utama Direksi adalah bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perusahaan secara kolegal untuk kepentingan Perusahaan. Beberapa Ketentuan dan Perundang-undang yang menjadi acuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi, sesuai dengan keputusan Direksi Nomor: PR.02/8/22/PI-18.TU tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan rincian berikut:

1. **Direktur Utama**
 - a. Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan menerima petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang kebijakan Umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Melaksanakan tugas-tugas pokok Perusahaan.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur.
2. **Direktur SDM**
Membina, merencanakan dan menyelenggarakan fungsi manajemen strategis sumber daya manusia dan organisasi, umum, Pendidikan dan latihan pegawai, pengesahan administrasi kepegawaian, kemitraan dan bina lingkungan, serta hukum perusahaan baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
3. **Direktur Operasi dan Komersial**
Membina dan menyelenggarakan fungsi pemasaran, analisis pangsa pasar dan riset pasar, kerja sama dengan mitra strategis dan mitra bisnis, pengembangan bisnis logistic, bisnis property dan bisnis maritim, pelayanan terminal, penyiapan armada, teknologi informasi, pembangunan dan pengembangan aplikasi front-end serta pengelolaan terminal petikemas perintis.

In accordance with the provisions and legislation, the main task of the Board of Directors is to carry out the collegial management of the Company for the Company's interest. Some of the Provisions and Legislation which become the reference of the Board of Directors in carrying out their duties include the following:

1. The Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. The Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

DISTRIBUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Distribution of Tasks and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors, in accordance with the decision of the Board of Directors Number: PR.02 / 8/22 / PI-18. TU regarding Organizations and Work Procedures at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office with the following details:

1. **President Director**
 - a. For and on behalf of the Board of Directors and representing the Company, receive instructions from and are responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding General policies to carry out the Company's main duties and other duties determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
 - b. Carry out the Company's main tasks.
 - c. Controlling the implementation of Board of Directors' policies carried out by the Directors.
2. **Human Resources Director**
Fostering, planning and conducting strategic management functions of human and organizational resources, general, employee education and training, authorization of personnel administration, partnerships and community development, as well as corporate law both litigation and non-litigation in accordance with applicable policies and regulations.
3. **Operational and Commercial Director**
Fostering and organizing marketing functions, analyzing market share and market research, cooperating with strategic and business partners, developing business logistics, property and maritime business, terminal services, fleet preparation, information technology, development and development of front-end applications and management of pioneer container terminal.

4. Direktur Teknik

Membina dan menyelenggarakan peralatan dan fasilitas jasa kepelabuhan, sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan kesehatan kerja, manajemen lingkungan hidup, implementasi kepatuhan sistem manajemen terhadap regulasi, serta mengelola dan memonitoring percepatan proyek-proyek strategis sesuai tuntutan pengembangan bisnis perusahaan.

5. Direktur Keuangan

Membina dan menyelenggarakan kegiatan divisi akuntansi, manajemen, pembendaharaan perusahaan, akuntansi keuangan, manajemen aset, unit pusat layanan serta pengelolaan anak perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Perusahaan.

6. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan bisnis potensial, pengelolaan pengembangan bisnis di pelabuhan-pelabuhan strategis, perencanaan bisnis di Kawasan Selat Malaka, perencanaan program inisiasi perubahan perilaku pegawai untuk menghadapi transformasi bisnis internal maupun eksternal, perencanaan kerjasama proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Kuala Tanjung dengan mitra strategis.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Direksi tidak memiliki Komite dibawah Direksi, namun demikian tugas dan tanggung jawab Komite telah di bebaskan secara merata kepada masing-masing pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.

4. Technical Director

Fostering and organizing equipment and facilities for port services, quality management systems, occupational health safety management, environmental management, implementation of management system in compliance with regulations, and managing and monitoring the acceleration of strategic projects according to the demands of the company's business development.

5. Financial Director

Fostering and organizing activities in the accounting, management, corporate treasury, financial accounting, asset management, service center unit and management of subsidiaries in accordance with the business policies set by the Company.

6. Business Transformation and Development Director

Fostering and conducting potential business planning and development functions, managing business development in strategic ports, business planning in the Malacca Strait Area, planning programs for initiating changes in employee behavior to face internal and external business transformation, planning collaborative projects for developing and operating the Kuala Tanjung port with strategic partner.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE DIRECTORS

Directors does not have a Committee under the Directors, however the duties and responsibilities of the Committee have been evenly distributed to each division of labor in accordance with the company's organizational structure.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Perusahaan menyadari pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KP.32/2/22/Pl/16.TU tanggal 11 Februari 2016, bahwa Sekretaris Perusahaan Sdr Muhammad Eriansyah diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

The company realizes the importance of the role of the Corporate Secretary in facilitating relations between Company Organ, the relationship between the Company with the Stakeholders and the fulfillment of the provisions of the applicable laws. To support this role, the Company sets the Corporate Secretary as an official one level below the Board of Directors. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

APPOINTMENT OF CORPORATE SECRETARY

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: KP.32/2/22/Pl/16.TU dated February 11, 2016, that the Corporate Secretary, Mr. Muhammad Eriansyah was appointed by the Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.

MUHAMMAD ERIANSYAH

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Muhammad Eriansyah, SE

Lahir di Banda Aceh pada tanggal 26 April 1972, dengan tingkat pendidikan Strata (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997.

Mulai bekerja di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 1999 dengan pengalaman jabatan ACS Humas (2012-2016), ACS Hubungan Kelembagaan dan HI (2009-2011), Asmen IT (2005-2008), dan staf (1999-2005).

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan direksi, hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan hubungan internasional serta penyelenggaraan kegiatan Kantor Perwakilan Jakarta serta pengembangan sistem teknologi koordinasi Sekretaris Perusahaan.

PROFILE OF CORPORATE SECRETARY

Muhammad Eriansyah, SE

Born in Banda Aceh on April 26, 1972, with a Strata (S1) education level in Economic Development at the University of North Sumatra in 1997.

Started working at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 1999 with experience in the position of Corporate Secretary Assistant of Public Relations (2012-2016), Corporate Secretary Assistant of Institutional and International Relations (2009-2011), Manager Assistant of IT (2005-2008), and staff (1999-2005).

DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Corporate Secretary has the task of preparing coaching, arranging work programs and organizing the secretarial activities of directors, community relations, relations between institutions and international relations also organizing the activities of the Jakarta Representative Office as well as developing a technology system for coordinating the Corporate Secretary.

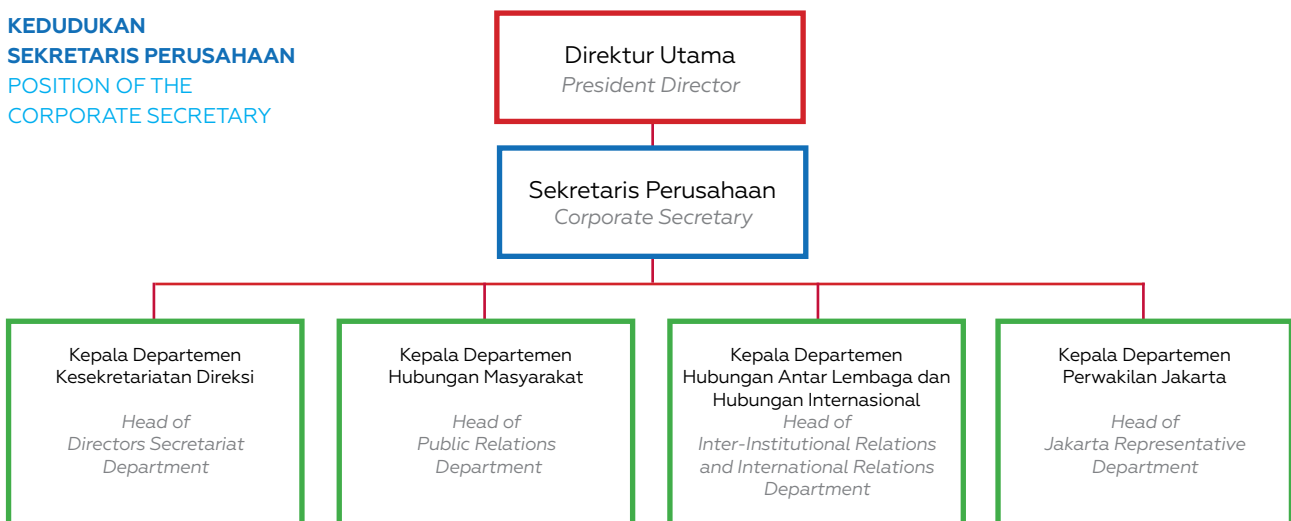
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat penghubung (Liason Officer) antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, lembaga lain, dan public serta sebagai penanggung jawab sekretariat Perusahaan maupun sekretariat Direksi dan menatausahakan dokumen-dokumen Perusahaan.
2. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja, dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direksi.
3. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat.
4. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.
5. Pemantauan penerapan good corporate governance.
6. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan pameran dan eksibisi perusahaan.
7. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Kantor Perwakilan Jakarta.
8. Pelaksanaan program kerja dan penyelenggaraan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.
9. Penyiapan, Perencanaan dan pengembangan sistem teknologi koordinasi sekretaris Perusahaan.

To conduct these tasks, the Corporate Secretary has the following functions:

1. As a Liason Officer between the Company and shareholders, regulators, other institutions and the public as well as the person in charge of the Corporate secretariat and the Directors' secretariat and administering Company documents;
2. Preparation of guidance, preparation of work programs, and implementation of Directors' secretarial activities;
3. Preparation of guidance, preparation of work programs and implementation of community relations activities;
4. Preparation of guidance, preparation of work programs and implementation of relations activities between institutions and international relations;
5. Monitoring the implementation of good corporate governance;
6. Preparation of guidance, preparation of work programs and organization of exhibition activities and company exhibitions;
7. Guidance, planning, development and implementation of activities of the Jakarta Representative Office;
8. Implementation of work programs and implementation of the implementation of management information systems in the work environment;
9. Preparation, planning and development of technology systems coordinating the Corporate secretary.

**KEDUDUKAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN**
POSITION OF THE
CORPORATE SECRETARY



REALISASI PROGRAM KERJA

Realisasi Program Sekretaris Perusahaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

REALIZATION OF WORK PROGRAM

The realization of the Corporate Secretary Program in 2018 are as follows:

No	Key Performance Indicator (KPI) Key Performance Indicator (KPI)	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization
A	KEUANGAN DAN PASAR/ FINANCE AND MARKET			
1.	Laba Korporat/ Corporate Profit	%	100,00	100,00
2.	Actual cost/budget cost Actual cost/ budget cost	%	100,00	100,00
B	FOKUS PELANGGAN/ CUSTOMER FOCUS			
3.	Nilai CII (Corporate Index Image) Value of CII (Corporate Index Image)	S.Likert	3,50	4,08
C	EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES/ EFFECTIVENESS OF PRODUCT AND PROCESS			
4.	Tindaklanjut usaha peningkatan implementasi GCG kepada masing-masing bidang untuk mencapai target score yg ditetapkan Follow-up of the efforts to increase GCG implementation to each field to achieve the set score target	%	100	100
5.	Jumlah aktivitas program komunikasi dan promosi perusahaan Number of company communication and promotion program activities	kali dalam setahun	4	6
6.	Jumlah Penghargaan diraih PT Pelindo 1 Number of awards achieved by PT Pelindo 1	Jumlah	2,00	19
7.	Tersedianya kebijakan Direksi mengenai Mekanisme distribusi data ke pihak eksternal dan Klasifikasi jenis data (Pelayanan Informasi Publik) Availability of the Directors policies regarding the mechanism of data distribution to external parties and the classification of data types (Public Information Services)	SK	1	1
D	KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY			
8.	Ketepatan Penyampaian Laporan Secara Berkala BUMN The Accuracy of Periodic SOE Report Submission	%	100	100
9.	Skor GCG/ GCG Score	Skor	94,35	94,60
10.	Skor KPKU Excellent Performance Assessment Criteria score	Skor	139	567,25
11.	Jumlah temuan SPI (berulang) Number of SPI findings (repeated)	Jumlah	0	100
12.	Tindaklanjut Penyelesaian Hasil Temuan Auditor Internal (SPI) Follow-up Settlement of Internal Auditor Findings (Internal Controlling Unit) Results	%	0	100
13.	Implementasi Menejemen Risiko Implementation of Risk Management	%	100	100
Jumlah/ TOTAL			13	13

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL MONITORING UNIT

Ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern meliputi semua wilayah operasional Pelindo 1 dan Anak Perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dalam rangka mengamankan investasi dan aset Perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik.

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KP.31/5/II/PT-14.TU tanggal 16 Juni 2014, bahwa Kepala Satuan Pengawasan Intern Sdr Arif Hutomo diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

The scope of duties and functions of the Internal Audit Unit covers all operational areas of Pelindo 1 and Subsidiaries to assess the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes in order to secure the Company's investment and assets and maintain good performance.

APPOINTMENT OF HEAD OF INTERNAL MONITORING UNIT

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: KP.31/5/II/PT-14. TU dated June 16, 2014, the Head of Internal Monitoring Unit, Arif Hutomo was appointed by the Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.

ARIF HUTOMO

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Monitoring Unit



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Arif Hutomo, SE, D.E.S.S.

Lahir di Magelang pada tanggal 24 Desember 1966, dengan tingkat pendidikan Strata (S1) Ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991, Magister (S2) Transport & Logistic di Universitas Paris pada tahun 1997.

Mulai bekerja di Pelindo 1 tanggal 25 Februari 1993 dengan pengalaman jabatan Koordinator project management office pembentukan anak perusahaan (2013-2014), Senior Manager PKBL (2011-2013), Senior Manager Kesejahteraan dan Administrasi SDM (2010-2011), ASM perencanaan & Pengembangan Organisasi (2009-2010).

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL MONITORING UNIT

Arif Hutomo, SE, D.E.S.S.

Born in Magelang on December 24, 1966, with a Strata (S1) level of Economics at Gadjah Mada University in 1991, Master (S2) Transport & Logistics at the University of Paris in 1997.

Started working at Pelindo 1 on February 25, 1993 with experience in establishing a subsidiary project management office (2013-2014), Senior Manager of Partnership and Environmental Development Program (2011-2013), Senior Manager of Welfare and HR Administration (2010-2011), Senior Manager Assistant of Planning & Development Organization (2009-2010).

SATUAN PENGAWASAN INTERN INTERNAL MONITORING UNIT

VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi mitra bisnis strategis melalui kegiatan asuransi dan konsultasi dalam mewujudkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi nomor satu di bisnis kepelabuhan di Indonesia.

2. Misi

- Membantu perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Mengevaluasi efektivitas internal control, risk management dan proses tata kelola perusahaan melalui penerapan audit berbasis risiko.
- Mengelola aktifitas internal audit secara efektif dan efisien.
- Mengembangkan kompetensi internal auditor.
- Meningkatkan sinergi fungsi internal audit dan eksternal audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas

- Membantu Direksi dan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Pelindo 1 dan Anak Perusahaan dengan memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan. Kewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian intern dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan berada dalam tanggung jawab manajemen.
- Membantu Direksi dan Komisaris dalam meningkatkan corporate governance Pelindo 1 dan Anak Perusahaan, terutama dengan mendorong efektifitas organ corporate governance, serta efektifitas proses pengendalian intern, manajemen risiko, implementasi etika bisnis dan pengukuran kinerja organisasi.
- Memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan Pelindo 1 dan Anak Perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien dan ekonomis.
- Memberikan masukan kepada manajemen mengenai perubahan lingkungan dan risiko bisnis yang muncul serta hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja Pelindo 1 dan Anak Perusahaan.
- Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di Pelindo 1 dan Anak Perusahaan.
- Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Manajemen operasional berkewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian intern dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

VISION DAN MISSION

1. Vision

Become a strategic business partner through insurance and consulting activities in realizing PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to be number one in the port business in Indonesia

2. Mission

- Help the company to realize a good corporate governance
- Evaluate the effectiveness of internal control, risk management and corporate governance processes through the application of risk-based audits
- Manage internal audit activities effectively and efficiently
- Develop internal auditor competencies
- Increase the synergy of internal audit and external audit functions.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties

- Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in fulfilling the management responsibilities of Pelindo 1 and its Subsidiaries by monitoring the adequacy and effectiveness of the company's internal control system. The obligation to develop an internal control system in order to achieve company goals and objectives is within the responsibility of management.
- Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in enhancing Pelindo 1 and its Subsidiaries' corporate governance, especially by encouraging the effectiveness of corporate governance organs, as well as the effectiveness of internal control processes, risk management, implementation of business ethics and measurement of organizational performance.
- Provide assessment and recommendations in order that Pelindo 1 and its Subsidiary activities lead to the achievement of goals and objectives effectively, efficiently and economically.
- Provide input to management regarding changes in the environment and business risks that arise as well as other matters that affect the results and performance of Pelindo 1 and its Subsidiaries.
- Creating added value by identifying opportunities to improve the efficiency, efficiency and effectiveness of activities in Pelindo 1 and its Subsidiaries.
- Assess the adequacy and effectiveness of the internal control system. Operational management is obliged to develop an internal control system in order to achieve the company's goals and objectives.

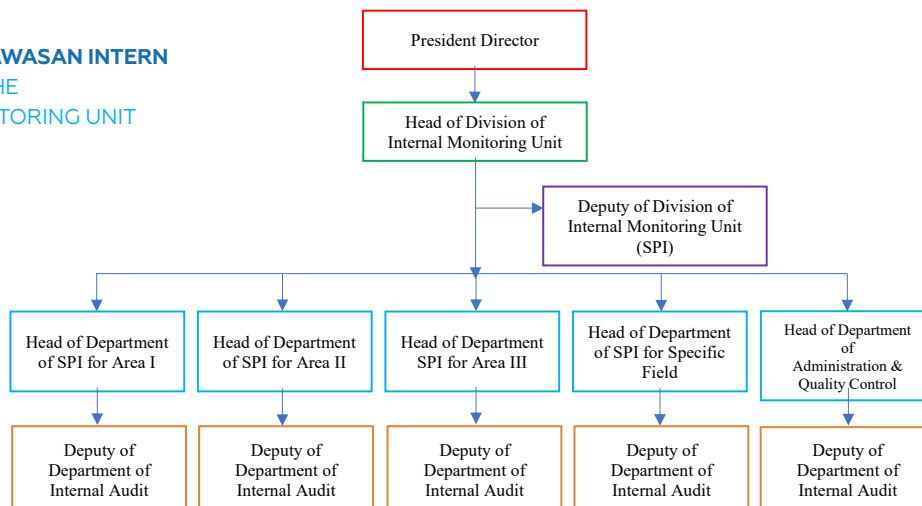
Tanggung Jawab

1. Memberikan laporan kinerja Satuan Pengawasan Intern secara berkala kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Audit.
2. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen Pelindo 1 dan Anak Perusahaan.
3. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.
4. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.
5. Berkoordinasi dengan insititusi pengendalian dan governance lainnya, seperti Komite Audit dan auditor eksternal (counterpart).
6. Memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi lainnya yang dilaksanakan oleh SPI.
7. Menjaga profesionalisme auditor dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi yang diperlukan.
8. Memberikan jasa konsultansi kepada Manajemen, dengan cara menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu SOP/ kebijakan/aturan yang akan diimplementasikan.

Responsibilities

1. Provide Internal Monitoring Unit performance report periodically to the President Director and the President Commissioner through the Audit Committee.
2. Providing assessment of the adequacy and effectiveness of the management processes of Pelindo 1 and its subsidiaries.
3. Report important matters related to the internal control process, including reporting the possibility of making improvements to the process.
4. Provide information about progress and the results of the implementation of the annual audit plan and the adequacy of audit resources.
5. Coordinate with other control and governance institutions, such as the Audit Committee and external auditors (counterparts).
6. Provide assessment of the results of other evaluations conducted by Internal Monitoring Unit.
7. Maintain auditor professionalism with sufficient knowledge, skills and experience as well as the required certification.
8. Provide consultancy services to Management, by assessing the adequacy of internal audit from an SOP/ policy/ rule that will be implemented.

**KEDUDUKAN
SATUAN PENGAWASAN INTERN**
POSITION OF THE
INTERNAL MONITORING UNIT



SATUAN PENGAWASAN INTERN INTERNAL MONITORING UNIT

JUMLAH PEGAWAI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jumlah Pegawai Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2018 sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selama tahun 2018 Jumlah pegawai Satuan pengawasan Intern sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan/ Position	Jumlah Total	Tingkat Pendidikan/ Education Level			
			SMU High School	D3/D4 Diploma III/ IV	S1 Bachelor Degree	S2 Master Degree
1.	Kepala Divisi SPI/ Head of Division of SPI	1	-	-	-	1
2.	Staff Kadiv SPI/ Head of Division Staff of SPI	1	-	-	-	1
3.	Kadep Wilayah/ Head of Area Department	3	-	-	2	1
4.	Kadep Bidang Khusus/ Head of Department of Specific Field	1	-	-	-	1
5.	Kadep ADM & Penjamin Mutu Head of Department of Administration and Quality Control	1	-	-	-	1
6.	Wakadep Audit/ Deputy of Audit	5	-	-	2	3
7.	Auditor/ Auditor	13	-	-	11	4
8.	Pembantu Auditor/ Assisstant of Auditor	5	-	3	2	-
9.	Staff Analisa & Pelaporan/ Analizing and Reporting Staff	0	-	-	-	-
10.	Pelaksana ADM & TU/ Executive of Administration	1	1	-	-	-
Jumlah/ TOTAL		31	1	3	17	12

2. Berdasarkan Sertifikasi Profesi

Selama tahun 2018 terdapat pelatihan yang diikuti oleh pegawai Satuan pengawasan Intern diantaranya Pendidikan profesi sebanyak 30 orang dari 31 orang jumlah pegawai Satuan pengawasan Intern, dengan rincian sebagai berikut:

NUMBER OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL MONITORING UNIT

The number of Internal Audit Unit Employees as of 31 December 2018 is 31 people, with details as follows:

1. Based on Education Level

During 2018 there were 31 Internal Audit Unit employees, with details as follows:

2. Based on Professional Certification

During 2018 there were trainings attended by employees of the Internal Monitoring Unit including professional education as many as 30 persons from 31 persons of the number of employees of the Internal Monitoring Unit, with details as follows:

No	Jabatan/ Position	Jumlah Total	Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Internal Auditor Qualification Certificate				
			Dasar I Basic I	Dasar II Basic II	Lanjutan I Advance I	Lanjutan II Advance II	QIA
1.	Kepala Divisi SPI/ Head of Division of SPI	1					1
2.	Staff Kadiv SPI/ Head of Division Staff of SPI	1					1
3.	Kadep Wilayah/ Head of Area Department	3		1			2
4.	Kadep Bidang Khusus/ Head of Department of Specific Field	1			1		

No	Jabatan/ Position	Jumlah Total	Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Internal Auditor Qualification Certificate				
			Dasar I Basic I	Dasar II Basic II	Lanjutan I Advance I	Lanjutan II Advance II	QIA
5.	Kadep ADM & Penjamin Mutu Head of Department of Administration and Quality Control	1					1
6.	Wakadep Audit/ Deputy of Audit	5			1	2	2
7.	Auditor/ Auditor	13	1	1	4	7	
8.	Pembantu Auditor/ Assisstant of Auditor	5	5				
9.	Staff Analisa & Pelaporan/ Analizing and Reporting Staff	0					
10.	Pelaksana ADM & TU/ Executive of Administration	1					
Jumlah/ TOTAL		31	6	2	6	9	7

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

1. **Capaian Program Kerja Manajemen (PKM) Tahun 2018**
Bersarkan Laporan SPI tahun 2018, Capaian Program Kerja Manajemen (PKM) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF ANNUAL MONITORING ACTIVITIES PROGRAM ACTIVITIES

1. **Achievement of the Management Work Program in 2018**
Based on the 2018 SPI Report, the Achievement of the Management Work Program in 2018 are as follows:

No	Program Kerja/ Work Program	Realisasi/ Realization
1.	Melanjutkan pemantauan Implementasi SOP pada Cabang Dumai, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Continue the monitoring of SOP implementation in Branches of Dumai, Pekanbaru and Tanjung Pinang.	Kegiatan/aktivitas pemantauan efektifitas dan implementasi SOP pada Cabang-cabang Pelabuhan, dilaksanakan secara bersamaan atau menjadi bagian dari kegiatan field audit yang dilaksanakan pada Cabang Dumai, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Activities of monitoring the effectiveness and implementation of SOP at Port Branches, carried out simultaneously or become part of field audit activities carried out at Branches of Dumai, Pekanbaru and Tanjung Pinang.
2.	Penyusunan Manual/Pedoman Penilaian Sistem pengendalian Intern di Lingkungan Pelindo 1 Compilation of Manuals/ Guidelines for Assessment of Internal Control Systems in Pelindo 1 Environment	Telah dilaksanakan masing-masing review atas masing-masing pelaksanaan pekerjaan investasi maupun perawatan yang dipandang strategis dan memberi dampak signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran operasional maupun target-target perusahaan. Has been prepared a Guidelines for Compiling and Evaluating the Internal Control System in the Pelindo 1 Environment
3.	Review Pelaksanaan Investasi fisik strategis dan perawatan Review of Implementation of Strategic Physical Investment And Maintenance	Telah dimplementasikan pemanfaatan audit tools "IDEA Ver 10.311 dalam menunjang pelaksanaan desk audit maupun field audit sejalan dengan telah dimplementasikannya aplikasi ERP-SAP di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Has been carried out each of review of each of the implementation of investment and maintenance work which seen as strategic and has a significant impact both directly and indirectly on operational smoothness and company targets..

SATUAN PENGAWASAN INTERN INTERNAL MONITORING UNIT

No	Program Kerja/ Work Program	Realisasi/ Realization
4.	Implementasi teknik audit berbantuan komputer Implementation of computer-assisted audit techniques	Telah disiapkan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Penilaian Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Pelindo 1 Has been implemented the utilization of audit tools "IDEA Ver 10.311 in supporting the implementation of desk audit or field audit in line with the implementation of ERP-SAP applications in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) environment
5.	Melakukan pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan perbaikan berbasis HRIS/MKE. Conduct follow-up monitoring of findings of audit and improvement based on HRIS / MKE	Telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Temuan melalui penerapan RKB mandatory bagi Auditee dan penanggung jawab terkait butir temuan serta telah dilakukan updating/monitoring dan pembahasan tindak lanjut temuan dengan masing-masing auditee Has been made the effort to accelerate the completion of the Follow-Up of Findings through the implementation of the mandatory RKB for the Auditee and the person in charge related to the point of finding and have updated/ monitored and discussed the follow-up findings with each auditee.
6.	Peningkatan Kompetensi SDM-SPI HR-Internal Audit System Competence Improvement	Telah dilaksanakan secara bertahap peningkatan Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar I, Dasar II dan Lanjutan II dan tingkat Manajerial, Focus Group Discussion: Executive Retreat, Diktat Pembekalan Change Agent Batch 2 dan Batch 3, Workshop khusus bagi SOM SP/ oleh Komite Audit, Seminar Navigating Risk in The Digital Era, Workshop Cybersecurity in an Unsecure World, Sharing session Employee Enggagement, Pelatihan Penyusunan Kajian Risiko, serta Workshop khusus "Audit Report Writing". Has been carried out gradually, the Qualification of Internal Auditor (QIA) Basic I, Basic II and Advanced II and Managerial level have been carried out in stages, Focus Group Discussion: Executive Retreat, Diktat of Debrief of Change Agent Batch 2 and Batch 3, Special Workshop for SOM SP/ by the Audit Committee, Seminar of Navigating Risk in The Digital Era Seminar, Cybersecurity in Unsecure World Workshop, Employee Engineering Sharing session, Risk Study Preparation Training, and a special Workshop "Audit Report Writing".

2. Capaian Program Kerja Audit Internal Tahun 2018

Berdasarkan Laporan SPI Tahun 2018 rencana pemeriksaan sebanyak 24 Auditee sedangkan realisasi sebanyak 23 atau 95,83%.

2. Achievement of the Internal Audit Work Program in 2018

Based on the SPI Report for 2018 the audit plan was 24 Auditees while the realization was 23 or 95.83%.

No	Program Kerja/ Work Program	Realisasi/ Realization
1.	Audit rutin Cabang Batam Routine Audit at Branch of Batam	Laporan Nomor: 01/LHA/BTM/IV /18-RH tanggal 30 April 2018 Report Number: 01/LHA/BTM/IV /18-RH dated April 30, 2018
2.	Audit rutin Cabang Tanjung Balai Asahan Routine Audit at Branch of Tanjung Balai Asahan	Laporan Nomor: 02/LHA/TBA/IV/18-RH tanggal 30 April 2018 Report Number: 02/LHA/TBA/IV/18-RH dated April 30, 2018
3.	Audit rutin Cabang Tanjung Balai Karimun Routine Audit at Branch of Tanjung Balai Karimun	Laporan Nomor: 03/LHA/TBK/IV/18-RH tanggal 30 April 2018 Report Number: 03/LHA/TBK/IV/18-RH dated April 30, 2018
4.	Audit rutin Cabang Dumai (Periode I) Routine Audit at Branch of Dumai (Period I)	Laporan Nomor: 04/LHA/DUM/V/18-RH tanggal 11 Mei 2018. Report Number: 04/LHA/DUM/V/18-RH dated May 11, 2018.
5.	Audit rutin Cabang Pekanbaru (Periode I) Routine Audit at Branch of Pekanbaru (Period I)	Laporan Nomor: 05/LHA/PKU/V/18-RH tanggal 04 Juni 2018 Report Number: 05/LHA/PKU/V/18-RH dated June 04, 2018

No	Program Kerja/ Work Program	Realisasi/ Realization
6.	Audit rutin Cabang Gunungsitoli Routine Audit at Branch of Gunungsitoli	Laporan Nomor: 06/LHA/GST/VI/18-RH tanggal 04 Juni 2018 Report Number: 06/LHA/GST/VI/18-RH dated June 04, 2018
7.	Audit rutin Cabang Lhokseumawe Routine Audit at Branch of Lhokseumawe	Laporan Nomor: 07/LHA/LSM/VI/18-RH tanggal 06 Juni 2018. Report Number: 07/LHA/LSM/VI/18-RH dated June 06, 2018.
8.	Audit rutin Cabang Belawan (Periode I) Routine Audit at Branch of Belawan (Period I)	Laporan Nomor: 08/LHA/BLW/VIII/18-RH tanggal 03 Agustus 2018 Report Number: 08/LHA/BLW/VIII/18-RH dated August 03, 2018
9.	Audit rutin Cabang Kuala Tanjung Routine Audit at Branch of Kuala Tanjung	Laporan Nomor: 09/LHA/KTG/VIII/18-RH tanggal 13 Agustus 2018 Report Number: 09/LHA/KTG/VIII/18-RH dated 13 August 2018
10.	Audit rutin Cabang Malahayati Routine Audit at Branch of Malahayati	Laporan Nomor: 10/LHA/MLH/VIII/18-RH tanggal 30 Agustus 2018. Report Number: 10/LHA/MLH/VIII/18-RH dated August 30, 2018.
11.	Audit rutin Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (Periode I) Routine Audit at Belawan Domestic Container Terminal (Period I)	Laporan Nomor: 11/LHA/TPKDB/VIII/18-RH tanggal 30 Agustus 2018. Report Number: 11/LHA/TPKDB/VIII/18-RH dated August 30, 2018.
12.	Audit rutin Belawan International Container Terminal (Periode I) Routine Audit at Belawan International Container Terminal (Period I)	Laporan Nomor 12/LHA/BICT/IX/18-RH tanggal 07 September 2018. Report Number: 12/LHA/BICT/IX/18-RH dated September 07, 2018.
13.	Audit rutin Cabang Sungai Pakning Routine Audit at Branch of Sungai Pakning	Laporan Nomor: 13/LHA/SPN/IX/18-RH tanggal 13 September 2018. Report Number: 13/LHA/SPN/IX/18-RH dated September 13, 2018.
14.	Audit rutin Cabang Tembilahan Routine Audit at Branch of Tembilahan	Laporan Nomor: 14/LHA/TBH/IX/18-RH tanggal 24 September 2018. Report Number: 14/LHA/TBH/IX/18-RH dated September 24, 2018.
15.	Audit rutin Cabang Sibolga Routine Audit at Branch of Sibolga	Laporan Nomor: 15/LHA/SBG/X/18-RH tanggal 15 Oktober 2018. Report Number: 15/LHA/SBG/X/18-RH dated October 15, 2018.
16.	Audit rutin Cabang Tanjung Pinang Routine Audit at Branch of Tanjung Pinang	Laporan Nomor: 17/LHA/TPI/X/18-RH tanggal 23 Oktober 2018. Report Number: 17/LHA/TPI/X/18-RH dated October 23 2018.
17.	Audit rutin Cabang Pekanbaru Routine Audit at Branch of Pekanbaru	Laporan Nomor: 18/LHA/PKU/XI/18-RH tanggal 7 Nopember 2018. Report Number: 18/LHA/PKU/XI/18-RH dated November 7, 2018.
18.	Audit rutin Cabang Dumai Routine Audit at Branch of Cabang Dumai	Laporan Nomor: 23/LHA/DUM/XII/18-RH tanggal 28 Desember 2018. Report Number: 23/LHA/DUM/XII/18-RH dated December 28, 2018.
19.	Audit anak perusahaan PT Prima Husada Cipta Medan Audit PT Prima Husada Cipta Medan Subsidiaries	Laporan Nomor: 19/LHA/PHCM/XI/18-RH tanggal 26 Desember 2018. Report Number: 19/LHA/PHCM/XI/18-RH dated December 26, 2018.
20.	Audit rutin Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (Periode II) Routine Audit at Belawan International Container Terminal (Period II)	Laporan Nomor: 21/LHA/TPKDB/XII/18-RH tanggal 26 Desember 2018. Report Number: 21/LHA/TPKDB/XII/18-RH dated December 26, 2018.
21.	Audit rutin Belawan International Container Terminal (Periode II) Routine Audit at Belawan International Container Terminal (Periode II)	Laporan Nomor: 24/LHA/BICT/XII/18-RH tanggal 31 Desember 2018. Report Number: 24/LHA/BICT/XII/18-RH dated December 31, 2018.
22.	Audit rutin Cabang Belawan (Periode II) Routine Audit at Branch of Belawan (Periode II)	Laporan Nomor: 20/LHA/BLW/XII/18-RH tanggal 26 Desember 2018. Report Number: 20/LHA/BLW/XII/18-RH dated December 26, 2018.
23.	Audit Anak Perusahaan PT Prima Indonesia Logistik Audit of PT Prima Indonesia Logistik Subsidiaries	Laporan Nomor: 22/LHA/PIL/XII/18-RH tanggal 26 Desember 2018 Report Number: 22/LHA/PIL/XII/18-RH dated December 26, 2018
24.	Audit rutin Kantor Pusat Routine Audit at Main Office	Proses Penerbitan Laporan/ Process of Report Issuance

POSISI TINDAK LANJUT TEMUAN TAHUN 2017

Jumlah temuan audit Satuan Pengawasan Intern tahun 2017 yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah sebanyak 69 temuan yang sudah tuntas sebanyak 61 temuan atau dengan capaian sebesar 88,40%, dengan rincian sebagai berikut:

POSITION OF FOLLOW UP OF 2017 FINDINGS

The number of audit findings for the Internal Audit Unit in 2017 which were followed up in 2018 were as many as 69 findings with completed findings in total of 61 findings or with achievements of 88.40%, with details as follows:

No	Uraian/ Description	Temuan Findings	Tuntas Completed	Proses Process	Belum Not Completed Yet	% Penyelesaian % Completion
1.	Pengawas Wilayah I Supervisor of Area I	17	17	0	0	100
2.	Pengawas Wilayah II Supervisor of Area II	17	17	0	0	100
3.	Pengawas Wilayah III Supervisor of Area III	14	13	1	0	92,85
4.	Pengawas Bidang Khusus Supervisor for Specific Field	21	14	1	6	66,66
5.	Full Team/ Full Team	0	0	0	0	0
6.	Audit tujuan Tertentu Audit for Specific purpose	0	0	0	0	0
	Total	69	61	2	6	88,40

AGENDA DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING AGENDA AND ATTENDANCE LEVEL

1. Dewan Komisaris

- a. Materi Rapat Dewan Komisaris
Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal sebanyak 13 kali dengan materi pembahasan masalah strategis perusahaan, yaitu:

1. Board of Commissioners

- a. Board of Commissioners Meeting Material
During 2018, the Board of Commissioners has conducted 13 internal meetings with material for discussing the company's strategic issues, namely:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Materi Rapat/ Meeting Material
1.	12 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembahasan Hasil Laporan General Audit KAP Tahun Buku 2017 b) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Discussion of the Result of Public Accountant Office General Audit Report for 2017 fiscal year b) Others
2.	2 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembahasan Hasil General Audit Tahun Buku 2017 b) Pembahasan Hasil Assessment GCG Tahun 2017. c) Pembahasan Kerja Sama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Port of Rotterdam. d) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Discussion of the Result of General Audit for 2017 fiscal year b) Discussion of the Result of 2017 GCG Assessment; c) Discussion of Cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with Port of Rotterdam; d) Others
3.	27 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan BOD-BOC tanggal 15 Maret 2018 sebagai berikut. b) Tanggapan BOC terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (LMPT) Tahun Buku 2017 (Audited). c) Rencana Pengusulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2018 d) Tanggapan Terhadap Usulan Bakal Calon Direktur PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). e) Persiapan Wawancara Direktur PT Prima Husada Cipta Medan (Anak Perusahaan). f) Tanggapan Terhadap Piagam SPI PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). g) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Follow-up on the Results of the BOD-BOC Joint Meeting on March 15, 2018 as follows; b) BOC's response to the Annual Company Management Report for the 2017 Fiscal Year (Audited). c) Plans for the Proposed Public Accountant Office in 2018 d) Response to the proposal of Prospective Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). e) Preparation of Interview of Director of PT Prima Husada Cipta Medan (Subsidiary). f) Response to the Internal Audit Unit Charter of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). g) Others
4.	25 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) LMPT Triwulan I Tahun 2018. b) Pengendalian Internal Triwulan I Tahun 2018. c) Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2018. d) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Quarter I of 2018 Annual Company Management Report; b) Quarter I of Internal Control in 2018; c) Quarter I of Risk Management in 2018; d) Others
5.	30 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembahasan Kebijakan SDM sd Triwulan I 2018. b) Pembahasan Kebijakan Manajemen Mutu s.d Triwulan I 2018. c) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Discussion of HR Policy as of the First Quarter of 2018; b) Discussion of Quality Management Policy as of the First Quarter of 2018; c) Others
6.	4 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembahasan Kendala dan Hambatan Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. b) Lain-lain
		<ul style="list-style-type: none"> a) Discussion of Constraints and Obstacles to the Construction of Kuala Tanjung Port. b) Others

AGENDA DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING AGENDA AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Materi Rapat/ Meeting Material
7.	28 Juni 2018	a) Realisasi investasi s.d Mei 2018. b) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa s.d Mei 2018. c) Lain-lain. a) Realization of investment as of May 2018; b) Realization of Procurement of Goods and Services as of May 2018; c) Others
8.	25 Juli 2018	Pembahasan LMPT Triwulan II tahun 2018. Discussion of Quarter II of 2018 Annual Company Management Report.
9.	31 Agustus 2018	Revisi Investasi 2018/ Revision on 2018 Investment
10.	19 September 2018	a) Pembahasan Tugas Dewan Komisaris. b) Usulan Kredit Investasi. c) Penunjukkan KAP Tahun 2018. d) Lain-lain a) Discussion on Commissioners Duties; b) Proposed Investment Credit; c) Appointment of 2018 Public Accountant Office; d) Others.
11.	19 Oktober 2018	a) Laporan Manajemen Triwulan III 2018. b) RKAP 2019. c) Lain-lain. a) Quarter III of 2018 Management Report; b) 2019 Work Plan and Budget; c) Others.
12	21 November 2018	a) Kebijakan dan Pelaksanaan IT s.d Oktober 2018. b) Kinerja Anak Perusahaan s.d Oktober 2018. c) Lain-lain. a) Policy and Implementation of IT as of October 2018; b) Performance of Subsidiaries as of October 2018; c) Others.
13.	19 Desember 2018 d	a) Pelaksanaan Pengendalian Internal s.d November 2018. b) Pelaksanaan Manajemen Risiko s.d November 2018. c) Lain-lain. a) Implementation of Internal Control as of November 2018; b) Implementation of Risk Management as of November 2018; c) Others.

b. Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sampai dengan bulan Desember 2018 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 kali. Rata-rata tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebesar 96,92%, dengan rincian sebagai berikut:

b. Level of Attendance of Board of Commissioners
As of December 2018, there have been 13 times Board of Commissioners meetings held. The average attendance rate at the Board of Commissioners' meetings during 2018 was 96.92%, with details as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	%
1.	Refly Harun	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100,00
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris/ Commissioner	13	12	92,31
3.	Winata Supriatna	Komisaris/ Commissioner	13	12	92,31

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	%
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo 2)	Komisaris/ Commissioner	4	4	100,00
5.	Heryadi 3)	Komisaris/ Commissioner	4	4	100,00
Rata-rata					96,92

- 1) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018
 2) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018
 3) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018

- 1) The term of office is appointed September 7, 2018
 2) The term of office is appointed September 7, 2018
 3) The term of office is appointed September 7, 2018

2. Direksi

- a. Materi Rapat Direksi
 Selama tahun 2018, Direksi telah melakukan rapat internal sebanyak 47.
- b. Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
 Sampai dengan bulan Desember 2018 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 47 kali. Rata-rata tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2018 sebesar 98,58%, dengan rincian sebagai berikut:

2. Directors

- a. Directors Meetings Material
 During 2018, the Board of Directors has held 47 internal meetings.
- b. Level of Attendance of the Board of Directors Meetings
 As of December 2018 there have been 47 Board of Directors meetings. The average attendance rate at the Board of Directors meeting during 2018 was 98.58%, with details as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	%
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	47	47	100,00
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director	47	47	100,00
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Operational & Commercial Director	47	43	91,48
4.	Hosadi Apriza Putra ¹⁾	Direktur Teknik Technical Director	6	6	100,00
5.	M. Nur Sodik ²⁾	Direktur Keuangan Financial Director	6	6	100,00
6.	Ihsanuddin Usman ³⁾	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	6	6	100,00
Rata-rata/ Average					98,58

- 1) Masa jabatan diangkat mulai 8 Oktober 2018
 2) Masa jabatan diangkat mulai 8 Oktober 2018
 3) Masa jabatan diangkat mulai 5 November 2018

- 1) The term of office is appointed from November 5, 2018
 2) The term of office is appointed from October 8, 2018
 3) The term of office is appointed from October 8, 2018

AGENDA DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT MEETING AGENDA AND ATTENDANCE LEVEL

3. Rapat Gabungan

a. Materi Rapat Gabungan

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat gabungan sebanyak 13 kali dengan materi pembahasan masalah strategis perusahaan, yaitu:

3. Joint Meetings

a. Materials of Joint Meetings

During 2018, the Board of Commissioners and the Board of Directors have conducted 13 joint meetings with material for discussing the company's strategic issues, namely:

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Materi Rapat/ Meetings Materials
1.	29 Januari 2018	a) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2017. b) Lain-lain yang berkembang dalam rapat. a) Discussion of Quarter IV of 2017 Management Report. b) Others which developed in meetings.
2.	12 februari 2018	a) Pembahasan Hasil Laporan General Audit KAP Tahun Buku 2017. b) Lain-lain yang berkembang dalam rapat. a) Discussion of the Results of Public Accountant Office General Audit Report of 2017fiscal year. b) Others which developed in meetings.
3.	15 Maret 2018	a) Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (LMPT) Tahun 2017 (Audited). b) Pembahasan Kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Port of Rotterdam. c) Pembahasan Audit oleh KAP terhadap Pelaksanaan PKBL Tahun 2017, (sesuai surat dari KBUMN No. S-28/D.7/MB/02/2018 tanggal 8 Februari 2018) d) Lain-lain yang berkembang dalam rapat a) Discussion of the Annual Company Management Report in 2017 (Audited). b) Discussion of Cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Port of Rotterdam. c) Discussion of Audit that conducted by the Public Accountant Office on 2017 Partnership and Environmental Development Program Implementation (according to the letter from Ministry of SOE No. S-28/D.7/MB/02/2018 dated February 8, 2018) d) Others which developed in meetings
4.	26 april 2018	a) Pembahasan Laporan Triwulan I Tahun 2018. b) Pembahasan Pengendalian Internal Triwulan I Tahun 2018. c) Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2018. d) Lain-lain yang berkembang dalam rapat. a) Discussion of 2018 First Quarter Reports; b) Discussion of Quarter I Internal Control in 2018; c) Discussion of 2018 First Quarter Risk Management; d) Others which developed in meetings.
5.	31 Mei 2018	a) Pembahasan Kebijakan SDM sd Triwulan I 2018. b) Pembahasan Kebijakan Manajemen Mutu sd Triwulan I 2018. c) Lain-lain yang berkembang dalam rapat. a) Discussion of HR Policy until the First Quarter of 2018; b) Discussion of Quality Management Policy in First Quarter of 2018; c) Others which developed in meetings.
6.	29 Juni 2018	a) Realisasi Investasi s.d Mei 2018. b) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa s.d Mei 2018. c) Lain-lain yang berkembang dalam rapat. a) Investment Realization as of May 2018; b) Realization of Procurement of Goods and Services as of May 2018; c) Others which developed in meetings.

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Materi Rapat/ Meetings Materials
7.	12 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Realisasi Investasi s.d Juni 2018 (Lanjutan). b) Progres Pembangunan Kuala Tanjung. c) RJPP 2019-2023. d) Pembaharuan Tata Nilai Perusahaan (CIPTa). e) Lain-lain. <ul style="list-style-type: none"> a) Investment Realization as of June 2018 (Continued); b) Kuala Tanjung Development Progress; c) Company's Long Term Plan for 2019-2023; d) Corporate Valuation Reform (CIPTa); e) Others.
8.	30 Juli 2018	Pembahasan LMPT Triwulan II Tahun 2018 Discussion of 2018 Quarter II of Annual Company Management Report.
9.	31 Agustus 2018	Revisi Investasi 2018 Revision of 2018 Investment
10.	19 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Program Pengenalan Perusahaan kepada Dekom Baru. b) Usulan Kredit Investasi. c) Penunjukan KAP untuk Pelaksanaan General Audit Tahun 2018. d) Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> a) Company Introduction Program to the New Board of Commissioners; b) Proposed Investment Credit; c) Appointment of Public Accountant Office for Implementation of General Audit in 2018; d) Others
11.	19 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Manajemen Triwulan III 2018. b) Pembahasan RKAP Tahun 2019. c) Lain-lain. <ul style="list-style-type: none"> a) 2018 Quarter III of Management Report; b) Discussion of 2019 Work Plan and Budget; c) Others.
12	21 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> a) Kebijakan dan Pelaksanaan IT s.d Oktober 2018. b) Kinerja Anak Perusahaan s.d Oktober 2018. c) Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> a) Policy and Implementation of IT as of October 2018; b) Performance of Subsidiaries as of October 2018; c) Others
13.	19 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Pengendalian Internal s.d November 2018. b) Pelaksanaan Manajemen Risiko s.d November 2018. c) Lain-lain. <ul style="list-style-type: none"> a) Implementation of Internal Control as of November 2018; b) Implementation of Risk Management as of November 2018; c) Others.

- b. Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan
Sampai dengan bulan Desember 2018 telah diselenggarakan Rapat Gabungan sebanyak 13 kali. Rata-rata tingkat kehadiran dalam rapat gabungan selama tahun 2018 sebesar 94,93%, dengan rincian sebagai berikut:

- b. Level of Attendance of Joint Meetings
Until December 2018 a Joint Meeting has been held 13 times. The average attendance rate at joint meetings during 2018 was 94.93%, with details as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	%
1.	Refly Harun 1)	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100,00
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris/ Commissioner	13	12	92,31
3.	Winata Supriatna	Komisaris/ Commissioner	13	12	92,31
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo 2)	Komisaris/ Commissioner	4	3	75,00
5.	Heryadi 3)	Komisaris/ Commissioner	4	4	100,00
6.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	13	13	100,00
7.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director	13	13	100,00
8.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Operational & Commercial Director	13	11	84,62
9.	Hosadi Apriza Putra4)	Direktur Teknik Technical Director	3	3	100,00
10.	M. Nur Sodiq5)	Direktur Keuangan Financial Director	3	3	100,00
11.	Ihsanuddin Usman6)	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	2	2	100,00
Average					94,93

- 1) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018
2) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018
3) Masa jabatan diangkat mulai 7 September 2018
4) Masa jabatan diangkat mulai 8 Oktober 2018
5) Masa jabatan diangkat mulai 8 Oktober 2018
6) Masa jabatan diangkat mulai 5 November 2018

- 1) The term of office is appointed from September 7, 2018
2) The term of office is appointed from September 7, 2018
3) The term of office is appointed from September 7, 2018
4) The term of office is appointed from November 5, 2018
5) The term of office is appointed from October 8, 2018
6) The term of office is appointed from October 8, 2018

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATE RELATION OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS

Selama tahun 2018 tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo 1 yang saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Pelindo 1 memiliki komitmen untuk mementingkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau kelompok manapun. Disamping itu, seluruh anggota Direksi Pelindo 1 tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BUMN lainnya dan perusahaan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

During 2018 there were no Pelindo 1 Board of Commissioners and Directors who had family relations with fellow members of the Board of Commissioners and/ or members of the Board of Directors.

In carrying out the duties, the Board of Commissioners, Directors and employees of Pelindo 1 have a commitment to prioritize the interests of the company above any personal or group interests. In addition, all members of the Pelindo 1 Board of Directors do not have concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers of other BUMNs and other companies, with details as follows:

NO	Nama/ Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With					
			Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Share Holders	
			YES	NO	YES	NO	YES	NO
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners								
1.	Refly Harun	Komisaris Utama President Commissioner		*		*		*
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris/ Commissioner		*		*		*
3.	Winata Supriatna	Komisaris/ Commissioner		*		*		*
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris/ Commissioner		*		*		*
5.	Heryadi	Komisaris/ Commissioner		*		*		*
Direksi/ Board of Directors								
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director		*		*		*
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director		*		*		*
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Operational & Commercial Director		*		*		*
4.	Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Technical Director		*		*		*
5.	M. Nur Sodik	Direktur Keuangan Financial Director		*		*		*
6.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director		*		*		*

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Pemegang Saham dalam menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan unsur keberagaman, baik dari sisi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan domisili anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Pelindo 1, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat tercermin dalam tabel berikut ini:

Shareholders in determining the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into account the diversity, whether in terms of age, sex, education and domicile of the members of the Board of Commissioners and Directors in Pelindo 1, the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors can be reflected in the following table:

NO	Nama/ Name	Jabatan Position	Keberagaman/ Diversity			
			Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Domisili Domicile
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners						
1.	Refly Harun	Komisaris Utama President Commissioner	49 Tahun 49 Years	Laki-Laki Male	S-3	Jakarta
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris/ Commissioner	62 Tahun 62 Years	Laki-Laki Male	S-3	Depok
3.	Winata Supriatna	Komisaris/ Commissioner	59 Tahun 59 Years	Laki-Laki Male	S-2	Tangerang
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris/ Commissioner	58 Tahun 58 Years	Laki-Laki Male	S-2	Jakarta
5.	Heryadi	Komisaris/ Commissioner	68 Tahun 68 Years	Laki-Laki Male	AKABRI	Bekasi
Direksi/ Board of Directors						
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	51 Tahun	Laki-Laki Male	S-2	Jakarta
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director	51 Tahun	Laki-Laki Male	S-2	Yogyakarta
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Operational & Commercial Director	55 Tahun	Laki-Laki Male	S-1	Medan
4.	Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Technical Director	46 Tahun	Laki-Laki Male	S-1	Medan
5.	M. Nur Sodik	Direktur Keuangan Financial Director	45 Tahun	Laki-Laki Male	S-2	Tangerang Selatan
6.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	49 Tahun	Laki-Laki Male	S-2	Jakarta

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Indikator Pengukuran Kinerja (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan Pemegang Saham/RUPS setiap tahun dengan melihat aspek keuangan dan aspek pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Selama tahun 2018 dilakukan Assessment atas realisasi dari indikator/target yang telah ditetapkan, dimana realisasi capaian tersebut menjadi tolok ukur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun berjalan.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Penilaian

Kinerja Dewan Komisaris

Kuasa Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menandatangani dan menyepakati indikator-indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris tahun 2018 yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN dengan prosedur sebagai berikut:

The Performance Measurement Indicators of the Board of Commissioners and Board of Directors have been determined by the Shareholders/ GMS every year by looking at the financial aspects and aspects of the overall management of the Company.

During 2018 an Assessment was carried out on the realization of the established indicators/ targets, where the realization of these achievements became a benchmark for the remuneration of the Board of Commissioners and Directors in the current year.

PROCEDURE FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Procedure for Evaluating the Performance of the Board of Commissioners

Proxy of Shareholders and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) signed and agreed on Key Performance Indicators of the Board of Commissioners in 2018 which refers to the Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/2011jo. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to State-Owned Enterprises Ministerial Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE with the following procedure:



PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menandatangani dan menyepakati indicator-indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 yang mengacu kepada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul sesuai Surat Wakil Menteri BUMN Nomor: S-508/MBU/WK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang shareholder aspiration dengan prosedur sebagai berikut:

PROCEDURE FOR DIRECTORS' PERFORMANCE EVALUATION

Proxy of Shareholders, Board of Commissioners and Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) signed and agreed on Key Performance Indicators as stated in the Management Contract in 2018 which refers to Excellent Performance Assessment Criteria in accordance with Letter of Deputy Minister of SOE Number: S-508/MBU/WK/2012 dated November 22 2012 concerning shareholder aspiration with the following procedure:



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan Pemegang Saham terkait KPI Dewan Komisaris Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners conducts performance evaluation set by the Shareholders regarding the Board of Commissioners' KPI in 2018, with details as follows:

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR PERSPECTIVE / INDICATOR	OUTPUT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION
			(%)	(%)	(%)
I	PROSES PERENCANAAN/ PLANNING PROCESS		30	30	30
1.	Pelaksanaan Pembahasan Audit KAP atas Laporan Keuangan (Audited) Tahun Buku 2017 Implementation of Public Accountant Office Audit Discussion on Audited 2017 Fiscal Year	Terlaksananya Pembahasan Audit KAP atas Laporan Keuangan (Audited) Tahun Buku 2017 antara Direksi, Dewan Komisaris dan KAP. Selambat-lambatnya Februari 2018 Realized the implementation of Public Accountant Office Audit Discussion on 2017 fiscal year, Audited Financial Statements between Directors, Board of Commissioners and Public Accountant Office. Not later than February 2018	5	5	5
2.	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Submission of Comments and Suggestions from the Board of Commissioners at the GMS Approval of Financial Statements of 2017 Fiscal Year	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. Selambat-lambatnya 31 Mei 2018 Realized the compilation of Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners at the GMS Approval of Financial Statements for the 2017 Financial Year. Not later than May 31, 2018	5	5	5
3.	Pemberian Aspirasi Dewan Komisaris (Commissioner's Aspiration) RKAP Tahun 2019 Providing the Board of Commissioners' Aspirations on Company Work Plan and Budget in 2019	Terlaksananya Pemberian Aspirasi Dewan Komisaris (Commissioner's Aspiration). RKAP Tahun 2019 Realized the implementation of Providing Aspirations of the Board of Commissioners on Company Work Plan and Budget in 2019	5	5	5
4.	Pelaksanaan Pembahasan Usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2019 Implementation of Discussion on Proposed Company Work Plan and Budget and Partnership and Environmental Development Program Work Plan and Budget in 2019	Terlaksananya Pembahasan Usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2019. Selambat-lambatnya Oktober 2018 Realized the implementation of Discussion on the Proposed Company Work Plan and Budget and Partnership and Environmental Development Program Work Plan and Budget in 2019. Not later than October 2018	5	5	5

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR PERSPECTIVE / INDICATOR	OUTPUT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION
			(%)	(%)	(%)
5.	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS RKAP dan RKA PKBL Tahun 2019 Submission of Comments and Suggestions from the Board of Commissioners at the GMS of Company Work Plan and Budget and 2019 Partnership and Environmental Development Program Work Plan and Budget	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS RKAP dan RKA PKBL Tahun 2019. Selambat-lambatnya 30 Januari 2019 Realized the compilation of Opinions and Suggestions from the Board of Commissioners at the GMS of Company Work Plan and Budget and 2019 Partnership and Environmental Development Program Work Plan and Budget Not later than January 30, 2019	5	5	5
6.	Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2019 Prepare the Board of Commissioners' Work Plan & Budget for 2019 Fiscal Year	Tersusunnya Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2019. Selambat-lambatnya Oktober 2018 Realized the compilation of the Board of Commissioners' Work Plan for 2019 Fiscal Year. Not later than October 2018	5	5	5
II	PROSES PELAKSANAAN USAHA IMPLEMENTATION PROCESS		30	30	30
1.	Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembuatan-Perbuatan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) The Written Approval of the Board of Commissioners for Directors' Actions, in accordance with the Company's Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Jumlah Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu. Paling lambat 7 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris The amount of Written Approval of the Board of Commissioners for Actions of Directors Provided on Time. No later than 7 calendar days after the complete document is received by the Board of Commissioners	5	5	5
2.	Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembuatan-Perbuatan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) The Written Response of the Board of Commissioners for the Actions of the Directors, in accordance with the Company's Articles of Association PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Jumlah Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu. Paling lambat 7 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris The amount of Written Responses from the Board of Commissioners for Actions of Directors Provided on Time. No later than 7 calendar days after the complete document is received by the Board of Commissioners	5	5	5

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR PERSPECTIVE / INDICATOR	OUTPUT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION
			(%)	(%)	(%)
3.	Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Implementation of the Board of Commissioners Internal Meetings is at least once a month	Jumlah Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris yang Dihasilkan Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Minimal 12 dokumen The amount of Minutes of Board of Commissioners Internal Meetings Produced at least once a month. At the minimum of 12 documents	10	10	10
4.	Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Implementation of a Joint Meeting of the Board of Commissioners - Directors at least once a month	Jumlah Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi yang Dihasilkan Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Minimal 12 dokumen The Amount of Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners - Directors Produced at least once a month. At the minimum of 12 documents	10	10	10
III	PROSES MONITORING & CONTROLLING PROCESS OF MONITORING & CONTROLLING		40	40	40
1.	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham atas Laporan Kinerja Triwulanan Submission of opinions and suggestions from the Board of Commissioners to Shareholders on the Quarterly Performance Report	Tersusunnya Pendapat dan Saran atas Laporan Kinerja Triwulan I, II, dan III. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebanyak 3 dokumen Realized the Compilation of opinions and suggestions on Quarter I, II, and III Performance Reports Board of Commissioner opinions and as much as of 3 documents	4	4	4
2.	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham atas Laporan Kinerja Tahunan Submission of opinions and suggestions from the Board of Commissioners to Shareholders on the Annual Performance Report	Tersusunnya Pendapat dan Saran atas Laporan Kinerja Tahunan Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebanyak 1 dokumen Realized the Compilation of Opinions and Suggestions for Annual Performance Reports Board of Commissioner opinions and suggestions as much as 1 document	4	4	4
3.	Penyampaian Laporan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Submission of the Board of Commissioners Evaluation Report on the Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Tersusunnya Laporan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of the Board of Commissioners' Evaluation Report on Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). As much as 2 documents	4	4	4

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR PERSPECTIVE / INDICATOR	OUTPUT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION
			(%)	(%)	(%)
4.	Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Manajemen Risiko Perusahaan Submission of Board of Commissioners' Direction regarding Corporate Risk Management	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Manajemen Risiko Perusahaan. sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of Direction of the Board of Commissioners in the form of Letters and/ or Minutes of Meetings on Corporate Risk Management. As much as 2 documents	4	4	4
5.	Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Sistem Teknologi Informasi yang Digunakan Perusahaan Submission of Board of Commissioners' Direction on Information Technology Systems Used by the Company	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/ atau Risalah Rapat tentang Sistem Teknologi Informasi yang Digunakan Perusahaan. sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of the Board of Commissioners' Direction in the form of Letters and/ or Minutes of Meeting on Information Technology Systems Used by the Company. As much as 2 documents	4	4	4
6.	Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Pengembangan SDM dan Pelaksanaannya Submission of Board of Commissioners' Direction regarding Policy of HR Development and its Implementation	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/ atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Pengembangan SDM dan Pelaksanaannya. sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of Direction of the Board of Commissioners in the form of a Letter and/ or Minutes of Meeting concerning Policy of HR Development and its Implementation. As much as 2 documents	4	4	4
7.	Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya Submission of Direction of the Board of Commissioners concerning Policy of Procurement and Implementation	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of Direction of the Board of Commissioners in the form of Letters and/ or Minutes of Meeting on Procurement Policies and its Implementation. As much as 2 documents	4	4	4

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR PERSPECTIVE / INDICATOR	OUTPUT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION
			(%)	(%)	(%)
8.	Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya Submission of Direction of the Board of Commissioners regarding Policy of Quality and Service and Implementation	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya. sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of Direction of the Board of Commissioners in the form of Letters and/ or Minutes of Meetings on Policy of Quality and Service and its Implementation. As much as 2 documents	4	4	4
9.	Penyampaian Laporan Perkembangan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN Submission of Progress Report on Board of Commissioners' Performance Achievement Indicators to the Minister of SOE	Laporan Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN disampaikan tepat waktu. sebanyak 2 dokumen Progress Report on the Realization of the Board of Commissioners' Performance Indicators To the Minister of SOE were submitted on time. As much as 2 documents	4	4	4
10.	Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2018 2018 Board of Commissioners' Work Plan Realization Report	Tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2018 (Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris). sebanyak 2 dokumen Realized the Compilation of 2018 Work Plan Realization Report (Board of Commissioners' Supervisory Task Report). 2 documents	4	4	4
Jumlah/ TOTAL			100	100	100

PENILAIAN**KINERJA DIREKSI****1. Kontrak Manajemen**

Direksi melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan Pemegang Saham terkait Kontrak Manajemen Perusahaan tahun 2018 dengan capaian sebesar 101,60 dengan rincian sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS**PERFORMANCE ASSESSMENT****1. Management Contract**

The Directors conduct a performance evaluation that has been determined by the Shareholders regarding the 2018 Company Management Contract with an achievement of 101.60 with the following details:

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS

No	INDIKATOR/ INDICATORS	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION	% CAPAIAN ACHIEVEMENT
A	KPI CORPORATE EKSISTING/ KPI CORPORATE EKSISTING					
I	KEUANGAN DAN PASAR FINANCE AND MARKET		24			25,46
1.	EBITDA Margin EBITDA Margin	%	8	45,33	48,71	107,45
2.	Capaian Pangsa Pasar Petikemas Achievement of Container Market Share	%	8	100	100	100
3.	EBITDA/Interest EBITDA/Interest	Kali Number of Times	8	8,93	9,89	110,80
II	FOKUS PELANGGAN FOCUS OF CUSTOMER		22			21,96
1.	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Likert Scale	7	3,89	3,91	100,51
2.	Indeks Keterikatan Pelanggan Customer Engagement Index	%	7	80	79,14	98,93
3.	Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan Follow-up of Customer Complaints	%	8	100	100	100
III	EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES EFFECTIVITY OF PRODUCT AND PROCESS		20			20,61
1.	Waiting Time for Pilot Waiting Time for Pilot	Jam Hour	4	0,02	0,01	105
2.	Produktivitas Bongkar Muat Terminal Petikemas Productivity of Container Load-Unloading Terminal	B/S/H	4	45	49,85	105
3.	Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR) Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR)	%	4	44,99	44,88	100,25
4.	Efektivitas Tambatan Petikemas Effectivity of Container Mooring	%	4	76,58	76,59	100,01
5.	Number of Costumer Served (Ships) Number of Coustomer Served (Ships)	GT	4	51.303.148	53.853.780	104,97
IV	FOKUS TENAGA KERJA FOCUS OF LABOR		17			16,09
1.	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index	Likert Scale	9	4	4	100
2.	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	Rp/Orang IDR/Person	8	924.518.541	888.611.725	96,12
V	KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY		17			16,84

No	INDIKATOR/ INDICATORS	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET	REALISASI REALIZATION	% CAPAIAN ACHIEVEMENT
1.	Ketepatan Penyampaian laporan Berkala Pada BUMN The Accuracy of Submitting Periodic Reports to SOE	%	5	100	100	100
2.	Skor GCG/ GCG Score	Score	4	94,35	94,35	100
3.	Skor KPKU/ KPKU Score	Score	4	526	545	103,61
4.	Penyerapan Investasi (CAPEX) Investment Absorption (CAPEX)	%	4	90	83,06	92,29
	TOTAL BOBOT KPI KORPORATE EKSTING (A) TOTAL WEIGHT OF EXISTING CORPORATE KPI (A)		100			101,56
B	KPI AGEN PEMBANGUNAN/ KPI OF DEVELOPMENT AGENT					
1.	Sinergi Antar BUMN Synergy between SOEs	%	20	30	41,99	105
2.	Kandungan Lokal Local Content	%	30	40	82,58	105
3.	Pembangunan Ekonomi Daerah/ Penugasan Pemerintah Regional Economic Development / Government Assignment	%	30	100	100	100
4.	Penciptaan Nilai Mandiri Mandiri Value Creation	%	30	100	100	100
	TOTAL BOBOT AGEN PEMBANGUNAN (B) TOTAL WEIGHT OF DEVELOPMENT AGENT (B)		100			102
	TOTAL BOBOT TERTIMBANG KPI TOTAL WEIGHT OF BALANCED KPI		100			101,60

2. Tingkat Kesehatan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan untuk tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan capaian skor 95,00 atau klasifikasi Sehat AA dengan rincian sebagai berikut:

2. Soundness Level

The evaluation of the soundness level of the Company for 2018 is based on the Minister of SOE Regulation Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 with a score of 95.00 or the AA Soundness classification with the following details:

No	Uraian/ Description	Bobot/ Weight	Target	Realisasi Realization	% Capaian Achievement
1.	Aspek Keuangan Aspect of Finance	50	44	45,00	102,27
2.	Aspek Operasional Aspect of Operational	35	33,60	35,00	104,17
3.	Aspek Administrasi Aspect of Administration	15	15	15,00	100,00
	Total Skor/ Total Score	100	92,60	95,00	102,59
	Kondisi/ Condition	SEHAT AAA HEALTHY AAA	SEHAT AAA HEALTHY AAA	SEHAT AAA HEALTHY AAA	SEHAT AAA HEALTHY AAA

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY OF REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Menunjuk Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SJ-148/MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 3 April 2018, dengan ini kami menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp155.000.000 perbulan, Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan 85% dari Gaji Direktur Utama.
2. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2018 sebesar Rp23.730.040.000,-

DEWAN KOMISARIS

1. Prosedur Penetapan Remunerasi

Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Performance Indicators (KPI) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris perusahaan.
- b. Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan term of reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen.

Referring to Minister of SOE Regulation Number: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and SOE Supervisory Board as amended, finally by the Ministry of SOE Regulation Number: PER-06/MBU/06/2018 date June 4, 2018 concerning the Third Amendment to the SOE Minister's Regulation Number: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and SOE Supervisory Board and Decree of the Minister of SOE Number: SJ-148/MBU/05/2018 dated 31 May 2018 concerning Determination of Income of Directors, Board of Commissioners, and SOE Supervisory Board in 2018 and following up on the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 2017 on April 3, 2018, hereby we submit 2018 Board of Directors and Board of Commissioners income determination with the following details:

1. The salary of the President Director is set at IDR 155,000,000.- per month, while the salary of other Directors is set at 85% of the Salary of the President Director.
2. The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the Director's Salary, while the honorarium of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.
3. Determination of bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Performance of the 2018 Fiscal Year is IDR 23,730,040,000.-

BOARD OF COMMISSIONERS

1. Procedure for Determining

the Remuneration of the Board of Commissioners

Provision of remuneration is an activity to assess the level of success or failure of company personnel in carrying out their duties and responsibilities assigned to them. Provision of remuneration is based on consideration of individual performance and responsibilities, as well as the level of position that carried out transparently therefore it can motivate in achieving company goals. The process of determining and giving remuneration for the Board of Commissioners are as follows:

- a. The Board of Commissioners signed a management contract that contained the Key Performance Indicators (KPI) and goals/ targets to be achieved during his tenure, before his appointment as the company's Board of Commissioners was determined.
- b. The Board of Commissioners prepares and establishes a term of reference (TOR) which contains a work plan, goals/ targets to be achieved in one year which is a description of the management contract.
- c. The Board of Commissioners evaluates the achievement of the Key Performance Indicators (KPI) with Self-Assessment whether collectively or

- c. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Key Performance Indicators (KPI) secara Self- Assessment baik kolektif maupun individual dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan Komisaris, minimal sekali dalam setahun.
- d. Pemegang saham melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual berdasarkan capaian Key Performance Indicators (KPI) dan realisasi RKAT.

individually by using assessment criteria that have been mutually agreed upon by members of the Board of Commissioners, at least once a year.

- d. Shareholders evaluate the performance of the Board of Commissioners collectively and individually based on the achievements of the Key Performance Indicators (KPI) and the realization of the Annual Work Plan and Budget.

2. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan perubahannya dengan struktur sebagai berikut:

2. Remuneration Structure of The Board of Commissioners

The Remuneration and Facility Structure for the Board of Commissioners has been adjusted to the Minister of SOE Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and SOE Supervisory Board and the changes are as follows:

No	Uraian/ Description	Keputusan Determination	Keterangan Explanation
1.	Gaji/ Allowance(s)		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium perbulan 20% from honorarium per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
	Asuransi Purna Jabatan Full Position Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari honorarium 1 tahun The premium borne by the company is 25% of the 1 year honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
2.	Fasilitas/ Facility		
	Tunjangan Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) In the form of health insurance or medical expenses reimbursement (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar pemakaian (at cost) As much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY OF REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

3. Rincian Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan penetapan honorarium Dewan Komisaris, maka remunerasi Dewan Komisaris tahun 2018 adalah sebagai berikut:

3. Details of Remuneration of the Board of Commissioners

Based on the determination of the Board of Commissioners' honorarium, the remuneration of the Board of Commissioners in 2018 are as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Gaji/ Honorarium Salary/ Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Penghasilan Bulanan Monthly Income	THR Religious Holiday Allowance
1.	Refty Harun	Komisaris Utama President Commissioner	69.750.000	13.950.000	83.700.000	69.750.000
2.	Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris Commissioner	62.775.000	12.555.000	75.330.000	62.775.000
3.	Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	62.775.000	12.555.000	75.330.000	62.775.000
4.	Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris Commissioner	62.775.000	12.555.000	75.330.000	62.775.000
5.	Heryadi	Komisaris Commissioner	62.775.000	12.555.000	75.330.000	62.775.000
Total			320.850.000	64.170.000	385.020.000	320.850.000

DEWAN DIREKSI

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan Direksi mengacu kepada evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala, proses penetapan gaji dan tunjangan Direksi adalah sebagai berikut:

- Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Performance Indicators (KPI) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan.
- Direksi menyusun Key Performance Indicators (KPI) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen.
- Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing Key Performance Indicators (KPI) dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.
- Hasil evaluasi Key Performance Indicators (KPI) Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS.
- Dewan Komisaris melakukan review sistem remunerasi Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan.

BOARD OF DIRECTORS

1. Procedure of Determination of Directors Remuneration

Salaries and allowance of Directors refer to the performance evaluations carried out in a comprehensive, tiered, and periodic manner, the process of determining the Directors' salaries and allowance are as follows:

- Board of Directors sign a management contract that contains the Key Performance Indicators (KPI) and goals/ targets to be achieved during his term of office, before his appointment as the company's Board of Directors is determined.
- Board of Directors form a Key Performance Indicators (KPI) containing work plans, goals/ targets to be achieved in one year and quarterly which are the elaboration of management contracts.
- Board of Directors report the realization of the achievement of the targets of each Key Performance Indicators (KPI) in quarterly and annual reports to the Commissioners both individually and collectively for evaluation.
- The evaluation results of the Directors' Key Performance Indicators (KPI) by the Board of Commissioners are the media for evaluating the Board of Directors' accountability at the GMS.
- Board of Commissioners review the remuneration system of the Board of Directors before submitted to the GMS for determination.

2. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan perubahannya dengan struktur sebagai berikut:

2. Remuneration Structure of Board of Directors

The Remuneration and Facility Structure for Directors has been adjusted to the Minister of SOE Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and SOE Supervisory Board and changes with the following structure:

No	Uraian/ Description	Keputusan Determination	Keterangan Explanation
1.	Tunjangan/ Allowance		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali Gaji 1 (one) time of Salary	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
	Asuransi Purna Jabatan Full Position Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun The premium borne by the company is 25% of the salary in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp25.000.000 -perbulan IDR25,000,000. –per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 if the company has provided a house of residence, it must be used until the term of office of the Board of Directors ends and the person is not given a housing allowance.
2.	Fasilitas/ Facility		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the company's financial condition	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500cc The specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500cc
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) In the form of health insurance or medical expenses reimbursement (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018

No	Uraian/ Description	Keputusan Determination	Keterangan Explanation
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assisstant Facility	Sebesar pemakaian (at cost) As much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 In accordance with PER-04/MBU/2014 jo PER-02/MBU/06/2016 jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018

3. Rincian Remunerasi Direksi

Berdasarkan penetapan gaji Direksi, maka remunerasi Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

3. Details of Directors Remuneration

Based on the Directors' salary determination, the remuneration of the Board of Directors in 2018 are as follows:

No	Nama/ Name	Jabatan Position	Gaji/ Honorarium Salary/ Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Penghasilan Bulanan Monthly Income	THR Religious Holiday Allowance
1.	Bambang Eka Cahyana	Direktur Utama President Director	155.000.000	25.000.000	180.000.000	155.000.000
2.	M. Hamied Wijaya	Direktur SDM HR Director	131.750.000	25.000.000	156.750.000	131.750.000
3.	Syahputera Sembiring	Direktur Operasi & Komersial Operational & Commercial Director	131.750.000	25.000.000	156.750.000	131.750.000
4.	Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Technical Director	131.750.000	25.000.000	156.750.000	131.750.000
5.	M. Nur Sodik	Direktur Keuangan Financial Director	131.750.000	25.000.000	156.750.000	131.750.000
6.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	131.750.000	25.000.000	156.750.000	131.750.000
Total			813.750.000	150.000.000	963.750.000	813.750.000

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

MEKANISME PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN (Good Corporate Governance) bahwa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan, melalui prosedur sebagai berikut:

SELECTION MECHANISM OF THE PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE

In accordance with the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, that the Company's Annual Financial Report is audited by external auditors appointed by the GMS from candidates submitted by the Board of Commissioners through the Audit Committee which conducts the process of appointing prospective external auditors in accordance with the provisions for the procurement of goods and services of the Company, through the following procedure:

No	Uraian/ Description	Realisasi/ Realization
1.	Pemilihan calon KAP dilakukan oleh Direksi dengan melalui pengawasan oleh Komite Audit Selection of Public Accountant Office candidates is carried out by Directors through supervision by the Audit Committee	Berita Acara No. BA-KA01/DK/PP-1/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Kemampuan Teknis 3 Calon Pemenang Pengadaan Jasa General Audit Tahun Buku 2018 Minutes No. BA-KA01 / DK / PP-1 / IX / 2018 dated September 20, 2018 concerning Minutes of Verification Results of Technical Capability Calculation of 3 Prospective Winners of General Audit Service Procurement for 2018 Fiscal Year
2.	Dewan Komisaris mengajukan surat permohonan KAP kepada Pemegang Saham The Board of Commissioners submits a letter of application for Public Accountant Office to the Shareholders	Dewan Komisaris mengajukan surat permohonan penetapan KAP kepada Pemegang Saham sesuai dengan Surat Nomor: UM57/210/DK/PP.I/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Board of Commissioners submits a letter of application for the appointment of Public Accountant Office to Shareholders in accordance with Letter Number: UM57/210/DK/PP.I/X/2018 dated 22 October 2018
3.	Pemegang Saham menyampaikan Penetapan KAP kepada Dewan Komisaris Shareholders submit Public Accountant Office Appointment to the Board of Commissioners	Pemegang Saham telah menyampaikan Surat Penetapan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun Buku 2018 sesuai Surat Nomor: S-727/MBU/10/2018 tanggal 29 oktober 2018 Shareholders have submitted Public Accountant Office Appointment Letters to audit the Consolidated Financial Statements and Subsidiaries as well as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Partnership and Environment Development Program Report for 2018 Fiscal Year after Letter Number: S-727/MBU/10/2018 dated 29 October 2018
4.	Dewan Komisaris menyampaikan penetapan KAP kepada Direksi The Board of Commissioners submits the Public Accountant Office Appointment to the Board of Directors	Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: KU.66/260/DK/PP.I/XI/2018 tanggal 02 November 2018 perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun Buku 2018. Letter of the Board of Commissioners to the President Director Number: KU.66/260/DK/PP.I/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning the Appointment of the Public Accounting Office to audit the Consolidated Financial Statements and Subsidiaries and the Partnership and Environment Development Program Report of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for 2018 Fiscal Year.
5.	SPI memberikan nota dinas kepada Divisi Pusat Pengadaan Internal Audit Unit provides official notes to the Procurement Center Division	Nota Dinas Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern kepada Kepala Divisi Pusat Pengadaan Nomor: 318/SPI/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Penetapan Auditor KAP tahun 2018. Service Note of the Head of Division of Internal Monitoring Unit to Head of Procurement Center Division Number: 318/SPI/XI/2018 dated November 13, 2018 concerning Appointment of Public Accounting Office Auditors in 2018.

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2018 berdasarkan Surat Pemegang Saham Nomor: S-727/MBU/10/2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun Buku 2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu menetapkan KAP Helianto dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2018.

PERIODE DAN BIAYA AKUNTAN PUBLIK

Periode dan biaya Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Tahun Buku Fiscal Year	KAP Public Accountant Office	Alamat KAP Address of Public Accountant Office	Fee KAP (Rp) Fee (IDR)
1.	2018	Helianto & Rekan	TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310	1.088.350.000
2.	2017	Kanaka Puradiredja, Suhartono	The Royal Palace Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A-C 29 Jakarta Selatan 12810	1.020.140.000
3.	2016	Helianto & Rekan	TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310	1.070.300.000
4.	2015	Helianto & Rekan	TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310	971.080.000
5.	2014	Helianto & Rekan	Aminta Plaza, 7th Floor Suite, JL. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310	1.023.770.000

RUANG LINGKUP PEKERJAAN AKUNTAN PUBLIK

- Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak Tahun Buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
- Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00050/2.0459/AU.2/05/1107-1/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
- Melaksanakan Audit Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang diterapkan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
- Melaksanakan Audit Kinerja di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2018 sesuai Laporan Nomor: 00021/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING OFFICE

Appointment of Public Accountant Office for 2018 based on Shareholder Letter Number: S-727/MBU/10/2018 concerning the Appointment of Public Accountant Office to audit the Consolidated Financial Statements and Subsidiaries as well as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Partnership and Environment Development Program Report for Financial Year 2018 dated October 29, 2018, that appoint Public Accountant Office, Helianto and Partners to conduct audits of the Consolidated Financial Statements and Subsidiaries as well as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Partnership and Environment Development Program Reports which will end on December 31, 2018.

PERIOD AND COST OF PUBLIC ACCOUNTANTS

The period and costs of the Public Accountant Office that audits the company's financial statements for the past 5 years are as follows:

SCOPE OF WORK OF A PUBLIC ACCOUNTANT

- Perform a General Audit of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Consolidated Financial Statements and Subsidiary Entities for 2018 fiscal year in accordance with Report Number: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 dated 11 February 2019.
- Perform a General Audit of the Financial Report of the Partnership and Environment Development Program of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for 2018 fiscal year according to Report Number: 00050/2.0459/AU.2/05/1107-1/1/II/2019 dated February 11, 2019.
- Perform Compliance Audit on legislation and Internal Control applied at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for 2018 fiscal year according to Report Number: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 dated February 11, 2019.
- Perform Performance Audit at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for 2018 fiscal year in accordance with Report Number: 00021/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 dated February 11, 2019.

KODE ETIK

CODE OF ETHICS

Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan tekad dari seluruh Insan Pelindo 1 untuk berperilaku terbaik dalam berinteraksi dengan pelanggan, pemerintah dan sesama manusia serta dalam Perusahaan sebagai perwujudan nilai-nilai yang telah menyatu dalam Perusahaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Lampiran IV.

POKOK-POKOK KODE ETIK

1. Tata Nilai Perusahaan
 - a. Fokus Kepada Pelanggan
 - b. Integritas
 - c. Profesionalisme
 - d. Kerja Sama
2. Pedoman Tata Etika Usaha
 - a. Standar etika dalam berhubungan dengan stakeholder
 - b. Pemberian kesempatan yang Sama untuk mendapatkan promosi
 - c. Integritas laporan keuangan
 - d. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi
 - e. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
3. Pedoman Etika Perilaku
 - a. Etika jajaran manajemen dan pegawai
 - b. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja
 - c. Perilaku asusila narkoba, obat terlarang, perjudian dan merokok
 - d. Kontribusi dan aktivitas politik
 - e. Menjaga dan menggunakan aset perusahaan
 - f. Kerahasiaan informasi
 - g. Benturan kepentingan
 - h. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi.
4. Kebijakan Disiplin
 - a. Penegakan dan pelaporan
 - b. Pelanggaran dan sanksi

Pengungkapan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Etika Usaha dan Etika Kerja ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU tanggal 19 November 2015 Lampiran IV berlaku bagi seluruh pegawai perusahaan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Code of Conduct diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua insan Pelindo 1 melalui berbagai media yang dimiliki, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, kepada segenap insan Pelindo 1 disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis.

Business Ethics and Work Ethics are the determination of all Pelindo 1 Persons to behave their best in interacting with customers, the government and fellow human beings and within the Company as an embodiment of the values that have been united in the Company as determined by the Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU dated November 19, 2015 Appendix IV.

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS

1. Corporate Values
 - a. Focus to Customer
 - b. Integrity
 - c. Professionalism
 - d. Cooperation
2. Guidelines of Business Ethics
 - a. Ethical standards in dealing with stakeholders
 - b. Give Equal opportunity to get a promotion
 - c. Integrity of financial statements
 - d. Giving and receiving gifts, entertainment, entertainment and giving donations
 - e. Concern for work health and safety
3. Code of Conduct Ethics
 - a. Ethics among management and employees
 - b. Maintain occupational health and safety
 - c. Drug abuse, drugs, gambling and smoking
 - d. Political contributions and activities
 - e. Maintain and use company assets
 - f. Confidentiality of information
 - g. Conflict of interest
 - h. Avoid personal conflicts.
4. Disciplinary Policy
 - a. Enforcement and reporting
 - b. Violations and sanctions

Disclosure That The Code of Ethics Applies To All Organizational Levels

Business Ethics and Work Ethics are determined by the Decree of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU dated November 19, 2015 Appendix IV, applies to all company employees.

SOCIALIZATION OF THE CODE OF ETHICS

The Code of Conduct is disclosed and/ or socialized to all Pelindo 1 personnel through various media, including through information technology that can be easily accessed by all employees at any time. Periodically, to all Pelindo 1 personnel it is delivered through Memo media and/ or Circular from the Directors regarding the implementation of business ethics.

Media Sosialisasi Penyebaran Code of Conduct antara lain melalui:

1. Website
2. Buku
3. CD
4. Poster
5. Buletin Internal

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama Tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran Kode Etik

Social Media for Code of Conduct Socialization, among others are through:

1. Websites
2. Books
3. CDs
4. Posters
5. Internal Bulletin

NUMBER OF CODE OF ETHICS VIOLATIONS

During 2018 there was no violation of the Code of Ethics

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

VIOLATION REPORTING SYSTEM

Perusahaan memiliki Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU Lampiran V tanggal 19 November 2015.

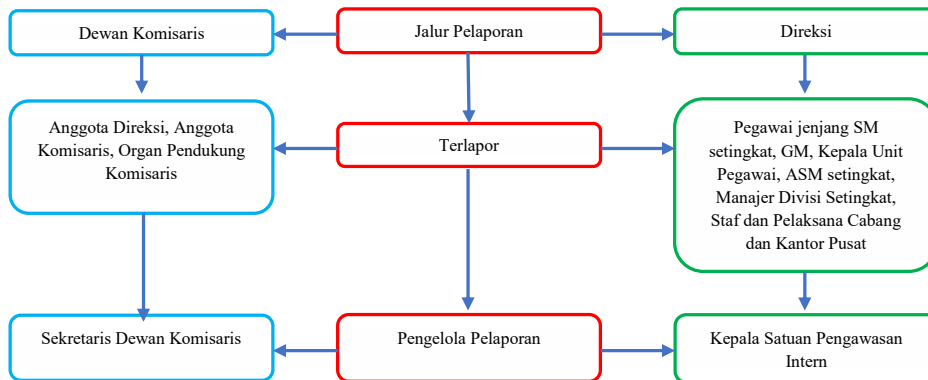
The company has a Reporting Mechanism Guidelines for Alleged Deviations in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU Annex V dated November 19, 2015.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Direksi membentuk tim pengelola pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai level pelaku atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

Directors form a reporting management team for alleged deviations in the company that are determined based on the Decree of Directors according to the level of the perpetrator for alleged irregularities in the company with the division of tasks as follows:



PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor.
2. Perlindungan pelapor memiliki manfaat atas kepastian perlakuan terhadap pelapor atas kerahasiaan pelapor sehingga mendorong keberanian melaporkan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan.
3. Pelapor dapat mengadukan apabila mendapat balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan balasan lain yang dialaminya.
4. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor meliputi:
 - Pemecatan yang tidak adil
 - Penurunan jabatan atau pangkat
 - Pelecehan atau diskriminasi
5. Perusahaan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sampai berubah status diperiksa.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengelola Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya. Hasil verifikasi dimuat dalam berita acara hasil verifikasi dan dilaporkan kepada Direktur Utama.
2. Direksi mempelajari laporan dan kesimpulan dari pengelola pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan beserta bukti awal yang ada, dan kemudian menempatkan, apakah pelaporan perlu ditindaklanjuti ke tahap investigasi atau tidak (ditutup).
3. Berita acara hasil verifikasi yang akan diproses ke tahap investigasi disampaikan/ diteruskan oleh Direksi kepada tim investigasi.
4. Terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang melibatkan oknum pegawai maka tim investigasi akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
5. Tim investigasi melakukan proses investigasi atas pelaporan yang diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Bila dipandang perlu, masa kerja ini dapat diperpanjang paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil investigasi dimuat dalam berita acara hasil investigasi dan dilaporkan kepada Direksi sesuai dengan level pelaku atas dugaan penyimpangan pada perusahaan.
6. Direksi mempelajari laporan dan kesimpulan dari tim investigasi jalur terkait, dan kemudian memberikan keputusan kepada pengelola pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan, apakah pelaporan perlu ditindaklanjuti atau tidak (ditutup).
7. Apabila pengelola pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan setelah mendapatkan keputusan Direksi menyatakan terbukti adanya atas dugaan penyimpangan pada perusahaan oleh terlapor maka Direksi harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

PROTECTION FOR REPORTERS

1. Company is obliged to protect the reporter.
2. Protection of reporter has benefit of certainty towards treatment to the reporter for the confidentiality of the reporter therefore it encourage to report the alleged deviations occurred in the company.
3. The reporter may complain if he/ she gets response in the form of pressure or threat or other counter measures that he/ she experiences.
4. Company provides protection to the reporter include:
 - Unfair dismissal
 - Demotion
 - Harassment or discrimination
5. Company maintains the confidentiality of the reporter's identity until the status of being examined is changed.

HANDLING OF COMPLAINTS

1. Reporting Manager for alleged deviations in the company verifies the incoming report within 30 (thirty) working days which can be extended for a maximum of the following 30 (thirty) days. The verification results are included in the minutes of verification results and reported to the President Director.
2. Directors study the reports and conclusions from the reporting manager for alleged deviations in the company along with the initial evidence that exists, and then places, whether the reporting needs to be followed up to the investigation stage or not (closed).
3. The minutes of verification that will be processed into the investigation stage are submitted/ forwarded by Directors to the investigation team.
4. Regarding to report of the alleged deviations in the company involving individuals, therefore, the investigation team will further be stipulated in the Decree of Board of Directors.
5. Investigation team conducts an investigation process on reports that received within 30 (thirty) working days. If deemed necessary, this work period can be extended for a maximum for the following 30 (thirty) working days. The results of the investigation are included in the minutes of the investigation results and be reported to Directors in accordance with the level of the perpetrators for alleged deviations in the company.
6. Board of Directors study the reports and conclusions from the relevant investigation team line, and later gives a decision to the reporting manager for the alleged deviations in the company, whether the report needs to be followed up or not (closed).
7. If the reporting manager of the alleged deviations in the company after obtaining a decision from Board of Directors, stated proven that there is an alleged deviation in the company by the reported party, Board of Directors must follow up in accordance with the

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN VIOLATION REPORTING SYSTEM

8. Hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai maka ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan
9. Hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.
10. Hasil investigasi menunjukkan tidak terbukti adanya pelanggaran/ penyimpangan oleh terlapor, maka terlapor dinyatakan tidak bersalah.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Perusahaan menerima setiap pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang diajukan oleh internal perusahaan, stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders secara tertulis, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Apabila terlapor adalah pegawai (pegawai jenjang SM Setingkat, General Manager, Kepala Unit, Asisten Menejer, Menejer divisi, Stat dan pelaksana) disampaikan melalui:
 - a. Website Perusahaan www.pelindol.co.id atau email: pelaporan@pelindol.co.id
 - b. Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

*Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
u.p Pengelola Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
pada Perusahaan
Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan*
 - c. Drop box, yang ditempatkan di lobby utama Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
 - d. Isi pelaporan agar menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai pelaku/ terlapor.
 - e. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan wajib menyampaikan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang akan disampaikan.
 - f. Admin pelaporan (selanjutnya disebut admin pelaporan) menerima, meregister, memilah dan meneruskan laporan kepada pengelola pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
 - g. Dalam ketentuan ini penunjukan admin pelaporan ditetapkan adalah Menejer Administrasi dan Monitoring pada SPI.

applicable laws.

8. The results of the investigation which prove that there is a disciplinary violation by the employee therefore will be followed up through a mechanism in accordance with the applicable provisions in the company
9. The results of the investigation which prove that violations by employees lead to criminal offenses will be followed up by legal proceedings that apply to law enforcement agencies with Directors as the officials to submit cases.
10. If the results of the investigation indicate that there was no evidence of violations/ deviations by the reported party, the reported party was stated not guilty.

COMPLAINTS ADMINISTERING PARTIES

Company accepts any report of alleged deviations in the company submitted by the company internal, stakeholders and/ or representatives of stakeholders in writing, with the following mechanism:

1. If the reported party is an employee (an employee at SM level, General Manager, Head of the Unit, Assistant Manager, Division Manager, Staff and executor) submitted through:
 - a. Company Website www.pelindol.co.id or email: pelaporan@pelindol.co.id
 - b. An official letter addressed to Board of Directors, by direct delivery or by post to the company with the address:

*Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
u.p The Reporting Manager of The Alleged
Deviations In The company
Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan*
 - c. Drop box, which placed in the main lobby of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Headquarters.
 - d. Report content to explain fully and clearly the alleged deviations in the company which reported as well as those suspected of being perpetrators/ reported parties.
 - e. Report on alleged deviations in the company must enclose supporting evidence such as documents relating to transactions carried out and/ or report on alleged deviations in the company which will be submitted.
 - f. Reporting Administrator (hereinafter referred to as reporting admin) receive, register, sort and forward reports to the reporting manager for alleged deviations in the company and ensure the confidentiality of the reporter's identity.
 - g. In this provision, the appointment of reporting admin is determined by the Administration and Monitoring Manager at Internal Monitoring Unit.

2. Apabila terlapor adalah oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris disampaikan melalui :
 - a. Website Perusahaan www.pelindo.co.id atau email: pelaporan@pelindo.co.id
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

*Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
U.p Pengelola Pelaporan Atas dugaan penyimpangan
pada Perusahaan
Kantor Perwakilan Jakarta
Menara Ravindo Lt. 10 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta*

- c. Drop box, yang ditempatkan di lobby utama Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- d. Dalam ketentuan ini penunjukan admin pelaporan ditetapkan adalah Sekretaris Dewan Komisaris.

JUMLAH PENGADUAN

Berdasarkan Laporan Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2018, tidak terdapat laporan pengaduan yang diterima melalui saluran pelaporan pelanggaran

2. If the reported party is a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, submitted through :
 - a. Company's website www.pelindo.co.id or email: pelaporan@pelindo.co.id
 - b. Submit an official letter addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery or by post to the company with the address:

*Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
U.p The Reporting Manager of The Alleged
Deviations In The company Jakarta Representative
Office
Menara Ravindo Lt. 10 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta*

- c. Drop box, which placed in the main lobby of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Headquarters.
- d. In this provision, the appointment of reporting admin as determined is the Secretary of the Board of Commissioners.

NUMBER OF REPORT

Based on the Internal Audit Unit Report as of December 31, 2018, there were no reports of complaints received through the violation reporting channel

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

STATE ADMINISTRATORS ASSETS REPORT

DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Dalam rangka mendorong agar penerapan GCG dapat berjalan lebih efektif, Perusahaan menetapkan ketentuan terkait penyampaian LHKPN. Ketentuan penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada peraturan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/BUMN/2011 pasal 2 (1) yang mewajibkan BUMN menerapkan GCG.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.
5. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KP.31/55/22/PI-17-TU tentang Penetapan Pejabat Struktural Yang Wajib Mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Administrasi Pengelola Data Wajib Laporan LHKPN Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

LAPORAN LHKPN

Selama Tahun 2018 Perusahaan menetapkan sebanyak 195 wajib lapor, yang sudah melaporkan sebanyak 176 orang dengan capaian sebesar 90,25%, dengan rincian sebagai berikut:

BASIS OF LEGAL AND REGULATION

In order to encourage the implementation of GCG to be more effective, the Company establishes provisions related to the submission of State Administrators Assets Report. Provisions for submitting State Administrators Assets Report in the Company refer to the following rules:

1. Law Number: 28 of 1999 concerning the State Administrator that are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law Number: 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/BUMN/2011 article 2 (1) which requires SOE to implement GCG.
4. Decree of the Secretary of the SOE Minister Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessing and Evaluating Good GCG Implementation;
5. Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: KP.31/55/22/PI-17-TU concerning Determination of Structural Officials Who Are Obligated to Fill In The State Administrators Assets Report and State Administrators Assets Compulsory Reporting Data Management Administration in the Environment PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

STATE ADMINISTRATORS ASSETS REPORT

During 2018 the Company stipulated that as many as 195 compulsory report, which had reported as many as 176 people with achievements of 90.25%, with details as follows:

No	Kantor/ Office	Wajib Lapor Compulsory Report	Sudah Lapor Have Been Reported	Belum Lapor Not Reported Yet	% Capaian Achievement
1.	Pimpinan Tertinggi/ Supreme Leader	1	1	0	100
2.	Wakil Pimpinan/ Deputy Chairperson	3	3	0	100
3.	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	0	100
4.	Komisaris/ Commissioner	3	2	1	66,66
5.	Direktorat Bisnis/ Directorate of Business	26	26	0	100
6.	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	24	24	0	100
7.	Non Direktorat/ Non Directorate	23	21	2	91,30
8.	Direktorat Perencanaan & Pengembangan Directorate of Planning & Development	19	17	2	89,47
9.	Direktorat SDM & Umum Directorate of HR & General	22	22	0	100
10.	Cabang Dumai/ Branch of Dumai	8	6	2	75
11.	Cabang Belawan/ Branch of Belawan	11	11	0	100
12.	Cabang TG Pinang/ Branch of Tanjung Pinang	3	3	0	100

No	Kantor/ Office	Wajib Laporan Compulsary Report	Sudah Laporan Have Been Reported	Belum Laporan Not Reported Yet	% Capaian Achievement
13.	Cabang Tembilahan/ Branch of Tembilahan	2	2	0	100
14.	Cabang Batam/ Branch of Batam	3	1	2	33,33
15.	Cabang Malayahati/ Branch of Malahayati	4	4	0	10
16.	Cabang Sungai Pakning Branch of Sungai Pakning	3	3	0	100
17.	Cabang Gunung Sitoli Branch of Gunung Sitoli	3	1	2	33,33
18.	Cabang Kuala Tanjung Branch of Kuala Tanjung	3	3	0	100
19.	Cabang Sibolga/ Branch of Sibolga	3	1	2	33,33
20.	Cabang Karimun Branch of Tanjung Balai Karimun	5	4	1	80
21.	Cabang TG.B. Asahan Branch of Tanjung Balai Asahan	3	3	0	100
22.	Cabang Lhokseumawe Branch of Lhokseumawe	2	1	1	50
23.	Cabang Pekanbaru Branch of Pekanbaru	5	4	1	80
24.	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Belawan Domestic Container Terminal	5	4	1	80
25.	Belawan International container Terminal Belawan International Container Terminal	7	5	2	71,42
26.	Galangan Kapal Belawan Belawan Shipyard	3	3	0	100
Total		195	176	19	90,25

GRATIFIKASI

GRATIFICATION

Untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Sebagai salah satu implementasinya adalah larangan bagi setiap Insan Pelindo 1 untuk memberikan dan menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung berupa hadiah, suap dan sejenisnya kepada penyelenggara negara, mitra kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan pihak-pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

To carry out sound business practices, the Company is committed to implementing business ethics based on GCG principles. As one of the implementations, it is prohibited for every Pelindo 1 employee to give and promise, either directly or indirectly in the form of gifts, bribes and the like to state administrators, work partners, and other parties related to the Company, where the gift is known or appropriate to be allegedly used to influence and mobilize these parties to do or not to do something in their position that is contrary to their obligations.

Company people are also prohibited from accepting anything that is illegal from stakeholders with the intention of

GRATIFIKASI GRATIFICATION

Insan Perusahaan juga dilarang menerima apapun yang tidak sah dari stakeholders dengan maksud untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Perusahaan, meminta hadiah, entertainment atau dalam bentuk lainnya. Secara lebih rinci kebijakan terkait hal tersebut diatur tersendiri dalam Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU Lampiran V tanggal 19 November 2015.

Batasan Gratifikasi

1. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan. Batasan Pemberian Hadiah, Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.
 - b. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Tidak Diperbolehkan dalam bentuk uang tunai.
 - c. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Tidak Diperbolehkan dalam bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
 - d. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud.
 - e. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada perusahaan atas undangan resmi dari perusahaan.
 - f. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang/ uang/setara uang, diperbolehkan, dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
 - g. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif perusahaan

providing personal benefits and harming the interests of the Company, requesting gifts, entertainment or in other forms. In more detail, the policy related to this matter is regulated separately in the Prohibition of Giving and Receiving Gifts or Bribery (Gratification) in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Environment as outlined in the Decree of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU Appendix V dated November 19, 2015.

Limitation of Gratification

1. Limitation on Appropriation of Gifts/ Souvenirs and Entertainment

Limitations on Appropriation of Gifts, Souvenirs and/ or Entertainment of Pelindo 1 Commissioners, Directors and Employees are as follows:

 - a. Appropriation of gifts/ souvenirs and/ or banquet and/ or entertainment, is permitted as long as the appropriation is intended to foster good relations within the appropriate limits and pay attention to equal relations, mutual respect and does not aim to bribe the party concerned to give something to the Company that are not the Company's rights legally. Examples of such gifts are banquets, sports activities, tickets to art shows, books, music recordings , etc.
 - b. Appropriation of Gifts/ Souvenirs and/ or Entertainment is not permitted in the form of Cash Payment.
 - c. Appropriation of Gifts/ Souvenirs and/ or Entertainment is not permitted in the forms that violate decency and law.
 - d. Appropriation of Gifts/ Souvenirs in the form of goods intended for promotion of the Company, must include the Company's logo which is an integral part of the said item.
 - e. Provision of meeting honorariums to Third Parties, is permitted as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given to the company at the official invitation of the company.
 - f. Appropriation of Gifts/ Souvenirs in the form of goods/ money/ equivalent to money, are permitted, in the case of the Board of Commissioners, Directors and Pelindo 1 Employees attending a Wedding, Circumcision, Birth, or Disaster event, with a maximum value of Rp 1,000,000 (one million rupiah) for each event, as long as the gift does not mean to influence the recipient, to do and/ or not to do anything related to his position/ post.
 - g. Banquets do not need to be limited, to the extent that they are reasonable and carried out in a respectable place and still maintain a positive image of the company.

2. Batasan Penerimaan Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan

Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
 - Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan.
 - Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainya.
 - Bukan berupa pemberian yang melanggar kesucilaan dan hukum.
- b. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- c. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/ setara uang, diperbolehkan, dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- d. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut :
 - Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 atau anggota keluarganya.
 - Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan hiburan.
 - Tidak mengganggu waktu kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 yang bersangkutan.
 - Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

2. Limitation on Receipt of Gifts/ Souvenirs and Entertainment.

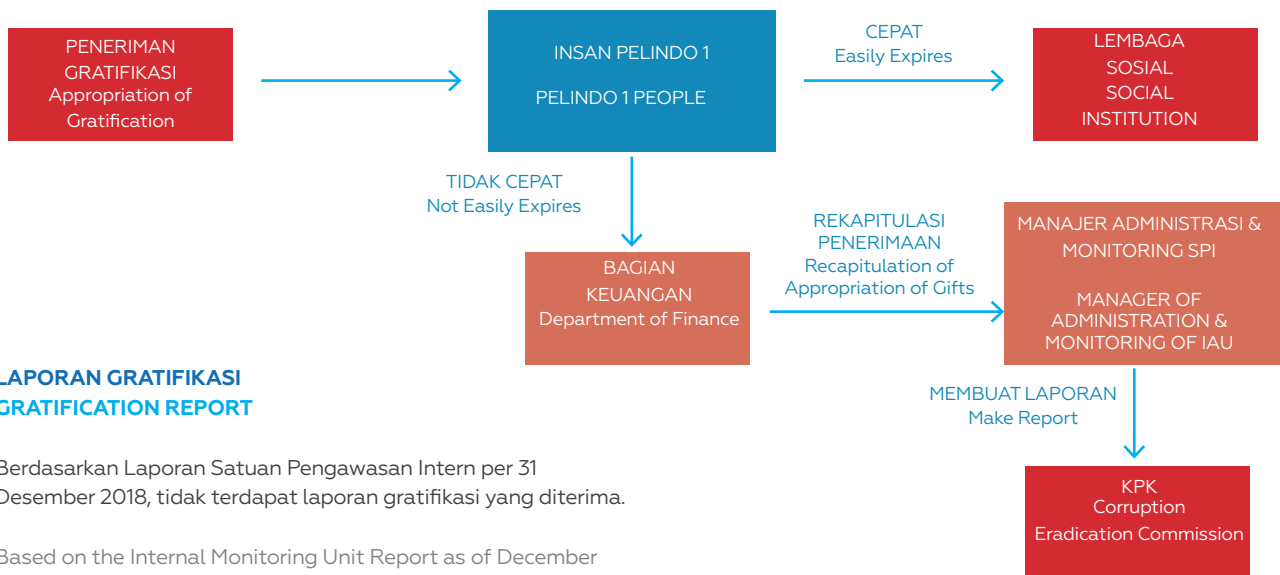
Limitations on Gifts/ Souvenirs and/ or Entertainment that may be received by the Board of Commissioners, Directors and Employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are as follows:

- a. Receiving Gifts/ Souvenirs that include the logo/ name of the giving company, with restrictions that must be fulfilled entirely as follows:
 - Logos, company names/ parties that provide the objects in question are inseparable parts of the policies/ promotions of the giving company and are objects that are commonly used as a form of corporate promotion.
 - Objects which do not have high financial value, such as books, compact discs and so on.
 - Not kind of gift that violates decency and law.
- b. Receiving honorarium as a speaker, resource persons who are officially invited by the Third Party are permitted, as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been provided, insofar as the appropriation does not intend to influence the Commissioners, Directors and Employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to do and/ or not to do something related to his position/ post.
- c. Receiving Gifts/ Souvenirs in the form of goods/ money/ equivalent to money, is permitted, in the case of Pelindo 1 Board of Commissioners, Directors and Employees to hold weddings, circumcisions, births, or related to disaster, with a maximum giving value of IDR. 1,000,000 (one million rupiah) per event, insofar as the appropriation does not intend to influence Board of Commissioners, Directors and Employees of Pelindo 1, to do and/ or not to do anything related to their position/ post.
- d. Receive Entertainment that is still within the limits of reasonableness, by meeting the overall limits, as follows:
 - Entertainment does not carried out continuously by the giver to Pelindo 1 Commissioners, Directors and Employees or family members.
 - If the rejection of the said entertainment is feared to affect institutional business relations between Companies and Third Parties that offer entertainment.
 - Does not interfere working hours of the relevant Pelindo 1 Board of Commissioners, Directors and Employees.
 - Does not conduct discussions regarding the provision of internal information about the Company that may cause fraud and conflict of interest.

GRATIFIKASI GRATIFICATION

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

MECHANISM OF GRATIFICATION REPORT



LAPORAN GRATIFIKASI GRATIFICATION REPORT

Berdasarkan Laporan Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2018, tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima.

Based on the Internal Monitoring Unit Report as of December 31, 2018, there were no reports of gratification received.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SETTLEMENT OF LEGAL PROBLEMS


Terdapat 9 masalah hukum yang dihadapi Pelindo 1 terjadi di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

There were 9 legal issues faced by Pelindo 1 in 2018, with details as follows:

No	No Perkara Case Number	Lokasi Location	Obyek Gugatan Accusation Object	Posisi Penyelesaian Settlement Position
1.	Perkara Perdata No.111/Pdt.Sus.PHI/2018/ PN.Mdn Civil Case No.111/Pdt.Sus.PHI/2018/ PN.Mdn	Medan	Kekurangan uang pesangon dan upah Lack of severance pay and wages Cancellation of Agreement Letter No. B.VIII-518/BLW-US.25 dated September 26, 2018 to conduct land use cooperation on Jl. Indrapura Ujung	Kasasi Cassation
2.	Perkara Perdata No. 672/ Pdt.G/2018/PN.Mdn Civil Case No. 672/Pdt.G/2018/ PN.Mdn	Medan	Pembatalah Surat Perjanjian No. B.VIII-518/BLW-US.25 tanggal 26 September 2018 untuk melakukan kerja sama penggunaan lahan di Jl. Indrapura Ujung	Agenda Sidang Mediasi (Pertama) Agenda of Medaition Session (First)

No	No Perkara Case Number	Lokasi Location	Obyek Gugatan Accusation Object	Posisi Penyelesaian Settlement Position
3.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis Civil Case No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis	Kuala Tanjung	Kepemilikan atas tanah seluas 10.000 m2 di Dusun II Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sel Suka, Kabupaten Batur Bara Ownership of 10,000 m2 land in Dusun II Alai, Kuala Tanjung Village, Sel Suka District, Batur Bara Regency	Agenda Sidang Pembacaan Gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran Agenda of Claims Reading Session in the Kisaran District Court
4.	Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis Civil Case No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis	Kuala Tanjung	Kepemilikan atas tanah seluas 447 m2 di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sel Suka, Kabupaten Batur Bara Ownership of 447 m2 land at Dusun III Alai, Kuala Tanjung Village, Sel Suka District, Batur Bara Regency	Agenda Sidang Pembacaan Gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran Agenda of Claims Reading Session in the Kisaran District Court
5.	Perkara Perdata No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis Civil Case No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis	Kuala Tanjung	Keberatan atas bentuk dan besaran ganti kerugian atas lahan seluas 21.481,16 m2 di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sel Suka, Kabupaten Batur Bara Objection to the form and amount of compensation for the area of 21,481.16 m2 in Kuala Tanjung Village, Sel Suka District, Batur Bara Regency	Putusan : Permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima Verdict: The claim of plaintiff is not acceptable
6.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2018/ PN.Dum Civil Case No. 6/Pdt.G/2018/ PN.Dum	Dumai	Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penerbitan Telegram Kementerian Perhubungan cq Dirjenhubla No. 65/VI/DM/17 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Edaran no. UM.50/16/20/DUM.17.TU tanggal 8 September 2017 Act Against the Law for the Issuance of Telegram of the Ministry of Transportation cq Directorate General of Sea Transportation No. 65/VI/DM/17 dated June 16, 2017 dan Circullar Letter no. UM.50/16/20/DUM.17.TU dated September 8, 2017	Putusan : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Verdict: Declare the claim of plaintiff is not acceptable
7.	Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2018/ PN.Tpg Civil Case No. 60/Pdt.G/2018/ PN.Tpg	Tanjung Pinang	Kepemilikan atas tanah seluas 5.500 m2 di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Ownership of 5,500 m2 of land in Sungai Walang Area, Kijang Village, Bintan Timur District, Bintan Regency	Agenda Sidang pembacaan Duplik di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Agenda of Duplicate reading session in Tanjungpinang District Court
8	Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2018/PN.Tpg Civil Case No. 61/Pdt.G/2018/PN.Tpg	Tanjung Pinang	Kepemilikan atas tanah seluas 5.500 m2 di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Ownership of 5,500 m2 of land in Sungai Walang Area, Kijang Village, Bintan Timur District, Bintan Regency	Agenda Sidang pembacaan Duplik di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Agenda of Duplicate reading session in Tanjungpinang District Court
9	Perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2018/ PN.Tpg Civil Case No. 62/Pdt.G/2018/ PN.Tpg	Tanjung Pinang	Kepemilikan atas tanah seluas 3.600 m2 di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Ownership of 3,600 m2 of land in Sungai Walang Area, Kijang Village, Bintan Timur District, Bintan Regency	Agenda Sidang pembacaan Duplik di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Agenda of Duplicate reading session in Tanjungpinang District Court





TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

COMPANY SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mewujudkan pelabuhan berwawasan lingkungan maka Perusahaan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dan perusahaan telah memiliki tata kelola lingkungan hidup.

As a form of the Company's commitment in realizing an environmentally sound port, therefore, the Company participates in environmental conservation, and the company implement environmental management.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

KEBIJAKAN

Kegiatan utama dari Pelindo 1 adalah pengelolaan jasa kepelabuhanan yang berhubungan dengan pelayanan kapal, pelayanan barang serta pelayanan lain-lain di pelabuhan. Saat ini aktivitas operasional di Pelindo 1 tidak melibatkan kegiatan produksi yang menghasilkan limbah, tetapi kami menyadari bahwa kegiatan pelabuhan pada skala tertentu tetap menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional pelabuhan adalah akibat yang timbul dari pembukaan lahan untuk pembangunan maupun perluasan pelabuhan.

Dampak yang timbul terutama berkaitan dengan perubahan kontur muka bumi. Selain itu, kami menyadari bahwa kegiatan operasional pelabuhan turut menggunakan energi listrik sebagai penerangan baik bagi aktivitas perkantoran, lapangan, maupun untuk mengoperasikan peralatan operasional pelabuhan. Pelindo 1 juga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas, memakai kertas untuk berbagai macam tujuan serta refrigerant dari alat pendingin. Berbagai hal tersebut turut berdampak terhadap lingkungan baik menambah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau emisi karbon (CO₂) di atmosfer dan emisi gas perusak ozon yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan, Pelindo 1 memberikan perhatian pada dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa. Kinerja lingkungan menjadi bagian penting dari pencapaian kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik diperlukan komitmen seluruh komponen Perusahaan untuk melakukan pendekatan yang sistematis dan penyempurnaan yang berkelanjutan dalam suatu sistem manajemen lingkungan. Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mewujudkan pelabuhan berwawasan lingkungan maka Perusahaan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dan perusahaan telah memiliki tata kelola lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: PP.27/1/10/PI-15.TU tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pedoman Penerapan Green Port Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Sertifikasi ISO 14.001 di beberapa Pelabuhan.

TARGET DAN KEGIATAN

Penggunaan Kertas

Dalam rangka mengurangi limbah kertas baik dalam penggunaan maupun dalam proses penyimpanan, Pelindo 1 telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan yang sebelumnya menggunakan kertas secara bertahap diganti dengan menggunakan aplikasi teknologi.
2. Dalam proses penyimpanan dokumen (arsip) perusahaan, telah dikembangkan dengan menggunakan teknologi

POLICY

The main activity of Pelindo 1 is the management of port services related to ship services, goods services and other services at the port. At present the operational activities at Pelindo 1 do not involve production activities that produce waste, but we realize that port activities on a certain scale still have an impact on the environment. One of the impacts arising from port operational activities is the result of land clearing for port construction and expansion.

The impact that arises is mainly related to changes in the contour of the earth. In addition, we recognize that port operations also use electricity as lighting for office, field activities and to operate port operational equipment. Pelindo 1 also uses fuel oil for official vehicles, uses paper for various purposes and refrigerants from refrigerators. These various things also have an impact on the environment, both increasing greenhouse gas (GRK) emissions or carbon (CO₂) emissions in the atmosphere and the emissions of ozone-depleting gases that cause global warming.

In relation with increasing the awareness towards environmental quality protection and management, Pelindo 1 pays attention to the environmental impacts of activities, products and services. Environmental performance is an important part of achieving the Company's overall performance. To achieve good environmental performance, the commitment of all components of the Company is required to take a systematic approach and continuous improvement in an environmental management system. As a form of the Company's commitment in realizing an environmentally sound port, therefore, the Company participates in environmental conservation, and the company implement environmental management in accordance with Directors' Decree Number: PP.27/1/10/PI-15. TU dated October 23, 2015 concerning the Implementation Guidelines of Green Port at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and ISO 14001 Certification in several Ports.

GOAL AND ACTIVITIES

Paper Usage

In order to reduce paper waste both in use and in the storage process, Pelindo 1 has carried out activities as follows:

1. Developing the use of corporate information technology, so that company activities that previously used paper were gradually replaced by using technology applications.
2. In the process of storing company's documents (archives), it has been developed using technology to

penyimpanan dokumen dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik/digital yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada. Perubahan proses ini memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dokumen.

3. Perusahaan akan menghitung rasio penggunaan kertas setiap unit kerja sebagai dasar untuk mengurangi pemakaian kertas.

Penggunaan Energi

1. Penggunaan Listrik

Dalam pengelolaan kegiatan perusahaan baik yang bergerak dalam bidang Industri maupun dalam bidang jasa tidak terlepas dari pemakaian sumber energi listrik. Pelindo 1 menyikapi hal tersebut dengan berinisiatif mengurangi konsumsi energi listrik.

Guna mendorong upaya efisiensi penggunaan energi listrik, aktivitas yang telah dilakukan adalah:

- a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan perusahaan mengenai penggunaan dan penghematan listrik.
- b. Mengingat pentingnya penerangan kantor dan juga upaya Pelindo 1 dalam menghemat energi listrik, perusahaan menggunakan lampu yang memiliki hemat energi.
- c. Agar lebih efisien dalam pemakaian energi listrik, perusahaan melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang pentingnya penggunaan listrik.
- d. Perusahaan telah meraih sertifikat laik operasi untuk pusat listrik tenaga diesel (generator set) berdasarkan laporan inspeksi teknik kelaikan operasi yang berlaku hingga tanggal 05 Juni 2023 oleh Lembaga Inspeksi Teknik PT Nalendra Halilintar Samudra.

2. Penggunaan Bahan Bakar

Perusahaan menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertamina untuk kendaraan operasional perusahaan baik untuk kendaraan roda empat maupun untuk kendaraan roda dua. Penggunaan jenis Pertamina lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan jenis bensin atau solar.

3. Penggunaan Air

Dalam pengelolaan kegiatan perusahaan selain membutuhkan energi listrik juga tidak terlepas dari pemakaian air dengan bekerjasama dengan Perusahaan Air Minum (PAM) setempat. Pelindo 1 menyikapi hal tersebut dengan berinisiatif mengurangi konsumsi air baik ditingkat pusat maupun di setiap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Guna mendorong upaya efisiensi penggunaan energi listrik, aktivitas yang telah dilakukan adalah:

- a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan perusahaan

store documents from paper documents into electronic/digital documents that are integrated with existing applications. This process change provides benefits in increasing the efficiency and effectiveness of document management.

3. The company will calculate the ratio of paper usage of each work unit as a basis for reducing paper usage.

Energy Usage

1. Electricity Usage

In managing the activities of companies that are engaged in the field of industry or in the service field, they cannot be separated from the use of electricity sources. Pelindo 1 respond this matter by taking the initiative to reduce electricity consumption.

In order to encourage the electricity use efficiency, the activities that have been carried out are:

- a. Stipulate and implement company policies regarding the use and savings of electricity.
- b. In view of the importance of office lighting and Pelindo 1's efforts to save electricity, the company uses energy-saving lamps.
- c. In order to be more efficient in using electricity, the company socialized to employees about the importance of electricity usage.
- d. The company has obtained an operational feasibility certificate for a diesel power plant (generator set) based on an inspection report on the technical feasibility of operations that are valid until the date 05 Juni 2023 by Technical Inspection Institute PT Nalendra Halilintar Samudra.

2. Fuel Usage

The company uses the Pertamina type fuel for the company's operational vehicles both for four-wheeled vehicles and for two-wheeled vehicles. The use of the Pertamina type is more environmentally friendly compared to gasoline or diesel.

3. Water Usage

In managing the company activities, besides requiring electricity energy it is also inseparable from the water usage therefore, Company collaborates with the local Drinking Water Company (PAM). Pelindo 1 responded to this matter by taking the initiative to reduce water consumption both at the central level and at each Regional Office and Branch Office.

In order to encourage the water usage efficiency, the activities that have been carried out are:

- a. Stipulate and implement company policies

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

- mengenai penggunaan dan penghematan air, listrik, telepon, bahan bakar dan kertas.
- Perusahaan melakukan edukasi untuk semua level manajemen dan karyawan tentang arti penting penghematan penggunaan air untuk operasional perusahaan berkelanjutan.
 - Perusahaan telah menyediakan anggaran penggunaan air setiap tahun, baik untuk kebutuhan Kantor Pusat maupun memenuhi kebutuhan operasional Kantor Wilayah/Cabang.

- regarding the use and savings of water, electricity, phone call, fuel and paper.
- The company educates all level of management and employees about the importance of saving electricity usage for sustainable company operational.
 - The company has provided a water usage budget every year, both for the needs of the Head Office and fulfill the operational needs of the Regional/Branch Offices.

Pengelolaan Limbah

Dalam mencegah pencemaran tanah dan air, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan karyawan, perusahaan mengurangi jumlah limbah anorganik dengan mengirim ketempat pembuangan akhir bekerjasama dengan pengelola sampah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Kegiatan operasional pelabuhan tentu menghasilkan limbah domestik. Saat ini pelabuhan telah merancang pengelolaan limbah terpadu untuk kegiatan operasional pelabuhan

Waste Management

In preventing land and water pollution, as well as maintaining environmental hygiene and employee health, the company reduces the amount of inorganic waste by sending to landfills work in collaboration with waste managers and coordinating with the Local Government. Port operational activities certainly produce domestic waste. At present the port has designed integrated waste management for port operations.



Untuk menjaga lingkungan hidup khususnya penyebaran limbah, perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan dan pembuangan sampah sehingga perusahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap lingkungan hidup, Biaya lingkungan dapat disebut juga biaya kualitas lingkungan. Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya aktifitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan telah mengalokasikan biaya/anggaran yang akan mempengaruhi peningkatan kualitas lingkungan hidup di pelabuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pengelolaan lingkungan yang berdampak :

- Dampak langsung seperti penyusunan dokumen lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup.
- Dampak tidak langsung seperti melakukan perawatan pada peralatan bongkar muat untuk menjaga kondisi peralatan

To protect the environment, especially the spread of waste, the company makes every effort to save and dispose of waste so that the company can contribute positively to the environment. Environmental costs can also be called environmental quality costs. As with quality costs, environmental costs are costs that occur due to company activities that affect the quality of the environment. In this case, the company has allocated costs/budgets that will affect the improvement of the quality of the environment in the port both directly and indirectly. Impact environmental management programs are as follows:

- Direct impacts such as the preparation of environmental documents and environmental preservation.
- Indirect impacts such as carrying out maintenance on loading and unloading equipment to protect the condition of loading and unloading equipment and

bongkar muat dan pembakaran secara optimal sehingga pencemaran pada gas buang peralatan tersebut berkurang.

burning optimally so that pollution in the exhaust gas of the equipment is reduced.

Selama tahun 2018, Pelindo 1 menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran limbah sebagai berikut:

Pelindo 1 has budget for the activities which related to waste management as follows:

Kegiatan/ Activities	Anggaran/ Budget
Dokumen Lingkungan/ Environmental Document	11.960.000.000
Fasilitas Baru/ New Facilities	167.094.010.000
Peralatan Baru/ New Equipment	746.030.000.000
Perbaikan Fasilitas/ Facility Repair	287.309.000.000
Perbaikan Peralatan/ Equipment Repair	37.552.000.000
Total Anggaran/ Total Budget	1.249.945.010.000

SERTIFIKASI

Perusahaan dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya selalu mengacu pada penerapan standar eksternal yang memberikan standar kelayakan operasi yang jelas dan terukur. Salah satu standar eksternal yang diterapkan oleh perusahaan adalah Manajemen Mutu ISO 14.001. Perolehan sertifikasi Manajemen Mutu ISO 14.001 merupakan komitmen perusahaan untuk memperoleh pengakuan secara internasional dan sekaligus memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan akan penciptaan nilai yang berkesinambungan atas pengelolaan perusahaan.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang ijin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Seluruh pelabuhan Pelindo 1 telah memiliki dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Secara rutin, di wilayah kerja Pelindo 1 dilakukan pemantauan lingkungan dengan pengambilan sampel air dan udara ambien untuk memastikan bahwa parameter lingkungan sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan sesuai peraturan lingkungan hidup. Upaya pengendalian pencemaran udara, air dan limbah antara lain dengan melakukan penghijauan penanaman pohon, meminimalisir limbah dari kegiatan bongkar muat, memaksimalkan pengoperasian road sweeper untuk penyapuan debu di badan jalan, dan pengelolaan limbah pelabuhan.

CERTIFICATION

Companies in running their business activities always referring to the external standards application that provide clear and measurable standardization of operational feasibility. One of the external standards applied by the company is ISO 14001 Quality Management. Obtaining ISO 14.001 Quality Management certification is the company's commitment to obtain international recognition and at the same time provide confidence for stakeholders in sustainable value creation for the management of the company.

In relation to Government Regulation (PP) Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits and Minister of Environment Regulation Number 16 of 2012 concerning Preparation of Environmental Document, All Pelindo 1 ports have had AMDAL documents (Analysis of Environmental Impacts).

Routine monitoring is carried out in the Pelindo 1 work area environmental by taking samples of water and ambient air to ensure that environmental parameters are in accordance with the quality standards required in environmental documents in accordance with environmental regulations. Efforts to control air, water and waste pollution include reforestation of trees, minimizing waste from loading and unloading activities, maximizing road sweeper operations for sweeping dust on the road, and managing port waste.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY
EMPOWERMENT

KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU.65/3/22/P.I/03 tanggal 13 Februari 2003 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan bahwa perusahaan ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan kondisi sebagai berikut:

TARGET DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL

Perusahaan melaksanakan program pengembangan sosial melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial dengan realisasi Rp. 11.504.799.012,- atau 78.58% dari jumlah yang dialokasikan sebesar Rp. 14.640.000.000.

POLICY

Based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises Partnership Program and Community Development Program and the Decision of the Directors of PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: KU.65/3/22/P.I/03 dated February 13, 2003 concerning Partnership and Community Development related to companies participating in social development and community empowerment programs

GOAL AND ACTIVITIES ON SOCIAL DEVELOPMENT

The company implement a social development program through the development of social facilities and infrastructure with the realization of Rp. 11,504,799,012, - or 78.58% of the allocated amount of Rp. 14,640,000,000.

NO	Uraian Description	Realisasi Tahun 2017 Realization of 2017	RKAP Tahun 2018 RKAP Year 2018	Realisasi Tahun 2018 Realization of 2018	%	
					Capaian Achievement	Pertumbuhan Growth
a	b	c	d	e	$f=(e/d)*100$	$g=(e-c)/c*100$
1.	Bantuan Korban Bencana Alam Assistance to Natural Disaster Victims	280.000.000	300.000.000	467.900.000	155.96	67.22
2.	Bantuan Pendidikan Dan Atau Latihan Education and/ or training assistance	3.619.500.000	2.810.000.000	2.022.104.400	71.96	(44.13)
3.	Bantuan Peningkatan Kesehatan Health Improvement Assistance	5.473.461.049	430.000.000	157.000.000	35.81	(97.13)
4.	Bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana And infrastructure Development Assistance	25.000.000	2.045.000.000	2.121.600.876	103.74	8386.40
5.	Bantuan Sarana Ibadah Worship Facilities	773.201.200	3.725.000.000	3.863.718.246	103.72	399.70

NO	Uraian Description	Realisasi Tahun 2017 Realization of 2017	RKAP Tahun 2018 RKAP Year 2018	Realisasi Tahun 2018 Realization of 2018	%	
					Capaian Achievement	Pertumbuhan Growth
a	b	c	d	e	$f=(e/d)*100$	$g=(e-c)/c*100$
6.	Bantuan Pelestraian Alam Nature Conservation Assistance	844.429.500	535.000.000	456.615.490	85.34	(45.93)
7.	Bantuan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Community Social Assistance In order to poverty alleviation	1.882.922.000	4.795.000.000	2.415.860.000	50.38	28.30
TOTAL		12.898.513.749	14.640.000.000	11.504.799.012	78.58	(10.81)

1. Pembangunan Drainase Dan 3 (Tiga) MCK/Kamar Mandi Di Batam Melalui Program PKT (Padat Karya Tunai) (Kampung Panau kelurahan Kabil kecamatan Nongsa Batam)

Kegiatan BUMN Program Padat Karya Tunai di Batam pada tanggal 11, 12 dan 13 April 2018 dengan BUMN PIC : Pelindo 1 sedangkan BUMN Co-PIC : Badan Klasifikasi Indonesia, Sucofindo dan Persero Batam.

Program Padat Karya Tunai di wilayah Batam di pusatkan di Kampung Panau Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa berupa pembangunan Drainase sepanjang 300 meter dan pembuatan masing-masing kamar mandi/MCK di 3 sekolah di lingkungan kecamatan Nongsa juga dirangkai dengan pemberian bea siswa, tas dan buku untuk siswa.

Pelaksanaan Program ini ditinjau langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Menpan RB Asman Abnur, Jaksa Agung H.M Prasetyo, Gubernur Kepulauan Riau Nurdi Basirun, Walikota Batam Muhammad Rudi, Direktur Utama Pelindo 1 Bambang Eka Cahyana beserta para Direksi BUMN lainnya.

Latar belakang Program Padat Karya Tunai adalah untuk mengurangi tingginya angka pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingginya jumlah desa tertinggal maka diperlukan langkah nyata dan cepat untuk mengatasi masalah tersebut di atas.

1. Construction of Drainage and 3 (Three) Bathrooms/ MCK in Batam through PKT (Cash For Work) Program (Kampung Panau kelurahan Kabil kecamatan Nongsa Batam)

Cash For Work SOE (BUMN) Programs Activities in Batam on April 11, 12 and 13 April, 2018 with SOE PIC: Pelindo 1 while SOE Co-PIC: Indonesia Classification Agency, Sucofindo and Persero Batam.

Cash For Work Programs in Batam region centralized in Kampung Panau Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa in the form of drainage construction alongside 300 meters and bathrooms/MCK construction in 3 schools at kecamatan Nongsa also arranged with the provision of scholarships, bags and books for students.

This Program Implementation is directly supervised by Minister of SOE Rini Soemarno with Ministry of administrative reforms (Menpan) RB Asman Abnur, Attorney General H.M Prasetyo, Governor of Riau Islands Nurdi Basirun, Mayor of Batam Muhammad Rudi, President Director of Pelindo 1 Bambang Eka Cahyana with others SOE Board of Directors.

The background of Cash For Work Program is to reduce high unemployment level, high poverty level, the low level of community welfare and the high number of disadvantaged villages, therefore, real and quick steps are needed to overcome the above problems.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL
& PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL DEVELOPMENT
AND COMMUNITY EMPOWERMENT



Foto kegiatan Program Padat Karya Tunai untuk pembuatan drainase

Photograph of Cash For Work Program activities for making drainage

Foto kegiatan Program Padat Karya Tunai untuk pembuatan MCK/kamar mandi

Photograph of Cash For Work Program activities for making MCK/bathrooms

2. Bantuan Renovasi Sekolah Alam Di Ekowisata Mangrove Belawan, Kelurahan Sicanang Belawan Propinsi Sumatera Utara

Ekowisata mangrove Sicanang telah berdiri sejak Tahun 2014 yang diinisiasi oleh Yagasu (Yayasan Gajah Sumatera) bersama Pokdarwis dan seluruh elemen masyarakat Kelurahan Sicanang Belawan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ekowisata Mangrove merupakan salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab serta peran sebagai penggerak berkembangnya kepariwisataan, perlindungan ekosistem mangrove, terwujudnya sapta pesona guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan kowisata mangrove adalah sekolah alam. Berdiri pada tahun 2016, difasilitasi Yagasu dan sekolah alam ini tidak dipungut/ gratis buat anak-anak nelayan di sekitar ekowisata mangrove. Bangunan sekolah alam dibangun pada Tahun 2015, hasil swadaya masyarakat. Namun, kondisi bangunan sangat prihatin karena bangunan dibuat dari kayu dan bambu yang sudah lama, lapuk dan tua. Begitu juga jembatan yang merupakan jalan penghubung sekolah alam sudah lapuk. Kondisi bangunan dan jembatan sangat membahayakan bagi anak-anak, pelajar dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan sekolah alam.

Kondisi bangunan sekolah alam dan jembatan jalan menuju sekolah alam sangat memprihatinkan terbuat dari bambu serta kayu Papan dan bambunya sudah lapuk dan tua, sehingga sangat khawatir dengan keselamatan anak-anak, pelajar maupun masyarakat yang berkunjung.

Berkaitan hal tersebut, agar anak-anak nelayan di sektor Mangrove Sicanang dapat belajar lebih kondusif, aman, serta semangat belajarnya tinggi. PT. Pelindo (Persero) I membantu rehabilitasi sekolah alam mangrove tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018.



2. Natural school renovation assistance in Belawan Mangrove Ecotourism, Kelurahan Sicanang Belawan Province of North Sumatera

Sicanang mangrove ecotourism has been established since 2014 initiated by Yagasu (Sumatran Elephant Foundation) with Pokdarwis and all elements of the Kelurahan Sicanang Belawan community. Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Mangrove Ecotourism is one of the institutions in the community, has concern, responsibility and role as a driver of development in tourism, protection of mangrove ecosystems, the realization of sapta charm (sapta pesona) to improve welfare for the community.

One of the activities of the tourist city of mangroves is the school of nature. Established in 2016, Facilitated by Yagasu and this natural school was not collected/ free for fishermen's children around mangrove ecotourism. Natural school buildings were built in 2015, resulting from community self-help. However, the condition of the building is very concerned because the building is made of wood and bamboo that are aged, weathered and old. Likewise, the bridge which is a natural school connecting road has been decayed. The condition of buildings and bridges is very dangerous for children, students and communities who carry out natural school activities.

The condition of the natural school building and the road bridge to the natural school is very worrying made of bamboo and wooden board and the bamboo is aged and old, so it is very worried about the safety of children, students and the people who visit.

In this regard, the children of fishermen in the Sicanang Mangrove sector can learn more conducive, safe, and have a high learning spirit. PT. Pelindo (Persero) I helped rehabilitate the natural mangrove school in the amount of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) in 2018.



TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

3. Pembuatan Rambu Laut Untuk Daerah 3T, Pulau Laut Dan Pulau Subi Di Kepulauan Natuna Propinsi Kepulauan Riau (Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Pulau Subi Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau)

PULAU LAUT merupakan pulau terluar Indonesia yang merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau Laut dapat ditempuh perjalanan dari pusat Kabupaten Natuna sekitar 7 jam perjalanan menggunakan kapal.

PULAU SUBI merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur (Kalimantan Utara). Pulau Subi dapat ditempuh perjalanan dari pusat Kabupaten Natuna sekitar 7 jam menggunakan kapal.

Pulau pulau yang ada di Kabupaten Natuna sepanjang pinggiran pantai banyak di kelilingi oleh batu batu yang dapat membuat kapal kapal kecil yang ingin bersandar rusak akibat benturan batu batuan di sepanjang pesisir pantai. Oleh karena itu Pelindo 1 menyalurkan program bina lingkungan berupa rambu rambu laut yang terletak di pinggir pantai untuk membantu penambatan kapal kapal sehingga tidak mengalami kerusakan akibat benturan benturan batu. Dengan adanya bantuan di Pulau terluar yaitu P. Subi dan P. Laut diharapkan bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Daerah 3T.

3. Making Sea Signs for 3T Areas, Laut Island and Subi Island in the Natuna Islands, Riau Islands Province

(Kecamatan Pulau Laut and Kecamatan Pulau Subi Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau)

LAUT ISLAND is Indonesia's outermost island which is a sub-district in Natuna Regency, Natuna Islands which borders with the South China Sea. Pulau Laut can be traveled from the center of Natuna Regency about 7 hours by boat.

SUBI ISLAND is the outermost island of Indonesia which is located on the Natuna Sea which is directly adjacent to the State of eastern Malaysia (North Kalimantan). Subi Island can be traveled from the center of Natuna Regency around 7 hours by boat.

There are many islands in Natuna Regency along the coastline surrounded by rocks that can damage small ships that want to lean back by collisions of rock along the coast. Therefore Pelindo 1 distributes environmental development programs in the form of sea signs that are located on the coast to help anchor ships so that they do not experience damage due to collisions. With the help of the outermost islands, namely P. Subi and P. Laut, it is hoped that this assistance can be felt by community in the 3T area.



Area yang di bangun Rambu Laut
 Area where the Sea Signs is built



Progres Pekerjaan
 Work Progress



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha kecil oleh Pelindo 1 telah dilaksanakan mulai tahun 1991. Wilayah binaan terdiri dari 4 (empat) Propinsi yaitu Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau yang secara keseluruhan terdapat 17 daerah binaan (1 Kantor Pusat, 12 Cabang dan 4 Perwakilan). Pola pembinaan dilaksanakan oleh cabang pelabuhan dan perwakilan setempat yang sekaligus mengelola pelaksanaan program Kemitraan agar berjalan lancar, sedangkan untuk Kantor Pusat mulai tahun 2003 tidak menambah mitra binaan baru (peminjam) dan hanya meneruskan pembinaan kepada mitra binaan yang telah ada yang belum melunasi pinjamannya.

Mitra binaan yang masih dibina sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.281 mitra binaan. Jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2018 terdapat penambahan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) dan pelunasan/pengalihan sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) mitra binaan, sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah mitra yang masih di bina adalah 1.322 mitra.

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 18.857.222.000,- atau sebesar 102 % dari alokasi dana yang sudah ditetapkan tahun 2018 sebesar Rp. 18.468.100.000,- yang seluruhnya merupakan penyaluran dalam bentuk pinjaman kepada mitra binaan.

COMMUNITY EMPOWERMENT

Implementation of coaching for small businesses by Pelindo 1 have been conducted since 1991. The fostered area consisted of 4 (four) provinces, namely, Aceh Province, North Sumatra Province, Riau Province and Riau Islands Province, with total fostered areas is 17 areas (1 Head Office, 12 Branches and 4 Representatives). The pattern of coaching was carried out by the port branch and local representatives who also carried out the Partnership program to run smoothly, while the Head Office starting in 2003 did not add new fostered partners (borrowers) and only added guidance to the fostered partners who had repaid the loans.

Fostered partners are still being fostered until 2017 as many as 1,281 fostered partners. The number of fostered partners up to 2018 with additions amounts to 275 (two hundred seventy five) and repayments/ diversion as much as 234 (two hundred thirty four) of fostered partners, as of December 31, 2018 the number of partners that being fostered is 1,322 partners.

The realization of the 2018 budget is Rp. 18,857,222,000, - or as much as 102% of the set fund allocation in 2018 of Rp. 18,468,100,000, - all of which are in the form of loans to fostered partners.



Hasil Pekerjaan Rambu Laut

Work Result

Adapun realisasi penyaluran dana tersebut dapat diuraikan per wilayah Propinsi sebagai berikut :

The realization of the distribution of funds can be described per Province area as follows:

NO	WILAYAH REGION	MITRA BINAAN FOSTER PARTNERS	TARGET	REALISASI REALIZATION
1.	Aceh	220	2.250.000.000	2.220.000.000
2.	Sumatera Utara North Sumatra	429	6.970.100.000	7.937.222.000
3.	Riau	549	7.363.000.000	6.480.000.000
4.	Kepulauan Riau	124	1.885.00.000	2.220.000.000
Total		1322	18.468.100.000	18.857.222.000

DONASI

Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donasi terhadap pembangunan fasilitas masyarakat. Pada tahun 2018 perusahaan telah merealisasikan bantuan Sumbangan dan Sosial sebesar Rp. 1.275.354.792,- atau 59,85% dari jumlah yang dialokasikan sebesar Rp. 2.131.252.201.

DONATION

Activities in the field of Community Empowerment as part of the social and environmental responsibility program are carried out in the form of participation in social activities such as donations to the construction of community facilities. In 2018 the company has realized donations and social assistance in the amount of Rp. 1,275,354,792, - or 59.85% of the allocated amount of Rp. 2,131,252,201.

KEBIJAKAN DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI

1. Dasar Hukum

Dalam rangka mendorong agar penerapan GCG dapat berjalan lebih efektif, Perusahaan menetapkan ketentuan terkait penyampaian LHKPN dan Gratifikasi. Ketentuan penyampaian LHKPN dan Gratifikasi di Perusahaan mengacu Surat Keputusan atau Kebijakan Direksi Nomor: KP.31/55/22/PI-17-TU tentang Penetapan Pejabat Struktural Yang Wajib Mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Administrasi Pengelola Data Wajib Lapor LHKPN Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI15.TU Lampiran V tanggal 19 November 2015 tentang Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Laporan LHKPN dan Gratifikasi
 - a. Selama Tahun 2018 Perusahaan menetapkan sebanyak 195 wajib lapor, yang sudah melaporkan sebanyak 176 orang dengan capaian sebesar 90,25%.
 - b. Selama Tahun 2018 tidak terdapat pelaporan tentang gratifikasi.

ANTI-CORRUPTION TRAINING AND POLICY

1. Legal Basis

In order to encourage the implementation of GCG to be more effective, the Company stipulates provisions relating to the submission of LHKPN and Gratuities. Provisions for submitting LHKPN and Gratuities at the Company refer to Directors' Decree or Policy Number: KP.31/55/22/ PI-17-TU concerning Determination of Structural Officials Who is Required to Fill in State Administrators' Assets Report (LHKPN) and Manager Data Administration Must Report LHKPN In the environment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.50/27/15/PI15.TU Annex V dated November 19, 2015 regarding Policy of Prohibition of Giving and Receiving Gifts or Bribery (Gratuities) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Environment.
2. Report of LHKPN and Gratification
 - a. During 2018 the Company stipulated that as many as 195 who must report, which had reported as many as 176 persons with achievements of 90.25%,
 - b. During 2018 there were no reports of gratuities

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

RESPONSIBILITY FOR CONSUMERS

KEBIJAKAN

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan sesuai dengan menyediakan jasa layanan yang fokus kepada pelanggan. Perusahaan selalu aktif meluncurkan berbagai program sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan, beberapa program yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penambahan kapasitas fasilitas produksi, peningkatan kinerja operasional, pengembangan aplikasi inovasi dalam teknologi informasi dan billing untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan.

TARGET DAN KEGIATAN

Tanggung Jawab Jenis Usaha

Dengan semakin beragamnya produk di pasar, di satu sisi akan menyenangkan konsumen karena mereka memiliki banyak pilihan. Di sisi lain, bagi produsen situasi tersebut menjadi sangat kompetitif karena perusahaan harus melakukan sejumlah upaya agar dapat merebut hati konsumen. Pemahaman yang baik tentang pasar dan perilakunya akan membuat upaya memuaskan konsumen menjadi relatif lebih mudah. Jika perusahaan ingin konsumennya terikat dan loyal terhadap produk perusahaan, mereka juga akan berupaya untuk memahami hal-hal lain yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli ulang. Hal-hal tersebut akan menjadi dasar yang penting bagi penyusunan dan implementasi strategi pemasaran yang kompetitif.

Pelindo 1 dituntut untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi para pelanggannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dari sisi internal maupun eksternal, yaitu pemenuhan prosedur dan feedback dari pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Kepuasan pelanggan akan dapat diraih apabila perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan penggunaan jasa secara berulang-ulang, sehingga melalui loyalitas ini dapat membangun kesetiaan dan keterikatan pelanggan terhadap jasa yang digunakan secara berulang tersebut.

JAMINAN KESEHATAN

Perlindungan kesehatan bagi konsumen atau pelanggan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja perusahaan secara keseluruhan, oleh karenanya upaya menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya, Pelindo 1 memfasilitasi konsumen dengan beberapa fasilitas yang diharapkan agar dapat membangkitkan dan memotivasi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masing-masing.

POLICY

The company has a high commitment to improve the service quality for customers in accordance with the provision of customer-focused services. The company has always been active in launching various programs to improve service quality for customers. As a company engaged in port services, several programs carried out to support this services are by increasing capacity of production facilities, improving operational performance, developing innovative applications in information technology and billing to optimize the services provided.

GOALS AND ACTIVITIES

Responsibilities of Business Type

With the increasingly diverse products on the market, on the one hand it will delight consumers because they have many choices. On the other hand, for producers, this situation has become very competitive because companies should make a number of efforts in order to win the hearts of consumers. A good understanding of the market and its behavior will make efforts to satisfy consumers become relatively easier. If the company wants its customers to be bound and loyal to the company's products, they will also try to understand other things that influence consumers' decisions to repurchase. These things will be an important basis for the preparation and implementation of competitive marketing strategies.

Pelindo 1 is required to maintain and improve the service quality for its customers, both in terms of quality and quantity, both internally and externally, namely fulfillment of procedures and feedback from customers, therefore, customer satisfaction can be properly fulfilled. Customer satisfaction will be achieved if the company is able to provide quality services and in accordance with the expectations of customers. Customer loyalty is a behavioral impulse to repeatedly use services, thus with this loyalty can build fidelity and customer bonding to the services used repeatedly.

HEALTH INSURANCE

Health protection for consumers or customers is one of the main keys to achieving corporate performance in a whole, therefore, efforts to maintain consumer health and safety become producer full responsibility, Pelindo 1 facilitates consumers with various facilities that are expected to facilitate and motivate in supporting each person's health and safety.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN RESPONSIBILITY FOR CONSUMERS

INFORMASI USAHA

Dalam pengembangan bidang ekonomi, pelabuhan bukan hanya digunakan sebagai tempat merapat bagi sebuah kapal melainkan juga dapat berfungsi untuk tempat penyimpanan barang seperti tempat penyimpanan peti kemas, karena biasanya selain sebagai prasarana transportasi manusia pelabuhan juga kerap menjadi prasarana transportasi untuk barang-barang. Pada dasarnya jasa pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpang).

Kegiatan usaha Pelindo 1 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Jasa kepelabuhanan yang dikelola oleh Pelindo 1 terbagi dalam 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Kapal.
2. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Peti Kemas.
3. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Non Peti Kemas.
4. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Penumpang.
5. Bidang Usaha Jasa Penunjang.

PENYEDIA SARANA DAN FASILITAS

Untuk menunjang keberhasilan perusahaan dan memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada konsumen pada tahun 2018 perusahaan telah menyediakan dan membangun beberapa fasilitas sarana dan prasarana sebagai berikut:

BUSINESS INFORMATION

In the development of the economy, the port is not only used as a dock for a ship but can also function as a place to store goods such as container storage, because apart from being human transportation infrastructure, a port also often becomes a transportation infrastructure for goods. Basically the services provided by ports are services to ships and services to cargo (goods and passengers).

Pelindo 1 business activities as stipulated in the Decree of the Minister of Transportation No. KP 133 Year 2011 dated March 2, 2011 concerning Granting Business Licenses to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is providing port and other business services that support the achievement of company goals. Port services managed by Pelindo 1 are divided into 5 (five) main pillars, namely:

1. Business Field of Ship Services
2. Business Field of Container Services.
3. Business Field of Non-Container Services.
4. Business Field of Passanger Services
5. Business Field of Other Services.

PROVIDER OF INFRASTRUCTURE AND FACILITIES

To support the success of the company and provide satisfaction and comfort for consumers in 2018 the company has provided and built several facilities and infrastructure as follows:

NO	NAMA PROYEK PROJECT AMOUNT OF FUNDS	JUMLAH DANA (Rp) AMOUNT OF FUNDS
1.	Pembangunan Perpanjangan Dermaga Gunung Sitoli Pier Expansion Construction of Sitoli Mountain	10.800.000.000
2.	Penataan Terminal Multipurpose pelabuhan Belawan termasuk perencanaan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Curah Kering di Terminal Citra pelabuhan Belawan • Pembangunan Dermaga 150 x 25 m breasting dolphin dan stasiun pandu IKD • Replacement Dermaga Ferry menjadi Dermaga Cargo dan Rehab Sheet Pile Belawan Port Multipurpose Terminal Setup includes planning consisting of: <ul style="list-style-type: none"> • Construction of a Dry Bulk Terminal in Citra Terminal Belawan Port • Pier Contruction of 150 x 25 m breasting dolphin dan IKD pilot station • Replacement of Ferry Pier into Cargo Pier and Sheet Pile Rehab 	196.000.000.00

NO	NAMA PROYEK PROJECT AMOUNT OF FUNDS	JUMLAH DANA (Rp) AMOUNT OF FUNDS
3.	Pengembangan Dedicated Terminal pelabuhan Belawan, terdiri dari: a. Pembangunan Car Terminal di Belawan Lama b. Penyiapan Instalasi CPO Antar Pulau di Pelabuhan Belawan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tangki Timbun • Instalasi Pipa dan Pompa • Akses Jalan Masuk • Perbaikan Dermaga • Pembuatan Daprah dan Mooring Dolphin untuk CPO Antar Pulau Development of Dedicated Terminal of Belawan port, which consists: a. Construction of Vehicles Terminal at Old Belawan b. Preparation of Inter-Island CPO Installation in Belawan Port, including: <ul style="list-style-type: none"> • Construction of Storage Tank • Installation of pipe and pump • Entry Access • Pier Repair • Construction of Dolphin Daprah and Mooring for Intermediate CPO 	109.100.000.000
4.	Pembangunan Terminal Shorebase termasuk konsultan perencana dan pengawas Construction of the Shore base Terminal includes planning consultant and supervisors.	16.000.000.000
5.	Penataan Terminal Penumpang Sri Bintang Pura termasuk supervisi Arrangement of Sri Bintang Pura Passenger Terminal including supervision	5.000.000.000
6.	Pengadaan Klinik dan Penataan Rumah Sakit Medical Clinic Procurement and Hospital Management	20.000.000.000
7.	Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga Belawan Lama, Ujung Baru, Citra dan IKD Procurement and Replacement of Fenders at Piers of Belawan Lama, Ujung Baru, Citra and IKD	7.276.258.000
8.	Perkuatan Lantai dan Struktur Dermaga Terminal Penumpang Belawan Lama Strengthening of Floor and Pier Structure of the Belawan Lama Passenger Terminal	8.807.000.000
9.	Lanjutan Penataan Terminal Penumpang Belawan Lama termasuk konsultan perencana dan pengawas Continuance of Belawan Lama Passenger Terminal setup including planning consultant and supervisor	9.225.100.000
10	Pembangunan Lapangan Peti Kemas Seluas 2,5 Ha termasuk konsultan perencana dan pengawas Construction of a container Field covering an area of 2.5 Ha including planning consultant and supervisor	15.000.000.000
11	Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Patroli untuk Batam termasuk biaya supervisi Providing 1 (one) unit Patrol boats for Batam include the cost of supervision	8.250.000.000
12	Pengadaan Kapal Tunda termasuk biaya konsultan dan supervisi, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit 2 x 1000 HP dan 1 (satu) unit 2 x 1200 HP untuk cabang Belawan • 1 (satu) unit 2 x 1000 HP dan 1 (satu) unit 2 x 1800 HP untuk cabang Batam • 2 (dua) unit 2 x 2000 HP untuk cabang Tanjung Balai Karimun Procurement of Tugboats including consultant and supervision fees, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (one) unit 2 x 1000 HP and 1 (one) unit 2 x 1200 HP for Belawan branch • 1 (one) unit 2 x 1000 HP and 1 (one) unit 2 x 1800 HP for Batam branch • 2 (two) units 2 x 2000 HP for Tanjung Balai Karimun branch 	39.561.333.000
13	Pengadaan Kapal Pandu termasuk biaya konsultan dan supervisi, yaitu 3 (tiga) unit untuk cabang Belawan, 2 (dua) unit untuk cabang Dumai dan 2 (dua) unit untuk pelayanan Selat Malaka Pilot boat procurement including consultant and supervisor fees, namely 3 (three) units for Belawan Branch, 2 (two) units for Dumai branch, 2 (two) for Malacca Strait service	17.500.000.000

NO	NAMA PROYEK PROJECT AMOUNT OF FUNDS	JUMLAH DANA (Rp) AMOUNT OF FUNDS
14	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set CC 03 Kap. 1250 KVA Lengkap dengan Resistor Bank dan Instalasinya Procurement and installation works of CC Set Generator 03 Cap. 1250 KVA complete with Bank Resistor and Installation	6.216.100.000
15	Pengadaan 1 unit Mobile Crane untuk pelabuhan Perawang dan 2 unit Mobile Crane untuk pelabuhan Belawan termasuk supervisi 1 unit Mobile Crane procurement for Perawang port dan 2 unit Mobile Crane for Belawan port including supervision	88.440.000.000
16	Pengadaan 1 (satu) unit Reach Stacker Kap. 45 Ton di TPK Perawang dan 1 (satu) unit Forklift 10 ton di Pelabuhan Tanjung pinang termasuk supervisi 1 (one) unit Reach Stacker Cap. 45 Ton procurement at TPK Perawang and 1 (one) unit Forklift 10 tons di Tanjung Pinang port including supervision	10.280.000.000
17	Pengadaan Alat Bongkar Muat Sisi Dermaga termasuk supervise, terdiri dari: • Pengadaan 2 unit Fixed Crane di Pelabuhan Tanjung Pinang dan Sibolga • Pengadaan 1 unit MHC di Pelabuhan Perawang Procurement of Pier Side Loading Equipment including supervision, consisting of: • Procurement of 2 units of Fixed Crane at Tanjung Pinang and Sibolga Piers • Procurement of 1 unit of MHC at Perawang Port	121.940.000.000
18	Pengadaan 4 (empat) Unit Mobile Crane, 2 (dua) unit untuk cabang Dumai dan 2 (dua) unit untuk cabang Belawan termasuk biaya konsultan Procurement of 4 (four) Units of Mobile Crane, 2 (two) units for Dumai branch and 2 (two) units for Belawan branch includes consultant fee	47.673.290.870
19	Inframe Overhaul dan Reseal Front Crankshaft Engine CAT 3512B Container Crane No. 9, No. 10, dan No. 11 Inframe Overhaul dan Reseal Front Crankshaft Engine CAT 3512B Container Crane No. 9, No. 10, dan No. 11	6.966.600.000
20	Pengadaan Terminal Tractor dan Chassis termasuk konsultan Procurement of Terminal Tractor and Chassis includes consultant	33.500.000.000
21	Penataan Listrik di Pelabuhan Belawan Electricity Setup in Belawan Port	11.975.446.000
22	Pembangunan Gedung Kantor Pelabuhan Perawang dan Sei Kolak Kijang termasuk ME dan perencanaan Office Building Construction of Perawang and Sei Kolak Kijang Ports including ME and Planning	26.909.100.550
23	Perkerasan Beton (Rigid) Jalan Raya Pelabuhan Belawan Rigid work of Roads at Belawan Port	28.600.000.000
24	Pembangunan Areal Parkir di Gabion termasuk konsultan perencana dan pengawas Parking Area Construction in Gabion including Planning Consultant and Supervisor	45.122.000.000
25	Pembangunan Gedung Perkantoran di Lokasi BPL Belawan termasuk konsultan perencana dan pengawas Office Building Construction in BPL Location of Belawan port including Planning Consultant and Supervisor	23.458.100.000
26	Penataan Lingkungan di pelabuhan Belawan termasuk konsultan perencana dan pengawas Environmental Setup in Belawan Port including planning consultant and supervisor	26.700.000.000
27	Penataan Pelabuhan Dumai termasuk konsultan perencana dan pengawas Dumai Port Setup including Planning Consultant and Supervisor	15.000.000.000
28	Pengembangan Lanjutan Sistem Informasi Kepelabuhanan Continuance Development of Ports Information System	5.824.199.960
29	Lanjutan Legalisasi Software di lingkungan Perusahaan Continuance of Software Legalization in Company's Area	2.097.539.620
Jumlah Dana Total		1.000.000.000.000

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

RESPONSIBILITY FOR LABOR, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY

KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh manajemen perusahaan dengan Serikat Pekerja Pelindo 1 tanggal 22 Januari 2016 Bab XIII Pasal 70 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

TARGET DAN KEGIATAN

1. Kesetaraan gender

Rata-rata komposisi pegawai dan rata-rata pertumbuhan pegawai selama 5 tahun terakhir dimana berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebesar 82% dan perempuan sebesar 18%, namun demikian rata-rata pertumbuhan perempuan selama 5 tahun terakhir sebesar 1,09% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan laki-laki sebesar 1,05%.

POLICY

Law Number 13 of 2003 regarding Labor, Law Number 2 of 2004 regarding Settlement of Industrial Relations Disputes, Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety and Collective Labor Agreement (PKB) between management and labor unions, and Collective Labor Agreement (PKB) which was signed by the management of the company with the Pelindo 1 Labor Union dated 22 January 2016 Chapter XIII Article 70 regarding the occupational safety and health management system.

GOALS AND ACTIVITIES

1. Gender equality

Average employee composition and average employee growth over the past 5 years based on gender was dominated by male by 82% and female by 18%, however the average growth rate of female over the past 5 years was 1.09% larger compared to the average male growth of 1.05%.

No	Jenis Kelamin Gender	Tahun Year					Rata-rata Komposisi (%) Average Composition (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%) Average Growth (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	Laki-Laki Male	1.044	987	935	1.161	1.143	82	1,05
2	Perempuan Female	216	204	199	267	258	18	1,09
Jumlah Total		1.260	1.191	1.134	1.428	1.401	100	1,05

2. Rekrutmen Pegawai

Pelindo 1 menerapkan asas kesamaan kesempatan dalam proses rekrutmen. Oleh karenanya rekrutmen karyawan Pelindo 1 pada dasarnya dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen dijalankan secara terbuka dengan melibatkan pihak ketiga.

2. Employee Recruitment

Pelindo 1 applies the principle of equal opportunity in the recruitment process. Therefore the recruitment of Pelindo 1 employees is basically open for anyone. There is no discrimination based on ethnicity, religion, race, class and gender in the recruitment process. The recruitment process is transparently performed by involving third parties.

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Setiap pegawai selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan (general check up) melalui Rumah Sakit yang ditunjuk. Pemeriksaan rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun melalui klinik yang ditunjuk sehingga data kesehatan dalam general check up (biasa/khusus) karyawan dan pejabat struktural selalu tersedia.

3. Occupational Health and Safety

Every employee always conducts a health check (general check-up) through a designated hospital. Routine examinations are conduct at least 1 time a year in the designated clinic so that the health data in general check-up (normal/ special) of employees and structural officers always available.

Pelindo 1 berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Pelindo 1 mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Pelindo 1 committed to conduct occupational health and safety (K3) that supports to achieve zero accident rates. The implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at Pelindo 1 referring to the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 1996 concerning the Occupational Safety and Health Management System that has been enhanced by Government Regulation Number. 50 of 2012 concerning Occupational Safety and Health Management System (SMK3). This regulation regulates the company's management system in handling work risks, including prevention of work accidents and work-related illnesses. This regulation is expected to help create a workplace that is safe, efficient and productive.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

KEBIJAKAN

Pelindo 1 berkeyakinan bisnis hanya dapat berkembang di dalam perusahaan yang menghormati, memajukan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menghormati pelaksanaan hak asasi manusia, Pelindo 1 memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk memperjuangkan hak-haknya secara berimbang dan setara melalui Serikat Pekerja Pelindo 1, menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang dan memberikan kebebasan yang sama terhadap semua pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pegawai.

TARGET DAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Setiap pegawai dapat bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja.
2. Diberikan pilihan untuk menentukan mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP).
3. Berhak mendapatkan cuti yang meliputi:
 - a. Cuti tahunan.
 - b. Cuti bersama.
 - c. Cuti bersalin / keguguran kandungan.
 - d. Cuti sakit.
 - e. Cuti haid.
 - f. Cuti besar.
 - g. Cuti di luar tanggungan Perusahaan
4. Mendapatkan Fasilitas Kesejahteraan antara lain:
 - a. Fasilitas kesehatan (perawatan dan pengobatan);
 - b. Fasilitas beribadah;
 - c. Fasilitas olahraga.
 - d. Fasilitas koperasi.
 - e. Fasilitas kantin.
 - f. Fasilitas ruangan menyusui.

POLICY

Pelindo 1 believes that businesses can only develop within companies that respect, promote and uphold human rights.

In respecting the implementation of human rights, Pelindo 1 provides an opportunity for all employees to fight for their rights in a balanced and equal manner through the Pelindo 1 Labor Union, providing a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in character, circumstances personal, and cultural background of a person and give equal freedom to all employees to conduct worship in accordance with the religion and beliefs held by each employee.

GOALS AND ACTIVITIES

Activities for implementing social responsibility related to human rights include:

1. Every employee can become a member of a Labor Union.
2. Given choices regarding the Pension Preparation Period (MPP).
3. Have the right to get leave which includes:
 - a. Annual leave.
 - b. Mass leave.
 - c. Maternity/ miscarriage leave.
 - d. Sick leave.
 - e. Menstruation leave.
 - f. Big leave.
 - g. Leave without the company's expenses
4. Receive Welfare Facilities, among others :
 - a. Health facilities (care and treatment);
 - b. Worship facilities;
 - c. Sport facilities.
 - d. Cooperative facilities.
 - e. Canteen facility.
 - f. Nursing room facilities.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP OPERASI YANG ADIL

RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

KEBIJAKAN

Dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, Pelindo 1 secara konsisten mengembangkan dan menyempurnakan seluruh pranata yang mendukung penilaian kemampuan pegawai. Hal ini sebagai perwujudan dari kemitraan antara Perusahaan, pegawai dan serikat pegawai yang saling mendukung dan bersinergi dalam menjalankan operasional maupun dalam mencapai misi dan visi perusahaan.

TARGET DAN KEGIATAN

Pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kompensasi, pendidikan dan promosi sesuai dengan kompetensinya masing-masing dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan profesionalisme, selaras dengan kepentingan dan rencana pengembangan perusahaan serta tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Di tahun 2018, sebanyak 998 pegawai yang mengikuti diklat dan menyerap anggaran sebesar Rp8.368.075.369 sebagai dana program pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan,


POLICY

In upholding the principle of justice, Pelindo1 consistently develops and complete all institutions that support employee capacity assessment. This is a manifestation of a partnership between the Company, employees and labor union that support and synergize in carrying out operations and achieving the company's mission and vision.

GOALS AND ACTIVITIES

Employees get the same opportunity to obtain compensation, education and promotion in accordance with their respective competencies by upholding the principles of justice and professionalism, in line with the interests and plans of the company's development and regardless of ethnic background, religion, gender, age, disability owned by someone, or other special circumstances protected by legislation.

In 2018, as many as 998 employees participated in the training and absorbed a budget of Rp.8.368.075.369 as funding for employee education, training and development programs.



LAPORAN KEUANGAN
AUDIT INDEPENDEN
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Eka Cahyana
Alamat Kantor : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Alamat domisili, sesuai KTP : Jl. Cipeucang II No. 3 RT 004 / RW 012, Kelurahan Koja,
Kecamatan Koja – Jakarta Utara
Nomor telepon : 061 – 6610220
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Mohamad Nur Sodik
Alamat Kantor : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Alamat domisili, sesuai KTP : Jl. Dahlia A.24/6 PJMI
RT 008 / RW 007, Kelurahan Jurangmangu Timur,
Kecamatan Pondok Aren-Tangerang Selatan
Nomor telepon : 061 – 6610220
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Februari 2019

DIREKTUR KEUANGAN	DIREKTUR UTAMA
	
MOHAMAD NUR SODIQ	BAMBANG EKA CAHYANA



**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2018 AND 2017 AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017**

We, the undersigned:

Name : Bambang Eka Cahyana
Office address : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Residential address : Jl. Cipeucang II No. 3 RT 004 / RW 012, Kelurahan Koja,
Kecamatan Koja – Jakarta Utara
Telephone : 061 – 6610220
Title : President Director

Name : Mohamad Nur Sodik
Office address : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Residential address : Jl. Dahlia A.24/6 PJMI
RT 008 / RW 007, Kelurahan Jurangmangu Timur,
Kecamatan Pondok Aren-Tangerang Selatan
Telephone : 061 – 6610220
Title : Financial Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and subsidiaries;
2. The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and subsidiaries do not contain any incorrect information of material fact, nor do they omit information or material fact;
4. We are responsible for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) internal control system.

Thus this statement is made truthfully.

Medan, February 11th, 2019

 FINANCIAL DIRECTOR MOHAMAD NUR SODIQ		 PRESIDENT DIRECTOR BAMBANG EKA CAHYANA
--	---	---

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain-lain

Laporan pengujian kepatuhan terhadap perundang-undangan dan evaluasi pengendalian intern untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No: 00022/2.0459/SPA/05/1107-1/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dengan No: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, sesuai dengan laporannya No. Ref.: R-091/Pelindo1-adf/SHT01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Heliantono & Rekan



Sultana Amri
Registrasi Akuntan Publik No AP.1107

11 Februari 2019.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as at December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Others matter

The Compliance with laws and regulation and internal control evaluation for the year ended December 31, 2018 have been submitted separately to the management with our report No.: 00022/2.0459/SPA/05/1107-1/1/II/2019 dated February 11, 2019 and No: 00026/2.0459/SPA/05/1107-1/II/2019 dated February 11, 2019.

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries for the year ended December 31, 2017, have been audited by other independent auditor who has expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements, according to their report No. Ref.: 091/Pelindo1-adf/SHT01/II/2018 dated February 12, 2018,

Heliantono & Rekan



Sultana Amri
Public Accountant License No AP.1107

February 11, 2019

Nomor: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/III/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta evaluasi pengendalian internal.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas serta mempertimbangkan hasil pengujian atas kepatuhan terhadap pasal tertentu peraturan perundang-undangan dan kontrak perjanjian. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

This report is originally issued in the Indonesian language

No.: 00051/2.0459/AU.1/05/1107-1/III/2019

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Inspection Standards issued by the Indonesian Supreme Audit Institution. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion of the effectiveness of the entity's internal control and considering the result of the entity's compliance testing to certain article of the laws and contract agreements. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017

(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2a, 2d, 2g, 2v, 4, 39, 40a	1.999.187.810.035	1.872.411.160.625
Piutang usaha - bersih	2d, 2f, 2h, 5,		
Pihak berelasi	39, 40b, 46	19.862.922.891	47.109.781.222
Pihak ketiga		82.381.146.735	153.469.079.173
Persediaan	2i, 2p, 6	25.388.282.754	23.716.976.975
Pajak dibayar di muka	2u, 22a	277.103.058.715	142.729.554
Uang muka	7	14.538.229.477	13.533.211.925
Biaya dibayar di muka	2j, 8	6.022.726.033	1.749.455.476
Aset keuangan lancar lainnya	2d, 2h, 9	198.465.718.974	97.416.051.632
Jumlah Aset Lancar		<u>2.622.949.895.614</u>	<u>2.209.548.446.582</u>
Aset Tidak Lancar			
Investasi entitas asosiasi	2k, 10	134.694.736.863	52.504.512.535
Investasi entitas ventura bersama	2l, 11	-	1.163.988.198.834
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.003.130.677 pada tahun 2018 dan Rp4.821.381.672 pada tahun 2017	2m, 2p, 12	416.270.074.823	189.858.355.697
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.809.956.010.468 pada tahun 2018 dan Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017	2n, 2p, 13, 46	3.234.638.748.536	3.354.047.326.040
Aset dalam konstruksi	13, 46	7.070.805.671.960	1.283.879.204.868
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp68.832.468.312 pada tahun 2018 dan Rp33.640.286.918 pada tahun 2017	2o, 14	395.797.369.111	202.775.204.132
Aset pajak tangguhan	2u, 22d	47.709.223.921	3.018.574.652
Aset tidak lancar lainnya	2u, 15	77.937.412.007	31.759.306.268
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16	20.049.725.276	15.764.186.140
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>11.397.902.962.497</u>	<u>6.297.594.869.166</u>
Jumlah Aset		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Consolidated Statements of Financial Position****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah)

	<u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ASSETS			
Current Assets			
Cash and cash equivalent	2a, 2d, 2g, 2v, 4, 39, 40a	1.999.187.810.035	1.872.411.160.625
Account receivables - net	2d, 2f, 2h, 5,		
Related parties	39, 40b	19.862.922.891	47.109.781.222
Third partied		82.381.146.735	153.469.079.173
Inventories	2i, 2p, 6	25.388.282.754	23.716.976.975
Prepaid taxes	2u, 22a	277.103.058.715	142.729.554
Advances	7	14.538.229.477	13.533.211.925
Prepaid expenses	2j, 8	6.022.726.033	1.749.455.476
Other current financial assets	2d, 2h, 9	198.465.718.974	97.416.051.632
Total Current Assets		<u>2.622.949.895.614</u>	<u>2.209.548.446.582</u>
Non Current Assets			
Investment in associated	2k, 10	134.694.736.863	52.504.512.535
Investment in joint venture	2l, 11	-	1.163.988.198.834
Investment property - after deducted to accumulated depreciation amounting to Rp5.003.130.677 in 2018 and Rp4.821.381.672 in 2017	2m, 2p, 12	416.270.074.823	189.858.355.697
Fixed assets - after deducted to accumulated depreciation amounting to Rp1.809.956.010.468 in 2018 and Rp1.602.168.291.223 in 2017	2n, 2p, 13	3.234.638.748.536	3.354.047.326.040
Assets under construction	13	7.070.805.671.960	1.283.879.204.868
Intangible assets - after deducted to accumulated depreciation amounting to Rp68.832.468.312 in 2018 and Rp33.640.286.918 in 2017	2o, 14	395.797.369.111	202.775.204.132
Deferred tax assets	2u, 22d	47.709.223.921	3.018.574.652
Other non-current assets	2u, 15	77.937.412.007	31.759.306.268
Other non-current financial assets	16	20.049.725.276	15.764.186.140
Total Non Current Assets		<u>11.397.902.962.497</u>	<u>6.297.594.869.166</u>
Total Assets		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

See accompanying notes to the consolidated financial statements,
which are an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2d, 21	17.992.184.312	10.571.780.774
Utang usaha	2d, 2f, 17, 39,40c		
Pihak berelasi		340.714.795.534	631.556.095.033
Pihak ketiga		1.434.443.784.474	800.916.485.096
Beban akrual	2d, 18	503.599.174.701	166.380.229.903
Utang Pajak	2u, 22b	77.508.016.452	48.077.542.635
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	2d		
Utang Bank Jangka panjang	23	175.000.140.000	52.883.016.545
Utang Obligasi	24	50.000.000.000	-
Bagian lancar pendapatan diterima di muka	19	74.312.072.313	110.876.536.593
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	20	4.170.747.659	1.782.961.739
Liabilitas jangka pendek lainnya		-	93.105.289
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.677.740.915.445</u>	<u>1.823.137.753.607</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank jangka panjang	2d, 23, 40d	3.364.720.079.181	327.000.000.000
Utang obligasi	2d, 24	947.431.699.211	996.601.217.455
Liabilitas imbalan kerja	2w, 25	262.232.070.323	194.888.043.417
Liabilitas pajak tangguhan	2u, 22d	54.966.512.285	51.567.795.902
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	26	234.184.192.281	209.724.744.084
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>4.863.534.553.282</u>	<u>1.779.781.800.858</u>
Jumlah Kewajiban		<u>7.541.275.468.727</u>	<u>3.602.919.554.465</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 6.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1.700.000 saham pada 2018 dan 2017	27	1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2aa, 28	527.133.217.252	525.884.662.252
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya		2.468.202.043.804	1.915.728.560.174
Belum ditentukan penggunaannya		911.814.406.602	803.620.909.175
Pengukuran kembali imbalan paska kerja	2w, 25	<u>(158.092.943.897)</u>	<u>(127.153.177.428)</u>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		5.449.056.723.761	4.818.080.954.173
Kepentingan non pengendali		1.030.520.665.623	86.142.807.110
Jumlah Ekuitas		<u>6.479.577.389.384</u>	<u>4.904.223.761.283</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Consolidated Statements of Financial Position****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah)

	<u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LIABILITIES			
Short Term Liabilities			
Short-term bank debt	2d, 21	17.992.184.312	10.571.780.774
Account payable	2d, 2f, 17, 39, 40c		
Related parties		340.714.795.534	631.556.095.033
Third parties		1.434.443.784.474	800.916.485.096
Accrued expense	2d, 18	503.599.174.701	166.380.229.903
Taxes payable	2u, 22b	77.508.016.452	48.077.542.635
Current maturities of long-term liabilities			
Long-term bank debt	23	175.000.140.000	52.883.016.545
Bonds debt	24	50.000.000.000	-
Unearned incomes/deposits/security deposits	19	74.312.072.313	110.876.536.593
Other current financial liabilities	20	4.170.747.659	1.782.961.739
Other current liabilities	21	-	93.105.289
Total Short Term Liabilities		<u>2.677.740.915.445</u>	<u>1.823.137.753.607</u>
Long Term Liabilities			
Long term bank loan	2d, 23b, 40d	3.364.720.079.181	327.000.000.000
Bonds payable	2d, 24	947.431.699.211	996.601.217.455
Employee benefit liability	2w, 25	262.232.070.323	194.888.043.417
Deferred tax liability	2u, 22d	54.966.512.285	51.567.795.902
Long term unearned incomes	26	234.184.192.281	209.724.744.084
Total Long Term Liabilities		<u>4.863.534.553.282</u>	<u>1.779.781.800.858</u>
Total Liabilities		<u>7.541.275.468.727</u>	<u>3.602.919.554.465</u>
EQUITY			
Capital shares - par value Rp1.000.000 per share			
Authorized capital - 6.800.000 shares			
Issued and fully paid			
1.700.000 shares in 2018 and 2017	27	1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
The Government grant with unspecified used (BPYBDS)	2aa, 28	527.133.217.252	525.884.662.252
Retained earning:			
Appropriate		2.468.202.043.804	1.915.728.560.174
Unappropriate		911.814.406.602	803.620.909.175
Revaluation on employee benefits	2w, 25	<u>(158.092.943.897)</u>	<u>(127.153.177.428)</u>
Equity attribute to owner of the parent		5.449.056.723.761	4.818.080.954.173
Non-controlling interest		<u>1.030.520.665.623</u>	<u>86.142.807.110</u>
Total Equity		<u>6.479.577.389.384</u>	<u>4.904.223.761.283</u>
Total Liabilities and Equity		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

See accompanying notes to the consolidated financial statements, which are an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 Dan 2017**
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
Pendapatan usaha	2r, 31, 40e	3.113.532.579.657	2.751.106.508.170
Beban pokok	2r, 32,	1.484.938.337.241	1.353.233.450.038
Beban pemasaran	2r, 33	31.837.481.375	31.817.630.329
Beban umum dan administrasi	2r, 34	351.811.734.800	320.495.051.550
Pendapatan (beban) non usaha - bersih	2r, 35	106.960.361.352	125.332.904.544
Laba Rugi		1.351.905.387.593	1.170.893.280.797
Beban Keuangan	2r, 36	153.280.657.124	100.799.481.838
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	2l, 2r, 10,11,37	(2.642.775.672)	(2.692.531.843)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan		1.195.981.954.797	1.067.401.267.117
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini	2u, 22c	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Tanggungan	2u, 22c	2.779.555.851	(3.311.119.496)
Laba Tahun Berjalan		904.870.576.473	805.144.812.107
Penghasilan Komprehensif Lainnya			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	22c	(30.939.766.469)	(12.249.900.617)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		873.930.810.004	792.894.911.490
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		880.874.640.133	791.371.008.558
Kepentingan non pengendali		(6.943.830.129)	1.523.902.931
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		873.930.810.004	792.894.911.489
Laba Per Saham Dasar	38	518.162	465.512

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)**

	Notes	2018	2017
Operating revenue	2r, 31, 40e	3.113.532.579.657	2.751.106.508.170
Operating expenses	2r, 32,	1.484.938.337.241	1.353.233.450.038
Marketing expenses	2r, 33	31.837.481.375	31.817.630.329
General and administrative expenses	2r, 34	351.811.734.800	320.495.051.550
Other incomes (expenses) - net	2r, 35	106.960.361.352	125.332.904.544
Operating Income		<u>1.351.905.387.593</u>	<u>1.170.893.280.797</u>
Financial expenses	2r, 36	153.280.657.124	100.799.481.838
Profit and (loss) of Associate Entity and Joint Venture	2l, 2r, 10,11,37	<u>(2.642.775.672)</u>	<u>(2.692.531.843)</u>
Income Before Income Taxes		<u>1.195.981.954.797</u>	<u>1.067.401.267.117</u>
Income Taxes:			
Current tax	2u, 22c	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Deferred tax	2u, 22c	<u>2.779.555.851</u>	<u>(3.311.119.496)</u>
Income for The Year		<u>904.870.576.473</u>	<u>805.144.812.107</u>
Other Comprehensive Income			
Other Comprehensive Income that will not be reclassified Subsequently to profit or loss			
Revaluation on employee benefits		<u>(30.939.766.469)</u>	<u>(12.249.900.617)</u>
Total Comprehensive Income for The Year		<u>873.930.810.004</u>	<u>792.894.911.490</u>
Total Comprehensive Income for The Year			
Attributeable to:			
Owner of the Parent		880.874.640.133	791.371.008.558
Non Controlling interest		<u>(6.943.830.129)</u>	<u>1.523.902.931</u>
Total Comprehensive Income for the Year		<u>873.930.810.004</u>	<u>792.894.911.489</u>
Basic Earning Per Share	38	<u>518.162</u>	<u>465.512</u>

See accompanying notes to the consolidated financial statements,
which are an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 Dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Modal ditempaikan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan	Saldo Laba		Pengukuran kembali imbalan kerja	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	Kepentingan non pengendali	Jumlah
				Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo 1 Januari 2017	511.960.000.000	1.188.040.000.000	538.812.899.239	1.402.206.722.174	733.602.829.177	(114.903.276.811)	4.259.719.173.779	41.456.737.539	4.301.175.911.318
Laba komprehensif tahun berjalan:									
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	803.620.909.175	-	803.620.909.175	1.523.902.931	805.144.812.106
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(12.249.900.617)	(12.249.900.617)	(12.249.900.617)	-	(12.249.900.617)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	803.620.909.175	(12.249.900.617)	791.371.008.558	1.523.902.931	792.894.911.489
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	43.223.000.000	43.223.000.000
Pembayaran dividen kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(60.824.537)	(60.824.537)
Penyesuaian kepentingan non pengendali	-	-	-	8.823	-	-	8.823	(8.823)	-
Pembagian laba tahun 2016:									
Dividen dan lainnya	-	-	(12.928.236.987)	-	(220.081.000.000)	-	(220.081.000.000)	-	(220.081.000.000)
Penyesuaian	-	-	-	-	(513.521.829.177)	-	(12.928.236.987)	-	(12.928.236.987)
Cadangan umum	-	-	-	513.521.829.177	(513.521.829.177)	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2017	511.960.000.000	1.188.040.000.000	525.884.662.252	1.915.728.560.174	803.620.909.175	(127.153.177.428)	4.818.080.954.173	86.142.807.110	4.904.223.761.283
Saldo 1 Januari 2018	511.960.000.000	1.188.040.000.000	525.884.662.252	1.915.728.560.174	803.620.909.175	(127.153.177.428)	4.818.080.954.173	86.142.807.110	4.904.223.761.283
Laba komprehensif tahun berjalan:									
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	911.814.406.602	-	911.814.406.602	(6.943.830.129)	904.870.576.473
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(30.939.766.469)	(30.939.766.469)	(30.939.766.469)	-	(30.939.766.469)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	911.814.406.602	(30.939.766.469)	880.874.640.133	(6.943.830.129)	873.930.810.004
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	951.423.316.448	951.423.316.448
Pembayaran dividen kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(101.627.806)	(101.627.806)
Penyesuaian kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian laba tahun 2017:									
Dividen dan lainnya	-	-	(10.061.152.792)	(10.061.152.792)	(241.086.272.753)	-	(251.147.425.545)	-	(251.147.425.545)
Cadangan umum	-	-	1.248.555.000	562.534.636.422	(562.534.636.422)	-	1.248.555.000	-	1.248.555.000
Dana PKBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2018	511.960.000.000	1.188.040.000.000	527.133.217.252	2.468.202.043.804	911.814.406.602	(158.092.943.897)	5.449.056.723.761	1.030.520.665.623	6.479.577.389.384

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

**Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Year Ended 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)**

	Notes	Capital shares issued and fully paid	Additional paid in capital	Government grant with unspecified used (BPYBDS)	Retained earnings		Revaluation on employee benefit	Equity attributable to owner of the parent	Non controlling interest	Total
					Appropriate	Unappropriate				
Balance as of January 1, 2017		511.960.000.000	1.188.040.000.000	538.812.899.239	1.402.206.722.174	733.602.829.177	(114.903.276.811)	4.259.719.173.779	41.456.737.539	4.301.175.911.318
Comprehensive income of the year:										
Income of the year		-	-	-	-	803.620.909.175	-	803.620.909.175	1.523.902.931	805.144.812.106
Comprehensive income of the year		-	-	-	-	(12.249.900.617)	(12.249.900.617)	(12.249.900.617)	-	(12.249.900.617)
Total comprehensive income of the year		-	-	-	-	803.620.909.175	(12.249.900.617)	791.371.008.558	1.523.902.931	792.894.911.489
Additional paid in capital - non controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	43.223.000.000	43.223.000.000
Dividend payment for non controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	(60.824.537)	(60.824.537)
Adjustment on non controlling interest		-	-	-	8.823	-	-	8.823	(8.823)	-
Allocation of income year 2016:										
Dividend and others	29	-	-	-	(220.081.000.000)	-	-	(220.081.000.000)	-	(220.081.000.000)
Adjustment	29	-	-	(12.928.236.987)	-	-	-	(12.928.236.987)	-	(12.928.236.987)
General reserve	29	-	-	-	513.521.829.177	(513.521.829.177)	-	-	-	-
Balance as of December 31, 2017		511.960.000.000	1.188.040.000.000	525.884.662.252	1.915.728.560.174	803.620.909.175	(127.153.177.428)	4.818.080.954.173	86.142.807.110	4.904.223.761.283
Balance as of January 1, 2018		511.960.000.000	1.188.040.000.000	525.884.662.252	1.915.728.560.174	803.620.909.175	(127.153.177.428)	4.818.080.954.173	86.142.807.110	4.904.223.761.283
Comprehensive income of the year:										
Income of the year		-	-	-	-	911.814.406.602	-	911.814.406.602	(6.943.830.129)	904.870.576.473
Comprehensive income of the year		-	-	-	-	(30.939.766.469)	(30.939.766.469)	(30.939.766.469)	-	(30.939.766.469)
Total comprehensive income of the year		-	-	-	-	911.814.406.602	(30.939.766.469)	880.874.640.133	(6.943.830.129)	873.930.810.004
Additional paid in capital - non controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	951.423.316.448	951.423.316.448
Dividend payment for non controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	(101.627.806)	(101.627.806)
Adjustment on non controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allocation of income year 2017:										
Dividend and others	29	-	-	-	(10.061.152.792)	(241.086.272.753)	-	(251.147.425.545)	-	(251.147.425.545)
Adjustment	29	-	-	1.248.555.000	562.534.636.422	(562.534.636.422)	-	1.248.555.000	-	1.248.555.000
General reserve	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as of December 31, 2018		511.960.000.000	1.188.040.000.000	527.133.217.252	2.468.202.043.804	911.814.406.602	(158.092.943.897)	5.449.056.723.761	1.030.520.665.623	6.479.577.389.384

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 Dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan		3.608.938.044.864	2.826.363.775.992
Penerimaan kas lain-lain		197.478.650.504	125.332.904.543
Pembayaran ke pemasok, karyawan, dll.		(2.150.799.084.886)	(664.730.130.724)
Pembayaran pajak penghasilan		(677.836.281.327)	(249.992.060.520)
Beban keuangan	46	<u>(173.897.163.605)</u>	<u>(100.799.481.838)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>803.884.165.550</u>	<u>1.936.175.007.453</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Pengeluaran investasi		(235.195.716.514)	(271.307.468.157)
Perolehan aset tetap dan properti investasi		(2.145.261.030.926)	(2.123.193.209.819)
Penjualan aset tetap			1.135.859.091
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi		<u>(2.380.456.747.440)</u>	<u>(2.393.364.818.885)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya		2.154.429.861.615	374.000.000.000
Pembayaran utang bank		(64.438.226.693)	(68.250.000.000)
Penambahan modal disetor pada entitas anak		(135.393.350.270)	43.223.000.000
Pembayaran dividen non pengendali		(101.627.806)	(60.824.537)
Pembayaran dividen dan lainnya	29	<u>(251.147.425.546)</u>	<u>(220.081.000.000)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>1.703.349.231.300</u>	<u>128.831.175.463</u>
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		126.776.649.410	(328.358.635.969)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	2a, 2g, 4	<u>1.872.411.160.625</u>	<u>2.200.769.796.594</u>
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	2a, 2g, 4	<u>1.999.187.810.035</u>	<u>1.872.411.160.625</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Consolidated Statements of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)**

	<u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cash Flows From Operations			
Cash receipt from customers		3.608.938.044.864	2.826.363.775.992
Other cash receipt		197.478.650.504	125.332.904.543
Cash paid to suppliers, employees and others		(2.150.799.084.886)	(664.730.130.724)
Tax payment		<u>(677.836.281.327)</u>	<u>(249.992.060.520)</u>
Net Cash Provided From Operating Activities		<u>977.781.329.155</u>	<u>2.036.974.489.291</u>
Cash Flows From Investment			
(Increase)/Decrease in investments		(235.195.716.514)	(271.307.468.157)
Acquisition of fixed assets and investment property		(2.145.261.030.926)	(2.123.193.209.819)
Deposal of fixed assets			1.135.859.091
Net Cash Used in Investing Activities		<u>(2.380.456.747.440)</u>	<u>(2.393.364.818.885)</u>
Cash Flows From Funding			
Proceeds from other financial fund		2.154.429.861.615	374.000.000.000
Bank loans payment		(64.438.226.693)	(68.250.000.000)
Financial expenses		(173.897.163.605)	(100.799.481.838)
Additional paid in capital in subsidiaries		(135.393.350.270)	43.223.000.000
Dividend for non controlling interest		(101.627.806)	(60.824.537)
Cash paid for dividends and others	29	<u>(251.147.425.546)</u>	<u>(220.081.000.000)</u>
Net Cash Provided From Funding Activities		<u>1.529.452.067.695</u>	<u>28.031.693.625</u>
Net Increase In Cash and Equivalents		126.776.649.410	(328.358.635.969)
Cash and Cash Equivalents at Beginning of The Year	2a, 2g, 4	<u>1.872.411.160.625</u>	<u>2.200.769.796.594</u>
Cash and Cash Equivalents at End of The Year	2a, 2g, 4	<u>1.999.187.810.035</u>	<u>1.872.411.160.625</u>

See accompanying notes to the consolidated financial statements,
which are an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Perusahaan") dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama "*Haven Badriff*". Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PN Pelabuhan. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 BPP dirubah menjadi Perseroan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan akta notaris nomor 207 tanggal 30 Juni 2014 oleh Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berisi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05403.40.20.2014 tertanggal 11 Juli 2014.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (*general cargo*) dan kendaraan;

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("the Company") was formerly known as "Haaven Badrift" in the period of Dutch colonialism. Further, since the independence of the Republic of Indonesia in 1945, until 1950, the Company reformed to "Jawatan Pelabuhan". In 1969, the Company was changed into the State-Owned Enterprise (BUMN) under the name of Perusahaan Negara Pelabuhan (PNP). From 1969 to 1983, PNP, then changed into Lembaga Pengusaha Pelabuhan by the name Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). In 1983, based on Government Regulation No. 11 year 1983, BPP was established into Perseroan Umum Pelabuhan I (Perumpel I). Since 1991, based on Government Regulation No. 56 year 1991, the Perumpel I changed the status into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The change of the Company's name to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) based on the notary deed of Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, No. 1 December 1, 1992 and approved by the Minister of Justice of Republic Indonesia judgment No. C2-8519.HT.01.01 /1992 dated June 1, 1992 and has been announced in the State Gazette of Republic of Indonesia. No. 8612 on November 1, 1994, additional No. 87.

The company statutes have been revised several times and the last adjustment was based on notary deed No. 207 on June 30, 2014 of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, regarding the general meeting of the shareholders PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), discussing of increasing basic capital, issued and paid-up capital. Then, the company statutes have been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. AHU-05403.40.20.2014 on July 11, 2014.

b. Business Fields

Based on statutes article 3, the objectives and purposes of company establishment are to conduct operation of port services. The company has also optimized utilization of its resources to provide the high quality and highly competitive goods and services to obtain benefits in order to increase the value of the company by applying the principles of limited company.

To reach the objectives and purposes as stated above, the company may carry out business activities as follows:

- To provide the services of harbor and for traffic and ship berthing areas;
- To provide the services of related pilotage and tugboats;
- To provide the services of quay and other facilities such as mooring, containers loading, liquid bulk, dry bulk, multi-purpose, other goods including livestock (general cargo), passenger station or vehicle facility;
- To provide the services of loading and unloading container, liquid bulk, dry bulk (general cargo) and vehicle;
- To provide the services of container terminal (general cargo), liquid bulk, dry bulk, multi purposes, passenger, roll on roll of shipyard and cruise passengers;
- To provide the services of warehousing, open storage, tank, place of stockpiling, loading and discharging tool and port equipment;
- To provide the services of land rental for buildings and fields, industries and buildings related to the smoothness of multi-mode transportation;
- To provide the services of electricity, fresh water, waste installation and garbage dump services;
- To provide the services of refueling for ship and vehicle at port;
- To provide the services of consolidated activities, goods distribution including live stocks;

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multy purpose*, penumpang, pelayaran rakyat dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik; dan
- Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Kegiatan usaha lainnya tersebut meliputi jasa angkutan, jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan, jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang pelabuhan, jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*), properti di luar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan kehotelan, jasa konsultan dan surveyor kepelabuhan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi kepelabuhanan, jasa *forwarding/ekspedisi*, jasa kesehatan, perbekalan dan katering, tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*, jasa penyelaman, jasa *tally*, jasa pas pelabuhan dan jasa timbangan.

c. Wilayah Kerja

Kegiatan usaha Perusahaan di bidang pelayanan jasa kepelabuhan ini meliputi wilayah, sebagai berikut:

Wilayah	Cabang/Unit Kerja
Wilayah Sumatera Utara	Pelabuhan Belawan dan Perwakilan Pangkalan Brandan/Susu Belawan International Container Terminal (BICT) Unit Galangan Kapal Terminal Petikemas Domestik Belawan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan Pelabuhan Sibolga Pelabuhan Gunung Sitoli Pelabuhan Kualatanjung
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Pelabuhan Dumai dan Perwakilan Bagan Siapi-api dan Perwakilan Bengkalis Pelabuhan Pekanbaru Pelabuhan Tembilahan, Perwakilan Rengat dan Perwakilan Kuala Enok Pelabuhan Tanjungpinang, Perwakilan Sei Kolak Kijang dan Perwakilan Tanjung Ubar Pelabuhan Tanjungbalai Karimun dan Perwakilan Selat Panjang Pelabuhan Sungai Pakning
Wilayah Aceh	Pelabuhan Batam dan Perwakilan Pulau Sambu Pelabuhan Malahayati dan Perwakilan Meulaboh Pelabuhan Lhokseumawe dan Perwakilan Kuala Langsa

Pelabuhan yang dikelola Perusahaan berjumlah 16 (enam belas) Pelabuhan Cabang dan 11 (sebelas) Pelabuhan Kawasan (Perwakilan), serta 1 (satu) unit usaha. Dari seluruh cabang

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- To provide the management of education and training consultancy services related to ports;
- To provide the container depot services and repairmen, cleaning, fumigation, and logistic;
- To provide the custom area and temporary dump;

Beside such activities above, the company also conduct other activities to support the company's goals regarding resource optimization. Other services, include transportation services, rental services, repairs facilities and tools, ship maintenance services and equipment in the field of port, shipping service from ship to ship, property outside the main activities of port, industry area, tourism facility and hospital, consultant and surveyor services, communication and information services, construction of ports, shipping, health, supplies, shuttle bus, dives, tally, pass of the port and scale.

c. Operational Areas

The operational areas of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as follows:

Area	Branch/Unit
North Sumatera Area	Belawan Port and Pangkalan Brandan/Susu Branch Representative Office Belawan International Container Terminal (BICT) Shipyards Unit (Unit Galangan Kapal) Belawan Domestic Container Terminal Tanjung Balai Asahan Port Sibolga Port Gunung Sitoli Port Kuala Tanjung Port
Riau Island Riau Area	Dumai port, Bagan Siapi-api and Bengkalis Branch Representative Pekanbaru Port Tembilahan Port, Rengat and Kuala Enok Branch Representative Tanjung Pinang Port, Sei Kolak Kijang and Tanjung Uban Branch Representative Tanjungbalai Karimun Port and Selat Panjang Representative Office Sungai Pakning Port
Aceh Province	Batam port and Pulau Sambu Branch Representative Office Malahayati Port and Meulaboh Branch Representative Office Lhokseumawe Port and Kuala Langsa Branch Representative Office

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has 16 (sixteen) Branch Port and 11 (twelve) Branch Representative Office, and 1 (one) business unit. From all of them, there are 5 (five) Branch that become the Main Port which are Belawan International Container Terminal (BICT), Dumai Port, Belawan Port, Belawan Domestic Container Terminal, and Pekanbaru Port, because give significant profit to Company.

The main office is located at Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan, North Sumatera.

d. Bonds Issuance

On June 10, 2016, the Company obtained the effective letter from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) by letter No. S-281/D.04/2016 to issue the Company's bond amounting to Rp1.000.000.000.000 (one trillion rupiah). On December 31, 2017, the total of outstanding bonds payable amounting to Rp1.000.000.000.000 which consists of the following bond series as follows:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

pelabuhan/unit usaha yang dikelola, terdapat 5 (lima) Cabang yang menjadi Pelabuhan Andalan yaitu Cabang Belawan International Container Terminal (BICT), Cabang Dumai, Cabang Belawan, Cabang Terminal Peti Kemas Domestik Belawan, dan Cabang Pekanbaru, karena memberikan kontribusi laba yang signifikan bagi Perusahaan.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan, Sumatera Utara.

d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-281/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum obligasi Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi	Jumlah (Rp)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
1	Obligasi Seri A	50.000.000.000	3	21/06/2016	21/06/2019
2	Obligasi Seri B	500.000.000.000	5	21/06/2016	21/06/2021
3	Obligasi Seri C	400.000.000.000	7	21/06/2016	21/06/2023
4	Obligasi Seri D	50.000.000.000	10	21/06/2016	21/06/2026
		1.000.000.000.000			

e. Manajemen Perusahaan**Dewan Komisaris**

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 17 September 2018 dan Akta No. 13 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H, susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut:

	2018	2017
Komisaris Utama	Refly Harun	Sapto Amal Damandari
Komisaris	Lukita Dinarsyah Tuwo Heryadi Bambang Setyo Wahyudi Winata Supriatna	Djarot Sri Sulistyono Djoko Sasono Bambang Setyo Wahyudi Winata Supriatna

Direksi

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 31 Agustus 2016 dan Akta No. 1 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H, susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	2017
Direktur Utama	Bambang Eka Cahyana
Direktur Bisnis	Syahputera Sembiring
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Iman A. Sulaiman
Direktur Keuangan	Farid Luthfi
Direktur SDM dan Umum	M. Hamied Wijaya

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

No	Bonds	Par value (Rp)	Tenor (Years)	Issuance Date	Maturity Date
1	Bonds Series A	50.000.000.000	3	21/06/2016	21/06/2019
2	Bonds Series B	500.000.000.000	5	21/06/2016	21/06/2021
3	Bonds Series C	400.000.000.000	7	21/06/2016	21/06/2023
4	Bonds Series D	50.000.000.000	10	21/06/2016	21/06/2026
		1.000.000.000.000			

e. Company Management**Board of Commissioners**

Based on Notary Deed No. 37 on September 17, 2018, and Notary Deed No. 13 on December 12, 2017, of Risna Rahmi Arifa, S.H., The Board of Commissioners on December 31, 2018 dan 2017, are as follows:

	2018	2017
President Commissioner	Refly Harun	Sapto Amal Damandari
Commissioners	Lukita Dinarsyah Tuwo Heryadi Bambang Setyo Wahyudi Winata Supriatna	Djarot Sri Sulistyjo Djoko Sasono Bambang Setyo Wahyudi Winata Supriatna

Board of Directors

Based on Notary Deed No. 46 on Agustus 31, 2016 and Notary Dees No. 1 on October 4, 2016, of Risna Rahmi Arifa, S.H, The Board of Directors on December 31, 2017, are as follows:

	2017
President Director	Bambang Eka Cahyana
Business Director	Syahputera Sembiring
Plan and Development Director	Iman A. Sulaiman
Financial Director	Farid Luthfi
Human Resources and General Director	M. Hamied Wijaya

Based on decision of Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as General Meeting of Shareholders of the Company PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), No: SK-288/MBU/11/2018 concerning Changes in Position Nomenclature, Assignment of Assignments, and Appointment of Members of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), hence changing the nomenclature of the positions of the members of the Company's Directors, as follows:

Then	Now
President Director	President Director
Business Director	Operasional and Commercial Director
Plan and Development Director	Technical Director
Financial Director	Financial Director
Human Resources and General Director	Human Resources Director
-	Transformation and Business Development Director

Transferring the assignments of these names, as members of the Company's Board of Directors, with the composition of the Board of Directors as of December 31, 2018, as follows:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Nomor: SK-288/MBU/11/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, maka mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Bisnis	Direktur Operasi dan Komersial
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknik
Direktur Keuangan	Direktur Keuangan
Direktur SDM dan Umum	Direktur SDM
-	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut, sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:

	2018
Direktur Utama	Bambang Eka Cahyana
Direktur Operasi dan Komersial	Syahputera Sembiring
Direktur Teknik	Hosadi A. Putra
Direktur Keuangan	M. Nur Sodik
Direktur SDM	M. Hamied Wijaya
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ihsanuddin Usman

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.33 tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 dan SK Dewan Komisaris Nomor KP.02 tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas sebagai Anggota Komite Audit an. Lidya Noor Haryanto, dan SK Dewan Komisaris Nomor KP.04 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) maka susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Ketua	Heryadi	Djarot Sri Sulistyono
Wakil Ketua	Lukita Dinarsyah Tuwo	Djoko Sasono
Anggota	Lidya Noor Haryanto Eddy Hary Susanto	Rudy Hartono Lidya Noor Haryanto

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 31 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan SK Dekom PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.09 tahun 2017 perihal perpanjangan masa tugas an. Denny Purwanto sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, dan SK Dewan Direksi Nomor.31 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) maka susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018
President Director	Bambang Eka Cahyana
Operasional and Commercial Director	Syahputera Sembiring
Technical Director	Hosadi A. Putra
Financial Director	M. Nur Sodik
Human Resources Director	M. Hamied Wijaya
Transformation and Business Development Director	Ihsanuddin Usman

Audit Committee

Based on decision of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.33 year 2017 dated Desember 04, 2017 and decision Board of Commissioners No. KP.02 year 2017 about tenure extension as a member of Audit Committee in the name of Lidya Noor Haryanto, and decision of Board of Commissioners No. KP.04 year 2018 about Dismissal and Appointment of the Chairperson and Deputy Chair of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the composition of the Audit Committee as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017
Chairman	Heryadi	Djarot Sri Sulisty
Vice Chairman	Lukita Dinarsyah Tuwo	Djoko Sasono
Members	Lidya Noor Haryanto Eddy Hary Susanto	Rudy Hartono Lidya Noor Haryanto

Risk Management Monitoring Committee

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 31 year 2017 dated December 4, 2017 concerning the composition of the Risk Management Monitoring Committee, and Decree of the Decree of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.09 of 2017 concerning the extension of the term of office. Denny Purwanto as a member of the Risk Monitoring Committee, and Decree of the Board of Directors No. 31 of 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Risk Management Monitoring Committee, the composition of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2018 and 2017 is as follows :

	2018	2017
Chairman	Bambang Setyo Wahyudi	Bambang Setyo Wahyudi
Members	Denny Purwanto Bambang Prio Djatmiko Hadi	Denny Purwanto Bambang Prio Djatmiko Hadi

Nomination and Remuneration Committee

Based on decision of Board of Commissioners PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.15 year 2017 dated Desember 4, 2017, and decision of Board of Commissioners PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.08 year 2018 about Dismissal and Appointment of the Chairperson and Deputy Chair of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomination and Remuneration Committee, the composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	2018	2017
Chairman	Refly Harun	Winata Supriatna
Members	Winata Supriatna Imron Eryandi	Ambal Lubis Imron Eryandi

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
Ketua	Bambang Setyo Wahyudi	Bambang Setyo Wahyudi
Anggota	Denny Purwanto Bambang Prio Djatmiko Hadi	Denny Purwanto Bambang Prio Djatmiko Hadi

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.15 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017, dan SK Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.08 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Ketua	Refly Harun	Winata Supriatna
Anggota	Winata Supriatna Imron Eryandi	Ambal Lubis Imron Eryandi

Audit Internal

Dalam memastikan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi Audit Internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pembentukan SPI oleh Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 67 ayat 1, Keputusan Pemerintah RI No. 12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan, tercantum pada Bab III Satuan Pengawasan Internal Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal pasal 2 ayat 1.

Kepala SPI per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Arif Hutomo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.32/5/11/PI-14.TU tanggal 16 Juni 2014.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Muhammad Eriansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.32/2/22/PI-16.TU tanggal 11 Februari 2016.

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.480.959.842 dan Rp16.471.959.748.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai masing-masing 1.402 dan 1.427 karyawan tetap (tidak diaudit).

f. Struktur Entitas Anak

Penyertaan entitas yang dimiliki Perusahaan atas entitas anak, pengendalian bersama dan entitas asosiasi pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Internal Audit

To ensure that the Company's operational activities are comply to Standard Operating Procedures, internal audit functions are necessary and the internal auditors should be working independently to support the President Director in his controlling and supervising functions. The internal audit functions are carried out by Internal Audit Department (SPI). The establishment of the SPI is based on (1) Law No. 19 Year 2003 about BUMN, section 67 subsection 1, (2) the Government Regulation No. 12 year 1998 dated January 17, 1998 about limited liability companies, Chapter III of Internal Audit, Articles 28, 29, and 30, and (3) The regulation of Capital Market and Financial Institutions No. IX.1.7 year 2009 on the establishment and guidance of the preparation of the internal audit charter of article 2 paragraph 1.

Head of SPI on December 31, 2018 and 2017 was Arif Hutomo that was officially inaugurated based on the Board of Director's Decision of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 32/5/11/PI-14.TU dated June 16, 2014.

Company Secretary

Company Secretary on December 31, 2018 and 2017 was Muhammad Eriansyah that was officially inaugurated based on Board of Director's Decision of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 32/2/22/PI-16. TU dated February 11, 2016.

Remuneration of Commissioners and directors for the period 2018 and 2017 were Rp16.480.959.842 and Rp16.471.959.748 respectively.

The number of employees of the Company as of December 31, 2018 and 2017, were 1.402 dan 1.427 employees (unaudited).

f. Structure of Subsidiaries

Investments in entities owned by the Company for subsidiaries, joint control and associated entities as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Entities's Name	Domicile	Type of Business	2018		Entities
			Percentage of Ownership	Total Assets (in million Rupiah)	
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Logistic service	99	381.018	Subsidiaries
PT Prima Pengembangan Kawasan*	Medan	Industrial areas	90	873.497	Subsidiaries
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Health	99,68	28.046	Subsidiaries
PT Prima Terminal Petikemas*	Medan	Container	70	1.889.641	Subsidiaries
PT Prima Multi Terminal*	Medan	Multi Purpose Terminal	55	3.873.994	Subsidiaries
PT Terminal Petikemas Indonesia*	Jakarta	Kepelabuhan	25		Associated

*) belum beroperasi secara komersial

Entities's Name	Domicile	Type of Business	2017		Entities
			Percentage of Ownership	Total Assets (in million Rupiah)	
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Logistic service	99	148.564	Subsidiaries
PT Prima Pengembangan Kawasan*	Medan	Industrial areas	90	853.228	Subsidiaries
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Health	99,68	23.986	Subsidiaries
PT Prima Terminal Petikemas*	Medan	Container	70	1.071.632	Jointly Controlled
PT Prima Multi Terminal*	Medan	Multi Purpose Terminal	55	3.196.113	Jointly Controlled
PT Terminal Petikemas Indonesia*	Jakarta	Port and harbour	25	135.742	Associated

*) belum beroperasi secara komersial

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nama Entitas	Domisili	Jenis Usaha	2018		Entitas
			Persentase Kepemilikan	Total Aset (Jutaan)	
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Jasa Logistik	99	381.018	Anak
PT Prima Pengembangan Kawasan*	Medan	Kawasan Industri	90	873.497	Anak
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Kesehatan	99,68	28.046	Anak
PT Prima Terminal Petikemas*	Medan	Jasa Pelayanan	70	1.889.641	Anak
PT Prima Multi Terminal*	Medan	Terminal Multi Purpose	55	3.873.994	Anak
PT Terminal Petikemas Indonesia*	Jakarta	Kepelabuhan	25		Asosiasi
*) belum beroperasi secara komersial					
Nama Entitas	Domisili	Jenis Usaha	2017		Entitas
			Persentase Kepemilikan	Total Aset (Jutaan)	
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Jasa Logistik	99	148.564	Anak
PT Prima Pengembangan Kawasan*	Medan	Kawasan Industri	90	853.228	Anak
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Kesehatan	99,68	23.986	Anak
PT Prima Terminal Petikemas*	Medan	Jasa Pelayanan	70	1.071.632	Pengendali Bersama
PT Prima Multi Terminal*	Medan	Terminal Multi Purpose	55	3.196.113	Pengendali Bersama
PT Terminal Petikemas Indonesia*	Jakarta	Kepelabuhan	25	135.742	Asosiasi
*) belum beroperasi secara komersial					

PT Prima Indonesia Logistik

PT Prima Indonesia Logistik didirikan berdasarkan akta No. 34 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 10 yang dibuat di hadapan Notaris Hapizo, S.H., Notaris di Medan tanggal 23 Agustus 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0239461 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 yang mengesahkan perubahan pengurus Perseroan Direksi dan Komisaris Perusahaan PT Prima Indonesia Logistik. Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima. Kegiatan operasional dimulai sejak tahun 2014.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Indonesia Logistik di tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp67.320.000.000 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan (Kopkapel UTPK). Perusahaan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp223.860.582.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

PT Prima Indonesia Logistik

PT Prima Indonesia Logistik was established by deed No. 34 of Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan dated September 26, 2014 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-27882.40.10.2014 dated October 6, 2014. The statutes have been adjusted, recently by notary deed No. 10 of Hapizo, S.H., Notary in Medan dated August 23, 2018 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter AHU-AH.01.03-0239461 year 2018 dated September 5, 2018 which ratifies changes in the management of the Company Directors and Company Commissioners PT Prima Indonesia Logistik. According to the Company statutes number 3, the purposes and objectives of the Company are to conduct business in the container depot and other logistics services field with excellent services. The commercial operation has been started since 2014.

The Company's investment in PT Prima Indonesia Logistik in 2018 and 2017 was Rp67.320.000.000 with percentage of ownership 99%, whereas 1% others owned by Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan (Kopkarpel UTPK). The Company recorded total comprehensive income for the year attributable to Non-controlling Interest of Rp223.860.582.

PT Prima Pengembangan Kawasan

PT Prima Pengembang Kawasan was established by Notary deed No. 15 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan on September 8, 2015 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-2455231.AH. 01.01.Year 2015 dated September 8, 2015. The Company's statutes have been adjusted, recently by Deed No.9 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan dated November 21, 2016, regarding the change of the Director of the Company, and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-AH.01.03-0103276 dated November 29, 2016. Based on the Extraordinary General Shareholders' Meeting (RUPS-LB) No. KU.60/1/20/PPK-16 dated December 1, 2016, the Company has decided and approved the addition of authorized capital and paid-up capital in 2016.

The commercial operation was started from 2015. The purposes and objectives of PT Prima Pengembangan Kawasan are to provide services with the main business activities includes: rental services and management of industrial areas, including management and leasing, maintenance and other supporting facilities, such as factories, warehouses and related activities; services development and management of industrial estates; consultancy, for operation as management and maintenance of industrial areas as well as physical infrastructure and regional infrastructure.

The Company's investment in PT Prima Pengembangan Kawasan for the years ended 2018 and 2017 are amounting to Rp759.000.000.000 respectively or 90%, whereas 10% others owned by PT Prima Multi Terminal. The Company recorded total comprehensive income for the year attributable to Non-controlling Interest of Rp1.757.248.133

PT Prima Husada Cipta Medan

PT Prima Husada Cipta Medan was established by Notary Deed No. 4 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan dated November 8, 2016 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-0052052.AH.01.01 year 2016 dated November 22, 2016. The Company's statutes has been changed several times and the latest was Notary Deed of Risna Rahmi Arifa, S. H., No. 15 dated November 21, 2017 and was approved by Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-0161958.AH.01.11 dated December 20, 2017. Commercial operation was started on 2017.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Prima Pengembangan Kawasan

PT Prima Pengembangan Kawasan didirikan berdasarkan akta No.15 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 September 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-2455231.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 9 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 21 Nopember 2016 mengenai pergantian Direktur Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0103276 tanggal 29 November 2016. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. KU.60/1/20/PPK-16 tanggal 1 Desember 2016, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal dasar dan modal disetor pada tahun 2016.

Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2015. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyediakan jasa dengan melakukan kegiatan usaha utama antara lain: Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, meliputi pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, seperti pabrik, gudang dan kegiatan terkait; Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri; Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Pengembangan Kawasan di tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp759.000.000.000 atau sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh PT Prima Multi Terminal. Perusahaan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp1.757.248.133.

PT Prima Husada Cipta Medan

PT Prima Husada Cipta Medan didirikan berdasarkan akta No. 4 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 November 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui akta No. 15 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di hadapan notaris Risna Rahmi Arifa, SH, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0161958.AH.01.11 tanggal 20 Desember 2017. Kegiatan operasional dimulai pada tahun 2017.

Sesuai dengan pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan: Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, serta usaha terkait.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Husada Cipta Medan tahun 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp15.840.000.000 atau sebesar 99,68%, sedangkan 0,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan. Perusahaan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp14.987.580.

PT Prima Terminal Petikemas

PT Prima Terminal Petikemas didirikan berdasarkan akta No. 162 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 20 Juli 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 73 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

According to the statutes article 3 of the Company, the purpose and objective of this Company are to conduct business in the field of health services: Hospitals, Clinics, Polyclinics, Medical Centers, and other related businesses.

The Company's investment in PT Prima Husada Cipta Medan year 2018 and 2017, amounting Rp15.840.000.000 or 99,68%, whereas 0,32% others owned by Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan. The Company recorded total comprehensive income for the year attributable to Non-controlling Interest of Rp14.987.580

PT Prima Terminal Petikemas

PT Prima Terminal Petikemas was established by Notary Deed No. 162 of Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan on July 20, 2013 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-46327.AH.01.01.Year 2013. The Company's statutes have been adjusted, and recently by Deed No.73 of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan dated November 30, 2015 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights on letter No. AHU-AH.01.03.0991253 dated December 24, 2015. Based on the General Meeting of Shareholders (RUPS) No. UM.50/4/17/PTP-15 dated December 18, 2015, the Company has decided and approved the addition of paid in capital in 2016, but the RUPS has not been covered by notary deed. The commercial operation was started in 2013.

According to the company statutes number 3, the purpose and objective of the Company is to provide international container terminal services.

The Company's investment in PT Prima Terminal Petikemas year 2018 and 2017 amounting Rp436.501.000.000 or 70%, while the rest was owned by PT Wijaya Karya (Persero) by 15% and PT Hutama Karya (Persero) by 15% with the aim of joint control. The Company recorded total comprehensive loss for the year attributable to Non-Controlling Interest of Rp4.028.947.263.

PT Prima Multi Terminal

PT Prima Multi Terminal was established by notary deed No. 04 of Tuti Sumarni, S.H., Notary in Jakarta on September 26, 2014 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter Number AHU-26883.40.10.2014 dated September 29, 2014. The Company's statutes have been changed, and recently by Deed No 20 of Notary Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan dated November 22, 2016 regarding the increase of authorized capital and paid up capital of the Company and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter Number AHU-0023804.AH .01.02.Year 2016 dated December 13, 2016.

The aims and objective of the Company are to provide Multi Purpose Terminal services to supply customer's needs at Kuala Tanjung Terminal in order to support the Sei Mangke MP3EI Program and market demands on the existence of the Liquid Bulk Terminal/Multi Purpose which is open to the public.

The Company's investment in PT Prima Multi Terminal in year 2018 and 2017 are amounting Rp724.548.000.000 or equal to 55%, while the rest was owned by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk as 30% and PT Waskita Karya (Persero) Tbk as 15% with the aim of joint control. The Company recorded total comprehensive loss for the year attributable to Non-Controlling Interest of Rp4.910.979.163.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

di Medan tertanggal 30 Nopember 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0991253 tanggal 24 Desember 2015. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. UM.50/4/17/PTP-15 tanggal 18 Desember 2015, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal disetor pada tahun 2016, namun RUPS tersebut belum dituangkan dalam akta notaris. Kegiatan operasional dimulai pada tahun 2013.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah menyediakan jasa pelayanan terminal petikemas internasional.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Terminal Petikemas tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp436.501.000.000 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya sebesar 15% dan PT Utama Karya sebesar 15%. Perusahaan mencatat jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp4.028.947.263.

PT Prima Multi Terminal

PT Prima Multi Terminal didirikan berdasarkan akta No. 04 yang dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 20 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 22 Nopember 2016 mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0023804.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 13 Desember 2016.

Maksud dan tujuan Perusahaan ini untuk menyediakan jasa pelayanan *Terminal Multi Purpose* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung dalam rangka menyukseskan Program MP3EI Sei Mangke dan tuntutan pasar atas keberadaan Terminal Curah Cair/*Terminal Multi Purpose* yang terbuka untuk umum.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Multi Terminal pada tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp724.548.000.000 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 30% dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 15%. Perusahaan mencatat jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp4.910.979.163.

PT Terminal Petikemas Indonesia

PT Terminal Petikemas Indonesia didirikan berdasarkan akta No. 36 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2016 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0104991 tanggal 05 Desember 2016.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

PT Terminal Petikemas Indonesia

PT Terminal Petikemas Indonesia was established by Notary Deed No. 36 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.K., Notary in Jakarta on April 10, 2013 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-21873.AH.01.01 year 2013 dated April 24, 2013 and published in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 10, 2013. The Company's statutes have been adjusted, and recently by Deed. No. 1 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.K., Notary in Jakarta dated December 2, 2016 regarding the change of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, which was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-AH.01.03-0104991 dated December 5, 2016.

According to statutes number 3, the purpose of this company is related to business activities in the port and harbour.

The Company's investment in PT Terminal Petikemas Indonesia as of December 31, 2018 was amounting to Rp37.500.000.000 or equal to 25%.

In 2018, PT Prima Terminal Petikemas and PT Prima Multi Terminal began to be consolidated by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in accordance with the approval of the Shareholders of PT Prima Terminal Petikemas and PT Prima Multi Terminal on letter Number KU.66 / 1/5 / PI- 19 and Number KU.66 / 1/1 / PI-19 concerning Confirmation of Shareholders dated January 22, 2019.

The following information are the significant accounting policies applied in consolidated financial statement reporting PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for the years ended Desember 31, 2018 and 2017.

The Company and subsidiaries are hereinafter referred to as "Groups"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance and Presentation of Consolidated Financial Statement

Statement of Compliance

Consolidated financial statement compiled and has complied with the Financial Accounting Standards (SAK) that applicable in Indonesia, which includes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association (DSAK - IAI), and Appendix to the Decision of the Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-347/BL/2012 concerning the presentation and disclosure of the financial statements of issuers or public companies, and the Accounting Guidelines for Indonesian Port Companies (PAPPI).

Presentation of Consolidated Financial Statements

Basis of presentation of consolidated financial statement, except for the statement of cash flows, the financial statements are prepared on accrual and historical cost basis and other measurement as disclosed in the related accounts.

The consolidated financial statements are prepared based on accrual concepts, except for statements of cash flows. The statement of cash flows is prepared using the direct method and classified into operating, investing, and funding activities. For the purpose of cash flow statement,

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Terminal Petikemas Indonesia adalah sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25%.

Pada tahun 2018, PT Prima Terminal Petikemas dan PT Prima Multi Terminal mulai dikonsolidasi oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai persetujuan para Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas dan PT Prima Multi Terminal pada surat Nomor KU.66/1/5/PI-19 dan Nomor KU.66/1/1/PI-19 perihal Konfirmasi Pemegang Saham tanggal 22 Januari 2019.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya disebut "Grup".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, diungkapkan di catatan 3.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

cash and cash equivalent include cash on hand, cash in banks, short term investments, maturing in three months or less, not pledged as collateral, and not restricted in use.

The consolidated financial statements are denominated in Rupiah (Rp), which is the functional currency of the Company and its Subsidiaries.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018 are in line with the accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017.

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgments in the process of applying the Company's accounting policies. Complex areas or require a higher level of consideration or areas where assumptions and estimates have a significant impact on the financial statements disclosed in Note 3.

b. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries under control, where the Company has more than 50%, both direct and indirect, voting rights in subsidiaries and can determine the financial and operating policies of subsidiaries to benefit from the activities of subsidiaries that is.

Subsidiaries are all entities (including structured entities) where the Company has control. The company controls an entity when the Company is exposed or has rights to returns that vary from its involvement with the entity and has the ability to influence such returns through its authority over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. Subsidiaries are no longer consolidated from the date the Company loses control.

Balances and transactions including unrealized gains or losses on inter-company transactions are eliminated to reflect the financial position and results of operations of the Company and subsidiaries as a business entity.

The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for similar events and transactions under the same conditions. If a subsidiary uses accounting policies that are different from the accounting policies used in the consolidated financial statements, adjustments are made to the financial statements of the subsidiary.

Non-controlling interest in the equity of subsidiaries is stated at the proportion of the non-controlling shareholders of the net income and equity of the subsidiary in accordance with the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary, and is presented as part of equity in the consolidated financial statements. Losses that are part of a non-controlling shareholder in a subsidiary can exceed its share in paid-up capital and are presented as negative.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are equity transactions. The difference between the fair value of the consideration paid and the acquired portion of the carrying amount of the net assets of a subsidiary is recorded in equity. Gain or loss of non-controlling interests is also recorded in equity. When the Company no longer has control over an entity, the remaining interests of the Company in the entity are remeasured based on their fair value at the date of loss of control, and changes in the carrying amount are recognized in the income statement. The

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****b. Prinsip Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dikendalikannya, dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara di entitas anak dan dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari entitas anak untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas entitas anak tersebut.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perusahaan memiliki kendali. Perusahaan mengendalikan suatu entitas ketika Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Saldo dan transaksi termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non pengendali atas laba bersih dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham non pengendali pada entitas anak tersebut, dan disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham non pengendali pada suatu entitas anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor dan disajikan tetap negatif.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas. Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas sesuatu entitas anak, kepentingan Perusahaan yang masih tersisa di entitas tersebut diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

c. Perubahan pada Pernyataan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substantif terhadap kebijakan akuntansi Grup dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, antara lain:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

initial carrying amount is fair value for the purpose of remeasuring the remaining interest as an associate, joint venture or financial asset.

In addition, the amount previously recognized in other comprehensive income in connection with the entity is recorded as if the Company had released the related asset or liability. This can mean that the amount previously recognized in other comprehensive income is reclassified to the income statement.

c. Changes to the Statement and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK)

Implementation of standards, the interpretation of the new / revised following standards which are effective January 1, 2018, does not give rise to substantive changes to the Company's accounting policies and securities for the amounts reported for the current or previous year, including:

- Amendment PSAK 2 "Statement of Cash Flows"
- Amendment PSAK 13 "Investment Property"
- Amendment PSAK 16 "Fixed Assets"
- Amendment PSAK 46 "Income Tax"
- Amendment PSAK 53 "Share Based Payment"

Some PSAK experience annual adjustments and are effective January 1, 2018, i.e.:

- Amendment PSAK 15 "Investment in Associates and Joint Ventures"
- Amendment PSAK 67 "Disclosure of Interest in Other Entities"

Standards and interpretations of certain new accounting standards have been issued but are not required to be applied in the year ending 31 December 2018 and have not been applied early by the Company. The company has reviewed the impact of these standards and interpretations as outlined below:

- Amendment PSAK 62 "Insurance contract"
Determine financial reporting for insurance contracts for each entity that issues insurance contracts. This statement specifically requires the development of limited accounting insurers for insurance contracts as well as disclosures that identify and explain the amount in insurer financial statements arising from insurance contracts, and assist users of financial statements in understanding the amount, timing and uncertainty of future cash flows from insurance contracts
- PSAK 71 "Financial Instrument"
Regulates the classification, measurement and termination of recognition of financial assets and liabilities, introduces new rules for hedge accounting and a new model of impairment of financial assets.
- PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers"
A standard for recognition of income has been issued. This standard will replace PSAK 23 which regulates contracts for goods and services and PSAK 34 which regulates construction contracts. This new standard is based on the principle that income is recognized when control of goods or services is transferred to customers.
- PSAK 73 "Lease"
This standard will have an impact on almost all leases recognized in the statement of financial position, because the difference between operating leases and financing is written off. In the new standard, an asset (usufructuary rights for goods leased) and a financial liability to pay rent is

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| - Amandemen PSAK 2 | “Laporan Arus Kas” |
| - Amandemen PSAK 13 | “Properti Investasi” |
| - Amandemen PSAK 16 | “Aset Tetap” |
| - Amandemen PSAK 46 | “Pajak Penghasilan” |
| - Amandemen PSAK 53 | “Pembayaran Berbasis Saham” |

Beberapa PSAK mengalami penyesuaian tahunan dan efektif 1 Januari 2018, yaitu:

- | | |
|---------------------|---|
| - Amandemen PSAK 15 | “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” |
| - Amandemen PSAK 67 | “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” |

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif 1 Januari 2019, yaitu:

- | | |
|-----------|--|
| - ISAK 33 | “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka” |
| - ISAK 34 | “Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan” |

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup. Grup telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amandemen PSAK 62 “Kontrak Asuransi”
Menentukan pelaporan keuangan untuk kontrak asuransi setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. Pernyataan ini secara khusus mensyaratkan pengembangan terbatas akuntansi *insurer* untuk kontrak asuransi serta pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan *insurer* yang timbul dari kontrak asuransi, dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan dari kontrak asuransi.
- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
Mengatur klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.
- PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
Suatu standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika control atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.
- PSAK 73 “Sewa”
Standar ini akan membawa dampak hampir ke seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah. Perlakuan akuntansi untuk pesewa tidak akan berbeda secara signifikan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya

Aset keuangan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

recognized. Exceptions are only found in short-term leases and low-value ones. The accounting treatment for boarders will not differ significantly.

d. Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

The Company's financial assets consist mainly of cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other current financial assets and other non-current financial assets.

Financial assets that are initially recognized at their fair value plus directly attributable transaction costs.

Financial assets are grouped into 4 categories, namely:

- (i) financial assets measured at fair value through profit or loss,
- (ii) financial assets available for sale,
- (iii) investments held to maturity,
- (iv) loans and receivables,

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are financial assets intended for trading. Financial assets are classified as financial assets that are traded if the acquisition is intended for sale or repurchase in the near future and there is evidence of a tendency for short-term profit-taking transactions. Derivative receivables are categorized as traded financial assets unless they are designated as hedges.

Gains and losses arising from changes in fair value of derivatives are recognized in the statement of comprehensive income as part of "foreign exchange gains / losses".

- (ii) Financial assets available for sale

Financial assets in the available-for-sale category are non-derivative financial assets that are determined to be held for a certain period, where they will be sold in order to fulfill liquidity or changes in interest rates, foreign exchange or not classified as loans or receivables, classified investments held to maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, available-for-sale financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at fair value where profit or loss is recognized in the statement of changes in equity except for impairment losses and comprehensive income from foreign exchange until the financial assets are derecognized. If an available-for-sale financial asset is impaired, the accumulated comprehensive income previously recognized in the equity section will be recognized in the statement of comprehensive income, while interest income is calculated using the effective interest method and gains or losses due to changes in the exchange rate of monetary assets classified as available-for-sale group recognized in comprehensive income.

- (iii) Investment held to maturity

Owned to maturity investments are non-derivative investments with fixed or determined payments and fixed maturities, in which management has positive intentions and the ability to hold the financial assets to maturity, in addition to:

- a) Investments which are initially designated as financial assets which are measured at fair value through profit or loss;

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
- (ii) aset keuangan yang tersedia untuk dijual,
- (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo,
- (iv) pinjaman yang diberikan dan piutang,

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk transaksi ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari “keuntungan/ kerugian selisih kurs”.

- (ii) Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, di mana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya di mana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi komprehensif dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi komprehensif yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif, sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi komprehensif.

- (iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, di mana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
 - a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- b) Investments that are determined as available for sale; and
- c) Investments that meet the definition of loans and receivables.

At initial recognition, held to maturity investments are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and not quoted in an active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the statements of comprehensive income when loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. Allowance for impairment losses on financial assets

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Subsequent interest income is recognized at the carrying value which is reduced in value based on the asset's original effective interest rate. Loans and receivables along with related provisions are written off if there is no possibility of a realistic recovery in the future and all guarantees have been realized or have been transferred to the Company. If in the subsequent period the value of the estimated impairment loss of a financial asset increases or decreases because an event that occurs after the decline in value is recognized, the impairment loss of the previously recognized value is added or reduced by adjusting the allowance account. If in the future the write-off can be recovered, the recovery amount is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For reserves of impairment losses on loans and receivables, the Company applies the Roll Rate or Flow Model method.

3. Financial Liabilities

The Company's financial liabilities mainly consist of trade payables, accrued expenses, tax debts, short-term bank loans, long-term bank loans and bonds payable.

Financial liabilities are classified into categories (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

- (i) **Financial liabilities measured at fair value through profit or loss**
Fair value of financial liabilities measured at fair value through profit or loss are financial liabilities intended for trading. Financial liabilities are classified as traded if they are acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near future and there is evidence of current short-term profit taking patterns. Derivatives are classified as trading liabilities unless specified and effective as hedging instruments.
- (ii) **Financial liabilities measured at amortized cost**
Financial liabilities not classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost using the effective interest rate method.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (iv) Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

2. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Grup. Jika pada periode berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman dan piutang, Grup menerapkan metode *Roll Rate* atau *Flow Model*.

3. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang obligasi.

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

4. Disconnect from Financial Instruments

Financial assets and offsetting financial liabilities and their net values are reported in the statement of financial position, if and only if they currently have legal rights to offset the amount that has been recognized and there is an intention to settle on a net basis or to realize assets and settle their obligations simultaneously. Revenues and expenses are presented in net amounts only if permitted by accounting standards.

5. Recognition

The company initially recognized loans and receivables at the date of acquisition.

The purchase and sale of common financial assets (regular) is recognized on the trading date where the Company has a commitment to buy or sell the asset.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trading date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

At initial recognition, financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for financial instruments not measured at fair value through profit or loss after initial recognition) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The measurement of financial assets and financial liabilities after initial recognition depends on the classification of financial assets and financial liabilities.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or the issuance of a financial liability and are additional costs that would not have occurred if the financial instrument was not obtained or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized at the beginning of the recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized at the beginning of the calculation of the liability. These transaction costs are amortized over the life of the instrument based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs relating to financial assets or part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

6. Measurement of Amortized Cost

Amortized cost of financial assets or financial liabilities is the amount of financial assets or liabilities measured at initial recognition, minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and maturity value, and reduced allowance for impairment losses.

The effective interest rate is the interest rate that precisely discounts the estimated future cash flows during the estimated life of a financial asset or financial liability (or if more appropriate, a shorter period) to obtain a net carrying value at initial recognition. When calculating the effective interest rate, Company estimates future cash flows by considering all contractual requirements in the financial instrument, but does not consider future credit losses.

Effective interest rate calculations include transaction costs and all benefits/fees and other benefits paid or received which are an integral part of the effective interest rate.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****4. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5. Pengakuan

Grup pada awalnya mengakui pinjaman yang diberikan dan piutang pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan di mana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

6. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

7. Estimated fair value

The Company records certain financial assets and liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates.

Fair value is the price that will be received to sell an asset or the price that will be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants (market participant) on the main market measurement date or, if there is no main market, in the most profitable market where the Company has access to that date. The fair value of the liabilities reflects the risk of their performance.

If available, the Company measures the fair value of financial instruments using quoted prices in the active market for these instruments. A market is considered active if transactions on assets and liabilities occur with sufficient frequency and volume to provide continuous pricing information. If quoted prices are not available in active markets, the Company uses valuation techniques by maximizing the use of observable and relevant inputs and minimizing the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique combines all factors that are accounted for by market participants in determining transaction prices.

The best proof of the fair value of financial instruments at initial recognition is the transaction price, which is the fair value of the payments given or received. If the Company determines that fair value at initial recognition is different from transaction price and fair value cannot be proved by quoted prices in active markets for identical assets or liabilities or based on valuation techniques that only use observable market data, hence the fair value of financial instruments at initial recognition is adjusted to defer the difference between fair value at initial recognition and transaction price. After initial recognition, the difference is recognized in profit or loss based on the age of the instrument but not later than when the valuation is fully supported by observable market data or when the transaction is closed.

If an asset or liability measured at fair value has an offer price and demand price, the Company measures assets and long positions based on the bid price and measures liabilities and short positions based on the price of the request.

The group of financial assets and financial liabilities exposed to market risk and credit risk managed by the Company based on their net exposure to market risk or credit risk is measured based on the price that will be received to sell net long positions (or paid to shift net short positions) for risk exposures certain. Adjustments at the level of the portfolio are allocated to individual assets and liabilities based on the adjustment of the relative risk of each individual instrument in the portfolio.

While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the amount of fair value or amortization may differ if the Company uses a valuation methodology or different assumptions. These changes can directly affect the profit or loss of the Company.

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on the prevailing market values in the consolidated financial statements.

Fair values for other financial instruments that are not traded on the market are determined using certain valuation techniques.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bantu lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

7. Estimasi nilai wajar

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participant*) pada tanggal pengukuran pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

If the market for a financial instrument is not active, the Company determines fair value using valuation techniques. Appraisal techniques include the use of current market transactions that are carried out fairly by parties who understand, desire and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, use discounted cash flow analysis and use option pricing models. The chosen valuation technique maximizes the use of market inputs, and minimizes the use of specific estimates from the Company, incorporates all factors that will be considered by market participants in setting prices and is consistent with acceptable economic methodologies in pricing financial instruments. Inputs used in valuation techniques adequately reflect market expectations and measures of risk and return factors that are inherent in financial instruments. Companies calibrate valuation techniques and test their validity by using prices from current market transactions that can be observed for the same instrument or on the basis of other available market data that can be observed.

Fair value reflects the credit risk of financial instruments and includes adjustments made to include credit risk of the Company and the other party, whichever is more appropriate. Estimated fair value obtained from the valuation model will be adjusted to consider other factors, such as liquidity risk or uncertainty in the valuation model, insofar as the Company believes that the involvement of a third party market will consider these factors in pricing a transaction.

Financial assets and long positions are measured using the bid price; financial liabilities and short positions are measured using the asking price. If the Company has the position of assets and liabilities where the market risk is mutually offset, then the Company can use the middle value of the market price as a basis for determining the fair value of the offsetting risk position and apply adjustments to the bid price or the price of demand for the net open position, whichever is more appropriate.

Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost using interest rates have approached fair value at the end of the financial year.

e. Termination of Recognition

The company derecognizes the financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the Company transfers all rights to receive contractual cash flows from the financial assets in the transaction where the Company has substantially transferred all the risks and rewards of ownership of the financial assets that transferred. Every right or liability for a transferred financial asset that arises or is still owned by the Company is recognized as an asset or liability separately.

The company derecognizes financial liabilities when the liabilities specified in the contract are released or canceled or expired.

In transactions where the Company does not substantially own or does not transfer all risks and benefits of ownership of a financial asset, the Company derecognizes the asset if the Company no longer has control over the asset. Rights and obligations that arise or are still owned in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control of assets is still owned, The company continues to recognize the transferred assets in the amount of continuous involvement, where the level of the Company's sustainability in the assets transferred is as large as the change in the value of the assets transferred.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan keuangan konsolidasian.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Grup menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Grup, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Grup mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Grup dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Grup yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Aset keuangan dan posisi *long* diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan posisi *short* diukur menggunakan harga permintaan. Jika Grup memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Grup dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka bersih (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga telah mendekati nilai wajar pada akhir tahun buku.

e. Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

The company write-off financial assets and related allowance for impairment losses when the Company determines that the financial assets cannot be collected. This decision is taken after considering information such as there has been a significant change in the financial position of the debtor/issuer of financial assets so that the debtor/issuer of financial assets can no longer pay off their obligations, or the proceeds of sale of collateral will not be sufficient to pay off all credit exposures.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the entity preparing its financial statements (in this case referred to as "reporting entity").

- a. The closest person or family member has a relationship with the reporting entity if the person:
 - i. Having joint control or control over the reporting entity;
 - ii. Has a significant influence on the reporter or reporting entity; or
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or parent and reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning the parent, subsidiaries and subsequent subsidiaries are related to other entities).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture which is a member of a business group, of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is the operator of a post-employment benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
 - vi. Entities that are controlled or controlled jointly by the person identified in letter (a).
 - vii. The person identified in letter (a) (i) has a significant influence on the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).

All significant transactions with related parties, whether carried out with terms and conditions similar to or not the same as those of third parties, have been disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

g. Cash and Cash Equivalent

In the consolidated cash flow statement, cash and cash equivalents include cash, deposits which can be withdrawn at any time and other short-term liquid investments with maturities of three months or less from the date of placement, and which are not guaranteed and are not restricted and overdraft. In the consolidated statement of financial position, overdrafts are presented together as loans in current liabilities.

h. Account Receivable

Accounts receivable is the amount owed by customers for the sale of merchandise or services in normal business activities. If the receivables are estimated to be billed within one year or less (or in the normal operating cycle if longer), the receivables are classified as current assets. If not, the receivables are presented as non-current assets. Non-business receivables from related parties represent accounts receivable balance related to loans given to related parties of the Company.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Grup menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam hal ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Kas dan Setara Kas

Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Trade accounts and non-trade receivables are initially recognized at fair value and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, minus provision for impairment.

The company determines the allowance for impairment losses on loans and receivables using the Roll Rate Model method. This method also known as Migration Analysis or Flow Model, uses past experience to calculate the roll rate average and is adjusted statistically for the percentage that changes significantly.

Trade accounts are presented at initial fair value, and are measured at amortized value after deducting the allowance for doubtful accounts.

The collectability of trade accounts receivable and non-business receivables are reviewed regularly. Receivables that are known to be uncollectible are written off by directly reducing their carrying value. An allowance account is used when there is objective evidence that it cannot collect all outstanding values in accordance with the initial requirements of the accounts. Significant financial difficulties experienced by debtors, the possibility of debtors being declared bankrupt or financial reorganization and defaults or delinquent payments are indicators that are deemed to cause a decrease in the value of receivables. The amount of impairment is equal to the difference between the carrying value and the present value of the estimated future cash flows at the initial effective interest rate. Cash flows related to short-term receivables are not discounted if the discount effect is immaterial.

The amount of the impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is presented under "impairment expense". When trade accounts receivable and non-business receivables, for which an impairment loss has been recognized, cannot be collected in the subsequent period, the receivables are written off by reducing the allowance account. Amount which can then be recovered from previously written-off receivables, credited against "impairment expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

For inventory damaged, all or partially obsolete, or the selling price has decreased, and if the estimated cost of completing or estimating costs to make a sale has increased, the value of inventory is reduced to net realizable value separately for each item or group of items in similar inventory or related. The difference arising from a decrease in the value of inventories is directly charged to the statement of comprehensive income in the heading "income/(expenses) other".

Inventory is damaged, the parent device is no longer available or economically cannot be used separated from its presentation into the group "other assets".

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses incurred but the charges will only be made in the period when the benefits are received. Prepaid expenses are amortized over the benefit of each cost using the straight-line method.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya serta cerukan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

h. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagihkan dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Piutang usaha dan piutang non usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Grup menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dengan menggunakan metode *Roll Rate Model*. Metode ini juga dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*, menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (*roll rate average*) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

Piutang usaha disajikan dalam nilai wajar awal, dan diukur dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menimbulkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam "beban penurunan nilai". Ketika piutang usaha dan piutang non usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban penurunan nilai" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Untuk persediaan rusak, seluruh atau sebagian telah usang, atau harga jualnya telah menurun, serta jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat maka nilai persediaan diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap item atau

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

k. Participation in associated entities

An associate is an entity where the Company has a significant influence through voting rights between 20% and 50%. Investments in associates are measured using the equity method. In accordance with the equity method, the investment value is recognized by the acquisition value or subtracted by the share of net income or loss, and dividend receipt from the associate from the date of acquisition.

The existence of significant influence is evidenced by the way each board of directors represents each shareholder. The company is represented on the board of directors through the appointment of a finance director. The deed of establishment also accommodates Company participation in the decision making process and policy setting.

The comprehensive income statement reflects the share of the results of operations of the associate. If there is a change that is recognized directly in the equity of the associate, recognize its share of the change and disclose this, if relevant, in the report on changes in equity. Unrealized gains or losses as a result of transactions between and associates are eliminated to the amount in accordance with the interests of the associate.

The financial statements of associates are prepared for the same reporting period as the Company. The company determines whether it is necessary to recognize additional impairment losses on investments in associates. The company determines at each reporting date whether there is objective evidence indicating that the investment in the associate has decreased in value. In this case, the Company calculates the amount of impairment based on the difference between the recoverable amount of the investment in the associate and its carrying value and recognizes it in profit or loss.

l. Investments in Joint Control of Entities

Co-arrangement is an arrangement in which two or more parties have joint control. Joint control is a contractual agreement to share control over an existing arrangement only when decisions regarding relevant activities require unanimous approval from all parties who share control. Joint arrangements can take the form of joint ventures and joint operations. Joint ventures are joint arrangements that stipulate that the parties that have joint control of the arrangement have the right to the net assets of the arrangement. Whereas joint operations are joint arrangements that stipulate that the parties that have joint control over the arrangement have the rights to the assets and obligations to the liabilities related to those arrangements..

The company entered into a cooperation agreement with various parties as stated in the agreement, in the form of transferring funds to the manager with the obligations contained in the cooperation agreement. The project manager is formed with members from each of the parties that make the agreement to form joint controls. This project manager carries out project development activities originating from the employer (owner) and is fully responsible for all of these activities including financial and project accountability reports to each party that carries out a cooperation agreement.

At the end of each reporting period, the Company evaluates when there is objective evidence that the investment in joint control of the entity is impaired.

The results of an entity's joint control operation are included or issued in the Company's consolidated financial statements from the date of acquisition or the date of release.

In 2018, the Company does not have investments in joint control (see Note 1f).

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

kelompok item dalam persediaan yang serupa atau berkaitan. Selisih yang timbul akibat penurunan nilai persediaan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi komprehensif pada pos “pendapatan/(beban) lain-lain”.

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset lain-lain”.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka adalah pengeluaran-pengeluaran yang terjadi namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode saat manfaatnya diterima. Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan melalui kepemilikan hak suara antara 20% sampai dengan 50%. Investasi pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai investasi diakui sejumlah nilai perolehan ditambah atau dikurang dengan bagian atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Keberadaan pengaruh signifikan dibuktikan dengan cara masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Laporan laba rugi komprehensif mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba atau rugi.

l. Penyertaan Pada Pengendalian Bersama Entitas

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Pengaturan bersama dapat berbentuk ventura bersama dan operasi bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Sedangkan operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola dengan kewajiban yang tertuang dalam

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

m. Investment Property

Investment Property is property that is owned by the owner or lessee through a finance lease to produce a rental or increase in value or both, and not for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sold in daily business activities.

Investment property is stated based on the cost model which is recorded at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss. Land rights are not depreciated and are presented at cost. Buildings are depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives (2-50 years). Maintenance and repair costs are charged to the statement of comprehensive income when incurred, while restoration and additions are capitalized. Transfers to investment properties are carried out if there is a change in use as indicated by the end of usage. Transfers from investment properties are carried out if, and only if there is a change in use, indicated by the commencement of owner-use or commencement of development for sale.

Investment property is derecognized at the time of disposal or when the investment property is not permanently used again and does not have any future economic benefits that can be expected at the time of disposal. Profit or loss arising from the termination or disposal of investment property is recognized in comprehensive income in the year the said stop or disposal occurs.

n. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost which includes all expenses directly related to the acquisition of fixed assets less accumulated depreciation. In accordance with PSAK 16, the Company chooses the cost method for measuring its fixed assets. Depreciation of fixed assets is calculated using the straight-line method over the estimated useful life less the residual value.

The grouping of depreciation percentage and asset age are as follows:

Types of Assets	% Depreciation/year	Residual values
Buildings and infrastructures	2 - 5	Rp1.000.000 or 2%
Ships	5 - 10	2%
Tools port facilities	5 - 20	2%
Tools	5 - 25	2%
Vehicles	20	20%
Emplacement	25	Rp1.000.000 or 2%

The residual value of fixed assets is reviewed, and adjusted at each date of the consolidated financial statements. The Company has reviewed the residual value where the new residual value is calculated from a certain percentage of the acquisition price except for port ponds, wave retainers, stacking fields, roads, bridges, parking lots and parks. Previously the remaining value of fixed assets was Rp. 0 (nil).

Land is recorded based on cost and not depreciated. The initial legal costs for obtaining legal rights are recognized as part of the costs of land acquisition and are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights.

The cost of repairing and maintaining assets to maintain future economic benefits is charged to the statement of comprehensive income when incurred. Improvements that add value, usefulness and useful life in large amounts are capitalized. Fixed assets that are no longer used or sold are removed

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

perjanjian kerjasama. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian membentuk pengendalian bersama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja (owner) dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penilaian ketika terdapat bukti objektif bahwa investasi pada pengendalian bersama entitas mengalami penurunan nilai.

Hasil usaha pengendalian bersama entitas dimasukkan atau dikeluarkan di dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan masing-masing sejak tanggal akuisisi atau tanggal pelepasan.

Pada tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki penyertaan pada pengendalian bersama (lihat Catatan 1f).

m. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti Investasi dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi komprehensif dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

n. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan PSAK 16, Grup memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat dikurangi nilai residunya.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

from the group of fixed assets and the accumulated related depreciation and gains or losses arising from the termination or disposal of a fixed asset are recognized as gains or losses in the current year statement of comprehensive income.

Assets in progress are stated at cost and presented as part of property, plant and equipment. The accumulated costs are transferred to each of the relevant fixed assets when the asset is completed and is ready for use.

Unused assets again, acquisition costs and accumulated depreciation are transferred to non-functioning fixed assets accounts in other asset accounts in the group of non-current assets and recorded at the residual value. Fixed assets that have not been used are recorded at cost in the account of the untapped fixed assets in the group of non-current assets.

Rental transactions are classified as financial leases if they meet all the required criteria (presented as part of fixed assets). If one of the criteria is not met, the lease transaction is classified as an operating lease transaction. Leased assets with finance leases are stated at the cash value of all lease payments over the lease period plus the residual value to be paid at the end of the lease term. Each rental payment is allocated as a principal installment.

Lease and interest expense obligations. Depreciation of assets leased with finance leases is calculated using the straight-line method based on the estimated useful lives of the same as those applied to the property, plant and equipment concerned.

The value of recoverable assets is estimated at the time of events or changes that indicate that the carrying amount may not be recoverable in accordance with SFAS No. 48 "Impairment of Assets Value". The decline in asset value is recognized as a loss in the statement of comprehensive income.

Fixed and/or unproductive assets are recognized in the statement of financial position as unproductive fixed assets in the group of other assets and are measured at their carrying value.

Referring to the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia SK I, II, III and IV Number KU.60 / 2/9 / PI-12, NomorHK.56 / 5/12 / PI.II-11, Number HK.04 / 19 / P. III-2011, and Number 1 / HK.104 / DUT-2012 dated December 30, 2011, the capitalized minimum expenditure for maintenance of fixed assets is regulated as follows:

Types of Assets	Minimum capitalized cost (% of Replacement Cost)
Buildings and infrastructures	2
Ships	2
Port facilities equipments	5 - 20
Port facilities installation	4 - 10
Land, roads, and buildings	3 - 10
Equipment	4 - 25
Vehicles	20
Emplacement	4 - 34

Interest and other borrowing costs incurred both directly and indirectly used to finance the construction of fixed assets, are capitalized up to when the fixed assets are ready for use. Interest

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengelompokan persentase penyusutan dan umur aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	% Penyusutan/tahun	Nilai Sisa
Bangunan dan Prasarana	2 - 5	Rp1.000.000 atau 2%
Kapal	5 - 10	2%
Alat Fasilitas Pelabuhan	5 - 20	2%
Peralatan	5 - 25	2%
Kendaraan	20	20%
Emplasmen	25	Rp1.000.000 atau 2%

Nilai residu aset tetap dikaji ulang, dan telah disesuaikan pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian. Grup telah melakukan pengkajian ulang atas nilai sisa dimana nilai sisa yang baru dihitung dari persentase tertentu dari harga perolehan kecuali untuk kolam pelabuhan, penahan gelombang, lapangan penumpukan, jalan, jembatan, lapangan parkir dan taman. Sebelumnya nilai sisa dari aset tetap adalah Rp0 (nihil).

Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

Biaya perbaikan dan perawatan aset untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Aset yang tidak dipergunakan lagi, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dipindahkan ke akun aset tetap tidak berfungsi dalam akun aset lain-lain pada kelompok aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai residunya. Aset tetap yang belum digunakan dicatat sebesar biaya perolehan pada akun aset tetap belum dimanfaatkan dalam kelompok aset tidak lancar.

Transaksi sewa digolongkan sebagai sewa pembiayaan (*financial lease*) apabila memenuhi semua kriteria yang diisyaratkan (disajikan sebagai bagian dalam aset tetap). Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa operasi (*operating lease*). Aset sewa dengan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa selama masa sewa ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok.

Kewajiban sewa dan beban bunga. Penyusutan atas aset yang disewa dengan sewa pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang bersangkutan.

Nilai aset yang dapat dipulihkan diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali sesuai PSAK

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

and borrowing costs incurred after the fixed assets are ready for use are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For borrowing costs that are directly attributable to qualifying assets, the amount of borrowing costs that can be capitalized is the actual borrowing costs incurred during the period less investment income from the temporary investment of the loan.

For borrowing costs that are not directly attributable to qualifying assets, the amount of capitalized borrowing costs is determined using the capitalization rate for expenditure on the asset. The capitalization rate is the weighted average borrowing cost for the loan balance that can be applied to the loan balance during the current period, in addition to loans specifically for the purpose of obtaining qualifying assets. The amount of borrowing costs capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing costs incurred during that period.

o. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses on assets. Cost includes costs that are directly attributable to obtaining the related asset.

All assets classified as intangible assets with limited useful lives are amortized. The amount that can be depreciated by intangible assets with limited useful life is the cost less the residual value.

Amortization of intangible assets with limited useful life using the straight-line method. The method of amortizing intangible assets with limited useful life is always reviewed at each reporting date.

The residual value of intangible assets with limited useful life is always reviewed, and adjustments are made if necessary, at each reporting date. The useful life for each intangible asset with a useful life of 2, 5 and 10 years.

The carrying amount of an intangible asset is reduced to the recoverable value of the intangible asset, if the carrying value of the intangible asset is greater than the recoverable value. Impairment of intangible assets is recognized as an impairment loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the post "other income/(expenses)-net".

Intangible assets that do not have the economic benefits of the front benefits or which are sold are excluded from the group of intangible assets and their accumulated amortization.

p. Non Financial Assets Impairment

At the end of each annual reporting period, the Company reviews whether there is an indication that an asset has decreased in value. If there is an indication or when the annual test of asset impairment needs to be done, the Company estimates the recoverable amount of the asset.

The recoverable amount determined for an individual asset is the higher of the fair value of the asset less the cost of selling with its value, unless the asset does not generate cash inflows that are significantly independent of the asset or other group of assets. If the carrying value of an asset is greater than its recoverable value, then the asset is stated to be impaired and the carrying value of the asset is reduced in value to its recoverable value. Impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment loss". In calculating use value, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market valuation of the time value of money and the specific risks to the asset.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No. 48 "Penurunan Nilai Aset". Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi komprehensif.

Aset tetap yang belum dan/atau tidak produktif diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tetap tidak produktif pada kelompok aset lain-lain dan diukur sebesar nilai tercatatnya.

Mengacu pada SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Nomor KU.60/2/9/PI-12, NomorHK.56/5/12/PI.II-11, Nomor HK.04/19/P.III-2011, dan Nomor 1/HK.104/DUT-2012 tanggal 30 Desember 2011 batasan minimum pengeluaran pemeliharaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi diatur sebagai berikut:

Jenis Aset	Batas minimum kapitalisasi (% dari replacement cost)
Bangunan fasilitas pelabuhan	2
Kapal	2
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	4 - 10
Tanah jalan dan bangunan	3 - 10
Peralatan	4 - 25
Kendaraan	20
Emplasemen	4 - 34

Bunga dan biaya pinjaman lain yang timbul baik yang langsung maupun yang tidak langsung digunakan dalam membiayai konstruksi aset tetap, dikapitalisasikan sampai dengan saat aset tetap telah siap dipakai. Bunga dan biaya pinjaman yang timbul setelah aset tetap tersebut siap digunakan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut.

Untuk biaya pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut.

Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman yang dapat diterapkan atas saldo pinjaman selama periode berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

In calculating fair value less costs to sell, current market transactions are also taken into account, if available. If market transactions are now not available, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of assets. These calculations must be supported by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in accordance with the cost category that is consistent with the function of the asset that has been impaired.

A review is carried out at the end of each annual reporting period to determine whether there are indications that an asset impairment loss that has been recognized in the previous period may no longer exist or may have declined. If the indication is found, the Company estimates the recoverable amount of the asset. The impairment loss recognized in the previous period is recovered only if there are changes in the assumptions used to determine the recoverable amount of the asset since the loss of the last impairment was recognized. In this case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The recovery is limited so that the carrying value of the asset does not exceed the recoverable amount or carrying value, net after depreciation, if there is no impairment loss recognized for the asset in previous years. The impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income. After the recovery, the depreciation of the asset is adjusted in the coming period to allocate the carrying value of the revised asset, minus the remaining value, on a systematic basis for the remaining useful life.

q. Bonds Payable and Bond Issuance Costs

Bonds payable are stated at nominal value after taking into account premium or discount amortization. Bond issuance costs are transaction costs deducted directly from the proceeds of emissions in determining the yield of net bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value represents a discount or premium and is amortized over the term of the bonds concerned.

r. Revenue and Expense Recognition

The port business revenue is recognized when the service activities have been completed (accrual basis). Service activities that have been completed until the end of the period for which the invoice has not been issued are recorded as income that will still be received. Rental income of assets is recognized when the lease rights arise for the lessee in accordance with the lease term. Shipyard business and hospital service revenues are recognized when the service has been completed.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

s. Lease

A lease is classified as a finance lease if the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset.

Classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or combined under normal conditions lead to leases classified as financing are:

1. Rent to transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset tak berwujud dengan umur manfaat 2, 5 dan 10 tahun.

Nilai tercatat suatu aset tak berwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset tak berwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset tak berwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos "pendapatan/(beban) lain-lain-bersih".

Aset tak berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tak berwujud berikut akumulasi amortisasinya.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Pengkajian ulang dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

2. The lessee has the option to buy assets at a price quite low compared to the fair value on the date the option can begin to be implemented so that at the beginning of the lease it is certain that the option will indeed be implemented.
3. The lease period is for most of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.
4. At the beginning of the lease the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;
5. Rented assets are specific and where only the lessee can use them without needing to be materially modified.

Indicators of situations that individually or jointly can also indicate that leases classified as financing are:

1. If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss associated with the cancellation is borne by the lessee.
2. Profit or loss from fluctuations in the fair value of residuals is charged to the lessee (for example, in the form of a rental price discount and which is equivalent to the majority of the sale of residuals at the end of the lease), and
3. Lessee has the ability to continue the lease for the second period with a rental value that is substantially lower than the market value of the rental

t. Borrowing Costs

Borrowing costs are the interest and foreign exchange loans received in foreign currencies and other costs (discount amortization / premiums from loans received) that occur in connection with borrowing funds.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the acquisition cost of the asset. Other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

If the Company borrows funds specifically for the purpose of obtaining qualifying assets, then the Company determines the amount of borrowing costs that are feasible to be capitalized at the amount of the actual borrowing costs incurred during the year minus the investment income on the temporary investment of the loan.

If the active development of the qualifying assets is terminated, the Company stops capitalizing borrowing costs during the extended period.

Capitalization of borrowing costs is terminated when the substance completes all activities needed to prepare qualifying assets so that they can be used or sold according to their intended purpose.

u. Income Tax

Current tax expense is determined based on taxable income in the relevant year calculated based on the applicable tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences arising from differences in the carrying amounts of assets and liabilities according to the consolidated financial statements with the tax bases of assets and liabilities. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and for tax purposes

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Utang Obligasi dan Biaya Emisi Obligasi

Utang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha jasa kepelabuhanan diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan (*accrual basis*). Kegiatan jasa pelayanan yang telah selesai dilakukan sampai dengan akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan sewa aset tetap diakui pada saat timbulnya hak sewa bagi penyewa sesuai masa kontrak sewa. Pendapatan usaha galangan kapal dan pelayanan rumah sakit diakui pada saat jasa telah selesai diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

s. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa.
2. *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada *lessee* (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

every reporting date. Future tax benefits, such as the balance of unused tax losses (if any) are also recognized to the extent that the realization of the tax benefits is possible.

Deferred tax is measured using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statement of profit or loss and other comprehensive income, except for deferred tax that is charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statement of financial position, except deferred tax assets and liabilities for different entities, on the basis of compensation in accordance with the presentation of current tax assets and liabilities.

Amendments to tax obligations are recorded when a Tax Assessment Letter (SKP) is received or, if the Company filed an objection, when the decision on the objection has been determined.

v. Transactions and Balances in Foreign Currencies

The Company's consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the Company's functional currency. Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on the Bank Indonesia middle rate prevailing on that date. Foreign exchange gains and losses arising from foreign currency transactions and the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies into Rupiah, are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year.

The rates used as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017
American Dollar (USD)	14.500	13.554

w. Employee Benefits

The company has a pension plan in accordance with labor regulations and Company policies. This program is generally funded through payments to pension fund managers as determined in periodic actuarial calculations. A defined benefit pension plan is a pension plan that determines the amount of pension benefits to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation. A defined contribution pension plan is a pension plan where the Company will pay a fixed contribution to a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions if the pension fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits relating to services provided by employees in the current and previous periods.

The obligation of the defined benefit pension plan recognized in the statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position date less the fair value of the plan assets, which is adjusted for unrecognized actuarial gains and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected-unit-credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rate of high-quality corporate bonds in the same currency as the currency of the compensation to be paid and the maturity time more or less the same as the obligation in question.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

v. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Current service costs from the defined benefit pension plan are recognized in the employee benefit expense in the income statement which reflects the increase in defined benefit obligations resulting from employee services in the current year.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they occur.

The company has a defined benefit pension plan and a defined contribution for qualified employees. Contributions are funded and paid for by the Company and employees. In addition, the Company also provides employee benefits to eligible employees in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor.

x. Comprehensive Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, concerning earnings per share, earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent entity by the number of weighted average shares outstanding during the year. The weighted average number of shares is 1.700.000 shares for 2018 and 2017 respectively.

y. Segment Information's

Segment information is prepared in accordance with the accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements. An operating segment is a component of an entity:

- a) Those involved in business activities to obtain income and incur expenses (including income and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- b) Its operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance; and
- c) Available financial information that can be separated.

Information that is reported to the chief operating decision maker for the purpose of allocating resources and evaluating its performance is more focused on the category of each service.

z. Business Partner Cooperation

Revenues from joint venture contracts that cover and meet the criteria for development or capacity building concession agreements, in the form of financial assets or intangible assets, are measured at the fair value of the benefits received or will be received.

Contract income and expenses are recognized based on the stage of completion of contract activities at the end date of the reporting period (percentage completion method).

Estimated losses arising from the amount of contract costs exceeding the total contract revenue are recognized as expenses. The amount of the loss determined without regard to work has been or has not been carried out, the stage of completion of contract activity and the estimated amount of profit to be obtained from other contracts that are not treated as a single construction project.

If the outcome of a transaction related to the sale of services can be estimated reliably, then the revenue associated with the transaction is recognized by reference to the level of completion of the transaction at the end of the reporting period.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.500	13.554

w. Imbalan Kerja

Grup memiliki program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Grup. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada periode kini dan sebelumnya.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi Grup berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi didanai dan dibayar oleh Grup dan karyawan. Selain itu, Grup juga memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

x. Laba Komprehensif Per Saham

Sesuai PSAK No. 56, tentang laba per saham, laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

aa. Government Assistance Not Yet Defined Status (BPYBDS)**Fixed Assets**

Property, plant and equipment acquired from Government donations are recognized and measured at cost and presented in the statement of financial position as non-current assets. Cost includes the fair value of assets and costs that are directly attributable so that the relevant fixed assets are in a condition ready for use in accordance with the wishes and intentions of management. Fixed assets obtained from Government donations are recognized based on evidence of handover.

If the fixed assets obtained from Government donations cannot be measured at fair value, the acquisition costs are measured in accordance with similar market transaction values.

State Capital Participation

The State Capital Participation (PMN) obtained from Government donations is recorded separately from the Company's share capital and is recognized at the fair value of cash and/or financial assets and/or non-financial assets received.

PMN in the form of assets obtained from Government donations is recognized based on objective evidence that the Company has fulfilled the conditions and conditions of the donation and that donations will be obtained.

PMN in the form of assets and supported by the minutes of handover are recognized as part of the equity as Government assistance that has not been determined until the Government Regulation on PMN has been issued.

3. USE OF MANAGEMENT ESTIMATION, CONSIDERATIONS, AND ASSUMPTIONS

In applying the Company's accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, management must make estimates, judgments, and assumptions on the carrying values of assets and liabilities that are not available by other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

In the process of applying accounting principles, there are no critical considerations that have a significant effect on the amounts recognized in the financial statements, other than those described below.

Information about the main assumptions made about the future and the main sources of other estimated uncertainties at the end of the reporting period, which have significant risks that result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the following reporting period are explained below.

Management believes that the following disclosures include an overview of estimates, considerations and significant assumptions made by management, which affect the reported amounts and disclosures in the financial statements.

1) Income Tax

Significant consideration is needed in determining the provision of income tax for the consolidated financial statements. Calculation of final income tax will be made for the consolidated financial statements. The tax calculation for the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018, is assumed by assuming a fiscal correction consistent with the fiscal correction of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

beredar selama tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham masing-masing sebesar 1.700.000 saham untuk tahun 2018 dan tahun 2017.

y. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing jasa.

z. Kerjasama Mitra Usaha

Pendapatan kontrak kerjasama operasi yang mencakup dan memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan, berupa aset keuangan atau aset tak berwujud, diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima.

Pendapatan dan beban kontrak diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Taksiran rugi yang timbul karena jumlah biaya kontrak melebihi jumlah pendapatan kontrak diakui sebagai beban. Jumlah kerugian tersebut ditentukan tanpa memperhatikan pekerjaan telah atau belum dilaksanakan, tahap penyelesaian aktivitas kontrak dan jumlah taksiran laba yang akan diperoleh dari kontrak lain yang tidak diperlakukan sebagai satu proyek tunggal konstruksi.

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

aa. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya dan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Biaya perolehan meliputi nilai wajar aset dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tetap bersangkutan dalam kondisi siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti serah terima.

Apabila aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah tidak dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan nilai transaksi pasar yang serupa.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

2) Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available so that the tax loss can be used. Significant estimates by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the time of use and the level of taxable income and future tax planning strategies.

3) Assessment of Allowance for Decreasing Market Value and Inventory obsolescence

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories are estimated based on available facts and situations, including but not limited to, physical conditions of inventories owned, market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs incurred for sale. Provisions are re-evaluated and adjusted if there is additional information that affects the estimated amount.

4) Determination of Depreciation of Fixed Assets and the Benefits of Fixed Assets

The acquisition cost of fixed assets is depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets of 2 years to 50 years. This is the age generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological development can affect the economic useful life and the residual value of assets. The Company's management does not change the estimated useful lives of fixed assets based on the latest evaluation.

5) Assessment of Decreasing the Value of Certain Non-Financial Assets

PSAK No. 48 requires that an assessment of impairment be carried out on certain non-financial assets if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value cannot be recovered.

Factors that are considered important by the Company which can trigger a review of impairment are as follows:

- a) Performance that is less significant relative to the expected historical or expected operational results of future projects;
- b) Significant changes in the way the assets are acquired or the overall business strategy; and
- c) Significant negative industry or economic trends.

Losses due to impairment are recognized if the carrying amount of non-financial assets exceeds the recoverable amount. Determining the recoverable amount of these assets requires an estimate of the expected cash flows that can be generated from the continued use and final disposition of the asset.

6) Determination of Pension Costs and Employee Benefits Liabilities

The costs of the defined benefit pension plan and the present value of the pension obligation are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes determining various assumptions which include, among others, discount rates, rates of compensation increases and mortality rates. Any changes to these assumptions will have an impact on the carrying value of pension obligations. Because of the complexity of the valuations made, the related assumptions and their long-term nature, the defined benefit obligations are very sensitive to changes in assumptions. Although the Company believes that the Company's assumptions are adequate and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in assumptions can materially affect pension costs and obligations and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh dari donasi Pemerintah dicatat secara terpisah dari modal saham Perusahaan dan diakui sebesar nilai wajar kas dan/atau aset keuangan dan/atau aset non keuangan yang diterima.

PMN berupa aset yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti obyektif bahwa Grup telah memenuhi kondisi dan persyaratan donasi tersebut dan donasi tersebut akan diperoleh.

PMN berupa aset dan didukung oleh berita acara serah terima diakui bagian dari ekuitas sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan Peraturan Pemerintah atas PMN tersebut sudah terbit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, tidak terdapat pertimbangan kritis yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari yang sudah dijelaskan di bawah ini.

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

1) Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan untuk laporan keuangan konsolidasian. Perhitungan pajak penghasilan akhir akan dilakukan untuk laporan keuangan konsolidasian. Perhitungan pajak untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan dengan mengasumsikan koreksi fiskal konsisten dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2) Pajak Tanggahan

Aset pajak tanggahan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tanggahan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

3) Penilaian Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cash	1.854.745.269	1.548.608.140
Bank		
Related parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	63.771.395.283	30.795.828.872
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	61.775.948.091	93.416.885.469
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	21.732.915.253	8.834.237.419
PT Bank Syariah Mandiri	13.252.568	5.001.030.355
<u>US Dollar</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	3.187.210.915	4.108.198.264
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	756.298.975	487.054.758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	332.845.035	84.969.715
Total Related Parties	<u>151.569.866.120</u>	<u>142.728.204.852</u>
Third parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	1.819.520.459	1.795.876.104
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk.	994.463.989	
PT Bank Bukopin Tbk.	572.883.510	427.774.601
PT Bank Permata Syariah	7.780.049	7.510.035
Total Third Parties	<u>3.394.648.007</u>	<u>2.231.160.740</u>
Total bank	<u>154.964.514.127</u>	<u>144.959.365.592</u>
Deposits		
Related parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	506.548.871.210	755.805.809.398
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	494.233.953.980	402.773.853.968
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	362.525.303.939	312.286.101.976
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	56.463.175.106	65.730.534.995
PT Bank Syariah Mandiri	5.529.033.763	-
PT Bank Tabungan Negara Syariah	-	21.955.170.526
<u>US Dollar</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	246.980.747.500	87.187.100.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	67.000.000.000
Total Related Parties	<u>1.672.281.085.498</u>	<u>1.712.738.570.863</u>
Third parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Bukopin Tbk	82.500.000.000	2.500.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	63.000.000.000	
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24.587.465.140	10.664.616.030
Total Third Parties	<u>170.087.465.140</u>	<u>13.164.616.030</u>
Total Deposits	<u>1.842.368.550.638</u>	<u>1.725.903.186.893</u>
Total Cash and Cash Equivalent	<u>1.999.187.810.035</u>	<u>1.872.411.160.625</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

- 4) Penentuan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Masa Manfaat Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 50 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset. Manajemen Grup tidak melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan evaluasi terkini.
- 5) Penilaian Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan Tertentu
PSAK No. 48 mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset non-keuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.

Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Grup yang dapat memicu penelaahan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kinerja yang kurang signifikan relatif terhadap *expected historical* atau hasil dari operasional yang diharapkan dari proyek masa depan;
- b) perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri negatif yang signifikan atau tren ekonomi.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset non-keuangan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

- 6) Penentuan Biaya Pensiun dan Liabilitas Imbalan Kerja
Beban dari program pensiun imbalan pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris mencakup penentuan asumsi yang bervariasi yang antara lain terdiri dari, tingkat diskonto, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Setiap perubahan dari asumsi tersebut akan berdampak terhadap nilai tercatat dari kewajiban pensiun. Oleh karena kompleksitas dari penilaian yang dilakukan, asumsi terkait dan sifatnya yang jangka panjang, kewajiban imbalan pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi Grup sudah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Interest rates obtained from the placement of cash in banks, and time deposits at related party banks are proportional to the interest rate obtained from third party banks. The average deposit interest rate for 2018 ranges from 0.50% - 8.00% p.a

5. ACCOUNT RECEIVABLE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Related parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Pertamina Trans Kontinental	7.090.337.013	10.746.642.668
PT Pertamina (Persero)	4.832.742.368	1.217.221.649
PT Perta Arun Gas	3.024.053.053	5.268.527.238
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	-	1.160.894.337
PT Sarana Agro Nusantara	-	5.433.414.192
PT Semen Padang	-	1.154.273.207
PT Arun NGL	-	221.939.700
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	5.614.012.978
PT Kereta Api Logistik	-	1.563.614.000
PT Prima Multi Terminal	-	9.637.301.250
Others of less than Rp1.000.000.000	3.929.750.872	3.909.895.693
Total Rupiah	<u>18.876.883.306</u>	<u>45.927.736.912</u>
<u>US Dollar</u>		
Others if less than Rp1.000.000.000	986.039.585	1.182.044.310
Total US Dollar	<u>986.039.585</u>	<u>1.182.044.310</u>
Total Related Parties	<u>19.862.922.891</u>	<u>47.109.781.222</u>
Third parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Salam Pacific Indonesia Line	4.378.068.119	2.933.249.844
PT Cemindo Gemilang	3.677.021.805	7.103.945.478
PT Bahari Sandi Pratama	3.323.402.504	2.479.208.675
PT Intibenua Perkasatama	3.166.002.387	1.095.946.651
PT Tirta Nusapersada	3.151.836.709	1.447.483.080
PT Rizkia Armada Nusantara	3.101.794.948	4.389.576.217
PT Oiltanking Karimun	3.010.005.041	6.434.683.712
PT Nagamas Palmoil Lestari	2.522.810.067	2.014.884.194
PT Shohibul Barokah	2.490.978.747	2.490.978.747
PT Pelayaran Batam Samudera	2.453.431.894	2.467.722.004
PT Tri Eka Line	1.961.001.318	2.162.961.436
PT Citra Pase Indah	1.914.584.253	2.369.174.469
PT Caraka Tirta Perkasa	1.670.957.279	1.431.812.866
PT Gresik Cipta Sejahtera	1.540.461.685	1.194.004.664
PT Snepac Shipping	1.531.401.926	3.481.519.828
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	1.494.728.412	2.733.680.968
PT Maxsteer Drynusa Perdana	1.345.132.612	2.657.572.221
PT Usda Seroja Jaya	1.338.391.155	2.679.284.415
PT Guntur Line	1.318.398.665	1.513.593.735
PT Handa Terminal	1.256.589.336	4.390.036.497
PT Ivo Mas Tunggal	1.220.945.079	1.546.838.970
PT Meratus Line	1.195.926.851	2.500.238.728

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kas	1.854.745.269	1.548.608.140
Bank		
Pihak Berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	63.771.395.283	30.795.828.872
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	61.775.948.091	93.416.885.469
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	21.732.915.253	8.834.237.419
PT Bank Syariah Mandiri	13.252.568	5.001.030.355
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	3.187.210.915	4.108.198.264
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	756.298.975	487.054.758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	332.845.035	84.969.715
Jumlah Pihak Berelasi	<u>151.569.866.120</u>	<u>142.728.204.852</u>
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	1.819.520.459	1.795.876.104
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk.	994.463.989	
PT Bank Bukopin Tbk.	572.883.510	427.774.601
PT Bank Permata Syariah	7.780.049	7.510.035
Jumlah Pihak Ketiga	<u>3.394.648.007</u>	<u>2.231.160.740</u>
Jumlah Bank	<u>154.964.514.127</u>	<u>144.959.365.592</u>
Deposito		
Pihak Berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	506.548.871.210	755.805.809.398
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	494.233.953.980	402.773.853.968
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	362.525.303.939	312.286.101.976
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	56.463.175.106	65.730.534.995
PT Bank Syariah Mandiri	5.529.033.763	-
PT Bank Tabungan Negara Syariah	-	21.955.170.526
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	246.980.747.500	87.187.100.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	67.000.000.000
Jumlah Pihak Berelasi	<u>1.672.281.085.498</u>	<u>1.712.738.570.863</u>
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Bukopin Tbk	82.500.000.000	2.500.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	63.000.000.000	
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24.587.465.140	10.664.616.030
Jumlah Pihak Ketiga	<u>170.087.465.140</u>	<u>13.164.616.030</u>
Jumlah Deposito	<u>1.842.368.550.638</u>	<u>1.725.903.186.893</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>1.999.187.810.035</u>	<u>1.872.411.160.625</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018	2017
PT Kreasi Jaya Adhikarya	1.126.811.250	2.296.374.965
PT Cuaca Marina Servicatama	1.027.406.842	2.874.300.229
PT Kanaka Lines	1.011.425.589	1.041.580.989
PT Armada Maritim Nusantara	-	1.569.677.431
PT Musim Mas	-	3.330.483.652
PT Sandico Ocean Line	-	1.015.307.120
PT Sufie Bahari Lines	-	1.068.915.168
PT Asia Sinergi Lintas Nusa	-	2.288.127.208
PT Godwin Austen Indonesia	-	7.010.525.712
PT Pancaran Jatinusa	-	2.143.871.054
PT Lafarge Cement Indonesia	-	2.225.222.109
PT Nur Sembilan Logistical	-	1.072.757.475
PT Bintang Samudera Utama	-	4.615.230.171
PT Cahaya Lautan Niaga	-	1.827.450.497
PT Ekadura Indonesia	-	3.160.518.768
PT Tanjung Putra Maritim	-	1.963.208.757
PT Garuda Mahakam Pratama	-	1.168.404.348
PT Holcim Indonesia Tbk	-	1.218.707.291
PT Medan Sugar Industry	-	1.335.736.831
PT Citra Abadi Marine Indonesia	-	2.241.466.001
PT Barakomindo Shipping	-	1.099.008.357
PT The Nasional Global	-	1.726.130.796
PT Bhandha Ghara Reksa	-	4.133.152.162
CV Khoda	-	4.000.027.500
PT Pelayaran Cahaya Papua	-	1.339.208.690
Others of less than Rp1.000.000.000	84.303.554.521	56.740.093.693
Total Rupiah	136.533.068.994	176.023.884.373
US Dollar		
PT Citra Abadi Marine Indonesia	2.411.385.525	2.228.679.001
PT Tri Eka Lines	1.876.792.710	1.734.591.362
PT Cuaca Marina Service Utama	1.798.012.760	1.661.780.433
PT The Nasional Global	1.786.405.945	1.719.943.006
PT Sandico Ocean Line	1.606.362.490	1.484.651.174
Others of less than Rp1.000.000.000	2.918.345.368	3.209.297.251
Total US Dollar	12.397.304.798	12.038.942.227
Subtotal Third Parties	148.930.373.792	188.062.826.600
Less: provision of impairment	(66.549.227.057)	(34.593.747.427)
Total Third Parties	82.381.146.735	153.469.079.173
Total	102.244.069.626	200.578.860.395

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Tingkat suku bunga yang diperoleh dari penempatan kas pada bank, dan deposito berjangka pada bank pihak berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga. Tingkat suku bunga deposito rata-rata tahun 2018 berkisar 0,50% - 1,00% per tahun untuk USD, dan 5,00% - 8,00% per tahun untuk Rupiah.

5. PIUTANG USAHA

	2018	2017
Pihak Berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Pertamina Trans Kontinental	7.090.337.013	10.746.642.668
PT Pertamina (Persero)	4.832.742.368	1.217.221.649
PT Perta Arun Gas	3.024.053.053	5.268.527.238
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	-	1.160.894.337
PT Sarana Agro Nusantara	-	5.433.414.192
PT Semen Padang	-	1.154.273.207
PT Arun NGL	-	221.939.700
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	5.614.012.978
PT Kereta Api Logistik	-	1.563.614.000
PT Prima Multi Terminal	-	9.637.301.250
Lainnya di bawah Rp1.000.000.000	3.929.750.872	3.909.895.693
Jumlah Rupiah	<u>18.876.883.306</u>	<u>45.927.736.912</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Lainnya di bawah Rp1.000.000.000	986.039.585	1.182.044.310
Jumlah Dolar Amerika Serikat	<u>986.039.585</u>	<u>1.182.044.310</u>
Jumlah Pihak Berelasi	<u>19.862.922.891</u>	<u>47.109.781.222</u>
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Salam Pacific Indonesia Line	4.378.068.119	2.933.249.844
PT Cemindo Gemilang	3.677.021.805	7.103.945.478
PT Bahari Sandi Pratama	3.323.402.504	2.479.208.675
PT Intibenua Perkasatama	3.166.002.387	1.095.946.651
PT Tirta Nusapersada	3.151.836.709	1.447.483.080
PT Rizkia Armada Nusantara	3.101.794.948	4.389.576.217
PT Oiltanking Karimun	3.010.005.041	6.434.683.712
PT Nagamas Palmoil Lestari	2.522.810.067	2.014.884.194
PT Shohibul Barokah	2.490.978.747	2.490.978.747
PT Pelayaran Batam Samudera	2.453.431.894	2.467.722.004
PT Tri Eka Line	1.961.001.318	2.162.961.436
PT Citra Pase Indah	1.914.584.253	2.369.174.469
PT Caraka Tirta Perkasa	1.670.957.279	1.431.812.866
PT Gresik Cipta Sejahtera	1.540.461.685	1.194.004.664
PT Snepac Shipping	1.531.401.926	3.481.519.828
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	1.494.728.412	2.733.680.968
PT Maxsteer Drynusa Perdana	1.345.132.612	2.657.572.221
PT Usda Seroja Jaya	1.338.391.155	2.679.284.415
PT Guntur Line	1.318.398.665	1.513.593.735

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Details of account receivables by age as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Not yet due	44.753.913.732	111.702.690.808
1 - 30 days	44.174.696.165	40.653.408.321
31 - 60 days	11.200.747.439	51.283.927.249
61 - 90 days	15.479.751.950	8.829.055.139
91 - 180 days	4.044.511.220	5.795.200.819
181 - 365 days	4.840.485.818	3.356.006.615
> 365 days	44.299.190.359	13.552.318.871
Total	168.793.296.683	235.172.607.822
Provision for impairment for receivables	(66.549.227.057)	(34.593.747.427)
Net total	<u>102.244.069.626</u>	<u>200.578.860.395</u>

Movements in impairment of receivables are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beginning Balances	(34.593.747.427)	(26.803.903.203)
Bad debt recovery	(34.219.001.810)	(7.789.844.224)
Recovery during the year	2.263.522.180	-
Ending Balances	<u>(66.549.227.057)</u>	<u>(34.593.747.427)</u>

Recovery of this current year represents accrued receivables that have been impaired, however after such collectable efforts are collectible.

Management believes that the allowances made for impairment losses on receivables are adequate to cover possible loss on uncollectible receivable.

6. INVENTORIES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Port facility tool parts	17.350.459.582	-
Fuel and lubricants	4.526.808.515	3.234.859.425
Lubricant supplies	1.478.448.024	-
Office tools	821.673.505	262.104.542
Medicines	420.234.752	273.826.906
Office stationery	201.864.743	-
Spare parts	191.127.235	19.197.127.550
Port facility installation parts	162.639.094	-
UGK	141.154.426	-
Equipment parts	93.872.878	-
Others	-	749.058.552
Total	<u>25.388.282.754</u>	<u>23.716.976.975</u>

As of December 31, 2018 and 2017, inventories are not insured, because management believes that the Company's inventories do not require insurance protection in accordance with existing inventory conditions. Management believes that no allowance for decline in inventory value is required.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Handa Terminal	1.256.589.336	4.390.036.497
PT Ivo Mas Tunggal	1.220.945.079	1.546.838.970
PT Meratus Line	1.195.926.851	2.500.238.728
PT Kreasi Jaya Adhikarya	1.126.811.250	2.296.374.965
PT Cuaca Marina Servicatama	1.027.406.842	2.874.300.229
PT Kanaka Lines	1.011.425.589	1.041.580.989
PT Armada Maritim Nusantara	-	1.569.677.431
PT Musim Mas	-	3.330.483.652
PT Sandico Ocean Line	-	1.015.307.120
PT Sufie Bahari Lines	-	1.068.915.168
PT Asia Sinergi Lintas Nusa	-	2.288.127.208
PT Godwin Austen Indonesia	-	7.010.525.712
PT Pancaran Jatinusa	-	2.143.871.054
PT Lafarge Cement Indonesia	-	2.225.222.109
PT Nur Sembilan Logistical	-	1.072.757.475
PT Bintang Samudera Utama	-	4.615.230.171
PT Cahaya Lautan Niaga	-	1.827.450.497
PT Ekadura Indonesia	-	3.160.518.768
PT Tanjung Putra Maritim	-	1.963.208.757
PT Garuda Mahakam Pratama	-	1.168.404.348
PT Holcim Indonesia Tbk	-	1.218.707.291
PT Medan Sugar Industry	-	1.335.736.831
PT Citra Abadi Marine Indonesia	-	2.241.466.001
PT Barakomindo Shipping	-	1.099.008.357
PT The Nasional Global	-	1.726.130.796
PT Bhandha Ghara Reksa	-	4.133.152.162
CV Khoda	-	4.000.027.500
PT Pelayaran Cahaya Papua	-	1.339.208.690
Lainnya di bawah Rp1.000.000.000	84.303.554.521	56.740.093.693
Jumlah Rupiah	<u>136.533.068.994</u>	<u>176.023.884.373</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Citra Abadi Marine Indonesia	2.411.385.525	2.228.679.001
PT Tri Eka Lines	1.876.792.710	1.734.591.362
PT Cuaca Marina Service Utama	1.798.012.760	1.661.780.433
PT The Nasional Global	1.786.405.945	1.719.943.006
PT Sandico Ocean Line	1.606.362.490	1.484.651.174
Lainnya di bawah Rp1.000.000.000	2.918.345.368	3.209.297.251
Jumlah Dolar Amerika Serikat	<u>12.397.304.798</u>	<u>12.038.942.227</u>
Sub Jumlah Pihak Ketiga	148.930.373.792	188.062.826.600
Dikurangi Penurunan Nilai Piutang	<u>(66.549.227.057)</u>	<u>(34.593.747.427)</u>
Jumlah Pihak Ketiga	<u>82.381.146.735</u>	<u>153.469.079.173</u>
Jumlah	<u>102.244.069.626</u>	<u>200.578.860.395</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

7. ADVANCES

Detail of advances as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Advances payment	14.538.229.477	13.533.211.925
Total	<u>14.538.229.477</u>	<u>13.533.211.925</u>

Advances are advances for fuel purchases, advances for carrying out operational work, and office operational needs.

8. PREPAID EXPENSES

Detail of advances as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Prepaid expenses	6.022.726.033	1.749.455.476
Total	<u>6.022.726.033</u>	<u>1.749.455.476</u>

9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

Detail of advances as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Other receivable third parties	153.441.037.046	32.056.294.787
Unearned revenues	45.963.612.300	66.367.493.703
Retired employee receivable	2.562.672.160	2.562.672.160
Employee receivable	129.352.108	60.545.622
Other receivable third parties provision	(1.068.282.480)	(1.068.282.480)
Retired employee receivable provision	(2.562.672.160)	(2.562.672.160)
Total	<u>198.465.718.974</u>	<u>97.416.051.632</u>

The Company recognizes that the trade receivables have not been factored based on the pre-invoice statement when the provision of services has been made, but the billing note has not been made to the customer concerned.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Name of Entity	%	2018		Equity in net gain/(loss)	Dividend	Ending Balance
		Beginning Balance	Addition/ (Deduction)			
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	34.873.231.950		(1.237.351.486)		33.635.880.464
PT Prima Tangki Indonesia	20	17.631.280.585		(1.405.424.186)		16.225.856.399
PT Patriot Nusantara Aceh		500.000.000		-		500.000.000
PT Prima Pengembangan Kawasan	10	86.633.040.159	134.522.422	(2.434.562.582)		84.333.000.000
Jumlah		<u>139.637.552.694</u>	<u>134.522.422</u>	<u>(5.077.338.254)</u>	-	<u>134.694.736.863</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lancar	44.753.913.732	111.702.690.808
1 hari - 30 hari	44.174.696.165	40.653.408.321
31 hari - 60 hari	11.200.747.439	51.283.927.249
61 hari - 90 hari	15.479.751.950	8.829.055.139
91 hari - 180 hari	4.044.511.220	5.795.200.819
181 hari - 365 hari	4.840.485.818	3.356.006.615
> 365 hari	44.299.190.359	13.552.318.871
Jumlah	168.793.296.683	235.172.607.822
Dikurangi Penurunan Nilai Piutang	(66.549.227.057)	(34.593.747.427)
Jumlah Bersih	<u>102.244.069.626</u>	<u>200.578.860.395</u>

Perubahan pencadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo awal	(34.593.747.427)	(26.803.903.203)
Pencadangan selama tahun berjalan	(34.219.001.810)	(7.789.844.224)
Pemulihan selama tahun berjalan	2.263.522.180	-
Saldo akhir	<u>(66.549.227.057)</u>	<u>(34.593.747.427)</u>

Piutang usaha merupakan piutang tanpa bunga, karena jatuh temponya relatif pendek dan jumlah tercatat piutang usaha sama dengan nilai wajarnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

6. PERSEDIAAN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Suku cadang alat faspel	17.350.459.582	-
Bahan bakar minyak	4.526.808.515	3.234.859.425
Persediaan pelumas	1.478.448.024	-
Perlengkapan	821.673.505	262.104.542
Obat dan alat medis/rumah sakit pelabuhan	420.234.752	273.826.906
Alat tulis kantor	201.864.743	-
Suku cadang kapal	191.127.235	19.197.127.550
Suku cadang instalasi faspel	162.639.094	-
UGK	141.154.426	-
Suku cadang peralatan	93.872.878	-
Lain-lain	-	749.058.552
Jumlah	<u>25.388.282.754</u>	<u>23.716.976.975</u>

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa persediaan Grup tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Name of Entity	%	2017				Ending Balance
		Beginning Balance	Addition/ (Deduction)	Equity in net gain/(loss)	Dividend	
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	35.852.193.160	-	(978.961.210)	-	34.873.231.950
PT Prima Tangki Indonesia	20	8.573.839.624	9.000.000.000	57.440.961	-	17.631.280.585
Jumlah		44.426.032.784	9.000.000.000	(921.520.249)	-	52.504.512.535

PT Terminal Petikemas Indonesia

In April 10, 2013, the Company signed an agreement with PT Pelabuhan Indonesia II, III and IV (Persero) to establish an associate under the name PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) with an investment of Rp37.500.000.000 or 25% owned together with PT Pelabuhan Indonesia II, III and IV (Persero).

Based on the deed of establishment, each board of directors represents each shareholder. The Company is represented on the board of directors through the appointment of a finance director. The deed of establishment also accommodates Company participation in the decision making process and policy setting. TPI's main business activities are business activities in the Port. Bookkeeping of TPI began on January 1, 2014.

As of December 31, 2018, the Company has an investment in shares of TPI amounting to Rp33.635.880.464 and recognized the loss in value of the investment in the amount of Rp1.237.351.486 in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018.

Summary of TPI financial information as follows:

	2018	2017
Total assets	131.715.919.780	135.742.777.503
Total liabilities	1.550.674.274	628.126.054
Equity	130.165.245.506	135.114.651.449
Net profit/(loss)	(4.949.405.943)	(3.915.844.838)

PT Prima Tangki Indonesia (Subsidiary of PT Prima Indonesia Logistik)

Based on deed No. 65 made before Ashoya Ratam, SH, M.kn, Notary in Jakarta on April 27, 2016 concerning Declaration of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders, PT Prima Indonesia Logistik (PIL) has included 18.000 shares in associates with the name of PT Prima Tangki Indonesia (PTI) with a total nominal value of Rp9.000.000.000 or 20% of the total shares of PTI.

The purpose and objective and business activities of PTI are to carry out business activities in the form of providing port facilities in the form of tank storage.

As of December 31, 2018, PIL has an investment in PTI amounting to Rp16.225.856.399 and recognized the loss in value of the investment amounting to Rp1.405.424.186 in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****7. UANG MUKA**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Uang Muka	14.538.229.477	13.533.211.925
Jumlah	<u>14.538.229.477</u>	<u>13.533.211.925</u>

Uang muka merupakan uang muka untuk pembelian bahan bakar, uang muka pelaksanaan pekerjaan operasional, dan keperluan operasional kantor.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Biaya dibayar di muka	6.022.726.033	1.749.455.476
Jumlah	<u>6.022.726.033</u>	<u>1.749.455.476</u>

9. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi	153.441.037.046	32.056.294.787
Piutang usaha belum difakturkan	45.963.612.300	66.367.493.703
Piutang pegawai non aktif	2.562.672.160	2.562.672.160
Piutang pegawai aktif	129.352.108	60.545.622
Provisi penurunan nilai piutang lain pihak ketiga	(1.068.282.480)	(1.068.282.480)
Provisi penurunan nilai piutang lain pegawai non aktif	(2.562.672.160)	(2.562.672.160)
Jumlah	<u>198.465.718.974</u>	<u>97.416.051.632</u>

Grup mengakui piutang usaha belum difakturkan berdasarkan pra nota tagihan ketika pemberian jasa telah dilakukan namun belum dibuatkan nota penagihan kepada pelanggan yang bersangkutan.

10. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

Nama Entitas	%	2018		Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas	Pembagian Deviden	Nilai Tercatat Akhir Tahun
		Nilai Tercatat Awal Tahun	Penambahan			
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	34.873.231.950		(1.237.351.486)		33.635.880.464
PT Prima Tangki Indonesia	20	17.631.280.585		(1.405.424.186)		16.225.856.399
PT Patriot Nusantara Aceh	-	500.000.000		-		500.000.000
PT Prima Pengembangan Kawasan	10	86.633.040.159	134.522.422	(2.434.562.582)		84.333.000.000
Jumlah		<u>139.637.552.694</u>	<u>134.522.422</u>	<u>(5.077.338.254)</u>	-	<u>134.694.736.863</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Summary of PTI financial information as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total assets	205.549.944.541	94.085.755.756
Total liabilities	124.420.662.544	5.929.352.829
Equity	81.129.281.997	88.156.402.927
Net profit/(loss)	(7.027.120.930)	1.391.752.195

PT Patriot Nusantara Aceh (Subsidiary of PT Prima Indonesia Logistik)

The participation of share capital to PT Patriot Nusantara Aceh as of 31 December 2018 amounting to Rp500.000.000 represents the initial deposit of capital based on letter No. KU.60 / 1/4 / PI-18-TU dated 12 December 2018 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to PT Prima Indonesia Logistics, and for the deposit information on the percentage of capital ownership and financial statements is not yet available.

PT Patriot Nusantara Aceh has not yet operated.

PT Prima Pengembangan Kawasan (Subsidiary of PT Prima Multi Terminal)

PT Prima Pembangunan Kawasan was established on September 8, 2015 with equity participation as of December 31, 2018 amounting to Rp84.333.000.000 with ownership rights of 10%, engaged in the development, rental and processing services of industrial estates, and still in the development stage.

Summary of PPK financial information as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total assets	873.566.658.718	853.232.788.742
Total liabilities	4.832.342.755	2.070.954.111
Equity	868.664.950.124	651.161.834.631
Net profit/(loss)	(15.569.702.608)	(11.656.841.415)

11. INVESTMENT IN JOINT VENTURES

Based on the shareholders' decree on PT Prima Terminal Petikemas and PT Prima Pengembangan Kawasan share ownership, it is stated that PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has significant share ownership and control in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), so the two companies have been consolidated since 2018.

Name of Entity	%	2017				Ending Balance
		Beginning Balance	Addition/ (Deduction)	Equity in net gain/(loss)	Dividend	
Metode Ekuitas						
PT Prima Terminal Petikemas	70	337.632.537.367	100.000.000.000	(4.125.598.699)	-	433.506.938.668
PT Prima Multi Terminal	55	563.126.673.061	165.000.000.000	2.354.587.105	-	730.481.260.166
Jumlah		<u>900.759.210.428</u>	<u>265.000.000.000</u>	<u>(1.771.011.594)</u>	-	<u>1.163.988.198.834</u>

12. INVESTMENT PROPERTY

	2018			Ending Balance
	Beginning Balance	Addition	Deduction	
<u>Acquisition Cost</u>				
Land	186.033.428.621	226.421.032.998	-	412.454.461.619
Building and facilities	8.646.308.748	172.435.133	-	8.818.743.881
Total	<u>194.679.737.369</u>	<u>226.593.468.131</u>	-	<u>421.273.205.500</u>
<u>Accumulated depreciation</u>				
Building and facilities	4.821.381.672	181.749.005	-	5.003.130.677
Toral	<u>4.821.381.672</u>	<u>181.749.005</u>	-	<u>5.003.130.677</u>
Book Value	<u>189.858.355.697</u>			<u>416.270.074.823</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nama Entitas	%	2017		Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas	Pembagian Deviden	Nilai Tercatat Akhir Tahun
		Nilai Tercatat Awal Tahun	Penambahan			
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	35.852.193.160	-	(978.961.210)	-	34.873.231.950
PT Prima Tangki Indonesia	20	8.573.839.624	9.000.000.000	57.440.961	-	17.631.280.585
Jumlah		44.426.032.784	9.000.000.000	(921.520.249)	-	52.504.512.535

PT Terminal Petikemas Indonesia

Pada bulan 10 April 2013, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II, III dan IV (Persero) untuk mendirikan entitas asosiasi dengan nama PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) dengan penyertaan saham sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25% yang dimiliki bersama dengan PT Pelindo II, III dan IV.

Berdasarkan akta pendirian, masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Kegiatan usaha utama TPI adalah kegiatan pengusahaan di Pelabuhan. Pembukuan TPI dimulai pada 1 Januari 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada TPI sebesar Rp33.635.880.464 dan mengakui kerugian nilai penyertaan saham sebesar Rp1.237.351.486 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

Rangkuman informasi keuangan TPI sebagai berikut:

	2018	2017
Total aset	131.715.919.780	135.742.777.503
Total liabilitas	1.550.674.274	628.126.054
Ekuitas	130.165.245.506	135.114.651.449
Laba (rugi) bersih	(4.949.405.943)	(3.915.844.838)

PT Prima Tangki Indonesia (Anak Usaha PT Prima Indonesia Logistik)

Berdasarkan akta Nomor 65 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 27 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT Prima Indonesia Logistik (PIL) telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham pada entitas asosiasi dengan nama PT Prima Tangki Indonesia (PTI) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000 atau sebesar 20% dari jumlah saham PTI.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTI adalah melaksanakan kegiatan usaha berupa penyediaan fasilitas pelabuhan berupa tangki timbun (*tank storage*).

Sampai dengan 31 Desember 2018, PIL memiliki penyertaan saham pada PTI sebesar Rp16.225.856.399 dan mengakui kerugian nilai penyertaan saham sebesar Rp1.405.424.186 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2017			
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Ending Balance
<u>Acquisition Cost</u>				
Land	4.843.165.052	181.190.263.569	-	186.033.428.621
Building and facilities	8.646.308.748	-	-	8.646.308.748
Total	<u>13.489.473.800</u>	<u>181.190.263.569</u>	<u>-</u>	<u>194.679.737.369</u>
<u>Accumulated depreciation</u>				
Building and facilities	4.639.632.667	181.749.005	-	4.821.381.672
Total	<u>4.639.632.667</u>	<u>181.749.005</u>	<u>-</u>	<u>4.821.381.672</u>
Book Value	<u>8.849.841.133</u>			<u>189.858.355.697</u>

In 2018 land investment property increased by Rp226.421.032.998 from additional assets in PPK subsidiaries. Investment property is insured with PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (see Note 13.a).

13. FIXED ASSETS

	2018				
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Reclassification	Ending Balance
<u>Acquisition cost</u>					
Lands	114.497.262.561	-	-	-	114.497.262.561
Building and facilities	1.940.143.848.337	78.426.911.388	-	-	2.018.570.759.725
Ships	604.847.079.255	358.381.000	-	-	605.205.460.255
Equipment port facilities	1.426.207.409.361	35.023.295.718	-	(36.746.885.362)	1.424.483.819.717
Installation port facilities	303.146.798.902	3.699.772.727	-	-	306.846.571.629
Road and building	423.958.607.597	5.452.903.151	-	(1.793.949.146)	427.617.561.602
Equipment	72.543.970.482	3.526.178.993	-	-	76.070.149.475
Vehicles	12.570.327.001	432.533.273	-	-	13.002.860.274
Emplacement	58.300.313.767	-	-	-	58.300.313.767
Sub total	<u>4.956.215.617.263</u>	<u>126.919.976.250</u>	<u>-</u>	<u>(38.540.834.508)</u>	<u>5.044.594.759.006</u>
Assets under construction	<u>1.283.879.204.868</u>	<u>5.914.869.345.382</u>	<u>(1.022.902.040)</u>	<u>(126.919.976.250)</u>	<u>7.070.805.671.960</u>
Acquisition cost	<u>6.240.094.822.131</u>	<u>6.041.789.321.632</u>	<u>(1.022.902.040)</u>	<u>(165.460.810.758)</u>	<u>12.115.400.430.966</u>
<u>Accumulation depreciations</u>					
Building and facilities	404.072.107.354	63.208.997.368	-	(6.333.333)	467.274.771.389
Ships	250.706.257.231	27.042.987.303	-	-	277.749.244.534
Equipment port facilities	617.486.621.091	98.433.989.669	-	(17.433.825.944)	698.486.784.816
Installation port facilities	90.355.574.250	12.667.245.702	-	30.457.557	103.053.277.509
Road and building	157.455.020.153	17.884.193.886	-	9.476.109	175.348.690.148
Peralatan	62.427.262.677	3.251.325.525	-	155.204.766	65.833.792.968
Equipment	9.531.398.816	207.229.207	-	-	9.738.628.023
Emplacement	10.134.049.651	2.336.771.430	-	-	12.470.821.081
	<u>1.602.168.291.223</u>	<u>225.032.740.090</u>	<u>-</u>	<u>(17.245.020.845)</u>	<u>1.809.956.010.468</u>
Book value	<u>4.637.926.530.908</u>				<u>10.305.444.420.498</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Rangkuman informasi keuangan PTI sebagai berikut:

	2018	2017
Total aset	205.549.944.541	94.085.755.756
Total liabilitas	124.420.662.544	5.929.352.829
Ekuitas	81.129.281.997	88.156.402.927
Laba (rugi) bersih	(7.027.120.930)	1.391.752.195

PT Patriot Nusantara Aceh (Anak Usaha PT Prima Indonesia Logistik)

Penyertaan modal saham kepada PT Patriot Nusantara Aceh per 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000 merupakan setoran awal modal berdasarkan surat no.KU.60/1/4/PI-18-TU tanggal 12 Desember 2018 PT Pelindo I (Persero) kepada PT Prima Indonesia Logistik, dan atas setoran tersebut informasi prosentase kepemilikan modal dan laporan keuangan belum tersedia.

PT Patriot Nusantara Aceh belum beroperasi.

PT Prima Pengembangan Kawasan (Anak Usaha PT Prima Multi Terminal)

PT Prima Pengembangan Kawasan didirikan pada tanggal 8 September 2015 dengan penyertaan saham hingga tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp84.333.000.000 dengan hak kepemilikan sebesar 10%, bergerak di bidang jasa pembangunan, penyewaan dan pengolahan kawasan industri, serta masih dalam tahap pengembangan.

	2018	2017
Total aset	873.566.658.718	853.232.788.742
Total liabilitas	4.832.342.755	2.070.954.111
Ekuitas	868.664.950.124	651.161.834.631
Laba (rugi) bersih	(15.569.702.608)	(11.656.841.415)

11. PENYERTAAN PADA ENTITAS VENTURA BERSAMA

Berdasarkan surat keputusan pemegang saham atas kepemilikan saham PMT dan PPT, dinyatakan bahwa PT Pelindo I (Persero) memiliki kepemilikan saham yang signifikan dan pengendalian pada PT Pelindo I (Persero), maka kedua perusahaan dikonsolidasi sejak tahun 2018.

Nama Entitas	%	2017				
		Nilai Tercatat Awal Tahun	Penambahan	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas	Pembagian Deviden	Nilai Tercatat Akhir Tahun
Metode Ekuitas						
PT Prima Terminal Petikemas	70	337.632.537.367	100.000.000.000	(4.125.598.699)	-	433.506.938.668
PT Prima Multi Terminal	55	563.126.673.061	165.000.000.000	2.354.587.105	-	730.481.260.166
Jumlah		900.759.210.428	265.000.000.000	(1.771.011.594)	-	1.163.988.198.834

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2017				
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Reclassification	Ending Balance
<u>Acquisition cost</u>					
Lands	103.022.921.573	11.474.340.988	-	-	114.497.262.561
Building and facilities	1.640.153.003.336	318.089.935.381	(167.239.757)	(17.931.850.623)	1.940.143.848.337
Ships	585.446.489.595	112.895.863.548	-	(93.495.273.887)	604.847.079.256
Equipment port facilities	1.281.927.818.584	204.459.209.591	-	(60.179.618.814)	1.426.207.409.361
Installation port facilities	245.989.337.406	59.265.657.314	-	(2.108.195.818)	303.146.798.902
Road and building	385.120.326.820	41.753.362.419	(141.957.641)	(2.773.124.001)	423.958.607.597
Equipment	72.270.713.982	417.710.000	-	(144.453.500)	72.543.970.482
Vehicles	12.231.518.637	789.546.727	(128.200.000)	(322.538.363)	12.570.327.001
Emplacement	17.602.075.403	41.067.102.728	-	(368.864.364)	58.300.313.767
Sub total	4.343.764.205.336	790.212.728.696	(437.397.398)	(177.323.919.372)	4.956.215.617.264
Assets under construction	801.083.610.858	1.151.790.217.555	-	(668.994.623.545)	1.283.879.204.868
Acquisitoon cost	5.144.847.816.194	1.942.002.946.251	(437.397.398)	(846.318.542.916)	6.240.094.822.131
<u>Accumulation depreciations</u>					
Building and facilities	345.087.029.367	59.063.365.264	(254.202.035)	175.914.758	404.072.107.354
Ships	215.952.144.566	17.252.145.946	-	17.501.966.719	250.706.257.231
Equipment port facilities	538.720.192.604	118.923.665.900	-	(40.157.237.413)	617.486.621.091
Installation port facilities	79.267.467.932	12.849.889.224	-	(1.761.782.906)	90.355.574.250
Road and building	142.330.114.092	19.226.575.354	-	(4.101.669.294)	157.455.020.153
Peralatan	54.663.760.601	7.940.899.242	-	(177.397.166)	62.427.262.677
Equipment	9.537.373.727	377.088.713	(126.063.294)	(257.000.330)	9.531.398.816
Emplacement	8.685.209.678	1.820.844.415	-	(372.004.442)	10.134.049.651
	1.394.243.292.567	237.454.474.058	(380.265.329)	(29.149.210.074)	1.602.168.291.223
Book value	3.750.604.523.627				4.637.926.530.908

Depreciation of property and equipment which is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp225.032.740.090 and Rp237.454.474.058, respectively.

Based on the letter of the Board of Commissioners Number KU.61 / 155 / DK / PP.I / VIII / 2018 concerning the write-off of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) it has been approved the elimination of fixed assets with economic life of up to 5 years amounting to Rp242.432.347 and recommended the elimination of fixed assets of more than 5 years of economic life in the amount of Rp4.338.821.614 so that the reclassification of fixed assets to unproductive property and equipment amounted to Rp36.746.885.362 which is the asset of Mobile Harbor Crane type LHM 400 No. 01, while Rp1.793.949.146 is an adjustment to the asset settlement in the form of Gate Construction in Teluk Nibung Port. In 2017 the Company reclassified the assets in progress to fixed assets based on the realization of the settlement supported by the handover report amounting to Rp668.623.545.

In 2017 there was a realization of asset write-offs with the approval of write-off of Company assets in accordance with the SOE Minister's Letter Number S-339 / MBU / 07/2016 dated 11 July 2016 and Number S-566 / MBU / 09/2016 dated 29 September 2016 and Board of Commissioners No.KU.61 / 038 / DK / PP.I / I / 2017 dated 31 January 2017 which is spread on asset accounts as follows:

- Fixed assets amounting to the acquisition price of Rp437.397.398 and book value of Rp57.132.069.
- Assets remain unproductive at the acquisition price of Rp8.350.519.091 and book value of Rp1.236.800.716.

Based on management's review, there were no events or changes that indicated a decline in the value of fixed assets, so that management did not make provision for impairment of fixed assets.

a. As of December 31, 2018 and 2017, the Company insured its fixed assets and investment property to third parties PT Jasindo (Persero) in the amount of Rp2.524.055.711.095 and Rp2.181.576.800.852 and to PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) amounting to Rp502.350.425.130 and Rp79.520.895.000, so that the total coverage as of December 31, 2018 and

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. PROPERTI INVESTASI

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>				
Tanah	186.033.428.621	226.421.032.998	-	412.454.461.619
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	8.646.308.748	172.435.133	-	8.818.743.881
Jumlah Nilai Perolehan	194.679.737.369	226.593.468.131	-	421.273.205.500
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	4.821.381.672	181.749.005	-	5.003.130.677
Jumlah Akm. Penyusutan	4.821.381.672	181.749.005	-	5.003.130.677
Nilai Buku	189.858.355.697			416.270.074.823
	2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>				
Tanah	4.843.165.052	181.190.263.569	-	186.033.428.621
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	8.646.308.748	-	-	8.646.308.748
Jumlah Nilai Perolehan	13.489.473.800	181.190.263.569	-	194.679.737.369
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	4.639.632.667	181.749.005	-	4.821.381.672
Jumlah Akm. Penyusutan	4.639.632.667	181.749.005	-	4.821.381.672
Nilai Buku	8.849.841.133			189.858.355.697

Pada tahun 2018 properti investasi tanah mengalami kenaikan sebesar Rp226.421.032.998 yang berasal dari penambahan aset pada perusahaan anak PPK. Properti investasi telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (lihat catatan 13.a).

13. ASET TETAP

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Penyesuaian	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>					
Tanah	114.497.262.561	-	-	-	114.497.262.561
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.940.143.848.337	78.426.911.388	-	-	2.018.570.759.725
Kapal	604.847.079.255	358.381.000	-	-	605.205.460.255
Alat Fasilitas Pelabuhan	1.426.207.409.361	35.023.295.718	-	(36.746.885.362)	1.424.483.819.717
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	303.146.798.902	3.699.772.727	-	-	306.846.571.629
Jalan dan Bangunan	423.958.607.597	5.452.903.151	-	(1.793.949.146)	427.617.561.602
Peralatan	72.543.970.482	3.526.178.993	-	-	76.070.149.475
Kendaraan	12.570.327.001	432.533.273	-	-	13.002.860.274
Emplasemen	58.300.313.767	-	-	-	58.300.313.767
Jumlah	4.956.215.617.263	126.919.976.250	-	(38.540.834.508)	5.044.594.759.005
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	404.072.107.354	63.208.997.368	-	(6.333.333)	467.274.771.390
Kapal	250.706.257.231	27.042.987.303	-	-	277.749.244.534
Alat Fasilitas Pelabuhan	617.486.621.091	98.433.989.669	-	(17.433.825.944)	698.486.784.816
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	90.355.574.250	12.667.245.702	-	30.457.557	103.053.277.509
Jalan dan Bangunan	157.455.020.153	17.884.193.886	-	9.476.109	175.348.690.148
Peralatan	62.427.262.677	3.251.325.525	-	155.204.766	65.833.792.968
Kendaraan	9.531.398.816	207.229.207	-	-	9.738.628.023
Emplasemen	10.134.049.651	2.336.771.430	-	-	12.470.821.081
Jumlah	1.602.168.291.223	225.032.740.090	-	(17.245.020.845)	1.809.956.010.469
Nilai Tercatat Aset Tetap	3.354.047.326.040				3.234.638.748.536
Aset dalam Penyelesaian	1.283.879.204.868	5.914.869.345.382	(1.022.902.040)	(126.919.976.250)	7.070.805.671.960
Jumlah	4.637.926.530.908	5.914.869.345.382	(1.022.902.040)	(126.919.976.250)	10.305.444.420.496

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

2017 becomes Rp3.026.406.136.225 and Rp2.261.097.695.852, which in management's opinion is sufficient to cover the possibility of losses arising from these risks.

b. Some fixed assets were pledged to several banks for loan facilities obtained by the Company (see Note 23).

c. Assets in progress as of December 31, 2018 and 2017 consist of:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lands	39.812.659.204	-
Port building facilities	4.341.945.407.064	291.211.025.069
Ships	571.512.919.350	222.038.464.632
Equipment of port facilities	1.472.043.292.994	323.470.096.449
Installation of port facilities	263.339.053.942	171.608.789.997
Roads and buildings	366.046.327.748	248.609.789.108
Equipment	14.765.934.539	26.941.039.613
Vehicles	1.340.000.000	-
Emplacement	77.118	-
Total	<u>7.070.805.671.960</u>	<u>1.283.879.204.868</u>

The Company reclassifies assets in progress mostly to fixed assets based on the realization of settlement supported by minutes of handover of Rp126.919.976.250 and Rp668.994.623.545 for 2018 and 2017, respectively.

As of December 31, 2018 and 2017, the average percentage of completion of settlement assets ranged from 50% to 95%.

Certain fixed assets are used as collateral for bank loans (Note 23).

14. INTANGIBLE ASSETS

Description	2018				Ending Balance
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Reclassification	
Software development	-	14.217.474.689	-	-	14.217.474.689
Certification	814.434.917	-	-	-	814.434.917
Consultans and appraisal	556.370.000	595.560.546	-	-	1.151.930.546
Education facilities	24.170.166.823	-	-	-	24.170.166.823
Education non facilities					
Establishment and change	3.633.987.180	6.315.795.088	-	(2.117.162.583)	7.832.619.685
Articles of association	-	4.562.175.277	-	-	4.562.175.277
Others	93.205.708.716	21.177.361.688	-	(403.860.546)	113.979.209.858
Asset under construction	114.034.823.414	202.006.044.319	-	(18.139.042.105)	297.901.825.628
Sub total	<u>236.415.491.050</u>	<u>248.874.411.607</u>	<u>-</u>	<u>(20.660.065.234)</u>	<u>464.629.837.423</u>
Accumulation depreciation	33.640.286.918	35.192.181.394	-	-	68.832.468.312
Total	<u>202.775.204.132</u>	<u>213.682.230.213</u>	<u>-</u>	<u>(20.660.065.234)</u>	<u>395.797.369.111</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2017				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Penyesuaian	
Harga perolehan					
Tanah	103.022.921.573	11.474.340.988	-	-	114.497.262.561
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.640.153.003.336	318.089.935.381	(167.239.757)	(17.931.850.623)	1.940.143.848.337
Kapal	585.446.489.595	112.895.863.548	-	(93.495.273.887)	604.847.079.256
Alat Fasilitas Pelabuhan	1.281.927.818.584	204.459.209.591	-	(60.179.618.814)	1.426.207.409.361
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	245.989.337.406	59.265.657.314	-	(2.108.195.818)	303.146.798.902
Jalan dan Bangunan	385.120.326.820	41.753.362.419	(141.957.641)	(2.773.124.001)	423.958.607.597
Peralatan	72.270.713.982	417.710.000	-	(144.453.500)	72.543.970.482
Kendaraan	12.231.518.637	789.546.727	(128.200.000)	(322.538.363)	12.570.327.001
Emplasemen	17.602.075.403	41.067.102.728	-	(368.864.364)	58.300.313.767
Jumlah	4.343.764.205.336	790.212.728.696	(437.397.398)	(177.323.919.372)	4.956.215.617.264
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	345.087.029.367	59.063.365.264	(254.202.035)	175.914.758	404.072.107.354
Kapal	215.952.144.566	17.252.145.946	-	17.501.966.719	250.706.257.231
Alat Fasilitas Pelabuhan	538.720.192.604	118.923.665.900	-	(40.157.237.413)	617.486.621.091
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	79.267.467.932	12.849.889.224	-	(1.761.782.906)	90.355.574.250
Jalan dan Bangunan	142.330.114.092	19.226.575.354	-	(4.101.669.294)	157.455.020.153
Peralatan	54.663.760.601	7.940.899.242	-	(177.397.166)	62.427.262.677
Kendaraan	9.537.373.727	377.088.713	(126.063.294)	(257.000.330)	9.531.398.816
Emplasemen	8.685.209.678	1.820.844.415	-	(372.004.442)	10.134.049.651
Jumlah	1.394.243.292.567	237.454.474.058	(380.265.329)	(29.149.210.074)	1.602.168.291.223
Nilai Tercatat Aset Tetap	2.949.520.912.769	552.758.254.638	(817.662.727)	(148.174.709.298)	3.354.047.326.040
Aset dalam Penyelesaian	801.083.610.858	1.151.790.217.555	-	(668.994.623.545)	1.283.879.204.868
Jumlah	3.750.604.523.627	1.704.548.472.193	(817.662.727)	(817.169.332.843)	4.637.926.530.908

Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp225.032.740.090 dan Rp237.454.474.058.

Berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor KU.61/155/DK/PP.I/VIII/2018 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah disetujui penghapusan aset tetap yang memiliki umur ekonomis sampai dengan 5 tahun sebesar Rp242.432.347 dan direkomendasikan penghapusan aset tetap yang berumur ekonomis lebih dari 5 tahun sebesar Rp4.338.821.614. sehingga dilakukan reklasifikasi aset tetap ke aset tetap tidak produktif sebesar Rp36.746.885.362 yang merupakan aset Mobile Harbour Crane tipe LHM 400 No. 01, sedangkan Rp1.793.949.146 adalah penyesuaian atas *settlement* aset berupa Pembangunan *Gate* di Pelabuhan Teluk Nibung. Pada tahun 2017 Perusahaan mereklasifikasi aset dalam penyelesaian ke aset tetap berdasarkan realisasi penyelesaian yang didukung berita acara serah terima sebesar Rp668.623.545.

Pada tahun 2017 terdapat realisasi penghapusan aset atas persetujuan penghapusbukuan aset Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-339/MBU/07/2016 tanggal 11 Juli 2016 dan Nomor S-566/MBU/09/2016 tanggal 29 September 2016 dan Surat Dewan Komisaris No.KU.61/038/DK/PP.I/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang tersebar pada akun aset sebagai berikut:

- Aset tetap sebesar harga perolehannya Rp437.397.398 dan nilai buku Rp57.132.069
- Aset tetap tidak produktif sebesar harga perolehan Rp8.350.519.091 dan nilai buku Rp1.236.800.716.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap.

- a. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mengasuransikan aset tetap dan properti investasi kepada pihak ketiga PT Jasindo (Persero) sebesar Rp2.524.055.711.095 dan Rp2.181.576.800.852 serta kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar Rp502.350.425.130 dan Rp79.520.895.000, sehingga total pertanggungan pada 31 Desember 2018

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Description	2017				Ending Balance
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Reclassification	
Certification	-	814.434.917	-	-	814.434.917
Consultans and appraisal	298.470.000	257.900.000	-	-	556.370.000
Education	13.886.210.295	13.917.943.708	-	-	27.804.154.003
Others	72.123.991.821	21.081.716.895	-	-	93.205.708.716
Asset under construction	-	114.034.823.414	-	-	114.034.823.414
Sub total	86.308.672.116	150.106.818.934	-	-	236.415.491.050
Accumulation depreciation	5.856.848.034	27.783.438.884	-	-	33.640.286.918
Total	80.451.824.082	122.323.380.050	-	-	202.775.204.132

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2018	2017
<u>Unutilized assets</u>		
Lands	805.851.797	805.851.797
Port building facilities	20.914.646.221	20.874.229.471
Ships	527.000.000	527.000.000
Equipment of port facilities	46.245.045.893	170.500.000
Installation of port facilities	170.500.000	-
Roads and buildings	86.276.000	86.276.000
Vehicles	634.024.224	634.024.224
Sub total Unutilized Assets	69.383.344.135	23.097.881.492
<u>Other Assets</u>		
Idle fixed assets	153.352.829.867	121.984.241.440
Accumulated amortization of idle fixed assets	(108.645.544.702)	(95.343.642.612)
Impairment idle fixed assets	(36.153.217.293)	(17.988.382.700)
Sub total Others Assets	8.554.067.872	8.652.216.128
Other	-	9.208.648
Total Other Non-Current Assets	77.937.412.007	31.759.306.268

Fixed assets that are unproductive are fixed assets that cannot be operated in the Company's operational activities, most of which consist of ships, and port facilities such as Trainer, Rubber Tire Gantry Crane, Forklift, Reach Staker, and Harbor Mobile Crane.

In 2018 the abolition of unproductive fixed assets was carried out based on the letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number S-194 / MBU / 03/2017, Number S-424 / MBU / 07/2017, and Number S-444 / MBU / 08 / 2017 concerning the Approval of Permanent Assets Removal of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

16. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

	2018	2017
Security deposits	20.049.725.276	15.315.728.210
Other third parties account receivable	13.537.896.496	13.537.896.496
Provision for other parties account receivable	(13.537.896.496)	(13.089.438.566)
Total	20.049.725.276	15.764.186.140

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan 2017 menjadi Rp3.026.406.136.225 dan Rp2.261.097.695.852, yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

- b. Beberapa aset tetap dijaminkan ke beberapa bank atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Grup (lihat catatan 23).
c. Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Tanah	39.812.659.204	-
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.341.945.407.064	291.211.025.069
Kapal	571.512.919.350	222.038.464.632
Alat aset tetap fasilitas pelabuhan	1.472.043.292.994	323.470.096.449
Instalasi fasilitas pelabuhan	263.339.053.942	171.608.789.997
Jalan dan bangunan	366.046.327.748	248.609.789.108
Peralatan	14.765.934.539	26.941.039.613
Kendaraan	1.340.000.000	-
Emplasemen	77.118	-
Jumlah	7.070.805.671.960	1.283.879.204.868

Grup mereklasifikasi aset dalam penyelesaian sebagian besar ke aset tetap berdasarkan realisasi penyelesaian yang didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan masing-masing sebesar Rp126.919.976.250 dan Rp668.994.623.545 untuk tahun 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian rata-rata berkisar antara 50% sampai dengan 95%. Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank (catatan 23).

14. ASET TAK BERWUJUD

Uraian	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /	Saldo Akhir
Pengembangan Piranti Lunak	-	14.217.474.689	-	-	14.217.474.689
Sertifikasi	814.434.917	-	-	-	814.434.917
Konsultan dan Appraisal	556.370.000	595.560.546	-	-	1.151.930.546
Pendidikan dan sarana	24.170.166.823	-	-	-	24.170.166.823
Pendidikan non fasilitas dan sarana					
Pendirian dan Perubahan	3.633.987.180	6.315.795.088	-	(2.117.162.583)	7.832.619.685
Anggaran Dasar	-	4.562.175.277	-	-	4.562.175.277
Lainnya	93.205.708.716	21.177.361.688	-	(403.860.546)	113.979.209.858
Aset Dalam Konstruksi	114.034.823.414	202.006.044.319	-	(18.139.042.105)	297.901.825.628
Sub Jumlah	236.415.491.050	248.874.411.607	-	(20.660.065.234)	464.629.837.423
Akumulasi Amortisasi	33.640.286.918	35.192.181.394	-	-	68.832.468.312
Jumlah	202.775.204.132	213.682.230.213	-	(20.660.065.234)	395.797.369.111

Uraian	2017				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /	Saldo Akhir
Sertifikasi	-	814.434.917	-	-	814.434.917
Konsultan dan Appraisal	298.470.000	257.900.000	-	-	556.370.000
Pendidikan	13.886.210.295	13.917.943.708	-	-	27.804.154.003
Lainnya	72.123.991.821	21.081.716.895	-	-	93.205.708.716
Aset Dalam Konstruksi	-	114.034.823.414	-	-	114.034.823.414
Sub Jumlah	86.308.672.116	150.106.818.934	-	-	236.415.491.050
Akumulasi Amortisasi	5.856.848.034	27.783.438.884	-	-	33.640.286.918
Jumlah	80.451.824.082	122.323.380.050	-	-	202.775.204.132

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

The balance of other receivables as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp13.537.896.496 and Rp15.764.186.140 represent uncollectible trade receivables of more than 3 years and allowance reserves have been formed.

The deposit balance as of December 31, 2018 amounting to Rp20.049.725.276 was mostly deposits pledged as collateral for working capital loans at PT Bank Negara Indonesia (Persero) by a subsidiary of PT Prima Indonesia Logistik, while in 2017 Rp15.315.728.210 partly large is a deposit pledged to procure Reach Stacker Rp15.000.000.000 to a subsidiary of PT Prima Indonesia Logistik.

17. ACCOUNT PAYABLE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Rupiah	1.771.838.935.231	1.432.120.277.093
US Dollar	3.319.644.777	352.303.036
Total	<u>1.775.158.580.008</u>	<u>1.432.472.580.129</u>

Details of account payable:

Related parties

PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82.937.812.373	114.889.327.285
PT Nindya Karya (Persero)	71.318.324.111	26.571.870.119
PT Brantas Abipraya (Persero)	55.636.263.216	62.646.152.697
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34.648.385.805	59.280.000.000
PT Pertamina (Persero)	24.651.055.758	3.873.297.343
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22.558.011.236	223.023.966.481
PT Hutama Karya (Persero)	15.220.572.797	111.258.602.136
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	12.762.636.250	3.281.306.150
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6.734.336.614	1.660.583.520
PT Sucofindo (Persero)	5.717.554.858	5.015.220.731
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.945.896.550	1.648.580.616
Pertamina Trans Kontinental	1.322.746.046	355.057.527
BPPU ITS	1.246.509.999	-
PT Virama Karya (Persero)	-	7.316.575.500
Unit Galangan Kapal (UGK)	-	5.957.500.000
DPC INSA Pekanbaru - Sei Pakning	-	1.144.818.097
Others of less than Rp1.000.000.000	4.014.689.921	3.633.236.831
Sub Total Related Parties	<u>340.714.795.534</u>	<u>631.556.095.033</u>

Third parties

Sennobogen Maschinenfabrik GmbH	206.748.317.388	63.617.086.650
PT Waruna Nusa Sentana	100.083.423.212	104.233.060.630
PT Citra Shipyard	87.578.304.001	63.319.461.473
Konecranes Finland Corporation	86.376.076.000	22.110.000.000
PT Harijadi Sukses	22.337.132.598	14.003.513.956
PT Anta Raksa	22.326.421.132	33.651.905.042
PWC Consulting	20.267.175.751	11.210.781.209
PT Kaharutama	18.999.692.421	23.280.352.848
PT Harbarindo Baharutama	18.596.294.792	20.336.198.580
PT Pahala Harapan Lestari	12.787.780.000	-

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	2018	2017
<u>Aset Tetap Belum Dimanfaatkan</u>		
Tanah	805.851.797	805.851.797
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	20.914.646.221	20.874.229.471
Kapal	527.000.000	527.000.000
Alat Fasilitas Pelabuhan	46.245.045.893	170.500.000
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	170.500.000	-
Jalan dan Bangunan	86.276.000	86.276.000
Kendaraan	634.024.224	634.024.224
Sub Jumlah Aset Tetap Belum Dimanfaatkan	<u>69.383.344.135</u>	<u>23.097.881.492</u>
<u>Aset Tetap Tidak Produktif</u>		
Aset tetap tidak produktif	153.352.829.867	121.984.241.440
Amortisasi aset tetap tidak produktif	(108.645.544.702)	(95.343.642.612)
Penurunan nilai aset tetap tidak produktif	(36.153.217.293)	(17.988.382.700)
Sub Jumlah Aset Tetap Tidak Produktif	<u>8.554.067.872</u>	<u>8.652.216.128</u>
Lainnya	-	9.208.648
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	<u>77.937.412.007</u>	<u>31.759.306.268</u>

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *Transtainer, Rubber Tired Gantry Crane, Forklift, Reach Staker, dan Harbour Mobile Crane*.

Pada tahun 2018 dilakukan penghapusan aset tetap tidak produktif berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-194/MBU/03/2017, Nomor S-424/MBU/07/2017, dan Nomor S-444/MBU/08/2017 tentang Persetujuan Penghapusan Aktiva Tetap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

16. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

	2018	2017
Kas deposit (uang jaminan, bank garansi, dll)	20.049.725.276	15.315.728.210
Piutang lain-lain pihak ketiga	13.537.896.496	13.537.896.496
Provisi turun nilai piutang lain-lain pihak ketiga	(13.537.896.496)	(13.089.438.566)
Jumlah	<u>20.049.725.276</u>	<u>15.764.186.140</u>

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp13.537.896.496 dan Rp15.764.186.140 merupakan piutang usaha tak tertagih lebih dari 3 tahun dan telah dibentuk cadangan penyisihannya.

Saldo uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20.049.725.276 sebagian besar merupakan deposito yang diagunkan untuk kredit modal kerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) oleh anak perusahaan PT Prima Indonesia Logistik, sedangkan pada tahun 2017 Rp15.315.728.210 sebagian besar merupakan deposito yang diagunkan untuk pengadaan *Reach Stacker* Rp15.000.000.000 pada anak perusahaan PT Prima Indonesia Logistik.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018	2017
PT Konsulindo Informatika Perdana	11.661.371.413	11.230.556.172
Jade Logistic Group, LTD	11.462.078.065	-
PT Karya Utama Unggul	11.297.616.716	5.314.382.020
Farhanindo	9.969.141.025	-
Indomobil Prima Niaga	9.620.889.838	-
PT Energi Cakrawala Buana	8.521.274.068	5.489.114.907
Trakindo Utama	7.852.749.500	-
PT. Damhury Jaya	7.698.738.000	-
PT Rajawali Sakti Prima	7.555.923.404	3.993.699.927
Liebherr Werk Nenzing	7.102.918.357	50.242.243.307
PT Mitra Persada Jaya	7.054.215.000	7.054.215.000
PT Gambir Mas Pangkalan	6.822.051.891	2.013.861.336
PT Primus Indonesia	6.754.668.887	13.400.565.601
Chairani	6.303.339.849	2.181.681.818
PT Asha Portindo	6.295.994.066	5.645.070.613
PT Cemerlang Samudra	6.244.747.407	-
Terberg Tractors Malaysia SDN, BHD	5.469.540.750	77.870.630.000
PT AKR Corporindo Tbk	5.414.831.468	3.059.008.989
Selako Batam Shipyard	5.393.787.207	-
PT Kawasan Industri Dumai	5.202.008.877	1.824.051.542
PT Tisa Lestari	5.086.645.680	3.754.880.000
Inti Persada Raya Lestari	4.698.685.546	-
Veda Praxis	4.624.955.800	-
PT Dwira Kusuma	4.537.881.818	-
PT Jasautama Sukmaperka	4.317.331.754	3.453.865.403
Multi Ocean Shipyard	4.308.000.000	-
PT. Altrovis Tekno Global	3.999.960.000	-
PT Duta Utama Sumatera	3.905.260.063	5.396.250.000
Artha Kindo Perkasa	3.885.488.842	-
PT. Surya Hedona Lembayung	3.858.881.150	-
Sang Saka	3.793.137.509	-
Nagamas Pelmoil Lestari	3.569.886.900	-
Premiere Risk Catalyst Consulting	3.336.463.872	3.923.238.168
PT Lautan Belawan Jaya	3.293.927.355	2.102.052.706
PT Kuda Inti Samudera	3.293.173.097	9.964.214.149
Sumatera Indah Indonesia	3.272.260.000	-
PT Rantai Bahari Nusantara	3.238.673.495	1.228.092.789
Shanghai Zenhua Heavy Industri Co.	3.103.091.573	21.277.486.264
Musim Mas	2.841.973.114	-
PT Layar Dumai Sejahtera	2.682.330.449	1.559.219.271
Zoraya Utama	2.662.088.824	-
PT Bramasari	2.655.678.465	2.008.181.818
PT Wahana Adidaya Pertiwi	2.611.559.182	22.769.898.990
PT Sinar Jaya Mandiri	2.589.222.464	1.518.841.409
Tugan Mandiri Gemilang	2.520.756.987	-
SGS Indonesia	2.409.160.000	-
PT Batam Expresindo Shipyard	2.387.090.910	2.387.090.910
Tirta Kencana Sejahtera	2.364.728.905	-
Mitra Sukses	2.362.492.978	-
PT Adhimascipta Dwipantara	2.349.847.788	1.079.397.289

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****17. UTANG USAHA**

	2018	2017
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82.937.812.373	114.889.327.285
PT Nindya Karya (Persero)	71.318.324.111	26.571.870.119
PT Brantas Abipraya (Persero)	55.636.263.216	62.646.152.697
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34.648.385.805	59.280.000.000
PT Pertamina (Persero)	24.651.055.758	3.873.297.343
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22.558.011.236	223.023.966.481
PT Hutama Karya (Persero)	15.220.572.797	111.258.602.136
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	12.762.636.250	3.281.306.150
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6.734.336.614	1.660.583.520
PT Sucofindo (Persero)	5.717.554.858	5.015.220.731
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.945.896.550	1.648.580.616
Pertamina Trans Kontinental	1.322.746.046	355.057.527
BPPU ITS	1.246.509.999	-
PT Virama Karya (Persero)	-	7.316.575.500
Unit Galangan Kapal (UGK)	-	5.957.500.000
DPC INSA Pekanbaru - Sei Pakning	-	1.144.818.097
Lainnya di bawah Rp1.000.000.000	4.014.689.921	3.633.236.831
	<hr/>	<hr/>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	340.714.795.534	631.556.095.033
<u>Pihak Ketiga</u>		
Sennobogen Maschinenfabrik GmbH	206.748.317.388	63.617.086.650
PT Waruna Nusa Sentana	100.083.423.212	104.233.060.630
PT Citra Shipyard	87.578.304.001	63.319.461.473
Konecranes Finland Corporation	86.376.076.000	22.110.000.000
PT Harijadi Sukses	22.337.132.598	14.003.513.956
PT Anta Raksa	22.326.421.132	33.651.905.042
PWC Consulting	20.267.175.751	11.210.781.209
PT Kaharutama	18.999.692.421	23.280.352.848
PT Harbarindo Baharitama	18.596.294.792	20.336.198.580
PT Pahala Harapan Lestari	12.787.780.000	-
PT Konsulindo Informatika Perdana	11.661.371.413	11.230.556.172
Jade Logistic Group, LTD	11.462.078.065	-
PT Karya Hutama Unggul	11.297.616.716	5.314.382.020
Farhanindo	9.969.141.025	-
Indomobil Prima Niaga	9.620.889.838	-
PT Energi Cakrawala Buana	8.521.274.068	5.489.114.907
Trakindo Utama	7.852.749.500	-
PT. Damhury Jaya	7.698.738.000	-
PT Rajawali Sakti Prima	7.555.923.404	3.993.699.927
Liebherr Werk Nenzing	7.102.918.357	50.242.243.307
PT Mitra Persada Jaya	7.054.215.000	7.054.215.000
PT Gambir Mas Pangkalan	6.822.051.891	2.013.861.336
PT Primus Indonesia	6.754.668.887	13.400.565.601

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018	2017
Duta Agung Group	2.333.522.760	3.287.681.136
Panji Mandiri	2.301.700.000	-
Jayendu Khrisna	2.253.950.000	-
Havenbedrijf Rotterdam NV	2.207.315.000	2.207.315.000
Marlent Manurung, SE	2.202.760.555	-
Timbul Baru Jaya	2.138.012.555	-
Artek Utama	2.103.519.868	-
PT. Multimas Nabati Asahan	2.098.631.842	-
PT Garda Parahiangan	2.019.513.623	1.384.207.510
Asia Mega Persada	2.012.888.500	-
PT Windu Aji Kencana	1.874.460.000	-
Gubahreka Consultant	1.853.178.375	-
PT Prima Madani Perkasa	1.827.843.447	-
Cargotec CHS PTE LTD	1.822.412.902	1.822.412.902
CV. Tota	1.790.909.091	-
Trio Wisata Eka Raksa	1.782.648.768	-
Riau Samudra	1.778.702.777	-
Delta Prima Abadi	1.775.885.974	-
Ivo Mas Tunggal	1.769.535.345	-
Putera Gemilang	1.723.245.622	-
Godwin Austen Indonesia	1.599.785.600	-
PT Bintang Seroja	1.588.487.860	6.269.515.455
Perfecta Sarana Engineering	1.552.548.567	-
PT Cinovasi Rekaprima	1.552.032.000	-
Ramian R	1.542.475.000	-
Jet Marine Supplier	1.528.545.755	-
Diagonal Jaya Multikreasi	1.504.969.818	-
Bonafindo Consultant	1.442.887.000	1.172.126.211
PT Budi Putra Indonesia	1.383.869.912	2.641.041.363
Eka Jaya Sakti	1.365.251.410	-
New Sentosa	1.340.000.000	-
Bina Cipta Jaya Sejati	1.326.712.100	-
PT Arkindo	1.287.516.773	1.287.516.773
Havara Daya Sejahtera	1.274.587.500	-
Jaya Palugada Mas	1.246.288.350	-
PT Transforma Rekayasa	1.236.515.700	-
Adela Raya	1.225.879.595	-
Sumatera Computer Centre	1.218.727.750	1.074.562.000
Lemotata Grahamas	1.217.992.002	-
Srikandi Multi Mandiri	1.180.854.392	-
CV Khoda Medan	1.177.474.445	1.552.956.347
Citra Pramatra	1.149.827.273	-
PT Gada Jaya	1.142.659.564	1.741.611.421
PT Daya Radar Utama	1.135.550.200	14.687.118.000
Hadid Mulia	1.107.962.251	-
Koperasi UTPK Belawan	1.083.644.492	1.083.794.492
Hamparan Alam Baruna Indonesia	1.043.016.300	-
Atrya Swacipta/Dimensi Produccion	1.038.854.273	-
Algholib	1.004.331.301	-
PT Karya Karimun Mandiri	-	4.330.352.329

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
PT Primus Indonesia	6.754.668.887	13.400.565.601
Chairani	6.303.339.849	2.181.681.818
PT Asha Portindo	6.295.994.066	5.645.070.613
PT Cemerlang Samudra	6.244.747.407	-
Terberg Tractors Malaysia SDN, BHD	5.469.540.750	77.870.630.000
PT AKR Corporindo Tbk	5.414.831.468	3.059.008.989
Selako Batam Shipyard	5.393.787.207	-
PT Kawasan Industri Dumai	5.202.008.877	1.824.051.542
PT Tisa Lestari	5.086.645.680	3.754.880.000
Inti Persada Raya Lestari	4.698.685.546	-
Veda Praxis	4.624.955.800	-
PT Dwira Kusuma	4.537.881.818	-
PT Jasautama Sukmaperkasa	4.317.331.754	3.453.865.403
Multi Ocean Shipyard	4.308.000.000	-
PT. Altrovis Tekno Global	3.999.960.000	-
PT Duta Utama Sumatera	3.905.260.063	5.396.250.000
Artha Kindo Perkasa	3.885.488.842	-
PT. Surya Hedona Lembayung	3.858.881.150	-
Sang Saka	3.793.137.509	-
Nagamas Pelmoil Lestari	3.569.886.900	-
Premiere Risk Catalyst Consulting	3.336.463.872	3.923.238.168
PT Lautan Belawan Jaya	3.293.927.355	2.102.052.706
PT Kuda Inti Samudera	3.293.173.097	9.964.214.149
Sumatera Indah Indonesia	3.272.260.000	-
PT Rantai Bahari Nusantara	3.238.673.495	1.228.092.789
Shanghai Zenhua Heavy Industri Co.	3.103.091.573	21.277.486.264
Musim Mas	2.841.973.114	-
PT Layar Dumai Sejahtera	2.682.330.449	1.559.219.271
Zoraya Utama	2.662.088.824	-
PT Bramasari	2.655.678.465	2.008.181.818
PT Wahana Adidaya Pertiwi	2.611.559.182	22.769.898.990
PT Sinar Jaya Mandiri	2.589.222.464	1.518.841.409
Tugan Mandiri Gemilang	2.520.756.987	-
SGS Indonesia	2.409.160.000	-
PT Batam Expresindo Shipyard	2.387.090.910	2.387.090.910
Tirta Kencana Sejahtera	2.364.728.905	-
Mitra Sukses	2.362.492.978	-
PT Adhimascripta Dwipantara	2.349.847.788	1.079.397.289
Duta Agung Group	2.333.522.760	3.287.681.136
Panji Mandiri	2.301.700.000	-
Jayendu Khrisna	2.253.950.000	-
Havenbedrijf Rotterdam NV	2.207.315.000	2.207.315.000
Marlent Manurung, SE	2.202.760.555	-
Timbul Baru Jaya	2.138.012.555	-
Artek Utama	2.103.519.868	-
PT. Multimas Nabati Asahan	2.098.631.842	-

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018	2017
PT Emitraco Investama Mandiri	-	3.642.883.488
PT Haskoning Indonesia	-	1.100.261.317
PT Aryaguna Jaya	-	1.833.371.051
PT Rasya Utama	-	1.416.854.310
PT Abadi Tetap Jaya	-	1.101.674.545
PT Kurnia Samudra	-	1.250.938.424
PT Pahala Harapan Lestari	-	18.022.817.500
PT Indo Traktor Utama	-	7.072.727.273
PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera	-	5.985.360.000
PT Astra Isuzu Medan	-	3.840.909.090
PT Dungo Reksa	-	3.297.640.364
PT Prima Teknik Husada	-	2.956.749.091
PT Multi Jaya Samudera	-	2.598.000.000
PT Sidomukti Lestari	-	1.960.227.932
PT Aman Arwita Maritime	-	1.126.620.544
PT Mandiri Teknik Utama Sejahtera	-	1.069.347.400
CV Bina Tekhnik	-	1.068.181.818
Others of less than Rp1.000.000.000	506.914.762.684	69.525.559.224
Sub Total Third Parties	<u>1.434.443.784.474</u>	<u>800.916.485.096</u>
Total	<u>1.775.158.580.008</u>	<u>1.432.472.580.129</u>

Trade payables of related parties to PT Waruna Nusa Sentana as of December 31, 2018 amounting to Rp100.083.423.212 (Note 40), is the work of procuring 1 x 2 tugboats in Batam Branch, 1 Belawan Branch unit and 2 Tanjungbalai Karimun Branch units.

Third party business debt to Sennobogen Mechianenfabrik Gmbh as of December 31, 2018 amounting to Rp206.748.337.388 (Note 40), is a Mobile Harbor Crane Procurement Work for 4 Belawan Branch units, 2 units for Dumai Branch and 1 unit in Perawang.

The business debt of a related party to PT Adhi Karya (Persero) as of December 31, 2018 amounting to Rp82.937.812.373 is a debt for the construction of the Office Building in Belawan.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	2018	2017
PT Garda Parahiangan	2.019.513.623	1.384.207.510
Asia Mega Persada	2.012.888.500	-
PT Windu Aji Kencana	1.874.460.000	-
Gubahreka Consultant	1.853.178.375	-
PT Prima Madani Perkasa	1.827.843.447	-
Cargotec CHS PTE LTD	1.822.412.902	1.822.412.902
CV. Tota	1.790.909.091	-
Trio Wisata Eka Raksa	1.782.648.768	-
Riau Samudra	1.778.702.777	-
Delta Prima Abadi	1.775.885.974	-
Ivo Mas Tunggal	1.769.535.345	-
Putera Gemilang	1.723.245.622	-
Godwin Austen Indonesia	1.599.785.600	-
PT Bintang Seroja	1.588.487.860	6.269.515.455
Perfecta Sarana Engineering	1.552.548.567	-
PT Cinovasi Rekaprima	1.552.032.000	-
Ramian R	1.542.475.000	-
Jet Marine Supplier	1.528.545.755	-
Diagonal Jaya Multikreasi	1.504.969.818	-
Bonafindo Consultant	1.442.887.000	1.172.126.211
PT Budi Putra Indonesia	1.383.869.912	2.641.041.363
Eka Jaya Sakti	1.365.251.410	-
New Sentosa	1.340.000.000	-
Bina Cipta Jaya Sejati	1.326.712.100	-
PT Arkindo	1.287.516.773	1.287.516.773
Havara Daya Sejahtera	1.274.587.500	-
Jaya Palugada Mas	1.246.288.350	-
PT Transforma Rekeyasa	1.236.515.700	-
Adela Raya	1.225.879.595	-
Sumatera Computer Centre	1.218.727.750	1.074.562.000
Lemotata Grahama	1.217.992.002	-
Srikandi Multi Mandiri	1.180.854.392	-
CV Khoda Medan	1.177.474.445	1.552.956.347
Citra Pramatra	1.149.827.273	-
PT Gada Jaya	1.142.659.564	1.741.611.421
PT Daya Radar Utama	1.135.550.200	14.687.118.000
Hadid Mulia	1.107.962.251	-
Koperasi UTPK Belawan	1.083.644.492	1.083.794.492
Hamparan Alam Baruna Indonesia	1.043.016.300	-
Atrya Swacipta/Dimensi Produccion	1.038.854.273	-
Algholib	1.004.331.301	-
PT Karya Karimun Mandiri	-	4.330.352.329
PT Emitraco Investama Mandiri	-	3.642.883.488
PT Haskoning Indonesia	-	1.100.261.317
PT Aryaguna Jaya	-	1.833.371.051
PT Rasya Utama	-	1.416.854.310
PT Abadi Tetap Jaya	-	1.101.674.545
PT Kurnia Samudra	-	1.250.938.424
PT Pahala Harapan Lestari	-	18.022.817.500

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

18. ACCRUES EXPENSES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Employee	21.366.147.356	105.846.004.559
Contributions to other parties	9.016.873.915	-
Materials	2.692.421.114	6.748.978.834
Rental	774.980.525	4.476.366.154
Office administration	735.928.520	1.499.981.346
Official travel	511.618.203	-
Examination and consultant	439.676.000	-
Insurances	365.401.321	15.748.801
Maintenance	121.877.035	1.190.724.113
Education and training	110.500.000	-
Health care of active employees	4.070.201	-
Partnerships	2.380.500	3.598.085.411
Sports and art	2.071.886	-
General	-	28.164.990.820
Others	467.455.228.125	14.839.349.865
Total	<u>503.599.174.701</u>	<u>166.380.229.903</u>

Other accrued costs in 2018 are mostly asset costs in construction at PT Prima Multi Terminal in the amount of Rp449.853.280.859, while in 2017, among others are concession fees for the implementation of the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 15 of 2015.

19. CURRENT PART OF REVENUE RECEIVED IN ADVANCE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Short-term income received	42.756.096.092	56.906.961.745
Deposit money	22.354.600.138	22.947.828.402
Down payment	9.201.376.083	31.021.746.446
Total	<u>74.312.072.313</u>	<u>110.876.536.593</u>

Received income in advance is a rental advance from a customer before port services are provided to customers. Most of the deposited money is a reimbursement of Article 23 Income Tax and contributions from pension funds, pensions, cooperatives and trade unions.

20. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Non-tax state income (PNBP)	2.512.518.492	873.165.919
Others	1.658.229.167	909.795.820
Total	<u>4.170.747.659</u>	<u>1.782.961.739</u>

PNBP debt comes from ship services and goods services in accordance with Government Regulation Number 15 of 2016 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenues that Apply to the Ministry of Transportation. Other short-term debt in 2018 comes from BPJS contributions, insurance, and other deposits.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Indo Traktor Utama	-	7.072.727.273
PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera	-	5.985.360.000
PT Astra Isuzu Medan	-	3.840.909.090
PT Dungo Reksa	-	3.297.640.364
PT Prima Teknik Husada	-	2.956.749.091
PT Multi Jaya Samudera	-	2.598.000.000
PT Sidomukti Lestari	-	1.960.227.932
PT Aman Arwita Maritime	-	1.126.620.544
PT Mandiri Teknik Utama Sejahtera	-	1.069.347.400
CV Bina Tekhnik	-	1.068.181.818
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	506.914.762.684	69.525.559.224
Sub Jumlah Pihak Ketiga	<u>1.434.443.784.474</u>	<u>800.916.485.096</u>
Jumlah	<u>1.775.158.580.008</u>	<u>1.432.472.580.129</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Rupiah	1.771.838.935.231	1.432.120.277.093
Dolar Amerika Serikat	3.319.644.777	352.303.036
Jumlah	<u>1.775.158.580.008</u>	<u>1.432.472.580.129</u>

Utang usaha pihak ketiga kepada Sennebogen Mechninenfabrik Gmbh pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp206.748.317.388 (Catatan 40), merupakan Pekerjaan Pengadaan Mobile Harbour Crane untuk 4 unit Cabang Belawan, 2 unit untuk Cabang Dumai dan 1 unit di Perawang.

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Adhi Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp82.937.812.373 merupakan utang atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor di Belawan.

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Waruna Nusa Sentana pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp100.083.423.212 (Catatan 40), merupakan pekerjaan pengadaan Kapal Tunda 2 x 2 sebanyak 1 unit di Cabang Batam, 1 unit Cabang Belawan dan 2 unit Cabang Tanjungbalai Karimun.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

21. SHORT-TERM BANK DEBT

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidiaries		
Third parties	-	-
Related parties		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	17.989.184.312	10.571.780.774
PT Bank Syariah Mandiri	3.000.000	-
Total	<u>17.992.184.312</u>	<u>10.571.780.774</u>

PT Bank Syariah Mandiri

Based on the credit line facility agreement Deed No. 1 Notary Egawati Siregar, S.H., in Medan on November 24, 2017, the Group received credit from PT Bank Mandiri Syariah with the following details:

- Credit limit/ceiling : Rp91.000.000.000 (ninety-one billion rupiahs)
- The intended use : Investment financing (LC Sublimit)
Purchase 2 units of Harbor Mobile Crane (HMC)
- Form of credit : Financing of the Modaraba Line Facility
- Time period : 27 November 2017 - 20 August 2025 (7 years 9 months)
- Interest rate : 8.50% per year
- Provision : 0,10%

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Based on the Credit Agreement Number 665 / MDC / PK-C3-2018 dated 12 October 2018 from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. subsidiaries receive credit facilities with the following details:

- Credit limit/ceiling : Rp6.000.000.000 (six billion rupiahs)
- The intended use : Additional working capital
- Time period : 12 October 2018 - 11 October 2019 (one year)
- Interest rate : 8.00% per year
- Provision : 0,10%

Debt to PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk amounting to Rp6.000.000.000 has been paid in January 2019.

Based on the credit agreement letter: 003 / MDC / PK-C3 / 2017 dated January 18, 2017 from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. The group receives credit with the following details:

- Credit limit/ceiling : Rp12.000.000.000 (twelve billion rupiahs)
- The intended use : Additional working capital
- Form of credit : Limited RC
- Time period : 8.75% per year (survey per 3 (three) months)
- Interest rate : 8.50% per year
- Credit collateral : 1. Bilyet deposit No. Series of BAO 0427601 on behalf of PT Prima Indonesia Logistics for Rp2.000.000.000 account no. 430431652.
2. Bilyet deposit No. Series PAB 0427607 on behalf of PT Prima Indonesia Logistics for Rp2.000.000.000 account no. 431520418.
3. Bilyet deposit No. Series of BAO 0427610 on behalf of PT Prima Indonesia Logistics for Rp7.000.000.000 account no. 431914719.
4. Bilyet deposit No. Series of BAO 0421217 on behalf of PT Prima

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****18. BEBAN AKRUAL**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pegawai	21.366.147.356	105.846.004.559
Kontribusi kepada pihak lain	9.016.873.915	-
Bahan	2.692.421.114	6.748.978.834
Sewa	774.980.525	4.476.366.154
Administrasi kantor	735.928.520	1.499.981.346
Perjalanan dinas	511.618.203	-
Pemeriksaan dan konsultan	439.676.000	-
Asuransi	365.401.321	15.748.801
Pemeliharaan	121.877.035	1.190.724.113
Pendidikan dan latihan	110.500.000	
Perawatan kesehatan pegawai aktif	4.070.201	
Kerja sama mitra usaha	2.380.500	3.598.085.411
Olah raga dan kesenian	2.071.886	
Umum	-	28.164.990.820
Lainnya	467.455.228.125	14.839.349.865
Jumlah Beban Akrua	<u>503.599.174.701</u>	<u>166.380.229.903</u>

Beban akrual - lainnya tahun 2018 sebagian besar merupakan biaya pekerjaan di PT Prima Multi Terminal sebesar Rp449.853.280.859 karena tagihan belum diterima oleh PT Prima Multi Terminal, sedangkan tahun 2017 antara lain merupakan fee konsesi atas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 tahun 2015.

19. BAGIAN LANCAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	42.756.096.092	56.906.961.745
Uang titipan	22.354.600.138	22.947.828.402
Uang panjar	9.201.376.083	31.021.746.446
Jumlah	<u>74.312.072.313</u>	<u>110.876.536.593</u>

Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka sewa dai pelanggan sebelum pelayanan jasa kepelabuhan diberikan kepada pelanggan. Uang titipan sebagian besar merupakan reimburse PPh pasal 23 dan iuran peserta taspen, pensiun, koperasi, dan serikat pekerja.

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.512.518.492	873.165.919
Lainnya	1.658.229.167	909.795.820
Jumlah	<u>4.170.747.659</u>	<u>1.782.961.739</u>

Utang PNBP bersumber dari jasa pelayanan kapal dan pelayanan barang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Utang jangka pendek lainnya tahun 2018 bersumber dari iuran BPJS, Asuransi, dan uang titipan lainnya.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Indonesia Logistics for Rp4.000.000.000 account no. 443659390.

Based on the mortgage agreement No.666 / MDC / GADAI / 2018 dated 12 October 2018 the guarantee for the loan becomes as follows:

- Credit collateral : 1. Bilyet deposit No. Series PAB 0427607 on behalf of PT Prima Indonesia Logistik in the amount of Rp2.293.586.579 Rec. 431520418.
- 2. Bilyet deposit No. Series PAB 0427610 on behalf of PT Prima Indonesia Logistik in the amount of Rp8.027.553.063 Rec. 431914719.
- 3. Bilyet deposit No. Series of BAO 0421217 on behalf of PT Prima Indonesia Logistics for Rp4.540.033.040 Rec. 443659390.
- 4. Bilyet deposit No. BAO Series 536377354 on behalf of PT Prima Indonesia Logistik in the amount of Rp2.147.712.042 Rec. 443659390.
- 5. Bilyet deposit No. BAO Series 0839853 on behalf of PT Prima Indonesia Logistik in the amount of Rp2.025.384.380.040 Rec. 718891219.

22. TAXATION**a. Prepaid Taxes**

	2018	2017
<u>Company</u>		
Income taxes article 23	2.322.008.215	93.141.124
VAT Input can be credited	53.421.018.452	-
VAT - Underpayment Tax Assessment Letter	128.790.000	-
Sub total Company	<u>55.871.816.667</u>	<u>93.141.124</u>
<u>Subsidiaries</u>		
VAT Input can be credited	145.362.626.540	49.588.430
VAT input cannot be credited	75.868.615.508	-
Sub total Subsidiaries	<u>221.231.242.048</u>	<u>49.588.430</u>
Total Prepaid Taxes	<u>277.103.058.715</u>	<u>142.729.554</u>

b. Utang pajak

	2018	2017
<u>Company</u>		
Income tax article 21	6.598.380.770	6.988.531.729
Income tax article 22	1.473.004.097	383.101.782
Income tax article 23	2.079.523.663	890.836.198
Income tax article 4 par (2)	143.720.923	3.447.767.460
Income tax article 25	667.274.086	16.858.997.730
Income tax article 26	9.447.710	-
Income tax article 29	33.941.327.354	16.149.137.052
Income tax article 15	59.838.401	-
VAT Out	16.872.844.953	-
VAT Input can be credited	8.845.674.671	167.788.639
VAT input cannot be credited	1.401.728.996	-
Sub total Company	<u>72.092.765.624</u>	<u>44.886.160.590</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

21. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	2018	2017
<u>Entitas Anak</u>		
Pihak Ketiga	-	-
Pihak Berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	17.989.184.312	10.571.780.774
PT Bank Syariah Mandiri	3.000.000	-
Jumlah Utang Bank	17.992.184.312	10.571.780.774

PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan perjanjian kredit *Line Facility* Akta No. 1 Notaris Egawati Siregar, SH di Medan tanggal 24 November 2017, Grup menerima kredit dari PT Bank Mandiri Syariah dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/*plafond* kredit : Rp91.000.000.000 (sembilan puluh satu miliar rupiah).
- Tujuan penggunaan : Pembiayaan investasi (*Sublimit LC*)
Pembelian 2 unit Harbour Mobile Crane (HMC)
- Bentuk kredit : Pembiayaan *Line Facility* Mudharabah
- Jangka waktu : 27 November 2017 – 20 Agustus 2025 (7 tahun 9 bulan)
- Suku bunga : 8,50% per tahun
- Provisi : 0,10%.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor 665/MDC/PK-C3-2018 tanggal 12 Oktober 2018 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. entitas anak mendapat fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/*plafond* kredit : Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- Tujuan penggunaan : Tambahan modal kerja.
- Jangka waktu : 12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2019 (satu tahun).
- Suku bunga : 8,00% per tahun.
- Provisi : 0,10%.

Utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp6.000.000.000 telah dilunasi pada bulan Januari 2019.

Berdasarkan surat perjanjian kredit noor: 003/MDC/PK-C3/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Grup menerima kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/*plafond* kredit : Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
- Tujuan penggunaan : Tambahan modal kerja.
- Bentuk kredit : RC Terbatas
- Jangka waktu : 18 Januari – 17 Januari 2019.
- Suku bunga : 8,75% per tahun (rivi per 3 (tiga) bulan).
- Agunan Kredit
 1. Bilyet deposito No. Seri PAB 0427601 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.000.000.000 Rek No. 430431652.
 2. Bilyet deposito No. Seri PAB 0427607 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.000.000.000 Rek No. 431520418.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

<u>Subsidiaries</u>		
Income tax article 21	789.695.530	1.167.107.324
Income tax article 22	26.526.057	-
Income tax article 23	23.463.054	74.945.110
Income tax article 4 par (2)	3.636.686.889	30.122.727
Income tax article 25	938.879.298	-
Income tax article 29	-	1.540.837.807
Input VAT can be credited	-	378.369.077
Sub total Subsidiaries	<u>5.415.250.828</u>	<u>3.191.382.045</u>
Total	<u>77.508.016.452</u>	<u>48.077.542.635</u>

c. Income Tax Expense

The reconciliation between income before income tax as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Company</u>		
Current tax	(284.490.617.500)	(253.790.009.250)
Deferred tax	<u>(13.849.114.073)</u>	<u>(4.690.686.890)</u>
Sub total Company	<u>(298.339.731.573)</u>	<u>(258.480.696.140)</u>
<u>Subsidiaries</u>		
Current tax	(9.400.316.675)	(5.155.326.264)
Deferred tax	<u>16.628.669.924</u>	<u>1.379.567.393</u>
Sub total Subsidiaries	<u>7.228.353.249</u>	<u>(3.775.758.871)</u>
<u>Consolidated</u>		
Current tax	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Deferred tax	<u>2.779.555.851</u>	<u>(3.311.119.496)</u>
Total	<u>(291.111.378.324)</u>	<u>(262.256.455.010)</u>

The reconciliation of profit before income tax for commercial purpose and profit before tax for fiscal

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Profit before income taxes	1.195.981.954.797	1.073.424.193.944
Less:		
Profit before income taxes - subsidiaries	12.090.658.474	(38.736.027.210)
Adjustment on consolidated elimination	<u>(877.067.982)</u>	<u>(3.321.938.940)</u>
	<u>1.184.768.364.305</u>	<u>1.031.366.227.794</u>
Temporary different:		
Provision for employee benefits	25.861.600.717	24.904.891.570
Allowance for doubtful accounts	31.598.182.033	7.612.157.277
Amortization expense	554.871.867	173.067.817
Depreciation expense	<u>(119.438.205.421)</u>	<u>(51.395.150.751)</u>
	<u>(61.423.550.803)</u>	<u>(18.705.034.087)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Bilyet deposito No. Seri PAB 0427610 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp7.000.000.000 Rek No. 431914719.
4. Bilyet deposito No. Seri PAB 0421217 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp4.000.000.000 Rek No. 443659390.

Berdasarkan surat perjanjian gadai No.666/MDC/GADAI/2018 tanggal 12 Oktober 2018 jaminan atas pinjaman menjadi sebagai berikut:

- Agunan Kredit
 1. Bilyet deposito No. Seri PAB 0427607 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.293.586.579 Rek No. 431520418.
 2. Bilyet deposito No. Seri PAB 0427610 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp8.027.553.063 Rek No. 431914719.
 3. Bilyet deposito No. Seri PAB 0421217 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp4.540.033.040 Rek No. 443659390.
 4. Bilyet deposito No. Seri PAB 536377354 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.147.712.042 Rek No. 443659390.
 5. Bilyet deposito No. Seri PAB 0839853 atas nama PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.025.384.380.040 Rek No. 718891219.

22. PERPAJAKAN**a. Pajak dibayar di muka**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
PPH Pasal 23	2.322.008.215	93.141.124
PPN masukan dapat dikreditkan	53.421.018.452	-
PPN - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	128.790.000	-
Sub Jumlah Perusahaan	<u>55.871.816.667</u>	<u>93.141.124</u>
<u>Entitas Anak</u>		
PPN masukan dapat dikreditkan	145.362.626.540	49.588.430
PPN masukan tidak dapat dikreditkan	75.868.615.508	-
Sub Jumlah Entitas Anak	<u>221.231.242.048</u>	<u>49.588.430</u>
Jumlah Pajak Dibayar di Muka	<u>277.103.058.715</u>	<u>142.729.554</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Permanent differences:		
Non Deductible expense	141.249.132.979	130.888.903.836
Income subject to final taxes	<u>(126.631.476.481)</u>	<u>(128.390.059.605)</u>
	14.617.656.498	2.498.844.231
Estimate taxable income	<u>1.137.962.470.000</u>	<u>1.015.160.037.938</u>
Estimated taxable income rounded	1.137.962.470.000	1.015.160.037.000
Tax rate	25%	25%
Current tax expense	<u>284.490.617.500</u>	<u>253.790.009.250</u>
Tax credit		
Income tax article 22	(3.401.403.000)	(8.155.918.150)
Income tax article 23	(4.787.470.790)	(31.940.981.288)
Income tax article 25	<u>(242.360.416.356)</u>	<u>(197.543.972.760)</u>
Total tax credit	<u>(250.549.290.146)</u>	<u>(237.640.872.198)</u>
Corporate income tax under (over) paid	<u>33.941.327.354</u>	<u>16.149.137.052</u>

The estimated corporate income tax for the year ended 31 December 2017 above is in accordance with the Annual Notice (SPT) reported by the Company to the tax office.

Calculation of taxable income (fiscal loss) for the year ended 31 December 2018 above is based on temporary calculations. This amount may differ from the taxable income reported in the annual corporate income tax return. The calculation of taxable income (fiscal loss) from the reconciliation above is the basis for filling in the Annual Income Tax Return.

Income tax charged/(credited) in connection with other comprehensive income during the year is as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Employee Benefits Expenses recognized in the DP4 Program	39.288.109.071	10.662.438.824
Employee Benefits / Income (recognized) at PPUKP	1.964.912.887	5.670.761.998
(Income) / Tax Expenses	<u>(10.313.255.489)</u>	<u>(4.083.300.205)</u>
Employee Benefits Expenses recognized in Comprehensive Income	<u>30.939.766.469</u>	<u>12.249.900.617</u>

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

Uraian	2018			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>L/R</u>	<u>Ekuitas</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Fixed assets and investment property	(108.975.134.424)	(29.859.551.355)	-	(138.834.685.779)
Intangible asset amortization	403.695.482	138.717.967	-	542.413.449
Allowance for doubtful debt	8.418.774.385	7.899.545.508	-	16.318.319.893
Employee benefits	48.722.010.855	7.972.173.808	10.313.255.490	67.007.440.153
Sub total	<u>(51.430.653.702)</u>	<u>(13.849.114.072)</u>	10.313.255.490	(54.966.512.285)
Subsidiaries				
Fiscal losses that have not been used	2.881.432.452	44.827.791.469	-	47.709.223.921
Sub total	<u>2.881.432.452</u>	<u>44.827.791.469</u>	-	47.709.223.921
Total	<u>(48.549.221.250)</u>	<u>30.978.677.397</u>	<u>10.313.255.490</u>	<u>(7.257.288.364)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****b. Utang Pajak**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
PPh Pasal 21	6.598.380.770	6.988.531.729
PPh Pasal 22	1.473.004.097	383.101.782
PPh Pasal 23	2.079.523.663	890.836.198
PPh Pasal 4 ayat (2)	143.720.923	3.447.767.460
PPh Pasal 25	667.274.086	16.858.997.730
PPh Pasal 26	9.447.710	-
PPh Pasal 29	33.941.327.354	16.149.137.052
PPh Pasal 15	59.838.401	-
PPN Keluaran	16.872.844.953	-
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	8.845.674.671	167.788.639
PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	1.401.728.996	-
Sub Jumlah Perusahaan	<u>72.092.765.624</u>	<u>44.886.160.590</u>
<u>Entitas Anak</u>		
PPh Pasal 21	789.695.530	1.167.107.324
PPh Pasal 22	26.526.057	-
PPh Pasal 23	23.463.054	74.945.110
PPh Pasal 4 ayat (2)	3.636.686.889	30.122.727
PPh Pasal 25	938.879.298	-
PPh Pasal 29	-	1.540.837.807
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	-	378.369.077
Sub Jumlah Entitas Anak	<u>5.415.250.828</u>	<u>3.191.382.045</u>
Jumlah Utang Pajak	<u>77.508.016.452</u>	<u>48.077.542.635</u>

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
Pajak kini	(284.490.617.500)	(253.790.009.250)
Pajak tangguhan	(13.849.114.073)	(4.690.686.890)
Sub Jumlah Perusahaan	<u>(298.339.731.573)</u>	<u>(258.480.696.140)</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak kini	(9.400.316.675)	(5.155.326.264)
Pajak tangguhan	16.628.669.924	1.379.567.393
Sub Jumlah Entitas Anak	<u>7.228.353.249</u>	<u>(3.775.758.871)</u>
<u>Konsolidasian</u>		
Pajak kini	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Pajak tangguhan	2.779.555.851	(3.311.119.496)
Jumlah Konsolidasian	<u>(291.111.378.324)</u>	<u>(262.256.455.010)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Uraian	2017			
	Saldo Awal	L/R	Ekuitas	Saldo Akhir
Fixed assets and investment property	(96.126.346.736)	(12.848.787.688)	-	(108.975.134.424)
Intangible asset amortization	360.428.528	43.266.954	-	403.695.482
Employee benefits	38.412.487.757	6.226.222.893	4.083.300.205	48.722.010.855
Allowance for doubtful debt	6.515.735.066	1.903.039.319	-	8.418.774.385
Employee benefits	14.428.368	(14.428.368)	-	-
Sub total	(50.823.267.017)	(4.690.686.890)	4.083.300.205	(51.430.653.702)
Subsidiaries				
Fiscal losses that have not been used	1.501.865.058	1.379.567.394	-	2.881.432.452
Sub total	1.501.865.058	1.379.567.394	-	2.881.432.452
Total	(49.321.401.959)	(3.311.119.496)	4.083.300.205	(48.549.221.250)

Deferred tax assets and liabilities are adjusted to the tax rates that apply to the period when the realized assets and liabilities are settled based on the tax rate determined.

e. Underpayment Tax Assessment Letter

In 2018 the Company completed the Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for the 2013 and 2014 tax periods received in 2017, namely:

No.	Tax Year	Tax Object	Branch	Letter No.	Underpayment
1	2013	PPN	Pusat	00012/287/13/093/17	58.432.559
2	2013	PPN	Pusat	00013/287/13/093/17	809.560
3	2013	PPN	Pusat	00014/287/13/093/17	7.576.524
4	2013	PPN	Pusat	00015/287/13/093/17	9.097.732
5	2013	PPN	Pusat	00016/287/13/093/17	26.240.400
6	2013	PPN	Pusat	00017/287/13/093/17	23.580.544
7	2013	PPN	Pusat	00018/287/13/093/17	4.460.569
8	2013	PPN	Pusat	00104/207/13/093/17	1.463.636
9	2013	PPN	Pusat	00105/207/13/093/17	849.150
10	2013	PPN	Pusat	00106/207/13/093/17	1.672.890
11	2013	PPN	Pusat	00107/207/13/093/17	4.286.092
12	2013	PPN	Pusat	00108/207/13/093/17	168.625.210
13	2013	PPN	Pusat	00109/207/13/093/17	30.215.200
14	2013	PPN	Pusat	00110/207/13/093/17	98.139.270
15	2013	PPN	Pusat	00111/207/13/093/17	157.569.666
16	2013	PPN	Pusat	00112/207/13/093/17	409.659.385
17	2013	PPN	Pusat	00113/207/13/093/17	554.328.248
18	2013	PPN	Pusat	00114/207/13/093/17	84.947.688
19	2014	PPN	Pusat	00068/207/14/093/17	159.571.434
20	2014	PPN	Pusat	00069/207/14/093/17	133.937.607
21	2014	PPN	Pusat	00070/207/14/093/17	86.926.625
22	2014	PPN	Pusat	00071/207/14/093/17	87.671.170
23	2014	PPN	Pusat	00072/207/14/093/17	61.027.784
24	2014	PPN	Pusat	00073/207/14/093/17	41.533.268
25	2014	PPN	Pusat	00074/207/14/093/17	59.423.807
26	2014	PPN	Pusat	00075/207/14/093/17	357.811.238
27	2014	PPN	Pusat	00076/207/14/093/17	79.091.915
28	2014	PPN	Pusat	00077/207/14/093/17	58.007.900

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
Laba sebelum pajak	1.195.981.954.797	1.073.424.193.944
Dikurangi:		
Laba sebelum pajak - entitas anak	12.090.658.474	(38.736.027.210)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	(877.067.982)	(3.321.938.940)
	<u>1.184.768.364.305</u>	<u>1.031.366.227.794</u>
 Beda temporer:		
Beban manfaat karyawan bersih	25.861.600.717	24.904.891.570
Penyisihan piutang usaha	31.598.182.033	7.612.157.277
Beban amortisasi	554.871.867	173.067.817
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	(119.438.205.421)	(51.395.150.751)
	<u>(61.423.550.803)</u>	<u>(18.705.034.087)</u>
 Beda tetap		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	141.249.132.979	130.888.903.836
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(126.631.476.481)	(128.390.059.605)
	<u>14.617.656.498</u>	<u>2.498.844.231</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>1.137.962.470.000</u>	<u>1.015.160.037.938</u>
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	1.137.962.470.000	1.015.160.037.000
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	<u>284.490.617.500</u>	<u>253.790.009.250</u>
Kredit pajak		
PPh Pasal 22	(3.401.403.000)	(8.155.918.150)
PPh Pasal 23	(4.787.470.790)	(31.940.981.288)
PPh Pasal 25	(242.360.416.356)	(197.543.972.760)
Jumlah Kredit Pajak	<u>(250.549.290.146)</u>	<u>(237.640.872.198)</u>
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	<u>33.941.327.354</u>	<u>16.149.137.052</u>

Estimasi pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada kantor pajak.

Perhitungan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut di atas didasarkan pada perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahunan. Perhitungan laba kena pajak (rugi fiskal) hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Pajak penghasilan yang dibebankan/(dikreditkan) sehubungan dengan pendapatan komprehensif lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Beban Imbalan Kerja yang diakui di Program DP4	39.288.109.071	10.662.438.824
Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di PPUKP	1.964.912.887	5.670.761.998
(Pendapatan)/Beban Pajak	<u>(10.313.255.489)</u>	<u>(4.083.300.205)</u>
Beban Imbalan Kerja yang diakui di Penghasilan Komprehensif	<u>30.939.766.469</u>	<u>12.249.900.617</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

No.	Tax Year	Tax Object	Branch	Letter No.	Underpayment
29	2014	PPN	Pusat	00078/207/14/093/17	129.430.958
30	2014	PPN	Pusat	00079/207/14/093/17	78.915.952
31	2013	PPH badan	Pusat	00011/206/13/093/17	10.543.250.640
32	2014	PPH badan	Pusat	00007/206/14/093/17	4.065.051.990
33	2013	PPH pasal 21	DPKB	00094/101/13/112/17	111.980
34	2013	PPH pasal 21	DPKB	00093/101/13/112/17	157.663
35	2013	PPH pasal 21	DPKB	00092/101/13/112/17	100.000
36	2014	PPH pasal 21	DPKB	00116/101/14/112/17	100.000
37	2014	PPH pasal 21	DPKB	00114/101/14/112/17	161.647
38	2014	PPH pasal 21	DPKB	00115/101/14/112/17	100.000
39	2013	PPH pasal 21	RSPM	00091/101/13/112/17	213.260
40	2013	PPH pasal 21	RSPM	00090/101/13/112/17	100.000
41	2014	PPH pasal 21	RSPM	00113/101/14/112/17	100.000
42	2013	PPH pasal 21	Batam	00036/101/13/215/17	100.000
43	2013	PPH pasal 21	Batam	00001/201/13/215/17	88.880.576
44	2013	PPH pasal 21	Batam	00035/101/13/215/17	300.000
45	2014	PPH pasal 21	Batam	00064/101/14/215/17	266.778
46	2014	PPH pasal 21	Batam	00001/201/14/215/17	37.414.326
47	2013	PPH pasal 21	TBK	00001/201/13/223/17	63.863.920
48	2014	PPH pasal 21	TBK	00001/201/14/223/17	45.130.237
49	2014	PPH pasal 21	TBK	00008/101/13/223/17	197.794
50	2013	PPH pasal 21	Pekanbaru	00003/201/13/218/17	49.452.004
51	2014	PPH pasal 21	Pekanbaru	00003/201/14/218/17	143.053.837
52	2014	PPH pasal 21	SBG	00015/101/14/126/17	400.000
53	2014	PPH pasal 21	SBG	00002/201/14/126/17	7.161.412
54	2014	PPH pasal 23	DPKB	00014/103/14/112/17	53.866
55	2014	PPH pasal 23	DPKB	00015/103/14/112/17	100.000
56	2013	PPH pasal 23	DPKB	00011/103/13/112/17	51.326
57	2013	PPH pasal 23	DPKB	00010/103/13/112/17	83.007
58	2013	PPH pasal 23	DPKB	00009/103/13/112/17	100.000
59	2013	PPH pasal 23	RSPM	00008/103/13/112/17	122.120
60	2014	PPH pasal 23	RSPM	00011/103/14/112/17	44.492
61	2014	PPH pasal 23	RSPM	00010/103/14/112/17	9.045
62	2014	PPH pasal 23	TPKDB	00012/103/14/112/17	100.000
63	2013	PPH pasal 23	Batam	00001/103/13/215/17	100.000
64	2013	PPH pasal 23	Batam	00001/203/13/215/17	11.288.676
65	2014	PPH pasal 23	Batam	00001/203/14/215/17	56.076.410
66	2013	PPH pasal 23	TBK	00001/203/13/223/17	447.872.451
67	2014	PPH pasal 23	TBK	00001/203/14/223/17	305.334.691
68	2013	PPH pasal 23	Pekanbaru	00014/203/13/218/17	3.936.440
69	2014	PPH pasal 23	Pekanbaru	00003/203/14/218/17	87.958.135
70	2014	PPH pasal 23	SBG	00002/103/14/126/17	200.000
71	2014	PPH pasal 23	SBG	00002/203/14/126/17	497.832
72	2014	PPH pasal 23	SBG	00003/203/14/126/17	583.019
73	2014	PPH pasal 23	SBG	00004/203/14/126/17	1.071.418
74	2014	PPH pasal 23	SBG	00005/203/14/126/17	2.045.412
75	2014	PPH pasal 23	SBG	00006/203/14/126/17	1.019.609
76	2014	PPH pasal 23	SBG	00007/203/14/126/17	1.020.083

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

Uraian	2018				
	Saldo Awal	L/R	Aset/(Liabilitas)	Ekuitas	Saldo Akhir
Aset Tetap dan Properti Investasi	(108.975.134.424)	(29.859.551.355)	-	-	(138.834.685.779)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	403.695.482	138.717.967	-	-	542.413.449
Cadangan Piutang	8.418.774.385	7.899.545.508	-	-	16.318.319.893
Imbalan Kerja	48.722.010.855	7.972.173.808	-	10.313.255.490	67.007.440.153
Sub Jumlah	(51.430.653.702)	(13.849.114.072)	-	10.313.255.490	(54.966.512.285)
Entitas Anak					
Kerugian fiskal yang belum digunakan	2.881.432.452	16.628.669.924	28.199.121.545	-	47.709.223.921
Sub Jumlah	2.881.432.452	16.628.669.924	28.199.121.545	-	47.709.223.921
Jumlah	(48.549.221.250)	2.779.555.852	28.199.121.545	10.313.255.490	(7.257.288.364)

Uraian	2017				
	Saldo Awal	L/R	Aset/(Liabilitas)	Ekuitas	Saldo Akhir
Aset Tetap dan Properti Investasi	(96.126.346.736)	(12.848.787.688)	-	-	(108.975.134.424)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	360.428.528	43.266.954	-	-	403.695.482
Imbalan kerja	38.412.487.757	6.226.222.893	-	4.083.300.205	48.722.010.855
Cadangan Piutang	6.515.735.066	1.903.039.319	-	-	8.418.774.385
Imbalan Kerja	14.428.368	(14.428.368)	-	-	-
Sub Jumlah	(50.823.267.017)	(4.690.686.890)	-	4.083.300.205	(51.430.653.702)
Entitas Anak					
Kerugian fiskal yang belum digunakan	1.501.865.058	1.379.567.394	-	-	2.881.432.452
Sub Jumlah	1.501.865.058	1.379.567.394	-	-	2.881.432.452
Jumlah	(49.321.401.959)	(3.311.119.496)	-	4.083.300.205	(48.549.221.250)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pada tahun 2018 Grup telah menyelesaikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 yang diterima pada tahun 2017, yaitu:

No.	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
1	2013	PPN	Pusat	00012/287/13/093/17	58.432.559
2	2013	PPN	Pusat	00013/287/13/093/17	809.560
3	2013	PPN	Pusat	00014/287/13/093/17	7.576.524
4	2013	PPN	Pusat	00015/287/13/093/17	9.097.732
5	2013	PPN	Pusat	00016/287/13/093/17	26.240.400
6	2013	PPN	Pusat	00017/287/13/093/17	23.580.544
7	2013	PPN	Pusat	00018/287/13/093/17	4.460.569
8	2013	PPN	Pusat	00104/207/13/093/17	1.463.636
9	2013	PPN	Pusat	00105/207/13/093/17	849.150
10	2013	PPN	Pusat	00106/207/13/093/17	1.672.890
11	2013	PPN	Pusat	00107/207/13/093/17	4.286.092
12	2013	PPN	Pusat	00108/207/13/093/17	168.625.210
13	2013	PPN	Pusat	00109/207/13/093/17	30.215.200
14	2013	PPN	Pusat	00110/207/13/093/17	98.139.270
15	2013	PPN	Pusat	00111/207/13/093/17	157.569.666

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

No.	Tax Year	Tax Object	Branch	Letter No.	Underpayment
77	2014	PPH pasal 23	SBG	00008/203/14/126/17	1.161.970
78	2014	PPH pasal 23	SBG	00009/203/14/126/17	1.195.133
79	2014	PPH pasal 23	SBG	00010/203/14/126/17	1.017.019
80	2014	PPH pasal 23	SBG	00011/203/14/126/17	2.559.750
81	2014	PPH pasal 23	SBG	00012/203/14/126/17	4.730.460
82	2014	PPH pasal 23	SBG	00013/203/14/126/17	364.017
83	2013	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00002/140/13/215/17	100.000
84	2013	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00003/140/13/215/17	100.000
85	2013	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00001/240/13/215/17	1.776.000
86	2013	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/13/215/17	5.476.000
87	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00010/140/14/215/17	100.000
88	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00011/140/14/215/17	100.000
89	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/14/215/17	1.776.000
90	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00012/140/14/215/17	100.000
91	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00013/140/14/215/17	100.000
92	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00014/140/14/215/17	100.000
93	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00003/240/14/215/17	7.104.000
94	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00004/240/14/215/17	5.476.000
95	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00005/240/14/215/17	1.776.000
96	2014	PPH pasal 4 ayat 2	Batam	00006/20/14/215/17	3.552.000
97	2013	PPH pasal 4 ayat 2	Pekanbaru	00002/240/13/218/17	8.894.402
98	2014	PPH pasal 4 ayat 2	SBG	00002/140/14/126/17	100.000
99	2013	PPH pasal 15	Batam	00001/141/13/215/17	100.000
100	2013	PPH pasal 15	Batam	00001/241/13/215/17	5.542.088
101	2014	PPH pasal 15	Batam	00001/141/14/215/17	100.000
102	2014	PPH pasal 15	Batam	00002/141/14/215/17	100.000
103	2014	PPH pasal 15	Batam	00001/241/14/215/17	11.632.914
104	2013	PPH pasal 15	TBK	00001/141/13/223/17	3.379.364
105	2014	PPH pasal 15	TBK	00001/141/14/223/17	565.069
				Jumlah	19.009.718.263

f. Administrasi perpajakan

Based on Indonesian tax regulations, the Company submits its own notification letter on the amount of tax owed. The Directorate General of Taxation can determine and amend tax obligations within a period of 5 years from the date the tax becomes due.

23. LONG-TERM DEBT BANKS

	2018	2017
Bank debt	3.539.720.219.181	379.883.016.545
Current portion of long-term liabilities	(175.000.140.000)	(52.883.016.545)
Long Term Debt Section	3.364.720.079.181	327.000.000.000

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
16	2013	PPN	Pusat	00112/207/13/093/17	409.659.385
17	2013	PPN	Pusat	00113/207/13/093/17	554.328.248
18	2013	PPN	Pusat	00114/207/13/093/17	84.947.688
19	2014	PPN	Pusat	00068/207/14/093/17	159.571.434
20	2014	PPN	Pusat	00069/207/14/093/17	133.937.607
21	2014	PPN	Pusat	00070/207/14/093/17	86.926.625
22	2014	PPN	Pusat	00071/207/14/093/17	87.671.170
23	2014	PPN	Pusat	00072/207/14/093/17	61.027.784
24	2014	PPN	Pusat	00073/207/14/093/17	41.533.268
25	2014	PPN	Pusat	00074/207/14/093/17	59.423.807
26	2014	PPN	Pusat	00075/207/14/093/17	357.811.238
27	2014	PPN	Pusat	00076/207/14/093/17	79.091.915
28	2014	PPN	Pusat	00077/207/14/093/17	58.007.900
29	2014	PPN	Pusat	00078/207/14/093/17	129.430.958
30	2014	PPN	Pusat	00079/207/14/093/17	78.915.952
31	2013	PPH badan	Pusat	00011/206/13/093/17	10.543.250.640
32	2014	PPH badan	Pusat	00007/206/14/093/17	4.065.051.990
33	2013	PPH pasal 21	DPKB	00094/101/13/112/17	111.980
34	2013	PPH pasal 21	DPKB	00093/101/13/112/17	157.663
35	2013	PPH pasal 21	DPKB	00092/101/13/112/17	100.000
36	2014	PPH pasal 21	DPKB	00116/101/14/112/17	100.000
37	2014	PPH pasal 21	DPKB	00114/101/14/112/17	161.647
38	2014	PPH pasal 21	DPKB	00115/101/14/112/17	100.000
39	2013	PPH pasal 21	RSPM	00091/101/13/112/17	213.260
40	2013	PPH pasal 21	RSPM	00090/101/13/112/17	100.000
41	2014	PPH pasal 21	RSPM	00113/101/14/112/17	100.000
42	2013	PPH pasal 21	Batam	00036/101/13/215/17	100.000
43	2013	PPH pasal 21	Batam	00001/201/13/215/17	88.880.576
44	2013	PPH pasal 21	Batam	00035/101/13/215/17	300.000
45	2014	PPH pasal 21	Batam	00064/101/14/215/17	266.778
46	2014	PPH pasal 21	Batam	00001/201/14/215/17	37.414.326
47	2013	PPH pasal 21	TBK	00001/201/13/223/17	63.863.920
48	2014	PPH pasal 21	TBK	00001/201/14/223/17	45.130.237
49	2014	PPH pasal 21	TBK	00008/101/13/223/17	197.794
50	2013	PPH pasal 21	Pekanbaru	00003/201/13/218/17	49.452.004
51	2014	PPH pasal 21	Pekanbaru	00003/201/14/218/17	143.053.837
52	2014	PPH pasal 21	SBG	00015/101/14/126/17	400.000
53	2014	PPH pasal 21	SBG	00002/201/14/126/17	7.161.412
54	2014	PPH pasal 23	DPKB	00014/103/14/112/17	53.866
55	2014	PPH pasal 23	DPKB	00015/103/14/112/17	100.000
56	2013	PPH pasal 23	DPKB	00011/103/13/112/17	51.326
57	2013	PPH pasal 23	DPKB	00010/103/13/112/17	83.007
58	2013	PPH pasal 23	DPKB	00009/103/13/112/17	100.000
59	2013	PPH pasal 23	RSPM	00008/103/13/112/17	122.120
60	2014	PPH pasal 23	RSPM	00011/103/14/112/17	44.492
61	2014	PPH pasal 23	RSPM	00010/103/14/112/17	9.045
62	2014	PPH pasal 23	TPKDB	00012/103/14/112/17	100.000
63	2013	PPH pasal 23	Batam	00001/103/13/215/17	100.000

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Details of long-term bank loans as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Company</u>		
Third parties	-	-
Related parties		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	350.000.000.000	156.583.056.564
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	350.000.000.000	114.299.959.981
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	350.000.000.000	109.000.000.000
Sub total Company	<u>1.050.000.000.000</u>	<u>379.883.016.545</u>
<u>Subsidiaries</u>		
Third parties	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.318.780.191.060	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	585.470.014.061	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	585.470.014.060	-
Sub total Subsidiaries	<u>2.489.720.219.181</u>	<u>-</u>
Total Long Term Debt Bank	<u>3.539.720.219.181</u>	<u>379.883.016.545</u>

The details of the current portion of long-term liabilities are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Company</u>		
Third parties	-	-
Related parties		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	58.333.380.000	47.583.056.564
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	58.333.380.000	5.299.959.981
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	58.333.380.000	-
Total current portion of long-term liabilities	<u>175.000.140.000</u>	<u>52.883.016.545</u>

Company**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

In accordance with the Credit Agreement Deed No. 29 dated August 25, 2011, the Company obtained investment credit facilities in the form of R/C and Credit Overeenkomst (OC) loans with a ceiling of Rp400.000.000.000. These investment loans are used to finance the construction of port facilities, ships and port facilities. The credit period is seven years, starting from the signing of the credit agreement, including a grace period of twelve months. The credit agreement was signed on August 25, 2011 and ended on August 24, 2018. The interest rate applied for this credit facility is 9.5% p.a.

Guarantees for these credit facilities are as follows:

- Four units of 2 x 1,600 HP tugs located in Belawan and Dumai ports with fiduciary guarantee value of Rp160.781.000.000.
- Two fast-pavement units located in Tanjungpinang and Tanjungbalai Karimun with a fiduciary guarantee value of Rp35.000.000.000.
- Two Wheel Loader units located in Belawan with a fiduciary guarantee value of Rp5.000.000.000.
- One unit of fuel oil tanker truck located in Belawan International Container Terminal with a fiduciary guarantee value of Rp499.000.000.
- One forklift unit located in the Belawan Shipyard Unit with a capacity of 2.5 tons with a fiduciary guarantee value of Rp405.000.000.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
64	2013	PPh pasal 23	Batam	00001/203/13/215/17	11.288.676
65	2014	PPh pasal 23	Batam	00001/203/14/215/17	56.076.410
66	2013	PPh pasal 23	TBK	00001/203/13/223/17	447.872.451
67	2014	PPh pasal 23	TBK	00001/203/14/223/17	305.334.691
68	2013	PPh pasal 23	Pekanbaru	00014/203/13/218/17	3.936.440
69	2014	PPh pasal 23	Pekanbaru	00003/203/14/218/17	87.958.135
70	2014	PPh pasal 23	SBG	00002/103/14/126/17	200.000
71	2014	PPh pasal 23	SBG	00002/203/14/126/17	497.832
72	2014	PPh pasal 23	SBG	00003/203/14/126/17	583.019
73	2014	PPh pasal 23	SBG	00004/203/14/126/17	1.071.418
74	2014	PPh pasal 23	SBG	00005/203/14/126/17	2.045.412
75	2014	PPh pasal 23	SBG	00006/203/14/126/17	1.019.609
76	2014	PPh pasal 23	SBG	00007/203/14/126/17	1.020.083
77	2014	PPh pasal 23	SBG	00008/203/14/126/17	1.161.970
78	2014	PPh pasal 23	SBG	00009/203/14/126/17	1.195.133
79	2014	PPh pasal 23	SBG	00010/203/14/126/17	1.017.019
80	2014	PPh pasal 23	SBG	00011/203/14/126/17	2.559.750
81	2014	PPh pasal 23	SBG	00012/203/14/126/17	4.730.460
82	2014	PPh pasal 23	SBG	00013/203/14/126/17	364.017
83	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/140/13/215/17	100.000
84	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00003/140/13/215/17	100.000
85	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00001/240/13/215/17	1.776.000
86	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/13/215/17	5.476.000
87	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00010/140/14/215/17	100.000
88	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00011/140/14/215/17	100.000
89	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/14/215/17	1.776.000
90	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00012/140/14/215/17	100.000
91	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00013/140/14/215/17	100.000
92	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00014/140/14/215/17	100.000
93	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00003/240/14/215/17	7.104.000
94	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00004/240/14/215/17	5.476.000
95	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00005/240/14/215/17	1.776.000
96	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00006/20/14/215/17	3.552.000
97	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Pekanbaru	00002/240/13/218/17	8.894.402
98	2014	PPh pasal 4 ayat 2	SBG	00002/140/14/126/17	100.000
99	2013	PPh pasal 15	Batam	00001/141/13/215/17	100.000
100	2013	PPh pasal 15	Batam	00001/241/13/215/17	5.542.088
101	2014	PPh pasal 15	Batam	00001/141/14/215/17	100.000
102	2014	PPh pasal 15	Batam	00002/141/14/215/17	100.000
103	2014	PPh pasal 15	Batam	00001/241/14/215/17	11.632.914
104	2013	PPh pasal 15	TBK	00001/141/13/223/17	3.379.364
105	2014	PPh pasal 15	TBK	00001/141/14/223/17	565.069
				Jumlah	18.951.285.704

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- One unit of mobile generator set capacity of 1.250 KVA located in Tanjungpinang with a fiduciary guarantee value of Rp7.585.000.000.
- Pier with a length of 100 m (meters) in Belawan International Container Terminal (BICT) with a fiduciary guarantee value of Rp42.625.000.000.
- Two 4.000 m (meters) warehouse units in Dumai with a fiduciary guarantee value of Rp19.982.000.
- Extension of Pier B is 400 m (meters) in Dumai Port with a fiduciary guarantee value of Rp143.566.000.000.
- The workshop building is 640 m in the Belawan Logistic Center with a fiduciary guarantee value of Rp2.310.000.000.
- One 2.725 KVA generator set unit, transformer and installation located in Belawan Port with an insurance value of Rp12.000.000.000.
- One 1.825 KVA generator set, transformer and installation located in Belawan Port with an insurance value of Rp15.000.000.000.
- One mobile generator set unit located in Dumai Port with a fiduciary guarantee value of Rp8.000.000.000.
- Bulk Terminal Conveyor System located in Dumai Port with a fiduciary guarantee value of Rp39.483.000.000.

While still receiving credit facilities from the bank, without written approval from the bank, the Company is not permitted: asking to be declared bankrupt, transferring/surrendering to other parties partially or wholly for rights and obligations arising from the credit agreement, binding themselves as guarantor/guarantor of debt/pledging the Company's assets to other parties, obtaining new credit facilities from banks/financial institutions/other third parties except the maximum debt to equity ratio of 210% is still overlapped (the Company simply provides a notification letter), rents out assets that are collateral for credit facilities to third parties (except for business operations).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

In accordance with the Credit Agreement Deed No. 12 dated April 5, 2011, the Company obtained an investment credit facility with a limit of Rp126.000.000.000. In addition to investment credit facilities, the Company also obtains a Non-Cash Loan credit facility in the form of a Letter of Credit (L/C) or Domestic Letter of Credit with a limit of Rp126.000.000.000. The credit facility is used to finance the procurement of port facilities. The credit period is up to December 31, 2018. The interest rate applied for this credit facility is 9.5% p.a.

Guarantees for credit facilities are all equipment of port facilities whose acquisition is financed using this credit facility with a guarantee value of Rp126.500.000.000.

As long as they still receive credit facilities from the Bank, without written approval from the bank, the Company is not permitted: use credit facilities other than the intended purpose, obtain new loans of any kind from banks or other creditors, provide new loans to anyone including the Company's business group except if the loan is given in the context of trade transactions that are directly related to the Company's business, binding themselves as guarantor/guarantor of debt to other parties and/or pledging the Company's assets that have been pledged to other parties, transferring collateral except according to its transferable nature (billing, merchandise) provided that the Company must replace the collateral with goods of the same type and/or with equal value and can be burdened with collateral. sell or transfer in any way or release part or all of the Company's assets that can affect the implementation of the Company's obligations to the bank, request bankruptcy or delay payment of debt, conduct transactions with other people or parties, including but not limited to affiliated companies, outside the practice - fair trade practices and make purchases lower than market prices or sell below market prices.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

f. Administrasi perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

23. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utang bank	3.539.720.219.181	379.883.016.545
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	<u>(175.000.140.000)</u>	<u>(52.883.016.545)</u>
Bagian Utang Jangka Panjang	<u>3.364.720.079.181</u>	<u>327.000.000.000</u>

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
Pihak Ketiga	-	-
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	350.000.000.000	156.583.056.564
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	350.000.000.000	114.299.959.981
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	<u>350.000.000.000</u>	<u>109.000.000.000</u>
Sub Jumlah	<u>1.050.000.000.000</u>	<u>379.883.016.545</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pihak Ketiga	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.318.780.191.060	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	585.470.014.061	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	585.470.014.060	-
Sub Jumlah	<u>2.489.720.219.181</u>	<u>-</u>
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	<u>3.539.720.219.181</u>	<u>379.883.016.545</u>

Rincian bagian lancar liabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
Pihak Ketiga	-	-
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	58.333.380.000	47.583.056.564
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	58.333.380.000	5.299.959.981
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	<u>58.333.380.000</u>	<u>-</u>
Sub Jumlah	<u>175.000.140.000</u>	<u>52.883.016.545</u>
Jumlah Bag. Lancar Liabilitas Jk. Panjang	<u>175.000.140.000</u>	<u>52.883.016.545</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

The financial ratio that must be maintained by the Company is a maximum leverage ratio of 250%, a minimum current ratio of 110% and a minimum debt service coverage ratio of 110%. The company has fulfilled all the required ratios.

Syndicated Credit of Bank Mandiri, BNI and BRI

In accordance with the Deed of Syndicated Credit Agreement No. 28 dated December 21, 2017, the Company obtained a syndicated credit facility with a limit of Rp1.050.000.000.000.

Credit limit:

Each Syndicated Credit participates in each credit facility withdrawal in an amount in accordance with the agreed proportion of the total Commitments of all Syndicated Creditors, as follows:

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp350.000.000.000 (three hundred fifty billion rupiahs).
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp350.000.000.000 (three hundred fifty billion rupiah).
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp350.000.000.000 (three hundred fifty billion rupiahs).

Time period:

A maximum of 7 years from the date of signing the Agreement, including the grace period.

As long as they still receive credit facilities from banks, without written approval from the bank, the Company is not permitted to make changes in business fields that can generate material benefits (unless required by applicable legislation), merge or consolidate with other companies (unless required by Law - applicable laws), make changes to legal entities, divert / surrender to other parties in whole or in part to the rights and obligations of the credit facility, bind themselves as guarantor or guarantor of debt or guarantee the Company's assets including subsidiaries to the parties other, submit a bankruptcy application or request for postponement of debt obligations to the competent authority, obtain a credit or loan facility from another bank or creditor, except for borrowing in the context of a reasonable business transaction or in the event that the required financial ratio credit facility is still fulfilled, the Company notifies in writing to the Syndicated Bank through the agent no later than five days after obtaining the credit / loan facility.

The financial ratio that must be maintained by the Company is the current ratio greater than or equal to 1.1 times, the debt service coverage ratio is greater or equal to 1.25 times, and the debt to equity ratio is smaller or equal to 2.1 times. The company has fulfilled all the required ratios.

Based on Syndicated Credit Agreement No. 02 signed on December 13, 2018 before a Notary Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Hum., M.Kn., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. syndicated as a Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB) to finance the investment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2018 in the amount of Rp1.300.000.000.000 (one trillion three hundred billion rupiahs)

Credit limit:

Each Syndicated Credit participates in each credit Facility withdrawal in an amount in accordance with the agreed proportion of the total Commitments of all Syndicated Creditors, as follows:

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp440.000.000.000 (four hundred forty billion rupiahs).

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Agustus 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dalam bentuk krecit R/C dan *Credit Overeenkomst* (OC) dengan plafon sebesar Rp400.000.000.000. Kredit investasi tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan bangunan fasilitas pelabuhan, kapal dan alat- alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit selama tujuh tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit, termasuk *grace period* selama dua belas bulan. Perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- Empat unit Kapal Tunda 2 x 1.600 HP yang terletak di Pelabuhan Belawan dan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp160.781.000.000.
- Dua unit kapal pandu cepat yang terletak di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp35.000.000.000.
- Dua unit *Wheel Loader* yang terletak di Belawan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp5.000.000.000.
- Satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) yang terletak di Belawan *International Container Terminal* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp499.000.000.
- Satu unit *forklift* yang terletak di Unit Galangan Kapal Belawan kapasitas 2,5 ton dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp405.000.000.
- Satu unit *mobile generator set* kapasitas 1.250 KVA yang terletak di Tanjung Pinang dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp7.585.000.000.
- Dermaga dengan panjang 100 m (meter) di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp42.625.000.000.
- Dua unit gudang seluas 4.000 m (meter) di Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp19.982.000.
- Perpanjangann Dermaga B sepanjang 400 m (meter) di Pelabuhan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp143.566.000.000.
- Gedung *workshop* seluas 640 m yang berlokasi di Belawan *Logistic Centre* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp2.310.000.000.
- Satu unit *generator set* kapasitas 2.725 KVA, trafo dan instalasi yang berlokasi di Pelabuhan Belawan dengan nilai penjaminan idusia sebesar Rp12.000.000.000.
- Satu unit *generator set* kapasitas 1.825 KVA, trafo dan instalasi yang berlokasi di Pelabuhan Belawan dengan nilai penjaminan idusia sebesar Rp15.000.000.000.
- Satu unit *mobiel generator set* yang terletak di Pelabuahn Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp8.000.000.000.
- *Conveyor System* Terminal Curah yang terletak di Pelabuhan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp39.483.000.000.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan: meminta untuk dinyatakan pailit, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan atas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, memperoleh fasilitas kredit baru dari bank/lembaga keuangan/pihak ketiga lainnya kecuali *debt to equity ratio* maksimal sebesar 210% masih terpebuhi (Perusahaan cukup dengan memberikan surat pemberitahuan), menyewakan aset-aset yang menjadi jaminan fasilitas kredit kepada pihak ketiga (kecuali untuk operasional usaha).

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp430.000.000.000 (four hundred thirty billion rupiahs).
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. with a total commitment of Rp430.000.000.000 (four hundred thirty billion rupiahs).

This credit facility is an affiliated credit facility (declining) and non-revolving.

Type of credit:

Investment credit to finance:

- a. Physical investment (except investment in land and for subsidiaries).
- b. Non-physical in the form of developing a Capital Expenditure system in accordance with the 2018 RKAP, both carried out in 2018 and which is being scrutinized to 2019 and beyond that has been financed by a syndicated credit facility in 2017 provided that the multi-year project investment is for the settlement is not more than 2 years.

Time period:

A maximum of 7 years from the date of signing the Agreement, including the grace period.

Credit withdrawal:

Only can be done on the basis of reimbursement, unless the Group wishes to withdraw Credit Facility on the basis of a payment plan, the Group is obliged to submit a request for a change of mechanism for approval by the Syndicated Creditors.

The maximum withdrawal is 69.26% from:

- a. Physical investment (except investment in land and for subsidiaries).
- b. Non-physical in the form of system development, except for carry over in 2018 which is financed by the 2017 syndication, as evidenced by contracts / purchase orders or other documents approved by the Syndicated Creditors.

Limitation of financial ratios required for each bank loan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. : Current ratio; 100%, DSCR: 110%, Leverage ratio: 250%

PT BNI (Persero) Tbk : Current ratio: 100%, Debt Equity Ratio: 220%, DSCR: 100%,
Days Receivable: 60 days

PT BRI (Persero) Tbk : Debt Equity Ratio: 210%

Subsidiaries**Syndicated Credit BNI, BRI, Mandiri**

Based on Syndicated Credit Agreement No. 61 signed on March 29, 2016 before Notary Ariani Laksmijati Rachim, S.H., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., And PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. establish a financing syndication for the Terminal Multi-Purpose (TMP) Project in the form of an investment credit facility of up to 70% of the Group approved project costs, as follows:

Credit limit:

Maximum Rp2.194.278.000.000 (two trillion one hundred ninety-four billion two hundred seventy-eight million), with details as follows:

1. Tranche I non-revolving investment credit facility in Rupiah with a maximum amount of Rp1.353.912.000.000.
2. Tranche II revolving investment credit facility in the form of Non-Cash Loans in Rupiah with a maximum amount of Rp607.725.000.000.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 5 April 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp126.000.000.000. Selain fasilitas kredit investasi, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas kredit Non Cash Loan berupa Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan limit sebesar Rp126.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a..

Jaminan atas fasilitas kredit adalah seluruh alat-alat fasilitas pelabuhan yang perolehannya dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit ini dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.500.000.000.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan: menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan yang telah ditentukan, memperoleh pinjaman baru dalam bentuk apapun dari bank atau kreditur lainnya, memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada group usaha Perusahaan kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Perusahaan, mengikat diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, memindahtangankan agunan kecuali menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan) dengan ketentuan Perusahaan harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan jaminan, menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada bank, meminta untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang, melakukan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, diluar praktek-praktek kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih rendah daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.

Rasio keuangan yang wajib dijaga oleh Perusahaan adalah leverage ratio maksimal 250%, current ratio minimal 110% dan debt service coverage ratio minimal 110%. Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

Kredit Sindikasi Bank Mandiri, BNI, dan BRI

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 21 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dengan limit sebesar Rp1.050.000.000.000.

Limit kredit:

Masing-masing Kredit Sindikasi berpartisipasi dalam setiap penarikan Fasilitas kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi yang disepakati dari total Komitmen seluruh Kreditur Sindikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Jangka waktu:

Maksimal 7 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, termasuk masa tenggang.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

3. IDC credit facilities in Rupiah with a maximum amount of Rp232.641.000.000.

With each proportion:

No.	Syndicate	Credit limit			Total
		Tranche I	Tranche II	Tranche IDC	
1.	PT BNI, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
2.	PT BRI, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
3.	PT Bank Mandiri, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
	Total	1,353.912.000.000	607.725.000.000	232.641.000.000	2.194.278.000.000

Type of credit:

- a. Tranche I Investment Credit Facility
Used to finance a maximum of 70% of the costs of planning, construction and development (excluding land costs, non-physical operations and overhead) Multy Purpose Terminal.
- b. Tranche II Investment Credit Facility
Used for financing a maximum of 70% of the cost of purchasing Port Facility equipment.
- c. Tranche IDC Investment Credit Facility
Used to finance 70% of investment credit interest during the construction period including the initial operating period of 6 months, but not exceeding the period of supply.

Time period:

A maximum of 10 years from the date of signing the Agreement, including the grace period.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Based on investment credit agreement Number CRO.KP/016/KI/11 dated 02 February 2011, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. provide a Letter of Credit (L/C)/Domestic Credit Letter (SKBDN) facility to the Company with the following details:

- Credit limit / credit : USD39.000.000 (thirty nine million US dollars) including a maximum LC/SKBDN facility sub-limit of USD35.000.000 (thirty-five million US dollars).
- Type of credit : Investment Credit (KI) with LC/SKBDN sublimites.
- Purpose : To refinancing and or financing the purchase of Belawan International Container Terminal (BICT) machines/tools.
- Type of facility / ceiling : Import LC/SKBDN.
- Time period : 7 (seven) years from the date of signing the credit agreement including the credit withdrawal period until the end of the first quarter of 2012.
- Credit withdrawal : Credit withdrawal by reimbursing equipment / machinery for port facilities purchased by the Company with a composition of 80% financing (Investment Credit): 20% (Self Financing) accompanied by original invoice.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan perubahan bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat yang material (kecuali dipersyaratkan oleh Perundang-undangan yang berlaku), melakukan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain (kecuali dipersyaratkan oleh Perundang-undangan yang berlaku), melakukan perubahan bentuk badan hukum, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan atas hak dan kewajiban yang timbul dari pemberian fasilitas kredit, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan termasuk entitas anak kepada pihak lain, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban utang kepada instansi berwenang, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau kreditur lain, kecuali pinjam meminjam dalam rangka transaksi usaha yang wajar atau dalam hal setelah memperoleh fasilitas kredit rasio keuangan yang dipersyaratkan masih terpenuhi, maka Perusahaan cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank Sindikasi melalui agen selambatnya lima hari sejak memperoleh fasilitas kredit/pinjaman tersebut.

Rasio keuangan yang wajib dijaga oleh Perusahaan adalah *current ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali, *debt service coverage ratio* lebih besar atau sama dengan 1,25 kali, dan *debt to equity ratio* lebih kecil atau sama dengan 2,1 kali. Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 02 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2018 di hadapan Notaris Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Hum., M.Kn., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. secara sindikasi bertindak sebagai *Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB)* untuk membiayai investasi PT Pelindo I (Persero) tahun 2018 sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah)

Limit kredit:

Masing-masing Kredit Sindikasi berpartisipasi dalam setiap penarikan Fasilitas kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi yang disepakati dari total Komitmen seluruh Kreditur Sindikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp440.000.000.000 (empat ratus empat puluh miliar rupiah).
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar rupiah).
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan total komitmen Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar rupiah).

Fasilitas kredit ini merupakan fasilitas kredit yang bersifat *aflopend* (menurun) dan *non revolving*.

Jenis kredit:

Kredit investasi untuk membiayai:

- a. Investasi fisik (kecuali investasi atas tanah dan atas anak perusahaan)
- b. Non fisik berupa pengembangan system *Capital Expenditure* sesuai dengan RKAP tahun 2018, baik yang dilaksanakan pada tahun 2018 maupun yang *dicarry over* ke tahun 2019 dan diluar yang telah dibiayai oleh fasilitas kredit sindikasi pada tahun 2017 dengan ketentuan bahwa pembiayaan atas investasi proyek *multi years* adalah untuk yang penyelesaiannya tidak lebih dari 2 tahun.

Jangka waktu:

Maksimal 7 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, termasuk masa tenggang.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Credit withdrawals for the purchase/procurement of port facilities/machines that use LC/SKBDN with the following conditions:

- LC/SKBDN payments are made during the credit withdrawal period up to the end of the first quarter of 2012.
 - Funds for Investment Credit facilities up to a maximum of 80% and minimum Company Funds (Self Financing) of 20%.
 - Submit documents on the progress of supervision of project implementation signed by supervisory/third party consultants and the Company.
 - If the LC/SKBDN is issued in a currency different from the credit facility's currency, the Company will convert into LC/SKBDN currency at the exchange rate prevailing at the Bank at the time of the transaction..
- Credit collateral : Collateral in the form of machinery/equipment of port facilities which are financed with Investment Credit facilities with a minimum Fiduciary binding value of Rp360.000.000.000 (three hundred sixty billion rupiahs) or total fixed assets collateral value which is bound to cover a minimum of 100% of the total credit facility.

All collateral items that have been submitted must be bound according to the provisions of the applicable legislation. Insurable collateral is insured with Banker's clause of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. through an insurance company partner PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. all costs incurred are borne by the Company.

Based on the credit agreement Number CRO.KP/089/KI/11 dated April 5, 2011 and No. CRO.KP/090/KI/11 dated April 5, 2011, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. offer additional credit facilities to the Company with the following details:

- Credit limit / credit : USD21.000.000 (twenty one million US dollars).
: Rp126.000.000.000 (one hundred twenty six billion rupiah).
- Type of credit : Investment Credit.
- Purpose : To finance the procurement of port facilities on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) including its port branch.
- Type of facility / ceiling : Import LC/SKBDN.
- Time period : 8 (eight) years from the date of signing of the credit agreement or the maximum up to December 31, 2018 including the grace period for payment of the principal installments and the credit withdrawal period at the end of the fourth quarter of 2012.
- Interest rate : USD = 4,00% p.a. (paid every quarter).

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penarikan kredit:

Hanya dapat dilakukan atas dasar *reimburse*, kecuali Grup ingin melakukan Penarikan Fasilitas Kredit atas dasar rencana pembayaran, Grup wajib mengajukan permohonan perubahan mekanisme untuk mendapat persetujuan Kreditur Sindikasi.

Maksimal penarikan adalah sebesar 69,26% dari:

- Investasi fisik (kecuali investasi atas tanah dan atas anak perusahaan).
- Non fisik berupa pengembangan system, kecuali *carry over* tahun 2018 yang dibiayai oleh sindikasi tahun 2017, yang dibuktikan dengan kontrak/*purchase order* atau dokumen lain yang disetujui oleh Kreditur Sindikasi.

Batasan rasio keuangan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pinjaman bank:

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. : *Current ratio*: 100%, *DSCR*: 110%, *Leverage Ratio*: 250%

Bank BNI (Persero), Tbk. : *Current ratio*: 100%, *Debt Equity Ratio*: 220%, *DSCR*: 100%,
Days Receivable: 60 hari

Bank BRI (Persero), Tbk. : *Debt Equity Ratio*: 210%

Entitas Anak

Kredit Sindikasi BNI, BRI, Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 61 yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2016 di hadapan Notaris Ariani Laksmijati Rachim, S.H., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. membentuk sindikasi pembiayaan Proyek Terminal Multi Purpose (TMP) berupa fasilitas kredit investasi maksimal 70% dari *project cost* yang disetujui Grup, sebagai berikut:

Limit kredit:

Maksimum Rp2.194.278.000.000 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas kredit investasi Tranche I non-revolving dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.353.912.000.000.
- Fasilitas kredit investasi Tranche II revolving dalam bentuk Non Cash Loan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimal sebesar Rp607.725.000.000.
- Fasilitas kredit IDC dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimal Rp232.641.000.000

Dengan proporsi masing-masing:

No.	Sindikasi	Limit kredit			Total
		Tranche I	Tranche II	Tranche IDC	
1.	PT BNI, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
2.	PT BRI, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
3.	PT Bank Mandiri, Tbk	451.304.000.000	202.575.000.000	77.547.000.000	731.426.000.000
	Total	1,353.912.000.000	607.725.000.000	232.641.000.000	2.194.278.000.000

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- : Rp = 9,50% p.a. (paid every quarter).
- Provisi kredit : 0,25% (paid at the time of withdrawal of credit).
 - Agunan kredit : USD = Collateral in the form of port equipment financed by an Investment Credit facility with a minimum fiduciary binding value of USD21.500.000 and or Equivalent Rupiah or the total value of fixed assets collateral tied to cover a minimum of 100% of the total credit facility.
- Rp = Collateral in the form of port equipment financed by an Investment Credit facility with a minimum fiduciary binding value of Rp126.500.000.000 and / or the total collateral value of fixed assets which covers a minimum of 100% of the total credit facility.

24. BONDS PAYABLE

	2018	2017
Nominal		
Bond principal debt	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Unamortized emissions costs	(2.568.300.789)	(3.398.782.545)
Sub total	997.431.699.211	996.601.217.455
Parts that are due in one year	50.000.000.000	-
Total Bonds Payable	947.431.699.211	996.601.217.455
Rincian obligasi per seri:		
	2018	2017
Series A		
Bond principal debt series A	50.000.000.000	50.000.000.000
Unamortized emissions costs	(38.704.227)	(116.112.699)
Sub total	49.961.295.773	49.883.887.301
Parts that are due in one year	50.000.000.000	-
Total Bonds Payable Series A	(38.704.227)	49.883.887.301
Series B		
Bond principal debt series B	500.000.000.000	500.000.000.000
Unamortized emissions costs	(1.161.126.316)	(1.625.576.820)
Sub total	498.838.873.684	498.374.423.180
Parts that are due in one year	-	-
Total Bonds Payable Series B	498.838.873.684	498.374.423.180

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis kredit:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Tranche I
Digunakan untuk membiayai maksimum 70% dari biaya perencanaan, pembangunan dan pengembangan (di luar biaya tanah, pra operasi non fisik dan overhead) Terminal Multi Purpose.
- b. Fasilitas Kredit Investasi Tranche II
Digunakan untuk pembiayaan maksimum 70% dari biaya pembelian peralatan Fasilitas Pelabuhan.
- c. Fasilitas Kredit Investasi Tranche IDC
Digunakan untuk membiayai 70% bunga kredit investasi selama masa konstruksi termasuk masa awal operasi selama 6 bulan, namun tidak melebihi jangka waktu penyediaan.

Jangka Waktu:

Maksimal 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, termasuk masa tenggang

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit investasi Nomor CRO.KP/016/KI/11 tanggal 02 Pebruari 2011, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Grup dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/*plafond* kredit : USD 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta US dollar) termasuk sub limit fasilitas L/C / SKBDN maksimum sebesar USD 35.000.000 (tiga puluh lima juta dolar Amerika Serikat).
- Jenis kredit : Kredit Investasi (KI) dengan sub limit L/C / SKBDN.
- Tujuan : Untuk *refinancing* dan atau membiayai pembelian mesin / alat-alat fasilitas Belawan International Container Terminal (BICT).
- Jenis fasilitas/*plafond* : LC Impor / SKBDN.
- Jangka waktu : 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk di dalamnya masa penarikan kredit sampai dengan akhir triwulan I tahun 2012.
- Penarikan kredit : Penarikan kredit dengan cara *reimburse* atas alat-alat / mesin fasilitas pelabuhan yang telah dibeli Grup dengan komposisi pembiayaan 80% (Kredit Investasi) : 20% (*Self Financing*) dengan disertai *invoice* asli. Penarikan kredit untuk pembelian / pengadaan mesin / alat-alat fasilitas pelabuhan yang menggunakan L/C / SKBDN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran L/C / SKBDN dilakukan selama masa penarikan kredit sampai dengan maksimal akhir triwulan I tahun 2012.
 - Dana fasilitas Kredit Investasi maksimal sebesar 80% dan dana Perusahaan (*Self Financing*) minimal sebesar 20%.
 - Menyerahkan dokumen progres pengawasan pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh konsultan pengawas / pihak ketiga dan Perusahaan.
 - Jika L/C / SKBDN diterbitkan dalam valuta berbeda dengan valuta fasilitas kredit, Perusahaan akan melakukan konversi menjadi valuta L/C / SKBDN dengan kurs yang berlaku di Bank pada saat pelaksanaan transaksi.
- Agunan kred : Agunan berupa mesin/ alat-alat fasilitas pelabuhan yang di biayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan Fidusia minimal sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Series C		
Bond principal debt series C	400.000.000.000	400.000.000.000
Unamortized emissions costs	<u>(1.194.301.330)</u>	<u>(1.459.701.606)</u>
Sub total	398.805.698.670	398.540.298.394
Parts that are due in one year	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Bonds Payable Series C	<u>398.805.698.670</u>	<u>398.540.298.394</u>
Series D		
Bond principal debt series D	50.000.000.000	50.000.000.000
Unamortized emissions costs	<u>(174.168.916)</u>	<u>(197.391.420)</u>
Sub total	49.825.831.084	49.802.608.580
Parts that are due in one year	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Bonds Payable Series D	<u>49.825.831.084</u>	<u>49.802.608.580</u>
Total Bonds Payable	<u>947.431.699.211</u>	<u>996.601.217.455</u>

Pelindo 1 Gerbang Nusantara Bond I 2016 is issued scrippless and is guaranteed in full commitment consisting of 4 (four) series, as follows:

Series A : Bonds with an interest rate of 8.25% (eight point twenty five percent) per year with a period of 3 (three) years from the date of issuance. The principal amount of Series A bonds offered is Rp50.000.000.000 (fifty billion Rupiah) in full commitment. Payment of Series A bonds will be made in full (bullet payment) in the amount of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Series A bonds on the principal repayment date, namely on June 21, 2019.

Series B : Bonds with an interest rate of 9% (nine percent) per year with a period of 5 (five) years from the date of issuance. The principal amount of the Series B bonds offered is Rp500.000.000.000 (five hundred billion Rupiah) in full commitment. Payment of Series B bonds will be made in full (bullet payment) in the amount of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Series B bonds on the principal repayment date, namely on June 21, 2021.

Series C : Bonds with an interest rate of 9.25% (nine point twenty five percent) per year with a period of 7 (seven) years from the date of issuance. The principal amount of Series C bonds offered is Rp400.000.000.000 (four hundred billion Rupiah) in full commitment. Payment of Series C bonds will be made in full (bullet payment) in the amount of 100% (one hundred percent) of the principal amount of Series C bonds on the principal repayment date, namely on June 21, 2023.

Series D : Bonds with an interest rate of 9.5% (nine point five percent) per year with a tenor of 10 (ten) years from the date of issuance. The principal amount of Series D bonds offered is Rp50.000.000.000 (fifty billion Rupiah) in full commitment. Payment of Series D bonds will be made in full (bullet payment) in the amount of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Series D bonds on the principal repayment date, namely on June 21, 2026.

Bond interest is paid every 3 (three) months in accordance with the bond interest payment date in question. Payment of the first bond interest will be made on September 21, 2016, while the final bond

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Atas seluruh barang agunan yang telah diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Agunan yang *Insurable* diasuransikan dengan *Banker's clause* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. melalui Perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Seluruh biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian kredit Nomor CRO.KP/089/KI/11 tanggal 05 April 2011 dan Nomor CRO.KP/090/KI/11 tanggal 05 April 2011, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. memberikan penawaran tambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/*plafond* kredit : USD 21.000.000 (dua puluh satu juta US dollar).
: Rp126.000.000.000 (seratus dua puluh enam miliar rupiah).
- Jenis kredit : Kredit Investasi.
- Tujuan : Untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) termasuk cabang pelabuhannya.
- Jenis fasilitas/*plafond* : LC Impor / SKBDN.
- Jangka waktu : 8 (delapan) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau maksimum sampai dengan 31 Desember 2018 termasuk masa tenggang pembayaran angsuran pokok dan masa penarikan kredit s.d akhir triwulan IV 2012.
- Suku bunga : USD = 4,00% p.a. (dibayar setiap triwulan).
: Rp = 9,50% p.a. (dibayar setiap triwulan).
- Provisi kredit : 0,25% (dibayar pada saat penarikan kredit).
- Agunan kredit : USD = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal USD21.500.000 dan atau *Equivalent* Rupiah atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.
Rp = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal Rp126.500.000.000 dan atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mencakup minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

interest payment as well as the maturity of each series of bonds is on June 21, 2019 for Series A bonds, June 21, 2021 for Series B bonds, June 21, 2023 for Series bonds C, and June 21, 2026 for Series D bonds. The bullet payment is due at maturity.

All bonds are sold at face value and are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with PT Bank Tabungan Negara Tbk. as trustee.

These bonds are not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all the company's assets, both movable and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the Criminal Code. The rights of bondholders are pari passu without preferential rights with the creditor rights of other issuers both now and in the future, except for the company's creditors' rights which are specifically guaranteed with the assets of the existing and future companies.

In the context of the issuance of these bonds, the Company has obtained a rating on long-term bonds (bonds) from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") and PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") with ratings: AA (idn)/idAA (Double A).

These bonds are issued scripless, except for the jumbo certificate of bonds issued to be registered in the name of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as proof of debt for the benefit of bondholders. These bonds are registered in the name of KSEI for the benefit of account holders in KSEI, which are subsequently for the interest of bondholders and are registered on the date the Company's jumbo bond certificate is submitted to KSEI. Proof of bond ownership for bondholders is written confirmation issued by KSEI, Securities Company or Custodian Bank.

The Company can Buy Back bonds, can be addressed as repayment or deposited for later resale at market prices, the implementation of bond buybacks is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, the buyback of new bonds can be done 1 (one) year after the allotment date as stated in the prospectus.

25. EMPLOYEE BENEFITS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Employee benefit liability - DP4 Program	51.886.817.377	14.581.553.626
Employee benefit liability - PPUKP	210.345.252.947	180.306.489.791
Total	<u>262.232.070.324</u>	<u>194.888.043.417</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Employee benefit expense - DP4 Program	2.233.457.195	1.587.059.055
(Income) / Employee benefit expense - PPUKP	29.655.238.037	27.542.876.208
Total	<u>31.888.695.232</u>	<u>29.129.935.263</u>

a. Defined Benefit Pension Fund Program

The Defined Benefit Pension Fund Program is managed by the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4) whose deed of establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-248 / KM.6 / 2002 dated October 21, 2002. DP4 is a pension fund established by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with founding partners of

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****24. UTANG OBLIGASI**

	2018	2017
Nilai Nominal		
Utang pokok obligasi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(2.568.300.789)	(3.398.782.545)
Sub Jumlah	997.431.699.211	996.601.217.455
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	50.000.000.000	-
Jumlah Utang Obligasi	<u>947.431.699.211</u>	<u>996.601.217.455</u>
Rincian obligasi per seri:		
	2018	2017
Seri A		
Utang pokok obligasi seri A	50.000.000.000	50.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(38.704.227)	(116.112.699)
Sub Jumlah	49.961.295.773	49.883.887.301
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	50.000.000.000	-
Jumlah Obligasi Seri A	<u>(38.704.227)</u>	<u>49.883.887.301</u>
Seri B		
Utang pokok obligasi seri B	500.000.000.000	500.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.161.126.316)	(1.625.576.820)
Sub Jumlah	498.838.873.684	498.374.423.180
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri B	<u>498.838.873.684</u>	<u>498.374.423.180</u>
Seri C		
Utang pokok obligasi seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.194.301.330)	(1.459.701.606)
Sub Jumlah	398.805.698.670	398.540.298.394
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri C	<u>398.805.698.670</u>	<u>398.540.298.394</u>
Seri D		
Utang pokok obligasi seri D	50.000.000.000	50.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(174.168.916)	(197.391.420)
Sub Jumlah	49.825.831.084	49.802.608.580
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri D	<u>49.825.831.084</u>	<u>49.802.608.580</u>
Jumlah Utang Obligasi	<u>947.431.699.211</u>	<u>996.601.217.455</u>

Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 4 (empat) seri, sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pengerukan Indonesia (Persero).

Calculation of pension expenses and pension fund benefit assets as of December 31, 2018 and 2017 uses figures calculated by Actuary PT Bestama Actuarial through its report Number 18008 / PEL-1 / EP / 01/2019 dated January 7, 2019 and Number 17003 / PEL-1 / EP / 01/2018 dated January 5, 2018.

Reconcile the initial and final balances of the present value of the defined benefit obligation

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
The present value of the defined benefit obligation at the beginning of the year	179.497.652.818	178.784.182.718
Interest expenses	11.456.023.969	13.462.696.732
Current service fees	1.802.045.841	1.710.650.343
Payment of employee benefits	(22.861.541.196)	(22.711.597.479)
(Gain) / actuarial loss - assumption	(3.320.977.359)	2.737.101.154
(Gains) / actuarial losses - liabilities	5.705.838.158	5.514.619.350
The present value of the defined benefit obligation at the end of the year	<u>172.279.042.231</u>	<u>179.497.652.818</u>

Reconcile the initial and final balances of program assets

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Early period program assets	164.916.099.192	173.041.797.778
Results of real development	(26.338.423.529)	10.680.382.268
Payment of contributions - employers	4.216.302.515	3.410.329.193
Payment of contributions - program participants	459.787.872	495.187.432
Payment of employee benefits	(22.861.541.196)	(22.711.597.479)
End of period program assets - actual	<u>120.392.224.854</u>	<u>164.916.099.192</u>

Liabilities recognized in the statement of financial position

Determination of deficit / (surplus)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Determination of deficit / (surplus)		
The present value of the defined benefit obligation at the end of the period	172.279.042.231	179.497.652.818
End of period program assets - actual	(120.392.224.854)	(164.916.099.192)
Deficit / (surplus)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*). Pembayaran obligasi Seri A akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri A pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2019.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*). Pembayaran obligasi Seri B akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri B pada tanggal pelunasan obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2021.
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*). Pembayaran obligasi Seri C akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri C pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2023.
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi. Jumlah pokok obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*). Pembayaran obligasi Seri D akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri D pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2026.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 21 September 2016 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada tanggal 21 Juni 2019 untuk obligasi Seri A, tanggal 21 Juni 2021 untuk obligasi Seri B, tanggal 21 Juni 2023 untuk obligasi Seri C, dan tanggal 21 Juni 2026 untuk obligasi Seri D. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk. sebagai wali amanat.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Grup telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") dan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat: AA(idn) / idAA (Double A).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Employee benefit liability

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Determination of deficit / (surplus)		
The present value of the defined benefit obligation at the end of the period	172.279.042.231	179.497.652.818
End of period program assets - actual	<u>(120.392.224.854)</u>	<u>(164.916.099.192)</u>
Deficit / (surplus)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
The present value of the defined benefit obligation at the end of the period	172.279.042.231	179.497.652.818
Fair value of program assets	<u>(120.392.224.854)</u>	<u>(164.916.099.192)</u>
Deficit / (surplus)	51.886.817.377	14.581.553.626
Limit on assets	-	-
Liabilities / (assets)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

Expenses recognized in profit or loss

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Current service fees	1.802.045.841	1.710.650.343
Net interest expense	891.199.226	371.596.144
Contribution of participants	<u>(459.787.872)</u>	<u>(495.187.432)</u>
Total	<u>2.233.457.195</u>	<u>1.587.059.055</u>

Change in net liability

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Net liability at the beginning of the year	14.581.553.626	5.742.384.940
Definite compensation costs	2.233.457.195	1.587.059.055
Re-measurement of defined benefits	39.288.109.071	10.662.438.824
Payment of employee benefits by the entity	-	-
Payment of current year contributions	<u>(4.216.302.515)</u>	<u>(3.410.329.193)</u>
Year-end net liability	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) obligasi, dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	2018	2017
Liabilitas imbalan kerja - Program DP4	51.886.817.377	14.581.553.626
Liabilitas imbalan kerja - PPUKP	210.345.252.946	180.306.489.791
Jumlah	262.232.070.323	194.888.043.417
	2018	2017
Beban imbalan kerja - Program DP4	2.425.914.689	1.587.059.055
(Pendapatan)/Beban imbalan kerja - PPUKP	29.655.238.037	27.542.876.208
Jumlah	32.081.152.726	29.129.935.263

a. Program Dana Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero).

Perhitungan beban pensiun dan aset manfaat dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuaria melalui laporannya dengan Nomor 18008/PEL-1/EP/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Nomor 17003/PEL-1/EP/01/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti

	2018	2017
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun	179.497.652.818	178.784.182.718
Biaya bunga	11.456.023.969	13.462.696.732
Biaya jasa kini	1.802.045.841	1.710.650.343
Pembayaran imbalan kerja	(22.861.541.196)	(22.711.597.479)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - asumsi	(3.320.977.359)	2.737.101.154
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - kewajiban	5.705.838.158	5.514.619.350
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir tahun	172.279.042.231	179.497.652.818

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
The number of measurements returned early in the year	26.318.097.920	15.655.659.096
Actuarial gains	2.384.860.799	8.251.720.504
Returns on program assets	36.903.248.272	2.410.718.320
Changes to the impact of assets outside of net interest	-	-
The number of measurements returned in the current year	<u>39.288.109.071</u>	<u>10.662.438.824</u>
Year-end net liability	<u>65.606.206.991</u>	<u>26.318.097.920</u>

Actuarial Assumption

Actuarial calculations for defined benefit costs, adhere to the principle of the present value of the amount of payments for benefits due to retirement, compensation for death and compensation for disability. Calculation of present value is obtained from the use of actuarial assumptions. Not only based on the interest rate but also based on the increase in the PhDP, the rate of death, disability and resignation. The calculation of all the factors referred to is commonly called actuarial cash value.

The Actuarial Calculation method used is the Projected Unit Credit method, as required by PSAK 24. The Projected Unit Credit method is used in accordance with the provisions required in paragraph 67 of the Statement of Financial Accounting Standards number 24 regarding employee benefits. The actuarial calculation using this method is to allocate each unit of employee benefits into the period of work that may be undertaken until retirement.

The actuarial assumptions used to calculate the present value of the defined benefit liability for 2018 are as follows:

	<u>Assumption</u>
Discount rate	8,40%
PhDP increase rate	4,00%
Mortality table	<i>The 1949 Annuity Mortality Table (Modified)</i>
Defect rate	1.00% of the mortality rate
Rate of resignation	1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age

b. Definite Rewards After Other Work

In addition to the above retirement program, the Company has a Severance Compensation Pension Program (PPUKP) managed by the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Financial Institution Pension Fund, the benefits of PPUKP can be compensated for all of the Company's obligations to its employees in complying with Labor Law No 13/2003 when employees enter retirement age or employees related to cases of Termination of Employment Relationship (PHK), insofar as provided for in the Collective Labor Agreement (PKB) or Company Regulations.

Other employee benefit costs as of December 31, 2018 and 2017 use figures calculated by Actuary PT Bestama Actuarial through its report Number 18008 / PEL-1 / EP / 01/2019 dated January 7, 2019 and Number 17003 / PEL-1 / EP / 01 / 2018 dated January 2, 2018.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aset program awal periode	164.916.099.192	173.041.797.778
Hasil pengembangan riil	(26.338.423.529)	10.680.382.268
Pembayaran iuran - pemberi kerja	4.216.302.515	3.410.329.193
Pembayaran iuran - peserta program	459.787.872	495.187.432
Pembayaran imbalan kerja	(22.861.541.196)	(22.711.597.479)
Aset program akhir periode - aktual	<u>120.392.224.854</u>	<u>164.916.099.192</u>

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan

Penentuan defisit/(surplus)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Penentuan defisit/(surplus)		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode	172.279.042.231	179.497.652.818
Aset program akhir periode - aktual	(120.392.224.854)	(164.916.099.192)
Defisit/(Surplus)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

Liabilitas imbalan kerja

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Penentuan defisit/(surplus)		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode	172.279.042.231	179.497.652.818
Aset program akhir periode - aktual	(120.392.224.854)	(164.916.099.192)
Defisit/(Surplus)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	172.279.042.231	179.497.652.818
Nilai wajar aset program	(120.392.224.854)	(164.916.099.192)
Defisit/(Surplus)	51.886.817.377	14.581.553.626
Batas atas aset	-	-
Liabilitas/(aset)	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

Beban yang diakui di laba rugi

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Biaya jasa kini	1.802.045.841	1.710.650.343
Beban bunga neto	891.199.226	371.596.144
luran peserta	(459.787.872)	(495.187.432)
Jumlah	<u>2.233.457.195</u>	<u>1.587.059.055</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Reconcile the initial and final balances of the present value of the defined benefit obligation

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
The present value of the defined benefit obligation at the beginning of the year	220.214.637.152	208.813.049.620
Interest rate	16.802.697.967	17.631.020.714
Current service fees	15.228.222.333	14.245.309.921
Curtailment	-	-
Past service costs	-	-
Payment of employee benefits	(25.527.640.250)	(21.847.671.634)
(Gain) / actuarial loss - assumption	(7.872.858.129)	(3.305.697.991)
(Gains) / actuarial losses - liabilities	8.284.272.505	4.618.964.432
The present value of the defined benefit obligation at the end of the year	<u>227.129.331.578</u>	<u>220.154.975.062</u>

Reconcile the initial and final balances of program assets

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Early period program assets	39.848.485.271	60.905.483.535
Results of real development	652.441.610	(24.041.130)
Payment of employee benefits	(23.716.848.250)	(21.032.957.134)
End of period program assets - actual	<u>16.784.078.631</u>	<u>39.848.485.271</u>

Liabilities recognized in the statement of financial position

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Present value of defined benefit obligation	227.129.331.578	220.154.975.062
Fair value of program assets	(16.784.078.631)	(39.848.485.271)
Deficit/(surplus)	<u>210.345.252.947</u>	<u>180.306.489.791</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Present value of defined benefit obligation	226.899.927.346	220.154.975.062
Fair value of program assets	(16.784.078.631)	(39.848.485.271)
Deficit/(surplus)	210.115.848.715	180.306.489.791
Limit on assets	-	-
Liabilities / (Assets)	<u>210.115.848.715</u>	<u>180.306.489.791</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan liabilitas bersih

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Liabilitas bersih awal tahun	14.581.553.626	5.742.384.940
Biaya imbalan pasti	2.233.457.195	1.587.059.055
Pengukuran kembali imbalan pasti	39.288.109.071	10.662.438.824
Pembayaran imbalan kerja oleh entitas	-	-
Pembayaran iuran tahun berjalan	<u>(4.216.302.515)</u>	<u>(3.410.329.193)</u>
Liabilitas bersih akhir tahun	<u>51.886.817.377</u>	<u>14.581.553.626</u>

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	26.318.097.920	15.655.659.096
Keuntungan aktuarial	2.384.860.799	8.251.720.504
Imbal hasil atas aset program	36.903.248.272	2.410.718.320
Perubahan atas dampak aset di luar bunga neto	-	-
Jumlah pengukuran kembali tahun berjalan	<u>39.288.109.071</u>	<u>10.662.438.824</u>
Liabilitas bersih akhir tahun	<u>65.606.206.991</u>	<u>26.318.097.920</u>

Asumsi Aktuarial

Perhitungan Aktuarial untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuarial. Tidak hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan PhDP, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuarial.

Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan adalah metode *Projected Unit Credit*, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24. Metode *Projected Unit Credit* digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuarial dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja ke dalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan untuk perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>Asumsi</u>
Tingkat diskonto	8,40%
Tingkat kenaikan PhDP	4,00%
Tabel mortalitas	<i>The 1949 Annuity Mortality Table (Modified)</i>
Tingkat cacat	1,00% dari tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Amount of expense recognized in profit or loss

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Current service fees	15.046.889.161	14.245.309.921
Net interest expense	14.608.348.876	13.297.566.287
Curtailment	-	-
Past service costs	-	-
Total	<u>29.655.238.037</u>	<u>27.542.876.208</u>

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
The number of measurements returned early in the year	89.420.383.267	83.749.621.269
Actuarial losses / (profits)	434.129.728	1.313.266.441
Returns on program assets	1.530.783.159	4.357.495.557
Changes to the impact of assets outside of net interest	-	-
Year-end net liability	<u>91.385.296.154</u>	<u>89.420.383.267</u>

Change in net liability

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Net liability at the beginning of the year	180.306.489.791	147.907.566.085
Definite compensation costs	31.620.150.924	33.213.638.206
Payment of employee benefits by the entity	(1.810.792.000)	(814.714.500)
Payment of current year contributions	-	-
Year-end net liability	<u>210.115.848.715</u>	<u>180.306.489.791</u>

Actuarial Assumption

Actuarial calculations for defined benefit costs, adhere to the principle of the present value of the amount of payments for benefits due to retirement, compensation for death and compensation for disability. Calculation of present value is obtained from the use of actuarial assumptions. Not only based on interest rates but also based on wage increases, death rates, disability and resignation. The calculation of all the factors referred to is commonly called actuarial cash value.

The Actuarial Calculation method used is the Projected Unit Credit method, as required by PSAK 24. The Projected Unit Credit method is used in accordance with the provisions required in paragraph 67 of the Statement of Financial Accounting Standards number 24 regarding employee benefits. The actuarial calculation using this method is to allocate each unit of employee benefits into the period of work that may be undertaken until retirement.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Imbalan Pasti Pasca Kerja Lainnya

Selain program pensiun di atas, Perusahaan memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, manfaat PPUKP dapat dikompensasikan terhadap semua kewajiban Perusahaan kepada karyawannya dalam memenuhi ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 pada saat karyawan memasuki usia pensiun maupun karyawan yang terkait dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.

Beban imbalan kerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuaria melalui laporannya dengan Nomor 18008/PEL-1/EP/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Nomor 17003/PEL-1/EP/01/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan pasti

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pembayaran imbalan kerja		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun	220.214.637.152	208.813.049.620
Biaya bunga	16.802.697.967	17.631.020.714
Biaya jasa kini	15.228.222.333	14.245.309.921
Kurtailmen	-	-
Biaya jasa lalu	-	-
Pembayaran imbalan kerja	(25.527.640.251)	(21.847.671.634)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - asumsi	(7.872.858.129)	(3.305.697.991)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - kewajiban	8.284.272.505	4.618.964.432
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir tahun	<u>227.129.331.577</u>	<u>220.154.975.062</u>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aset program awal periode	39.848.485.271	60.905.483.535
Hasil pengembangan riil	652.441.610	(24.041.130)
Pembayaran imbalan kerja	(23.716.848.250)	(21.032.957.134)
Aset program akhir periode - aktual	<u>16.784.078.631</u>	<u>39.848.485.271</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

The actuarial assumptions used for calculating the pension expense and pension benefit assets for 2018 are as follows:

	Assumption
Discount rate	8,60%
PhDP increase rate	6,00%
Mortality table	Indonesian Mortality Table in 2011
Defect rate	1.00% of the mortality rate
Rate of resignation	1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age

Amount, time and uncertainty of future cash flows

- i. Sensitivity analysis based on changes in discount rates

Present Value of Defined Benefit Obligations		Movement
218.093.573.342	0,50%	-3,88%
236.343.045.464	-0,50%	4,16%

- ii. The benefit analysis is due and the present value of the defined benefit obligation

Present Value of Defined Benefit Obligations	Benefits of Maturity	Year to
16.643.207.836	17.539.051.067	< 1
15.762.767.264	18.734.315.287	1 - < 2
14.133.031.897	19.146.274.499	2 - < 3
7.568.717.783	11.706.927.814	3 - < 4
14.186.030.707	24.553.380.851	4 - < 5
158.606.171.859	1.681.021.464.006	>= 5

26. REVENUE RECEIVED IN LONG-TERM ADVANCE

	2018	2017
Prepaid income	276.940.288.373	266.631.705.829
Less parts are due in one year	42.756.096.092	56.906.961.745
Long-term Income Received	234.184.192.281	209.724.744.084

27. CAPITAL STOCK

The amount of capital that has been placed and fully paid up by the shareholders as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

Year 2018	Shares	Nominal	Percentage
Government of the Republic of Indonesia	1.700.000	1.000.000	100,00%
	1.700.000	1.000.000	100,00%

Based on Deed No. 1, on August 15, 2008 by Agus Sudiono Kuntjoro, SH, Notary in Bekasi, the Articles of Association of the Company were amended by increasing the Company's authorized capital from

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	227.129.331.577	220.154.975.062
Nilai wajar aset program	(16.784.078.631)	(39.848.485.271)
Defisit/(surplus)	<u>210.345.252.946</u>	<u>180.306.489.791</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	226.899.927.346	220.154.975.062
Nilai wajar aset program	(16.784.078.631)	(39.848.485.271)
Defisit/(surplus)	210.115.848.715	180.306.489.791
Batas atas aset	-	-
Liabilitas / (Aset)	<u>210.115.848.715</u>	<u>180.306.489.791</u>

Jumlah beban yang diakui di laba rugi

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Biaya jasa kini	15.046.889.161	14.245.309.921
Beban bunga neto	14.608.348.876	13.297.566.287
Kurtailmen	-	-
Biaya jasa lalu	-	-
Jumlah	<u>29.655.238.037</u>	<u>27.542.876.208</u>

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	89.420.383.267	83.749.621.269
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	434.129.728	1.313.266.441
Imbal hasil atas aset program	1.530.783.159	4.357.495.557
Perubahan atas dampak aset di luar bunga neto	-	-
Liabilitas bersih akhir tahun	<u>91.385.296.154</u>	<u>89.420.383.267</u>

Perubahan liabilitas bersih

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Liabilitas bersih awal tahun	180.306.489.791	147.907.566.085
Biaya imbalan pasti	31.620.150.924	33.213.638.206
Pembayaran imbalan kerja oleh entitas	(1.810.792.000)	(814.714.500)
Pembayaran iuran tahun berjalan	-	-
Liabilitas bersih akhir tahun	<u>210.115.848.715</u>	<u>180.306.489.791</u>

Asumsi Aktuarial

Perhitungan Aktuarial untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuarial. Tidak hanya

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Rp1.248.000.000.000 divided into 1.248.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share to Rp1.800.000.000.000 which is divided into 1.800.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share.

Increased paid-in capital of the Company in accordance with Deed No.1 dated 15 August 2008 Notary Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., from Rp312.000.000.000 to Rp455.059.000.000 by issuing shares in portfolio a total of 143.059 shares or Rp143.059.000.000 which are all taken part by the State of the Republic of Indonesia. Amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-85564.AH.01.02 of 2008 dated November 13, 2008.

Based on Deed No. 88 dated August 16, 2012 issued by Notary Rahmad Nauli Siregar, S.H., the Articles of Association of the Company were amended by an increase in paid-in capital of the Company from Rp455.059.000.000 divided into 455.059 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share to Rp511.960.000.000 which is divided into 511,960 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share, consisting of:

- a. Rp455.059.000.000 is a capital deposit in accordance with Deed number 1 dated August 15, 2008 made by Notary Agus Sudiono Kuntjoro.
- b. As much as Rp48.167.600.000 is the State Capital Participation (PMN) according to PP No. 79 of 2011.
- c. As much as Rp85.000 is the Company's capitalization until the 2011 financial year.
- d. As much as Rp8.333.315.000 is the State Capital Participation (PMN) according to PP No. 34 of 2012.

Amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.1.0-3524 of 2012 dated September 28, 2012.

Based on Deed No. 207 dated June 30, 2014 issued by Notary Risna Rahmi Arifa, S.H., the Company's articles of association underwent a change in the Company's authorized capital from Rp1.800.000.000.000 which was divided into 1.800.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share to Rp6.800.000.000.000 which is divided into 6.800.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share. Based on the deed, there has also been an increase in the paid up capital of the Company from Rp511.960.000.000 divided into 511.960 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share to Rp1.700.000.000.000 divided into 1.700.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000 per share, consists of:

- a. Rp511.960.000.000 is an old capital deposit in accordance with Deed Number 88 dated 16 August 2012 issued by Notary Rahmad Nauli Siregar, S.H.
- b. As much as Rp1.188.040.000.000 is the Company's capitalization up to the 2013 financial year.

Amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 dated July 11, 2014.

28. GOVERNMENT ASSISTANCE THAT'S NOT STATED

Government Assistance that has not yet been determined (BPYBDS) is Rp527.133.217.252 and Rp525.884.662.252 for each December 31, 2018 and 2017, constituting State Capital Participation in the form of assets originating from Government projects with the following details:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan upah, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuarial.

Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan adalah metode *Projected Unit Credit*, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24. Metode *Projected Unit Credit* digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuarial dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja kedalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan untuk perhitungan beban pensiun dan aset manfaat pensiun untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tingkat diskonto	8,60%
Tingkat kenaikan upah	6,00%
Tabel mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011
Tingkat cacat	1,00% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal

Jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan

- i. Analisis sensitivitas berdasarkan perubahan tingkat diskonto

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti		Perubahan
218.093.573.342	0,50%	-3,88%
236.343.045.464	-0,50%	4,16%

- ii. Analisis manfaat jatuh tempo dan nilai kini kewajiban imbalan pasti

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	Manfaat Jatuh Tempo	Tahun Ke
16.643.207.836	17.539.051.067	< 1
15.762.767.264	18.734.315.287	1 - < 2
14.133.031.897	19.146.274.499	2 - < 3
7.568.717.783	11.706.927.814	3 - < 4
14.186.030.707	24.553.380.851	4 - < 5
158.606.171.859	1.681.021.464.006	>= 5

26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

	2018	2017
Pendapatan diterima di muka	276.940.288.373	266.631.705.829
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	42.756.096.092	56.906.961.745
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang	234.184.192.281	209.724.744.084

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Additional Government Assistance that Has Not Been Defined Year 2011		
Derived from the Ministry of Transportation: Dock and port facilities of Dumai Phase 3	414.128.745.519	414.128.745.519
Additional Government Assistance that Has Not Been Defined Year 2013		
Derived from the Ministry of Transportation: Construction of the South Side Pier and other supporting facilities (8.3 x 43.5 m) in Sibolga	37.991.646.536	36.743.091.536
One unit of Patria forklift brand capacity of 3 tons	196.900.000	196.900.000
One unit forklift brand Patria capacity of 5 tons	365.200.000	365.200.000
Port Sitoli facility	19.203.989.000	19.203.989.000
Source from the Ministry of Transportation: A TB Kreung Raya tugboat unit in the Malahayati	26.799.668.974	26.799.668.974
Three units of forklift capacity of 3 tons	590.700.000	590.700.000
Three units of forklift capacity of 5 tons	1.095.600.000	1.095.600.000
Bookkeeping of Government Assistance records that have not yet been determined	(19.450.875)	(19.450.875)
Source from the Ministry of Transportation: One Kreung Geukeuh tugboat in the Malahayati	26.780.218.098	26.780.218.098
Amount of Government Assistance that Has Not Been Defined	<u>527.133.217.252</u>	<u>525.884.662.252</u>

Dock and Facilities of Dumai Port Phase III

Based on the Minutes of Handover of the Construction Results of Dumai Port Number KN.38 / 2/20 / DJPL-11 Facility dated March 29, 2011 regarding the addition of the Indonesian Government's Capital Participation to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), then in 2011 there were additional assets with Submission value as follows:

In Rupiah (Rp)	:	349.273.056.206
In American Dollar (USD)	:	2.905.914
In Japan Yen (¥)	:	474.296.987

The value of delivery in foreign currencies as mentioned above is converted into rupiah with the Company's book rate in April 2011 amounting to Rp8.900/USD 1 (¥ 100 equivalent to USD 1.23) so that the value of submitting BPYBDS becomes Rp427.056.982.506.

Phase III Pier Dumai has been used commercially since 2012, as of December 31, 2013, presented as an asset under construction, and as of December 31, 2014, reclassification has been made into fixed assets - buildings and infrastructure (Note 13).

Additional Assets for Government Assistance that Have Not Been Stipulated (BPYBDS) in 2013

The addition of BPYBDS assets consists of 2 (two) units of tugboats in Malahayati and Lhokseumawe Port Branches, 3 (three) tons and 5 (five) tons forklifts in Gunung Sitoli and Malahayati Port Branches,

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

27. MODAL SAHAM

Jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

<u>Tahun 2018</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>Nominal</u>	<u>Prosentase</u>
Pemerintah Republik Indonesia	1.700.000	1.000.000	100,00%
	1.700.000	1.000.000	100,00%

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 15 Agustus 2008 oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, anggaran dasar Grup mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Grup dari Rp1.248.000.000.000 yang terbagi atas 1.248.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Peningkatan modal disetor Grup sesuai Akta No.1 tanggal 15 Agustus 2008 Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., dari sebesar Rp312.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.059.000.000 dilakukan dengan cara mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 143.059 saham atau sebesar Rp143.059.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Nopember 2008.

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., anggaran dasar Grup mengalami perubahan dengan peningkatan modal disetor Grup dari Rp455.059.000.000 yang terbagi atas 455.059 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas:

- Sebesar Rp455.059.000.000 merupakan setoran modal sesuai Akta nomor 1 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro.
- Sebesar Rp48.167.600.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 79 tahun 2011.
- Sebesar Rp85.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011.
- Sebesar Rp8.733.315.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 34 tahun 2012.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.1.0-3524 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Grup mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas:

- Sebesar Rp511.960.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai Akta Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Pier and Facilities in Gunung Sitoli Port Branch. It was proposed to the Technical Ministry on November 19, 2013 and reviewed by the BPKP on August 14, 2013 and December 2, 2013.

29. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Provision for general reserves	562.534.636.422	513.521.829.177
Cash dividend distribution	241.086.272.753	220.081.000.000
Total	<u>803.620.909.175</u>	<u>733.602.829.177</u>

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) as stated in the Minutes of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) GMS Number 01 dated April 3, 2018, the use of the Company's net profit for the 2017 financial year is determined as follows:

- a. Dividend of 30% or Rp241.086.272.753.
- b. Reserves of 70% or Rp562.534.636.423.

The Company's net profit in 2018 amounted to Rp803.620.909.175, the Company determined the amount of Funds for the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year of Rp15.000.000.000 (fifteen billion Rupiah) calculated as equivalent to $\pm 2\%$ of 2017 net income, whose source of funds is taken from the Company's expense and the remaining balance of PKBL funds from the previous year's series.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders as stated in the Minutes of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) GMS Number 1 dated 8 May 2017, the use of the Company's net profit for the 2016 financial year is determined as follows:

- a. Dividend of 30% or Rp220.081.000.000.
- b. Reserves of 70% or Rp513.521.829.177.

The Company's net profit in 2017 amounted to Rp733.602.829.177, the Company determined that the Fund for the Partnership and Environmental Development Program (PKBL) was taken from the Company's net profit of Rp12.000.000.000.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Sebesar Rp1.188.040.000.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2013.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

28. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp527.133.217.252 dan Rp525.884.662.252 untuk masing-masing 31 Desember 2018 dan 2017, merupakan Penyertaan Modal Negara berupa aset yang berasal dari proyek-proyek Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tambahan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Tahun 2011		
Berasal dari Kementerian Perhubungan:		
Dermaga dan fasilitas pelabuhan Dumai Fase 3	414.128.745.519	414.128.745.519
Tambahan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Tahun 2013		
Bersumber dari Kementerian Perhubungan:		
Pembangunan Dermaga sisi selatan dan fasilitas pendukung lainnya (8,3 x 43,5 m) di Sibolga	37.991.646.536	36.743.091.536
Satu unit forklift merk Patria kapasitas 3 ton	196.900.000	196.900.000
Satu unit forklift merk Patria kapasitas 5 ton	365.200.000	365.200.000
Fasilitas pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989.000	19.203.989.000
Bersumber dari Kementerian Perhubungan:		
Satu unit Kapal Tunda TB Kreung Raya di cabang Malahayati	26.799.668.974	26.799.668.974
Tiga unit forklift kapasitas 3 ton	590.700.000	590.700.000
Tiga unit forklift kapasitas 5 ton	1.095.600.000	1.095.600.000
Pembukuan pencatatan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	(19.450.875)	(19.450.875)
Bersumber dari Kementerian Perhubungan:		
Satu Kapal Tunda Kreung Geukeuh di cabang Malahayati	26.780.218.098	26.780.218.098
Jumlah Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan	<u>527.133.217.252</u>	<u>525.884.662.252</u>

Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Dumai Phase III

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai Nomor KN.38/2/20/DJPL-11 tanggal 29 Maret 2011 perihal penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka pada tahun 2011 terdapat penambahan aset dengan nilai penyerahan sebagai berikut:

Dalam Rupiah(Rp)	:	349.273.056.206
Dalam Dolar Amerika Serikat (USD)	:	2.905.914
Dalam Yen Jepang (¥)	:	474.296.987

Nilai penyerahan dalam mata uang asing sebagaimana tersebut di atas dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs buku Perusahaan pada bulan April 2011 sebesar Rp8.900/ USD 1 (¥ 100 ekuivalen dengan USD 1,23) sehingga nilai penyerahan BPYBDS menjadi Rp427.056.982.506.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

30. NON CONTROL OF INTEREST IN CLEAN ASSETS AND NET INCOME OF CHILDREN

The non-controlling interests of the net assets and the net profit / (loss) of the consolidated subsidiaries are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	377.079.255.893	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	283.176.250.535	-
PT Wijaya Karya	141.113.941.798	-
PT Utama Karya	141.113.941.798	-
Employee Cooperative Port of Container Business Unit in Medan Municipality	1.094.435.126	972.202.350
Employee Cooperative Headquarters of PT Pelabuhan Indonesia I Medan	69.708.878	54.721.297
PT Prima Multi Terminal	86.873.131.596	85.115.883.463
Total	<u>1.030.520.665.623</u>	<u>86.142.807.110</u>

31. OPERATING REVENUES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Container Service Revenue	1.547.033.203.026	1.307.243.197.818
Revenue from Non-Container Goods Services	405.022.343.578	363.403.287.150
Ship Service Revenue	363.544.786.056	362.240.149.032
Tersus / Pelsus / Dersus / Tml UKS Port Revenues	338.202.996.918	314.689.990.805
Land & Building Rental Income / Part of Building (PI)	128.719.868.128	98.576.082.784
Logistic Service Revenue / Goods Consolidation & Distribution	82.214.215.829	73.297.100.659
Electricity / Power Plant and Water Service Revenues	45.233.428.945	52.336.581.854
Asset Rental Income, Equipment & Room (Non PI)	41.481.172.265	42.923.437.320
Revenue from Health Services (Polyclinic & Hospital)	25.025.373.556	12.600.243.963
Marine Service	8.255.594.009	2.791.311.224
Dock Service	408.190.000	2.300.341.783
Other Service	128.391.407.347	118.704.783.778
Total	<u>3.113.532.579.657</u>	<u>2.751.106.508.170</u>

Other income is port-based income, stevedoring sharing income and land rental sharing income.

For income with related parties see Note 40.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dermaga Dumai phase III sudah digunakan secara komersil sejak tahun 2012, pada tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai aset dalam penyelesaian, dan per tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan reklasifikasi ke dalam aset tetap - bangunan dan prasarana (catatan 13).

Tambahan Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) tahun 2013

Penambahan aset BPYBDS Terdiri dari 2 (dua) unit Kapal Tunda di Cabang Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe, Forklift 3 (tiga) ton dan 5 (lima) ton di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli dan Malahayati, Dermaga dan Fasilitas di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli. Sudah diusulkan kepada Kementerian Teknis pada tanggal 19 Nopember 2013 dan direviu oleh BPKP pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 02 Desember 2013.

29. PEMBAGIAN LABA DAN CADANGAN UMUM

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Penyisihan untuk cadangan umum	562.534.636.422	513.521.829.177
Pembagian dividen tunai	<u>241.086.272.753</u>	<u>220.081.000.000</u>
Jumlah	<u>803.620.909.175</u>	<u>733.602.829.177</u>

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor 01 tanggal 3 April 2018, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2017 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 30% atau Rp241.086.272.753.
- b. Cadangan sebesar 70% atau Rp562.534.636.422.

Laba bersih Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp803.620.909.175, Perusahaan menetapkan besaran Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2017 sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) dihitung equivalen $\pm 2\%$ dari laba bersih tahun 2017, yang sumber dananya diambil dari beban Perusahaan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor 1 tanggal 8 Mei 2017, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2016 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 30% atau Rp220.081.000.000.
- b. Cadangan sebesar 70% atau Rp513.521.829.177.

Laba bersih Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp733.602.829.177, Perusahaan menetapkan Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diambil dari laba bersih Perusahaan Rp12.000.000.000.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

32. OPERATING EXPENSES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Rental (ship and port facilities)	330.245.827.865	320.632.700.111
Employee (operating SDM)	269.022.623.023	269.394.562.584
Depreciation fixed assets (ship and port facilities)	221.285.713.668	234.448.310.413
KSMU (port facilities)	176.754.403.248	104.757.023.417
Material (ship and other port facilities)	166.094.672.298	151.253.607.832
Maintaining and repairing (ship and port facilities)	101.798.377.626	103.785.973.804
Tax and retribution (port facilities)	48.718.186.154	32.236.953.815
Provision and impairment of receivable	32.401.286.011	7.623.749.488
Amortization intangible assets (port facilities)	30.268.438.429	25.108.047.297
Insurance (ship and port facilities)	27.361.448.681	20.542.747.222
Safety and security (ship and port facilities)	18.835.721.320	17.982.637.302
Official travel	17.093.427.425	10.207.888.961
Administration office	4.510.814.611	4.161.541.063
Medical (operating SDM)	2.623.692.096	948.263.742
Plan and development business	2.602.146.834	4.237.274.345
Post-employment benefit (operating SDM)	2.586.601.350	856.812.163
Donation and social	1.275.354.792	615.414.600
Receivable collection	617.203.416	877.050.517
Quality control services (ship and facilities)	590.450.000	331.622.250
PKBL	511.369.304	535.670.105
Training and certification (operating SDM)	461.514.484	203.751.985
Uniform (ship and port facilities)	391.225.250	788.481.201
Penalty, compensation/claim	68.296.700	55.240.069
Consultant/service	59.106.000	198.241.691
Depreciation investment properties (port facilities)	36.554.163	142.057.036
Impairment of non-financial assets	-	19.539.173.075
Others	28.723.882.493	21.768.653.950
Total	<u>1.484.938.337.241</u>	<u>1.353.233.450.038</u>

33. MARKETING EXPENSE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Advertising and promotion	27.307.534.560	21.602.713.589
Public and relations	2.707.930.133	2.445.441.294
Others	1.822.016.682	7.769.475.446
Total	<u>31.837.481.375</u>	<u>31.817.630.329</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI ATAS ASET BERSIH DAN LABA BERSIH ENTITAS ANAK

Kepentingan non pengendali atas aset bersih dan atas laba/(rugi) bersih entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	377.079.255.893	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	283.176.250.535	-
PT Wijaya Karya	141.113.941.798	-
PT Utama Karya	141.113.941.798	-
Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Petikemas Kotamadya Medan	1.094.435.126	972.202.350
Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan	69.708.878	54.721.297
PT Prima Multi Terminal	86.873.131.596	85.115.883.463
Jumlah	<u>1.030.520.665.623</u>	<u>86.142.807.110</u>

31. PENDAPATAN USAHA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	1.547.033.203.026	1.307.243.197.818
Pendapatan Pelayanan Barang Non Peti Kemas	405.022.343.578	363.403.287.150
Pendapatan Pelayanan Kapal	363.544.786.056	362.240.149.032
Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelus/Dersus/Tml UKS	338.202.996.918	314.689.990.805
Pendapatan Sewa Lahan & Bangunan/Bag. Bangunan (PI)	128.719.868.128	98.576.082.784
Pendapatan Pelayanan Logistik/Konsolidasi & Distribusi Barang	82.214.215.829	73.297.100.659
Pendapatan Jasa Listrik / Power Plant dan Air	45.233.428.945	52.336.581.854
Pendapatan Sewa Aset, Peralatan & Ruangan (Non PI)	41.481.172.265	42.923.437.320
Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS)	25.025.373.556	12.600.243.963
Pendapatan Pelayaran / Marine Service	8.255.594.009	2.791.311.224
Pendapatan Galangan (Dock) Kapal	408.190.000	2.300.341.783
Pendapatan Usaha Rupa-rupa	128.391.407.347	118.704.783.778
Jumlah Pendapatan	<u>3.113.532.579.657</u>	<u>2.751.106.508.170</u>

Pendapatan rupa-rupa merupakan pendapatan pas pelabuhan, pendapatan *sharing* bongkar muat dan pendapatan *sharing* persewaan tanah.

Untuk pendapatan dengan pihak-pihak berelasi lihat catatan 40.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

34. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Employee	86.466.140.800	100.980.661.404
Others	65.873.211.000	58.596.104.126
Board of Director and Commissioner	36.417.649.981	19.398.237.261
Post-employment benefit	30.696.779.231	28.273.123.100
Rent (non-ship and port facilities)	19.852.307.895	11.948.498.740
Impairment of non-financial assets	18.195.597.049	474.904.170
Duty traveling	15.243.815.549	14.211.713.565
Tax and retribution (non-port facilities)	12.644.035.080	25.345.238.987
PKBL	11.493.429.708	12.651.873.160
Training and certification (non-operating SDM)	9.974.948.620	10.091.622.774
Medical (non-operating SDM/routine checkup)	7.863.777.637	8.242.941.851
Insurance (non-ship and port facilities)	7.293.068.895	8.754.493.907
Administration office	6.389.781.036	4.668.871.049
Consultant and audit service	6.199.745.438	3.054.675.404
Maintaining and repairing (non-ship and port facilities)	4.100.978.198	2.050.235.932
Depreciation fixed assets (non-ship and port facilities)	3.747.026.422	3.006.163.645
Material	2.355.381.276	2.042.693.256
Amortization intangible assets (non-port facilities)	2.096.341.823	2.675.391.587
Beban umum & adm. (perawatan kesehatan pensiunan)	2.083.889.168	-
Uniform (non-operating SDM)	1.672.755.000	908.212.000
Plan and development business	934.681.603	2.200.844.142
Depreciation investment properties (non-port facilities)	145.194.842	39.691.969
Donation and social	36.500.000	636.679.400
Receivable collection	32.047.000	42.002.610
Provision and impairment of receivable	2.651.549	198.217.081
Penalty, compansation/claim (non-tax finalty)	-	1.960.430
Total	<u>351.811.734.800</u>	<u>320.495.051.550</u>

35. OTHER INCOME (EXPENSE) - NET

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Other Income</u>		
Interest (before final tax)	79.298.304.486	98.026.883.778
Foreign exchange gain (loss)	42.846.566.995	937.991.669
Penalty/compensation	5.866.601.365	3.455.919.911
Other rent investment properties	4.555.723.485	46.737.000
Administration (before final tax)	3.033.002.703	3.499.185.966
Insurance claim	1.998.091.914	35.900.000.000
Stamp duty charge	1.488.723.000	516.804.000
Procurement document purchasing	2.000.000	219.213.329
Rounding income	34.497	-
Gain on non-productive fixed assetes disposal	-	1.135.859.091
Others	100.602.346.712	46.701.189.425
Sub Total Other Income	<u>239.691.395.157</u>	<u>190.439.784.169</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

32. BEBAN POKOK

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban sewa (kapal dan fasar kepelabuhanan)	330.245.827.865	320.632.700.111
Beban imbalan kerja (SDM operasional)	269.022.623.023	269.394.562.584
Beban penyusutan AT (kapal & fasar kepelabuhan)	221.285.713.668	234.448.310.413
Beban KSMU (fasar kepelabuhanan)	176.754.403.248	104.757.023.417
Beban bahan pokok (kapal & jasa kepelabuhan lain)	166.094.672.298	151.253.607.832
Beban pemeliharaan & perbaikan (kapal & fasar kepelabuhan)	101.798.377.626	103.785.973.804
Beban pajak & retribusi (fasar kepelabuhan)	48.718.186.154	32.236.953.815
Beban provisi penurunan nilai piutang	32.401.286.011	7.623.749.488
Beban amortisasi ATB (fasar kepelabuhanan)	30.268.438.429	25.108.047.297
Beban asuransi (kapal & fasar kepelabuhanan)	27.361.448.681	20.542.747.222
Beban keamanan & keselamatan (kapal & fasar kepelabuhan)	18.835.721.320	17.982.637.302
Beban perjalanan dinas (tunj. keg. operasi pelayanan jasa)	17.093.427.425	10.207.888.961
Beban administrasi perkantoran	4.510.814.611	4.161.541.063
Beban kesehatan (SDM operasional-mandatory)	2.623.692.096	948.263.742
Beban perencanaan pengembangan usaha	2.602.146.834	4.237.274.345
Beban imbalan pasca kerja (SDM operasional)	2.586.601.350	856.812.163
Sumbangan dan beban sosial	1.275.354.792	615.414.600
Beban penagihan piutang	617.203.416	877.050.517
Beban kendali mutu pelayanan (kapal & fasar kepelabuhan)	590.450.000	331.622.250
Beban program kemitraan & bina lingkungan (PKBL)	511.369.304	535.670.105
Beban diklat & sertifikasi (SDM operasional)	461.514.484	203.751.985
Beban pakaian dinas/kerja (kapal & fasar kepelabuhan)	391.225.250	788.481.201
Beban denda, ganti rugi/klaim (non denda pajak)	68.296.700	55.240.069
Beban konsultan/survei/supervisi (kapal & fasar kepelabuhan)	59.106.000	198.241.691
Beban penyusutan PI (fasar kepelabuhanan)	36.554.163	142.057.036
Beban penurunan nilai aset non keuangan	-	19.539.173.075
Beban Pokok - Lainnya	28.723.882.493	21.768.653.950
Jumlah Beban Pokok	<u>1.484.938.337.241</u>	<u>1.353.233.450.038</u>

33. BEBAN PEMASARAN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban promosi dan periklanan	27.307.534.560	21.602.713.589
Beban kehumasan	2.707.930.133	2.445.441.294
Beban pemasaran lainnya	1.822.016.682	7.769.475.446
Jumlah Beban Pemasaran	<u>31.837.481.375</u>	<u>31.817.630.329</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Other Expenses

Concession expense	44.481.173.666	39.809.290.808
Non-tax revenue (PNBP)	28.713.379.452	19.794.007.859
Foreign exchange loss	17.485.579.259	1.023.346.318
(Final) tax expense for demand & service deposito	4.660.387.907	204.961.903
Stamp duty costs	1.521.209.792	1.312.259.105
Loss of sales of non-financial assets		
- unproductive	1.271.497.117	-
Bond amortization fee	830.481.756	830.481.756
Bank Administration fee	419.278.879	257.478.502
Rounding loss	143	-
Other non-business expenses	33.348.045.834	1.875.053.374
Sub Total Other Expenses	<u>132.731.033.805</u>	<u>65.106.879.625</u>
Total of Other Income (Expenses)	<u>106.960.361.352</u>	<u>125.332.904.544</u>

Expenses outside of other businesses in 2018 include, among other things, recording the imposition of Expenses, the cost of selling services for Pertamina Trans Kontinental national vessels, adjusting records for write-offs of fixed assets, adjusting accounting for depreciation fees (import duties), and adjusting accounting records for PNBP bills.

Expenses outside of other businesses in 2017 represent expenses for the elimination of fixed assets, expenses for allowance for employee receivables and correction of concession fees.

36. FINANCIAL EXPENSES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Financial burden on the issuance of Long-Term Financial Instruments	90.875.000.000	-
Loan interest and bond	62.405.657.124	100.799.481.838
Total	<u>153.280.657.124</u>	<u>100.799.481.838</u>

37. PART OF PROFIT (LOSS) OF ASSOCIATION AND VENTURATION TOGETHER

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Prima Terminal Petikemas	-	(4.125.598.699)
PT Prima Multi Terminal	-	2.354.587.105
PT Terminal Petikemas Indonesia	(1.237.351.486)	(978.961.210)
PT Prima Tangki Indonesia	(1.405.424.186)	57.440.961
Total Part of Profit (Loss) of Association and Venturation Together	<u>(2.642.775.672)</u>	<u>(2.692.531.843)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	2018	2017
Beban imbalan kerja (SDM adm. perkantoran)	86.466.140.800	100.980.661.404
Beban umum dan administrasi - lainnya	65.873.211.000	58.596.104.126
Beban direksi, dewan komisaris & perangkat kerjanya	36.417.649.981	19.398.237.261
Beban imbalan pasca kerja (SDM adm. perkantoran)	30.696.779.231	28.273.123.100
Beban sewa (non kapal & fasar kepelabuhanan)	19.852.307.895	11.948.498.740
Beban penurunan nilai aset non keuangan	18.195.597.049	474.904.170
Beban perjalanan dinas (tunj. non keg. operasi pelayanan jasa)	15.243.815.549	14.211.713.565
Beban pajak & retribusi (non fasar kepelabuhanan)	12.644.035.080	25.345.238.987
Beban program kemitraan dan bina lingkungan	11.493.429.708	12.651.873.160
Beban diklat & sertifikasi (non SDM operasional)	9.974.948.620	10.091.622.774
Beban kesehatan (non SDM operasi/checkup rutin)	7.863.777.637	8.242.941.851
Beban asuransi (non kapal & fasar kepelabuhanan)	7.293.068.895	8.754.493.907
Beban administrasi perkantoran	6.389.781.036	4.668.871.049
Beban jasa konsultan & audit	6.199.745.438	3.054.675.404
Beban pemeliharaan & perbaikan (non kapal & fasar kepelabuhanan)	4.100.978.198	2.050.235.932
Beban penyusutan aset tetap (non kapal & fasar kepelabuhanan)	3.747.026.422	3.006.163.645
Beban bahan	2.355.381.276	2.042.693.256
Beban amortisasi aset tak berwujud (non fasar kepelabuhanan)	2.096.341.823	2.675.391.587
Beban umum & adm. (perawatan kesehatan pensiunan)	2.083.889.168	-
Beban pakaian dinas/kerja (non SDM operasional)	1.672.755.000	908.212.000
Beban perencanaan pengembangan usaha	934.681.603	2.200.844.142
Beban penyusutan properti investasi (non fasar kepelabuhanan)	145.194.842	39.691.969
Sumbangan dan beban sosial	36.500.000	636.679.400
Beban penagihan piutang	32.047.000	42.002.610
Beban provisi penurunan nilai piutang	2.651.549	198.217.081
Beban denda, ganti rugi/klaim (non denda pajak)	-	1.960.430
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	351.811.734.800	320.495.051.550

35. PENDAPATAN/(BEBAN) NON USAHA

	2018	2017
Pendapatan Non Usaha		
Pendapatan bunga deposito (sebelum PPh final)	79.298.304.486	98.026.883.778
Laba selisih kurs (<i>gains on foreign exchange</i>)	42.846.566.995	937.991.669
Pendapatan denda/penalti	5.866.601.365	3.455.919.911
Pendapatan sewa properti investasi	4.555.723.485	46.737.000
Pendapatan jasa giro (sebelum PPh final)	3.033.002.703	3.499.185.966
Pendapatan klaim asuransi	1.998.091.914	35.900.000.000
Pendapatan biaya materai yang ditagihkan	1.488.723.000	516.804.000
Pendapatan pembelian dok./buku/formulir std.	2.000.000	219.213.329
Pendapatan pembulatan	34.497	-
Laba penjualan aset tetap tidak produktif	-	1.135.859.091
Pendapatan non usaha - lainnya	100.602.346.712	46.701.189.425
Sub Jumlah Pendapatan Non Usaha	239.691.395.157	190.439.784.169

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

38. PROFIT PER BASIC STOCK

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Net profit - Company	880.874.640.133	791.371.008.558
Number of shares outstanding	795.238	688.761
Basic earnings per share	518.162	465.512

39. ASSETS AND MONETARY LIABILITY IN FOREIGN CURRENCY

	<u>2018</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Assets			
Cash and cash equivalent	USD	17.328.076	251.257.102.425
Account receivable	USD	922.989	13.383.344.383
Total		<u>18.251.065</u>	<u>264.640.446.808</u>

	<u>2018</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Liability			
Account payable	USD	228.941	3.319.644.777
Total		<u>228.941</u>	<u>3.319.644.777</u>

	<u>2017</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Assets			
Cash and cash equivalent	USD	11.721.066	158.867.322.737
Account receivable	USD	975.431	13.220.986.537
Total		<u>12.696.496</u>	<u>172.088.309.274</u>

	<u>2017</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Liability			
Account payable	USD	25.993	352.303.036
Total		<u>25.993</u>	<u>352.303.036</u>

40. INFORMATION ABOUT RELATED PARTIES

The company is controlled by the Government of the Republic of Indonesia which conducts transactions with related parties as follows:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Beban Non Usaha

Beban konsesi	44.481.173.666	39.809.290.808
Beban atas penerimaan negara bukan pajak	28.713.379.452	19.794.007.859
Rugi selisih kurs (<i>loss on foreign exchange</i>)	17.485.579.259	1.023.346.318
Beban pajak (final) jasa giro & deposito	4.660.387.907	204.961.903
Beban biaya materai	1.521.209.792	1.312.259.105
Rugi penjualan aset non keuangan - tidak produktif	1.271.497.117	-
Biaya amortisasi obligasi	830.481.756	830.481.756
Biaya administrasi bank	419.278.879	257.478.502
Rugi pembulatan	143	-
Beban non usaha lainnya	33.348.045.834	1.875.053.374
Sub Jumlah Beban Non Usaha	132.731.033.805	65.106.879.625
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha	106.960.361.352	125.332.904.544

Beban non usaha lainnya tahun 2018 diantaranya, merupakan pencatatan pembebanan biaya Sektap, biaya penjualan jasa kapal nasional Pertamina Trans Kontinental, penyesuaian pencatatan atas penghapusbukuan aset tetap, penyesuaian pembukuan biaya penyusutan (bea masuk impor), dan penyesuaian pembukuan pencatatan tagihan PNBPN.

Beban non usaha lainnya tahun 2017 merupakan beban atas penghapusan aset tetap, beban penyisihan piutang pegawai dan koreksi atas *fee* konsesi.

36. BEBAN KEUANGAN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban keuangan atas penerbitan Instrumen Keuangan		
Jangka Panjang	90.875.000.000	-
Beban pinjaman bank	62.405.657.124	100.799.481.838
Jumlah Beban Keuangan	153.280.657.124	100.799.481.838

37. BAGIAN LABA (RUGI) ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Prima Terminal Petikemas	-	(4.125.598.699)
PT Prima Multi Terminal	-	2.354.587.105
PT Terminal Petikemas Indonesia	(1.237.351.486)	(978.961.210)
PT Prima Tangki Indonesia	(1.405.424.186)	57.440.961
Jumlah Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(2.642.775.672)	(2.692.531.843)

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

a. Cash and cash equivalent

	2018		2017	
	Total	%)	Total	%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	818.492.777.716	5,71	940.517.993.131	11,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	558.338.194.299	3,89	433.654.652.555	5,08
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	385.014.518.167	2,69	388.607.394.153	4,55
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	56.463.175.106	0,39	65.730.534.995	0,77
PT Bank Tabungan Negara Syariah	63.000.000.000	0,44	21.955.170.526	0,26
PT Bank Mandiri Syariah	13.252.568	0,00	5.001.030.355	0,14
Total	1.881.321.917.856	13,12	1.855.466.775.715	21,81

*) Percentage of total assets

b. Account receivable

	2018		2017	
	Total	%)	Total	%)
PT Pertamina Trans Kontinental	7.090.337.013	0,05	10.746.642.668	0,13
PT Pertamina (Persero)	4.832.742.368	0,03	1.217.221.649	0,01
PT Perta Arun Gas	3.024.053.053	0,02	5.268.527.238	0,06
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	848.408.139	0,01	1.160.894.337	0,01
PT Sarana Agro Nusantara	279.125.000	0,00	5.433.414.192	0,06
PT Semen Padang	267.594.016	0,00	1.154.273.207	0,01
PT Arun NGL	221.939.700	0,00	221.939.700	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.350.201	0,00	5.614.012.978	0,07
PT Kereta Api Logistik	187.032	0,00	1.563.614.000	0,02
PT Prima Multi Terminal	-	-	9.637.301.250	0,11
PT Pertamina UPPDN I	-	-	-	-
Others of less than Rp1.000.000.000	3.295.186.369	0,02	5.091.940.003	0,06
Total	19.862.922.891	0,14	47.109.781.222	0,6

*) Percentage of total assets

c. Account payable

	2018		2017	
	Total	%)	Total	%)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82.937.812.373	1,10	114.889.327.285	3,16
PT Nindya Karya (Persero)	71.318.324.111	0,95	26.571.870.119	0,73
PT Brantas Abipraya (Persero)	55.636.263.216	0,74	62.646.152.697	1,72
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34.648.385.805	0,46	59.280.000.000	1,63
PT Pertamina (Persero)	25.973.801.804	0,34	3.873.297.343	0,11
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22.558.011.236	0,30	223.023.966.481	6,14
PT Hutama Karya (Persero)	15.220.572.797	0,20	111.258.602.136	3,06
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	12.762.636.250	0,17	3.281.306.150	0,09
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6.734.336.614	0,09	1.660.583.520	0,05
PT Sucofindo (Persero)	5.717.554.858	0,08	5.015.220.731	0,14
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.945.896.550	0,03	1.648.580.616	0,05
PT Danareksa Sekuritas	1.246.509.999	0,02	-	0,00
PT Virama Karya (Persero)	-	0,01	7.316.575.500	0,20
Perusahaan Galangan Kapal	-	0,00	5.957.500.000	0,16
PT Prima Indonesia Logistik	-	0,00	-	0,00
DPC Insa - Pekanbaru	-	0,00	1.144.818.097	0,03
Others of less than Rp1.000.000.000	4.014.689.921	0,04	-	0,00
Total	340.714.795.534	4,5	627.567.800.675	17,3

*) Percentage of total assets

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****38. LABA PER SAHAM DASAR**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Laba bersih - entitas Induk	880.874.640.133	791.371.008.558
Jumlah saham beredar	795.238	688.761
Laba bersih per lembar saham dasar	518.162	465.512

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

	<u>2018</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Aset			
Kas dan Setara Kas	USD	17.328.076	251.257.102.425
Piutang Usaha	USD	922.989	13.383.344.383
Jumlah		<u>18.251.065</u>	<u>264.640.446.808</u>

	<u>2018</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Liabilitas			
Utang Usaha	USD	228.941	3.319.644.777
Jumlah		<u>228.941</u>	<u>3.319.644.777</u>

	<u>2017</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Aset			
Kas dan Setara Kas	USD	11.721.066	158.867.322.737
Piutang Usaha	USD	975.431	13.220.986.537
Jumlah		<u>12.696.496</u>	<u>172.088.309.274</u>

	<u>2017</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen</u>	<u>Rp</u>
Liabilitas			
Utang Usaha	USD	25.993	352.303.036
Jumlah		<u>25.993</u>	<u>352.303.036</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

d. Bank Debt

	2018		2017	
	Total	%*)	Total	%*)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	953.459.198.372	12,65	119.571.780.774	3,3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	935.470.014.061	12,41	114.299.959.981	3,1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.668.783.191.060	22,13	156.583.056.564	4,3
Total	3.557.712.403.493	47	390.454.797.319	10,7

*) Percentage of total assets

e. Operating Income

	2018		2017	
	Total	%*)	Total	%*)
PT Pertamina (Persero)	33.696.746.026		28.717.436.157	1,04
PT Banda Graha Reksa	18.834.200.860		4.905.278.677	0,18
PT Jasa Prima Logistik Bulog	11.771.438.822		18.327.000	0,00
PT Sarana Agro Nusantara	10.111.980.155		-	-
PT Lafarge Cement Indonesia	9.463.841.638		3.678.413.088	0,13
PT Pelayaran Nasional Indonesia	5.758.560.943		1.418.363.738	0,05
PT Semen Padang	2.016.146.284		5.398.689.651	0,20
PT Pupuk Sriwijaya Palembang	1.021.116.018		9.878.913.150	0,36
PT Sarana Bandar Nasional	530.910.864		294.188.855	0,01
PT Djakarta LLYOD	345.115.287		258.332.160	0,01
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	195.779.490		101.583.432	0,00
PT Pupuk Iskandar Muda	133.642.458		555.133.282	0,02
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	114.903.808		1.507.402.893	0,05
PT Bahtera Adhiguna	50.375.278		1.956.904.579	0,07
PT Telekomunikasi Seluler Tbk	24.373.017		158.841.570	0,01
PT Waskita Karya (Persero)	19.266.574		9.294.202	0,00
PT Perkebunan Nusantara IV	17.048.332		775.405.978	0,03
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8.476.399		96.595.928	0,00
PT Varuna Tirta Prakarsa	1.317.728		1.099.500	0,00
PT A.S.D.P	341.356		807.963	0,00
PT Arun NGL	-		3.398.043.050	0,12
Total	94.115.581.337	-	63.129.054.853	2,3

*) Percentage of total operating income

41. OPERATING SEGMENT

Management has determined the operating segment based on the reports reviewed by the Directors, which are used in making strategic decisions, the Directors consider business operations from a business and geographical perspective. Transactions across transactions between segments have been eliminated, information according to segments as follows:

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

40. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

	2018		2017	
	Jumlah	%)	Jumlah	%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	818.492.777.716	5,71	940.517.993.131	11,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	558.338.194.299	3,89	433.654.652.555	5,08
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	385.014.518.167	2,69	388.607.394.153	4,55
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	56.463.175.106	0,39	65.730.534.995	0,77
PT Bank Tabungan Negara Syariah	63.000.000.000	0,44	21.955.170.526	0,26
PT Bank Mandiri Syariah	13.252.568	0,00	5.001.030.355	0,14
Jumlah	1.881.321.917.856	13,12	1.855.466.775.715	21,81

*) Persentase terhadap total aset

b. Piutang Usaha

	2018		2017	
	Jumlah	%)	Jumlah	%)
PT Pertamina Trans Kontinental	7.090.337.013	0,05	10.746.642.668	0,13
PT Pertamina (Persero)	4.832.742.368	0,03	1.217.221.649	0,01
PT Perta Arun Gas	3.024.053.053	0,02	5.268.527.238	0,06
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	848.408.139	0,01	1.160.894.337	0,01
PT Sarana Agro Nusantara	279.125.000	0,00	5.433.414.192	0,06
PT Semen Padang	267.594.016	0,00	1.154.273.207	0,01
PT Arun NGL	221.939.700	0,00	221.939.700	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.350.201	0,00	5.614.012.978	0,07
PT Kereta Api Logistik	187.032	0,00	1.563.614.000	0,02
PT Prima Multi Terminal	-	-	9.637.301.250	0,11
PT Pertamina UPPDN I	-	-	-	-
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	3.295.186.369	0,02	5.091.940.003	0,06
Jumlah	19.862.922.891	0,14	47.109.781.222	0,6

*) Persentase terhadap total aset

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

a. Business income based on main activities

	2018			
	Container	Port	Others	Consolidated
Operating income	1.536.009.388.602	1.543.858.644.121	33.664.546.934	3.113.532.579.657
Operating expense	(479.764.464.766)	(900.976.622.021)	(536.809.538.073)	(1.917.550.624.860)
Operating Profit (Loss)	1.056.244.923.836	642.882.022.100	(503.144.991.139)	1.195.981.954.797
	2017			
	Container	Port	Others	Consolidated
Operating income	1.340.814.745.298	1.389.212.665.354	21.079.097.518	2.751.106.508.170
Operating expense	(495.514.060.874)	(749.196.735.232)	(438.994.444.948)	(1.683.705.241.054)
Operating Profit (Loss)	845.300.684.424	640.015.930.122	(417.915.347.430)	1.067.401.267.116

b. Segment Assets and Segment Liabilities Based on Main Activities

	2018			
	Container	Port	Others	Consolidated
Assets				
Segment assets	737.503.220.220	2.479.597.042.042	6.333.294.482.692	9.550.394.744.954
Assets that cannot be allocated				4.470.458.113.157
Consolidation Elimination				
Total assets	737.503.220.220	2.479.597.042.042	6.333.294.482.692	14.020.852.858.111
Liabilities				
Segment liability	125.410.594.837	708.616.937.704	3.372.816.808.058	4.206.844.340.599
Liability that cannot be allocated				3.334.431.128.128
Consolidation Elimination				
Total liabilities	125.410.594.837	708.616.937.704	3.372.816.808.058	7.541.275.468.727
	2017			
	Container	Port	Others	Consolidated
Assets				
Segment assets	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	2.442.806.932.047
Assets that cannot be allocated				6.064.336.383.701
Consolidation Elimination				-
Total assets	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	8.507.143.315.748
Liabilities				
Segment liability	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	803.354.274.107
Liability that cannot be allocated				2.799.565.280.358
Consolidation Elimination				
Total liabilities	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	3.602.919.554.465

Operating Segments based on geographical area:

a. Assets

	2018	2017
Sumatera Utara	13.369.298.541.811	7.925.773.601.225
Riau dan Kepulauan Riau	647.158.382.552	562.550.435.189
Aceh	4.395.933.748	18.819.279.334
Total	14.020.852.858.111	8.507.143.315.748

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Utang Usaha

	2018		2017	
	Jumlah	%)	Jumlah	%)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82.937.812.373	1,10	114.889.327.285	3,16
PT Nindya Karya (Persero)	71.318.324.111	0,95	26.571.870.119	0,73
PT Brantas Abipraya (Persero)	55.636.263.216	0,74	62.646.152.697	1,72
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34.648.385.805	0,46	59.280.000.000	1,63
PT Pertamina (Persero)	25.973.801.804	0,34	3.873.297.343	0,11
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22.558.011.236	0,30	223.023.966.481	6,14
PT Hutama Karya (Persero)	15.220.572.797	0,20	111.258.602.136	3,06
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	12.762.636.250	0,17	3.281.306.150	0,09
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6.734.336.614	0,09	1.660.583.520	0,05
PT Sucofindo (Persero)	5.717.554.858	0,08	5.015.220.731	0,14
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.945.896.550	0,03	1.648.580.616	0,05
PT Danareksa Sekuritas	1.246.509.999	0,02	-	0,00
PT Virama Karya (Persero)	-	0,01	7.316.575.500	0,20
Perusahaan Galangan Kapal	-	0,00	5.957.500.000	0,16
PT Prima Indoesia Logistik	-	0,00	-	0,00
DPC Insa - Pekanbaru	-	0,00	1.144.818.097	0,03
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	4.014.689.921	0,04	-	0,00
Jumlah	340.714.795.534	4,5	627.567.800.675	17,3

*) Persentase terhadap total aset

d. Utang Bank

	2018		2017	
	Jumlah	%)	Jumlah	%)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	953.459.198.372	12,65	119.571.780.774	3,3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	935.470.014.061	12,41	114.299.959.981	3,1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.668.783.191.060	22,13	156.583.056.564	4,3
Jumlah	3.557.712.403.493	47	390.454.797.319	10,7

*) Persentase terhadap total aset

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

b. Liabilities

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sumatera Utara	7.229.218.782.351	3.282.219.620.050
Riau dan Kepulauan Riau	300.221.635.457	308.964.690.130
Aceh	11.835.050.919	11.735.244.285
Total	<u>7.541.275.468.727</u>	<u>3.602.919.554.465</u>

c. Pendapatan Usaha

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sumatera Utara	2.266.276.759.405	1.910.470.108.731
Riau dan Kepulauan Riau	816.394.603.005	807.774.032.904
Aceh	30.861.217.247	32.862.366.535
Total	<u>3.113.532.579.657</u>	<u>2.751.106.508.170</u>

d. Laba Usaha

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sumatera Utara	886.303.572.601	719.219.372.627
Riau dan Kepulauan Riau	313.382.515.588	348.180.153.981
Aceh	(3.704.133.392)	1.740.508
Total	<u>1.195.981.954.797</u>	<u>1.067.401.267.116</u>

42. COMPREHENSIVE PROFIT PER SHARE

Comprehensive profit attributable to owners of the parent entity for the purpose of calculating comprehensive earnings per share is Rp873.930.810.004 in 2018 and amounting to Rp792.894.911.489 in 2017. Basic earnings per share as of December 31, 2018 and 2017 are respectively amounting to Rp518.162 and Rp465.512 per share.

43. ASSOCIATION

- a. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. UM.58 / 41/18 / P.I-04, dated November 26, 2004 with PT Metito Indonesia for the Collaboration of Drinking Water Operations. This collaboration is valid from 1 January 2007 to 31 December 2021.
- b. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.IX-527BLW-US.15, dated April 28, 2018 with PT Tirta Nusa Persada to Cooperate Dry Bulk Loading and Unloading Services at Belawan Dry Bulk Terminal. This collaboration is valid from April 28, 2018 to April 27, 2020.
- c. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.IX-203 / BLW-US.15, dated April 20, 2018 with PT Tirta Nusa Persada for the Cooperation of the Weigh Bridge Operation in Belawan Port. This collaboration is valid from January 20, 2018 to January 19, 2020.
- d. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII - 47 / BLW-US.15 dated January 23, 2019 with PT Multi Jaya Samudera for Collaboration of Time Charter Tugboat Operations. This collaboration is valid from December 23, 2018 - December 31, 2019.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

e. Pendapatan Usaha

	2018		2017	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Pertamina (Persero)	33.696.746.026	0,01	28.717.436.157	1,04
PT Banda Graha Reksa	18.834.200.860	0,01	4.905.278.677	0,18
PT Jasa Prima Logistik Bulog	11.771.438.822	0,00	18.327.000	0,00
PT Sarana Agro Nusantara	10.111.980.155	0,00	-	-
PT Lafarge Cement Indonesia	9.463.841.638	0,00	3.678.413.088	0,13
PT Pelayaran Nasional Indonesia	5.758.560.943	0,00	1.418.363.738	0,05
PT Semen Padang	2.016.146.284	0,00	5.398.689.651	0,20
PT Pupuk Sriwijaya Palembang	1.021.116.018	0,00	9.878.913.150	0,36
PT Sarana Bandar Nasional	530.910.864	0,00	294.188.855	0,01
PT Djakarta LLYOD	345.115.287	0,00	258.332.160	0,01
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	195.779.490	0,00	101.583.432	0,00
PT Pupuk Iskandar Muda	133.642.458	0,00	555.133.282	0,02
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	114.903.808	0,00	1.507.402.893	0,05
PT Bahtera Adhiguna	50.375.278	0,00	1.956.904.579	0,07
PT Telekomunikasi Seluler Tbk	24.373.017	0,00	158.841.570	0,01
PT Waskita Karya (Persero)	19.266.574	0,00	9.294.202	0,00
PT Perkebunan Nusantara IV	17.048.332	0,00	775.405.978	0,03
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8.476.399	0,00	96.595.928	0,00
PT Varuna Tirta Prakarsa	1.317.728	0,00	1.099.500	0,00
PT A.S.D.P	341.356	0,00	807.963	0,00
PT Arun NGL	-	0,00	3.398.043.050	0,12
Jumlah	94.115.581.337	0,0	63.129.054.853	2,3

*) Persentase terhadap total pendapatan

41. SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Transaksi seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi, informasi menurut segmen sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha berdasarkan kegiatan utama

	2018			
	Peti kemas	Kepelabuhan	Lainnya	Konsolidasi
Pendapatan Usaha	1.536.009.388.602	1.543.858.644.121	33.664.546.934	3.113.532.579.657
Beban Usaha	(479.764.464.766)	(900.976.622.021)	(536.809.538.073)	(1.917.550.624.860)
Laba (Rugi) Usaha	1.056.244.923.836	642.882.022.100	(503.144.991.139)	1.195.981.954.797
	2017			
	Peti kemas	Kepelabuhan	Lainnya	Konsolidasi
Pendapatan Usaha	1.340.814.745.298	1.389.212.665.354	21.079.097.518	2.751.106.508.170
Beban Usaha	(495.514.060.874)	(749.196.735.232)	(438.994.444.948)	(1.683.705.241.054)
Laba (Rugi) Usaha	845.300.684.424	640.015.930.122	(417.915.347.430)	1.067.401.267.116

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- e. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.XV-624 / BLW-US.15 dated November 13, 2018 with PT Emitraco Investama Mandiri 01 for Collaboration of Container Loading and Dry Bulk Service Services at Ujung Baru Pier. This collaboration is valid from 1 August 2018 - 31 December 2018.
- f. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.XV-625 / BLW-US.15 dated November 13, 2018 with PT Emitraco Investama Mandiri 02 for Collaborative Container and Dry Bulk Service Services Cooperation at Ujung Baru Pier. This collaboration is valid from 1 August 2018 - 31 December 2018.
- g. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII / 463 / BLW-US.15 dated September 7, 2018 2018 with PT Duet Pratama Samudra for Operation of Dry Bulk Terminal in Belawan Port. This collaboration is valid from September 7, 2018 - September 6, 2020.
- h. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No.B.16 / 1/3 / BLW-18.TU dated May 18, 2018 with PT Meroke Permanent Jaya for Cooperation in Concession Operations Equipment for Unloading Goods in the Belawan Port Branch. This collaboration is valid from April 23, 2018 - April 22, 2020.
- i. The Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No.B.XV-622 / BLW-US.15 dated 22 November 2018 with PT Emitraco Investama Mandiri 03 for Cooperation in the Operation of Loading and Unloading Services in the Belawan Port Branch. This collaboration is valid from 1 August 2018 - 31 July 2019.
- j. Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.IX-602 / BLW-US.15 dated November 8, 2017 with PT Prima Osrat Indonesia for Cooperation in the Supply and Operation of Oil Booms and Tools to Support the Prevention and Control of Marine Pollution in the Port of Belawan. This collaboration is valid from 1 November 2017 - 30 January 2019.
- k. Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII-413 / BLW, US-15 dated August 13, 2018 with PT Tanto Intim Line for Service Agreement (Container Agreement) for Loading and Unloading in the Port of Belawan. This collaboration is valid from April 24, 2018 - December 31, 2018.
- l. Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII-373 / BLW-US.13, July 18, 2012 with Belawan Perkasa PT Indoterminal for Maintenance of Rack and Pipe Installation and Supporting Facilities for Palm Oil Terminal at Pier 105 - 106 Belawan Port. This collaboration is valid from 1 January 2012 to 31 December 2023.
- m. Belawan Port Branch signed a cooperation agreement No. B.XV-521 / BLW-US.15, August 30, 2017 with PT Lemo Tatagraha Mas for Cooperation in Leasing to Rent Loaders 2 (two) Harbor Crane Mobile Units in the Belawan Port Branch. This collaboration is valid from 30 August 2017 - 29 August 2022.
- n. The Belawan International Container Terminal Port Branch signed a cooperation agreement No. HK.45 / 1/6 / BICT-18.TU, dated May 14, 2018 with PT Graha Segara for Cooperation in Handling Quarantine Container Inspections at Quarantine Checkpoints (TPKs) at the PT Graha Segara TPFT Location. This collaboration is valid from April 26, 2018 - April 25, 2023.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

b. Aset Segmen dan Liabilitas Segmen Berdasarkan Kegiatan Utama

	2018			
	Peti kemas	Kepelabuhan	Lainnya	Konsolidasi
Aset				
Aset Segmen	737.503.220.220	2.479.597.042.042	6.333.294.482.692	9.550.394.744.954
Aset yang tidak dapat dialokasikan				4.470.458.113.157
Eliminasi Konsolidasian				
Jumlah Aset	737.503.220.220	2.479.597.042.042	6.333.294.482.692	14.020.852.858.111
Liabilitas				
Liabilitas Segmen	125.410.594.837	708.616.937.704	3.372.816.808.058	4.206.844.340.599
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				3.334.431.128.128
Eliminasi Konsolidasian				
Jumlah Liabilitas	125.410.594.837	708.616.937.704	3.372.816.808.058	7.541.275.468.727
	2017			
	Peti kemas	Kepelabuhan	Lainnya	Konsolidasi
Aset				
Aset Segmen	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	2.442.806.932.047
Aset yang tidak dapat dialokasikan				6.064.336.383.701
Eliminasi Konsolidasian				-
Jumlah Aset	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	8.507.143.315.748
Liabilitas				
Liabilitas Segmen	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	803.354.274.107
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				2.799.565.280.358
Eliminasi Konsolidasian				
Jumlah Liabilitas	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	3.602.919.554.465

Segmen Operasi berdasarkan wilayah geografis:

a. Aset

	2018	2017
Sumatera Utara	13.369.298.541.811	7.925.773.601.225
Riau dan Kepulauan Riau	647.158.382.552	562.550.435.189
Aceh	4.395.933.748	18.819.279.334
Jumlah	14.020.852.858.111	8.507.143.315.748

b. Liabilitas

	2018	2017
Sumatera Utara	7.229.218.782.351	3.282.219.620.050
Riau dan Kepulauan Riau	300.221.635.457	308.964.690.130
Aceh	11.835.050.919	11.735.244.285
Jumlah	7.541.275.468.727	3.602.919.554.465

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- o. The Belawan International Container Terminal Port Branch signed a cooperation agreement No. UM.57 / 10/19 / BICT-18.TU, dated October 2, 2018 with PT Lemo Tatagraha Mas for Cooperation in Reach Stacker Rental for Lift On / Lift Off Activities at BICT. This collaboration is valid from 09 October 2018 - 8 October 2019.
- p. The Belawan Domestic Container Terminal signed a cooperation agreement No. UM.57 / 4/10 / TPKDB-16.TU, dated May 10, 2016 with PT Emitraco Investama Mandiri for Collaboration by Leasing 1 (one) Mobile Harbor Crane (HMC) Unit in the Belawan Domestic Container Terminal. This collaboration is valid from 10 May 2016 - 09 May 2019.
- q. The Belawan Domestic Container Terminal signed a cooperation agreement No. UM.57 / 16/13 / TPKDB-17.TU, dated December 22, 2017 with PT Lemo Tatagraha Mas for Operational Cooperation of Reach Stacker at Belawan Domestic Container Terminal by Rent. This collaboration is valid from 12 November 2015 - 12 November 2019.
- r. Kuala Tanjung Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII-13 / KTG-US.13 dated January 17, 2013 with PT Inalum for cooperation in ship port services. This collaboration is valid from 1 January 2013 to 31 December 2018.
- s. Kuala Tanjung Port Branch signed a cooperation agreement No. B.VIII-12 / KTG-US.13 dated January 17, 2013 with PT Multimas Nabati Asahan for cooperation in sharing water sharing and Pier PBM for their own purposes. This collaboration is valid from 1 January 2013 to 31 December 2018.
- t. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. UM.57 / 7/6 / DUM-18 dated July 25, 2018 with PT Multi Jaya Samudera about Collaboration on the management and operation of tugboat time TB charters. Speed Turbo at Dumai Port. This collaboration is valid from 01 July 2018 - 30 June 2019.
- u. Dumai Port Branch signed an agreement on cooperation No. UM.57 / 5/3 / DUM-18 dated May 2, 2018 with PT Multi Jaya Samudera for Collaboration on the management and operation of tugboat time TB charters. Beautiful Meiden in Dumai Harbor. This collaboration is valid from 01 May 2018 - 30 April 2019.
- v. Dumai Port Branch signed an agreement on cooperation No. UM.57 / 4/6 / DUM-18.TU dated 02 April 2018 with PT Multi Jaya Samudera for Collaboration on the management and operation of tugboat time TB charters. Martha Indah in Dumai Harbor. This collaboration is valid from 06 March 2018 - 05 March 2019.
- w. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. UM.58 / 41/18 / P.I-04 and No 001 / AGR / PI-MI / 04 dated November 26, 2004 with PT Metito Indonesia for cooperation in water service operations. This collaboration is valid from 1 April 2005 to 31 March 2019.
- x. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No.B-XV.28 / Dum-US.15 dated February 20, 2016 with PT. Sari Dumai Sejati for Port Services Service Operations at the Special Terminal (Tersus) in Lubuk Gaung Dumai. This collaboration is valid from 20 February 2017 - 19 February 2022.
- y. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No.B-XV.101 / Dum-US.15 dated 15 September 2015 with PT. Intibenua Perkasatama for Port Services Service Operations collaboration at the

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

c. Pendapatan Usaha

	2018	2017
Sumatera Utara	2.266.276.759.405	1.910.470.108.731
Riau dan Kepulauan Riau	816.394.603.005	807.774.032.904
Aceh	30.861.217.247	32.862.366.535
Jumlah	<u>3.113.532.579.657</u>	<u>2.751.106.508.170</u>

d. Laba Usaha

	2018	2017
Sumatera Utara	886.303.572.601	719.219.372.627
Riau dan Kepulauan Riau	313.382.515.588	348.180.153.981
Aceh	(3.704.133.392)	1.740.508
Jumlah	<u>1.195.981.954.797</u>	<u>1.067.401.267.116</u>

42. LABA KOMPREHENSIF PER SAHAM

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tujuan perhitungan laba komprehensif per saham adalah sebesar Rp873.930.810.004 tahun 2018 dan sebesar Rp792.894.911.489 tahun 2017. Laba per saham dasar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sejumlah Rp518.162 dan Rp465.512 per lembar saham.

43. PERIKATAN

- a. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No UM.58/41/18/P.I-04, tanggal 26 Nopember 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2021.
- b. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No B.IX-527BLW-US.15, tanggal 28 April 2018 dengan PT Tirta Nusa Persada untuk Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Curah Kering di Terminal Curah Kering Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 28 April 2018 sampai dengan 27 April 2020.
- c. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No B.IX-203/BLW-US.15, tanggal 20 April 2018 dengan PT Tirta Nusa Persada untuk Kerjasama Pengoperasian Jembatan Timbang di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2020.
- d. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII - 47/BLW-US.15 tanggal 23 Januari 2019 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama Operasi Kapal Tunda Time Charter. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 23 Desember 2018 - 31 Desember 2019.
- e. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-624/BLW-US.15 tanggal 13 November 2018 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 01 untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas dan Curah Kering di Dermaga Ujung Baru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Agustus 2018 - 31 Desember 2018.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- Special Terminal (Tersus) in Lubuk Gaung Dumai. This collaboration is valid from 1 September 2015 - 31 August 2020.
- z. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No.B.XV-4 / DUM-US.15 dated March 22, 2018 with PT Pelabuhan Dumai Berseri for a joint operation agreement on goods traffic and passenger terminals. This collaboration is valid from January 1, 2016 - 31 December 2018.
- aa. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. B.XV-42 / Dum-US.15 dated August 9, 2017 with PT Prima Osrat Indonesia for Collaboration in the Supply and Operation of Oil Boom and Supporting Tools for Prevention and Prevention of Marine Pollution in Dumai Port. This collaboration is valid from 10 August 2017 - 10 November 2019.
- ab. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. US.12 / I / I / DUM-18 dated January 15, 2018 with PT Dumai Industrial Zone for cooperation in Scouting and Postponement in the Special Terminal (Tersus) of the Dumai Industrial Estate. This collaboration is valid from 15 January 2018 - 14 January 2021.
- ac. Batam Port Branch signed a cooperation agreement No. US. 12/1/4 / BTM-18.TU dated May 14, 2018 with PT Maxsteer Dyrnusa Perdana for Collaboration in the Management and Operation of Anchorage Ship to Ship Transit in Nipah Waters. This collaboration is valid from 11 November 2016 to 10 November 2021.
- ad. Tanjungbalai Karimun Port Branch signed a cooperation agreement No. US.15 / 1/7 / TBK-18 dated February 28, 2018 with PT Karya Karimun Mandiri for Cooperation in Domestic and Overseas Passenger Terminal Services at Tanjungbalai Karimun Port. This collaboration is valid from 01 January 2018 - 31 December 2018.
- ae. Tanjungbalai Karimun Port Branch signed a cooperation agreement No. US.15 / 1/1 / TBK-19 dated January 2, 2019 with PT Pelayaran Multi Jaya Samudera for Cooperation in the Provision of 1 (one) Tugboat Unit with a Time Charter System in the Karimun Port Branch. This collaboration is valid from 02 January 2019 - 31 October 2019.
- af. Tanjungbalai Karimun Port Branch signed a cooperation agreement No. US.15 / 3/14 / TBK-18 dated 08 December 2018 with PT Oiltanking Indonesia for Guiding Service and Terminal Time Charter in Terminal for Own Interest of PT Oiltanking Karimun Tanjungbalai Karimun. This collaboration is valid from December 8, 2018 - October 07 2019.
- ag. Tanjungbalai Karimun Port Branch signed a cooperation agreement No. US.15 / 1/13 / TBK-18 dated April 3, 2018 with PT SMPL Indonesia for Cooperation in the Development of Marine Business Services at the Waters of STS Karimun, Riau Islands. This collaboration is valid from April 3, 2018 - April 2, 2020.
- ah. The Tanjungpinang Port Branch signed a cooperation agreement No. US.14 / 1/4 / TPI-17.TU dated 06 March 2017 with PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) for the Management of Pass Foreign Passenger Terminals at the Port of Sri Bintan Puser Tanjungpinang. This collaboration is valid from 1 June 2017 - May 31, 2019.
- ai. The Tanjungpinang Port Branch signed a cooperation agreement No. US.14 / 1/3 / TPI-17.TU dated 06 March 2017 with PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) for the Management of Passenger

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

- f. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-625/BLW-US.15 tanggal 13 November 2018 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 02 untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas dan Curah Kering di Dermaga Ujung Baru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Agustus 2018 - 31 Desember 2018.
- g. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII/463/BLW-US.15 tanggal 07 September 2018 dengan PT Duet Pratama Samudra untuk Pengoperasian Terminal Curah Kering di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 07 September 2018 - 06 September 2020.
- h. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.B.16/1/3/BLW-18.TU tanggal 18 Mei 2018 dengan PT Meroke Tetap Jaya untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Alat Bantu Bongkar Muat Barang di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 23 April 2018 - 22 April 2020.
- i. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.B.XV-622/BLW-US.15 tanggal 22 November 2018 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 03 untuk Kerjasama Operasi Jasa Bongkar Muat di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Agustus 2018 - 31 Juli 2019.
- j. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.IX-602/BLW-US.15 tanggal 08 November 2017 dengan PT Prima Osrat Indonesia untuk Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Oil Boom dan Alat Penunjang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 November 2017 – 30 Januari 2019.
- k. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-413/BLW,US-15 tanggal 13 Agustus 2018 dengan PT Tanto Intim Line untuk Kersepakatan Pelayanan (Service Agreement) Bongkar Muat Peti Kemas di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 24 April 2018 - 31 Desember 2018.
- l. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-373/BLW-US.13, tanggal 18 Juli 2012 dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa untuk Maintenance Instalasi Rak dan Pipa Serta Fasilitas Pendukung Terminal Minyak Kelapa Sawit di Dermaga 105 - 106 Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2023.
- m. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-521/BLW-US.15, tanggal 30 Agustus 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Sewa Menyewa Alat Bongkar Muat 2 (dua) Unit Harbour Mobile Crane di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2017 - 29 Agustus 2022.
- n. Belawan Internasional Container Terminal menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.45/1/6/BICT-18.TU, tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Graha Segara untuk Kerjasama Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) pada Lokasi TPFT PT Graha Segara. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 26 April 2018 - 25 April 2023.
- o. Belawan Internasional Container Terminal menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/10/19/BICT-18.TU, tanggal 02 Oktober 2018 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

Terminal Passes at the Port of Sri Bintan Puser Tanjungpinang. This collaboration is valid from 1 June 2017 - 31 May 2019.

- aj. The Gunungsitoli Port Branch signed a cooperation agreement No. B.HK.46 / 1/10 / GST-17.TU dated February 1, 2017 with PT ISS PARKING MANAGEMENT for the Joint Port Management Service Through the Operation of the Auto gate System for Port Facilities at Gunung Sitoli Port. This collaboration is valid from 1 February 2017 - 31 January 2019.
- ak. Tanjungbalai Asahan Port Branch signed a cooperation agreement No. KU.65 / 1/10 / TBA-17.TU dated December 13, 2018 with the Public Company of Aneka Usaha Kualo to Collaborate on the Management of Passenger Terminal Passes in Nibung Bay Port, Tanjung Asahan Hall. This collaboration is valid from 01 January 2018 - 31 December 2019.

44. LEGAL EVENTS

- a. Civil Case No.728 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn with Tjahaya as Plaintiff versus PT Pelabuhan Indonesia I as Guardian I regarding Lawsuit for Unlawful Action for losing reefferent of container parts in the area of PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) which caused losses to CV. Prosperous Sumatra. The Decision at the First Level is to Punish the Defendant to provide compensation in the amount of Rp2.002.000.000 and at present the case is referred to in the appeal process at PT Medan.
- b. Case No. Perdata 672 / Pdt.G / 2018 / PN. Mdn dated October 8, 2018 with Tamrin as Plaintiff against Agung Rachman Hidayat as Defendant I and Yarham Harid as Defendant II related to the cancellation of agreement letter No. B.VII-518 / BLW-US.25 dated September 26 2018 to collaborate on land use on the Indrapura Ujung road (next to the KPLP pier) with the land area to be used is 895,59 m². This case is still under investigation at the Medan District Court.
- c. Case No. Perdata 40 / Pdt.G / 2018 / PN.Kis between Asminah Sitorus as Plaintiff versus PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant II regarding the ownership of 10.000 m² of land in Alai Hamlet II Kuala Tanjung Village, Representative of Sei Suka Sub-District, formerly Asahan Regency, now Batubara Regency, North Sumatra Province. This case is still under investigation at the Kisaran District Court.
- d. Case No. Perdata 49 / Pdt.G / 2018 / PN.Kis between Nurasiah Dkk, as Plaintiff versus PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant IV related to Ownership of ± 447 m² of land in Alai Hamlet III Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, formerly Asahan Regency now Batubara Regency, North Sumatra Province. This case is still under investigation at the Kisaran District Court.
- e. Case No. Perdata 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Dum dated February 7, 2018 between PT Dahlia Bina Utama versus General Manager of Dumai Branch PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia I Head Office as Defendants III and IV related to Lawsuit Against Telegram Issuance of the Ministry of Transportation cq Dirjenhubla No. 65 / VI / DM / 17 dated June 16, 2017 and Circular No. UM.50 / 16/20 / DUM.17.TU dated September 8, 2017, with the ruling Declaring the Plaintiff's claim unacceptable. At present the case is in the appeal stage.
- f. Case No. Perdata 60 / Pdt.G / 2018 / PN.Tpg between Rasyid Oyong as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang Branch regarding ownership of an area of 5.500 m² in Sungai Walang Area, Kijang Sub-District, East Bintan Sub-District. This case is still under investigation at the Tanjungpinang District Court.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kerjasama Persewaan Reach Stacker untuk Kegiatan Lift On / Lift Off Di BICT. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 09 Oktober 2018 - 08 Oktober 2019.

- p. Terminal Peti Kemas Domestik Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/4/10/TPKDB-16.TU, tanggal 10 Mei 2016 dengan PT Emitraco Investama Mandiri untuk Kerjasama Dengan Cara Sewa 1 (satu) Unit Mobile Harbour Crane (HMC) di Terminal Petikemas Domestik Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 10 Mei 2016 - 09 Mei 2019.
- q. Terminal Peti Kemas Domestik Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/16/13/TPKDB-17.TU, tanggal 22 Desember 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Operasional Reach Stacker di terminal Peti Kemas Domestik Belawan Dengan Cara Sewa. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 12 November 2015 - 12 November 2019.
- r. Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-13/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Inalum untuk kerjasama jasa kepelabuhanan kapal. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.
- s. Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-12/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Multimas Nabati Asahan untuk kerjasama pembagian sharing air dan PBM Dermaga untuk keperluan sendiri. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.
- t. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/7/6/DUM-18 tanggal 25 Juli 2018 dengan PT Multi Jaya Samudera tentang Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda time charter TB. Speed Turbo di Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Juli 2018 - 30 Juni 2019.
- u. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/5/3/DUM-18 tanggal 02 Mei 2018 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda *time charter* TB. Meiden Cantik di Cabang Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Mei 2018 - 30 April 2019.
- v. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/4/6/DUM-18.TU tanggal 02 April 2018 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda time charter TB. Martha Indah di Cabang Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 06 Maret 2018 - 05 Maret 2019.
- w. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/41/18/P.I-04 dan No 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 Nopember 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk kerjasama operasi pelayanan air. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan 31 Maret 2019.
- x. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B-XV.28/Dum-US.15 tanggal 20 Februari 2016 dengan PT. Sari Dumai Sejati untuk Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 - 19 Februari 2022.
- y. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B-XV.101/Dum-US.15 tanggal 15 September 2015 dengan PT. Intibenua Perkasatama untuk kerjasama Operasi

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

- g. Case No. Perdata 61 / Pdt.G / 2018 / PN.Tpg between Muntoadi Hidayat as Plaintiff versus PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang Branch regarding ownership of an area of 5.500 m² in Sungai Walang Area, Kijang Village, East Bintan District. This case is still under investigation at the Tanjungpinang District Court.
- h. Case No. Perdata 62 / Pdt.G / 2018 / PN.Tpg between Musohir as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang Branch Ownership of 3,600 m² of land in Sungai Walang Area, Kijang Sub-District, Bintan Timur District, Bintan Regency. This case is still under investigation at the Tanjungpinang District Court.

Management believes that legal events have no material impact on the Company's financial statements.

45. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (RISK MANAGEMENT)

Various activities carried out made the Company face a variety of financial risks, including the impact of changes in foreign exchange rates. The Company's risk management program is aimed at dealing with uncertainties faced in financial markets and to minimize unexpected impacts on the Company's financial performance. Some of the risks faced by the Company are as follows:

Risk of Foreign Exchange Rates

Foreign exchange rate risk is the risk of changes in the fair value of future cash flows from a financial instrument that fluctuates as a result of changes in foreign exchange rates used by the Company. The Company's exposure to exchange rate fluctuations mainly comes from cash and cash equivalents, and bank loans in foreign currencies.

At the time of preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2018 there were assets denominated in United States Dollars amounting to USD18.251,065 with a book rate of Rp14.500/US Dollar, while liabilities amounting to USD228.941, when compared to assets and liabilities at the report issuance date Audited finance in 2018 (February 11, 2018 BI rate Rp14.500/US Dollar) there is a reduction in foreign exchange loss of Rp1.488.538.120.

Interest Rate Risk

Interest rate risk on cash flow is a risk where future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. Current exposure mainly comes from bank debt in foreign currencies with floating interest rates. Loans with floating interest rates pose a cash flow risk.

The Company's management does not have a formal policy for hedging interest rate risk. The policy taken by Management in anticipating interest rate risk is to periodically evaluate the ratio of fixed interest rates to floating interest rates in line with changes in relevant interest rates on the market. Management also conducted a survey in the banking sector to get an estimate of the relevant interest rates.

The company has a policy in obtaining financing that will provide a suitable mix of floating interest rates and fixed interest rates. In addition, the bank's interest rate in the agreement is determined based on the JIBOR figure plus the margin for the rupiah and SIBOR plus the margin for foreign exchange.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company incurs losses arising from customers or opposing parties as a result of failing to fulfill its contractual liabilities. Management believes that there is no significant credit risk concentrated.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 September 2015 – 31 Agustus 2020.

- z. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B.XV-4/DUM-US.15 tanggal 22 Maret 2018 dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri untuk Perjanjian kerjasama operasi kelancaran lalu lintas barang dan terminal penumpang.. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018.
- aa. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani Perjanjian kerjasama No. B.XV-42/Dum-US.15 tanggal 09 Agustus 2017 dengan PT Prima Osrat Indonesia untuk Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Oil Boom dan Alat Penunjang Penanggulangan dan Pencegahan Pencemaran Laut di Cabang Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 10 Agustus 2017 - 10 November 2019.
- ab. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/II/DUM-18 tanggal 15 Januari 2018 dengan PT Kawasan Industri Dumai untuk kerjasama Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus (Tersus) PT Kawasan Industri Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 15 Januari 2018 - 14 Januari 2021.
- ac. Cabang Pelabuhan Batam menandatangani perjanjian kerjasama No. US. 12/1/4/BTM-18.TU tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Maxsteer Dyrnusa Perdana untuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Ship to Ship Transit Anchorage di Perairan Nipah. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 s/d 10 November 2021.
- ad. Cabang Pelabuhan Tanjungbalai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/7/TBK-18 tanggal 28 Februari 2018 dengan PT Karya Karimun Mandiri untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018.
- ae. Cabang Pelabuhan Tanjungbalai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/1/TBK-19 tanggal 02 Januari 2019 dengan PT Pelayaran Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama Penyediaan 1 (satu) Unit Kapal Tunda Dengan Sistem Time Charter Di Cabang Pelabuhan Karimun. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 02 Januari 2019 - 31 Oktober 2019.
- af. Cabang Pelabuhan Tanjungbalai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/3/14/TBK-18 tanggal 08 Desember 2018 dengan PT Oiltanking Indonesia untuk Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Time Charter Kapal Tunda Di terminal untuk Kepentingan Sendiri PT Oiltanking Karimun Tanjungbalai Karimun. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 08 Desember 2018 - 07 Oktober 2019.
- ag. Cabang Pelabuhan Tanjungbalai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/13/TBK-18 tanggal 03 April 2018 dengan PT SMPL Indonesia untuk Kerjasama Pengembangan Pelayanan Marine Bisnis Di Perairan STS Karimun Kepulauan Riau. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 03 April 2018 - 02 April 2020.
- ah. Cabang Pelabuhan Tanjungpinang menandatangani perjanjian kerjasama No. US.14/1/4/TPI-17.TU tanggal 06 maret 2017 dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) untuk Pengelolaan Pas Terminal Penumpang Luar Negeri Di Pelabuhan Sri Bintang Pular Tanjungpinang. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Juni 2017 - 31 Mei 2019.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Notes to The Consolidated Financial Statements

31 December 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

The company has credit risk mainly from bank deposits, trade accounts receivable, accrued income, other receivables, and other current assets.

Management controls credit risk by conducting business with other parties that have credibility, and implementing a cash management system at port operations and monitoring the position of customers' receivables regularly. The company minimizes the credit risk of financial assets such as deposits in banks by choosing a quality bank for placement of funds.

Risiko Likuiditas

Liquidity risk is a risk that can occur where short-term income cannot cover short-term expenses.

Given that the Company's current funding needs are significant due to the increase in business development or expansion activities, in managing liquidity risk, the Company continuously monitors and maintains the level of cash and cash equivalents to be sufficient to finance the Company's operational needs.

In addition, the Company also routinely evaluates cash flow projections to address the effects of cash flow fluctuations, including long-term liability maturity schedules, and continues to review financial market conditions for fundraising and placement initiatives including bank loans, debt and equity equity issuance capital market.

The company has liquid assets that are liquid and available to meet their liquidity needs.

Capital Management

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders, and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

The company actively and routinely reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and return for shareholders, taking into account the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, considering future capital requirements.

The company monitors capital based on the ratio of bank loans to capital. This ratio is calculated by dividing the total bank loans by total capital. Capital consists of all equity components that are present as amounts in the consolidated statement of financial position.

Fair Value of Financial Instruments

Fair value is an amount where an asset can be exchanged or a liability is settled between parties who understand and wish to make a fair transaction.

Management believes that the carrying amounts of financial assets and liabilities which are carried at amortized cost in the consolidated financial statements approach their fair values, either due in the short term or carried on the basis of market interest rates.

The fair value of financial instruments is determined through a discounted cash flow analysis using a discount rate equal to the rate of return applicable to financial instruments that have the same terms and maturity period.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- ai. Cabang Pelabuhan Tanjungpinang menandatangani perjanjian kerjasama No. US.14/1/3/TPI-17.TU tanggal 06 maret 2017 dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) untuk Pengelolaan Pas Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintang Puser Tanjung Pinang. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Juni 2017 - 31 Mei 2019.
- aj. Cabang Pelabuhan Gunungsitoli menandatangani perjanjian kerjasama No. B.HK.46/1/10/GST-17.TU tanggal 1 Februari 2017 dengan PT ISS PARKING MANAGEMENT untuk Kkerjasama Jasa Pengelolaan Pas Pelabuhan Melalui Pengoperasian Autogate System untuk Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Gunung Sitoli. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Februari 2017 - 31 Januari 2019.
- ak. Cabang Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menandatangani perjanjian kerjasama No. KU.65/1/10/TBA-17.TU tanggal 13 Desember 2018 dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo untuk Kerjasama Pengelolaan Pas Terminal Penumpang Di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai Asahan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2018 - 31 Desember 2019.

44. PERISTIWA HUKUM

- a. Perkara Perdata No.728/Pdt.G/2016/PN.Mdn dengan Tjahaya sebagai Penggugat lawan PT Pelindo I selaku Tergugat I terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan *reeffer part* petikemas pada area PT. Pelindo I (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap CV. Sumatera Sejahtera. Adapun Putusan pada tingkat Pertama adalah Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 2.002.000.000,- dan saat ini perkara dimaksud dalam proses banding di PT Medan.
- b. Perkara Perdata No. 672/Pdt.G/2018/PN. Mdn tanggal 08 Oktober 2018 dengan Tamrin selaku Penggugat lawan Agung Rachman Hidayat selaku Tergugat I dan Yarham Harid selaku Tergugat II terkait Pembatalan surat perjanjian No. B.VII-518/BLW-US.25 tanggal 26 September 2018 untuk melakukan kerjasama penggunaan lahan di jalan Indrapura Ujung (samping dermaga KPLP) dengan luas lahan yang akan digunakan adalah 895.59 m². Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan.
- c. Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Asminah Sitorus selaku Penggugat lawan PT. Pelindo I (Persero) selaku Tergugat II terkait Kepemilikan atas tanah seluas 10.000 m² di Dusun II Alai Desa Kuala Tanjung, Perwakilan Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran.
- d. Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Nurasiah Dkk, selaku Penggugat lawan PT. Pelindo I (Persero) selaku Tergugat IV terkait Kepemilikan atas tanah seluas ±447 m² di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran.
- e. Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2018/PN.Dum tanggal 07 Februari 2018 antara PT Dahlia Bina Utama lawan General Manager Cabang Dumai PT. Pelindo I (Persero) dan Kantor Pusat PT Pelindo I selaku Tergugat III dan IV terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penerbitan Telegram Kementerian Perhubungan cq Dirjenhubla No. 65/VI/DM/17 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Edaran No UM.50/16/20/DUM.17.TU tanggal 08 September 2017, dengan amar putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Saat ini perkara dalam tahap banding.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2018	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Current Financial Assets		
Cash and cash equivalent	1.999.187.810.035	1.999.187.810.035
Account receivable	102.244.069.626	102.244.069.626
Other current financial assets	198.465.718.974	198.465.718.974
Total current financial assets	<u>2.299.897.598.635</u>	<u>2.299.897.598.635</u>
Non Current Financial Assets		
Other non current financial assets	20.049.725.276	20.049.725.276
Total non current financial assets	<u>20.049.725.276</u>	<u>20.049.725.276</u>
Total Financial Assets	<u>2.319.947.323.911</u>	<u>2.319.947.323.911</u>
Short-term financial liabilities		
Accounts payable	1.775.158.580.008	1.775.158.580.008
Short-term bank debt	17.992.184.312	17.992.184.312
Tax debt	77.508.016.452	77.508.016.452
Accrued cost	503.599.174.701	503.599.174.701
Total short-term financial liabilities	<u>2.374.257.955.473</u>	<u>2.374.257.955.473</u>
Long-term financial liabilities		
Long-term bank debt	3.364.720.079.181	3.364.720.079.181
Bond debt	947.431.699.211	947.431.699.211
Amount of Long-Term Financial Liabilities	<u>4.312.151.778.392</u>	<u>4.312.151.778.392</u>
Amount of Financial Liabilities	<u>6.686.409.733.865</u>	<u>6.686.409.733.865</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- f. Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2018/PN.Tpg antara Rasyid Oyong selaku Penggugat lawan PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang terkait kepemilikan atas tanah seluas 5.500 m² di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur. Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- g. Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2018/PN.Tpg antara Muntoadi Hidayat selaku Penggugat lawan PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang terkait kepemilikan atas tanah seluas 5.500 m² di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur. Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- h. Perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2018/PN.Tpg antara Musohir selaku Penggugat lawan PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang Kepemilikan atas tanah seluas 3.600 m² di Kawasan Sungai Walang, Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Manajemen berkeyakinan bahwa peristiwa hukum tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

45. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (MANAJEMEN RISIKO)

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan menghadapi berbagai macam risiko keuangan, termasuk dampak perubahan nilai tukar mata uang asing. Program manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar keuangan dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan. Beberapa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa mendatang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, dan utang bank dalam mata uang asing.

Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2018 terdapat aset dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar USD18.251.065 dengan kurs buku Rp14.500/Dolar AS, sedangkan liabilitas sebesar USD228.941, apabila dibandingkan antara aset dan liabilitas pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan audited tahun 2018 (11 Februari 2018 kurs BI Rp14.500/Dolar AS) terdapat pengurangan rugi selisih kurs sebesar Rp1.488.538.120.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank dalam mata uang asing dengan suku bunga mengambang. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Manajemen Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh Manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga adalah dengan melakukan evaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**Notes to The Consolidated Financial Statements****31 December 2018 and 2017**

(Expressed in Rupiah, or stated otherwise)

	2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Current Financial Assets		
Cash and cash equivalent	1.872.411.160.625	1.872.411.160.625
Account receivable	200.578.860.395	200.578.860.395
Other current financial assets	97.416.051.632	97.416.051.632
Total current financial assets	<u>2.170.406.072.652</u>	<u>2.170.406.072.652</u>
Non Current Financial Assets		
Other non current financial assets	15.764.186.140	15.764.186.140
Total non current financial assets	<u>15.764.186.140</u>	<u>15.764.186.140</u>
Total Financial Assets	<u>2.186.170.258.792</u>	<u>2.186.170.258.792</u>
Short-term financial liabilities		
Accounts payable	1.432.472.580.129	1.432.472.580.129
Short-term bank debt	10.571.780.774	10.571.780.774
Tax debt	48.077.542.635	48.077.542.635
Accrued cost	166.380.229.903	166.380.229.903
Total short-term financial liabilities	<u>1.657.502.133.441</u>	<u>1.657.502.133.441</u>
Long-term financial liabilities		
Long-term bank debt	379.883.016.545	379.883.016.545
Bond debt	996.601.217.455	996.601.217.455
Amount of Long-Term Financial Liabilities	<u>1.376.484.234.000</u>	<u>1.376.484.234.000</u>
Amount of Financial Liabilities	<u>3.033.986.367.441</u>	<u>3.033.986.367.441</u>

46. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Some accounts in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements that ended December 31, 2018, these accounts are:

		2017	
		Before	After
Related parties receivable	Statement of Financial Position	40.217.792.573,00	47.109.781.222,00
Third parties receivable	Statement of Financial Position	160.361.067.822,00	153.469.079.173,00
Fixed assets	Statement of Financial Position	4.637.926.530.908,00	3.354.047.326.040,00
Assets under construction	Statement of Financial Position	-	1.283.879.204.868,00
Financial expenses	Statement of Cash Flows - Funding Activities	100.799.481.838,00	-
Financial expenses	Statement of Cash Flows - Operating Activities	-	100.799.481.838,00

47. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Until the presentation date of the consolidated financial statements there are no events after the significant reporting date.

48. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that have been completed and authorized to be issued on February 11, 2019.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai atas tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Di samping itu, suku bunga bank di dalam perjanjian ditetapkan berdasarkan angka JIBOR plus margin untuk rupiah dan SIBOR plus margin untuk valuta asing.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain, dan aset lancar lainnya.

Manajemen mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, dan menerapkan *cash management system* pada operasional pelabuhan serta melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur. Perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti simpanan di bank dengan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat kebutuhan dana Perusahaan saat ini cukup signifikan akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga secara rutin melakukan evaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas utang dan ekuitas pasar modal.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Pengelolaan Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perusahaan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

	2018	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	1.999.187.810.035	1.999.187.810.035
Piutang usaha	102.244.069.626	102.244.069.626
Aset keuangan lancar lainnya	198.465.718.974	198.465.718.974
Jumlah Aset Keuangan Lancar	<u>2.299.897.598.635</u>	<u>2.299.897.598.635</u>
Aset Keuangan Tidak Lancar		
Aset keuangan tidak lancar lainnya	20.049.725.276	20.049.725.276
Jumlah Aset Keuangan Tidak Lancar	<u>20.049.725.276</u>	<u>20.049.725.276</u>
Jumlah Aset Keuangan	<u>2.319.947.323.911</u>	<u>2.319.947.323.911</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang usaha	1.775.158.580.008	1.775.158.580.008
Utang bank jangka pendek	-	-
Utang pajak	77.508.016.452	77.508.016.452
Beban Akrua	503.599.174.701	503.599.174.701
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	<u>2.356.265.771.161</u>	<u>2.356.265.771.161</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang bank jangka panjang	3.364.720.079.181	3.364.720.079.181
Utang obligasi	947.431.699.211	947.431.699.211
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	<u>4.312.151.778.392</u>	<u>4.312.151.778.392</u>
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>6.668.417.549.553</u>	<u>6.668.417.549.553</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	1.872.411.160.625	1.872.411.160.625
Piutang usaha	200.578.860.395	200.578.860.395
Aset keuangan lancar lainnya	97.416.051.632	97.416.051.632
Jumlah Aset Keuangan Lancar	<u>2.170.406.072.652</u>	<u>2.170.406.072.652</u>
Aset Keuangan Tidak Lancar		
Aset keuangan tidak lancar lainnya	15.764.186.140	15.764.186.140
Jumlah Aset Keuangan Tidak Lancar	<u>15.764.186.140</u>	<u>15.764.186.140</u>
Jumlah Aset Keuangan	<u>2.186.170.258.792</u>	<u>2.186.170.258.792</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang usaha	1.432.472.580.129	1.432.472.580.129
Utang bank jangka pendek	10.571.780.774	10.571.780.774
Utang pajak	48.077.542.635	48.077.542.635
Beban Akrua	166.380.229.903	166.380.229.903
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	<u>1.657.502.133.441</u>	<u>1.657.502.133.441</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang bank jangka panjang	379.883.016.545	379.883.016.545
Utang obligasi	996.601.217.455	996.601.217.455
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	<u>1.376.484.234.000</u>	<u>1.376.484.234.000</u>

46. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2018, akun-akun tersebut adalah:

		2017	
		Sebelum	Sesudah
Piutang pihak berelasi	Laporan Posisi Keuangan	40.217.792.573	47.109.781.222
Piutang pihak ketiga	Laporan Posisi Keuangan	160.361.067.822	153.469.079.173
Aset tetap	Laporan Posisi Keuangan	4.637.926.530.908	3.354.047.326.040
Aset dalam konstruksi	Laporan Posisi Keuangan	-	1.283.879.204.868
Beban keuangan	Laporan Arus Kas - Aktivitas Pendanaan	100.799.481.838	-
Beban keuangan	Laporan Arus Kas - Aktivitas Operasi	-	100.799.481.838

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan konsolidasian tidak terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang signifikan.

48. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2019.



PELINDO 1
INDONESIA GATEWAY

pelindo1.co.id